LAPORAN

KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, Mei 2023

Nomor : 900/0009155
Lampiran : -
Perihal : Surat Representasi Manajemen

Kepada

Yth. Kepala Perwakilan BPK RI
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
di-
SEMARANG

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2022 dan 2021, Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan :

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.

8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal :
    a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
    b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas dan (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Semarang, 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

H. GANJAR PRANOWO, SH. M.IP

Jl. Pahlawan Nomor 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Faximile 8311266 Semarang Kode Pos 50234

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 57B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 12 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ★ KEPALA PERWAKILAN ★ PROVINSI JAWA TENGAH

Hari Wiwoho S.E., M.M., Ak., CA., CSFA

Register Negara Akuntan Nomor 9796

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%	REALISASI Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN DAERAH**					
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.1.1**	**16.141.754.406.000,00**	**16.264.618.853.852,00**	**100,76**	**14.695.474.898.162,00**
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	13.754.458.219.000,00	13.484.851.151.740,00	98,04	11.718.378.320.505,00
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	109.285.847.000,00	115.158.014.199,00	105,37	91.634.269.205,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	546.716.226.000,00	546.717.104.899,00	100,00	508.263.876.971,00
6	Lain-lain Pad Yang Sah	5.1.1.1.4	1.731.294.114.000,00	2.117.892.583.014,00	122,33	2.377.198.431.481,00
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)**		**16.141.754.406.000,00**	**16.264.618.853.852,00**	**100,76**	**14.695.474.898.162,00**
8	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.1.2**	**7.894.603.950.000,00**	**7.810.882.578.787,00**	**98,94**	**11.871.796.336.054,00**
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00
10	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	7.833.251.450.000,00	7.749.530.078.787,00	98,93	11.803.085.731.054,00
11	Dana Insentif Daerah (did)	5.1.1.2.1.2	61.352.500.000,00	61.352.500.000,00	100,00	68.710.605.000,00
12	**Jumlah Pendapatan Transfer**		**7.894.603.950.000,00**	**7.810.882.578.787,00**	**98,94**	**11.871.796.336.054,00**
13	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.1.3**	**92.655.000.000,00**	**92.434.201.488,00**	**99,76**	**65.728.851.747,00**
14	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	92.655.000.000,00	92.161.740.403,00	99,47	64.882.003.502,00
15	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	0,00	272.461.085,00	100.00	846.848.245,00
16	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**		**92.655.000.000,00**	**92.434.201.488,00**	**99,76**	**65.728.851.747,00**
17	**Jumlah Pendapatan Daerah**		**24.129.013.356.000,00**	**24.167.935.634.127,00**	**100,16**	**26.633.000.085.963,00**
18	**BELANJA DAERAH**					
19	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**14.233.669.493.000,00**	**13.456.887.671.949,00**	**94,54**	**16.826.577.831.470,00**
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	6.217.355.037.000,00	5.902.903.886.767,00	94,94	5.685.925.255.020,00
21	Belanja Barang Dan Jasa	5.1.2.1.2	5.750.890.367.000,00	5.377.369.153.895,00	93,50	5.345.399.454.776,00
22	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	6.405.087.000,00	4.958.884.836,00	77,42	90.482.166,00
23	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	2.170.297.452.000,00	2.092.761.564.803,00	96,43	5.728.982.384.318,00
24	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	88.721.550.000,00	78.894.181.648,00	88,92	66.180.255.190,00
25	**Jumlah Belanja Operasi**		**14.233.669.493.000,00**	**13.456.887.671.949,00**	**94,54**	**16.826.577.831.470,00**
26	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**2.015.151.410.000,00**	**1.713.641.630.081,00**	**85,04**	**1.447.620.411.245,00**
27	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	49.037.321.000,00	17.346.322.716,00	35,37	79.135.275.975,00
28	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.1.2.2.2	904.691.628.000,00	767.027.589.289,00	84,78	578.353.949.251,00
29	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.1.2.2.3	446.596.836.000,00	359.726.308.741,00	80,55	330.679.148.402,00
30	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.1.2.2.4	507.655.838.000,00	475.441.543.110,00	93,65	351.328.654.582,00
31	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	107.169.787.000,00	94.099.866.225,00	87,80	108.123.383.035,00
32						
33	**Jumlah Belanja Modal**		**2.015.151.410.000,00**	**1.713.641.630.081,00**	**85,04**	**1.447.620.411.245,00**
34	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**36.000.000.000,00**	**16.545.479.100,00**	**45,96**	**72.303.305.000,00**
35	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00
36	**Jumlah Belanja Tidak Terduga**		**36.000.000.000,00**	**16.545.479.100,00**	**45,96**	**72.303.305.000,00**
37	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**8.862.885.338.000,00**	**8.763.165.716.275,00**	**98,87**	**7.497.298.646.119,00**
38	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	6.123.468.838.000,00	6.085.808.822.482,00	99,38	5.735.553.033.353,00
39	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	2.739.416.500.000,00	2.677.356.893.793,00	97,73	1.761.745.612.766,00
40	**Jumlah Belanja Transfer**		**8.862.885.338.000,00**	**8.763.165.716.275,00**	**98,87**	**7.497.298.646.119,00**

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN Tahun 2022	REALISASI Tahun 2022	%	REALISASI Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
41	**Jumlah Belanja Daerah**		**25.147.706.241.000,00**	**23.950.240.497.405,00**	**95,24**	**25.843.800.193.834,00**
42	**SURPLUS/DEFISIT**		**(1.018.692.885.000,00)**	**217.695.136.722,00**	**(21,37)**	**789.199.892.129,00**
43	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.1.3**				
44	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.1**	**1.909.692.885.000,00**	**1.909.773.865.813,00**	**100,00**	**861.492.992.625,00**
45	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.3.1.1	1.435.692.885.000,00	1.435.692.146.361,00	100,00	861.376.784.856,00
46	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.3.1.2	474.000.000.000,00	474.081.719.452,00	100,02	116.207.769,00
47	**Jumlah Penerimaan Pembiayaan**		**1.909.692.885.000.00**	**1.909.773.865.813.00**	**100.00**	**861.492.992.625.00**
48	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.3.2**	**891.000.000.000,00**	**891.000.000.000,00**	**100,00**	**215.000.000.000,00**
49	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.3.2.1	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00	200.000.000.000,00
50	Penyertaan Modal Daerah	5.1.3.2.2	491.000.000.000,00	491.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00
51	**Jumlah Pengeluaran Pembiayaan**		**891.000.000.000.00**	**891.000.000.000.00**	**100.00**	**215.000.000.000.00**
52	**Jumlah Pembiayaan Netto**		**1.018.692.885.000,00**	**1.018.773.865.813,00**	**100,01**	**646.492.992.625,00**
53	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	**5.1.4**	**0,00**	**1.236.469.002.535,00**		**1.435.692.884.754,00**

** Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

,

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 2022 dan 2021

NO	URAIAN	REF	Tahun 2022	Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	**Saldo Anggaran Lebih Awal**	5.2.1	**1.435.692.884.754,00**	**861.343.812.527,00**
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	1.435.692.146.361,00	861.376.784.856,00
3	**Sub Total (1-2)**		**738.393,00**	**(32.972.329,00)**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	1.236.469.002.535,00	1.435.692.884.754,00
5	**Sub Total (3+4)**		**1.236.469.740.928,00**	**1.435.659.912.425,00**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	(738.393,00)	32.972.329,00
7	Lain-lain		0,00	0,00
8	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6+7)**	5.2.5	**1.236.469.002.535,00**	**1.435.692.884.754,00**

** Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

,

GUBERNUR JAWA TENGAH

Type text here

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NERACA KOMPARATIF

Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
ASET	**5.3.1**	**40.276.338.752.810,46**	**39.291.945.337.213,10**	**984.393.415.597,36**	**2,51**
ASET LANCAR	**5.3.1.1**	**3.561.496.934.500,47**	**3.791.840.781.045,50**	**(230.343.846.545,03)**	**(6,07)**
Kas Dan Setara Kas	**5.3.1.1.1**	**1.237.681.108.155,00**	**1.436.740.557.457,00**	**(199.059.449.302,00)**	**(13,85)**
Kas Di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	412.202.942.305,00	398.435.833.644,00	13.767.108.661,00	3,46
Kas Di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.2	177.410.000,00	314.414.803,00	(137.004.803,00)	(43,57)
Kas Di Blud	5.3.1.1.1.3	803.488.749.247,00	992.730.293.369,00	(189.241.544.122,00)	(19,06)
Kas Dana Bos	5.3.1.1.1.4	21.812.006.603,00	45.260.015.641,00	(23.448.009.038,00)	(51,81)
Piutang Pajak Daerah	**5.3.1.1.2**	**2.212.266.408.390,00**	**2.116.395.701.783,00**	**95.870.706.607,00**	**4,53**
Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (pkb)		2.212.218.992.400,00	2.116.302.921.544,00	95.916.070.856,00	4,53
Piutang Pajak Air Permukaan		47.415.990,00	92.780.239,00	(45.364.249,00)	(48,89)
Piutang Retribusi Daerah	**5.3.1.1.3**	**265.512.463,00**	**1.188.953.671,00**	**(923.441.208,00)**	**(77,67)**
Piutang Retribusi Jasa Umum	5.3.1.1.3.1	183.846.044,00	1.156.912.071,00	(973.066.027,00)	(84,11)
Piutang Retribusi Jasa Usaha	5.3.1.1.3.2	81.666.419,00	32.041.600,00	49.624.819,00	154,88
Piutang Lain-lain Pad Yang Sah	**5.3.1.1.4**	**58.532.786.077,48**	**344.393.176.499,09**	**(285.860.390.421,61)**	**(83,00)**
Piutang Hasil Pemanfaatan Bmd Yang Tidak Dipisahkan	5.3.1.1.4.1	370.051.669,00	758.763.959,00	(388.712.290,00)	(51,23)
Piutang Jasa Giro	5.3.1.1.4.2	25.099.003,18	0,00	25.099.003,18	100,00
Piutang Pendapatan Bunga	5.3.1.1.4.3	0,00	356.367.123,66	(356.367.123,66)	(100,00)
Piutang Pendapatan Blud	5.3.1.1.4.4	58.137.635.405,30	343.278.045.416,43	(285.140.410.011,13)	(83,06)
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	**5.3.1.1.5**	**14.764.276.977,00**	**0,00**	**14.764.276.977,00**	**100,00**
Piutang Dana Perimbangan	5.3.1.1.5.1	14.764.276.977,00	0,00	14.764.276.977,00	100,00
Piutang Lainnya	**5.3.1.1.6**	**15.599.471.995,00**	**15.717.526.838,00**	**(118.054.843,00)**	**(0,75)**
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.1.6.1	11.129.442.003,00	11.246.587.755,00	(117.145.752,00)	(1,04)
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	5.3.1.1.6.2	4.470.029.992,00	4.470.939.083,00	(909.091,00)	(0,02)
Penyisihan Piutang	**5.3.1.1.7**	**(380.010.526.610,72)**	**(642.081.528.398,58)**	**262.071.001.787,86**	**(40,82)**
Penyisihan Piutang Pendapatan	5.3.1.1.7.1	(364.411.054.615,72)	(626.364.001.560,58)	261.952.946.944,86	(41,82)
Penyisihan Piutang Lainnya	5.3.1.1.7.2	(15.599.471.995,00)	(15.717.526.838,00)	118.054.843,00	(0,75)
Beban Dibayar Dimuka	**5.3.1.1.8**	**5.301.065.353,13**	**5.756.838.225,90**	**(455.772.872,77)**	**(7,92)**
Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.8.1	5.072.568.759,69	5.756.838.225,90	(684.269.466,21)	(11,89)
Beban Dibayar Dimuka-sewa	5.3.1.1.8.2	228.496.593,44	0,00	228.496.593,44	100,00
Persediaan	**5.3.1.1.9**	**397.096.831.700,58**	**513.729.554.970,09**	**(116.632.723.269,51)**	**(22,70)**
Barang Pakai Habis	5.3.1.1.9.1	397.069.859.195,58	513.673.181.320,09	(116.603.322.124,51)	(22,70)
Barang Tak Habis Pakai	5.3.1.1.9.2	23.280.005,00	55.317.650,00	(32.037.645,00)	(57,92)
Barang Bekas Dipakai	5.3.1.1.9.3	3.692.500,00	1.056.000,00	2.636.500,00	249,67
Jumlah Aset Lancar		**3.561.496.934.500,47**	**3.791.840.781.045,50**	**(230.343.846.545,03)**	**(6,07)**
INVESTASI JANGKA PANJANG	**5.3.1.2**	**7.359.256.134.721,51**	**7.454.908.269.377,92**	**(95.652.134.656,41)**	**(1,28)**
Investasi Jangka Panjang Permanen	**5.3.1.2.1**	**7.359.256.134.721,51**	**7.454.908.269.377,92**	**(95.652.134.656,41)**	**(1,28)**
Penyertaan Modal	5.3.1.2.1.1	7.359.256.134.721,51	7.454.908.269.377,92	(95.652.134.656,41)	(1,28)
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**7.359.256.134.721,51**	**7.454.908.269.377,92**	**(95.652.134.656,41)**	**(1,28)**
ASET TETAP	**5.3.1.3**	**26.085.962.628.082,34**	**26.362.173.533.902,41**	**(276.210.905.820,07)**	**(1,05)**
Tanah	5.3.1.3.1	13.198.047.275.028,00	13.583.627.731.544,00	(385.580.456.516,00)	(2,84)
Peralatan Dan Mesin	5.3.1.3.2	8.329.364.755.485,00	7.529.773.129.665,00	799.591.625.820,00	10,62
Gedung Dan Bangunan	5.3.1.3.3	8.861.709.983.162,00	7.920.921.189.200,00	940.788.793.962,00	11,88
Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	5.3.1.3.4	11.173.745.673.192,00	10.585.831.733.218,00	587.913.939.974,00	5,55
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	976.375.566.548,00	1.472.453.852.706,00	(496.078.286.158,00)	(33,69)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	242.550.742.201,00	788.310.129.085,00	(545.759.386.884,00)	(69,23)
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(16.695.831.367.533,66)	(15.518.744.231.515,59)	(1.177.087.136.018,07)	7,58
Jumlah Aset Tetap		**26.085.962.628.082,34**	**26.362.173.533.902,41**	**(276.210.905.820,07)**	**(1,05)**
DANA CADANGAN	**5.3.1.4**	**600.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**400.000.000.000,00**	**200,00**
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	**600.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**400.000.000.000,00**	**200,00**

URAIAN	REF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (4-3)	6
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	600.000.000.000,00	200.000.000.000,00	400.000.000.000,00	200,00
Jumlah Dana Cadangan		**600.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**	**400.000.000.000,00**	**200,00**
ASET LAINNYA	**5.3.1.5**	**2.669.623.055.506,14**	**1.483.022.752.887,27**	**1.186.600.302.618,87**	**80,01**
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	**5.3.1.5.1**	**107.001.525.781,00**	**74.906.991.293,00**	**32.094.534.488,00**	**42,85**
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.1	107.001.525.781,00	74.906.991.293,00	32.094.534.488,00	42,85
Aset Tidak Berwujud	**5.3.1.5.2**	**36.540.063.930,00**	**28.936.052.970,00**	**7.604.010.960,00**	**26,28**
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.2	36.540.063.930,00	28.936.052.970,00	7.604.010.960,00	26,28
Aset Lain-lain	**5.3.1.5.3**	**2.898.167.680.722,00**	**1.756.554.545.840,00**	**1.141.613.134.882,00**	**64,99**
Aset Lain-lain	5.3.1.5.3	2.898.167.680.722,00	1.756.554.545.840,00	1.141.613.134.882,00	64,99
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	**5.3.1.5.4**	**(25.209.487.525,70)**	**(21.190.441.634,27)**	**(4.019.045.891,43)**	**18,97**
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(25.209.487.525,70)	(21.190.441.634,27)	(4.019.045.891,43)	18,97
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	**5.3.1.5.5**	**(450.364.793.392,16)**	**(356.184.395.581,46)**	**(94.180.397.810,70)**	**26,44**
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(450.364.793.392,16)	(356.184.395.581,46)	(94.180.397.810,70)	26,44
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (tdf)	**5.3.1.5.6**	**103.488.065.991,00**	**0,00**	**103.488.065.991,00**	**100,00**
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (tdf)	5.3.1.5.6	103.488.065.991,00	0,00	103.488.065.991,00	100,00
Jumlah Aset Lainnya		**2.669.623.055.506,14**	**1.483.022.752.887,27**	**1.186.600.302.618,87**	**80,01**
JUMLAH ASET		**40.276.338.752.810,46**	**39.291.945.337.213,10**	**984.393.415.597,36**	**2,51**
KEWAJIBAN	**5.3.2**	**338.699.949.467,91**	**383.270.068.724,08**	**(44.570.119.256,17)**	**(11,63)**
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	**5.3.2.1**	**338.699.949.467,91**	**383.270.068.724,08**	**(44.570.119.256,17)**	**(11,63)**
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (pfk)	**5.3.2.1.1**	**323.256.100,00**	**281.977.193,00**	**41.278.907,00**	**14,64**
Utang Pph Pusat	5.3.2.1.1.1	91.973.257,00	45.666.889,00	46.306.368,00	101,40
Utang Ppn Pusat	5.3.2.1.1.2	229.305.143,00	218.613.315,00	10.691.828,00	4,89
Utang Pihak Ketiga Lainnya	5.3.2.1.1.3	1.977.700,00	17.696.989,00	(15.719.289,00)	(88,82)
Pendapatan Diterima Dimuka	**5.3.2.1.2**	**38.988.175.991,98**	**39.251.892.013,58**	**(263.716.021,60)**	**(0,67)**
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak Iii	5.3.2.1.2.1	38.327.134.107,01	39.251.892.013,58	(924.757.906,57)	(2,36)
Pendapatan Diterima Dimuka-belanja Sewa	5.3.2.1.2.2	661.041.884,97	0,00	661.041.884,97	100,00
Utang Belanja	**5.3.2.1.3**	**287.498.121.718,93**	**339.312.280.309,50**	**(51.814.158.590,57)**	**(15,27)**
Utang Belanja Pegawai	5.3.2.1.3.1	7.040.425.144,00	4.287.414.859,00	2.753.010.285,00	64,21
Utang Belanja Barang Dan Jasa	5.3.2.1.3.2	174.377.494.891,93	238.607.355.361,50	(64.229.860.469,57)	(26,92)
Utang Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.3.2.1.3.3	109.612.163,00	0,00	109.612.163,00	100,00
Utang Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	5.3.2.1.3.4	0,00	2.668.401.804,00	(2.668.401.804,00)	(100,00)
Utang Belanja Bagi Hasil	5.3.2.1.3.5	105.970.589.520,00	93.749.108.285,00	12.221.481.235,00	13,04
Utang Jangka Pendek Lainnya	**5.3.2.1.4**	**11.890.395.657,00**	**4.423.919.208,00**	**7.466.476.449,00**	**168,78**
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	5.3.2.1.4.1	11.846.040.742,00	4.387.972.846,00	7.458.067.896,00	169,97
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	5.3.2.1.4.2	44.354.915,00	35.946.362,00	8.408.553,00	23,39
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**338.699.949.467,91**	**383.270.068.724,08**	**(44.570.119.256,17)**	**(11,63)**
JUMLAH KEWAJIBAN		**338.699.949.467,91**	**383.270.068.724,08**	**(44.570.119.256,17)**	**(11,63)**
EKUITAS	**5.3.3**	**39.937.638.803.342,55**	**38.908.675.268.489,02**	**1.028.963.534.853,53**	**2,64**
EKUITAS		**39.937.638.803.342,55**	**38.908.675.268.489,02**	**1.028.963.534.853,53**	**2,64**
Ekuitas		39.937.638.803.342,55	38.908.675.268.489,02	1.028.963.534.853,53	2,64
Jumlah Ekuitas		**39.937.638.803.342,55**	**38.908.675.268.489,02**	**1.028.963.534.853,53**	**2,64**
JUMLAH EKUITAS DANA		**39.937.638.803.342,55**	**38.908.675.268.489,02**	**1.028.963.534.853,53**	**2,64**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**40.276.338.752.810,46**	**39.291.945.337.213,10**	**984.393.415.597,36**	**2,51**

** Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Per 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REFF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN - LO	**5.4.1**				
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	**5.4.1.1**				
Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	13.912.533.319.927,00	11.772.065.741.700,00	2.140.467.578.227,00	18,18
Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	114.752.669.729,38	91.286.282.786,62	23.466.386.942,76	25,71
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	1.145.452.282.670,38	957.641.390.593,36	187.810.892.077,02	19,61
Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	1.802.424.410.356,58	2.496.153.709.716,51	(693.729.299.359,93)	(27,79)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (pad)-lo		**16.975.162.682.683,34**	**15.317.147.124.796,49**	**1.658.015.557.886,85**	**10,82**
PENDAPATAN TRANSFER-LO	**5.4.1.2**				
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		7.826.984.774.063,00	11.610.733.551.105,00	(3.783.748.777.042,00)	(32,59)
Jumlah Pendapatan Transfer-lo		**7.826.984.774.063,00**	**11.610.733.551.105,00**	**(3.783.748.777.042,00)**	**(32,59)**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	**5.4.1.3**				
Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.1	1.348.771.688.053,61	1.085.776.688.624,07	262.994.999.429,54	24,22
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	5.4.1.3.2	272.461.085,00	846.848.245,00	(574.387.160,00)	(67,83)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-lo		**1.349.044.149.138,61**	**1.086.623.536.869,07**	**262.420.612.269,54**	**24,15**
JUMLAH PENDAPATAN		**26.151.191.605.884,95**	**28.014.504.212.770,56**	**(1.863.312.606.885,61)**	**(6,65)**
BEBAN	**5.4.2**				
BEBAN OPERASI	**5.4.2.1**				
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	5.905.656.897.052,00	5.599.672.063.711,00	305.984.833.341,00	5,46
Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	5.562.182.723.375,26	5.624.678.582.064,53	(62.495.858.689,27)	(1,11)
Beban Barang	5.4.2.1.2.1	1.361.271.643.862,72	1.513.501.886.300,77	(152.230.242.438,05)	(10,06)
Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	1.898.182.918.222,18	2.488.402.294.904,40	(590.219.376.682,22)	(23,72)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	348.391.026.948,64	537.057.928.770,00	(188.666.901.821,36)	(35,13)
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	366.605.806.782,00	239.273.525.666,00	127.332.281.116,00	53,22
Beban Uang Dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/pihak Lain/masyarakat	5.4.2.1.2.5	133.245.863.754,00	177.737.257.983,00	(44.491.394.229,00)	(25,03)
Beban Barang Dan Jasa Bop	5.4.2.1.2.6	772.370.151.286,91	0,00	772.370.151.286,91	100,00
Beban Barang Dan Jasa Bos	5.4.2.1.2.7	682.115.312.518,81	668.705.688.440,36	13.409.624.078,45	2,01
Beban Subsidi	5.4.2.1.3	4.958.884.836,00	90.482.166,00	4.868.402.670,00	5.380,51
Beban Hibah	5.4.2.1.4	2.966.262.710.733,99	6.634.910.082.267,36	(3.668.647.371.533,37)	(55,29)
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	78.894.181.648,00	133.388.891.190,00	(54.494.709.542,00)	(40,85)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	70.784.354.513,53	1.755.144.617,29	69.029.209.896,24	3.932,96
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	1.298.548.256.045,20	1.321.362.950.359,57	(22.814.694.314,37)	(1,73)
Beban Lain-Lain	5.4.2.1.8	0,00	14.823.224.697,14	(14.823.224.697,14)	(100,00)
Jumlah Beban Operasi		**15.887.288.008.203,98**	**19.330.681.421.072,89**	**(3.443.393.412.868,91)**	**(17,81)**
BEBAN TRANSFER	**5.4.2.2**				
Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	6.098.030.303.717,00	5.243.126.215.061,00	854.904.088.656,00	16,31
Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	2.677.356.893.793,00	1.761.745.612.766,00	915.611.281.027,00	51,97
Jumlah Beban Transfer		**8.775.387.197.510,00**	**7.004.871.827.827,00**	**1.770.515.369.683,00**	**25,28**
JUMLAH BEBAN		**24.662.675.205.713,98**	**26.335.553.248.899,89**	**(1.672.878.043.185,91)**	**(6,35)**
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI		**1.488.516.400.170,97**	**1.678.950.963.870,67**	**(190.434.563.699,70)**	**(11,34)**
SURPLUS DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	**5.4.3**				
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO	**5.4.3.1**				
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - Lo	5.4.3.1.1	1.478.620.139,69	341.940.608.963,02	(340.461.988.823,33)	(99,57)

URAIAN	REFF	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah	%
1	2	3	4	5 = (3-4)	6
Jumlah Surplus Non Operasional-lo		**1.478.620.139,69**	**341.940.608.963,02**	**(340.461.988.823,33)**	**(99,57)**
DEFISIT NON OPERASIONAL-LO	**5.4.3.2**				
Defisit Penjualan/pertukaran/pelepasan Aset Non Lancar-lo	5.4.3.2.1	1.190.620.583,93	10.428.083.662,69	(9.237.463.078,76)	(88,58)
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-lo	5.4.3.2.2	712.184.325.639,32	6.660.203.314,46	705.524.122.324,86	10.593,13
Jumlah Defisit Non Operasional-lo		**713.374.946.223,25**	**17.088.286.977,15**	**696.286.659.246,10**	**4.074,64**
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		**(711.896.326.083,56)**	**324.852.321.985,87**	**(1.036.748.648.069,43)**	**(319,14)**
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		**776.620.074.087,41**	**2.003.803.285.856,54**	**(1.227.183.211.769,13)**	**(61,24)**
POS LUAR BIASA	**5.4.4**				
BEBAN LUAR BIASA	**5.4.4.2**				
Beban Luar Biasa	5.4.4.2.1	16.545.479.100,00	4.329.429.000,00	12.216.050.100,00	282,16
Jumlah Beban Luar Biasa		**16.545.479.100,00**	**4.329.429.000,00**	**12.216.050.100,00**	**282,16**
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		**(16.545.479.100,00)**	**(4.329.429.000,00)**	**(12.216.050.100,00)**	**282,16**
SURPLUS/DEFISIT-LO		**760.074.594.987,41**	**1.999.473.856.856,54**	**(1.239.399.261.869,13)**	**(61,99)**

** Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

,

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	2022 (*Audited*)	2021
1	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**	**5.5.1.1**		
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	13.484.851.151.740,00	11.718.378.320.505,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	115.158.014.199,00	91.634.269.205,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	546.717.104.899,00	508.263.876.971,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1.4	2.117.287.575.454,00	2.355.108.484.231,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	909.711.090.450,00	1.023.258.872.325,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	18.989.623.430,00	12.586.758.109,00
9	Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	3.435.718.090.405,00	3.432.978.859.000,00
10	Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	3.385.111.274.502,00	7.334.261.241.620,00
11	Dana Insentif Daerah	5.5.1.1.9	61.352.500.000,00	68.710.605.000,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.10	-	-
13	Pendapatan Hibah	5.5.1.1.11	92.161.740.403,00	64.882.003.502,00
14	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1.1.12	272.461.085,00	846.848.245,00
15	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**24.167.330.626.567,00**	**26.610.910.138.713,00**
16	**Arus Keluar Kas**	**5.5.1.2**		
17	Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	5.902.903.886.767,00	5.685.925.255.020,00
18	Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	5.377.369.153.895,00	5.345.399.454.776,00
19	Belanja Subsidi	5.5.1.2.3	4.958.884.836,00	90.482.166,00
20	Belanja Hibah	5.5.1.2.4	2.092.761.564.803,00	5.728.982.384.318,00
21	Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	78.894.181.648,00	66.180.255.190,00
22	Belanja TidakTerduga	5.5.1.2.6	16.545.479.100,00	72.303.305.000,00
23	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	5.5.1.2.7	6.085.808.822.482,00	5.735.553.033.353,00
24	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2.8	2.677.356.893.793,00	1.761.745.612.766,00
25	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**22.236.598.867.324,00**	**24.396.179.782.589,00**
26	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**1.930.731.759.243,00**	**2.214.730.356.124,00**
27	**ARUS KAS DARI INVESTASI ASET NON KEUANGAN**	**5.5.2**		
28	**Arus Masuk Kas**	**5.5.2.1**		
29	Pendapatan Penjualan atas Tanah	5.5.2.1.1	-	20.826.561.000,00
30	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.2	11.080.000,00	130.149.400,00
31	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.3	79.289.000,00	-
32	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.4	217.998.000,00	675.394.250,00
33	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	5.5.2.1.5	296.640.560,00	457.842.600,00
34	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**605.007.560,00**	**22.089.947.250,00**
35	**Arus Keluar Kas**	**5.5.2.2**		
36	Belanja Tanah	5.5.2.2.1	17.346.322.716,00	79.135.275.975,00
37	Belanja Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	767.027.589.289,00	578.353.949.251,00
38	Belanja Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	359.726.308.741,00	330.679.148.402,00
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	475.441.543.110,00	351.328.654.582,00

NO	URAIAN	REF	2022 (*Audited*)	2021
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	94.099.866.225,00	108.123.383.035,00
41	Belanja Aset Lainnya		-	-
42	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**1.713.641.630.081,00**	**1.447.620.411.245,00**
43	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**		**(1.713.036.622.521,00)**	**(1.425.530.463.995,00)**
44	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN**	**5.5.3**		
45	**Arus Masuk Kas**	**5.5.3.1**		
46	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3.1.1	-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.3.1.2	-	-
48	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	5.5.3.1.3	81.719.452,00	106.519.175,00
49	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	5.5.3.1.4	-	9.688.594,00
50	Penerimaan Kembali Investasi Permanen kepada BUMD	5.5.3.1.5	474.000.000.000,00	-
51	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**474.081.719.452,00**	**116.207.769,00**
52	**Arus Keluar Kas**	**5.5.3.2**		
53	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.3.2.1	400.000.000.000,00	200.000.000.000,00
54	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.2	491.000.000.000,00	15.000.000.000,00
55	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**891.000.000.000,00**	**215.000.000.000,00**
56	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan**		**(416.918.280.548,00)**	**(214.883.792.231,00)**
57	**ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN**	**5.5.4**		
58	**Arus Masuk Kas**	**5.5.4.1**		
59	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	724.571.099.601,00	901.046.407.823,00
60	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.2	-	18.040.000,00
61	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	5.5.4.1.3	314.414.803,00	102.386.400,00
62	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.1.4	-	32.972.329,00
63	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**724.885.514.404,00**	**901.199.806.552,00**
64	**Arus Keluar Kas**	**5.5.4.2**		
65	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	724.571.099.601,00	901.046.407.823,00
66	Kas Di Bend Penerimaan- TA Berjalan	5.5.4.2.2	177.410.000,00	314.414.803,00
67	Kas Di Bend Pengeluaran - TA Berjalan	5.5.4.2.3	-	-
68	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	5.5.4.2.4	738.393,00	-
69	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**724.749.247.994,00**	**901.360.822.626,00**
70	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran**		**136.266.410,00**	**(161.016.074,00)**
71	Kenaikan/Penurunan Kas	5.5.5	(199.086.877.416,00)	574.155.083.824,00
72	Saldo Awal Kas di BUD		398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
73	Saldo Awal Kas di BLUD		991.964.597.859,00	437.713.567.521,00
74	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah		44.978.038.448,00	60.865.862.020
75	Saldo Akhir Kas	5.5.6	1.236.291.592.535,00	1.435.378.469.951,00
76	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
77	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		177.410.000,00	314.414.803,00
78	Saldo Akhir Kas di BLUD (Non SILPA)		779.237.357,00	765.695.510,00
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Sekolah (Non SILPA)		432.868.263,00	281.977.193,00
80	Saldo Akhir Kas Lainnya (Non SILPA)		-	-
81	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.7**	**1.237.681.108.155,00**	**1.436.740.557.457,00**

** Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2022 dan 2021

URAIAN	REF	JUMLAH	
		Tahun 2022	Tahun 2021
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	**5.6.1**	**38.908.675.268.489,02**	**36.397.640.492.434,77**
SURPLUS/DEFISIT LO	**5.6.2**	**760.074.594.987,41**	**1.999.473.856.856,54**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	**5.6.3**	**268.888.939.866,12**	**511.560.919.197,71**
KOREKSI/PENYESUAIAN KAS	5.6.3.1	(738.393,00)	32.972.328,65
KOREKSI/PENYESUAIAN PIUTANG	5.6.3.2	133.602.485.134,00	207.027.275.428,62
KOREKSI/PENYESUAIAN PENYISIHAN PIUTANG	5.6.3.3	(162.114.289,77)	(562.386.694.925,14)
KOREKSI/PENYESUAIAN PERSEDIAAN	5.6.3.4	0,00	193.681.017.147,88
KOREKSI/PENYESUAIAN INVESTASI PERMANEN	5.6.3.7	0,00	567.938.674.324,21
KOREKSI/PENYESUAIAN ASET TETAP	5.6.3.8	119.273.473.855,00	139.112.653.436,00
KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN	5.6.3.9	18.743.562.212,44	(33.829.823.867,00)
KOREKSI/PENYESUAIAN ASET LAINNYA	5.6.3.10	(4.367.995.535,00)	(4.997.267.920,00)
KOREKSI/PENYESUAIAN AMORTISASI	5.6.3.11	(100.352.782,51)	(80.105.975,83)
KOREKSI/PENYESUAIAN PENYUSUTAN ASET LAINNYA	5.6.3.12	1.900.619.664,95	5.008.727.119,30
KOREKSI/PENYESUAIAN HUTANG	5.6.3.13	0,00	53.492.101,64
KOREKSI/PENYESUAIAN LAIN-LAIN	5.6.3.15	0,01	(0,62)
EKUITAS AKHIR		**39.937.638.803.342.55**	**38.908.675.268.489.02**

** Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.*

,

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi
   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi Kinerja
   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
   LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c. Neraca
   Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO)
   LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
e. Laporan Arus Kas (LAK)
   LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi yang diharuskan atau dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI
4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan
4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4.16. Kebijakan Akuntansi Koreksi

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB 7 PENUTUP

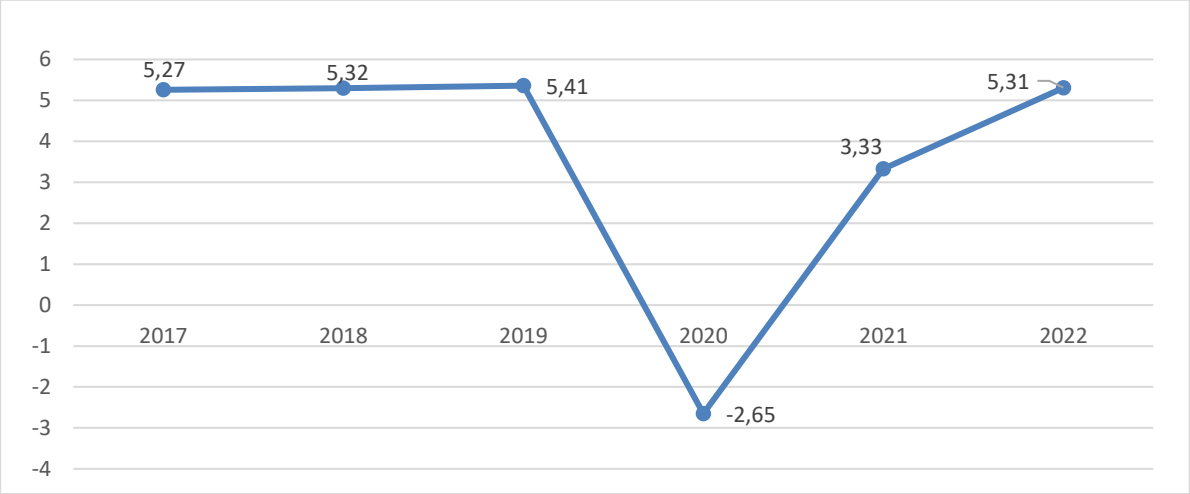
BAB 2
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

1.1. Ekonomi Makro

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah cenderung mengalamai kenaikan dari tahun ke tahun, meskipun di tahun 2020 sempat mengalami kontraksi sebesar minus 2,65 persen diakibatkan Pandemi Covid-19 yang memberikan dampak pada seluruh sendi kehidupan masyarakat dan krisis multisektor, utamanya sektor kesehatan, sektor perekonomian dan sektor sosial ekonomi lainnya. Namun pada Tahun 2021 dan 2022 Perekonomian Jawa Tengah terus mencatatkan pertumbuhan yang positif, di Tahun 2022 yaitu sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian pada tahun 2021 yang tumbuh 3,33 persen. Perbaikan ekonomi Jawa Tengah tersebut didorong oleh pemulihan ekonomi domestik dan berlanjutnya stimulus kebijakan Bank Indonesia, Pemerintah, dan otoritas terkait lainnya. Kinerja positif ekspor dan investasi masih diperkirakan tumbuh positif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah meskipun melambat dampak dari tekanan inflasi global seiring dengan ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionisme yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi, serta gangguan rantai pasok, kenaikan suku bunga kebijakan moneter yang agresif, dan ketidakpastian pasar keuangan. Kinerja pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebagaimana Grafik 1.1.

Grafik 1.1
Kinerja Pertumbuhan Ekonomi (%) Jawa Tengah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 – 2022



Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Dari sisi Lapangan Usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2022 meliputi sektor Transportasi dan Pergudangan dengan kontribusi sebesar 73,03 persen selanjutnya diikuti oleh Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 16,99 persen dan Jasa Lainnya sebesar 11,79 persen. Lapangan usaha lain yang juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya adalah Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,88 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,32 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 2,92

persen; Konstruksi tumbuh sebesar 1,83 persen; Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 6,15 persen; Real Estate tumbuh sebesar 5,09 persen persen; serta Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 3,79 persen.

Data pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha Tahun 2020 - 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – 2022

No	Lapangan Usaha	Prosentase (%) Pertumbuhan		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,48	0,81	2,92
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,80	4,40	-6,20
3	Industri Pengolahan	-3,74	2,32	3,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,79	5,95	3,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29	5,87	1,01
6	Konstruksi	-3,76	7,37	1,83
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,80	5,80	4,32
8	Transportasi dan Pergudangan	-33,15	3,30	73,03
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-7,98	5,92	16,99
10	Informasi dan Komunikasi	15,65	6,04	2,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,03	1,66	0,53
12	Real Estate	-0,28	2,15	5,09
13	Jasa Perusahaan	-7,19	3,07	6,15
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,31	-0,64	1,58
15	Jasa Pendidikan	-0,24	0,07	1,58
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	0,18	2,51
17	Jasa lainnya	-8,01	0,53	11,79
	PDRB	-2,65	3,32	5,31

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 1,78 persen disusul dengan Industri Pengolahan sebesar 1,30 persen serta Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,64 persen. Sebagaimana Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2020 – 2021

Sumber Pertumbuhan Ekonomi		Persentase (%)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,31	0,10	0,37
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,02	0,10	-0,14
3	Industri Pengolahan	-1,27	0,78	1,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,00	0,01	0,00
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	-0,39	0,76	0,20
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,55	0,84	0,64
8	Transportasi dan Pergudangan	-1,16	0,08	1,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,27	0,19	0,56
10	Informasi dan Komunikasi	0,80	0,37	0,16
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,05	0,05	0,01
12	Real Estate	-0,01	0,04	0,10
13	Jasa Perusahaan	-0,03	0,01	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,03	-0,02	0,04
15	Jasa Pendidikan	-0,01	0,00	0,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,07	0,00	0,02
17	Jasa lainnya	-0,14	0,01	0,19
	PDRB	-2,65	3,32	5,31

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dilihat dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 10,48 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 5,52 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (PKLNPRT) sebesar 4,89 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 1,95 persen dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,12 persen. Sedangkan Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran tumbuh sebesar 8,17 persen. Data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2020 – 2022

No	Komponen Pengeluaran	Prosentase (%)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,42	1,82	5,52
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-2,98	1,25	4,89
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-4,30	0,83	0,12
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-6,98	6,86	1,95
5	Perubahan Inventori	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	-13,84	15,97	10,48
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-14,82	15,41	8,17
	PDRB	-2,65	3,32	5,31

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Dari sisi pengeluaran, perbaikan kinerja ekonomi Jawa Tengah masih ditopang oleh Ekpor Barang dan Jasa sebesar 4,11 persen serta konsumsi Rumah Tangga sebesar 3,23 persen, diikuti komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 0,58 persen. Kinerja ekspor tahun 2022 mengalami pelemahan dibanding tahun 2021 dikarenakan percepatan normalisasi kebijakan moneter, implementasi kebijakan zero Covid-19 di Tiongkok, penurunan daya beli masyarakat dunia di tengah peningkatan inflasi dan ketidakpastian pasar global, serta gangguan rantai pasok global. Beberapa sektor yang terimbas dinamika kondisi global saat ini diantaranya industri tekstil, kayu dan furniture, dan industri makan minum. Konsumsi rumah tangga terjadi pada seluruh komponen, seperti sandang, perumahan, perlengkapan rumah tangga, transportasi, dan rekreasi. Data lengkap Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2020 – 2022 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2020 - 2022

No	Komponen Pengeluaran	Persentase (%)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,86	1,08	3,23
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-0,04	0,01	0,05
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,33	0,05	0,01
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	-2,30	1,98	0,58
5	Perubahan Inventori	-	-	-
6	Ekspor Barang dan Jasa	-5,88	5,58	4,11
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-6,72	4,93	2,92
	PDRB	-2,65	3,32	5,31

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2022 menurut Lapangan Usaha atas harga didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 33,93 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,53 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,59 persen; dan Konstruksi sebesar 11,03 persen. Data lengkap struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2020–2022 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 – 2022

Kategori	Komponen (%)			
		Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,30	13,86	13,53
B	Pertambangan dan Penggalian	2,46	2,58	2,42
C	Industri Pengolahan	34,44	34,29	33,93
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,56	11,13	11,03
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,50	13,76	13,59
H	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,26	3,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,99	3,05	3,39
J	Informasi dan Komunikasi	4,26	4,29	4,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	3,02	3,01
L	Real Estate	1,71	1,67	1,63
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,40	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,53	2,40
P	Jasa Pendidikan	4,74	4,55	4,23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	0,97	0,92
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,48	1,56
	PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)
*Keterangan: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

Dari sisi pengeluaran, struktur PDRB Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 didominasi oleh Komponen PK-RT sebesar 60,28 persen; diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 40,30 persen; komponen PMTB sebesar 30,69 persen; Komponen PK-P sebesar 6,53 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,22 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,99 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 40,01 persen. Data lengkap seperti pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 – 2022

Komponen		Struktur (%)		
		Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2022**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,02	60,17	60,28
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,19	1,18	1,22
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,32	7,11	6,53
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,01	31,76	30,69
5	Perubahan Inventori	0,95	0,84	0,99
6	Ekspor Barang dan Jasa	36,30	40,01	40,30
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	37,39	41,09	40,01
	PDRB	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)
*Keterangan: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

1.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 sebesar Rp 42,15 juta meningkat dibanding PDRB per kapita Tahun 2021 yang sebesar Rp 38,65 juta. Data selengkapnya sebagaimana Tabel berikut:

Tabel 1.7
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Komponen	2020	2021*	2022**
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rp)	1.347.222,49	1.419.986,62	1.560.899,02
Jumlah Penduduk (Jiwa)	36.446.115	36.742.501	37.032.410
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku :			
Nilai (Juta Rupiah)	36,96	38,65	42,15
Perkembangan (%)	-6,15	4,55	9,06

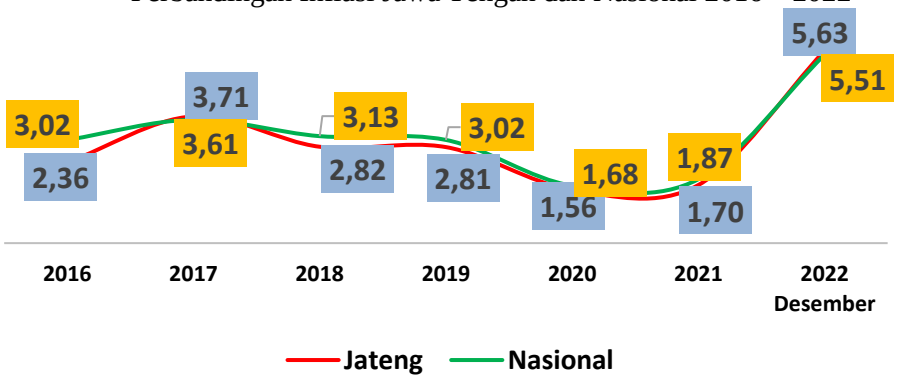
Sumber: Data BPS Jateng (diolah)
Keterangan:
**) Angka Sementara*
***) Angka Sangat Sementara*
Tahun 2020-2021 Proyeksi Penduduk Provinsi Jawa Tengah Interim BPS 2020-2023

1.1.3. Inflasi

Tingkat inflasi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 5,63 persen dan tingkat inflasi tahun 2021 sebesar 1,70 persen. Kenaikan inflasi tahunan Jawa Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,52 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,78 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,31 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,07 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,06 persen; kelompok transportasi sebesar 0,02 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,01 persen.

Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan minus 0,03 persen serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga minus 0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil). Dari faktor eksternal, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina menyebabkan kenaikan harga pada sejumlah komoditas dan produk turunannya di dalam negeri yang mendorong kenaikan inflasi. Grafik perbandingan inflasi Jawa Tengah dengan Nasional sebagai berikut:

Grafik 1.2
Perbandingan Inflasi Jawa Tengah dan Nasional 2016 – 2022



Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.4. Indeks Gini

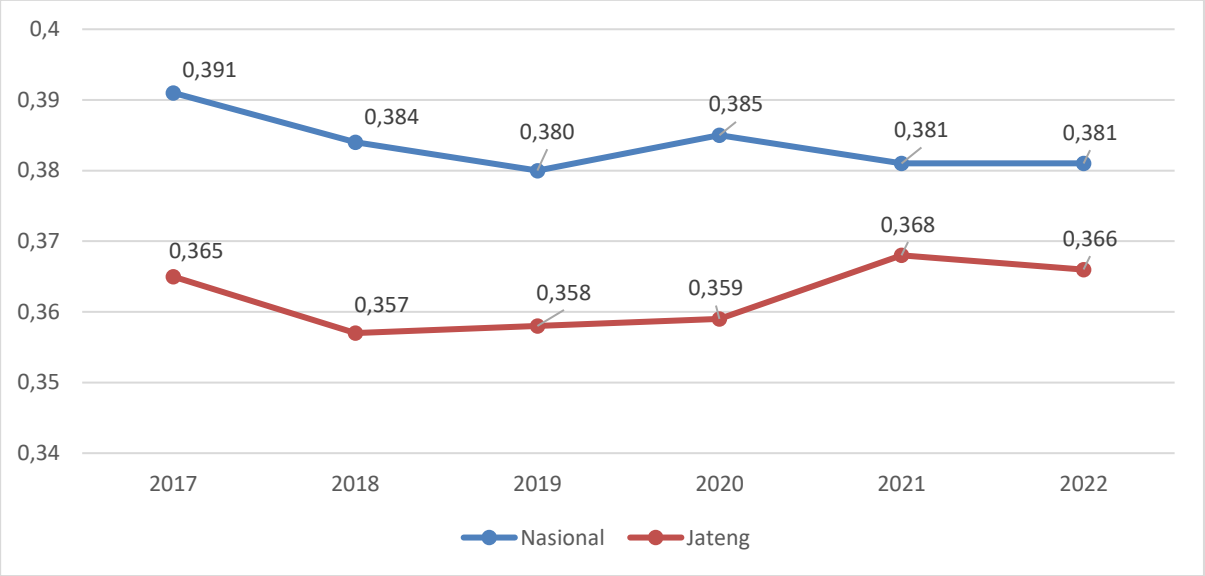
Indek Gini merupakan indikator yang mengukur ketimpangan pendapatan atau pengeluaran antar kelompok masyarakat dalam suatu wilayah secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan yang semakin tinggi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan moderat; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 berada dalam ketimpangan tinggi.

Pada September 2022, Gini Ratio Jawa Tengah tercatat sebesar 0,366 menurun 0,008 poin dibandingkan dengan Maret 2022 yang sebesar 0,374 dan menurun jika dibandingkan dengan September 2020 yang sebesar 0,368. Penurunan angka Gini Rasio dari Maret 2022 ke September 2022

mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk semakin merata atau ketimpangan pengeluaran semakin menurun. Bantuan sosial Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya untuk masyarakat dengan pendapatan rendah sangat membantu penduduk pada lapisan bawah, hal ini bisa sedikit mengurangi ketimpangan penduduk.

Posisi Indeks Gini Jawa Tengah Tahun 2022 sebesar 0,366 masih lebih rendah daripada Nasional yaitu sebesar 0,381. Ini menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat Jawa Tengah masih lebih baik daripada secara Nasional. Gini Rasio Jawa Tengah sebesar 0,366 pada tahun 2022 masuk dalam kategori tingkat ketimpangan sedang. Perkembangan Indek Gini seperti dalam Grafik 1.3.

Grafik 1.3
Gini Rasio Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

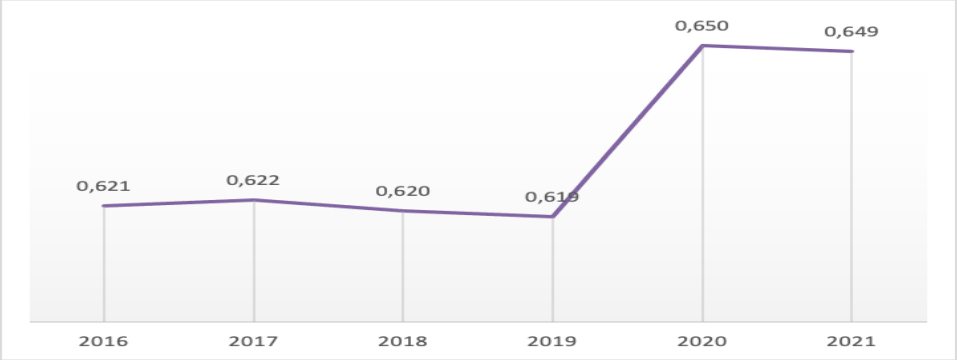


Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya antara kabupaten/kota dengan rerata provinsi. Nilai Indeks Williamson yang tinggi di suatu daerah menunjukkan ketimpangan kesenjangan pembangunan yang tinggi antar wilayah di daerah tersebut. Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0-1. Jika nilai menjauhi 0 (nol), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin besar. Sedangkan jika nilai mendekati 0 (nol) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut semakin kecil. Tahun 2021, Indeks Wiliasmson Jawa Tengah tercatat sebesar 0,649 menurun dibandingkan Tahun 2020 yang sebesar 0,650. Adapun grafik Indek Williamson seperti dalam Grafik 1.4.

Grafik 1.4
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2021



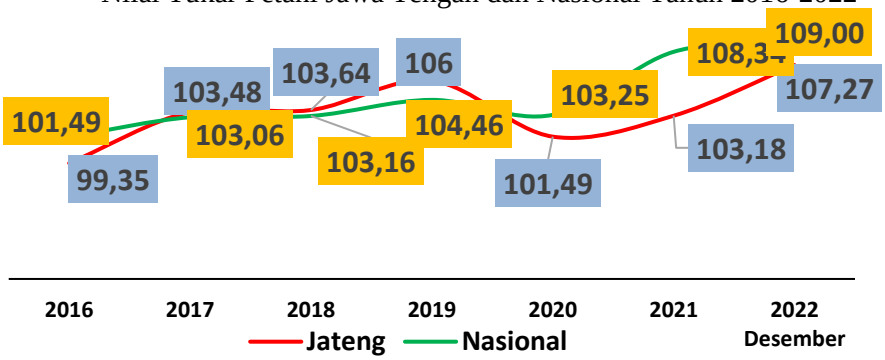
Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. NTP juga menunjukan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

NTP Provinsi Jawa Tengah pada Desember 2022 sebesar 107,27 lebih tinggi dibanding tahun 2021 sebesar 103,18. Kenaikan NTP disebabkan kenaikan Indeks harga yang Diterima petani (It) sebesar 2,80 persen lebih cepat dibanding kenaikan Indeks Harga yang Dibayar petani (Ib) sebesar 0,88 persen. Subsektor yang mengalami kenaikan NTP adalah subsektor tanaman pangan sebesar 1,75 persen; subsektor hortikultura sebesar 5,18 persen; subsektor tanaman perkebunan rakyat sebesar 0,41 persen; dan subsektor peternakan sebesar 0,21 persen. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan NTP adalah subsektor perikanan sebesar -0,23 persen. Untuk grafik Nilai Tukar Petani tahun 2017- 2022 dalam Grafik 1.5.

Grafik 1.5
Nilai Tukar Petani Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2022



Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka

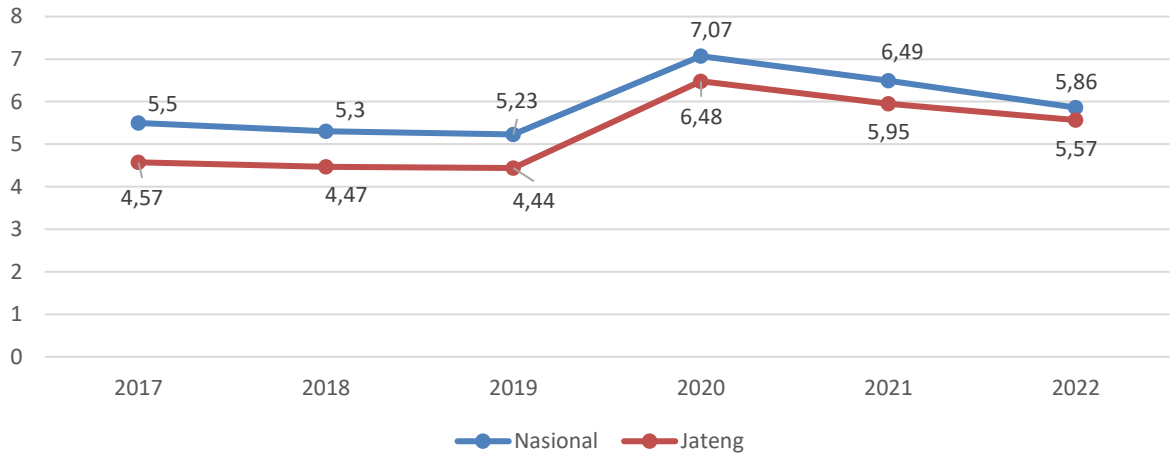
Jumlah penduduk usia kerja di Jawa Tengah pada Agustus 2022 sebesar 27,49 juta orang atau meningkat 0,87% (yoy). Kondisi ini mencerminkan ketersediaan tenaga kerja usia produktif di Jawa Tengah yang besar. Jumlah penduduk usia produktif yang menjadi angkatan kerja juga meningkat, dari

18,96 juta orang pada Agustus 2021 menjadi 19,47 juta orang pada Agustus 2022 atau tumbuh sebesar 2,69% (yoy). Angkatan kerja di Provinsi Jawa Tengah memiliki porsi 13,55% dari total angkatan kerja di nasional.

Tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah pada Agustus 2022 sebesar 5,57 persen atau sebanyak 1,08 juta orang, turun 0,38 persen point dibandingkan Agustus 2021 yang sebesar 5,95 persen. Angka tersebut masih lebih baik dibandingkan dengan angka pengangguran nasional sebesar 5,86 persen. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Jawa Tengah pada periode Agustus 2022 meningkat dibandingkan Agustus 2021, yaitu dari 69,58% menjadi 70,84%. Peningkatan TPAK Jawa Tengah tersebut sejalan dengan penurunan tingkat pengangguran yang menjadi 5,57%, dan lebih baik dibandingkan tingkat pengangguran nasional 5,86%. Hal ini mengindikasikan ketersediaan lapangan kerja sudah mulai meningkat seiring aktifitas ekonomi yang mulai pulih.

Sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah pertanian, selama Agustus 2021-Agustus 2022 serapan tenaga kerja dari sektor pertanian sebanyak 324 ribu orang atau 24,78 persen. Serapan tenaga kerja itu disusul dengan sektor usaha perdagangan 94 ribu orang, dan industri pengolahan 71 ribu orang.

Grafik 1.6.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022

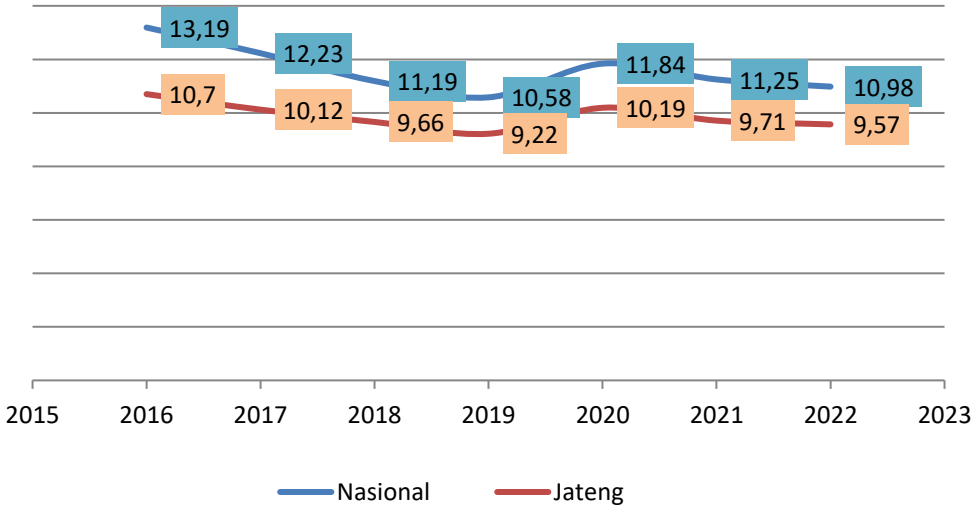


Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.8. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Jawa Tengah bulan September 2022 sebesar 10,98 persen, mengalami sedikit kenaikan yaitu 0,05 persen poin dibanding Maret 2022, namun Jika dibandingkan September 2021 menurun sebesar 0,27 persen poin. Secara absolut jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebanyak 3,86 juta orang, naik 26,79 ribu orang dibandingkan Maret 2022, akan tetapi menurun jika dibandingkan September 2021 sebesar 75,78 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di perkotaan pada September 2022 naik sebanyak 33,92 ribu orang (dari 1,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 1,85 juta orang pada September 2022). Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan turun sebanyak 7,14 ribu orang (dari 2,01 juta orang pada Maret 2022 menjadi 2,00 juta orang pada September 2022).

Grafik 1.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2021



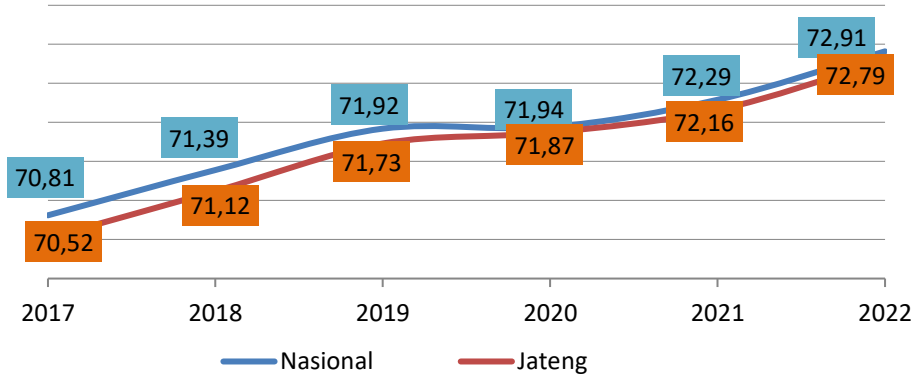
Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

1.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia/IPM (Human Development Index/HDI) merupakan salah satu parameter keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di suatu wilayah (negara, provinsi, dan kabupaten/kota). IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan sehat; dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pembangunan manusia, baik dari sisi dampaknya terhadap kondisi fisik manusia (kesehatan dan kesejahteraan) maupun yang bersifat non-fisik (pendidikan). Pembangunan yang berdampak pada kondisi fisik masyarakat misalnya tercermin dalam Usia Harapan Hidup serta kemampuan daya beli masyarakat, sedangkan dampak nonfisik dapat dilihat dari kualitas pendidikan masyarakat. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), sedangkan dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. IPM Jawa Tengah tahun 2022 adalah sebesar 72,79 atau tumbuh 0,87 persen (meningkat 0,63 poin) dibandingkan capaian tahun 2021 sebesar 72,16 dan masih dibawah capaian Nasional sebesar 72,91. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2022 didukung oleh peningkatan disemua komponen penyusunnya. Hal ini sama dengan kondisi sebelumnya. Pada tahun 2021, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan pertumbuhan IPM yang disebabkan oleh penurunan pengeluaran per kapita yang disesuaikan pada tahun 2020. Pada tahun 2022, pengeluaran per kapita naik 3,11 persen dibanding tahun 2021.

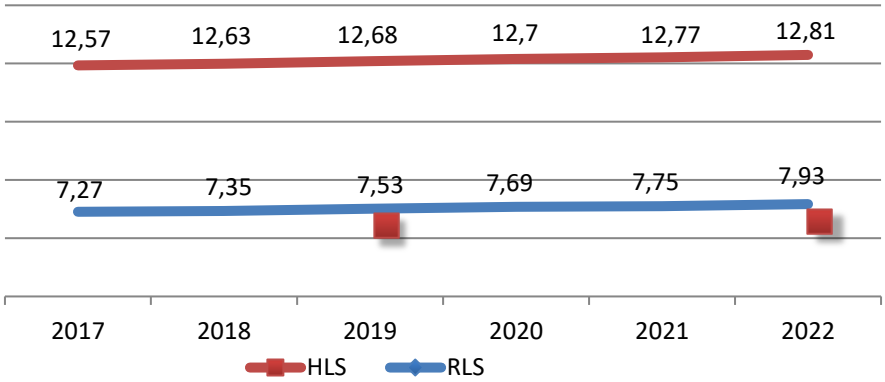
Grafik 1.8
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

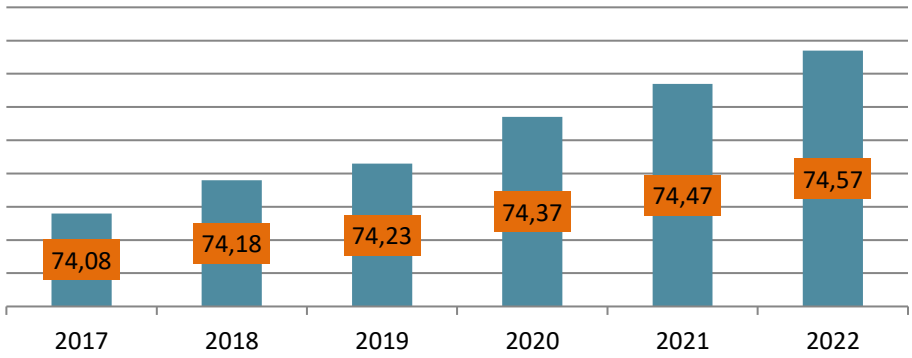
Dari dimensi pengetahuan/ pendidikan, anak-anak di Jawa Tengah yang berusia 7 tahun pada tahun 2022, memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,81 tahun atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat SMA atau Diploma I. Angka ini meningkat 0,04 tahun dibandingkan tahun 2021 yang mencapai 12,77 tahun. Selain itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas juga meningkat 0,18 tahun, dari 7,75 tahun menjadi 7,93 tahun pada tahun 2022.

Grafik 1.9
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Tengah, 2017-2022



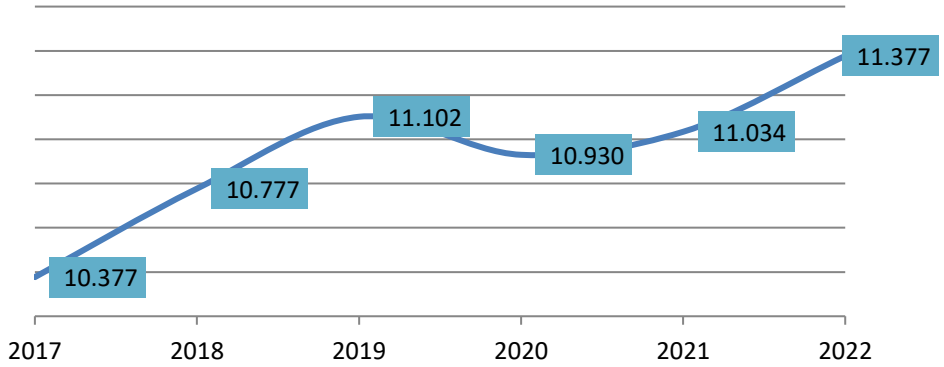
Dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, selama periode 2012 hingga 2022 UHH telah meningkat sebesar 1,48 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,20 persen per tahun. Pada tahun 2012, Umur Harapan Hidup saat lahir di Jawa Tengah adalah 73,09 tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 74,57 tahun. Meskipun adanya pandemi COVID-19, pertumbuhan UHH Jawa Tengah tahun 2021 dan 2022 masih lebih baik daripada tahun 2019.

Grafik 1.10.
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH) Jawa Tengah, 2012-2022



Dimensi Standar Hidup Layak, Pada tahun 2022 pengeluaran per kapita yang disesuaikan masyarakat Jawa Tengah mencapai Rp11,38 juta per tahun, meningkat 3,11 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11,03 juta per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari dua tahun pandemi COVID-19 melanda Jawa Tengah, pengeluaran per kapita mulai meningkat kembali setelah di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Grafik. 1.11
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP) Jawa Tengah, 2017-2022 (Rp000)



1.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mencakup kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat, dengan tetap mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatan akuntabilitas dan tranparansi pengelolaan keuangan dengan membuat kebijakan sebagai petujuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan APBD maupun kebijakan mendukung pelaksanaan teknis kegiatan.

1.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 diarahkan pada "**Peningkatan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi dan SDM**". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2022 difokuskan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari Covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2022 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1) Percepatan penanganan pandemi Covid-19 di sektor kesehatan dengan mempercepat penuntasan program vaksinasi bagi seluruh masyarakat;
2) Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terutama untuk membantu masyarakat yang masih belum sepenuhnya kembali bekerja dan mengalami penurunan pendapatan dalam upaya menjaga daya beli masyarakat;
3) Peningkatan pemulihan ekonomi bagi UMKM melalui fasilitasi kemudahan pembiayaan, permodalan, pemasaran, penguatan digitalisasi pemasaran produk dan pelayanan, dan pemberian bantuan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik UMKM;
4) Pemulihan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan Jawa Tengah secara bertahap dengan fokus pada wisatawan domestik dan pengembangan wisata yang adaptif terhadap pandemi Covid-19.
5) Meningkatkan pelayanan perizinan untuk menarik investasi masuk ke Jawa Tengah;.

1.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2022

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan tahun 2021. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2022 masih mempertimbangkan keberlanjutan upaya pemulihan dampak Covid-19 yang lebih mengarah pada upaya peningkatan perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing sumberdaya manusia, dengan memperhatikan kebijakan pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2022. Arah kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah dijabarkan dalam prioritas daerah tahun 2022 dengan fokus sebagai berikut:

1) Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana;
2) Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
3) Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing;
4) Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

1.2.3. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.

1.2.3.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun 2022 direncanakan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Adapun Dana Perimbangan bersumber dari dana transfer Pemerintah Pusat meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari pendapatan hibah dan Dana Insentif Daerah.

1.2.3.2. Target Pendapatan Dearah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Penapatan Asli Daerah memberikan sumbangan terbesar pada Pendapatan Daerah, diikuti dengan Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pajak Daerah menjadi penopang utama Pendapatan Daerah di tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021. Sumber pendapatan lainnya adalah Retribusi Daerah yang realisasi di tahun 2022 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021.

Sedangkan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 sebesar Rp16,265 triliun meliputi Pajak Daerah, Retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp7,811 triliun terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah. Sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah di Tahun Anggaran 2022 realisasi sebesar Rp92,43 miliar.

1.2.3.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target Pendapatan

Peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan tahun 2022, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh antara lain melalui:

a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
b. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi sistem (eSAMSAT), kerja sama dengan BUMDes melalui program Samsat BUMDes Digital Mandiri (BUDIMAN), dan penambahan titik-titik pelayanan;
c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak;
d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
e. Meningkatkan pelayanan sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah;
f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan:

a. Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
b. Penguatan kelembagaan dan sinergi antar BUMD dan perangkat daerah, serta mengembangkan potensi usaha;
c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah;
d. Penggerakan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

1.2.4. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diperuntukkan dalam rangka:

1. Peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
2. Penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran;
3. Pencapaian target, sasaran dan program unggulan RPJMD 2018-2023;
4. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan. Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
5. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
7. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran/aspirasi Legislatif, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
8. Meningkatkan keserasian dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2022 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Struktur rencana belanja daerah tahun 2022, disusun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap memperhatikan kebijakan belanja yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Struktur belanja daerah tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang terdiri dari:

1.2.5. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai tahun 2022 diproyeksikan dengan Perubahan RKPD Tahun 2022 Bab III - 10 asumsi termasuk penambahan belanja pegawai untuk P3K (guru dan tenaga kesehatan) dan CPNS;
2) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan untuk mendukung pelaksanaan aktifitas dengan prinsip efektifitas, effisiensi, akuntabilitas, manfaat dan memperhatikan protokol Covid-19 dalam pelaksanaan *New Nomal*. Belanja barang dan jasa diantaranya digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) bagi siswa SMA, SMK dan SLB Negeri; operasional dan pengelolaan 3 SMK *Boarding School* dan 18 SMK Semi *Boarding School*; pembiayaan iuran

peserta PBI Jaminan Kesehatan; pembiayaan program-program pendukung perekonomian seperti kewirausahaan, sektor koperasi dan UMKM, pertanian, perikanan, pariwisata, perdagangan, dan perindustrian; serta pembiayaan program peningkatan tata kelola pemerintahan seperti manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, pelayanan publik, peningkatan ketenteraman dan ketertiban;

3) Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah antara lain digunakan untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB swasta dan MA, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan, PMI, Pramuka, organisasi olahraga, sarana peribadatan/ keagamaan, kebudayaan, hibah kepada organisasi kemasyarakatan, serta hibah kepada instansi vertikal;
4) Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diantaranya Beasiswa Siswa Miskin, listrik murah, perlindungan sosial bagi masyarakat non produktif melalui Program Kartu Jateng Sejahtera, bantuan sosial pembangunan rumah bagi korban bencana, dan pembangunan rumah relokasi program pemerintah.

1.2.5.1. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi aset.

1.2.5.2. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Penganggaran Belanja Tidak Terduga tersebut dianggarkan secara rasional untuk keadaan darurat yang meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik serta keadaan yang mendesak yang meliputi:
   1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   3) pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
   4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

1.2.5.3. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya (Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa). Belanja transfer tahun dirinci atas jenis:

a. Belanja Bagi Hasil adalah belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota;
b. Belanja Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya dalam rangka sinergitas dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan. Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota antara lain meliputi bantuan sarana prasarana, bantuan Pendidikan dan TMMD. Sementara bantuan keuangan kepada pemerintah desa antara lain meliputi bantuan RTLH pedesaan, KPMD, desa wisata, dan pengembangan kawasan pedesaan.

1.2.6. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2022 diarahkan pada penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah yang diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada dan penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian (prudential) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu sejalan dengan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020, terdapat pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Jawa Tengah yang akan dilaksanakan oleh BUMD Provinsi Jawa Tengah yang berpotensi adanya penyertaan modal investasi.

1.2.7. Dukungan Penanganan Dampak Inflasi

Dukungan program penanganan dampak inflasi di tahun 2022 dilakukan dengan sumber Dana Transfer Umum (DTU), Belanja Tak Terduga dan Program kegiatan di SKPD. Realisasi anggaran dari DTU sebesar Rp27,67 miliar untuk kegiatan fasilitasi bantuan sosial kesejahteraan keluarga (Kartu Jateng Sejahtera), penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap (Premi Asuransi), penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah provinsi (Trans jateng), sedangkan dukungan penanagan dampak inflasi dari sumber BTT dengan realisasi sebesar Rp15,05 miliar untuk program penanganan dampak inflasi berupa bantuan sosial bagi IKM Pangan, bantuan bagi pelaku usaha transportasi lokal, bantuan pembelian bahan baku pakan bagi peternak, bantuan pembelian bahan produksi pangan olahan produk pertanian, bantuan sosial kepada pekerja transportasi angkutan AKDP, AJDP dan Taksi, bantuan sosial bagi pekerja tranportasi *driver* angkutan online.

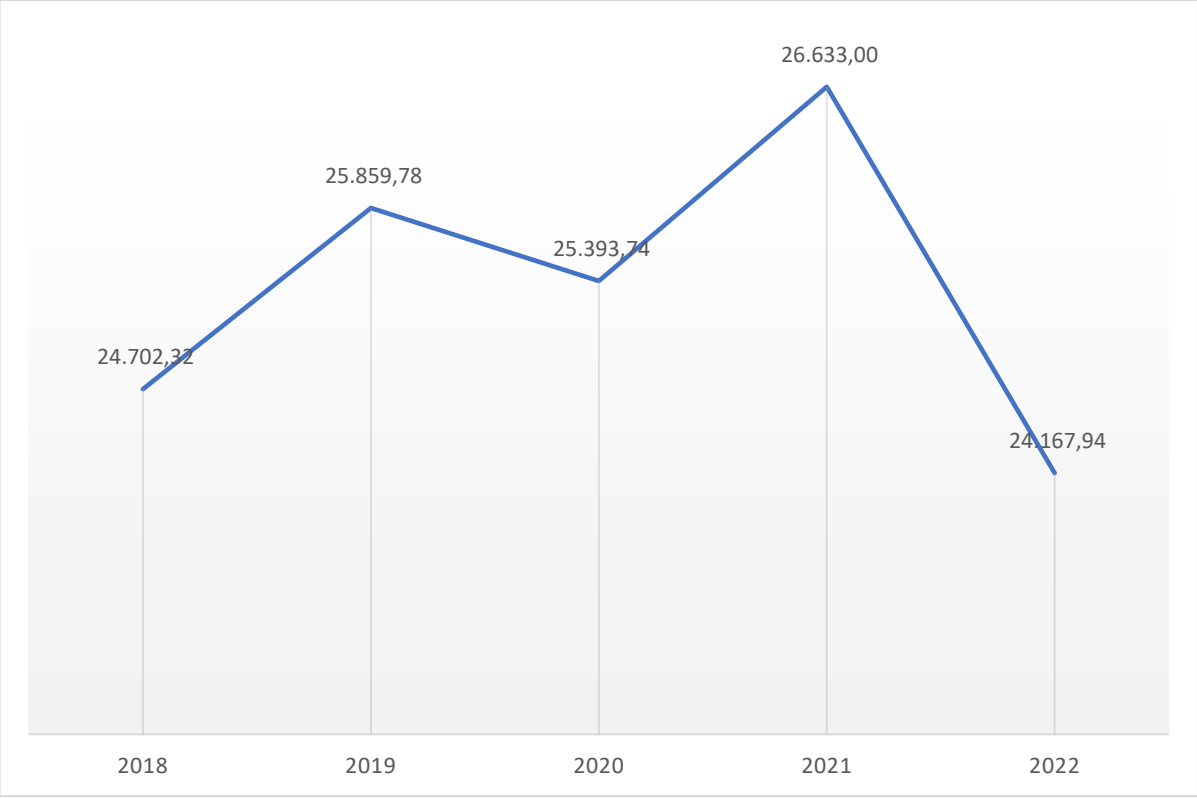
BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 difokuskan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah setelah perekonomian mulai berangsur membaik pasca pandemi. Dengan membaiknya kegiatan ekonomi, diharap atensi masyarakat terhadap kewajiban pajak daerah juga meningkat sehingga dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah dimana pajak daerah merupakan penyumbang terbesar pendapatan daerah. Hal tersebut dapat terlihat pada realisasi pendapatan asli daerah yang mulai menunjukkan tren positif di tahun ini, walau di penghujung tahun sempat terkoreksi kembali karena dampak isu global yang berakibat pada ketersediaan bahan baku.

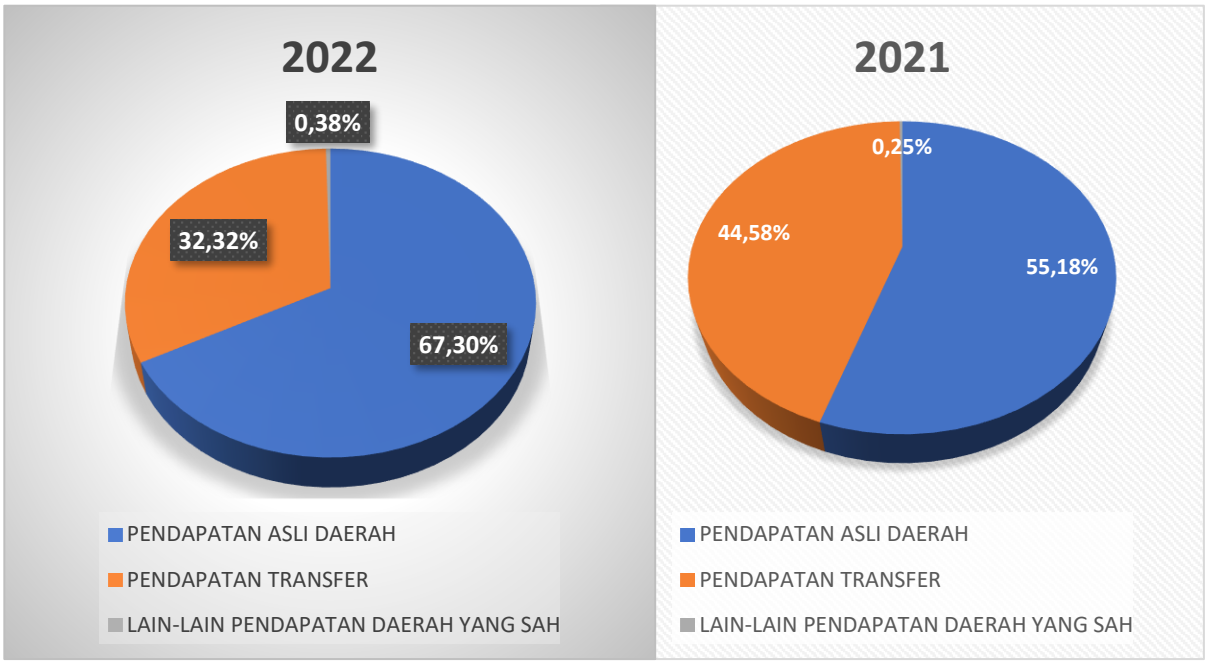
Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek. Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.1
Grafik tren capaian total pendapatan daerah 2018 – 2022 (dalam Milyar)

Meningkatnya realisasi PAD tahun 2022 berimbas juga pada membaiknya kemampuan fiskal daerah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

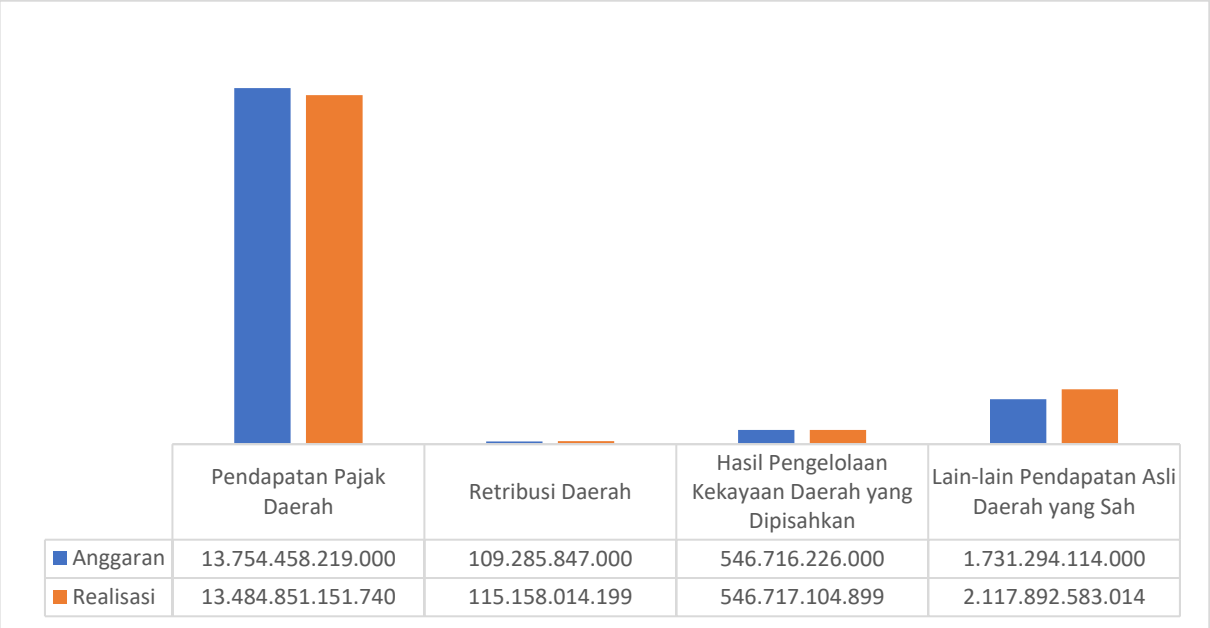
a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 67,30%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 55,18%;
b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 32,32%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 44,58%; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2022 memberikan kontribusi sebesar 0,38%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,25%.



Gambar 3.2
Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2022 dengan 2021

Pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan sumber lain yang sah dengan target total sejumlah Rp24.129.013.356.000,00 terealisasi sejumlah Rp24.167.935.634.127,00 atau 100,16%, mengalami penurunan sejumlah Rp2.465.064.451.836,00 atau 9,26% dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Komponen pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah ditargetkan Rp16.141.754.406.000,00 terealisasi sejumlah Rp16.264.618.853.852,00 atau 100,76%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.569.143.955.690,00 atau 10,68% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:
   - Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp13.754.458.219.000,00 terealisasi Rp13.484.851.151.740,00 atau 98,04%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.766.472.831.235,00 atau 15,07% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021;
   - Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp109.285.847.000,00 terealisasi Rp115.158.014.199,00 atau 105,37%, mengalami kenaikan sejumlah Rp23.523.744.994,00 atau 25,67% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021;
   - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp546.716.226.000,00 terealisasi Rp546.717.104.899,00 atau 100,00%, mengalami kenaikan sejumlah Rp38.453.227.928,00 atau 7,57% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021;
   - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp1.731.294.114.000,00 terealisasi Rp2.177.892.583.014,00 atau 122,33%, mengalami penurunan Rp259.305.848.467,00 atau 10,91% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021.



	Pendapatan Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Anggaran	13.754.458.219.000	109.285.847.000	546.716.226.000	1.731.294.114.000
Realisasi	13.484.851.151.740	115.158.014.199	546.717.104.899	2.117.892.583.014

Gambar 3.3
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022

Hampir semua Pendapatan Asli Daerah mencapai target di tahun ini. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 mencapai 100,76%. Pendapatan Pajak Daerah tercapai 98,04%. Walau Pajak Daerah tidak melampaui target, namun mengalami kenaikan 15,07% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 yaitu sejumlah Rp1.766.472.831.235,00. Penyumbang belum tercapainya target adalah Pajak Kendaraan Bermotor (98,39%) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (83,27%). Selain Pajak Daerah, komponen Pendapatan Asli Daerah lainnya mencapai target, seperti Retribusi Daerah tercapai 105,37% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan 25,67%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tercapai 100% mengalami kenaikan 7,57% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tercapai 122,33% walau mengalami penurunan 10,90% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Penurunan pada Lain-lain Pendapatan Asli Derah yang Sah di dominasi pada pendapatan Rumah Sakit Daerah, walaupun tercapai dari target namun secara jumlah mengalami penurunan karena sudah berkurangnya klaim atas pelayanan pasien Covid-19.

b. Pendapatan Transfer ditargetkan Rp7.894.603.950.000,00 terealisasi Rp7.810.882.578.787,00 atau 98,94%, mengalami penurunan sejumlah Rp4.060.913.757.267,00 atau 34,21% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021 terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan ditargetkan sejumlah Rp7.833.251.450.000,00 terealisasi Rp7.749.530.078.787,00 atau 98,93%, mengalami penurunan sejumlah Rp4.053.555.652.267,00 atau 34,34% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas:
  1 Dana Bagi Hasil dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp837.981.204.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil sejumlah Rp928.700.713.880,00 atau 110,83%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sejumlah Rp107.144.916.554,00 atau 10,34%.
  2 Dana Alokasi Umum dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp3.435.721.631.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum sejumlah Rp3.435.718.090.405,00 atau 100%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami kenaikan sejumlah Rp2.739.231.405,00 atau 0,08%.
  3 Dana Alokasi Khusus (Fisik) dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp424.152.663.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (Fisik) sejumlah

Rp371.734.785.185,00 atau 87,64%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sejumlah Rp30.150.782.213,00 atau 7,50%.

4 Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) dalam APBD Perubahan ditargetkan sejumlah Rp3.135.395.952.000,00. Realisasi Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) sejumlah Rp3.013.376.489.317,00 atau 96,11%, apabila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sejumlah Rp3.918.999.184.905,00 atau 56,53%.

Penurunan pendapatan transfer terjadi karena adanya perubahan metode pencatatan atas DAK non fisik pendidikan (BOS) untuk satuan pendidikan dasar kewenangan kabupaten/kota tidak lagi dicatat oleh Pemerintah Provinsi, selain itu terdapat beberapa pekerjaan DAK fisik tidak sesuai jadwal sehingga syarat salur tidak terpenuhi. Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan untuk Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 38,88% dari total Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari:

a. Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp1.987.260.551.320,00 (65,95%);
b. Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.018.083.273.208,00 (33,79%);
c. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.839.876.900,00 (0,13%);
d. Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar Rp3.727.564.040,00 (0,12%);
e. Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp344.543.290,00 (0,01%);
f. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp120.680.559,00 (0,004%).

- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya ditargetkan sejumlah Rp61.352.500.000,00 terealisasi Rp61.352.500.000,00 atau 100%, mengalami penurunan sejumlah Rp7.358.105.000,00 atau 10,71% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Pendapatan ini berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dengan kriteria utama antara lain penyajian laporan keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, penyampaian Perda APBD secara tepat waktu, interkoneksi sistem keuangan serta penggunaan *e-budgeting* & *e-procurement.*

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp92.655.000.000,00 terealisasi Rp92.434.201.488,00 atau 99,76% dari target, mengalami kenaikan sejumlah Rp26.705.349.741,00 atau 40,63% apabila dibandingkan realisasi tahun 2021 terdiri dari:

- Pendapatan Hibah ditargetkan sejumlah Rp92.655.000.000,00 terealisasi Rp92.161.740.403,00 atau 99,47% mengalami kenaikan sejumlah Rp27.279.736.901,00 atau 42,05% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021;
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak ditargetkan terealisasi sebesar Rp272.461.085,00.

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan pendapatan antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:

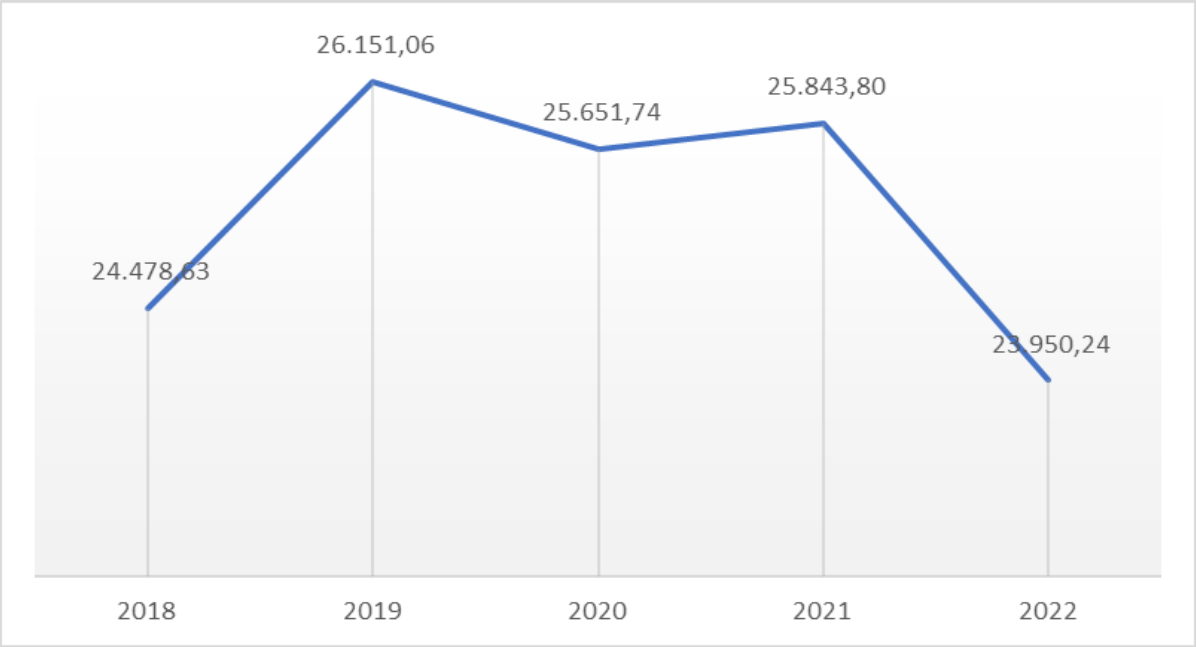
1. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu;
2. Belum optimalnya pengembangan sumber-sumber pendapatan lain sehingga masih bergantung pada penerimaan pajak daerah;
3. Belum optimalnya pengamanan fisik dan administrasi aset pemerintah daerah sehingga berpotensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan.

Solusi:

1. Menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui penambahan fasilitas dan titik pembayaran;
2. Peningkatan kinerja BUMD, revitalisasi dan optimalisasi pendayagunaan aset-aset milik Pemerintah yang belum digunakan dalam mendukung tugas dan fungsi pelayanan terhadap masyarakat serta menggali potensi yang mendukung penerimaan retribusi daerah;
3. Inventarisasi ulang atas aset tetap secara komprehensif dengan melibatkan tim apprasial independen guna pengamanan dan perolehan penghitungan nilai ekonomis aset, koordinasi lintas SKPD serta pemahaman pada tingkat Pengguna Barang dalam upaya pengamanan dan pemanfaatan aset serta mempromosikan aset melalui spanduk dan media massa.

3.1.2. Belanja Daerah

Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:

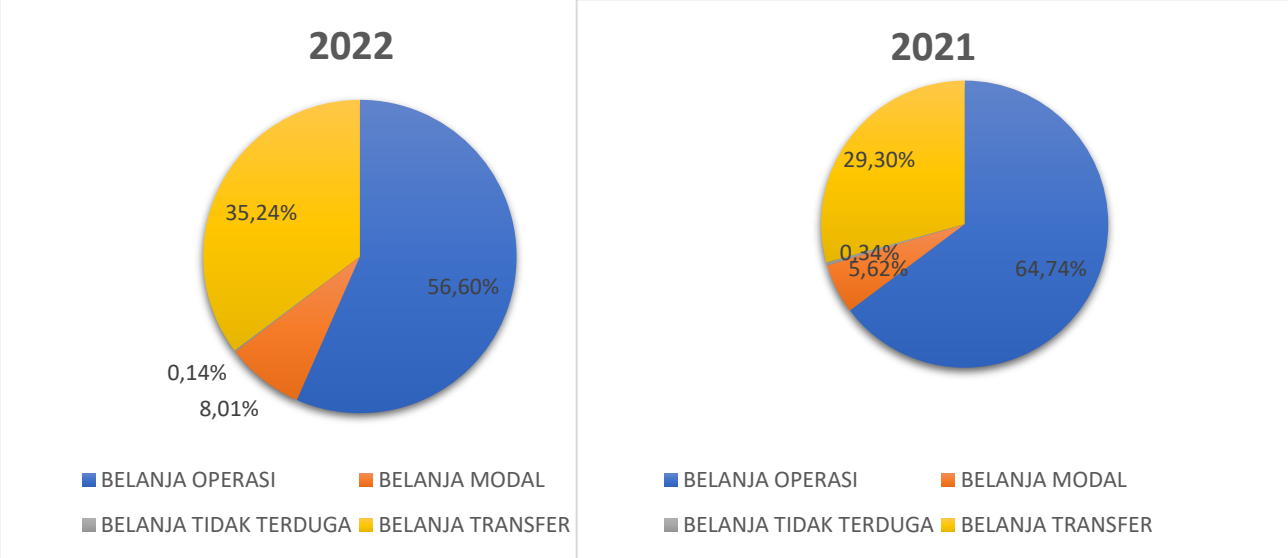


Gambar 3.4
Grafik tren realisasi total belanja daerah 2018 – 2022 (dalam Milyar)

Prioritas belanja daerah tahun 2022 diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat, penanganan masalah sosial, kemiskinan dan pengangguran, percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional dan sinergitas pembangunan antar wilayah. Beberapa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan serta penyesuaian penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah dan bantalan atas dampak inflasi akibat kenaikan harga BBM dan kelangkaan produk dampak dari isu global. Untuk menjaga tingkat inflasi, selain menggunakan belanja bantuan sosial sebagai respon dalam menjaga daya beli konsumen pada tahun ini mulai dilakukan intervensi melalui belanja subsidi marjin untuk menjaga harga jual komoditas pangan.

Beberapa penyesuaian dilakukan dengan memperhatikan perubahan peraturan yang berlaku, seperti kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan serta penyesuaian penggunaan dana transfer untuk dukungan program pemulihan ekonomi daerah, dukungan pendanaan belanja kesehatan maupun bantalan atas dampak inflasi karena kenaikan BBM. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

a. Belanja Operasi tahun anggaran 2022 sebesar 56,60% dari total belanja daerah, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan Anggaran 2021 sebesar 64,74%;
b. Belanja Modal tahun anggaran 2022 sebesar 8,01% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2021 sebesar 5,62%;
c. Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2022 sebesar 0,14% dari total belanja daerah, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan Anggaran 2021 sebesar 0,34%;
d. Belanja Transfer tahun anggaran 2022 sebesar 35,24% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan Anggaran 2021 sebesar 29,30%.

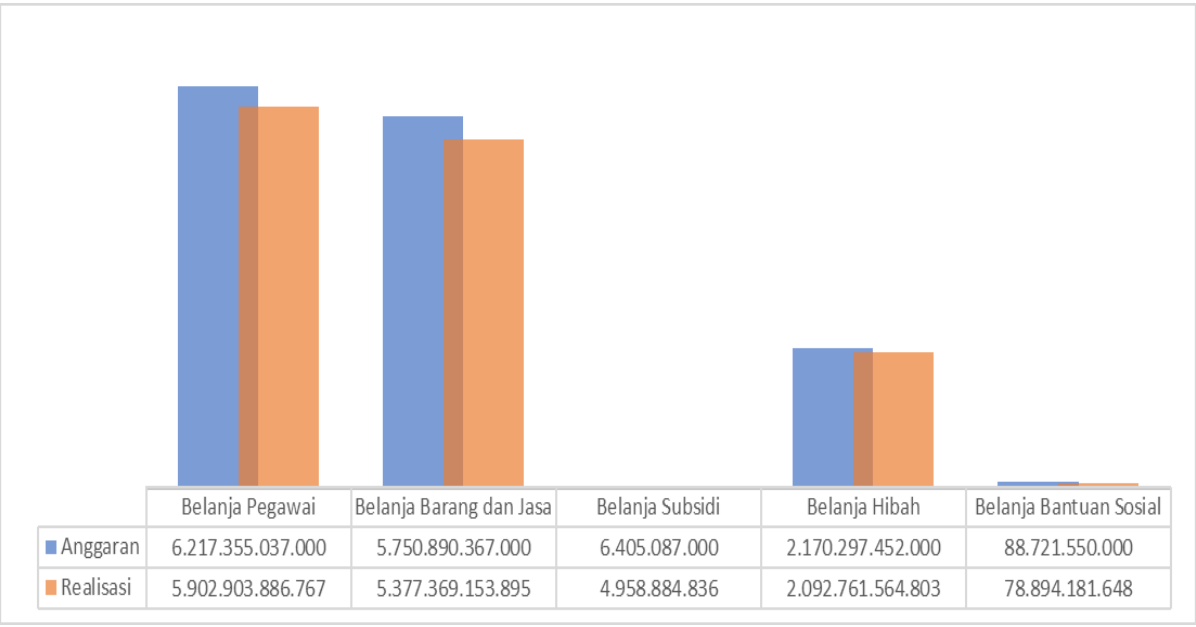


Gambar 3.5
Persandingan Persentase Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022 dengan 2021

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sejumlah Rp25.147.706.241.000,00 terealisasi sejumlah Rp23.950.240.497.405,00 atau 95,24% mengalami penurunan sejumlah Rp1.893.559.696.429,00 atau 7,33% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sejumlah Rp25.843.800.193.834,00. Komponen Belanja Daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sejumlah Rp14.233.669.493.000,00 terealisasi sejumlah Rp13.456.887.671.949,00 atau 94,54% mengalami penurunan sejumlah Rp3.369.690.159.521,00 atau 20,03% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sejumlah Rp16.826.577.831.470,00 terdiri dari:
   - Belanja Pegawai dianggarkan Rp6.217.355.037.000,00 terealisasi sejumlah Rp5.902.903.886.767,00 atau 94,94%, mengalami kenaikan sejumlah Rp216.978.631.747,00 atau 3,82% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021;

- Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp5.750.890.367.000,00. Terealisasi sejumlah Rp5.377.369.153.895,00 atau 93,50%, mengalami kenaikan sejumlah Rp31.969.699.119,00 atau 0,60% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021;
- Belanja Subsidi dianggarkan sejumlah Rp6.405.087.000,00. Terealisasi sejumlah Rp4.958.884.836,00 atau 77,42%, mengalami kenaikan sejumlah Rp4.868.402.670,00 apabila dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2021;
- Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp 2.170.297.452.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.092.761.564.803,00 atau 96,43% mengalami penurunan sejumlah Rp3.636.220.819.515,00 atau 63,47% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021;
- Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp 88.721.550.000,00, terealisasi sejumlah Rp78.894.181.648,00 atau 88,92%, mengalami kenaikan sejumlah Rp12.713.926.458,00 atau 19,21% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021.



	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
Anggaran	6.217.355.037.000	5.750.890.367.000	6.405.087.000	2.170.297.452.000	88.721.550.000
Realisasi	5.902.903.886.767	5.377.369.153.895	4.958.884.836	2.092.761.564.803	78.894.181.648

Gambar 3.6
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022

b. Anggaran belanja modal untuk tahun anggaran 2022 terdiri dari belanja modal pengadaan tanah sebesar Rp49.037.321.000,00 atau 2,43%; belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp904.691.628.000,00 atau 44,89%; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp446.596.836.000,00 atau 22,16%; belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp507.655.838.000,00 atau 25,19%; dan belanja modal aset tetap lainnya sebesar

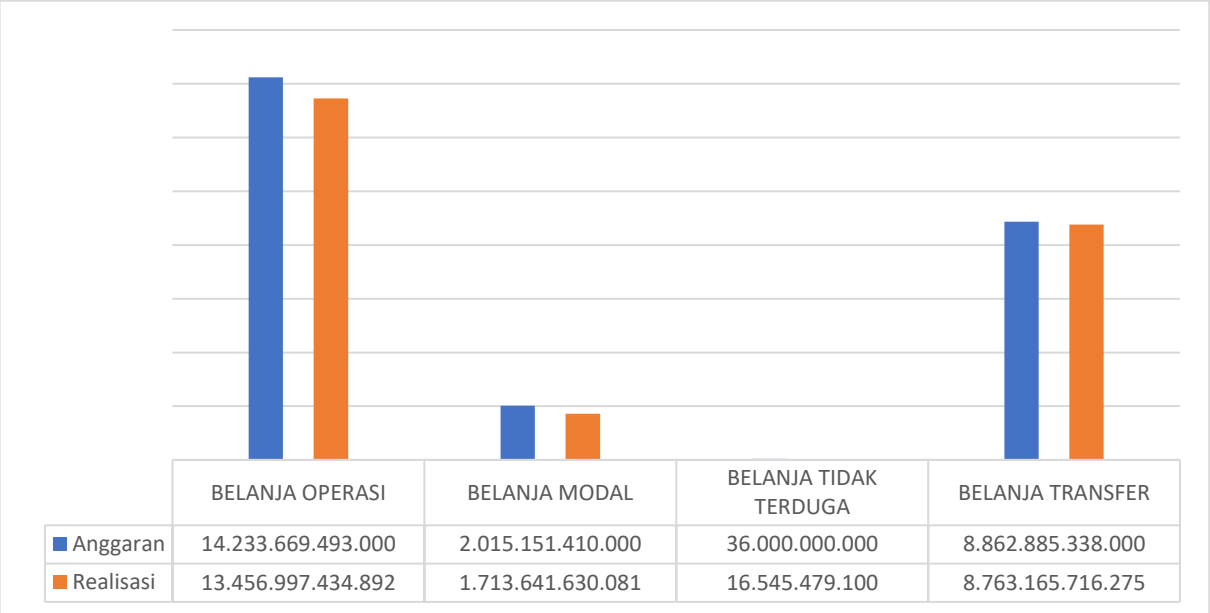
Rp107.169.787.000,00 atau 5,32%. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.713.641.630.081,00 atau 85,04%, mengalami kenaikan sejumlah Rp266.021.218.836,00 atau 18,38% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.447.620.411.245,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2021 yaitu:

a. Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2022 sebesar Rp17.346.322.716,00 atau 35,37% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp79.135.275.975,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.788.953.259,00 atau 78.08%;
b. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2022 sebesar Rp767.027.589.289,00 atau 84,78% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp578.353.949.251,00 mengalami kenaikan sebesar Rp188.673.640.038,00 atau 32,62%;
c. Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2022 sebesar Rp359.726.308.741,00 atau 80,55% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp330.679.148.402,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.047.160.339,00 atau 8,78%;
d. Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2022 sebesar Rp475.441.543.110,00 atau 93,65% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp351.328.654.582,00 mengalami kenaikan sebesar Rp124.112.888.528,00 atau 35,33%;
e. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2022 sebesar Rp94.099.866.225,00 atau 87,80% bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp108.123.383.035,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.023.516.810,00 atau 12,97%.

c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sejumlah Rp36.000.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp16.545.479.100,00 atau 45,96%, mengalami penurunan sejumlah Rp55.757.825.900,00 atau 77,12% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang digunakan untuk penanganan bencana di Kabupaten Tegal, Cilacap dan Pati sebesar Rp1.495.000.000,00 dan sebagai respon untuk bantalan inflasi atas dampak kenaikan BBM (perlindungan sosial) sebesar Rp15.050.479.100,00 meliputi :

a. Bantuan Sosial uang distribusi hasil produksi pangan dan selisih harga BBM subsidi proses penggilingan padi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan terealisasi sejumlah Rp3.587.083.200,00;
b. Bantuan Sosial uang selisih harga BBM subsidi nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sejumlah Rp4.788.199.900,00;
c. Bantuan Sosial uang untuk IKM Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sejumlah Rp802.868.000,00;
d. Bantuan Sosial uang bagi pelaku usaha tranportasi wisata lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terealisasi sejumlah Rp792.292.000,00;
e. Bantuan Sosial uang pembelian bahan baku pangan dan bahan produksi pangan olahan produksi peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sejumlah Rp560.000.000,00; dan
f. Bantuan Sosial uang kepada pekerja transportasi angkutan AKDP, AJDP dan Taksi serta transportasi *driver* angkutan online yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terealisasi sejumlah Rp4.589.036.000,00

d. Belanja Transfer dianggarkan sejumlah Rp8.862.885.338.000,00 terealisasi sejumlah Rp8.763.165.716.275,00 atau 98,87%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.265.867.070.156,00 atau 16,88% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021, terdiri dari:
   - Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp6.123.468.838.000,00 terealisasi sejumlah Rp6.085.808.822.482,00 atau 99,38%, mengalami kenaikan sejumlah Rp350.255.789.129,00 atau 6,11% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021;
   - Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sejumlah Rp2.739.416.500.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.677.356.893.793,00 atau 97,73%, mengalami kenaikan sejumlah Rp915.611.281.027,00 atau 51,97% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021. Belanja ini terdiri dari:
     a. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp862.666.000.000,00 terealisasi 93,31% atau Rp804.934.393.793,00;
     b. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.876.750.500.000,00 terealisasi 99,77% atau Rp1.872.422.500.000,00.



	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
Anggaran	14.233.669.493.000	2.015.151.410.000	36.000.000.000	8.862.885.338.000
Realisasi	13.456.997.434.892	1.713.641.630.081	16.545.479.100	8.763.165.716.275

Gambar 3.7
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Adapun permasalahan yang dihadapi dan solusi dalam pengelolaan belanja antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Pembayaran kontraktual kegiatan fisik yang menumpuk pada saat selesainya pekerjaan dan saat akhir tahun anggaran.
2. Terjadinya gagal lelang, sehingga harus mengulang proses lelang yang mengakibatkan waktu pelaksanaan kegiatan tidak mencukupi/tidak bisa dilaksanakan.
3. Kurang tertibnya pencatatan persediaan pada SKPD yang bersumber dari belanja barang dan jasa.
4. Kurangnya pemahaman pengelola keuangan di Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) atas pelaksanaan dan mekanisme pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Solusi:

1. Meningkatkan disiplin pelaksanaan anggaran dan menghimbau penyedia mengambil hak pembayaran *termijn* sesuai perjanjian.

2. Melaksanakan proses pengadaan barang/jasa lebih awal baik secara kontraktual maupun swakelola sesuai kebutuhan.
3. Menyiapkan aplikasi Sistem Informasi Persediaan dan melakukan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan maupun barang sampai pada UPT/Balai.
4. Melakukan penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis khusus Satuan Pendidikan Menengah (SMA/SMK) serta Satuan Pendidikan Khusus (SLB) serta melakukan *desk* barang milik daerah antara pengurus barang dan bendahara satuan pendidikan.

3.1.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dalam struktur APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah, terdapat juga Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, sedangkan Pengeluaran pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022 diarahkan untuk penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan dalam rangka Pilkada Gubernur.

Target Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp1.909.692.885.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.909.773.865.813,00 atau 100,00%, mengalami kenaikan sejumlah Rp1.048.280.873.188,00 atau 121,68% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021, sedangkan Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Rp891.000.000.000,00 dengan telah terealisasi Rp891.000.000.000,00 atau 100%.

SiLPA dikarenakan adanya PAD yang melebihi target sejumlah Rp122.864.447.852,00; tidak tercapainya Pendapatan Transfer sejumlah Rp83.721.371.213,00; tidak tercapainya Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp220.798.512,00; penghematan belanja sejumlah Rp1.197.355.980.652,00; serta Pelampauan Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp80.980.813,00.

3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing-masing SKPD tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KEBUDAYAAN

1.1. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Dan Bidang Kebudayaan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebesar Rp7.574.140.846.000,00 realisasi sebesar Rp7.218.366.499.874,00 atau 95,3% yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**5.172.665.377.000,00**	**4.898.632.695.491,00**	**94,70**	**99,99**
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.095.615.483.000,00	1.051.375.168.147,00	95,96	99,99
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.013.572.891.000,00	3.787.853.735.876,00	94,38	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	415.000.000,00	394.429.877,00	95,04	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500.000.000.00	485.541.142,00	97,11	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.087.715.000,00	10.828.695.149,00	97,66	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.365.200.000,00	6.585.691.165,00	89,42	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.410.244.000,00	32.632.975.161,00	92,16	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.698.844.000,00	8.476.458.974,00	97,44	100
2	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**2.370.204.714.000,00**	**2.289.778.786.631,00**	**96,61**	**99,98**
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	1.038.260.561.000,00	1.006.378.748.556,00	96,93	99,99
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	1.249.948.428.000,00	1.204.245.643.406,00	96,34	99,99
	Pengelolaan Pendidikan Khusus	81.995.725.000,00	79.154.394.669,00	96,53	99,97
3	**Program Pengembangan Kurikulum**	**1.508.310.000,00**	**1.457.643.647,00**	**96,64**	**100**
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	1.341.900.000,00	1.299.339.900,00	96,83	100
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	166.410.000,00	158.303.747,00	95,13	100
4	**Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**	**272.945.000,00**	**267.805.000,00**	**98,12**	**100**
	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	272.945.000,00	267.805.000,00	98,12	100
5	**Program Pengendalian Perizinan Pendidikan**	**502.000.000,00**	**457.539.950,00**	**91,14**	**100**
	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	452.000.000,00	407.545.000,00	90,16	100
	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	50.000.000,00	49.994.950,00	99,99	100
6	**Program Pengembangan Kebudayaan**	**18.677.500.000,00**	**17.753.016.672,00**	**95,05**	**100**
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000,00	1.084.064.000,00	94,27	100
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	16.027.500.000,00	15.469.933.672,00	96,52	100
	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.199.019.000,00	79,93	100
7	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	**3.680.000.000,00**	**3.541.350.000,00**	**96,23**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.680.000.000,00	3.541.350.000,00	96,23	100
8	**Program Pembinaan Sejarah**	**3.000.000.000,00**	**2.960.066.000,00**	**98,67**	**100**
	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	3.000.000.000,00	2.960.066.000,00	98,67	100
9	**Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya**	**755.000.000,00**	**708.784.000,00**	**93,88**	**100**
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	225.000.000,00	223.866.000,00	99.50	100
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	530.000.000,00	484.918.000,00	91,49	100
10	**Program Pengelolaan Permuseuman**	**2.875.000.000,00**	**2.808.812.483,00**	**97,70**	**100**
	Pengelolaan Museum Provinsi	2.875.000.000,00	2.808.812.483,00	97,70	100
	JUMLAH	**7.574.140.846.000,00**	**7.218.366.499.874,00**	**95,30**	**99,99**

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Bidang Kesehatan sebesar Rp3.789.830.012.000,00 realisasi sebesar Rp3.320.134.272.941,00 atau 87,61% yang dilaksanakaan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

2.1 DINAS KESEHATAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp677.130.714.000,00 realisasi sebesar Rp662.666.363.780,00 atau 97,86% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**137.554.343.000,00**	**134.689.909.265,00**	**97,92**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	705.184.000,00	657.078.925,00	93,18	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.059.325.000,00	97.728.187.382,00	98,66	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	440.000.000,00	432.402.055,00	98,27	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	655.000.000,00	618.114.653,00	94,37	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.001.259.000,00	9.756.718.157,00	97,55	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.284.750.000,00	2.095.438.512,00	91,71	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.169.262.000,00	15.244.729.830,00	94,28	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.239.563.000,00	8.157.239.751,00	99,00	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**532.990.731.000,00**	**521.837.575.312,00**	**97,91**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	38.428.404.000,00	38.173.713.578,00	99,34	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	494.037.627.000,00	483.164.490.626,00	97,80	100
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	524.700.000,00	499.371.108,00	95,17	100
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**2.284.634.000,00**	**2.133.738.395,00**	**93,40**	100
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.284.634.000,00	2.133.738.395,00	93,40	100
4	**Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman**	**1.800.000.000,00**	**1.556.062.746,00**	**86,45**	100
	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	1.700.000.000,00	1.481.130.714,00	87,13	100
	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	100.000.000,00	74.932.032,00	74,93	100
5	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**2.501.006.000,00**	**2.449.078.062,00**	**97,92**	100
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1.451.006.000,00	1.421.809.482,00	97,99	100
	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	1.050.000.000,00	1.027.268.580,00	97,84	100
	JUMLAH	**677.130.714.000,00**	**662.666.363.780,00**	**97,86**	**100**

2.2. RSUD Dr. MOEWARDI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada Rsud Dr. Moewardi sebesar Rp1.470.752.696.000,00 realisasi sebesar Rp1.309.534.378.738,00 atau 89,04% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**1.453.260.005.000,00**	**1.292.081.520.078,00**	**88,91**	**96,55**
	Administrasi Keuangan	183.625.466.000,00	182.250.967.279,00	99,25	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.269.634.539.000,00	1.109.830.552.799,00	87,41	96,05
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**17.442.337.000,00**	**17.404.058.660,00**	**99,78**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	17.442.337.000,00	17.404.058.660,00	99,78	100
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**50.354.000,00**	**48.800.000,00**	**96,91**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	50.354.000,00	48.800.000,00	96,91	100
	JUMLAH	**1.470.752.696.000,00**	**1.309.534.378.738,00**	**89,04**	**96,59**

2.3. RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp760.224.176.000,00 realisasi sebesar Rp614.685.334.737,00 atau 80,86%yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**757.624.176.000,00**	**612.268.654.024,00**	**80,81**	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	114.377.062.000,00	114.377.058.888,00	100	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	643.247.114.000,00	497.891.595.136,00	77,40	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**2.000.000.000,00**	**1.847.815.000,00**	**92,39**	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.000.000.000,00	1.847.815.000,00	92,39	100
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**500.000.000,00**	**468.916.774,00**	**93,78**	100
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia	500.000.000,00	468.916.774,00	93,78	100
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**100.000.000,00**	**99.948.939,00**	**99,95**	100
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas	100.000.000,00	99.948.939,00	99,95	100
	JUMLAH	**760.224.176.000,00**	**614.685.334.737,00**	**80,86**	**100**

2.4. RSUD TUGUREJO SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp366.800.146.000,00 realisasi sebesar Rp289.803.437.397,00 atau 79,01% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**345.688.664.000,00**	**268.896.119.259,00**	**77,79**	97,94
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93.979.384.000,00	92.870.080.176,00	98,82	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	251.709.280,000,00	176.026.039.083,00	69,93	97,17
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**20.861.482.000,00**	**20.658.492.262,00**	**99,03**	100
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	**20.344.622.000,00**	**20.141.730.134,00**	**99,00**	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	516.860.000,00	516.762.128,00	99,98	100
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**250.000.000,00**	**248.825.876,00**	**99,53**	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	250.000.000,00	248.825.876,00	99,53	100
	JUMLAH	366.800.146.000,00	289.803.437.397,00	**79,01**	100

2.5. RSUD KELET DONOREJO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSUD Kelet Donorejo sebesar Rp103.237.919.000,00 realisasi sebesar Rp98.718.535.858,00 atau 95,62% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**94.126.963.000,00**	**90.351.110.885,00**	**95,99**	**100**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	33.171.170,000,00	32.683.322.973,00	98,53	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	60.955.793.000,00	57.667.787.912,00	94,61	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**8.657.846.000,00**	**7.916.167.926,00**	**91,43**	**95,26**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	7.956.746.000,00	7.232.875.160,00	90,90	94,85
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	81.800.000,00	68.574.710,00	83,83	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	619.300.000,00	614.718.056,00	99,26	100
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**205.370.000,00**	**205.237.900,00**	**99,94**	**100**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	205.370.000,00	205.237.900,00	99,94	100
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**247.740.000,00**	**246.019.147,00**	**99,31**	**100**
	Peningkatan Upaya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	247.740.000,00	246.019.147,00	99,31	100
	JUMLAH	103.237.919.000,00	98.718.535.858,00	**95,62**	**99,6**

2.6. RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp129.823.465.000,00 realisasi sebesar Rp117.229.058.098,00 atau 90,3% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**125.753.465.000,00**	**113.259.240.713,00**	**90,06**	**100**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	58.660.009.000,00	58.324.983.220,00	99,43	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	67.093.456.000,00	54.934.257.493,00	81,88	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**3.871.656.000,00**	**3.772.653.785,00**	**97,44**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	3.500.000.000,00	3.497.102.664,00	99,92	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	371.656.000,00	275.551.121,00	74,14	100
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**198.344.000,00**	**197.163.600,00**	**99,40**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	198.344.000,00	197.163.600,00	99,40	100
	JUMLAH	**129.823.465.000,00**	**117.229.058.098,00**	**90,3**	**100**

2.7. RSJD SURAKARTA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSJD Surakarta sebesar Rp170.008.824.000,00 realisasi sebesar Rp138.467.596.714,00 atau 81,45% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**145.683.824.000,00**	**117.515.115.232,00**	**80,66**	**100**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.165.779.000,00	59.096.158.163,00	98,22	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	85.518.045.000,00	58.418.957.069.00	68,31	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**23.877.640.000,00**	**20.720.244.630,00**	**86,78**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	23.551.000.000,00	20.394.495.520,00	86,60	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	326.640.000,00	325.749.110,00	99,73	100
3	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**322.360.000,00**	**122.001.730,00**	**37,85**	**63,63**
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat	322.360.000,00	122.001.730,00	37,85	63,63
4	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**125.000.000,00**	**110.235.122,00**	**88,19**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	125.000.000,00	110.235.122.00	88,19	100
	JUMLAH	**170.008.824.000,00**	**138.467.596.714,00**	**81,45**	**99,93**

2.8 RSJD Dr. RM SOEDJARWADI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp111.852.072.000,00 realisasi sebesar Rp89.029.567.619,00 atau 79,6% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**107.166.552.000,00**	**84.381.373.031,00**	**78,74**	**96,55**
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.672.952.000,00	40.845.058.256,00	98,01	100
	Peningkatan Pelayanan BLUD	65.493.600.000,00	43.536.314.775,00	66,47	100
2	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**4.487.835.000,00**	**4.451.109.138,00**	**99,18**	**100**
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	4.000.000.000,00	3.967.559.778,00	99,19	100
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	487.835.000,00	483.549.360,00	99,12	100
3	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**197.685.000,00**	**197.085.450,00**	**99,70**	**100**
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	197.685.000,00	197.085.450,00	99,70	100
	JUMLAH	111.852.072.000**,00**	89.029.567.619**,00**	**79,6**	**96,69**

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.028.484.117.000,00 realisasi sebesar Rp956.549.322.106,00 atau 93,01% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

3.1. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp791.634.584.000,00 realisasi sebesar Rp734.576.375.780,00 atau 92,79% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**109.107.516.000,00**	**102.715.847.978,00**	**94,14**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	560.000.000,00	546.971.552,00	97,67	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79.589.740.000,00	74.901.306.962,00	94,11	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	120.000.000,00	113.816.000,00	94,85	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	13.100.000,00	26,20	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.722.803.000,00	3.536.512.625,00	95,00	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.507.835.000,00	10.161.712.233,00	96,71	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.140.921.000,00	8.294.949.236,00	90,75	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.416.217.000,00	5.147.479.370,00	95,04	100
2	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**24.191.069.000,00**	**24.043.344.226.00**	**99,39**	**100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	24.191.069.000,00	24.043.344.226,00	99,39	100
3	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**730.000.000,00**	**717.053.847,00**	**98,23**	**100**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	730.000.000,00	717.053.847,00	98,23	100
4	**Program Penataan Bangunan Gedung**	**28.353.480.000,00**	**28.232.612.133,00**	**99,57**	**100**
	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	28.353.480.000,00	28.232.612.133,00	99,57	100
5	**Program Penataan Bangunan Lingkungannya**	**801.480.000,00**	**757.691.099,00**	**94,54**	**100**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	801.480.000,00	757.691.099,00	94,54	100
6	**Program Penyelenggaraan Jalan**	**626.648.439.000,00**	**576.507.503.213,00**	**92,00**	**100**
	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	626.648.439.000,00	576.507.503.213,00	92,00	100
7	**Program Pengembangan Jasa Konstruksi**	**1.802.600.000,00**	**1.602.323.284,00**	**88,89**	**100**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	1.414.600.000,00	1.236.646.102,00	87,42	100
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	388.000.000,00	365.677.182,00	94,25	100
	JUMLAH	**791.634.584.000,00**	**734.576.375.780,00**	**92,79**	**100**

3.2. DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp236.849.533.000,00 realisasi sebesar Rp221.972.946.326,00 atau 93,72% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**88.197.308.000,00**	**86.637.460.392,00**	**98,23**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	600.000.000,00	543.070.262,00	90,51	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	66.842.703.000,00	65.842.949.439,00	98,50	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	194.000.000,00	174.713.395,00	90,06	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	250.000.000,00	235.657.855,00	94,26	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.356.322.000,00	1.261.145.403,00	92,98	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.253.800.000,00	11.212.437.000,00	99,63	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.095.547.000,00	3.826.356.951,00	93,43	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.604.936.000,00	3.541.130.087,00	98,23	100
2	**Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**	**144.209.801.000,00**	**131.554.685.628,00**	**91,22**	**97,96**
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	87.228.176.000,00	82.150.629.531,00	94,18	99,59
	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	56.981.625.000,00	49.404.056.097,00	86,70	97,11
3	**Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**	**4.442.424.000,00**	**3.780.800.306,00**	**85,11**	**100**
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi	1.909.440.000,00	1.586.035.669,00	83,06	100
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	889.547.000,00	580.183.928,00	65,22	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	630.197.000,00	608.830.447,00	96,61	100
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi	1.013.240.000,00	1.005.750.262,00	99,26	100
	JUMLAH	**236.849.533.000,00**	**221.972.946.326,00**	**93,72**	**97,27**

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

4.1. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp44.538.221.000,00 realisasi sebesar Rp44.015.656.501,00 atau 98,83% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah**	**17.753.221.000,00**	**17.414.231.257,00**	**98,09**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	860.000.000,00	845.516.844,00	98,32	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.371.221.000,00	12.272.363.274,00	99,20	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	150.000.000,00	146.648.900,00	97,77	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	45.442.640,00	90,89	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.278.953.000,00	1.276.862.752,00	99,84	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	864.881.000,00	858.426.450,00	99,25	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.488.166.000,00	1.283.729.697,00	86,26	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690.000.000,00	685.240.700,00	99,31	100
2	**Program Pengembangan Perumahan**	**19.825.000.000,00**	**6.791.534.829,00**	**34,26**	**100**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	2.365.000.000,00	2.314.209.583,00	97,85	100
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	175.000.000,00	172.827.953,00	98,76	100
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5.064.380.000,00	5.061.824.605,00	99,95	100
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	12.220.620.000,00	12.214.672.688,00	99,95	100
3	**Program Kawasan Permukiman**	**610.000.000,00**	**599.919.551,00**	**98,35**	**100**
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	385.000.000,00	375.521.499,00	97,54	100
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	225.000.000,00	224.398.052,00	99,73	100
4	**Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**	**3.300.000.000,00**	**3.208.951.515,00**	**97,24**	**100**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	3.300.000.000,00	3.208.951.515,00	97,24	100
5	**Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	**1.500.000.000,00**	**1.482.223.809,00**	**98,81**	**100**
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	1.500.000.000,00	1.482.223.809,00	98.81	100
6	**Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**	**550.000.000,00**	**549.915.416,00**	**99,98**	**100**
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	550.000.000,00	549.915.416,00	99,98	100
7	**Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan**	**500.000.000,00**	**499.996.916,00**	**100**	**100**
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	499.996.916,00	100	100
8	**Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee**	**500.000.000,00**	**496.883.208,00**	**99,38**	**100**
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	500.000.000,00	496.883.208,00	99,38	100
	JUMLAH	**44.538.221.000,00**	**44.015.656.501,00**	**98,83**	**100**

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp32.516.706.000,00 realisasi sebesar Rp31.752.105.891,00 atau 97,65% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

5.1. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp16.353.211.000,00 realisasi sebesar Rp16.137.557.154,00 atau 98,68% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**14.436.211.000,00**	**14.223.129.519,00**	**98,52**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.308.000,00	61.037.770,00	99,56	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.133.105.000,00	9.972.115.432,00	98,41	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	139.100.000,00	138.347.328,00	99,46	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	384.500.000,00	383.411.905,00	99,72	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	573.500.000,00	573.161.909,00	99,94	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.566.198.000,00	2.528.042.093,00	98,51	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	578.500.000,00	567.013.082,00	98,01	100
2	**Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum**	**1.917.000.000,00**	**1.914.427.635,00**	**99,87**	**100**
	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.476.000.000,00	1.473.751.632,00	99,85	100
	Penegakan Peraturan Daerah Peraturan Gubernur	441.000.000,00	440.676.003,00	99,93	100
	JUMLAH	**16.353.211.000,00**	**16.137.557.154,00**	**98,68**	**100**

5.2. SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp16.163.495.000,00 realisasi sebesar Rp15.614.548.737,00 atau 96,6% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**11.428.495.000,00**	**11.140.124.513,00**	**97,48**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	236.354.804,00	94,54	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.263.495.000,00	6.237.457.468,00	99,58	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100.000.000,00	99.697.880,00	99,70	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.206.000.000,00	1.102.682.450,00	91,43	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.789.000.000,00	2.653.214.345,00	95,13	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.000.000,00	800.717.566,00	98,85	100
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**4.735.000.000,00**	**4.474.424.224,00**	**94,50**	**100**
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	1.250,000.000,00	1.214.713.402,00	97,18	100
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.385.000.000,00	2.202.326.230,00	92,34	100
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	950.000.000,00	907.900.592,00	95,57	100
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	150.000.000,00	149.484.000,00	99,66	100
	JUMLAH	**16.163.495.000,00**	**15.614.548.737,00**	**96,6**	**100**

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

6.1. DINAS SOSIAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp354.959.157.000,00 realisasi sebesar Rp333.316.158.223,00 atau 93,9% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**135.623.639.000,00**	**121.238.940.198,00**	**89,39**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.000.000,00	926.621.344,00	95,04	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	108.596.387.000,00	94.641.223.444,00	87,15	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	93.650.000,00	81.854.500,00	87,40	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.562.778.000,00	4.519.945.553,00	99,06	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	684.750.000,00	675.595.000,00	98,66	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.198.007.000,00	15.928.604.234,00	98,34	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.513.067.000,00	4.465.096.123,00	98,94	100
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.000.000,00	926.621.344,00	95,04	100
2	**Program Pemberdayaan Sosial**	**7.079.750.000,00**	**7.043.843.156,00**	**99,49**	**100**
	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	150.000.000,00	147.138.520,00	98,09	100
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	6.929.750.000,00	6.896.704.636,00	99,52	100
3	**Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan**	**100.000.000,00**	**88.282.000,00**	**88,28**	**100**
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	100.000.000,00	88.282.000,00	88,28	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
4	**Program Rehabilitasi Sosial**	**50.815.172.000,00**	**49.218.142.135,00**	**96,85**	**100**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	17.435.042.000,00	16.888.220.497,00	96,86	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	14.802.107.000,00	14.270.684.475,00	96,41	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	13.273.822.000,00	12.921.217.195,00	97,34	100
	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti	2.237.860.000,00	2.205.182.527,00	98,54	100
	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di Dalam Panti	3.066.341.000,00	2.932.837.441,00	95,65	100
5	**Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial**	**159.155.596.000,00**	**153.574.331.869,00**	**94,49**	**100**
	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	100
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	159.055.596.000,00	153.474.331.869,00	94,49	100
6	**Program Penanganan Bencana**	**1.700.000.000,00**	**1.668.895.664,00**	**98,17**	**100**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.700.000.000,00	1.668.895.664,00	98,17	100
7	**Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**	**485.000.000,00**	**483.723.201,00**	**99,74**	**100**
	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	485.000.000,00	483.723.201,00	99,74	100
	JUMLAH	**354.959.157.000,00**	**333.316.158.223,00**	**93,9**	**100**

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

7.1. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp99.020.993,000,00 realisasi sebesar Rp96.072.012.396,00 atau 97,02% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**80.948.063.000,00**	**78.658.327.388,00**	**97,17**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	987.776.000,00	951.338.784,00	96,31	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	64.874.298.000,00	62.898.194.799,00	96,95	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	121.698.000,00	112.784.572,00	92,68	100
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	78.000.000,00	77.787.176,00	99,73	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.682.680.000,00	3.603.652.115,00	97,85	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	353.095.000,00	346.738.660,00	98,20	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.890.730.000,00	7.772.151.373,00	98,50	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.934.786.000,00	2.870.679.909,00	97,82	100
2	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**361.812.000,00**	**358.218.610,00**	**99,01**	**100**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	361.812.000,00	358.218.610,00	99,01	100
3	**Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**10.380.841.000,00**	**9.944.001.002,00**	**95,79**	**100**
	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	9.350.242.000,00	8.954.710.020,00	95,77	100
	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	115.305.000,00	108.570.341,00	94,16	100
	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah	910.782.000,00	876.579.041,00	96,24	100
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	4.512.000,00	4.141.600,00	91,79	100
4	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**1.835.434.000,00**	**1.786.384.419,00**	**97,33**	**100**
	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.428.519.000,00	1.392.074.940,00	97,45	100
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	61.250.000,00	61.250.000,00	100,00	100
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi	315.705.000,00	305.670.939,00	96,82	100
	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	29.960.000,00	27.388.540,00	91,42	100
5	**Program Hubungan Industrial**	**2.197.319.000,00**	**2.102.784.578,00**	**95,70**	**100**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota	343.609.000,00	326.966.748,00	95,16	100
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.501.917.000,00	1.431.571.830,00	95,32	100
	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	351.793.000,00	344.246.000,00	97,85	100
6	**Program Pengawasan Ketenagakerjaan**	**3.002.524.000,00**	**2.927.622.699,00**	**97,51**	**100**
	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	3.002.524.000,00	2.927.622.699,00	97,51	100
7	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**295.000.000,00**	**294.673.700,00**	**99,89**	**100**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	295.000.000,00	294.673.700,00	99,89	100
	JUMLAH	**99.020.993.000,00**	**96.072.012.396,00**	**97,02**	**100**

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

8.1. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp20.748.444.000,00 realisasi sebesar Rp20.202.033.061,00 atau 97,37%yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**12.083.244.000,00**	**11.755.077.427,00**	**97,28**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	396.138.000,00	389.775.195,00	98,39	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.077.344.000,00	8.785.800.319,00	96,79	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	58.000.000,00	57.945.387,00	99,91	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	17.950.000,00	17.740.980,00	98,84	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	585.862.000,00	577.176.293,00	98,52	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.500.000,00	17.466.020,00	99,81	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.357.625.000,00	1.343.852.737,00	98,99	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	572.825.000,00	565.320.496,00	98,69	100
2	**Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**	**3.221.868.000,00**	**3.154.592.514,00**	**97,91**	**100**
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	220.000.000,00	218.433.486,00	99,29	100
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	3.001.868.000,00	2.936.159.028,00	97,81	100
3	**Program Perlindungan Perempuan**	**977.246.000,00**	**879.141.612,00**	**89,96**	**100**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	213.225.000,00	212.922.123,00	99,86	100
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	351.522.000,00	255.791.424,00	72,77	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	412.499.000,00	410.428.065,00	99,50	100
4	**Program Peningkatan Kualitas Keluarga**	**175.000.000,00**	**174.449.446,00**	**99,69**	**100**
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	50.000.000,00	49.481.206,00	98,96	100
	Penyedia Layanan bagi Keluarga dalam dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000,00	124.968.240,00	99,97	100
5	**Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**	**150.000.000,00**	**149.847.461,00**	**99,90**	**100**
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	150.000.000,00	149.847.461,00	99,90	100
6	**Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**	**1.634.132.000,00**	**1.634.001.033,00**	**99,99**	**100**
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	1.549.132.000,00	1.549.093.376,00	100,00	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	85.000.000,00	84.907.657,00	99,89	100
7	**Program Perlindungan Khusus Anak**	**752.053.000,00**	**704.444.272,00**	**93,67**	**100**
	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	125.225.000,00	124.825.412,00	99,68	100
	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	386.122.000,00	339.841.601,00	88,01	100
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	240.706.000,00	239.777.259,00	99,61	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
8	**Program Pengendalian Penduduk**	**275.000.000,00**	**274.077.635,00**	**99,66**	**100**
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	225.000.000,00	224.728.633,00	99,88	100
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	50.000.000,00	49.349.002,00	98,70	100
9	**Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**	**1.139.901.000,00**	**1.139.532.080,00**	**99,97**	**100**
	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.093.011.000,00	1.092.705.726,00	99,97	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	46.890.000,00	46.826.354.00	99,86	100
10	**Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)**	**340.000.000,00**	**336.869.581,00**	**99,08**	**100**
	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	150.000.000,00	149.460.141,00	99,64	100
	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	190.000.000,00	187.409.440,00	98,64	100
	JUMLAH	**20.748.444.000,00**	**20.202.033.061,00**	**97,37**	**100**

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

9.1. DINAS KETAHANAN PANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dialokasikan pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp43.528.909.000,00 realisasi sebesar Rp41.632.036.996,00 atau 95,64% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**18.207.617.000,00**	**17.890.048.349,00**	**98,26**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	628.800.000,00	624.438.934,00	99,31	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.512.327.000,00	13.417.710.147,00	99,30	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	176.000.000,00	172.801.153,00	98,18	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	225.900.000,00	224.647.120,00	99,45	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.277.450.000,00	1.259.033.870,00	98,56	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.217.000.000,00	1.058.455.625,00	86,97	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.170.140.000,00	1.132.961.500,00	96,82	100
2	**Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat**	**19.490.077.000,00**	**17.920.498.229,00**	**91,95**	**97,26**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	10.977.990.000,00	9.461.285.806,00	86,18	93,53
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	5.831.592.000,00	5.791.795.954,00	99,32	100
	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	2.680.495.000,00	2.667.416.469,00	99,51	100
3	**Program Penanganan Kerawanan Pangan**	**2.759.500.000,00**	**2.754.172.700,00**	**99,81**	**100**
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	2.759.500.000,00	2.754.172.700,00	99,81	100
4	**Program Pengawasan Keamanan Pangan**	**3.071.715.000,00**	**3.067.317.718,00**	**99,86**	**100**
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.071.715.000,00	3.067.317.718,00	99,86	100
	JUMLAH	**43.528.909.000,00**	**41.632.036.996,00**	**95,64**	**96,96**

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

10.1. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp.196.755.806.000,00 realisasi sebesar Rp.192.539.808.921,00 atau 97,86%yang terdiri dari 12 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**133.530.057.000,00**	**131.580.105.692,00**	**98,54**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	661.527.000,00	645.842.049,00	97,63	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	111.803.428.000,00	110.411.976.898,00	98,76	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	379.170,000,00	360.863.237.00	95,17	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50,000,000,00	49.120.500,00	98,24	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.073.103,000,00	2.997.049.029,00	97,53	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.358.537.000,00	6.327.810.474,00	99,52	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.551.562.000,00	5.316.304.567,00	95,76	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.652.730.000,00	5.471.138.938,00	96,79	100
2	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**814.600.000,00**	**804.037.833,00**	**98,70**	**100**
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	609.600.000,00	601.749.077,00	98,71	100
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	205.000.000,00	202.288.756,00	98,68	100
3	**Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**5.355.000.000,00**	**5.297.260.723,00**	**98,92**	**100**
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup	5.355.000.000,00	5.297.260.723,00	98,92	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
4	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**1.760.000.000,00**	**1.751.451.878,00**	**99,51**	**100**
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.760.000.000,00	1.751.451.878,00	99,51	100
5	**Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**895.000.000,00**	**889.684.515,00**	**99,41**	**100**
	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	895.000.000,00	889.684.515,00	99,41	100
6	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**3.777.795.000,00**	**3.617.489.249,00**	**95,76**	**100**
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	3.777.795.000,00	3.617.489.249,00	95,76	100
7	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**320.000.000,00**	**317.768.185,00**	**99,30**	**100**
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	320.000.000,00	317.768.185,00	99,30	100
8	**Program Pengelolaan Persampahan**	**2.016.415.000,00**	**1.392.948.183,00**	**69,08**	**100**
	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	2.016.415.000,00	1.392.948.183,00	69,08	100
9	**Program Pengelolaan Hutan**	**30.876.860.000,00**	**30.344.602.100,00**	**98,28**	**100**
	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	418.175.000,00	413.911.889,00	98,98	100
	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	25.134.355.000,00	24.767.779.412,00	98,54	100
	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi	951.580.000,00	903.961.679,00	95,00	100
	Pelaksanaan (HHBK) Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu	3.028.284.000,00	2.950.833.895,00	97,44	100
	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun	973.166.000,00	937.682.341,00	96,35	100
	Perbenihan Tanaman Hutan	371.300.000,00	370.432.884,00	99,77	100
10	**Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya**	**3.134.606.000,00**	**3.062.918.823,00**	**97,71**	**100**
	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	1.211.700.000,00	1.181.941.165,00	97,54	100
	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi	705.812.000,00	693.367.945,00	98,24	100
	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	1.217.094.000,00	1.187.609.713,00	97,58	100
11	**Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan**	**13.260.803.000,00**	**12.491.375.396,00**	**94,20**	**98,37**
	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	13.260.803.000,00	12.491.375.396,00	94,20	98,37
12	**Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)**	**1.014.670.000,00**	**990.166.344,00**	**97,59**	**100**
	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.014.670.000,00	990.166.344,00	97,59	100
	JUMLAH	**196.755.806.000,00**	**192.539.808.921,00**	**97,86**	**99,85**

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

11.1. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil sebesar Rp21.993.882.000,00 realisasi sebesar Rp21.754.478.653,00 atau 98,91% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**15.465.592.000,00**	**15.284.581.619,00**	**98,83**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	290,000,000,00	287.993.130,00	99,31	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.009.092.000,00	11.868.090.544,00	98,83	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	94.000,000,00	91.998.000,00	97,87	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	621.750,000,00	619.842.963,00	99,69	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.074.748.000,00	2.055.500,021,00	99,07	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	376.002.000,00	361.156.961,00	96,05	100
2	**Program Pendaftaran Penduduk**	**263.076.000,00**	**259.383.122,00**	**98,60**	**100**
	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	263.076.000,00	259.383.122,00	98,60	100
3	**Program Pencatatan Sipil**	**255.161.000,00**	**253.723.624,00**	**99,44**	**100**
	Pelayanan Pencatatan Sipil	255.161.000,00	253.723.624,00	99,44	100
4	**Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**273.503.000,00**	**270.739.124,00**	**98,99**	**100**
	Penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan Provinsi	273.503.000,00	270.739.124,00	98,99	100
5	**Program Penataan Desa**	**200.000.000,00**	**199.308.141,00**	**99,65**	**100**
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat Berdasarkan Hukum Adat	200.000.000,00	199.308.141,00	99,65	100
6	**Program Peningkatan Kerjasama Desa**	**800.000.000,00**	**798.646.686,00**	**99,83**	**100**
	Fasilitasi Kerja Sama antardesa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	800.000.000,00	798.646.686,00	99,83	100
7	**Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat**	**2.961.550.000,00**	**2.918.402.045,00**	**98,54**	**100**
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.961.550.000,00	2.918.402.045,00	98,54	100
	JUMLAH	**21.993.882.000,00**	**21.754.478.653,00**	**98,91**	**100**

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

12.1. DINAS PERHUBUNGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp170.418.443.000,00 realisasi sebesar Rp167.478.841.939,00 atau 98,28% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**57.438.176.000,00**	**56.085.367.456,00**	**97,64**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000,00	434.528.550,00	96,56	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.063.620.000,00	40.388.816.685,00	98,36	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	165.000.000,00	164.562.000,00	99,73	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.000.000,00	19.576.000,00	39,15	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.177.000.000,00	2.108.748.612,00	96,86	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	49.955.000,00	99,91	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.646.656.000,00	10.228.183.319,00	96,07	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.835.900.000,00	2.690.997.290,00	94,89	100
2	**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)**	**109.379.027.000,00**	**108.113.208.324,00**	**98,84**	**100**
	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	110.000.000,00	109.371.900,00	99,43	100
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	8.859.620.000,00	8.645.239.440,00	97,58	100
	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	4.182.522.000,00	4.163.148.140,00	99,54	100
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	1.085.760.000,00	1.073.740.750,00	98,89	100
	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	125.000.000,00	124.716.000,00	99,77	100
	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	359.015.000,00	347.836.700,00	96,89	100
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	94.106.260.000,00	93.110.753.594,00	98,94	100
	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	235.000.000,00	227.009.200,00	96,60	100
	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang Dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	40.000.000,00	39.359.500,00	98,40	100
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	225.850.000,00	222.197.000,00	98,38	100
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	50.000.000,00	49.836.100,00	99,67	100
3	**Program Pengelolaan Pelayaran**	**1.936.216.000,00**	**1.627.572.753,00**	**84,06**	**100**
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.289.216.000,00	989.701.212,00	76,77	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	205.000.000,00	199.288.800,00	97,21	100
	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	150.000.000,00	149.144.466,00	99,43	100
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	292.000.000,00	289.438.275,00	99,12	100
4	**Program Pengelolaan Perkeretaapian**	**1.665.024.000,00**	**1.652.693.406,00**	**99,26**	**100**
	Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian	1.665.024.000,00	1.652.693.406,00	99,26	100
	JUMLAH	**170.418.443.000,00**	**167.478.841.939,00**	**98,28**	**100**

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

13.1. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp144.796.793.000,00 realisasi sebesar Rp140.283.526.565,00 atau 96,88%yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**25.591.661.000,00**	**24.655.622.687,00**	**96,34**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	750.000.000,00	726.597.500,00	96,88	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.491.661.000,00	16.049.728.980,00	97,32	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	160.000.000,00	158.945.138,00	99,34	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	240.000.000,00	234.580.500,00	97,74	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.825.000.000,00	1.794.409.348,00	98,32	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000,00	49.042.000,00	98,08	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.922.500.000,00	2.526.213.414,00	86,44	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.152.500.000,00	3.116.105.807.00	98,85	100
2	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**46.950.000.000,00**	**45.270.708.026,00**	**96,42**	**100**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	46.950.000.000,00	45.270.708.026,00	96,42	100
3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**67.255.132.000,00**	**65.418.439.931,00**	**97,27**	**100**
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	9.964.975.000,00	9.960.434.652,00	99,95	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	57.290.157.000,00	55.458.005.279,00	96,80	100
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**1.500.000.000,00**	**1.480.283.044,00**	**98,69**	**100**
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	1.500.000.000,00	1.480.283.044,00	98,69	100
5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**3.500.000.000,00**	**3.458.472.877,00**	**98,81**	**100**
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1.906.180.000,00	1.882.434.684,00	98,75	100
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	1.593.820.000,00	1.576.038.193,00	98,88	100
	JUMLAH	**144.796.793.000,00**	**140.283.526.565,00**	**96,88**	**100**

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

14.1. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp60.398.674.000,00 realisasi sebesar Rp59.182.439.499,00 atau 97,99% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**26.310.710.000,00**	**25.752.906.406,00**	**97,88**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.055.000.000,00	1.039.886.553,00	98,57	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.350.270.000,00	14.979.101.898,00	97,58	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95.000.000,00	94.700.000,00	99,68	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90.000.000,00	89.996.472,00	100	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.790.600.000,00	2.783.112.571,00	99,73	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.215.000.000,00	1.206.581.890,00	99,31	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.187.340.000,00	4.041.361.601,00	96,51	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.527.500.000,00	1.518.165.421,00	99,39	100
2	**Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi**	**2.050.000.000,00**	**2.043.849.084,00**	**99,70**	**100**
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	650.000.000,00	646.390.000,00	99,44	100
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.400.000.000,00	1.397.459.084,00	99,82	100
3	**Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi**	**1.780.000.000,00**	**1.761.740.841,00**	**98,97**	**100**
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya	1.780.000.000,00	1.761.740.841,00	98,97	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				
4	**Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian**	**6.498.200.000,00**	**6.459.112.868,00**	**99,40**	**100**
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6.498.200.000,00	6.459.112.868,00	99,40	100
5	**Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi**	**6.875.000.000,00**	**6.453.026.665,00**	**93,86**	**100**
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	6.875.000.000,00	6.453.026.665,00	93,86	100
6	**Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)**	**8.234.764.000,00**	**8.190.895.072,00**	**99,47**	**100**
	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	8.234.764.000,00	8.190.895.072,00	99,47	100
7	**Program Pengembangan UMKM**	**8.650.000.000,00**	**8.520.908.563,00**	**98,51**	**100**
	Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah	8.650.000.000,00	8.520.908.563,00	98,51	100
	JUMLAH	**60.398.674.000,00**	**59.182.439.499,00**	**97,99**	**100**

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

15.1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp19.034.974.000,00 realisasi sebesar Rp18.828.928.730,00 atau 98,92% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**15.225.911.000,00**	**15.037.644.934,00**	**98,76**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.392.000,00	142.291.180,00	99,93	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.420.226.000,00	12.269.131.911,00	98,78	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000,00	78.701.070,00	98,38	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.100.000,00	10.000.000,00	99,01	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	593.479.000,00	587.990.195,00	99,08	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.782.714.000,00	1.757.473.008,00	98,58	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	197.000.000,00	192.057.570,00	97,49	100
2	**Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**	**599.080.000,00**	**598.458.409,00**	**99,90**	**100**
	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	449.080.000,00	448.511.140,00	99,87	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	150.000.000,00	149.947.269,00	99,96	100
3	**Program Promosi Penanaman Modal**	**824.132.000,00**	**818.090.292,00**	**99,27**	**100**
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	824.132.000,00	818.090.292,00	99,27	100
4	**Program Pelayanan Penanaman Modal**	**1.191.638.000,00**	**1.189.435.531,00**	**99,82**	**100**
	Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	313.478.000,00	311.517.973,00	99,37	100
	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	878.160.000,00	877.917.558,00	99,97	100
5	**Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**894.651.000,00**	**886.123.756,00**	**99,05**	**100**
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	894.651.000,00	886.123.756,00	99,05	100
6	**Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal**	**299.562.000,00**	**299.175.808,00**	**99,87**	**100**
	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	299.562.000,00	299.175.808,00	99,87	100
	JUMLAH	**19.034.974.000,00**	**18.828.928.730,00**	**98,92**	**100**

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN BIDANG PARIWISATA

16.1. DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga Dan Bidang Pariwisata yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata sebesar Rp288.448.798.000,00 realisasi sebesar Rp274.212.100.329,00 atau 95,06% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**43.157.598.000,00**	**39.501.033.060,00**	**91,53**	**98,34**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	648.000.000,00	614.758.500,00	94,87	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26.963.501.000,00	24.953.327.770,00	92,54	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	360.000.000,00	358.406.975,00	99,56	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.061.500.000,00	1.014.855.507,00	95,61	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11.399.597.000,00	10.955.837.874,00	96,11	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.705.000.000,00	1.583.996.434,00	58,56	87,89
2	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	**24.939.750.000,00**	**24.637.446.600,00**	**98,79**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	10.120.000.000,00	9.824.510.550,00	97,08	100
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	14.819.750.000,00	14.812.936.050,00	99,95	100
3	**Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan**	**215.110.520.000,00**	**204.924.390.991,00**	**95,26**	**95,23**
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	93.171.584.000,00	83.330.389.716,00	89,44	89,47
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	8.901.286.000,00	8.813.929.412,00	99,02	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi	112.537.650.000,00	112.285.287.519,00	99,78	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	500.000.000,00	494.784.344,00	98,96	100
4	**Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**	**2.067.100.000,00**	**2.024.794.390,00**	**97,95**	**100**
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	709.350.000,00	691.868.600,00	97,54	100
	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	953.750.000,00	940.531.450,00	98,61	100
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	404.000.000,00	392.394.340,00	97,13	100
5	**Program Pemasaran Pariwisata**	**1.464.500.000,00**	**1.438.530.038,00**	**98,23**	**100**
	Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.464.500.000,00	1.438.530.038,00	98,23	100
6	**Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**	**50.000.000,00**	**46.349.000.00**	**92,70**	**100**
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	50.000.000,00	46.349.000,00	92,70	100
7	**Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**1.659.330.000,00**	**1.639.556.250,00**	**98,81**	**100**
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1.659.330.000,00	1.639.556.250,00	98,81	100
	JUMLAH	**288.448.798.000,00**	**274.212.100.329,00**	**95,06**	**96,52**

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN DAN BIDANG KEARSIPAN

17.1. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Dan Kearsipan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp30.351.953.000,00 realisasi sebesar Rp29.972.066.581,00 atau 98,75%yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**29.201.471.000,00**	**28.823.050.982,00**	**98,70**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,000,000,00	99.705.800,00	99,71	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.820.262.000,00	25.451.471.122,00	98,57	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20,000,000,00	19.929.000,00	99,65	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500,000,00	1.500,000,00	100,00	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	438.650,000,00	438.381.145,00	99,94	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.000,000,00	3.996.000,00	99,90	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.563.509.000,00	2.557.437.115,00	99,76	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253.550,000,00	250.630.800,00	98,85	100
2	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**675.059.000,00**	**674.428.759,00**	**99,91**	**100**
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	608.059.000,00	607.599.909,00	99,92	100
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi	67.000.000,00	66.828.850,00	99,74	100
3	**Program Pengelolaan Arsip**	**475.423.000,00**	**474.586.840,00**	**99,82**	**100**
	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	61.800.000,00	61.787.550,00	99,98	100
	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	322.050.000,00	321.510.774,00	99,83	100
	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	91.573.000,00	91.288.516,00	99,69	100
	JUMLAH	**30.351.953.000,00**	**29.972.066.581,00**	**98,75**	**100**

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

18.1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pilihan Bidang Kelautan Dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp120.179.610,000,00 realisasi sebesar Rp108.286.797.403,00 atau 90,10%yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**50,053.328.000,00**	**45.857.750.177,00**	**91.62**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	517.850.000,00	511.361.597,00	98,75	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	41.261.976.000,00	37.243.004.231,00	90,26	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	133.000.000,00	127.656.496,00	95,98	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	228.000.000,00	221.043.235,00	96,95	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.927.940.000,00	1.923.739.873,00	99,78	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	889.630.000,00	881.968.952,00	99,14	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.451.952.000,00	3.330.378.324,00	96,48	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.642.980.000,00	1.618.597.469,00	98,52	100
2	**Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil**	**4.191.180.000,00**	**3.773.538.626,00**	**90,04**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	2.541.180.000,00	2.195.802.891,00	86,41	100
	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	150.000.000,00	149.324.271,00	99,55	100
	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1.500.000.000,00	1.428.411.464,00	95,23	100
3	**Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**	**50.126.604.000,00**	**43.027.405.301,00**	**85,84**	**100**
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	36.997.249.000,00	29.974.617.966,00	81,02	100
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	2.156.000.000,00	2.141.857.184,00	99,34	100
	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	10.973.355.000,00	10.910.930.151,00	99,43	100
4	**Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**	**10.857.588.000,00**	**10.730.017.977,00**	**98,83**	**100**
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000,00	235.982.910,00	94,39	100
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	10.607.588.000,00	10.494.035.067,00	98,93	100
5	**Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan**	**2.469.440.000,00**	**2.460.788.302,00**	**99,65**	**100**
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil	1.922.594.000,00	1.914.893.375,00	99,60	100
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	546.846.000,00	545.894.927,00	99,83	100
6	**Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan**	**2.481.470.000,00**	**2.437.297.020,00**	**98,22**	**100**
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	250.000.000,00	249.892.162,00	99,96	100
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	2.231.470.000,00	2.187.404.858,00	98,03	100
	JUMLAH	**120.179.610.000,00**	**108.286.797.403,00**	**90,10**	**100**

19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp318.388.665.000,00 realisasi sebesar Rp301.006.127.282,00 atau 94,54% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

19.1. DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian Dan Perkebunan sebesar Rp193.516.027.000,00 realisasi sebesar Rp184.792.082.862,00 atau 95,49% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**94.762.295.000,00**	**91.812.075.822,00**	**96.89**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	610,000,000,00	528.989.991,00	86.72	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88.057.228.000,00	85.627.160.547,00	97.24	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	123.000,000,00	120.191.608,00	97.72	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	739.300,000,00	721.802.742,00	97.63	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.948.000,000,00	3.537.898.004,00	89.61	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.284.767.000,00	1.276.032.930,00	99.32	100
2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**78.576.307.000,00**	**73.354.169.975,00**	**93,35**	**98,32**
	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	65.311.307.000,00	60.327.101.191,00	92,37	95,65
	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	13.265.000,000,00	13.027.068.784,00	98.21	100
3	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**8.044.440,000,00**	**7.647.201.550,00**	**95,06**	**100**
	Penataan Prasarana Pertanian	8.044.440,000,00	7.647.201.550,00	95,06	100
4	**Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**1.528.572.000,00**	**1.417.226.713,00**	**92.72**	**100**
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	1.528.572.000,00	1.417.226.713,00	92.72	100
5	**Program Penyuluhan Pertanian**	**10.604.413.000,00**	**10.561.408.802,00**	**99.59**	**100**
	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	672.200,000,00	660.453.273,00	98.25	100
	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	9.432.213.000,00	9.422.262.279,00	99.89	100
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	500,000,000,00	478.693.250,00	95.74	100
	JUMLAH	**193.516.027.000,00**	**184.792.082.862,00**	**95,49**	**99,66**

19.2. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan sebesar Rp124.872.638.000,00 realisasi sebesar Rp116.214.044.420,00 atau 93,07% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**60.116.264.000,00**	**57.621.659.522,00**	**95,85**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.349.540.000,00	1.277.620.325,00	94,67	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.909.782.000,00	27.731.995.763,00	99,36	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	528.850.000,00	264.514.295,00	50,02	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	295.000.000,00	239.740.200,00	81,27	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.061.241.000,00	5.470.984.489,00	90,26	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.628.275.000,00	5.432.442.294,00	96,52	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.501.016.000,00	9.726.913.541,00	92,63	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.737.560.000,00	7.372.861.365,00	95,29	100
2	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	**29.294.739.000,00**	**25.725.152.214,00**	**87,81**	**100**
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	6.589.000.000,00	5.026.058.977,00	76,28	100
	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	21.785.739.000,00	19.803.839.418,00	90,90	100
	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor	920.000.000,00	895.253.819,00	97,31	100
3	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**5.310.000.000,00**	**4.563.664.967,00**	**85,94**	**100**
	Penataan Prasarana Pertanian	5.310.000.000,00	4.563.664.967,00	85,94	100
4	**Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**16.260.635.000,00**	**15.474.568.668,00**	**95,17**	**100**
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	12.429.085.000,00	11.797.112.285,00	94,92	100
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	2.831.550.000,00	2.711.628.544,00	95,76	100
	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	1.000.000.000,00	965.827.839,00	96,58	100
5	**Program Penyuluhan Pertanian**	**13.891.000.000,00**	**12.828.999.049,00**	**92,35**	**100**
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	13.891.000.000,00	12.828.999.049,00	92,35	100
	JUMLAH	**124.872.638.000,00**	**116.214.044.420,00**	**93,07**	**100**

20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

20.1. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp93.654.074.000,00 realisasi sebesar Rp87.676.094.165,00 atau 93,62% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**49.386.471.000,00**	**48.568.871.537,00**	**98,34**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	805.158.000,00	804.863.600,00	99,96	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.458.866.000,00	28.945.418.312,00	98,26	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	387.224.000,00	384.809.990,00	99,38	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	415.800.000,00	401.076.361,00	96,46	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.345.778.000,00	5.308.523.310,00	99,30	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.446.876.000,00	2.412.512.765,00	98,60	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.109.042.000,00	6.936.466.881,00	97,57	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.417.727.000,00	3.375.200.318,00	98,76	100
2	**Program Pengelolaan Aspek Kegeologian**	**7.161.408.000,00**	**7.073.550.089,00**	**98,77**	**100**
	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	4.077.821.000,00	4.038.120.761,00	99,03	100
	Penatausahaan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.629.787.000,00	1.590,054.825,00	97,56	100
	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1.453.800.000,00	1.445.374.503,00	99,42	100
3	**Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara**	**5.136.019.000,00**	**4.990.286.984,00**	**97,16**	**100**
	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut	4.048.554.000,00	3.912.513.154,00	96,64	100
	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.087.465.000,00	1.077.773.830,00	99,11	100
4	**Program Pengelolaan Energi Terbarukan**	**12.229.085.000,00**	**11.919.240.896,00**	**97,47**	**100**
	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	12.229.085.000,00	11.919.240.896,00	97,47	100
5	**Program Pengelolaan Ketenagalistrikan**	**19.741.091.000,00**	**15.124.144.659,00**	**76,61**	**98,73**
	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	3.049.210.000,00	2.985.983.923,00	97,93	100
	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	16.691.881.000,00	12.138.160.736,00	72,72	97,46
	JUMLAH	**93.654.074.000,00**	**87.676.094.165,00**	**93,62**	**99,75**

21. URUSAN PILIHAN BIDANG PERDAGANGAN DAN BIDANG PERINDUSTRIAN

21.1. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Bidang Perindustrian yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp108.657.394.000,00 realisasi sebesar Rp97.043.528.504,00 atau 89,31%yang terdiri dari 9 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**48.149.122.000,00**	**47.527.445.689,00**	**98,71**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	425.528.000,00	421.909.748,00	99,15	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28.491.816.000,00	28.191.497.160,00	98,95	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	260.000.000,00	257.951.539,00	99,21	100
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.903.500,00	99,04	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.124.455.000,00	1.111.153.562,00	98,82	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.438.751.000,00	3.400.422.392,00	98,89	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.881.740.000,00	1.849.493.420,00	98,29	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.434.558.000,00	7.255.357.305,00	97,59	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.082.274.000,00	5.029.757.063,00	98,97	100
2	**Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan**	**100.000.000,00**	**97.405.500,00**	**97,41**	**100**
	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)	100.000.000,00	97.405.500,00	97,41	100
3	**Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan**	**1.069.089.000,00**	**1.055.265.219,00**	**98,71**	**100**
	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta pasar lelang komoditas	1.069.089.000,00	1.055.265.219,00	98,71	100
4	**Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting**	**21.968.213.000,00**	**21.957.480.482,00**	**99,95**	**100**
	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada pelaku usaha distribusi barang lintas kabupaten/ kota yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan	21.743.693.000,00	21.735.320.154,00	99,96	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	224.520.000,00	222.160.328,00	98,95	100
5	**Program Pengembangan Ekspor**	**3.163.010.000,00**	**2.767.780.782,00**	**87,50**	**100**
	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3.163.010.000,00	2.767.780.782,00	87,50	100
6	**Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen**	**2.899.580.000,00**	**2.873.779.684,00**	**99,11**	**100**
	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	145.929.500,00	97,29	100
	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	2.507.160.000,00	2.485.718.400,00	99,14	100
	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	242.420.000,00	242.131.784,00	99,88	100
7	**Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri**	**286.685.000,00**	**268.658.474,00**	**93,71**	**100**
	Pelaksanaan Promosi Produk dalam Negeri	286.685.000,00	268.658.474,00	93,71	100
8	**Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri**	**29.943.905.000,00**	**19.437.273.959,00**	**64,91**	**90,39**
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	29.943.905.000,00	19.437.273.959,00	64,91	90,39
9	**Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional**	**1.077.790.000,00**	**1.058.438.715,00**	**98.20**	**100**
	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1.077.790.000,00	1.058.438.715,00	98,20	100
	JUMLAH	**108.657.394.000,00**	**97.043.528.504,00**	**89,31**	**91,54**

22. SEKRETARIAT DAERAH

22.1. SEKRETARIAT DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Sekretariat Daerah yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp628.782.550,000,00 realisasi sebesar Rp614.386.948.554,00 atau 97,71% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Administrasi Umum**	**176.822.593.000,00**	**172.745.129.869,00**	**97,69**	**99,62**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	250.000.000,00	248.864.812,00	99,55	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	83.435.028.000,00	80.493.647.764,00	96,47	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	321.000.000,00	316.857.002,00	98,71	100
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	20.000.000,00	18.455.000,00	92,28	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.745.945.000,00	1.509.437.440,00	86,45	98,52
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.730.243.000,00	8.694.779.730,00	99,59	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.749.812.000,00	4.677.328.174,00	98,47	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.691.105.000,00	21.201.645.395,00	97,74	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.025.000.000,00	5.904.205.465,00	98,00	100
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24.604.460.000,00	24.550.607.440,00	99,78	100
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5.870.000.000,00	5.863.983.449,00	99,90	100
	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	17.879.357.000,00	17.772.758.656,00	99,40	100
	Fasilitasi Keprotokolan	1.500.643.000,00	1.492.559.542,00	99,46	100
2	**Program Penataan Organisasi**	**1.726.180.000,00**	**1.714.621.473,00**	**99,33**	**100**
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	525.000.000,00	523.106.050,00	99,64	100
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	1.201.180.000,00	1.191.515.423,00	99,20	100
3	**Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah**	**3.366.130.000,00**	**3.349.441.950,00**	**99,50**	**100**
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	870.790.000,00	860.928.741,00	98,87	100
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	1.183.890.000,00	1.181.714.654,00	99,82	100
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.311.450.000,00	1.306.798.555,00	99,65	100
4	**Program Kesejahteraan Rakyat**	**431.427.610.000,00**	**422.716.931.390,00**	**97,98**	**98,25**
	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	429.862.610.000,00	421.190.463.203,00	97,98	98,24
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	765.000.000,00	731.608.646,00	95,64	100
	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	800.000.000,00	794.859.541,00	99,36	100
5	**Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	**2.403.244.000,00**	**2.400.812.419,00**	**99,90**	**100**
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	1.488.244.000,00	1.486.154.719,00	99,86	100
	Fasilitasi Bantuan Hukum	915.000.000,00	914.657.700,00	99,96	100
6	**Program Perekonomian Dan Pembangunan**	**7.684.793.000,00**	**6.145.032.875,00**	**79,96**	**98,64**
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	847.772.000,00	838.600.568,00	98,92	100
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	5.656.201.000,00	4.170.773.896,00	73,74	97,27
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	1.180.820.000,00	1.135.658.411,00	96,18	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
7	**Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa**	**3.447.000.000,00**	**3.413.879.101,00**	**99,04**	**100**
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.867.000.000,00	1.852.138.881,00	99,20	100
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	925.000.000,00	923.625.975,00	99,85	100
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	655.000.000,00	638.114.245,00	97,42	100
8	**Program Kebijakan Administrasi Pembangunan**	**1.905.000.000,00**	**1.901.099.477,00**	**99,80**	**100**
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.155.000.000,00	1.153.630.153,00	99,88	100
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	750.000.000,00	747.469.324,00	99,66	100
	JUMLAH	**628.782.550.000,00**	**614.386.948.554,00**	**97,71**	**87,02**

23. SEKRETARIAT DPRD

23.1. SEKRETARIAT DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Sekretariat DPRD yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp379.270.747.000,00 realisasi sebesar Rp351.064.987.793,00 atau 92,56% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi**	**196.410.872.000,00**	**192.018.400.555,00**	**97,76**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	820.000.000,00	810.757.664,00	98,87	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.377.180.000,00	17.974.788.413,00	97,81	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	853.674.000,00	791.416.900,00	92,71	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	556.428.000,00	544.822.560,00	97,91	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.490.468.000,00	3.461.545.301,00	99,17	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	23.808.287.000,00	22.434.740.090,00	94,23	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	15.532.116.000,00	14.514.414.426,00	93,45	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	8.996.049.000,00	8.758.419.460,00	97,36	100
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	123.976.670.000,00	122.727.495.741,00	98,99	100
2	**Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**	**182.859.875.000,00**	**159.046.587.238,00**	**86,98**	**100**
	Pembentukan Perda Dan Peraturan DPRD	12.358.640.000,00	8.062.629.043,00	65,24	100
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	705.694.000,00	686.594.819,00	97,29	100
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	15.792.750.000,00	11.348.113.400,00	71,86	100
	Peningkatan Kapasitas DPRD	56.974.908.000,00	48.880.765.768,00	85,79	100
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	43.285.790.000,00	42.169.651.491,00	97,42	100
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	508.100.000,00	455.932.310,00	89,73	100
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	30.278.149.000,00	27.126.637.099,00	89,59	100
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	22.955.844.000,00	20.316.263.308,00	88,50	100
	JUMLAH	**379.270.747.000,00**	**351.064.987.793,00**	**92,56**	**100**

24. PERENCANAAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

24.1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Perencanaan Bidang Penelitian Dan Pengembangan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp53.122.115.000,00 realisasi sebesar Rp50.844.006.619,00 atau 95,71% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**35.197.315.000,00**	**33.502.804.533,00**	**95,19**	**99,63**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000.000,00	432.898.860,00	96,20	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.384.075.000,00	24.069.148.915,00	98,71	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	228.550.000,00	186.637.042,00	81,66	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	544.800.000,00	514.848.405,00	94,50	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.737.200.000,00	2.449.199.581,00	89,48	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	705.750.000,00	664.881.874,00	94,21	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.359.400.000,00	2.710.849.159,00	80,69	97,93
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.787.540.000,00	2.474.340.697,00	88,76	99,14
2	**Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**3.950.000.000,00**	**3.928.396.523,00**	**99,45**	**100**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.650.000.000,00	2.636.866.536,00	99,50	100
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	347.707.940,00	99,35	100
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	950.000.000,00	943.822.047,00	99,35	100
3	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	**5.234.800.000,00**	**4.934.192.173,00**	**94,26**	**100**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.819.800.000,00	1.756.457.810,00	96,52	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.815.000.000,00	1.692.326.432,00	93,24	100
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.600.000.000,00	1.485.407.931,00	92,84	100
6	**Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah**	**8.740.000.000,00**	**8.478.613.390,00**	**97,01**	**100**
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	600.000.000,00	565.492.300,00	94,25	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	600.000.000,00	560.615.348,00	93,44	100
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	3.200.000.000,00	3.179.080.068,00	99,35	100
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	4.340.000.000,00	4.173.425.674,00	96,16	100
	JUMLAH	**53.122.115.000,00**	**50.844.006.619,00**	**95,71**	**99,91**

25. KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Keuangan sebesar Rp9.233.927.435.000,00 realisasi sebesar Rp9.090.375.407.705,00 atau 98,45% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yakni :

25.1. BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp285.742.195.000,00 realisasi sebesar Rp263.041.723.875,00 atau 92,06% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**243.426.939.000,00**	**221.227.123.413,00**	**90,88**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.195.783.000,00	1.180.851.125,00	98,75	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	143.838.068.000,00	125.872.472.291,00	87,51	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.086.988.000,00	996.346.565,00	91,66	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	302.384.000,00	279.486.000,00	92,43	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	28.432.843.000,00	27.412.442.042,00	96,41	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.646.867.000,00	3.482.864.610,00	95,50	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.072.126.000,00	46.181.300.427,00	98,11	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.851.880.000,00	15.821.360.353,00	88,63	100
2	**Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**	**42.315.256.000,00**	**41.814.600.462,00**	**98,82**	**100**
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	42.315.256.000,00	41.814.600.462,00	98,82	100
	JUMLAH	**285.742.195.000,00**	**263.041.723.875,00**	**92,06**	**100**

25.2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Keuangan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp8.948.185.240.000,00 realisasi sebesar Rp8.827.333.683.830,00 atau 98,65% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**32.467.576.000,00**	**31.084.083.515,00**	**95,74**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	314.750.000,00	293.157.310,00	93,14	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.331.409.000,00	23.065.808.080,00	94,80	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	165.000.000,00	156.275.944,00	94,71	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.411.490.000,00	2.381.114.920,00	98,74	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.010.345.000,00	2.988.319.301,00	99,27	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.234.582.000,00	2.199.407.960,00	98,43	100
2	**Program Pengelolaan Keuangan Daerah**	**8.911.605.842.000,00**	**8.792.162.700.775,00**	**98,66**	**99,77**
	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	6.457.590.000,00	6.395.222.855,00	99,03	100
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	670.250.000,00	600.897.850,00	89,65	100
	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.579.884.000,00	1.512.225.040,00	95,72	100
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	3.767.780.000,00	3.704.148.955,00	98,31	100
	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.898.885.338.000,00	8.779.711.195.375,00	98,66	98,66
	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	245.000.000,00	239.010.700,00	97,56	100
3	**Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**	**4.111.822.000,00**	**4.086.899.540,00**	**99,39**	**100**
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.111.822.000,00	4.086.899.540,00	99,39	100
	JUMLAH	**8.948.185.240.000,00**	**8.827.333.683.830,00**	**98,65**	**98,67**

26. KEPEGAWAIAN

26.1. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Kepegawaian yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp58.108.639.000,00 realisasi sebesar Rp53.169.077.457,00 atau 91,5% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**44.158.784.000,00**	**40.129.810.676,00**	**90,88**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000,00	496.911.982,00	99,38	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.695.969.000,00	32.109.809.624,00	89,95	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	154.000.000,00	147.775.000,00	95,96	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000,00	299.230.616,00	99,74	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.795.500.000,00	3.654.818.199,00	96,29	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	355.000.000,00	335.039.464,00	94,38	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.660.900.000,00	1.519.196.031,00	91,47	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.697.415.000,00	1.567.029.760,00	92,32	100
2	**Program Kepegawaian Daerah**	**13.949.855.000,00**	**13.039.266.781,00**	**93,47**	**99,97**
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.290.886.000,00	4.440.162.730,00	83,92	100
	Mutasi dan Promosi ASN	1.714.755.000,00	1.685.698.645,00	98,31	99,87
	Pengembangan Kompetensi ASN	5.010.637.000,00	4.990.409.046,00	99,60	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1.933.577.000,00	1.922.996.360,00	99,45	100
	JUMLAH	**58.108.639.000,00**	**53.169.077.457,00**	**91,49**	**100**

27. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

27.1 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp67.849.067.000,00 realisasi sebesar Rp65.607.086.848,00 atau 96,70% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**46.049.743.000,00**	**45.629.234.803,00**	**99,09**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	507.000.000,00	468.996.353,00	92,50	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31.086.890.000,00	30.952.652.484,00	99,57	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	197.000.000,00	196.716.336,00	99,86	100
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	111.175.000,00	110.885.200,00	99,74	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	177.520.000,00	177.156.335,00	99,80	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.870.084.000,00	1.852.994.890,00	99,09	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.902.500.000,00	1.859.668.640,00	97,75	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.837.130.000,00	7.680.150.402,00	98,00	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.360.444.000,00	2.330.014.163,00	98,71	100
2	**Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**	**21.799.324.000,00**	**19.977.852.045,00**	**91,64**	**100**
	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.834.228.000,00	1.606.511.882,00	87,59	100
	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	19.965.096.000,00	18.371.340.163,00	92,02	100
	JUMLAH	**67.849.067.000,00**	**65.607.086.848,00**	**96,70**	**100**

28. PENGHUBUNG

28.1. BADAN PENGHUBUNG

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Penghubung yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp17.763.855.000,00 realisasi sebesar Rp17.398.829.571,00 atau 97,95% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**	**16.524.676.000,00**	**16.160.910.475,00**	**97,80**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.500.000,00	44.052.945,00	99,00	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.268.100.000,00	7.982.343.777,00	96,54	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	181.580.000,00	172.966.115,00	95,26	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.017.240.000,00	2.002.032.277,00	99,25	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21.000.000,00	20.880.000,00	99,43	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.834.391.000,00	3.796.573.823,00	99,01	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.157.865.000,00	2.142.061.538,00	99,27	100
2	**Program Pelayanan Penghubung**	**1.239.179.000,00**	**1.237.919.096,00**	**99,90**	**100**
	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.239.179.000,00	1.237.919.096,00	99,90	100
	JUMLAH	**17.763.855.000,00**	**17.398.829.571,00**	**97,95**	**100**

29. INSPEKTORAT DAERAH

29.1. INSPEKTORAT

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Inspektorat Daerah yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp32.177.566.000,00 realisasi sebesar Rp31.886.633.959,00 atau 99,10% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.245.938.000,00**	**22.971.395.456,00**	**98,82**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	88.246.000,00	80.407.344,00	91,12	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.963.559.000,00	18.772.218.279,00	98,99	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	172.600.000,00	171.644.450,00	99,45	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	321.907.000,00	312.341.980,00	97,03	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	412.381.000,00	412.337.731,00	99,99	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	136.550.000,00	135.946.200,00	99,56	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.480.981.000,00	2.420,027.117,00	97,54	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.714.000,00	666.472.355,00	99,52	100
2	**Program Penyelenggaraan Pengawasan**	**6.197.961.000,00**	**6.190.874.964,00**	**99,89**	**100**
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	4.333.161.000,00	4.326.386.347,00	99,84	100
	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1.864.800.000,00	1.864.488.617,00	99,98	100
3	**Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi**	**2.733.667.000,00**	**2.724.363.539,00**	**99,66**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	622.574.000,00	620.817.239,00	99,72	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Pendampingan dan Asistensi	2.111.093.000,00	2.103.546.300,00	99,64	100
	JUMLAH	**32.177.566.000,00**	**31.886.633.959,00**	**99,10**	**100**

30. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

30.1. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Kesatuan Bangsa Dan Politik yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp115.857.796.000,00 realisasi sebesar Rp115.202.682.339,00 atau 99,44% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**15.609.707.000,00**	**15.361.106.963,00**	**98,41**	**100**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.408.062.000,00	2.384.626.092,00	99,03	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.257.216.000,00	8.156.647.108,00	98,78	100
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	80.000.000,00	79.862.473,00	99,83	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	317.405.000,00	312.005.878,00	98,30	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.248.484.000,00	1.216.156.212,00	97,41	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	263.101.000,00	261.239.650,00	99,29	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.365.456.000,00	2.313.866.674,00	97,82	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	669.983.000,00	636.702.876,00	95,03	100
2	**Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan**	**2.980.500.000,00**	**2.960.035.802,00**	**99,31**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	2.980.500.000,00	2.960.035.802,00	99,31	100
3	**Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik**	**24.607.189.000,00**	**24.585.268.514,00**	**99,91**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	24.607.189.000,00	24.585.268.514,00	99,91	100
4	**Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**46.630.000.000,00**	**46.500.389.316,00**	**99,72**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	46.630.000.000,00	46.500.389.316,00	99,72	100
5	**Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya**	**3.297.000.000,00**	**3.232.739.953,00**	**98,05**	**100**

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	3.297.000.000,00	3.232.739.953,00	98,05	100
6	**Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial**	**22.733.400.000,00**	**22.563.141.791,00**	**99,25**	**100**
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	22.733.400,000,00	22.563.141.791,00	99,25	100
	JUMLAH	**115.857.796.000,00**	**115.202.682.339,00**	**99,44**	**100**

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sejak tahun 2016. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.2.2 Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.2.1 Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa

1) Beban Barang

Beban barang dicatat pada saat pembelian barang, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban barang.

2) Beban Jasa, Pemeliharaan, dan Perjalanan Dinas

Beban jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen tagihan dari Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

c. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

d. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

e. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

f. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

(1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(2) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya dan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

i. Beban Lain-lain

Beban Lain-lain merupakan beban operasi yang tidak dapat dimasukan dalam kategori beban pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, penyisihan piutang maupun beban penyusutan dan amortisasi, beban lain-lain diantaranya beban ekstrakontabel.

4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer.

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca, dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.

3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)
      1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD), Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah dan Kas di Bendahara Sekolah yang merupakan sisa Dana BOS, BOP, Peran Serta Masyarakat, Bantuan Pemerintah dan Usaha Mandiri sampai dengan akhir tahun anggaran.
6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun

pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.

5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, Piutang Badan Layanan Umum Daerah dan Piutang Bunga Deposito. Piutang Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad kredit. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui bila terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut, telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau telah diterbitkan surat penagihan. Piutang Bunga Deposito diakui sebesar nilai bunga deposito yang akan diterima sampai dengan akhir periode pelaporan.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.
8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang diakui ketika terbit pernyataan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk surat pemberitahuan atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dan Piutang Transfer Antar Daerah yang berupa Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya yang diakui sesuai dengan hak yang masih harus diterima sampai dengan periode pelaporan keuangan.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan dalam piutang tuntutan ganti rugi daerah dan piutang berdasarkan peristiwa lainnya.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Piutang TP/TGR diakui sebesar nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
    a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
    b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
    c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
14. Piutang pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan / atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daearah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen. Apabila hasil verifikasi diketahui bahwa keabsahan piutang pajak tidak terpenuhi seperti kendaraan hilang, kendaraan dicabut registrasinya, alamat wajib pajak tidak diketahui kedudukan, kendaraan beralih kepemilikan atau dijual, maka atas SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDKB dapat dibatalkan untuk dilakukan koreksi sejak tanggal diketahui berdasarkan laporan hasil verifikasi.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Badan Usaha Lainnya berdasarkan keputusan RUPS belum dibayarkan.
17. Piutang Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad jual beli.
18. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan diakui berdasarkan selisih lebih tukar menukar BMD yang belum diterima pembayarannya.
19. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengakuan klaim pada pihak penjamin. Apabila hasil verifikasi dari pihak penjamin berbeda dengan pengajuan klaim maka dilakukan koreksi sesuai hasil verifikasi.
20. Piutang Jasa Giro dan Piutang pendapatan Bunga diakui sebesar nilai bunga yang akan diterima sampai dengan akhir periode.
21. Penyisihan piutang tidak tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan

Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	Kategori	% diragukan Tertagih
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

22. Penghentian pengakuan piutang

    Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

23. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

    Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban, sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

24. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.

5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek :
   a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
   b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
   c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
   d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
   e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
   f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
   g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
   h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
   i. Investasi jangka pendek disajikan pada pos asset lancer di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.
2. Investasi Jangka Panjang :
   a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
   b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
   c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
   d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO

3. Metode penilaian investasi pemerintah :
   a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
   b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

      Metode ekuitas diterapkan untuk :

      1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan
      2) Kepemilikan lebih dari 50%.

   c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
      1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
      2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
   e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.

4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :

a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
   1. Barang habis pakai;
   2. Barang tak habis pakai; dan
   3. Barang bekas pakai.

b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
   1. Barang konsumsi;
   2. Amunisi;
   3. Bahan untuk pemeliharaan;
   4. Suku cadang;
   5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
   6. Bahan baku;
   7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
   8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

6. Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
      Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
      Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pemakaian persediaan diakui sebagai beban barang pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya jumlah persediaan.

9. Pengukuran persediaan melalui :
   a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
      1) harga pembelian;
      2) biaya pengangkutan;
      3) biaya penanganan; dan
      4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

      Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
      1) potongan harga; dan
      2) rabat, dan lainnya yang serupa.
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.
   c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.
10. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
11. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
   a. metode penilaian Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir;
   b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
12. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
13. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
14. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.

15. Penghapusbukuan aset persediaan dilaksanakan oleh Kepala SKPD dengan persetujuan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar penghapusbukuan antara lain berita acara pemusnahan untuk barang persediaan yang dimusnahkan, berita acara serah terima untuk barang yang dihibahkan.
16. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan. Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
17. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
18. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
    a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas *subtance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
    a. Berwujud
    b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
    e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
    a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
    b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
    c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan

d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
   b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
   c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
   d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.
9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan

biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtable dan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtable tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*.
22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.
23. Pengeluaran setelah perolehan Saldo awal suatu Aset tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut :
    a. Pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau
    b. Semua aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunakan.
    c. Khusus bagi pemeliharaan peralatan mesin dan pemeliharaan gedung, pengeluaran memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap
24. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
25. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
26. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
27. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
28. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
29. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
30. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap dan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya berupa alat musik modern dan Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan secara periodik.
31. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca

berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset tidak digunakan operasional pemerintah, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

32. Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat). Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat).

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02				Peralatan dan Mesin			
1	3	02	01			Alat Besar			
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	01	03		Alat Bantu	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	02			Alat Angkutan			
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	02	03		Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02	04		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	02	05		Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	6
								≥75%	9
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Ukur			
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	03	03		Alat Ukur	5	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	04			Alat Bengkel dan Ukur			
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1	3	02	05	01		Alat Kantor	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05	03		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1	3	02	06	01		Alat Studio	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	08			Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	03		Alat Praktek Sekolah	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	06		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	7
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	09			Alat Persenjataan			
1	3	02	09	01		Senjata Api	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	09	03		Senjata Sinar	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	0
								≥75%	2
1	3	02	09	04		Alat Khusus Kepolisian	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	10			Komputer			
1	3	02	10	01		Komputer Unit	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	11			Alat Eksplorasi			
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	3	02	12			Alat Pengeboran			
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	2
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian			
1	3	02	13	01		Sumur	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	02		Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	6
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi			
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja			
1	3	02	15	01		Alat Deteksi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	02	15	02		Alat Pelindung	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	15	03		Alat SAR	2	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	1
1	3	02	15	04		Alat kerja Penerbangan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	16			Alat Peraga			
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi			
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	2
1	3	02	18			Rambu-Rambu			
1	3	02	18	01		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	02		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	03		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	7
1	3	02	19			Peralatan Olahraga			
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	2
1	3	03				Gedung dan Bangunan			
1	3	03	01			Bangunan Gedung			
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
						Permanen	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
						Semi Permanen	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	7
						Darurat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
						Permanen	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
						Semi Permanen	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	7
						Darurat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	03	02			Monumen			
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	15
1	3	03	03			Menara			
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1	3	03	04	01		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04				Jalan, Irigasi, dan Jaringan			
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan			
1	3	04	01	01		Jalan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	04	01	02		Jembatan	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02			Bangunan Air			
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03			Instalasi			
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Baku	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	5
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	08		Instalasi Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman	20	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	3	04	03	10		Instalasi Lainnya	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	3	04	04			Jaringan			
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik dan Komputer	40	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	10
1	3	04	04	04		Jaringan Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	05			Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian			
1	3	04	05	01		Alat Musik Modern/Band	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2

33. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya. Khusus perhitungan penyusutan secara bulanan akan mulai diterapkan Tahun Anggaran 2021. Perhitungan penyusutan dalam penyusunan Laporan Keuangan 2020 dilakukan secara tahunan.
34. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
35. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
36. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
37. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

38. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
39. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
40. Aset *ekstrakomtable* terdiri dari :
    a. Aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari/sama dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    b. Aset tetap gedung dan bangunan yang kurang dari/sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
    c. Aset tetap lainnya berupa buku yang dipinjamkan, hewan, biota perairan dan tanaman.
41. Aset ekstrakomtable dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapus bukukan.
42. Prosedur pemusnahan aset ekstrakomtable dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable yang akan dimusnahkan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas

suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
   1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah
      Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.
   2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
      Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan. Piutang ini sebagai *contrapost* atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.
   3. Pengakuan Beban
      Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.
7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
    a. Tanah
    b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
    c. BMD selain tanah dan bangunan
    d. Aset tak berwujud
11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.

13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria: dapat diidentifikasi, dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.
15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Perangkat lunak *Software* computer
    b. Hak paten, Hak cipta
    c. Lisensi dan Waralaba *(Franchise)*
    d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
    e. Goodwill
    f. Royalti
    g. Aset tak berwujud lainnya
    h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Pembelian
    b. Pengembangan internal
    c. Pertukaran
    d. Kerjasama
    e. Donasi/hibah; dan
    f. Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
    b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas
18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat

terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.

20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

   a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
   b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.

21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru. Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan Aset Tak Berwujud dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan.

22. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas dari penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

23. Software komputer sebagai ATB yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat diakui sebagai berikut :

   a. *Software* yang dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah (swakelola) tidak diakui sebagai ATB
   b. *Software* komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
   c. *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum;
   d. *Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan;
   e. Apabila *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian *integral* dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.

24. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.

25. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :

   a. masa manfaat dan metode amortisasi;
   b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan

c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.

26. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.

27. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, meliputi :

a. aset tetap yang rusak berat/usang;
b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
c. aset lain-lain lainnya antara lain:
   - kas/setara kas yang diblokir, disita atau kepemilikannya belum dapat teridentifikasi;
   - aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, tukar menukar);
   - aset hilang karena akibat bencana atau kelalaian;
   - aset yang masih dalam proses kepastian status hukum.

28. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

29. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology.*
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.15 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
   a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
   b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca
4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.16 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

   a. Kesalahan tidak berulang

   1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

      Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

   2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

      a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

      b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

         (1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

            (a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

            (b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

(2) Belanja dan Beban

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

(3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

(6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA 2022. Struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 dan 2021 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan	24.129.013.356.000,00	24.167.935.634.127,00	100,16	26.633.000.085.963,00	(2.465.064.451.836,00)
2	Belanja dan transfer	25.147.706.241.000,00	23.950.240.497.405,00	95,24	25.843.800.193.834,00	(1.893.559.696.429,00)
	Surplus/(Defisit)	**(1.018.692.885.000,00)**	**217.695.136.722,00**	**(21,37)**	**789.199.892.129,00**	**(571.504.755.407,00)**
3	Penerimaan Pembiayaan	1.909.692.885.000,00	1.909.773.865.813,00	100,00	861.492.992.625,00	1.048.280.873.188,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	891.000.000.000,00	891.000.000.000,00	100,00	215.000.000.000,00	676.000.000.000,00
	Pembiayaan netto	**1.018.692.885.000,00**	**1.018.773.865.813,00**	**100,01**	**646.492.992.625,00**	**372.280.873.188,00**
5	**SiLPA**	**-**	**1.236.469.002.535,00**	**-**	**1.435.692.884.754,00**	**(199.223.882.219,00)**

Penjelasan terinci realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp24.167.935.634.127,00

Pendapatan Daerah adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp24.129.013.356.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.167.935.634.127,00 atau 100,16%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp26.633.000.085.963,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.465.064.451.836,00 atau 9,26% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	16.141.754.406.000,00	16.264.618.853.852,00	100,76	14.695.474.898.162,00	1.569.143.955.690,00
2	Pendapatan Transfer	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00	(4.060.913.757.267,00)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	92.655.000.000,00	92.434.201.488,00	99,76	65.728.851.747,00	26.705.349.741,00
	Jumlah	**24.129.013.356.000,00**	**24.167.935.634.127,00**	**100,16**	**26.633.000.085.963,00**	**(2.465.064.451.836,00)**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp16.264.618.853.852,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp16.141.754.406.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.264.618.853.852,00 atau 100,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.695.474.898.162,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.569.143.955.690,00 atau 10,68% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	13.754.458.219.000,00	13.484.851.151.740,00	98,04	11.718.378.320.505,00	1.766.472.831.235,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	109.285.847.000,00	115.158.014.199,00	105,37	91.634.269.205,00	23.523.744.994,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	546.716.226.000,00	546.717.104.899,00	100,00	508.263.876.971,00	38.453.227.928,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	1.731.294.114.000,00	2.117.892.583.014,00	122,33	2.377.198.431.481,00	(259.305.848.467,00)
	Jumlah	**16.141.754.406.000,00**	**16.264.618.853.852,00**	**100,76**	**14.695.474.898.162,00**	**1.569.143.955.690,00**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp13.484.851.151.740,00

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp13.754.458.219.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.484.851.151.740,00 atau 98,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.718.378.320.505,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.766.472.831.235,00 atau 15,07%. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	5.521.380.840.000,00	5.432.525.592.000,00	98,39	4.758.837.101.600,00	673.688.490.400,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.466.000.000.000,00	2.886.101.450.650,00	83,27	2.775.978.070.000,00	110.123.380.650,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.156.225.094.000,00	2.248.760.733.492,00	104,29	1.826.681.450.277,00	422.079.283.215,00
4	Pajak Air Permukaan	17.243.453.000,00	18.802.964.785,00	109,04	17.243.160.079,00	1.559.804.706,00
5	Pajak Rokok	2.593.608.832.000,00	2.898.660.410.813,00	111,76	2.339.638.538.549,00	559.021.872.264,00
	Jumlah	**13.754.458.219.000,00**	**13.484.851.151.740,00**	**98,04**	**11.718.378.320.505,00**	**1.766.472.831.235,00**

Pendapatan Pajak Daerah **tidak mencapai target** dikarenakan:

- Fenomena kelangkaan pasokan *chip* semi konduktor yang berdampak pada stok dan penjualan kendaraan bermotor baru. Data dari Asosiasi Industri Sepeda motor Indonesia (AISI) menunjukkan angka penjualan kendaraan bermotor roda dua selama Mei tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis. Selama periode tersebut penjualan domestik pasar roda dua hanya sebanyak 248.235 unit. Angka ini turun sekitar 43% jika dibandingkan pencapaian bulan sebelumnya atau April 2022 yang membukukan penjualan 439.472 unit.
- Setiap pendaftaran unit kendaraan bermotor baru, selain dikenakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan tarif sebesar 12,5% juga dikenakan Pajak Kendaraan Bermotor dengan tarif untuk kepemilikan pertama pribadi sebesar 1,5%. Dengan demikian, tidak tercapainya pendapatan BBNKB juga berdampak langsung terhadap penerimaan PKB.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp115.158.014.199,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp109.285.847.000,00 dengan realisasi sebesar Rp115.158.014.199,00 atau 105,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp91.634.269.205,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.523.744.994,00 atau 25,67%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	22.103.022.000,00	25.848.603.574,00	116,95	17.612.618.195,00	8.235.985.379,00
2	Retribusi Jasa Usaha	83.742.700.000,00	85.078.946.825,00	101,60	67.852.456.270,00	17.226.490.555,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	3.440.125.000,00	4.230.463.800,00	122,97	6.169.194.740,00	(1.938.730.940,00)
	Jumlah	**109.285.847.000,00**	**115.158.014.199,00**	**105,37**	**91.634.269.205,00**	**23.523.744.994,00**

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp25.848.603.574,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp22.103.022.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.848.603.574,00 atau 116,95%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp17.612.618.195,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.235.985.379,00 atau 46,76% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	21.328.522.000,00	25.271.653.574,00	118,49	17.015.718.195,00	8.255.935.379,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	310.600.000,00	278.700.000,00	89,73	63.400.000,00	215.300.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	463.900.000,00	298.250.000,00	64,29	533.500.000,00	(235.250.000,00)
	Jumlah	**22.103.022.000,00**	**25.848.603.574,00**	**116,95**	**17.612.618.195,00**	**8.235.985.379,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum telah mencapai target, namun terdapat SKPD yang **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan :

- Kewenangan cetak peta topografi untuk perizinan air tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ditarik ke pemerintah pusat dan cetak peta WIUP atas perizinan minerba menjadi kewenangan pemerintah provinsi per bulan April 2022.
- Berkurangnya jumlah peserta pelatihan las dan mesin logam Balai Latihan Kerja Cilacap pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp25.271.653.574,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp21.328.522.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.271.653.574,00 atau 118,49%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp17.015.718.195,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.255.935.379,00 atau 48,52% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	21.328.522.000,00	25.271.653.574,00	118,49	17.015.718.195,00	8.255.935.379,00
	Jumlah	**21.328.522.000,00**	**25.271.653.574,00**	**118,49**	**17.015.718.195,00**	**8.255.935.379,00**

5.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp278.700.000,00

Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditargetkan sebesar Rp310.600.000,00 dengan realisasi sebesar Rp278.700.000,00 atau 89,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp63.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp215.300.000,00 atau 339,59% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	2.500.000,00	6.000.000,00	240,00	3.300.000,00	2.700.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	308.100.000,00	272.700.000,00	88,51	60.100.000,00	212.600.000,00
	Jumlah	**310.600.000,00**	**278.700.000,00**	**89,73**	**63.400.000,00**	**215.300.000,00**

5.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp298.250.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan ditargetkan sebesar Rp463.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp298.250.000,00 atau 64,29%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp533.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp235.250.000,00 atau 44,10% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	463.900.000,00	298.250.000,00	64,29	533.500.000,00	(235.250.000,00)
	Jumlah	**463.900.000,00**	**298.250.000,00**	**64,29**	**533.500.000,00**	**(235.250.000,00)**

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp85.078.946.825,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp83.742.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp85.078.946.825,00 atau 101,60%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp67.852.456.270,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.226.490.555,00 atau 25,39% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.165.636.400,00	48.995.329.563,00	108,48	38.307.608.734,00	10.687.720.829,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	452.000.000,00	536.446.650,00	118,68	458.284.775,00	78.161.875,00
3	Retribusi Terminal	3.006.561.000,00	3.868.353.200,00	128,66	1.296.264.750,00	2.572.088.450,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila"	6.882.076.600,00	3.524.730.000,00	51,22	694.235.000,00	2.830.495.000,00
5	Retribusi Kepelabuhan	4.296.000.000,00	6.535.788.500,00	152,14	5.532.632.500,00	1.003.156.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	734.950.000,00	646.295.350,00	87,94	269.133.000,00	377.162.350,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	23.205.476.000,00	20.972.003.562,00	90,38	21.294.297.511,00	(322.293.949,00)
	Jumlah	**83.742.700.000,00**	**85.078.946.825,00**	**101,60**	**67.852.456.270,00**	**17.226.490.555,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum telah mencapai target, namun terdapat SKPD yang **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan :

- Sewa kantin sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibuka kembali mulai bulan Juli 2022 sesuai Surat Ketetapan Bersama Empat Menteri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Covid-19*;
- Badan Penghubung masih dilakukan revitalisasi TMII yang berdampak terhadap jumlah kunjungan di Anjungan TMII;
- Penyewa gedung aula dan rumah dinas pada Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Sekretariat Daerah mengalami penurunan dan beberapa gedung masih dilakukan renovasi;

- Asrama Haji Donohudan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum sepenuhnya digunakan untuk menampung peserta haji, disebabkan adanya kebijakan pembatasan kuota haji dari Pemerintah Pusat; dan
- Pengunjung Taman Hutan Rakyat Baturaden dan Tawangmangu pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalami penurunan.

5.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp48.995.329.563,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp45.165.636.400,00 dengan realisasi sebesar Rp48.995.329.563,00 atau 108,48%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp38.307.608.734,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.687.720.829,00 atau 27,90% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.600.000.000,00	3.366.029.500,00	73,17	384.100.000,00	2.981.929.500,00
2	Dinas Kesehatan	271.478.000,00	672.314.100,00	247,65	227.436.500,00	444.877.600,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.538.650.000,00	8.162.613.237,00	124,84	7.052.041.238,00	1.110.571.999,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	4.715.000.000,00	4.264.111.751,00	90,44	3.687.879.541,00	576.232.210,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	477.000.000,00	482.220.480,00	101,09	412.747.200,00	69.473.280,00
6	Dinas Sosial	104.347.000,00	130.382.850,00	124,95	96.005.900,00	34.376.950,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.808.050.000,00	2.080.462.500,00	74,09	2.239.177.500,00	(158.715.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.286.550.000,00	4.483.553.630,00	104,60	4.287.836.770,00	195.716.860,00
9	Dinas Perhubungan	75.100.000,00	55.990.000,00	74,55	25.035.000,00	30.955.000,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	402.054.000,00	510.563.250,00	126,99	457.460.030,00	53.103.220,00
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	-
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.446.998.400,00	2.344.577.000,00	162,03	261.172.650,00	2.083.404.350,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	38.189.000,00	42.465.500,00	111,20	12.977.500,00	29.488.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.482.000.000,00	4.358.112.480,00	125,16	4.277.056.448,00	81.056.032,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	896.436.000,00	1.434.945.011,00	160,07	1.204.972.877,00	229.972.134,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.581.950.000,00	1.804.750.365,00	114,08	1.392.727.850,00	412.022.515,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	633.020.000,00	833.080.000,00	131,60	512.947.000,00	320.133.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.237.134.000,00	3.349.931.094,00	103,48	2.977.834.969,00	372.096.125,00
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.460.000,00	26.460.000,00	100,00	26.460.000,00	-
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.521.255.000,00	4.575.981.284,00	101,21	4.363.246.121,00	212.735.163,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.779.463.000,00	2.654.010.781,00	149,15	1.903.488.640,00	750.522.141,00
22	Badan Kepegawaian Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	10.000.000,00	2.000.000,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.950.902.000,00	2.251.974.750,00	115,43	1.351.805.000,00	900.169.750,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
24	Sekretariat Daerah	646.200.000,00	516.200.000,00	79,88	452.600.000,00	63.600.000,00
25	Sekretariat DPRD	552.600.000,00	552.600.000,00	100,00	550.600.000,00	2.000.000,00
26	Badan Penghubung	52.800.000,00	-	-	110.000.000,00	(110.000.000,00)
	Jumlah	**45.165.636.400,00**	**48.995.329.563,00**	**108,48**	**38.307.608.734,00**	**10.687.720.829,00**

5.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Rp536.446.650,00

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan ditargetkan sebesar Rp452.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp536.446.650,00 atau 118,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp458.284.775,00 mengalami kenaikan sebesar Rp78.161.875,00 atau 17,06% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	452.000.000,00	536.446.650,00	118,68	458.284.775,00	78.161.875,00
	Jumlah	**452.000.000,00**	**536.446.650,00**	**118,68**	**458.284.775,00**	**78.161.875,00**

5.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal Rp3.868.353.200,00

Pendapatan Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp3.006.561.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.868.353.200,00 atau 128,66%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.296.264.750,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.572.088.450,00 atau 198,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	3.006.561.000,00	3.868.353.200,00	128,66	1.296.264.750,00	2.572.088.450,00
	Jumlah	**3.006.561.000,00**	**3.868.353.200,00**	**128,66**	**1.296.264.750,00**	**2.572.088.450,00**

5.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Rp3.524.730.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp6.882.076.600,00 dengan realisasi sebesar Rp3.524.730.000,00 atau 51,22%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp694.235.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.830.495.000,00 atau 407,71% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Sosial	12.000.000,00	21.610.000,00	180,08	13.335.000,00	8.275.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	189.050.000,00	163.600.000,00	86,54	139.450.000,00	24.150.000,00
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	671.001.600,00	428.175.000,00	63,81	-	428.175.000,00
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	107.775.000,00	(107.775.000,00)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.250.000,00	124.500.000,00	1.106,67	15.400.000,00	109.100.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.016.375.000,00	1.811.770.000,00	36,12	-	1.811.770.000,00
7	Sekretariat Daerah	185.800.000,00	99.800.000,00	53,71	33.000.000,00	66.800.000,00
8	Sekretariat DPRD	249.400.000,00	285.050.000,00	114,29	158.680.000,00	126.370.000,00
9	Badan Penghubung	547.200.000,00	590.225.000,00	107,86	226.595.000,00	363.630.000,00
	Jumlah	**6.882.076.600,00**	**3.524.730.000,00**	**51,22**	**694.235.000,00**	**2.830.495.000,00**

5.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp6.535.788.500,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp4.296.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.535.788.500,00 atau 152,14%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.532.632.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.003.156.000,00 atau 18,13% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.296.000.000,00	6.535.788.500,00	152,14	5.532.632.500,00	1.003.156.000,00
	Jumlah	**4.296.000.000,00**	**6.535.788.500,00**	**152,14**	**5.532.632.500,00**	**1.003.156.000,00**

5.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp646.295.350,00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp734.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp646.295.350,00 atau 87,94%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp269.133.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp377.162.350,00 atau 140,14% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	200.000.000,00	172.904.000,00	86,45	-	172.904.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	510.950.000,00	447.946.350,00	87,67	256.788.000,00	191.158.350,00
3	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	24.000.000,00	25.445.000,00	106,02	12.345.000,00	13.100.000,00
	Jumlah	**734.950.000,00**	**646.295.350,00**	**87,94**	**269.133.000,00**	**377.162.350,00**

5.1.1.1.2.2.7 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp20.972.003.562,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp23.205.476.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.972.003.562,00 atau 90,38%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp21.294.297.511,00 mengalami penurunan sebesar Rp322.293.949,00 atau 1,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.990.000.000,00	1.965.855.400,00	98,79	1.688.769.844,00	277.085.556,00
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.486.419.000,00	11.831.532.372,00	87,73	11.039.412.404,00	792.119.968,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.154.000.000,00	5.961.662.790,00	96,87	7.061.053.263,00	(1.099.390.473,00)
4	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.575.057.000,00	1.212.953.000,00	77,01	1.505.062.000,00	(292.109.000,00)
	Jumlah	**23.205.476.000,00**	**20.972.003.562,00**	**90,38**	**21.294.297.511,00**	**(322.293.949,00)**

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp4.230.463.800,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp3.440.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.230.463.800,00 atau 122,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.169.194.740,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.938.730.940,00 atau 31,43% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	440.125.000,00	495.100.000,00	112,49	673.827.500,00	(178.727.500,00)
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.000.000.000,00	3.735.363.800,00	124,51	2.816.377.700,00	918.986.100,00
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	2.678.989.540,00	(2.678.989.540,00)
	Jumlah	**3.440.125.000,00**	**4.230.463.800,00**	**122,97**	**6.169.194.740,00**	**(1.938.730.940,00)**

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum — Rp495.100.000,00

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum ditargetkan sebesar Rp440.125.000,00 dengan realisasi sebesar Rp495.100.000,00 atau 112,49%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp673.827.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp178.727.500,00 atau 26,52% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	440.125.000,00	495.100.000,00	112,49	673.827.500,00	(178.727.500,00)
	Jumlah	**440.125.000,00**	**495.100.000,00**	**112,49**	**673.827.500,00**	**(178.727.500,00)**

5.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan — Rp3.735.363.800,00

Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan ditargetkan sebesar Rp3.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.735.363.800,00 atau 124,51%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.816.377.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp918.986.100,00 atau 32,63% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.000.000.000,00	3.735.363.800,00	124,51	2.816.377.700,00	918.986.100,00
	Jumlah	**3.000.000.000,00**	**3.735.363.800,00**	**124,51**	**2.816.377.700,00**	**918.986.100,00**

5.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) — Rp0,00

Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.678.989.540,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.678.989.540,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	2.678.989.540,00	(2.678.989.540,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**2.678.989.540,00**	**(2.678.989.540,00)**

Pemungutan Retribusi IMTA belum dapat dilaksanakan dikarenakan menunggu penetapan perubahan nomenklatur IMTA menjadi Izin Perpanjangan Tenaga Kerja Asing (PTKA) dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam propemperda tahun 2023.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan — Rp546.717.104.899,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp546.716.226.000,00 dengan realisasi sebesar Rp546.717.104.899,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp508.263.876.971,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.453.227.928,00 atau 7,57% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	5.643.744.000,00	5.643.744.878,00	100,00	6.314.626.659,00	(670.881.781,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	541.072.482.000,00	541.073.360.021,00	100,00	501.949.250.312,00	39.124.109.709,00
	Jumlah	**546.716.226.000,00**	**546.717.104.899,00**	**100,00**	**508.263.876.971,00**	**38.453.227.928,00**

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN — Rp5.643.744.878,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ditargetkan sebesar Rp5.643.744.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.643.744.878,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.314.626.659,00 mengalami penurunan sebesar Rp670.881.781,00 atau 10,62% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Deviden PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	2.445.643.000,00	2.445.643.698,00	100,00	3.325.376.041,00	(879.732.343,00)
2	Deviden PT. Asuransi Bangun Askrida	3.198.101.000,00	3.198.101.180,00	100,00	2.989.250.618,00	208.850.562,00
	Jumlah	**5.643.744.000,00**	**5.643.744.878,00**	**100,00**	**6.314.626.659,00**	**(670.881.781,00)**

5.1.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD — Rp541.073.360.021,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp541.072.482.000,00 dengan realisasi sebesar Rp541.073.360.021,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp501.949.250.312,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.124.109.709,00 atau 7,79% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	100,00	316.959.000,00	6.183.041.000,00
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	408.645.620.000,00	408.645.620.567,00	100,00	375.956.828.408,00	32.688.792.159,00
3	Bagian Laba BPR-BKK	69.771.667.000,00	69.771.757.284,00	100,00	63.975.590.182,00	5.796.167.102,00
4	Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)	7.620.941.000,00	7.621.727.841,00	100,01	6.812.844.537,00	808.883.304,00
5	Deviden PT. PRPP	-	-	-	-	-
6	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	9.024.857.000,00	9.024.857.185,00	100,00	15.651.337.104,00	(6.626.479.919,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	Deviden PT. Sarana Patra Hulu Cepu	31.301.982.000,00	31.301.982.000,00	100,00	32.002.416.626,00	(700.434.626,00)
8	Deviden PT. Jamkrida	8.207.415.000,00	8.207.415.144,00	100,00	7.233.274.455,00	974.140.689,00
	Jumlah	**541.072.482.000,00**	**541.073.360.021,00**	**100,00**	**501.949.250.312,00**	**39.124.109.709,00**

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp2.117.892.583.014,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp1.731.294.114.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.117.892.583.014,00 atau 122,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.377.198.431.481,00 mengalami penurunan sebesar Rp259.305.848.467,00 atau 10,91% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	666.235.000,00	605.007.560,00	90,81	22.089.947.250,00	(21.484.939.690,00)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro	30.000.000.000,00	14.585.286.961,00	48,62	33.421.665.370,00	(18.836.378.409,00)
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga	90.000.000.000,00	54.536.127.340,00	60,60	52.487.671.175,00	2.048.456.165,00
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	15.890.000,00	-	8.612.000,00	7.278.000,00
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	38.940.661.000,00	52.115.165.872,00	133,83	34.263.799.325,00	17.851.366.547,00
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	5.886.922.048,00	-	2.779.750.191,00	3.107.171.857,00
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	120.000.000.000,00	178.434.784.980,00	148,70	115.195.838.121,00	63.238.946.859,00
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	193.690.851,00	-	181.042.060,00	12.648.791,00
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	611.752.000,00	-	-	611.752.000,00
15	Pendapatan dari Pengembalian	-	1.493.643.033,00	-	1.809.013.300,00	(315.370.267,00)
16	Pendapatan BLUD	1.451.687.218.000,00	1.809.050.418.298,00	124,62	2.106.839.090.275,00	(297.788.671.977,00)
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	20.017.000,00	-	-	20.017.000,00
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	343.877.071,00	-	-	343.877.071,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
21	Pendapatan Zakat	-	-	-	-	-
22	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	-	-	-	1.739.312.072,00	(1.739.312.072,00)
23	Pendapatan Lain-Lain SKPKD	-	-	-	6.382.690.342,00	(6.382.690.342,00)
	Jumlah	**1.731.294.114.000,00**	**2.117.892.583.014,00**	**122,33**	**2.377.198.431.481,00**	**(259.305.848.467,00)**

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp605.007.560,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp666.235.000,00 dengan realisasi sebesar Rp605.007.560,00 atau 90,81%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp22.089.947.250,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.484.939.690,00 atau 97,26% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	61.735.000,00	146.601.560,00	237,47	324.962.000,00	(178.360.440,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	20.826.561.000,00	(20.826.561.000,00)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.000.000,00	16.360.000,00	41,95	23.750.000,00	(7.390.000,00)
4	Dinas Koperasi dan UKM	-	46.725.000,00	-	-	46.725.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	565.500.000,00	395.321.000,00	69,91	914.674.250,00	(519.353.250,00)
	Jumlah	**666.235.000,00**	**605.007.560,00**	**90,81**	**22.089.947.250,00**	**(21.484.939.690,00)**

5.1.1.1.4.2 Jasa Giro Rp14.585.286.961,00

Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.585.286.961,00 atau 48,62%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp33.421.665.370,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.836.378.409,00 atau 56,36% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000.000,00	14.585.286.961,00	48,62	33.421.665.370,00	(18.836.378.409,00)
	Jumlah	**30.000.000.000,00**	**14.585.286.961,00**	**48,62**	**33.421.665.370,00**	**(18.836.378.409,00)**

5.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga Rp54.536.127.340,00

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp90.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp54.536.127.340,00 atau 60,60%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp52.487.671.175,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.048.456.165,00 atau 3,90% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.000.000.000,00	54.536.127.340,00	60,60	52.487.671.175,00	2.048.456.165,00
	Jumlah	**90.000.000.000,00**	**54.536.127.340,00**	**60,60**	**52.487.671.175,00**	**2.048.456.165,00**

5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp15.890.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp15.890.000,00,

apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.612.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.278.000,00 atau 84,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	-	-	8.612.000,00	(8.612.000,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	15.890.000,00	-	-	15.890.000,00
	Jumlah	**-**	**15.890.000,00**	**-**	**8.612.000,00**	**7.278.000,00**

5.1.1.1.4.5 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp52.115.165.872,00

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain ditargetkan sebesar Rp38.940.661.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.115.165.872,00 atau 133,83%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp34.263.799.325,00 mengalami kenaikan sebesar Rp17.851.366.547,00 atau 52,10% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pengelolan Sumber Daya Air	-	77.770.500,00	-	-	77.770.500,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	-	5.000,00	-	-	5.000,00
3	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00
4	Dinas Perhubungan	18.800.000.000,00	22.409.202.336,00	119,20	12.549.852.000,00	9.859.350.336,00
5	Dinas Arsip dan Perpustakaan	26.811.000,00	26.811.000,00	100,00	1.224.768.425,00	(1.197.957.425,00)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.528.752.000,00	1.514.118.650,00	99,04	-	1.514.118.650,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	5.821.561.186,00	-	-	5.821.561.186,00
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	2.427.450,00	-	-	2.427.450,00
9	Badan Kepegawaian Daerah	745.000.000,00	791.400.000,00	106,23	643.900.000,00	147.500.000,00
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	17.840.098.000,00	21.470.469.750,00	120,35	19.845.278.900,00	1.625.190.850,00
	Jumlah	**38.940.661.000,00**	**52.115.165.872,00**	**133,83**	**34.263.799.325,00**	**17.851.366.547,00**

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp5.886.922.048,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp5.886.922.048,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.779.750.191,00 mengalami kenaikan sebesar Rp3.107.171.857,00 atau 111,78% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	-	-	2.779.750.191,00	(2.779.750.191,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	5.886.922.048,00	-	-	5.886.922.048,00
	Jumlah	**-**	**5.886.922.048,00**	**-**	**2.779.750.191,00**	**3.107.171.857,00**

5.1.1.1.4.7 Pendapatan Denda Pajak Rp178.434.784.980,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp120.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp178.434.784.980,00 atau 148,70%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp115.195.838.121,00 mengalami kenaikan sebesar Rp63.238.946.859,00 atau 54,90% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	120.000.000.000,00	178.434.784.980,00	148,70	115.195.838.121,00	63.238.946.859,00
	Jumlah	**120.000.000.000,00**	**178.434.784.980,00**	**148,70**	**115.195.838.121,00**	**63.238.946.859,00**

5.1.1.1.4.8 Pendapatan Denda Retribusi Rp193.690.851,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp193.690.851,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp181.042.060,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.648.791,00 atau 6,99% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	75.000,00	-	-	75.000,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja		31.680,00	-	90.618,00	(58.938,00)
3	Dinas Perhubungan	-	69.933.800,00	-	62.112.570,00	7.821.230,00
4	Dinas Kelautan dan perikanan	-	122.570.192,00	-	117.265.756,00	5.304.436,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	1.080.179,00	-	1.573.116,00	(492.937,00)
	Jumlah	**-**	**193.690.851,00**	-	**181.042.060,00**	**12.648.791,00**

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp611.752.000,00

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp611.752.000,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp611.752.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	611.752.000,00	-	-	611.752.000,00
	Jumlah	**-**	**611.752.000,00**	-	**-**	**611.752.000,00**

5.1.1.1.4.10 Pendapatan dari Pengembalian Rp1.493.643.033,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.493.643.033,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.809.013.300,00 mengalami penurunan sebesar Rp315.370.267,00 atau 17,43% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.493.643.033,00	-	1.809.013.300,00	(315.370.267,00)
	Jumlah	**-**	**1.493.643.033,00**	-	**1.809.013.300,00**	**(315.370.267,00)**

5.1.1.1.4.11 Pendapatan BLUD Rp1.809.050.418.298,00

Pendapatan BLUD ditargetkan sebesar Rp1.451.687.218.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.809.050.418.298,00 atau 124,62%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.106.839.090.275,00 mengalami penurunan sebesar Rp297.788.671.977,00 atau 14,13% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	732.044.818.000,00	893.806.891.320,00	122,10	1.096.083.274.297,00	(202.276.382.977,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	382.268.400.000,00	512.016.637.608,00	133,94	555.980.036.192,00	(43.963.398.584,00)
3	RSUD Tugurejo Semarang	164.000.000.000,00	201.494.647.182,00	122,86	221.383.394.575,00	(19.888.747.393,00)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	41.374.000.000,00	49.303.125.064,00	119,16	51.102.616.824,00	(1.799.491.760,00)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	54.000.000.000,00	74.960.514.784,00	138,82	49.509.558.788,00	25.450.955.996,00
6	RSJD Surakarta	36.000.000.000,00	34.951.606.511,00	97,09	76.247.667.943,00	(41.296.061.432,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	42.000.000.000,00	42.516.995.829,00	101,23	56.532.541.656,00	(14.015.545.827,00)
	Jumlah	**1.451.687.218.000,00**	**1.809.050.418.298,00**	**124,62**	**2.106.839.090.275,00**	**(297.788.671.977,00)**

5.1.1.1.4.12 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp20.017.000,00

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp20.017.000,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.017.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	20.017.000,00	-	-	20.017.000,00
	Jumlah	**-**	**20.017.000,00**	-	**-**	**20.017.000,00**

5.1.1.1.4.13 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah Rp343.877.071,00

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp343.877.071,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp343.877.071,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	343.877.071,00	-	-	343.877.071,00
	Jumlah	**-**	**343.877.071,00**	-	**-**	**343.877.071,00**

5.1.1.1.4.14 Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa Rp0,00

Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.739.312.072,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.739.312.072,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	SKPKD	-	-	-	1.739.312.072,00	(1.739.312.072,00)
	Jumlah	**-**	**-**	-	**1.739.312.072,00**	**(1.739.312.072,00)**

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur pendapatan dari hasil temuan pemeriksaan dihilangkan. Tahun 2022 terdapat pendapatan atas hasil temuan pemeriksa dimasukkan dalam nomenklatur Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

5.1.1.1.4.15 Pendapatan Lain-Lain SKPD Rp0,00

Pendapatan Lain-Lain SKPD terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.382.690.342,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.382.690.342,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	-
2	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	-	-	-	-
3	Dinas PU Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-	-	-	-
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	62.686,00	(62.686,00)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	17.322.000,00	(17.322.000,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	-
7	Dinas Perhubungan	-	-	-	5.200.000,00	(5.200.000,00)
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-	-
9	Dinas Enrgi Sumber Daya Mineral	-	-	-	6.759.000,00	(6.759.000,00)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-
11	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	-	-	-	53.722.000,00	(53.722.000,00)
12	SKPKD	-	-	-	6.299.151.156,00	(6.299.151.156,00)
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	473.500,00	(473.500,00)
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**6.382.690.342,00**	**(6.382.690.342,00)**

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Investarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, nomenklatur pendapatan lain-lain SKPD dihilangkan. Tahun 2022 terdapat pendapatan lain-lain SKPD dimasukkan dalam nomenklatur Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer Rp7.810.882.578.787,00

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp7.894.603.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.810.882.578.787,00 atau 98,94% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.871.796.336.054,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.060.913.757.267,00 atau 34,21% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemrintah Pusat	7.894.603.950.000,00	7.810.882.578.787,00	98,94	11.871.796.336.054,00	(4.060.913.757.267,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah	**7.894.603.950.000,00**	**7.810.882.578.787,00**	**98,94**	**11.871.796.336.054,00**	**(4.060.913.757.267,00)**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp7.810.882.578.787,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp7.894.603.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.810.882.578.787,00 atau 98,94%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.871.796.336.054,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.060.913.757.267,00 atau 34,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Perimbangan	7.833.251.450.000,00	7.749.530.078.787,00	98,93	11.803.085.731.054,00	(4.053.555.652.267,00)
2	Dana Insentif Daerah (DID)	61.352.500.000,00	61.352.500.000,00	100,00	68.710.605.000,00	(7.358.105.000,00)
	Jumlah	**7.894.603.950.000,00**	**7.810.882.578.787,00**	**98,94**	**11.871.796.336.054,00**	**(4.060.913.757.267,00)**

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan Rp7.749.530.078.787,00

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp7.833.251.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.749.530.078.787,00 atau 98,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp11.803.085.731.054,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.053.555.652.267,00 atau 34,34% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	837.981.204.000,00	928.700.713.880,00	110,83	1.035.845.630.434,00	(107.144.916.554,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3.435.721.631.000,00	3.435.718.090.405,00	100,00	3.432.978.859.000,00	2.739.231.405,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	424.152.663.000,00	371.734.785.185,00	87,64	401.885.567.398,00	(30.150.782.213,00)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.135.395.952.000,00	3.013.376.489.317,00	96,11	6.932.375.674.222,00	(3.918.999.184.905,00)
	Jumlah	**7.833.251.450.000,00**	**7.749.530.078.787,00**	**98,93**	**11.803.085.731.054,00**	**(4.053.555.652.267,00)**

Pendapatan Transfer mendasari pada :

1. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor S-170/PK/2021 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar DBH pada Tahun Anggaran 2022; dan
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 24/KM.7/2022 tentang Penghentian Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Subbidang Penguatan Percepatan Penurunan *Stunting* Menu Penyediaan Makanan Tambahan (Pabrikan) Tahun Anggaran 2022.

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp928.700.713.880,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp837.981.204.000,00 dengan

realisasi sebesar Rp928.700.713.880,00 atau 110,83%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.035.845.630.434,00 mengalami penurunan sebesar Rp107.144.916.554,00 atau 10,34% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	56.502.324.000,00	66.189.247.793,00	117,14	78.170.445.518,00	(11.981.197.725,00)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	497.008.231.000,00	560.482.715.387,00	112,77	690.318.309.644,00	(129.835.594.257,00)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	273.542.752.000,00	283.039.127.270,00	103,47	254.770.117.163,00	28.269.010.107,00
4	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	6.097.278.000,00	7.537.039.968,00	123,61	9.386.722.285,00	(1.849.682.317,00)
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	325.796.000,00	1.171.008.442,00	359,43	204.832.300,00	966.176.142,00
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	3.458.222.000,00	6.708.488.500,00	193,99	1.020.387.900,00	5.688.100.600,00
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	943.564.000,00	3.368.143.349,00	356,96	1.851.513.250,00	1.516.630.099,00
8	Bagi Hasil Dari Minerba	103.037.000,00	204.943.171,00	198,90	123.302.374,00	81.640.797,00
	Jumlah	**837.981.204.000,00**	**928.700.713.880,00**	**110,83**	**1.035.845.630.434,00**	**(107.144.916.554,00)**

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3.435.718.090.405,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp3.435.721.631.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.435.718.090.405,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.432.978.859.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.739.231.405,00 atau 0,08% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3.435.721.631.000,00	3.435.718.090.405,00	100,00	3.432.978.859.000,00	2.739.231.405,00
	Jumlah	**3.435.721.631.000,00**	**3.435.718.090.405,00**	**100,00**	**3.432.978.859.000,00**	**2.739.231.405,00**

5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp371.734.785.185,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp424.152.663.000,00 dengan realisasi sebesar Rp371.734.785.185,00 atau 87,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp401.885.567.398,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.150.782.213,00 atau 7,50% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	265.110.726.000,00	230.469.645.393,00	86,93	204.019.889.120,00	26.449.756.273,00
2	DAK Bidang Kesehatan	38.282.603.000,00	37.731.575.276,00	98,56	99.424.571.254,00	(61.692.995.978,00)
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	51.264.144.000,00	46.503.957.400,00	90,71	39.801.657.780,00	6.702.299.620,00
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	15.855.932.000,00	11.099.152.400,00	70,00	9.301.772.343,00	1.797.380.057,00
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	35.089.637.000,00	28.130.594.000,00	80,17	13.409.579.190,00	14.721.014.810,00
6	DAK Bidang Pertanian	-	-	-	4.217.308.288,00	(4.217.308.288,00)
7	DAK Bidang Kehutanan	18.549.621.000,00	17.799.860.716,00	95,96	26.823.374.450,00	(9.023.513.734,00)
8	DAK Bidang Pariwisata	-	-	-	4.887.414.973,00	(4.887.414.973,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
9	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-
	Jumlah	**424.152.663.000,00**	**371.734.785.185,00**	**87,64**	**401.885.567.398,00**	**(30.150.782.213,00)**

5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp3.013.376.489.317,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.135.395.952.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.013.376.489.317,00 atau 96,11%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.932.375.674.222,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.918.999.184.905,00 atau 56,53% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.075.055.028.000,00	1.018.083.273.208,00	94,70	1.101.018.112.000,00	(82.934.838.792,00)
2	Bantuan Operasional Sekolah	2.049.482.720.000,00	1.987.260.551.320,00	96,96	5.821.222.770.000,00	(3.833.962.218.680,00)
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	2.465.049.000,00	120.680.559,00	4,90	233.096.459,00	(112.415.900,00)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	3.791.355.000,00	3.727.564.040,00	98,32	3.281.743.678,00	445.820.362,00
5	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil	601.800.000,00	344.543.290,00	57,25	2.271.473.316,00	(1.926.930.026,00)
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	4.000.000.000,00	3.839.876.900,00	96,00	3.487.300.769,00	352.576.131,00
7	Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan	-	-	-	861.178.000,00	(861.178.000,00)
	Jumlah	**3.135.395.952.000,00**	**3.013.376.489.317,00**	**96,11**	**6.932.375.674.222,00**	**(3.918.999.184.905,00)**

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) Rp61.352.500.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp61.352.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.352.500.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp68.710.605.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.358.105.000,00 atau 10,71% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	61.352.500.000,00	61.352.500.000,00	100,00	68.710.605.000,00	(7.358.105.000,00)
	Jumlah	**61.352.500.000,00**	**61.352.500.000,00**	**100,00**	**68.710.605.000,00**	**(7.358.105.000,00)**

DID yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan kriteria utama antara lain penyajian laporan keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyampaian Perda APBD secara tepat waktu, penggunaan *e-budgeting & e-procurement* sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp0,00

Pendapatan Transfer Antar Daerah terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	-	-	-	-
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	-	-	-

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp92.434.201.488,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp92.655.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.434.201.488,00 atau 99,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp65.728.851.747,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.705.349.741,00 atau 40,63% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	92.655.000.000,00	92.161.740.403,00	99,47	64.882.003.502,00	27.279.736.901,00
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	272.461.085,00	-	846.848.245,00	(574.387.160,00)
	Jumlah	**92.655.000.000,00**	**92.434.201.488,00**	**99,76**	**65.728.851.747,00**	**26.705.349.741,00**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp92.161.740.403,00

Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp92.655.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.161.740.403,00 atau 99,47%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64.882.003.502,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.279.736.901,00 atau 42,05% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	49.905.000.000,00	49.411.740.407,00	99,01	42.132.003.502,00	7.279.736.905,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	22.750.000.000,00	22.749.999.996,00	100,00	22.750.000.000,00	(4,00)
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	100,00	-	20.000.000.000,00
	Jumlah	**92.655.000.000,00**	**92.161.740.403,00**	**99,47**	**64.882.003.502,00**	**27.279.736.901,00**

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Rp272.461.085,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp272.461.085,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp846.848.245,00 mengalami penurunan sebesar Rp574.387.160,00 atau 67,83% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	272.461.085,00	-	846.848.245,00	(574.387.160,00)
	Jumlah	**-**	**272.461.085,00**	**-**	**846.848.245,00**	**(574.387.160,00)**

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp25.147.706.241.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.950.240.497.405,00 atau 95,24%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.843.800.193.834,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.893.559.696.429,00 atau 7,33% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Operasional	14.233.669.493.000,00	13.456.887.671.949,00	94,54	16.826.577.831.470,00	(3.369.690.159.521,00)
2	Belanja Modal	2.015.151.410.000,00	1.713.641.630.081,00	85,04	1.447.620.411.245,00	266.021.218.836,00
3	Belanja Tidak Terduga	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00	(55.757.825.900,00)
4	Belanja Transfer	8.862.885.338.000,00	8.763.165.716.275,00	98,87	7.497.298.646.119,00	1.265.867.070.156,00
	Jumlah	**25.147.706.241.000,00**	**23.950.240.497.405,00**	**95,24**	**25.843.800.193.834,00**	**(1.893.559.696.429,00)**

Belanja daerah di dalamnya telah termasuk *mandatory spending* atau belanja wajib merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain :

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar Rp7.858.237.744.000,00 atau 31,25% dari total belanja daerah sebesar Rp25.147.706.241.000,00. Urusan Pendidikan terealisasi sebesar Rp7.489.154.821.111,00 atau 95,30% dengan rincian sebagai berikut :

	Bidang Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Pendidikan	7.545.153.346.000	7.190.594.470.719
b.	Kepemudaan dan Olahraga	283.207.868.000	269.062.870.651
c.	Perpustakaan	29.876.530.000	29.497.479.741
	Jumlah	7.858.237.744.000	7.489.154.821.111

2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan) dianggarkan sebesar Rp2.968.547.398.188,00 atau 11,80% dari total belanja daerah sebesar Rp25.147.706.241.000,00. Urusan kesehatan terealisasi sebesar Rp2.547.648.503.548,00 atau 85,82% dengan rincian sebagai berikut :

	Bidang Urusan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
a.	Kesehatan	2.966.792.497.188	2.545.898.024.252
b.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.754.901.000	1.750.479.296
	Jumlah	2.968.547.398.188	2.547.648.503.548

3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN) dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar Rp1.185.620.696.405,00 dengan realisasi sebesar Rp1.105.066.809.150,00 atau 93,21% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran			Realisasi			
		Sumber Pendanaan		Jumlah	Sumber Pendanaan		Jumlah	%
		DAU	DBH		DAU	DBH		
I	**BELANJA MODAL**	**428.246.014.405**	**-**	**428.246.014.405**	**415.610.250.311**	**-**	**415.610.250.311**	**97,05**
1	Jalan/ jembatan	372.721.313.000		372.721.313.000	363.957.488.216	-	363.957.488.216	97,65
2	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi	35.124.606.405		35.124.606.405	31.280.798.100		31.280.798.100	89,06
3	Fasilitas air bersih/air minum	20.400.095.000		20.400.095.000	20.371.963.995		20.371.963.995	99,86
II	**BELANJA PEMELIHARAAN**	**160.871.786.000**	**-**	**160.871.786.000**	**157.689.991.374**	**-**	**157.689.991.374**	**98,02**
1	Jalan/ jembatan	125.063.505.000		125.063.505.000	122.457.262.626		22.457.262.626	97,92
		19.543.115.000		19.543.115.000	19.113.461.348		19.113.461.348	97,80
2	Fasilitas pendidikan	641.130.000		641.130.000	641.130.000		641.130.000	100,00
3	Fasilitas irigasi/ air limbah/ sanitasi	15.624.036.000		15.624.036.000	15.478.137.400		15.478.137.400	99,07
III	**BELANJA HIBAH**	**-**	**243.296.460.000**	**243.296.460.000**	**-**	**241.545.335.000**	**241.545.335.000**	**99,28**
1	Fasilitas pendidikan	-	243.296.460.000	243.296.460.000	-	241.545.335.000	241.545.335.000	99,28
IV	**BELANJA BANTUAN SOSIAL**	**10.000.000.000**	**-**	**10.000.000.000**	**9.993.000.000**	**-**	**9.993.000.000**	**99,93**
1	Fasilitas pendidikan	10.000.000.000		10.000.000.000	9.993.000.000		9.993.000.000	99,93
V	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**

No.	Jenis Belanja	Anggaran			Realisasi			
		Sumber Pendanaan		Jumlah	Sumber Pendanaan		Jumlah	%
		DAU	DBH		DAU	DBH		
VI	**BELANJA GAJI GURU NON PNS/GURU PPPK**	**-**	**343.206.436.000**	**343.206.436.000**	**-**	**280.228.232.465**	**280.228.232.465**	**81,65**
Jumlah Belanja Untuk Program Pemulihan Ekonomi Daerah dan Pembangunan Manusia		**599.117.800.405**	**586.502.896.000**	**1.185.620.696.405**	**583.293.241.685**	**521.773.567.465**	**1.105.066.809.150**	**93,21**

4. Belanja APBD untuk mengantisipasi dampak inflasi melalui kebijakan penganggaran belanja wajib perlindungan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun anggaran 2022. Dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar Rp27.729.706.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.673.108.030,00 atau 99,80% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran			Realisasi			
		Sumber Pendanaan		Jumlah	Sumber Pendanaan		Jumlah	%
		DAU	DBH		DAU	DBH		
I	**BANTUAN SOSIAL**							
	a. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Kartu Jateng Sejahtera)	8.750.250.000	-	8.750.250.000	8.750.250.000	-	8.750.250.000	100,00
	b. Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap (Premi Nelayan)	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	943.402.030	943.402.030	94,3
	Subtotal BANTUAN SOSIAL	**8.750.250.000**	**1.000.000.000**	**9.750.250.000**	**8.750.250.000**	**943.402.030**	**9.693.652.030**	**99,42**
II	**PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA**							
	Subtotal PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
III	**SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI**							
	a. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	17.979.456.000	-	17.979.456.000	17.979.456.000	-	17.979.456.000	100,00

No.	Uraian	Anggaran			Realisasi			
		Sumber Pendanaan		Jumlah	Sumber Pendanaan		Jumlah	%
		DAU	DBH		DAU	DBH		
	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi (Trans Jateng)							
	Subtotal SUBSIDI SEKTOR TRANSPORTASI	**17.979.456.000**	**-**	**17.979.456.000**	**17.979.456.000**	**-**	**17.979.456.000**	**100,00**
IV	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**							
	Subtotal PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0,00**
JUMLAH BELANJA WAJIB PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2022		**26.729.706.000**	**1.000.000.000**	**27.729.706.000**	**6.729.706.000**	**943.402.030**	**27.673.108.030**	**99,80**

Belanja daerah termasuk di dalamnya belanja atas bantuan dari Pemerintah Negara Bagian Queensland Australia yang digunakan untuk program fasilitasi bantuan *Covid-19* di Jawa Tengah dalam bentuk :

a. Program Bantuan uang untuk spesifik anak yatim/ piatu/ yatim piatu yang orang tuanya meninggal di masa pandemi *Covid-19*;
b. Program Bantuan peralatan pelatihan peningkatan produktivitas ekonomi perempuan yang menjadi kepala keluarga atau perempuan rentan lainnya;
c. Memfasilitasi perangkat penyimpanan vaksin pada suhu yang sesuai untuk menjaga kualitas vaksin;
d. Ambulans air untuk Kepulauan Karimunjawa yang terpencil;
e. Program penyediaan vaksin *mobile* dan peralatan lengkap termasuk sumber daya manusia untuk menjangkau seluruh warga Jawa Tengah;
f. Bantuan vitamin kepada santri yang tersebar di 98 pondok pesantren di Jawa Tengah;
g. Pemberian bantuan Usaha Produktif Ekonomi bagi Kelompok Usaha Bersama/KUBE;
h. Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia/LKSLU;
i. Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Anak Tingkat Lanjut/LKSA; dan
j. Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas/LKSPD.

Bantuan tersebut dialokasikan kepada 4 SKPD sebagai berikut :

SKPD	Hibah Quennsland		
	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan			
Belanja Operasi	1.561.420.000,00	1.499.294.504,00	96,02
Belanja Modal	3.038.580.000,00	2.985.547.900,00	98,25
Sub Total	**4.600.000.000,00**	**4.484.842.404,00**	**97,50**
Dinas Sosial			
Belanja Operasi	11.920.000.000,00	11.920.000.000,00	100,00
Sub Total	**11.920.000.000,00**	**11.920.000.000,00**	**100,00**

SKPD	Hibah Quennsland		
	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DP3AKB			
Belanja Operasi	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	100,00
Sub Total	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**100,00**
Sekretariat Daerah (Biro Kesejahteraan Rakyat)			
Belanja Operasi	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00
Sub Total	**1.800.000.000,00**	**1.800.000.000,00**	**100,00**
Total	**19.920.000.000,00**	**19.804.842.404,00**	**99,42**

5.1.2.1 Belanja Operasional Rp13.456.887.671.949,00

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp14.233.669.493.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.456.887.671.949,00 atau 94,54%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.826.577.831.470,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.369.690.159.521,00 atau 20,03% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Pegawai	6.217.355.037.000,00	5.902.903.886.767,00	94,94	5.685.925.255.020,00	216.978.631.747,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.750.890.367.000,00	5.377.369.153.895,00	93,50	5.345.399.454.776,00	31.969.699.119,00
3	Belanja Subsidi	6.405.087.000,00	4.958.884.836,00	77,42	90.482.166,00	4.868.402.670,00
4	Belanja Hibah	2.170.297.452.000,00	2.092.761.564.803,00	96,43	5.728.982.384.318,00	(3.636.220.819.515,00)
5	Belanja Bantuan Sosial	88.721.550.000,00	78.894.181.648,00	88,92	66.180.255.190,00	12.713.926.458,00
	Jumlah	**14.233.669.493.000,00**	**13.456.887.671.949,00**	**94,54**	**16.826.577.831.470,00**	**(3.369.690.159.521,00)**

Penurunan belanja operasional yang sangat siginifikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat, dimana Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar semula dicatat oleh Pemerintah Provinsi pada Tahun Anggaran 2022 dicatat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga mengkoreksi nilai total belanja secara keseluruhan.

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp5.902.903.886.767,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp6.217.355.037.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.902.903.886.767,00 atau 94,94%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.685.925.255.020,00 mengalami kenaikan sebesar Rp216.978.631.747,00 atau 3,82% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.153.059.620.000,00	2.954.645.868.145,00	93,71	2.800.732.640.726,00	153.913.227.419,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.577.363.411.000,00	1.555.169.393.468,00	98,59	1.478.733.117.392,00	76.436.276.076,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.178.155.995.000,00	1.111.780.481.397,00	94,37	1.122.788.184.117,00	(11.007.702.720,00)
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	121.343.749.000,00	120.364.254.821,00	99,19	112.475.592.654,00	7.888.662.167,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	241.829.000,00	240.276.440,00	99,36	241.290.440,00	(1.014.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	24.889.431.000,00	24.889.431.000,00	100,00	23.793.042.000,00	1.096.389.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	-	-	-	-	-
8	Belanja Pegawai BLUD	162.301.002.000,00	135.814.181.496,00	83,68	147.161.387.691,00	(11.347.206.195,00)
	Jumlah	**6.217.355.037.000,00**	**5.902.903.886.767,00**	**94,94**	**5.685.925.255.020,00**	**216.978.631.747,00**

Belanja Pegawai **tidak terealisasi** antara lain dikarenakan adanya kekosongan jabatan struktural dan ASN yang memasuki purna tugas, meninggal dunia serta *accres* gaji.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN **Rp2.954.645.868.145,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp3.153.059.620.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.954.645.868.145,00 atau 93,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.800.732.640.726,00 mengalami kenaikan sebesar Rp153.913.227.419,00 atau 5,50% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.232.965.501.000,00	2.067.545.755.591,00	92,59	1.884.214.635.258,00	183.331.120.333,00
2	Dinas Kesehatan	42.584.810.000,00	41.726.646.584,00	97,98	43.587.800.574,00	(1.861.153.990,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	96.548.579.000,00	95.413.142.422,00	98,82	86.883.449.175,00	8.529.693.247,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	61.030.859.000,00	60.407.302.828,00	98,98	56.000.903.161,00	4.406.399.667,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	49.339.836.000,00	48.630.134.900,00	98,56	42.044.917.111,00	6.585.217.789,00
6	RSUD Kelet Donorejo	15.795.789.000,00	15.424.237.845,00	97,65	14.606.571.173,00	817.666.672,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	30.227.008.000,00	29.343.381.021,00	97,08	25.273.660.120,00	4.069.720.901,00
8	RSJD Surakarta	30.615.380.000,00	29.484.978.757,00	96,31	28.301.829.484,00	1.183.149.273,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	20.881.846.000,00	20.112.198.831,00	96,31	18.195.186.987,00	1.917.011.844,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	38.733.045.000,00	36.154.835.978,00	93,34	41.258.508.362,00	(5.103.672.384,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	33.313.203.000,00	33.093.928.828,00	99,34	33.746.803.484,00	(652.874.656,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.576.501.000,00	5.533.040.384,00	99,22	5.291.684.096,00	241.356.288,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.772.874.000,00	4.666.627.444,00	97,77	4.920.377.760,00	(253.750.316,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.770.238.000,00	3.694.455.365,00	97,99	3.905.648.268,00	(211.192.903,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.711.495.000,00	2.704.095.236,00	99,73	2.477.321.451,00	226.773.785,00
16	Dinas Sosial	50.081.172.000,00	43.226.843.893,00	86,31	45.003.482.798,00	(1.776.638.905,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.401.723.000,00	31.001.217.044,00	95,68	31.700.917.601,00	(699.700.557,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.011.068.000,00	3.828.572.979,00	95,45	3.665.527.516,00	163.045.463,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.008.466.000,00	5.977.719.367,00	99,49	6.084.682.618,00	(106.963.251,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	56.206.800.000,00	55.251.084.060,00	98,30	58.307.510.694,00	(3.056.426.634,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.417.831.000,00	5.322.045.251,00	98,23	5.533.280.297,00	(211.235.046,00)
22	Dinas Perhubungan	19.843.269.000,00	19.488.459.540,00	98,21	20.361.925.859,00	(873.466.319,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.631.158.000,00	7.328.250.521,00	96,03	7.553.329.231,00	(225.078.710,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.877.219.000,00	6.609.637.041,00	96,11	6.964.193.642,00	(354.556.601,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.514.026.000,00	5.450.800.849,00	98,85	4.753.681.697,00	697.119.152,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.486.957.000,00	11.769.468.853,00	87,27	12.478.658.116,00	(709.189.263,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.959.301.000,00	12.707.886.878,00	98,06	11.971.886.644,00	736.000.234,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.202.903.000,00	17.009.954.000,00	93,45	16.268.521.515,00	741.432.485,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	45.760.824.000,00	43.451.625.915,00	94,95	47.969.601.140,00	(4.517.975.225,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.724.955.000,00	13.716.547.493,00	99,94	14.081.620.658,00	(365.073.165,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.861.546.000,00	12.635.146.352,00	98,24	12.630.802.888,00	4.343.464,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.109.355.000,00	12.898.622.154,00	98,39	13.058.868.122,00	(160.245.968,00)
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.723.085.000,00	11.682.321.052,00	99,65	10.823.019.013,00	859.302.039,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	42.923.000.000,00	41.312.705.284,00	96,25	41.126.703.302,00	186.001.982,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.107.047.000,00	8.993.219.250,00	88,98	8.851.536.467,00	141.682.783,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	22.976.000.000,00	19.746.189.713,00	85,94	58.370.109.953,00	(38.623.920.240,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.584.057.000,00	13.580.194.329,00	99,97	13.634.382.919,00	(54.188.590,00)
38	Inspektorat	9.445.943.000,00	9.306.100.004,00	98,52	8.884.177.699,00	421.922.305,00
39	Sekretariat Daerah	36.983.400.000,00	36.595.736.405,00	98,95	37.925.978.538,00	(1.330.242.133,00)
40	Sekretariat DPRD	8.828.451.000,00	8.476.089.370,00	96,01	8.481.754.895,00	(5.665.525,00)
41	Badan Penghubung	3.523.100.000,00	3.344.668.534,00	94,94	3.537.190.440,00	(192.521.906,00)
	Jumlah	**3.153.059.620.000,00**	**2.954.645.868.145,00**	**93,71**	**2.800.732.640.726,00**	**153.913.227.419,00**

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp1.555.169.393.468,00

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp1.577.363.411.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.555.169.393.468,00 atau 98,59%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.478.733.117.392,00 mengalami kenaikan sebesar Rp76.436.276.076,00 atau 5,17% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	652.433.646.000,00	650.931.910.100,00	99,77	630.488.227.464,00	20.443.682.636,00
2	Dinas Kesehatan	43.984.515.000,00	43.613.577.360,00	99,16	41.919.953.907,00	1.693.623.453,00
3	RSUD Dr. Moewardi	91.871.930.000,00	91.297.975.834,00	99,38	81.890.424.721,00	9.407.551.113,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	57.529.391.000,00	57.529.391.000,00	100,00	54.027.825.733,00	3.501.565.267,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	47.205.162.000,00	46.788.017.444,00	99,12	41.347.782.567,00	5.440.234.877,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	RSUD Kelet Donorejo	17.900.000.000,00	17.756.104.443,00	99,20	16.580.339.887,00	1.175.764.556,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	30.861.931.000,00	30.851.010.599,00	99,96	26.806.856.669,00	4.044.153.930,00
8	RSJD Surakarta	31.607.614.000,00	31.584.853.596,00	99,93	30.118.000.201,00	1.466.853.395,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	21.766.106.000,00	21.615.399.901,00	99,31	19.489.359.528,00	2.126.040.373,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	37.660.505.000,00	36.687.261.883,00	97,42	38.155.967.798,00	(1.468.705.915,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	32.229.500.000,00	31.500.987.170,00	97,74	29.417.297.711,00	2.083.689.459,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.261.720.000,00	6.207.264.782,00	99,13	5.378.938.097,00	828.326.685,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.116.431.000,00	5.062.551.363,00	98,95	4.836.804.224,00	225.747.139,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.270.858.000,00	4.246.071.743,00	99,42	4.038.129.959,00	207.941.784,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.252.000.000,00	3.237.546.332,00	99,56	2.686.023.445,00	551.522.887,00
16	Dinas Sosial	56.815.215.000,00	49.732.429.265,00	87,53	48.206.698.274,00	1.525.730.991,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.627.817.000,00	31.062.867.533,00	98,21	30.789.753.598,00	273.113.935,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.685.576.000,00	4.583.010.462,00	97,81	4.127.312.413,00	455.698.049,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.772.661.000,00	6.721.912.928,00	99,25	6.295.131.947,00	426.780.981,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.428.018.000,00	54.995.891.088,00	99,22	52.961.393.759,00	2.034.497.329,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.232.261.000,00	6.192.898.492,00	99,37	5.930.779.076,00	262.119.416,00
22	Dinas Perhubungan	20.454.151.000,00	20.181.392.145,00	98,67	19.350.859.590,00	830.532.555,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.199.603.000,00	8.106.470.409,00	98,86	7.686.707.033,00	419.763.376,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.322.051.000,00	7.229.900.975,00	98,74	6.916.788.566,00	313.112.409,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.555.000.000,00	6.467.281.062,00	98,66	5.150.108.983,00	1.317.172.079,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.696.544.000,00	12.439.708.917,00	97,98	12.092.273.459,00	347.435.458,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.651.181.000,00	12.533.815.244,00	99,07	11.072.896.393,00	1.460.918.851,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.722.633.000,00	18.899.338.231,00	87,00	16.652.362.397,00	2.246.975.834,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	38.796.404.000,00	38.697.191.608,00	99,74	39.438.671.552,00	(741.479.944,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.865.627.000,00	13.726.848.270,00	99,00	13.187.035.593,00	539.812.677,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.339.188.000,00	15.077.833.407,00	98,30	14.092.215.100,00	985.618.307,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.041.941.000,00	13.994.095.206,00	99,66	13.042.881.026,00	951.214.180,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.754.350.000,00	11.723.208.313,00	99,74	10.240.779.454,00	1.482.428.859,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	46.067.653.000,00	44.518.240.235,00	96,64	41.050.717.417,00	3.467.522.818,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.867.902.000,00	9.824.386.630,00	99,56	8.950.000.000,00	874.386.630,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	11.388.319.000,00	11.154.454.771,00	97,95	10.200.374.357,00	954.080.414,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.889.711.000,00	12.889.711.000,00	100,00	11.984.159.121,00	905.551.879,00
38	Inspektorat	9.517.616.000,00	9.466.118.275,00	99,46	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00
39	Sekretariat Daerah	45.347.211.000,00	42.818.815.906,00	94,42	41.181.412.915,00	1.637.402.991,00
40	Sekretariat DPRD	8.698.729.000,00	8.653.910.018,00	99,48	8.009.094.170,00	644.815.848,00
41	Badan Penghubung	4.674.740.000,00	4.567.739.528,00	97,71	4.549.144.920,00	18.594.608,00
	Jumlah	**1.577.363.411.000,00**	**1.555.169.393.468,00**	**98,59**	**1.478.733.117.392,00**	**76.436.276.076,00**

5.1.2.1.1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN — Rp1.111.780.481.397,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp1.178.155.995.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.111.780.481.397,00 atau 94,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.122.788.184.117,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.007.702.720,00 atau 0,98% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.126.563.384.000,00	1.067.791.793.005,00	94,78	1.105.307.357.882,00	(37.515.564.877,00)
2	Dinas Kesehatan	5.650.000.000,00	5.644.979.951,00	99,91	-	5.644.979.951,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.730.400.000,00	1.728.620.000,00	63,31	-	1.728.620.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	881.040.000,00	836.890.000,00	94,99	-	836.890.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	381.880.000,00	380.840.000,00	99,73	-	380.840.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	242.960.000,00	242.160.000,00	99,67	-	242.160.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	213.120.000,00	213.120.000,00	100,00	-	213.120.000,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	216.600.000,00	213.000.000,00	98,34	-	213.000.000,00
16	Dinas Sosial	1.078.410.000,00	1.066.410.000,00	98,89	-	1.066.410.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	282.480.000,00	276.230.000,00	97,79	-	276.230.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
19	Dinas Ketahanan Pangan	335.760.000,00	325.260.000,00	96,87	-	325.260.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	629.728.000,00	607.943.250,00	96,54	-	607.943.250,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	347.045.000,00	341.640.000,00	98,44	-	341.640.000,00
22	Dinas Perhubungan	749.660.000,00	662.110.000,00	88,32	-	662.110.000,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	533.004.000,00	496.614.000,00	93,17	-	496.614.000,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	413.140.000,00	404.640.000,00	97,94	-	404.640.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	780.000.000,00	744.150.000,00	95,40	-	744.150.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	209.780.000,00	209.769.000,00	99,99	-	209.769.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.275.310.000,00	1.272.610.000,00	99,79	-	1.272.610.000,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.145.200.000,00	3.120.423.724,00	99,21	-	3.120.423.724,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27.660.000,00	27.660.000,00	100,00	-	27.660.000,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	959.352.000,00	956.992.000,00	99,75	-	956.992.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	980.562.000,00	945.170.000,00	96,39	-	945.170.000,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	625.520.000,00	380.140.000,00	60,77	-	380.140.000,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	25.196.060.000,00	19.345.266.467,00	76,78	17.480.826.235,00	1.864.440.232,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	952.480.000,00	905.040.000,00	95,02	-	905.040.000,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	588.880.000,00	515.960.000,00	87,62	-	515.960.000,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	477.480.000,00	477.480.000,00	100,00	-	477.480.000,00
38	Inspektorat	218.100.000,00	203.100.000,00	93,12	-	203.100.000,00
39	Sekretariat Daerah	741.220.000,00	718.220.000,00	96,90	-	718.220.000,00
40	Sekretariat DPRD	694.380.000,00	690.850.000,00	99,49	-	690.850.000,00
41	Badan Penghubung	35.400.000,00	35.400.000,00	100,00	-	35.400.000,00
	Jumlah	**1.178.155.995.000,00**	**1.111.780.481.397,00**	**94,37**	**1.122.788.184.117,00**	**(11.007.702.720,00)**

5.1.2.1.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp120.364.254.821,00

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp121.343.749.000,00 dengan realisasi sebesar Rp120.364.254.821,00 atau 99,19%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp112.475.592.654,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.888.662.167,00 atau 7,01% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat DPRD	121.343.749.000,00	120.364.254.821,00	99,19	112.475.592.654,00	7.888.662.167,00

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Jumlah	**121.343.749.000,00**	**120.364.254.821,00**	**99,19**	**112.475.592.654,00**	**7.888.662.167,00**

5.1.2.1.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp240.276.440,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp241.829.000,00 dengan realisasi sebesar Rp240.276.440,00 atau 99,36%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp241.290.440,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.014.000,00 atau 0,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	241.829.000,00	240.276.440,00	99,36	241.290.440,00	(1.014.000,00)
	Jumlah	**241.829.000,00**	**240.276.440,00**	**99,36**	**241.290.440,00**	**(1.014.000,00)**

5.1.2.1.1.4 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp24.889.431.000,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp24.889.431.000,00 dengan realisasi sebesar Rp24.889.431.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp23.793.042.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.096.389.000,00 atau 4,61% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	24.212.631.000,00	24.212.631.000,00	100,00	23.116.242.000,00	1.096.389.000,00
2	Sekretariat DPRD	676.800.000,00	676.800.000,00	100,00	676.800.000,00	-
	Jumlah	**24.889.431.000,00**	**24.889.431.000,00**	**100,00**	**23.793.042.000,00**	**1.096.389.000,00**

5.1.2.1.1.5 Belanja Pegawai BLUD Rp135.814.181.496,00

Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp162.301.002.000,00 dengan realisasi sebesar Rp135.814.181.496,00 atau 83,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp147.161.387.691,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.347.206.195,00 atau 7,71% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	38.448.107.000,00	38.421.453.040,00	99,93	42.668.783.000,00	(4.247.329.960,00)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	56.207.180.000,00	40.645.173.039,00	72,31	43.101.259.010,00	(2.456.085.971,00)
3	RSUD Tugurejo Semarang	23.843.758.000,00	23.533.012.083,00	98,70	26.165.725.000,00	(2.632.712.917,00)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	12.241.646.000,00	8.469.808.200,00	69,19	9.863.592.000,00	(1.393.783.800,00)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	11.592.526.000,00	10.607.689.184,00	91,50	10.617.395.681,00	(9.706.497,00)
6	RSJD Surakarta	11.442.785.000,00	7.979.095.950,00	69,73	7.239.460.000,00	739.635.950,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.525.000.000,00	6.157.950.000,00	72,23	7.505.173.000,00	(1.347.223.000,00)
	Jumlah	**162.301.002.000,00**	**135.814.181.496,00**	**83,68**	**147.161.387.691,00**	**(11.347.206.195,00)**

Adapun rincian Belanja Pegawai BLUD adalah sebagai berikut

a. Belanja Gaji dan Tunjangan — Rp115.300.259.087,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	27.422.262.500,00	27.414.012.500,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	52.257.446.000,00	38.104.908.670,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	21.720.758.000,00	21.534.492.083,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	8.251.200.000,00	5.543.360.700,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	11.592.526.000,00	10.607.689.184,00
6	RSJD Surakarta	11.442.785.000,00	7.979.095.950,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.832.600.000,00	4.116.700.000,00
	Jumlah	**138.519.577.500,00**	**115.300.259.087,00**

b. Belanja Tambahan Penghasilan — Rp3.670.860.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	2.004.729.816,00	2.004.700.000,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
3	RSUD Tugurejo Semarang	75.000.000,00	69.100.000,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.353.860.000,00	890.460.000,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	-	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.000.000.000,00	706.600.000,00
	Jumlah	**4.433.589.816,00**	**3.670.860.000,00**

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya — Rp16.843.062.409,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	9.021.114.684,00	9.002.740.540,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	3.949.734.000,00	2.540.264.369,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	2.030.000.000,00	1.929.420.000,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.636.586.000,00	2.035.987.500,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	-	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.692.400.000,00	1.334.650.000,00
	Jumlah	**19.329.834.684,00**	**16.843.062.409,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa — Rp5.377.369.153.895,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp5.750.890.367.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.377.369.153.895,00 atau 93,50%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.345.399.454.776,00 mengalami kenaikan sebesar Rp31.969.699.119,00 atau 0,60% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang	422.084.501.000,00	408.650.396.163,00	96,82	445.161.857.098,00	(36.511.460.935,00)
2	Belanja Jasa	1.339.037.528.000,00	1.287.081.632.900,00	96,12	1.077.148.718.265,00	209.932.914.635,00
3	Belanja Pemeliharaan	322.049.158.000,00	302.590.696.691,00	93,96	220.320.486.981,00	82.270.209.710,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	387.232.561.000,00	359.220.428.865,00	92,77	214.445.251.953,00	144.775.176.912,00
5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	135.170.525.000,00	132.883.085.254,00	98,31	175.458.434.362,00	(42.575.349.108,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	Belanja Barang dan Jasa BOP	793.670.491.000,00	781.802.645.118,00	98,50	1.280.507.243.690,00	(498.704.598.572,00)
7	Belanja Barang dan Jasa BOS	717.823.805.000,00	694.757.357.238,00	96,79	678.727.084.263,00	16.030.272.975,00
8	Belanja Barang dan Jasa BLUD	1.633.821.798.000,00	1.410.382.911.666,00	86,32	1.253.630.378.164,00	156.752.533.502,00
	Jumlah	**5.750.890.367.000,00**	**5.377.369.153.895,00**	**93,50**	**5.345.399.454.776,00**	**31.969.699.119,00**

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan :

- Pengadaan belanja habis pakai alat kesehatan dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan tidak cukup waktu pelaksanaan pengadaannya;
- Kegiatan-kegiatan rapat di luar daerah bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan selama pandemi *covid-19* dilaksanakan secara daring dan dibatasi jumlah pesertanya;
- Realisasi sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi serta terjadi sisa lelang/pengadaan; dan
- Belanja obat-obatan tidak sepenuhnya terealisasi dikarenakan kebutuhan obat telah tercukupi dari bantuan pemerintah maupun swasta.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang **Rp408.650.396.163,00**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp422.084.501.000,00 dengan realisasi sebesar Rp408.650.396.163,00 atau 96,82%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp445.161.857.098,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.511.460.935,00 atau 8,20% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.405.184.000,00	42.836.153.374,00	94,34	20.977.105.018,00	21.859.048.356,00
2	Dinas Kesehatan	42.986.791.000,00	42.493.669.093,00	98,85	99.297.672.205,00	(56.804.003.112,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	50.354.000,00	48.800.000,00	96,91	139.379.850,00	(90.579.850,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	100.000.000,00	99.948.939,00	99,95	875.801.619,00	(775.852.680,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	879.622.000,00	878.155.994,00	99,83	1.813.224.814,00	(935.068.820,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	4.746.010.000,00	4.732.654.314,00	99,72	13.644.289.337,00	(8.911.635.023,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.698.344.000,00	3.694.266.264,00	99,89	563.132.436,00	3.131.133.828,00
8	RSJD Surakarta	5.220.191.000,00	5.018.140.316,00	96,13	6.972.509.970,00	(1.954.369.654,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	4.197.685.000,00	4.164.645.228,00	99,21	2.149.925.557,00	2.014.719.671,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.434.209.000,00	9.032.784.314,00	95,75	14.346.782.695,00	(5.313.998.381,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	15.131.519.000,00	14.415.667.691,00	95,27	9.379.239.680,00	5.036.428.011,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.015.154.000,00	3.940.249.348,00	98,13	3.757.845.116,00	182.404.232,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	529.783.000,00	529.320.558,00	99,91	966.047.545,00	(436.726.987,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.496.892.000,00	4.444.162.032,00	98,83	4.645.978.720,00	(201.816.688,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.037.152.000,00	1.905.470.702,00	93,54	4.230.102.575,00	(2.324.631.873,00)
16	Dinas Sosial	47.893.012.000,00	46.447.178.580,00	96,98	50.068.585.475,00	(3.621.406.895,00)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.294.968.000,00	8.103.749.042,00	97,69	6.467.857.996,00	1.635.891.046,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.777.872.000,00	1.752.672.230,00	98,58	2.093.821.408,00	(341.149.178,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	9.702.199.000,00	9.667.713.057,00	99,64	3.838.273.080,00	5.829.439.977,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.658.221.000,00	17.162.798.853,00	97,19	8.608.412.406,00	8.554.386.447,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.395.656.000,00	1.391.726.191,00	99,72	1.723.618.090,00	(331.891.899,00)
22	Dinas Perhubungan	2.772.115.000,00	2.600.978.178,00	93,83	9.193.690.949,00	(6.592.712.771,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.458.205.000,00	4.238.259.654,00	95,07	22.683.134.827,00	(18.444.875.173,00)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.772.756.000,00	4.727.341.098,00	99,05	3.165.224.348,00	1.562.116.750,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	539.223.000,00	532.292.407,00	98,71	1.219.539.130,00	(687.246.723,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.788.882.000,00	10.675.771.675,00	98,95	12.389.938.333,00	(1.714.166.658,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	559.035.000,00	557.663.792,00	99,75	1.241.393.675,00	(683.729.883,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.970.640.000,00	5.930.887.425,00	99,33	5.846.523.599,00	84.363.826,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	19.520.800.000,00	17.904.860.502,00	91,72	10.197.407.684,00	7.707.452.818,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.337.482.000,00	7.982.848.397,00	95,75	12.582.513.235,00	(4.599.664.838,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.469.995.000,00	4.393.197.705,00	98,28	2.512.316.447,00	1.880.881.258,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.195.927.000,00	28.067.965.136,00	99,55	21.176.235.041,00	6.891.730.095,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.176.367.000,00	5.808.900.877,00	94,05	3.659.715.065,00	2.149.185.812,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	29.749.635.000,00	28.465.755.669,00	95,68	23.007.723.679,00	5.458.031.990,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.706.081.000,00	5.626.323.900,00	98,60	4.792.990.962,00	833.332.938,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	4.227.430.000,00	4.076.553.994,00	96,43	2.734.579.488,00	1.341.974.506,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.255.225.000,00	8.825.569.681,00	95,36	5.026.556.548,00	3.799.013.133,00
38	Inspektorat	1.460.227.000,00	1.416.925.835,00	97,03	932.760.905,00	484.164.930,00
39	Sekretariat Daerah	13.881.713.000,00	13.356.118.735,00	96,21	21.336.002.878,00	(7.979.884.143,00)
40	Sekretariat DPRD	29.866.030.000,00	28.986.617.194,00	97,06	23.893.818.029,00	5.092.799.165,00
41	Badan Penghubung	1.725.915.000,00	1.715.638.189,00	99,40	1.010.186.684,00	705.451.505,00
	Jumlah	**422.084.501.000,00**	**408.650.396.163,00**	**96,82**	**445.161.857.098,00**	**(36.511.460.935,00)**

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa **Rp1.287.081.632.900,00**

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp1.339.037.528.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.287.081.632.900,00 atau 96,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.077.148.718.265,00 mengalami kenaikan sebesar Rp209.932.914.635,00 atau 19,49% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	60.128.428.000,00	56.137.184.869,00	93,36	46.207.730.483,00	9.929.454.386,00
2	Dinas Kesehatan	494.935.048.000,00	484.309.745.456,00	97,85	410.966.069.027,00	73.343.676.429,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	500.000.000,00	468.916.774,00	93,78	-	468.916.774,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	516.860.000,00	516.762.128,00	99,98	683.092.800,00	(166.330.672,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	880.670.000,00	874.355.956,00	99,28	600.045.520,00	274.310.436,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	371.656.000,00	275.551.121,00	74,14	325.743.451,00	(50.192.330,00)
8	RSJD Surakarta	506.849.000,00	402.599.110,00	79,43	876.901.449,00	(474.302.339,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	487.835.000,00	483.549.360,00	99,12	481.236.000,00	2.313.360,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	22.468.976.000,00	21.040.264.938,00	93,64	18.909.569.165,00	2.130.695.773,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	49.707.300.000,00	48.190.737.062,00	96,95	38.749.273.754,00	9.441.463.308,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.985.467.000,00	8.694.744.192,00	96,76	4.863.330.615,00	3.831.413.577,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.207.174.000,00	3.155.811.781,00	98,40	3.980.727.585,00	(824.915.804,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.867.874.000,00	12.616.264.907,00	98,04	16.286.377.314,00	(3.670.112.407,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.086.615.000,00	3.832.275.440,00	93,78	4.931.018.779,00	(1.098.743.339,00)
16	Dinas Sosial	31.450.841.000,00	30.922.255.011,00	98,32	21.141.301.809,00	9.780.953.202,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.888.971.000,00	12.495.333.180,00	96,95	13.128.675.251,00	(633.342.071,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.805.395.000,00	4.739.799.477,00	98,63	7.791.053.934,00	(3.051.254.457,00)
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.123.919.000,00	5.742.617.568,00	93,77	5.385.890.853,00	356.726.715,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.822.296.000,00	15.310.386.066,00	96,76	13.378.687.096,00	1.931.698.970,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.919.718.000,00	3.879.590.250,00	98,98	5.832.932.050,00	(1.953.341.800,00)
22	Dinas Perhubungan	107.047.600.000,00	105.472.731.451,00	98,53	94.238.981.769,00	11.233.749.682,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	56.885.008.000,00	55.063.839.816,00	96,80	34.893.614.777,00	20.170.225.039,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.351.332.000,00	20.058.832.552,00	98,56	18.117.295.627,00	1.941.536.925,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.508.509.000,00	4.475.281.119,00	99,26	4.749.906.817,00	(274.625.698,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.634.579.000,00	24.854.387.798,00	96,96	31.642.435.694,00	(6.788.047.896,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.315.037.000,00	3.307.087.866,00	99,76	4.739.987.101,00	(1.432.899.235,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.018.167.000,00	16.572.989.988,00	97,38	21.188.631.222,00	(4.615.641.234,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	19.815.729.000,00	19.139.316.427,00	96,59	23.660.955.907,00	(4.521.639.480,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.194.552.000,00	13.667.937.515,00	89,95	12.453.397.197,00	1.214.540.318,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.130.833.000,00	11.758.686.922,00	96,93	10.044.500.560,00	1.714.186.362,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.893.209.000,00	21.889.040.268,00	95,61	18.886.821.806,00	3.002.218.462,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.047.928.000,00	10.228.761.201,00	92,59	8.808.736.407,00	1.420.024.794,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	100.218.180.000,00	90.156.091.499,00	89,96	77.184.654.561,00	12.971.436.938,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.385.604.000,00	13.185.794.179,00	98,51	13.169.924.593,00	15.869.586,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	7.900.150.000,00	7.079.415.081,00	89,61	7.435.785.293,00	(356.370.212,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.832.418.000,00	20.733.414.191,00	94,97	16.681.177.376,00	4.052.236.815,00
38	Inspektorat	2.022.082.000,00	2.001.087.347,00	98,96	3.969.806.331,00	(1.968.718.984,00)
39	Sekretariat Daerah	44.548.877.000,00	43.570.453.873,00	97,80	31.874.479.437,00	11.695.974.436,00
40	Sekretariat DPRD	93.545.003.000,00	84.758.801.267,00	90,61	24.377.835.917,00	60.380.965.350,00
41	Badan Penghubung	5.080.839.000,00	5.018.937.894,00	98,78	4.510.132.938,00	508.804.956,00
	Jumlah	**1.339.037.528.000,00**	**1.287.081.632.900,00**	**96,12**	**1.077.148.718.265,00**	**209.932.914.635,00**

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp302.590.696.691,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp322.049.158.000,00 dengan realisasi sebesar Rp302.590.696.691,00 atau 93,96%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp220.320.486.981,00 mengalami kenaikan sebesar Rp82.270.209.710,00 atau 37,34% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	65.968.286.000,00	54.477.899.146,00	82,58	29.973.113.861,00	24.504.785.285,00
2	Dinas Kesehatan	9.710.129.000,00	9.562.575.164,00	98,48	8.382.757.146,00	1.179.818.018,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	148.315.619.000,00	145.162.101.481,00	97,87	110.414.195.066,00	34.747.906.415,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	18.097.242.000,00	17.927.474.187,00	99,06	13.637.871.201,00	4.289.602.986,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	663.100.000,00	662.720.500,00	99,94	435.491.900,00	227.228.600,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	349.750.000,00	349.715.082,00	99,99	418.483.347,00	(68.768.265,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	642.483.000,00	618.110.876,00	96,21	410.745.927,00	207.364.949,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	521.925.000,00	512.885.641,00	98,27	357.575.536,00	155.310.105,00
16	Dinas Sosial	4.778.835.000,00	4.737.214.568,00	99,13	3.253.071.160,00	1.484.143.408,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.553.935.000,00	2.507.999.554,00	98,20	3.790.968.159,00	(1.282.968.605,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	361.625.000,00	359.917.148,00	99,53	225.283.800,00	134.633.348,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	973.393.000,00	957.015.718,00	98,32	810.389.400,00	146.626.318,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.964.190.000,00	4.834.500.507,00	97,39	2.585.440.904,00	2.249.059.603,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	287.622.000,00	275.016.760,00	95,62	622.422.812,00	(347.406.052,00)
22	Dinas Perhubungan	5.141.000.000,00	4.872.685.940,00	94,78	2.788.348.530,00	2.084.337.410,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.543.977.000,00	3.505.644.130,00	98,92	3.097.798.064,00	407.846.066,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	792.500.000,00	791.512.545,00	99,88	910.722.193,00	(119.209.648,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	177.955.000,00	173.881.570,00	97,71	425.135.931,00	(251.254.361,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.357.998.000,00	1.348.369.819,00	57,18	1.600.893.312,00	(252.523.493,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	220.450.000,00	219.416.000,00	99,53	699.176.966,00	(479.760.966,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.643.359.000,00	2.635.678.750,00	99,71	1.749.520.578,00	886.158.172,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.851.723.000,00	7.568.408.981,00	96,39	2.138.823.862,00	5.429.585.119,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.188.123.000,00	1.181.049.686,00	99,40	1.615.470.282,00	(434.420.596,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.349.242.000,00	2.321.245.920,00	98,81	1.330.824.329,00	990.421.591,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.434.344.000,00	4.122.374.438,00	92,96	2.248.309.085,00	1.874.065.353,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.157.290.000,00	1.851.695.820,00	85,83	828.467.193,00	1.023.228.627,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.815.746.000,00	10.295.854.790,00	87,14	8.886.712.746,00	1.409.142.044,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.645.473.000,00	1.623.269.197,00	98,65	833.663.757,00	789.605.440,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	1.320.305.000,00	1.198.855.260,00	90,80	1.026.188.779,00	172.666.481,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.340.879.000,00	2.315.593.337,00	98,92	2.189.946.386,00	125.646.951,00
38	Inspektorat	582.855.000,00	579.801.196,00	99,48	990.346.684,00	(410.545.488,00)
39	Sekretariat Daerah	5.773.438.000,00	5.683.510.875,00	98,44	4.282.916.091,00	1.400.594.784,00
40	Sekretariat DPRD	6.075.472.000,00	5.913.271.260,00	97,33	5.683.518.211,00	229.753.049,00
41	Badan Penghubung	1.448.895.000,00	1.443.430.845,00	99,62	1.675.893.783,00	(232.462.938,00)
	Jumlah	**322.049.158.000,00**	**302.590.696.691,00**	**93,96**	**220.320.486.981,00**	**82.270.209.710,00**

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas **Rp359.220.428.865,00**

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp387.232.561.000,00 dengan realisasi sebesar Rp359.220.428.865,00 atau 92,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp214.445.251.953,00 mengalami kenaikan sebesar Rp144.775.176.912,00 atau 67,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.118.126.000,00	21.182.948.437,00	91,63	7.282.685.804,00	13.900.262.633,00
2	Dinas Kesehatan	12.263.636.000,00	11.075.591.396,00	90,31	11.075.908.152,00	(316.756,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	97.960.000,00	71.537.830,00	73,03	-	71.537.830,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.060.816.000,00	4.647.688.461,00	91,84	3.897.498.222,00	750.190.239,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	13.651.964.000,00	12.839.706.138,00	94,05	7.309.871.347,00	5.529.834.791,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.616.125.000,00	4.564.977.845,00	98,89	2.047.258.166,00	2.517.719.679,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.133.239.000,00	2.131.370.926,00	99,91	2.989.888.251,00	(858.517.325,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.074.290.000,00	9.975.321.266,00	99,02	6.012.619.367,00	3.962.701.899,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.187.708.000,00	3.059.464.936,00	95,98	2.369.434.078,00	690.030.858,00
16	Dinas Sosial	6.400.414.000,00	6.213.373.906,00	97,08	2.854.887.793,00	3.358.486.113,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.523.724.000,00	10.179.941.173,00	96,73	7.304.152.652,00	2.875.788.521,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.023.225.000,00	2.862.771.153,00	94,69	1.677.347.467,00	1.185.423.686,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	3.971.219.000,00	3.801.767.118,00	95,73	1.995.039.820,00	1.806.727.298,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.535.721.000,00	14.321.747.153,00	98,53	5.086.625.645,00	9.235.121.508,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.254.549.000,00	4.213.209.709,00	99,03	4.092.585.380,00	120.624.329,00
22	Dinas Perhubungan	6.092.826.000,00	5.963.487.000,00	97,88	4.818.676.525,00	1.144.810.475,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.695.748.000,00	9.617.880.805,00	99,20	6.635.479.171,00	2.982.401.634,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17.374.676.000,00	17.165.347.662,00	98,80	7.109.133.562,00	10.056.214.100,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.700.261.000,00	1.690.391.723,00	99,42	1.160.367.757,00	530.023.966,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.035.692.000,00	14.563.874.655,00	96,86	7.080.395.533,00	7.483.479.122,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	356.667.000,00	356.079.075,00	99,84	764.007.850,00	(407.928.775,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.570.369.000,00	6.305.902.489,00	95,97	4.290.178.875,00	2.015.723.614,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.371.893.000,00	5.702.816.821,00	89,50	8.480.435.929,00	(2.777.619.108,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.360.020.000,00	12.934.623.181,00	96,82	3.776.669.951,00	9.157.953.230,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.109.932.000,00	11.942.549.781,00	98,62	5.283.773.930,00	6.658.775.851,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.712.940.000,00	9.753.809.840,00	91,05	3.777.939.535,00	5.975.870.305,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.675.575.000,00	7.314.377.924,00	95,29	3.110.509.962,00	4.203.867.962,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	21.195.226.000,00	20.655.366.011,00	97,45	11.841.957.873,00	8.813.408.138,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.452.840.000,00	6.295.072.267,00	97,56	3.907.964.280,00	2.387.107.987,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	8.546.355.000,00	8.298.164.664,00	97,10	3.646.809.162,00	4.651.355.502,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.440.797.000,00	4.806.130.670,00	88,34	1.458.477.712,00	3.347.652.958,00
38	Inspektorat	8.794.193.000,00	8.777.555.102,00	99,81	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00
39	Sekretariat Daerah	23.763.034.000,00	22.639.540.446,00	95,27	14.176.179.153,00	8.463.361.293,00
40	Sekretariat DPRD	87.904.826.000,00	72.131.604.903,00	82,06	49.422.296.201,00	22.709.308.702,00
41	Badan Penghubung	1.165.975.000,00	1.164.436.399,00	99,87	1.337.486.742,00	(173.050.343,00)
	Jumlah	**387.232.561.000,00**	**359.220.428.865,00**	**92,77**	**214.445.251.953,00**	**144.775.176.912,00**

5.1.2.1.2.5 Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/ Dijual/ Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat — Rp132.883.085.254,00

Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dianggarkan sebesar Rp135.170.525.000,00 dengan realisasi sebesar Rp132.883.085.254,00 atau 98,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp175.458.434.362,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.575.349.108,00 atau 24,27% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.109.497.000,00	5.510.683.978,00	90,20	4.463.900.000,00	1.046.783.978,00
2	Dinas Kesehatan	169.300.000,00	155.785.000,00	92,02	67.995.000,00	87.790.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	15.137.752.700,00	(15.119.752.700,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	175.000.000,00	175.000.000,00	100,00	129.960.000,00	45.040.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.350.000,00	200.350.000,00	100,00	-	200.350.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.000.000,00	-	-	153.400.000,00	(153.400.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.650.000,00	90.650.000,00	100,00	131.370.000,00	(40.720.000,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-
16	Dinas Sosial	118.563.008.000,00	117.804.108.000,00	99,36	6.104.295.000,00	111.699.813.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	279.315.000,00	277.934.195,00	99,51	728.700.000,00	(450.765.805,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.656.603.000,00	1.655.285.000,00	99,92	97.905.000,00	1.557.380.000,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	238.005.000,00	237.725.500,00	99,88	7.576.199.000,00	(7.338.473.500,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.049.690.000,00	1.043.540.000,00	99,41	29.759.396.585,00	(28.715.856.585,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	90.400.000,00	90.400.000,00	100,00	172.950.000,00	(82.550.000,00)
22	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	-	18.000.000,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	635.550.000,00	596.050.000,00	93,78	-	596.050.000,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	99.000.000,00	(99.000.000,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000,00	39.000.000,00	97,50	-	39.000.000,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	711.758.000,00	710.258.000,00	99,79	5.519.733.000,00	(4.809.475.000,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.300.000,00	36.300.000,00	100,00	-	36.300.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	10.146.493.664,00	(10.146.493.664,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	572.100.000,00	568.745.493,00	99,41	54.013.544.100,00	(53.444.798.607,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	109.400.000,00	109.400.000,00	100,00	843.032.500,00	(733.632.500,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	36.274.000,00	36.272.694,00	100,00	1.714.285.713,00	(1.678.013.019,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.118.000.000,00	1.263.940.694,00	59,68	971.854.100,00	292.086.594,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	232.050.000,00	231.950.000,00	99,96	281.500.000,00	(49.550.000,00)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-
36	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.000.000,00	21.000.000,00	100,00	-	21.000.000,00
38	Inspektorat	-	-	-	-	-
39	Sekretariat Daerah	1.921.775.000,00	1.915.206.700,00	99,66	37.277.168.000,00	(35.361.961.300,00)
40	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
41	Badan Penghubung	77.500.000,00	77.500.000,00	100,00	68.000.000,00	9.500.000,00
	Jumlah	**135.170.525.000,00**	**132.883.085.254,00**	**98,31**	**175.458.434.362,00**	**(42.575.349.108,00)**

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOP — Rp781.802.645.118,00

Belanja Barang dan Jasa BOP dianggarkan sebesar Rp793.670.491.000,00 dengan realisasi sebesar Rp781.802.645.118,00 atau 98,50%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.280.507.243.690,00 mengalami penurunan sebesar Rp498.704.598.572,00 atau 38,95% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	793.670.491.000,00	781.802.645.118,00	98,50	1.280.507.243.690,00	(498.704.598.572,00)
	Jumlah	**793.670.491.000,00**	**781.802.645.118,00**	**98,50**	**1.280.507.243.690,00**	**(498.704.598.572,00)**

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa BOP, adalah sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Barang	125.337.175.870,00
Belanja Jasa	544.895.993.446,00
Belanja Pemeliharaan	83.832.269.534,00
Belana Perjalanan Dinas	27.182.137.018,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	555.069.250,00
Total	781.802.645.118,00

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BOS **Rp694.757.357.238,00**

Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp717.823.805.000,00 dengan realisasi sebesar Rp694.757.357.238,00 atau 96,79%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp678.727.084.263,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.030.272.975,00 atau 2,36% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	717.823.805.000,00	694.757.357.238,00	96,79	678.727.084.263,00	16.030.272.975,00
	Jumlah	**717.823.805.000,00**	**694.757.357.238,00**	**96,79**	**678.727.084.263,00**	**16.030.272.975,00**

5.1.2.1.2.8 Belanja Barang dan Jasa BLUD **Rp1.410.382.911.666,00**

Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp1.633.821.798.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.410.382.911.666,00 atau 86,32%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.253.630.378.164,00 mengalami kenaikan sebesar Rp156.752.533.502,00 atau 12,50% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	747.000.071.000,00	745.987.811.011,00	99,86	695.157.378.679,00	50.830.432.332,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	478.122.646.000,00	367.686.540.624,00	76,90	304.272.022.828,00	63.414.517.796,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	209.799.908.000,00	143.056.707.530,00	68,19	136.668.778.090,00	6.387.929.440,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	50.448.880.000,00	43.127.937.252,00	85,49	39.214.567.649,00	3.913.369.603,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	41.038.648.000,00	39.235.280.851,00	95,61	21.729.820.198,00	17.505.460.653,00
6	RSJD Surakarta	61.518.045.000,00	41.126.715.252,00	66,85	26.447.125.317,00	14.679.589.935,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	45.893.600.000,00	30.161.919.146,00	65,72	30.140.685.403,00	21.233.743,00
	Jumlah	**1.633.821.798.000,00**	**1.410.382.911.666,00**	**86,32**	**1.253.630.378.164,00**	**156.752.533.502,00**

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD, adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang **Rp591.129.240.147,00**

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	314.199.821.353,00	314.051.602.788,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	241.298.317.000,00	186.891.509.667,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
3	RSUD Tugurejo Semarang	111.592.065.000,00	58.623.808.271,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	13.726.288.000,00	10.782.660.569,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	6.702.303.000,00	6.529.832.442,00
6	RSJD Surakarta	13.334.300.000,00	7.837.384.144,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	14.745.100.000,00	6.412.442.266,00
	Jumlah	**715.598.194.353,00**	**591.129.240.147,00**

b. Belanja Jasa — Rp724.899.691.718,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	396.361.349.647,00	396.017.450.722,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	198.197.134.000,00	144.194.860.452,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	89.555.243.000,00	76.592.744.910,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	31.994.758.000,00	29.360.024.757,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	29.634.155.000,00	28.256.423.177,00
6	RSJD Surakarta	40.373.745.000,00	28.220.908.619,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	28.851.250.000,00	22.257.279.081,00
	Jumlah	**814.967.634.647,00**	**724.899.691.718,00**

c. Belanja Pemeliharaan — Rp89.272.666.976,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	35.528.900.000,00	35.015.601.268,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	36.027.195.000,00	35.517.634.456,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	8.052.600.000,00	7.271.122.404,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	4.139.784.000,00	2.541.683.593,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.328.450.000,00	4.076.839.905,00
6	RSJD Surakarta	6.840.000.000,00	4.142.602.683,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.367.250.000,00	707.182.667,00
	Jumlah	**96.284.179.000,00**	**89.272.666.976,00**

d. Belanja Perjalanan Dinas — Rp5.081.312.825,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	910.000.000,00	903.156.233,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.600.000.000,00	1.082.536.049,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	590.000.000,00	569.031.945,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	588.050.000,00	443.568.333,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	373.740.000,00	372.185.327,00
6	RSJD Surakarta	970.000.000,00	925.819.806,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	930.000.000,00	785.015.132,00
	Jumlah	**6.961.790.000,00**	**5.081.312.825,00**

e. Belanja Barang, Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/ Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga **Rp0,00**

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	-
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
3	RSUD Tugurejo Semarang	10.000.000,00	-
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	-	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-
	Jumlah	**10.000.000,00**	**-**

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi **Rp4.958.884.836,00**

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp6.405.087.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.958.884.836,00 atau 77,42%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp90.482.166,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.868.402.670,00 atau 5.380,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	-	1.200.000.000,00
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	5.205.087.000,00	3.758.884.836,00	72,22	90.482.166,00	3.668.402.670,00
	Jumlah	**6.405.087.000,00**	**4.958.884.836,00**	**77,42**	**90.482.166,00**	**4.868.402.670,00**

Belanja Subsidi **tidak terealisasi** antara lain dikarenakan :

- Koperasi yang lolos persyaratan pencairan namun nilainya tidak maksimal berdasarkan hasil analisis risiko dari lembaga penyalur; dan
- Kurangnya sosialisasi kantor cabang pihak penyalur terkait dengan program subsidi bunga dengan pola *executing*.

5.1.2.1.3.1 Belanja Subsidi kepada BUMN **Rp1.200.000.000,00**

Belanja Subsidi kepada BUMN dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	100,00	-	1.200.000.000,00
	Jumlah	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**100,00**	**-**	**1.200.000.000,00**

5.1.2.1.3.2 Belanja Subsidi kepada BUMD **Rp3.758.884.836,00**

Belanja Subsidi kepada BUMD dianggarkan sebesar Rp5.205.087.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.758.884.836,00 atau 72,22%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp90.482.166,00 mengalami kenaikan sebesar Rp122.082.870,00 atau 134,92% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan	4.705.087.000,00	3.546.319.800,00	75,37	-	3.546.319.800,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Dinas Koperasi dan UKM	500.000.000,00	212.565.036,00	42,51	90.482.166,00	122.082.870,00
	Jumlah	**5.205.087.000,00**	**3.758.884.836,00**	**72,22**	**90.482.166,00**	**122.082.870,00**

5.1.2.1.4 Belanja Hibah Rp2.092.761.564.803,00

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp2.170.297.452.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.092.761.564.803,00 atau 96,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.728.982.384.318,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.636.220.819.515,00 atau 63,47% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.046.400.000,00	16.046.400.000,00	100,00	290.115.066.141,00	(274.068.666.141,00)
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.092.254.914.000,00	1.057.706.101.856,00	96,84	5.418.497.433.377,00	(4.360.791.331.521,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	1.041.626.248.000,00	998.639.178.147,00	95,87	-	998.639.178.147,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	20.369.890.000,00	20.369.884.800,00	100,00	20.369.884.800,00	-
	Jumlah	**2.170.297.452.000,00**	**2.092.761.564.803,00**	**96,43**	**5.728.982.384.318,00**	**(3.636.220.819.515,00)**

Belanja Hibah **tidak mencapai target** dikarenakan :

- Hibah BOS Satuan Pendidikan Dasar negeri maupun swasta semula dicatat oleh Pemerintah Provinsi, Tahun 2022 dicatat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pemohon telah menerima bantuan yang sejenis dari pemerintah pusat; dan
- Pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi pencairan sampai akhir tahun anggaran.

5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp16.046.400.000,00

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp16.046.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.046.400.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp290.115.066.141,00 mengalami penurunan sebesar Rp274.068.666.141,00 atau 94,47% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.046.400.000,00	16.046.400.000,00	100,00	9.436.432.141,00	6.609.967.859,00
2	Sekretariat Daerah	-		-	280.678.634.000,00	(280.678.634.000,00)
	Jumlah	**16.046.400.000,00**	**16.046.400.000,00**	**100,00**	**290.115.066.141,00**	**(274.068.666.141,00)**

Adapun rincian belanja hibah dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro	9.300.000.000,00	9.300.000.000,00	100,00	4.300.000.000,00	5.000.000.000,00
2	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng	5.114.900.000,00	5.114.900.000,00	100,00	3.664.900.000,00	1.450.000.000,00
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	-	-	-	340.032.141,00	(340.032.141,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	437.500.000,00	(237.500.000,00)
5	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang	700.000.000,00	700.000.000,00	100,00	280.000.000,00	420.000.000,00
6	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap	181.500.000,00	181.500.000,00	100,00	150.000.000,00	31.500.000,00
7	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	264.000.000,00	(114.000.000,00)
8	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-	200.000.000,00
9	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-	200.000.000,00
10	KANWIL KEMENAG PROV. JATENG	-	-	-	280.678.634.000,00	(280.678.634.000,00)
	Jumlah	**16.046.400.000,00**	**16.046.400.000,00**	**100,00**	**290.115.066.141,00**	**(274.068.666.141,00)**

5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia — Rp1.057.706.101.856,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp1.092.254.914.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.057.706.101.856,00 atau 96,84%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.418.497.433.377,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.360.791.331.521,00 atau 80,48%. dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	363.645.070.000,00	347.928.585.764,00	95,68	5.144.908.503.073,00	(4.796.979.917.309,00)
2	Dinas Kesehatan	1.450.000.000,00	1.444.500.000,00	99,62	-	1.444.500.000,00
3	Dinas Sosial	905.000.000,00	905.000.000,00	100,00	-	905.000.000,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.787.000.000,00	42.662.000.000,00	99,71	16.335.000.000,00	26.327.000.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.705.135.000,00	21.896.741.441,00	96,44	6.238.409.731,00	15.658.331.710,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00	-
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	114.083.000.000,00	114.073.000.000,00	99,99	102.775.000.000,00	11.298.000.000,00
8	Dinas kelautan dan Perikanan	4.571.000.000,00	4.464.146.900,00	97,66	23.846.242.732,00	(19.382.095.832,00)
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	62.052.399.000,00	57.233.766.991,00	92,23	1.675.000.000,00	55.558.766.991,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	40.332.700.000,00	36.194.761.245,00	89,74	16.940.101.000,00	19.254.660.245,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.416.000.000,00	8.254.489.515,00	98,08	9.360.676.841,00	(1.106.187.326,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	100,00	405.000.000,00	785.000.000,00
13	Sekretariat Daerah	426.617.610.000,00	417.959.110.000,00	97,97	92.513.500.000,00	325.445.610.000,00
	Jumlah	**1.092.254.914.000,00**	**1.057.706.101.856,00**	**96,84**	**5.418.497.433.377,00**	**(4.360.791.331.521,00)**

Adapun rincian belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hibah Bidang Perekonomian	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	100,00	47.429.753.463,00	(46.239.753.463,00)
2	Hibah Bidang Pendidikan	363.645.070.000,00	347.928.585.764,00	95,68	5.209.694.003.073,00	(4.861.765.417.309,00)
3	Hibah Bidang Kesehatan	1.450.000.000,00	1.444.500.000,00	99,62	-	1.444.500.000,00
4	Hibah Bidang Sosial	905.000.000,00	905.000.000,00	100,00	-	905.000.000,00
5	Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional	114.083.000.000,00	114.073.000.000,00	99,99	102.775.000.000,00	11.298.000.000,00
6	Hibah Bidang Kesenian dan Kebudayaan	-	-	#DIV/0!	9.605.000.000,00	(9.605.000.000,00)
7	Hibah Bidang Keagamaan	-	-	#DIV/0!	18.123.000.000,00	(18.123.000.000,00)
8	Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan	426.617.610.000,00	417.959.110.000,00	97,97	16.335.000.000,00	401.624.110.000,00
9	Hibah Bidang Kesatuan Bangsa & Politik	42.787.000.000,00	42.662.000.000,00	99,71	-	42.662.000.000,00
9	Hibah Bidang Lingkungan Hidup	22.705.135.000,00	21.896.741.441,00	96,44	-	21.896.741.441,00
10	Hibah Bidang Energi	8.416.000.000,00	8.254.489.515,00	98,08	9.360.676.841,00	(1.106.187.326,00)
11	Hibah Bidang Pertanian	62.052.399.000,00	57.233.766.991,00	92,23	1.675.000.000,00	55.558.766.991,00
11	Hibah Bidang Peternakan	40.332.700.000,00	36.194.761.245,00	89,74	-	36.194.761.245,00
11	Hibah Bidang Kelautan & Perikanan	4.571.000.000,00	4.464.146.900,00	97,66	-	4.464.146.900,00
12	Hibah Bidang Penyiaran	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	3.500.000.000,00	-
	Jumlah	**1.092.254.914.000,00**	**1.057.706.101.856,00**	**96,84**	**5.418.497.433.377,00**	**(4.360.791.331.521,00)**

5.1.2.1.4.3 Belanja Hibah Dana BOS **Rp998.639.178.147,00**

Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp1.041.626.248.000,00 dengan realisasi sebesar Rp998.639.178.147,00 atau 95,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp998.639.178.147,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.041.626.248.000,00	998.639.178.147,00	95,87	-	998.639.178.147,00
	Jumlah	**1.041.626.248.000,00**	**998.639.178.147,00**	**95,87**	**-**	**998.639.178.147,00**

5.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik **Rp20.369.884.800,00**

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp20.369.890.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.369.884.800,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp20.369.884.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.369.890.000,00	20.369.884.800,00	100,00	20.369.884.800,00	-
	Jumlah	**20.369.890.000,00**	**20.369.884.800,00**	**100,00**	**20.369.884.800,00**	**-**

Adapun rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	7.131.087.000,00	7.131.086.400,00	100,00	7.131.086.400,00	-
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.244.256.000,00	3.244.255.200,00	100,00	3.244.255.200,00	-
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	1.947.298.000,00	1.947.297.600,00	100,00	1.947.297.600,00	-
4	Partai Keadilan Sejahtera	1.484.352.000,00	1.484.352.000,00	100,00	1.484.352.000,00	-
5	Partai Golongan Karya	2.046.065.000,00	2.046.064.800,00	100,00	2.046.064.800,00	-
6	Partai Demokrat	1.145.102.000,00	1.145.101.200,00	100,00	1.145.101.200,00	-
7	Partai Amanat Nasional	1.037.600.000,00	1.037.599.200,00	100,00	1.037.599.200,00	-
8	Partai Persatuan Pembangunan	1.329.836.000,00	1.329.835.200,00	100,00	1.329.835.200,00	-
9	Partai Nasional Demokrat	1.004.294.000,00	1.004.293.200,00	100,00	1.004.293.200,00	-
	Jumlah	**20.369.890.000,00**	**20.369.884.800,00**	**100,00**	**20.369.884.800,00**	**-**

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp78.894.181.648,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp88.721.550.000,00 dengan realisasi sebesar Rp78.894.181.648,00 atau 88,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp66.180.255.190,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.713.926.458,00 atau 19,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	74.101.033.000,00	64.768.264.710,00	87,41	58.867.565.270,00	5.900.699.440,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	10.000.000.000,00	9.633.430.914,00	96,33	7.312.689.920,00	2.320.740.994,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.620.517.000,00	4.492.486.024,00	97,23	-	4.492.486.024,00
	Jumlah	**88.721.550.000,00**	**78.894.181.648,00**	**88,92**	**66.180.255.190,00**	**12.713.926.458,00**

Belanja Bantuan Sosial **tidak mencapai target** dikarenakan penerima bantuan sosial yang telah diusulkan setelah diverifikasi lapangan batal menerima bantuan dikarenakan meninggal, pindah domisili dan telah menerima bantuan yang sejenis.

5.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp64.768.264.710,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp74.101.033.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.768.264.710,00 atau 87,41%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp58.867.565.270,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.900.699.440,00 atau 10,02% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.000.000.000,00	9.993.000.000,00	99,93	9.526.000.000,00	467.000.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.972.000.000,00	12.972.000.000,00	100,00	8.956.000.000,00	4.016.000.000,00
3	Dinas Sosial	35.562.750.000,00	30.840.000.000,00	86,72	29.961.000.000,00	879.000.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.020.000.000,00	915.257.200,00	89,73	577.900.500,00	337.356.700,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.546.283.000,00	10.048.007.510,00	69,08	9.846.664.770,00	201.342.740,00
	Jumlah	**74.101.033.000,00**	**64.768.264.710,00**	**87,41**	**58.867.565.270,00**	**5.900.699.440,00**

5.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp9.633.430.914,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.633.430.914,00 atau 96,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.312.689.920,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.320.740.994,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	10.000.000.000,00	9.633.430.914,00	96,33	7.312.689.920,00	2.320.740.994,00
	Jumlah	**10.000.000.000,00**	**9.633.430.914,00**	**96,33**	**7.312.689.920,00**	**2.320.740.994,00**

5.1.2.1.5.3 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp4.492.486.024,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.620.517.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.492.486.024,00 atau 97,23%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.492.486.024,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Sosial	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	-	600.000.000,00
2	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	4.020.517.000,00	3.892.486.024,00	96,82	-	3.892.486.024,00
	Jumlah	**4.620.517.000,00**	**4.492.486.024,00**	**97,23**	**-**	**4.492.486.024,00**

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp1.713.641.630.081,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp2.015.151.410.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.713.641.630.081,00 atau 85,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.447.620.411.245,00 mengalami kenaikan sebesar Rp266.021.218.836,00 atau 18,38% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	49.037.321.000,00	17.346.322.716,00	35,37	79.135.275.975,00	(61.788.953.259,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	904.691.628.000,00	767.027.589.289,00	84,78	578.353.949.251,00	(188.673.640.038,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	446.596.836.000,00	359.726.308.741,00	80,55	330.679.148.402,00	29.047.160.339,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	507.655.838.000,00	475.441.543.110,00	93,65	351.328.654.582,00	124.112.888.528,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	107.169.787.000,00	94.099.866.225,00	87,80	108.123.383.035,00	(14.023.516.810,00)
	Jumlah	**2.015.151.410.000,00**	**1.713.641.630.081,00**	**85,04**	**1.447.620.411.245,00**	**266.021.218.836,00**

Belanja Modal **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan :

- Pembelian Tanah untuk SMK Negeri Satu Atap Tuntang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semula 3 bidang tanah namun hanya 2 bidang tanah yang dapat terealisasi dikarenakan 1 bidang tanah belum memenuhi kesepakatan;

- Pengadaan lahan pasar Kujon, Borobudur yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Ciptakarya tidak terserap akibat *sharing* pendanaan dari PT TWC/Taman Wisata Candi, tidak bisa menyediakan sesuai PKS;
- Proses Pembebasan Tanah yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Regional Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang tidak cukup waktu dan akan dilanjutkan pada tahun 2023;
- Ada beberapa kegiatan seperti pemenuhan alat kesehatan & jaringan pada Rumah Sakit Daerah yang direncanakan tidak dapat dilaksanakan karena waktu yang dibutuhkan untuk pengadaannya tidak mencukupi & stok global yang tidak mencukupi
- Pengadaan Alat Laboratorium untuk Balai Sertifikasi Mutu Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak cukup waktu pelaksanaan dan adanya regulasi TKDN karena sebagian besar merupakan barang impor dan tidak mendapatkan izin Kementerian Perindustrian;
- Pembangunan jalur evakuasi antara gedung parkir dengan gedung rawat inap dan pembangunan gedung bangunan gudang peralatan medis Rumah Sakit Daerah tidak cukup waktu;
- Jasa konsultan perencanaan perluasan gedung arsip UPPD Grobogan dan Sragen pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah tidak jadi dilaksanakan karena tidak cukup waktu pelaksanaan;
- Pembangunan bangunan irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang putus kontrak dan dihentikan karena akses jalan menuju lokasi terjadi longsor sehingga berisiko terhadap keamanan dalam proses pengerjaan (Banjaran Kabupaten Banyumas, Watujagir Kabupaten Purworejo dan Sungai Comal Pemalang); dan
- Sisa lelang dan efisiensi belanja modal pada SKPD.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp17.346.322.716,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp49.037.321.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.346.322.716,00 atau 35,37%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp79.135.275.975,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.788.953.259,00 atau 78,08% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.147.000.000,00	3.408.691.912,00	82,20	-	3.408.691.912,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	43.957.320.000,00	13.607.885.183,00	30,96	55.703.798.625,00	(42.095.913.442,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	282.051.400,00	(282.051.400,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	933.001.000,00	329.745.621,00	35,34	-	329.745.621,00
5	Dinas Perhubungan	-	-	-	23.149.425.950,00	(23.149.425.950,00)
	Jumlah	**49.037.321.000,00**	**17.346.322.716,00**	**35,37**	**79.135.275.975,00**	**(61.788.953.259,00)**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp767.027.589.289,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp904.691.628.000,00 dengan realisasi sebesar Rp767.027.589.289,00 atau 84,78%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp578.353.949.251,00 mengalami penurunan sebesar Rp188.673.640.038,00 atau 32,62% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	11.498.435.000,00	11.398.842.171,00	99,13	3.296.197.650,00	8.102.644.521,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	26.429.034.000,00	26.116.258.900,00	98,82	18.222.725.250,00	7.893.533.650,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.192.796.000,00	1.170.633.366,00	98,14	169.799.600,00	1.000.833.766,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.680.688.000,00	1.587.748.530,00	94,47	2.556.595.764,00	(968.847.234,00)
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	40.691.129.000,00	39.489.548.887,00	97,05	15.352.929.499,00	24.136.619.388,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.570.182.000,00	6.242.686.659,00	95,02	9.075.408.825,00	(2.832.722.166,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	48.079.519.000,00	46.965.376.472,00	97,68	111.799.761.868,00	(64.834.385.396,00)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	53.051.784.000,00	42.836.366.267,00	80,74	153.738.146.388,00	(110.901.780.121,00)
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	67.157.893.000,00	64.500.039.956,00	96,04	25.881.479.760,00	38.618.560.196,00
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	643.130.000,00	604.874.049,00	94,05	48.750.000,00	556.124.049,00
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	2.075.000,00	2.075.000,00	100,00	-	2.075.000,00
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-	1.810.803.000,00	(1.810.803.000,00)
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	-	-
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	40.000.000,00	39.585.700,00	98,96	-	39.585.700,00
16	Belanja Modal Alat Peraga	5.943.740.000,00	5.647.980.225,00	95,02	211.210.000,00	5.436.770.225,00
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	2.840.000.000,00	2.809.500.000,00	98,93	-	2.809.500.000,00
18	Belanja Modal Rambu-rambu	1.891.502.000,00	1.855.280.450,00	98,09	4.761.120.000,00	(2.905.839.550,00)
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	13.750.000,00	(13.750.000,00)
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	206.776.003.000,00	215.363.500.524,00	104,15	231.415.271.647,00	(16.051.771.123,00)
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	430.203.718.000,00	300.397.292.133,00	69,83	-	300.397.292.133,00
	Jumlah	**904.691.628.000,00**	**767.027.589.289,00**	**84,78**	**578.353.949.251,00**	**(188.673.640.038,00)**

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar **Rp11.398.842.171,00**

Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp11.498.435.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.398.842.171,00 atau 99,13%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.296.197.650,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.102.644.521,00 atau 245,82% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000.000,00	74.750.000,00	99,67	197.750.000,00	(123.000.000,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	7.650.000,00	(7.650.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	10.115.735.000,00	10.022.209.545,00	99,08	251.707.500,00	9.770.502.045,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	475.200.000,00	475.200.000,00	100,00	1.749.000.000,00	(1.273.800.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	10.125.000,00	(10.125.000,00)
6	Dinas Sosial	-	-	-	25.000.000,00	(25.000.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	-	8.000.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan	41.000.000,00	40.813.500,00	99,55	223.450.000,00	(182.636.500,00)
9	Dinas Perhubungan	-	-	-	532.516.100,00	(532.516.100,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	14.000.000,00	13.920.250,00	99,43	-	13.920.250,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	168.000.000,00	166.626.000,00	99,18	101.890.000,00	64.736.000,00
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90	-	199.800.000,00
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	208.000.000,00	206.089.470,00	99,08	-	206.089.470,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.500.000,00	43.931.500,00	98,72	154.020.790,00	(110.089.290,00)
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	149.000.000,00	147.501.906,00	98,99	37.088.260,00	110.413.646,00
	Jumlah	**11.498.435.000,00**	**11.398.842.171,00**	**99,13**	**3.296.197.650,00**	**8.102.644.521,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan **Rp26.116.258.900,00**

Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp26.429.034.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.116.258.900,00 atau 98,82%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18.222.725.250,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.893.533.650,00 atau 43,32% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	25.000.000,00	24.950.000,00	99,80	-	24.950.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.358.580.000,00	1.305.547.900,00	96,10	15.754.137.250,00	(14.448.589.350,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.239.374.000,00	9.158.974.000,00	99,13	1.887.888.000,00	7.271.086.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	10.778.600.000,00	10.737.237.000,00	99,62	551.000.000,00	10.186.237.000,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	29.700.000,00	(29.700.000,00)
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35.000.000,00	32.550.000,00	93,00	-	32.550.000,00
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	840.000.000,00	832.500.000,00	99,11	-	832.500.000,00
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	170.000.000,00	162.000.000,00	95,29	-	162.000.000,00
9	Sekretariat Daerah	1.760.000.000,00	1.732.000.000,00	98,41	-	1.732.000.000,00
10	Sekretariat DPRD	2.222.480.000,00	2.130.500.000,00	95,86	-	2.130.500.000,00
	Jumlah	**26.429.034.000,00**	**26.116.258.900,00**	**98,82**	**18.222.725.250,00**	**7.893.533.650,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur **Rp1.170.633.366,00**

Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur dianggarkan sebesar Rp1.192.796.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.170.633.366,00 atau 98,14%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp169.799.600,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.000.833.766,00 atau 589,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00	-	11.500.000,00
2	Dinas Kesehatan	103.831.000,00	102.500.000,00	98,72	-	102.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	33.500.000,00	31.004.296,00	92,55	-	31.004.296,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	306.750.000,00	305.832.750,00	99,70	-	305.832.750,00
5	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000,00	149.810.450,00	99,87	-	149.810.450,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	-	4.000.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	25.000.000,00	20.500.000,00	82,00	-	20.500.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.275.000,00	55.104.000,00	99,69	-	55.104.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1.200.000,00	(1.200.000,00)
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	99.699.600,00	(99.699.600,00)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	324.350.000,00	318.489.575,00	98,19	-	318.489.575,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	151.390.000,00	145.023.635,00	95,79	68.900.000,00	76.123.635,00
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	27.200.000,00	26.868.660,00	98,78	-	26.868.660,00
	Jumlah	**1.192.796.000,00**	**1.170.633.366,00**	**98,14**	**169.799.600,00**	**1.000.833.766,00**

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian **Rp1.587.748.530,00**

Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp1.680.688.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.587.748.530,00 atau 94,47%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.556.595.764,00 mengalami penurunan sebesar Rp968.847.234,00 atau 37,90% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54.700.000,00	54.125.000,00	98,95	-	54.125.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	211.860.000,00	211.483.000,00	99,82	64.800.000,00	146.683.000,00
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	2.275.745.764,00	(2.275.745.764,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.414.128.000,00	1.322.140.530,00	93,50	116.500.000,00	1.205.640.530,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	99.550.000,00	(99.550.000,00)
	Jumlah	**1.680.688.000,00**	**1.587.748.530,00**	**94,47**	**2.556.595.764,00**	**(968.847.234,00)**

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga **Rp39.489.548.887,00**

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp40.691.129.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.489.548.887,00 atau 97,05%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.352.929.499,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.136.619.388,00 atau 157,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.531.121.000,00	10.320.399.855,00	98,00	1.864.465.104,00	8.455.934.751,00
2	Dinas Kesehatan	1.462.845.000,00	1.413.494.070,00	96,63	2.747.978.304,00	(1.334.484.234,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.552.052.000,00	3.457.936.989,00	97,35	544.270.000,00	2.913.666.989,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	201.425.000,00	200.800.500,00	99,69	24.100.000,00	176.700.500,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30.000.000,00	29.826.350,00	99,42	184.353.940,00	(154.527.590,00)
6	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	#DIV/0!	89.400.000,00	(89.400.000,00)
7	Dinas Sosial	319.000.000,00	310.305.000,00	97,27	327.930.441,00	(17.625.441,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	312.700.000,00	311.363.675,00	99,57	549.337.000,00	(237.973.325,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	73.600.000,00	73.094.412,00	99,31	82.683.900,00	(9.589.488,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	114.200.000,00	109.990.889,00	96,31	74.827.000,00	35.163.889,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	643.230.000,00	628.479.899,00	97,71	107.552.000,00	520.927.899,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	48.800.000,00	47.952.000,00	98,26	187.364.680,00	(139.412.680,00)
13	Dinas Perhubungan	92.500.000,00	91.095.000,00	98,48	676.626.750,00	(585.531.750,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	131.680.000,00	129.182.000,00	98,10	135.070.000,00	(5.888.000,00)
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	662.200.000,00	657.077.040,00	99,23	349.360.000,00	307.717.040,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.000.000,00	3.996.000,00	99,90	62.700.000,00	(58.704.000,00)
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	349.880.000,00	345.501.892,00	98,75	156.328.000,00	189.173.892,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	25.000.000,00	21.465.000,00	85,86	120.276.750,00	(98.811.750,00)
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.069.151.000,00	1.027.141.400,00	96,07	618.586.000,00	408.555.400,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	490.447.000,00	488.214.682,00	99,54	-	488.214.682,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	868.850.000,00	845.965.414,00	97,37	240.703.430,00	605.261.984,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	444.100.000,00	408.289.332,00	91,94	103.576.000,00	304.713.332,00
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.221.000.000,00	6.144.685.110,00	98,77	1.377.612.000,00	4.767.073.110,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	109.000.000,00	108.570.432,00	99,61	12.000.000,00	96.570.432,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	355.000.000,00	335.039.464,00	94,38	69.655.300,00	265.384.164,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	93.500.000,00	92.248.724,00	98,66	44.000.000,00	48.248.724,00
29	Inspektorat	33.350.000,00	32.746.200,00	98,19	39.800.000,00	(7.053.800,00)
30	Sekretariat Daerah	1.289.988.000,00	1.274.909.598,00	98,83	1.536.695.000,00	(261.785.402,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
31	Sekretariat DPRD	11.141.510.000,00	10.558.897.960,00	94,77	2.698.978.000,00	7.859.919.960,00
32	Badan Penghubung	21.000.000,00	20.880.000,00	99,43	316.699.900,00	(295.819.900,00)
	Jumlah	**40.691.129.000,00**	**39.489.548.887,00**	**97,05**	**15.352.929.499,00**	**24.136.619.388,00**

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp6.242.686.659,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp6.570.182.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.242.686.659,00 atau 95,02%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.075.408.825,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.832.722.166,00 atau 31,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	424.840.000,00	418.978.498,00	98,62	238.180.000,00	180.798.498,00
2	Dinas Kesehatan	251.255.000,00	249.937.500,00	99,48	1.206.780.715,00	(956.843.215,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	50.000.000,00	49.913.000,00	99,83	18.000.000,00	31.913.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	220.206.000,00	217.530.640,00	98,79	25.000.000,00	192.530.640,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	46.601.000,00	46.553.000,00	99,90	29.500.000,00	17.053.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	168.585.000,00	(168.585.000,00)
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	21.319.850,00	(21.319.850,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	16.350.000,00	16.339.034,00	99,93	53.837.580,00	(37.498.546,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	153.293.000,00	151.300.000,00	98,70	-	151.300.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	159.798.000,00	(159.798.000,00)
11	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	-
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.662.480.000,00	1.572.657.500,00	94,60	4.813.588.950,00	(3.240.931.450,00)
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	216.000.000,00	214.768.875,00	99,43	129.140.000,00	85.628.875,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	54.100.000,00	(54.100.000,00)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.959.000,00	9.955.000,00	99,96	3.800.000,00	6.155.000,00
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	32.000.000,00	31.955.790,00	99,86	-	31.955.790,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	96.855.000,00	(96.855.000,00)
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	305.549.000,00	299.864.929,00	98,14	-	299.864.929,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.500.000,00	9.433.000,00	99,29	-	9.433.000,00
20	Badan Kepegawaian Daerah	13.740.000,00	13.542.000,00	98,56	13.879.000,00	(337.000,00)
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.309.500.000,00	1.278.849.750,00	97,66	1.053.415.730,00	225.434.020,00
22	Inspektorat	-	-	-	138.925.000,00	(138.925.000,00)
23	Sekretariat Daerah	617.130.000,00	604.619.961,00	97,97	664.204.000,00	(59.584.039,00)
24	Sekretariat DPRD	1.221.288.000,00	1.046.290.000,00	85,67	186.500.000,00	859.790.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
25	Badan Penghubung	10.491.000,00	10.198.182,00	97,21	-	10.198.182,00
	Jumlah	**6.570.182.000,00**	**6.242.686.659,00**	**95,02**	**9.075.408.825,00**	**(2.832.722.166,00)**

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp46.965.376.472,00

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp48.079.519.000,00 dengan realisasi sebesar Rp46.965.376.472,00 atau 97,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp111.799.761.868,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.834.385.396,00 atau 57,99% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	6.637.482.000,00	6.536.892.650,00	98,48	29.542.771.734,00	(23.005.879.084,00)
2	RSUD Dr. Moewardi	17.442.337.000,00	17.404.058.660,00	99,78	35.356.518.521,00	(17.952.459.861,00)
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	2.000.000.000,00	1.847.815.000,00	92,39	9.209.368.935,00	(7.361.553.935,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	19.715.000.000,00	19.512.400.016,00	98,97	23.357.254.292,00	(3.844.854.276,00)
5	RSUD Kelet Donorejo	2.020.000.000,00	1.400.169.146,00	69,32	5.236.048.173,00	(3.835.879.027,00)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	4.229.860.000,00	(4.229.860.000,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	4.703.190.213,00	(4.703.190.213,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	-	1.100.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	263.600.000,00	262.941.000,00	99,75	74.800.000,00	188.141.000,00
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	4.675.000,00	(4.675.000,00)
11	Sekretariat Daerah	-	-	-	85.275.000,00	(85.275.000,00)
	Jumlah	**48.079.519.000,00**	**46.965.376.472,00**	**97,68**	**111.799.761.868,00**	**(64.834.385.396,00)**

5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp42.836.366.267,00

Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp53.051.784.000,00 dengan realisasi sebesar Rp42.836.366.267,00 atau 80,74%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp153.738.146.388,00 mengalami penurunan sebesar Rp110.901.780.121,00 atau 72,14% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.631.785.000,00	35.547.581.065,00	94,46	30.509.162.715,00	5.038.418.350,00
2	Dinas Kesehatan	1.392.574.000,00	1.358.874.710,00	97,58	13.865.370.516,00	(12.506.495.806,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	33.201.533.326,00	(33.201.533.326,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	58.364.242.641,00	(58.364.242.641,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	3.362.023.199,00	(3.362.023.199,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	1.296.928.386,00	(1.296.928.386,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	2.102.060.397,00	(2.102.060.397,00)
8	RSJD Surakarta	-	-	-	2.787.032.989,00	(2.787.032.989,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	3.783.538.154,00	(3.783.538.154,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.152.720.000,00	2.124.651.000,00	98,70	1.515.250.000,00	609.401.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya	-	-	-	246.716.000,00	(246.716.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	Air dan Penataan Ruang					
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	426.472.500,00	(426.472.500,00)
13	Dinas Ketahanan Pangan	249.600.000,00	247.549.350,00	99,18	15.000.000,00	232.549.350,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	129.850.000,00	129.650.000,00	99,85	9.500.000,00	120.150.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	39.435.000,00	(39.435.000,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	54.500.000,00	50.200.000,00	92,11	-	50.200.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	394.220.000,00	390.975.500,00	99,18	320.853.500,00	70.122.000,00
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	8.338.000,00	(8.338.000,00)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.228.744.000,00	1.208.242.533,00	98,33	209.721.500,00	998.521.033,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	945.095.000,00	935.018.800,00	98,93	1.611.287.190,00	(676.268.390,00)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.872.696.000,00	843.623.309,00	9,51	63.680.375,00	779.942.934,00
	Jumlah	**53.051.784.000,00**	**42.836.366.267,00**	**80,74**	**153.738.146.388,00**	**(110.901.780.121,00)**

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Komputer — Rp64.500.039.956,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp67.157.893.000,00 dengan realisasi sebesar Rp64.500.039.956,00 atau 96,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.881.479.760,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.618.560.196,00 atau 149,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.865.570.000,00	2.822.335.968,00	98,49	7.280.256.300,00	(4.457.920.332,00)
2	Dinas Kesehatan	1.302.800.000,00	1.219.015.053,00	93,57	1.958.688.905,00	(739.673.852,00)
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	188.975.930,00	(188.975.930,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	320.000.000,00	(320.000.000,00)
5	RSUD Kelet Donorejo	205.120.000,00	169.915.200,00	82,84	-	169.915.200,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.295.423.000,00	2.205.697.100,00	96,09	323.420.000,00	1.882.277.100,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	230.132.000,00	227.432.650,00	98,83	97.779.000,00	129.653.650,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	443.250.000,00	440.095.310,00	99,29	29.000.000,00	411.095.310,00
9	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.500.000,00	149.862.000,00	98,92	296.230.100,00	(146.368.100,00)
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	135.685.000,00	(135.685.000,00)
12	Dinas Sosial	511.500.000,00	511.040.000,00	99,91	163.375.000,00	347.665.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	115.018.000,00	108.820.000,00	94,61	1.015.933.600,00	(907.113.600,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	69.000.000,00	68.680.200,00	99,54	102.602.700,00	(33.922.500,00)
15	Dinas Ketahanan Pangan	212.050.000,00	209.293.167,00	98,70	218.602.500,00	(9.309.333,00)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	563.304.000,00	555.510.211,00	98,62	42.240.000,00	513.270.211,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	56.649.000,00	(56.649.000,00)
18	Dinas Perhubungan	33.000.000,00	32.615.000,00	98,83	-	32.615.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.531.880.000,00	45.773.157.480,00	96,30	8.618.917.301,00	37.154.240.179,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	372.000.000,00	368.507.000,00	99,06	344.905.000,00	23.602.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	39.550.000,00	(39.550.000,00)
22	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	20.000.000,00	19.850.000,00	99,25	-	19.850.000,00
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	286.579.120,00	(282.579.120,00)
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	282.010.000,00	278.999.726,00	98,93	329.557.000,00	(50.557.274,00)
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	144.525.500,00	(144.525.500,00)
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	900.700.000,00	890.981.400,00	98,92	229.193.000,00	661.788.400,00
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	579.033.000,00	570.157.701,00	98,47	37.000.000,00	533.157.701,00
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	267.600.000,00	265.628.475,00	99,26	239.695.880,00	25.932.595,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.065.850.000,00	997.781.100,00	93,61	366.732.924,00	631.048.176,00
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.928.470.000,00	1.831.045.500,00	94,95	-	1.831.045.500,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	250.000.000,00	248.175.000,00	99,27	335.045.000,00	(86.870.000,00)
32	Badan Kepegawaian Daerah	782.460.000,00	743.031.500,00	94,96	623.464.400,00	119.567.100,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	258.300.000,00	250.524.600,00	96,99	314.259.400,00	(63.734.800,00)
34	Inspektorat	103.200.000,00	103.200.000,00	100,00	71.775.000,00	31.425.000,00
35	Sekretariat Daerah	1.082.694.000,00	1.065.798.615,00	98,44	1.053.940.200,00	11.858.415,00
36	Sekretariat DPRD	2.732.029.000,00	2.368.890.000,00	86,71	616.902.000,00	1.751.988.000,00
	Jumlah	**67.157.893.000,00**	**64.500.039.956,00**	**96,04**	**25.881.479.760,00**	**38.618.560.196,00**

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Eksplorasi — Rp604.874.049,00

Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp643.130.000,00 dengan realisasi sebesar Rp604.874.049,00 atau 94,05%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp48.750.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp556.124.049,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	204.400.000,00	198.813.000,00	97,27	-	198.813.000,00
2	Dinas Kesehatan	28.000.000,00	25.664.999,00	91,66	48.750.000,00	(23.085.001,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.500.000,00	4.400.040,00	97,78	-	4.400.040,00
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.000.000,00	192.400.000,00	87,45	-	192.400.000,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	120.000.000,00	119.675.000,00	99,73	-	119.675.000,00
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	56.230.000,00	56.050.000,00	99,68	-	56.050.000,00
7	Badan Kepegawaian Daerah	10.000.000,00	7.871.010,00	78,71	-	7.871.010,00
	Jumlah	**643.130.000,00**	**604.874.049,00**	**94,05**	**48.750.000,00**	**556.124.049,00**

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Pengeboran Rp2.075.000,00

Belanja Modal Alat Pengeboran dianggarkan sebesar Rp2.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.075.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.075.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.075.000,00	2.075.000,00	100,00	-	2.075.000,00
	Jumlah	**2.075.000,00**	**2.075.000,00**	**100,00**	**-**	**2.075.000,00**

5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp0,00

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.810.803.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.810.803.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	1.810.803.000,00	(1.810.803.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	-	**1.810.803.000,00**	**(1.810.803.000,00)**

5.1.2.2.2.13 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp39.585.700,00

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dianggarkan sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp39.585.700,00 atau 98,96%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp39.585.700,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	35.000.000,00	34.586.200,00	98,82	-	34.586.200,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	5.000.000,00	4.999.500,00	99,99	-	4.999.500,00
	Jumlah	**40.000.000,00**	**39.585.700,00**	**98,96**	**-**	**39.585.700,00**

5.1.2.2.2.14 Belanja Modal Alat Peraga Rp5.647.980.225,00

Belanja Modal Alat Peraga dianggarkan sebesar Rp5.943.740.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.647.980.225,00 atau 95,02%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp211.210.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.436.770.225,00 atau 2.574,11% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.540.000.000,00	5.246.756.500,00	94,71	-	5.246.756.500,00
2	Dinas Kesehatan	38.118.000,00	38.117.300,00	100,00	-	38.117.300,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	822.000,00	822.000,00	100,00	211.210.000,00	(210.388.000,00)
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	244.800.000,00	242.487.675,00	99,06	-	242.487.675,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	120.000.000,00	119.796.750,00	99,83	-	119.796.750,00
	Jumlah	**5.943.740.000,00**	**5.647.980.225,00**	**95,02**	**211.210.000,00**	**5.436.770.225,00**

5.1.2.2.2.15 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp2.809.500.000,00

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi dianggarkan sebesar Rp2.840.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.809.500.000,00 atau 98,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.809.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan	2.840.000.000,00	2.809.500.000,00	98,93	-	2.809.500.000,00
	Jumlah	**2.840.000.000,00**	**2.809.500.000,00**	**98,93**	**-**	**2.809.500.000,00**

5.1.2.2.2.16 Belanja Modal Rambu-Rambu Rp1.855.280.450,00

Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp1.891.502.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.855.280.450,00 atau 98,09%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.761.120.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.905.839.550,00 dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.891.500.000,00	1.855.280.450,00	98,09	4.761.120.000,00	(2.905.839.550,00)
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.000,00	-	-	-	-
	Jumlah	**1.891.502.000,00**	**1.855.280.450,00**	**98,09**	**4.761.120.000,00**	**(2.905.839.550,00)**

5.1.2.2.2.17 Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp0,00

Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.750.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.750.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	8.750.000,00	(8.750.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**13.750.000,00**	**(13.750.000,00)**

5.1.2.2.2.18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp215.363.500.524,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp206.776.003.000,00 dengan realisasi sebesar Rp215.363.500.524,00 atau 104,15%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp231.415.271.647,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.051.771.123,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	206.776.003.000,00	215.363.500.524,00	104,15	231.415.271.647,00	(16.051.771.123,00)
	Jumlah	**206.776.003.000,00**	**215.363.500.524,00**	**104,15**	**231.415.271.647,00**	**(16.051.771.123,00)**

5.1.2.2.2.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp300.397.292.133,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp430.203.718.000,00 dengan realisasi sebesar Rp300.397.292.133,00 atau 69,83%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp300.397.292.133,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	334.271.318.000,00	225.113.489.366,00	67,34	-	225.113.489.366,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	66.118.400.000,00	57.486.329.330,00	86,94	-	57.486.329.330,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	10.940.000.000,00	4.509.810.302,00	41,22	-	4.509.810.302,00
4	RSUD Kelet Donorejo	3.945.000.000,00	3.904.417.727,00	98,97	-	3.904.417.727,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.924.000.000,00	1.418.103.641,00	73,71	-	1.418.103.641,00
6	RSJD Surakarta	5.980.000.000,00	4.640.463.726,00	77,60	-	4.640.463.726,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	7.025.000.000,00	3.324.678.041,00	47,33	-	3.324.678.041,00
	Jumlah	**430.203.718.000,00**	**300.397.292.133,00**	**69,83**	**-**	**300.397.292.133,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp359.726.308.741,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp446.596.836.000,00 dengan realisasi sebesar Rp359.726.308.741,00 atau 80,55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp330.679.148.402,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.047.160.339,00 atau 8,78% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	256.036.521.000,00	227.535.339.310,00	88,87	330.327.506.402,00	(102.792.167.092,00)	(31,12)
2	Belanja Modal Monumen	4.320.000.000,00	4.308.211.000,00	99,73	-	4.308.211.000,00	-
3	Belanja Modal Bangunan Menara	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.280.315.000,00	1.276.381.267,00	99,69	351.642.000,00	924.739.267,00	262,98
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	184.960.000.000,00	126.606.377.164,00	68,45	-	126.606.377.164,00	-
	Jumlah	**446.596.836.000,00**	**359.726.308.741,00**	**80,55**	**330.679.148.402,00**	**29.047.160.339,00**	**8,78**

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp227.535.339.310,00

Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp256.036.521.000,00 dengan realisasi sebesar Rp227.535.339.310,00 atau 88,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp330.327.506.402,00 mengalami penurunan sebesar Rp102.792.167.092,00 atau 31,12% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	61.097.904.000,00	52.892.304.720,00	86,57	37.609.390.443,00	15.282.914.277,00
2	Dinas Kesehatan	120.000.000,00	96.108.830,00	80,09	1.864.298.882,00	(1.768.190.052,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	35.515.311.338,00	(35.515.311.338,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	3.437.299.922,00	(3.437.299.922,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	15.838.165.800,00	(15.838.165.800,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	1.259.156.000,00	1.190.330.357,00	94,53	76.816.000,00	1.113.514.357,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	3.939.693.980,00	(3.939.693.980,00)
8	RSJD Surakarta	18.500.000.000,00	15.460.204.226,00	83,57	3.952.333.000,00	11.507.871.226,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	970.480.000,00	(970.480.000,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	29.963.480.000,00	29.812.422.420,00	99,50	115.013.974.017,00	(85.201.551.597,00)
11	Dinas Sosial	-	-	-	184.353.000,00	(184.353.000,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	148.800.000,00	(148.800.000,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	922.843.000,00	914.815.648,00	99,13	62.585.000,00	852.230.648,00
14	Dinas Perhubungan	6.282.822.000,00	6.240.007.235,00	99,32	14.557.722.035,00	(8.317.714.800,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.000.000,00	99.000.000,00	99,00	-	99.000.000,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	500.000.000,00	499.822.000,00	99,96	124.201.000,00	375.621.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	92.853.386.000,00	83.013.260.612,00	89,40	68.768.253.107,00	14.245.007.505,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	40.504.300.000,00	33.507.830.502,00	82,73	16.945.509.153,00	16.562.321.349,00
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	3.080.002.938,00	(3.080.002.938,00)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.480.000.000,00	1.474.041.530,00	99,60	4.194.093.893,00	(2.720.052.363,00)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.108.825.000,00	1.106.891.550,00	99,83	772.691.611,00	334.199.939,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	716.580.000,00	715.005.370,00	99,78	2.115.437.265,00	(1.400.431.895,00)
23	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	200.000.000,00	196.581.000,00	98,29	-	196.581.000,00
24	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	427.225.000,00	316.713.310,00	74,13	-	316.713.310,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	163.314.057,00	(163.314.057,00)
26	Badan Penghubung	-	-	-	992.779.961,00	(992.779.961,00)
	Jumlah	**256.036.521.000,00**	**227.535.339.310,00**	**88,87**	**330.327.506.402,00**	**(102.792.167.092,00)**

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Monumen Rp4.308.211.000,00

Belanja Modal Monumen dianggarkan sebesar Rp4.320.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.308.211.000,00 atau 99,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.308.211.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat DPRD	4.320.000.000,00	4.308.211.000,00	99,73	-	4.308.211.000,00
	Jumlah	**4.320.000.000,00**	**4.308.211.000,00**	**99,73**	**-**	**4.308.211.000,00**

5.1.2.2.3.3 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp1.276.381.267,00

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp1.280.315.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.276.381.267,00 atau 99,69%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar

Rp351.642.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp924.739.267,00 atau 262,98% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	592.840.000,00	591.323.667,00	99,74	79.689.000,00	511.634.667,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000.000,00	199.315.000,00	99,66	-	199.315.000,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	45.000.000,00	44.955.000,00	99,90	-	44.955.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	442.475.000,00	440.787.600,00	99,62	271.953.000,00	168.834.600,00
	Jumlah	**1.280.315.000,00**	**1.276.381.267,00**	**99,69**	**351.642.000,00**	**924.739.267,00**

5.1.2.2.3.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp126.606.377.164,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp184.960.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp126.606.377.164,00 atau 68,45%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp126.606.377.164,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	137.500.000.000,00	91.222.867.849,00	66,34	-	91.222.867.849,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	38.350.000.000,00	28.267.517.203,00	73,71	-	28.267.517.203,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	4.060.000.000,00	2.378.437.000,00	58,58	-	2.378.437.000,00
4	RSUD Kelet Donorejo	500.000.000,00	276.781.500,00	55,36	-	276.781.500,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	50.000.000,00	49.000.000,00	98,00	-	49.000.000,00
6	RSJD Surakarta	1.500.000.000,00	1.476.954.000,00	98,46	-	1.476.954.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.000.000.000,00	2.934.819.612,00	97,83	-	2.934.819.612,00
	Jumlah	**184.960.000.000,00**	**126.606.377.164,00**	**68,45**	**-**	**126.606.377.164,00**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp475.441.543.110,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp507.655.838.000,00 dengan realisasi sebesar Rp475.441.543.110,00 atau 93,65%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp351.328.654.582,00 mengalami kenaikan sebesar Rp124.112.888.528,00 atau 35,33% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	408.892.526.000,00	392.796.968.184,00	96,06	248.942.142.910,00	143.854.825.274,00
2	Bangunan Air	63.212.217.000,00	52.584.050.096,00	83,19	46.321.405.827,00	6.262.644.269,00
3	Instalasi	1.601.000.000,00	1.490.894.782,00	93,12	3.442.016.000,00	(1.951.121.218,00)
4	Jaringan	20.420.095.000,00	20.391.958.995,00	99,86	52.623.089.845,00	(32.231.130.850,00)
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD	13.530.000.000,00	8.177.671.053,00	60,44	-	8.177.671.053,00
	Jumlah	**507.655.838.000,00**	**475.441.543.110,00**	**93,65**	**351.328.654.582,00**	**124.112.888.528,00**

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp392.796.968.184,00

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp408.892.526.000,00 dengan realisasi sebesar Rp392.796.968.184,00 atau 96,06%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp248.942.142.910,00 mengalami kenaikan sebesar Rp143.854.825.274,00 atau 57,79% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	190.000.000,00	187.866.078,00	98,88	-	187.866.078,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	404.432.215.000,00	388.342.532.847,00	96,02	248.809.611.265,00	139.532.921.582,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.046.311.000,00	4.043.062.459,00	99,92	123.493.000,00	3.919.569.459,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	224.000.000,00	223.506.800,00	99,78	-	223.506.800,00
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	9.038.645,00	(9.038.645,00)
	Jumlah	**408.892.526.000,00**	**392.796.968.184,00**	**96,06**	**248.942.142.910,00**	**143.854.825.274,00**

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air — Rp52.584.050.096,00

Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp63.212.217.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.584.050.096,00 atau 83,19%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp46.321.405.827,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.262.644.269,00 atau 13,52% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	61.872.083.000,00	51.246.852.850,00	82,83	45.363.220.827,00	5.883.632.023,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	199.714.000,00	(199.714.000,00)
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	190.746.000,00	189.598.900,00	99,40	758.471.000,00	(568.872.100,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	180.775.000,00	180.658.000,00	99,94	-	180.658.000,00
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	968.613.000,00	966.940.346,00	99,83	-	966.940.346,00
	Jumlah	**63.212.217.000,00**	**52.584.050.096,00**	**83,19**	**46.321.405.827,00**	**6.262.644.269,00**

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi — Rp1.490.894.782,00

Belanja Modal Instalasi dianggarkan sebesar Rp1.601.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.490.894.782,00 atau 93,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.442.016.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.951.121.218,00 atau 56,69% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSJD Surakarta	-	-	-	2.767.777.000,00	(2.767.777.000,00)
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	573.066.000,00	(573.066.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.000.000.000,00	900.000.000,00	90,00	-	900.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	76.473.000,00	(76.473.000,00)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.000.000,00	5.830.000,00	97,17	24.700.000,00	(18.870.000,00)
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	595.000.000,00	585.064.782,00	98,33	-	585.064.782,00
	Jumlah	**1.601.000.000,00**	**1.490.894.782,00**	**93,12**	**3.442.016.000,00**	**(1.951.121.218,00)**

5.1.2.2.4.4 Belanja Modal Jaringan Rp20.391.958.995,00

Belanja Modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp20.420.095.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.391.958.995,00 atau 99,86%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp52.623.089.845,00 mengalami penurunan sebesar Rp32.231.130.850,00 atau 61,25% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	4.717.368.500,00	(4.717.368.500,00)
2	RSJD Surakarta	-	-	-	220.250.000,00	(220.250.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	20.400.095.000,00	20.371.963.995,00	99,86	47.494.418.345,00	(27.122.454.350,00)
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.000.000,00	19.995.000,00	99,98	-	19.995.000,00
5	Sekretariat Daerah	-	-	-	191.053.000,00	(191.053.000,00)
	Jumlah	**20.420.095.000,00**	**20.391.958.995,00**	**99,86**	**52.623.089.845,00**	**(32.231.130.850,00)**

5.1.2.2.4.5 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Rp8.177.671.053,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp13.530.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.177.671.053,00 atau 60,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.177.671.053,00 dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	7.600.000.000,00	4.605.092.356,00	60,59	-	4.605.092.356,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
3	RSUD Tugurejo Semarang	500.000.000,00	-	-	-	-
4	RSUD Kelet Donorejo	2.355.000.000,00	2.291.899.335,00	97,32	-	2.291.899.335,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
6	RSJD Surakarta	3.000.000.000,00	1.206.271.862,00	40,21	-	1.206.271.862,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	75.000.000,00	74.407.500,00	99,21	-	74.407.500,00
	Jumlah	**13.530.000.000,00**	**8.177.671.053,00**	**60,44**	**-**	**8.177.671.053,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp94.099.866.225,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp107.169.787.000,00 dengan realisasi sebesar Rp94.099.866.225,00 atau 87,80%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp108.123.383.035,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.023.516.810,00 atau 12,97% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	179.571.000,00	173.658.790,00	96,71	972.986.486,00	(799.327.696,00)
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	-	-	-	461.892.800,00	(461.892.800,00)
3	Belanja Modal Hewan	-	-	-	7.000.000,00	(7.000.000,00)
4	Belanja Modal Biota Perairan	-	-	-	-	-
5	Belanja Modal Tanaman	-	-	-	-	-
6	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	30.000.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	266.702.660,00	(266.702.660,00)
8	Belanja Aset Tetap Tak Berwujud	1.155.500.000,00	1.104.959.915,00	95,63	-	1.104.959.915,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	104.519.016.000,00	91.670.459.320,00	87,71	106.414.801.089,00	(14.744.341.769,00)
10	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	1.285.700.000,00	1.120.788.200,00	87,17	-	1.120.788.200,00
	Jumlah	**107.169.787.000,00**	**94.099.866.225,00**	**87,80**	**108.123.383.035,00**	**(14.023.516.810,00)**

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp173.658.790,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp179.571.000,00 dengan realisasi sebesar Rp173.658.790,00 atau 96,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp972.986.486,00 mengalami penurunan sebesar Rp799.327.696,00 atau 82,15% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.126.000,00	49.119.000,00	99,99	2.386.000,00	46.733.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00	76.405.645,00	(74.905.645,00)
3	RSJD Surakarta	20.000.000,00	15.782.089,00	78,91	-	15.782.089,00
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	900.000,00	(900.000,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	20.000.000,00	18.528.350,00	92,64	55.653.941,00	(37.125.591,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.043.000,00	1.043.000,00	100,00	176.500,00	866.500,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.000.000,00	9.965.000,00	99,65	31.720.000,00	(21.755.000,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	3.500.000,00	(1.500.000,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.700.000,00	19.668.625,00	99,84	69.546.500,00	(49.877.875,00)
10	Dinas Perhubungan	-	-	-	189.523.000,00	(189.523.000,00)
11	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.202.000,00	36.052.726,00	99,59	64.500.000,00	(28.447.274,00)
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	21.000.000,00	(21.000.000,00)
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	10.000.000,00	(10.000.000,00)
14	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	20.000.000,00
15	Inspektorat	-	-	-	2.339.900,00	(2.339.900,00)
16	Sekretariat Daerah	-	-	-	445.335.000,00	(445.335.000,00)
	Jumlah	**179.571.000,00**	**173.658.790,00**	**96,71**	**972.986.486,00**	**(799.327.696,00)**

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga Rp0,00

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp461.892.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp461.892.800,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	431.917.800,00	(431.917.800,00)
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	29.975.000,00	(29.975.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**461.892.800,00**	**(461.892.800,00)**

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Hewan **Rp0,00**

Belanja Modal Hewan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.000.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	7.000.000,00	(7.000.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**7.000.000,00**	**(7.000.000,00)**

5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya **Rp30.000.000,00**

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp30.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	-	30.000.000,00
	Jumlah	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**100,00**	**-**	**30.000.000,00**

5.1.2.2.5.5 Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi **Rp0,00**

Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp266.702.660,00 mengalami penurunan sebesar Rp266.702.660,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	181.732.660,00	(181.732.660,00)
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	84.970.000,00	(84.970.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**266.702.660,00**	**(266.702.660,00)**

5.1.2.2.5.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS **Rp91.670.459.320,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp104.519.016.000,00 dengan realisasi sebesar Rp91.670.459.320,00 atau 87,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp106.414.801.089,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.744.341.769,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	104.519.016.000,00	91.670.459.320,00	87,71	106.414.801.089,00	(14.744.341.769,00)
	Jumlah	**104.519.016.000,00**	**91.670.459.320,00**	**87,71**	**106.414.801.089,00**	**(14.744.341.769,00)**

5.1.2.2.5.7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp1.120.788.200,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp1.285.700.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.120.788.200,00 atau 87,17%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.120.788.200,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	20.000.000,00	19.688.200,00	98,44	-	19.688.200,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	265.700.000,00	246.400.000,00	92,74	-	246.400.000,00
3	RSUD Kelet Donorejo	1.000.000.000,00	854.700.000,00	85,47	-	854.700.000,00
	Jumlah	**1.285.700.000,00**	**1.120.788.200,00**	**87,17**	**-**	**1.120.788.200,00**

5.1.2.2.5.8 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp1.104.959.915,00

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp1.155.500.000,00 dengan realisasi Rp1.104.959.915,00 atau 95,63%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.104.959.915,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	699.500.000,00	658.209.850,00	94,10	-	658.209.850,00
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	-	25.000.000,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.000.000,00	49.900.065,00	99,80	-	49.900.065,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	381.000.000,00	371.850.000,00	97,60	-	371.850.000,00
	Jumlah	**1.155.500.000,00**	**1.104.959.915,00**	**95,63**	**-**	**1.104.959.915,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Rp16.545.479.100,00

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp36.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.545.479.100,00 atau 45,96%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp72.303.305.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp55.757.825.900,00 atau 77,12% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	36.000.000.000,00	16.545.479.100,00	45,96	72.303.305.000,00	(55.757.825.900,00)
	Jumlah	**36.000.000.000,00**	**16.545.479.100,00**	**45,96**	**72.303.305.000,00**	**(55.757.825.900,00)**

Belanja Tidak Terduga Tahun 2022 digunakan untuk :

1. Penanganan bencana tanah longsor dan perbaikan rumah rusak di Kabupaten Tegal dan Cilacap serta bantuan korban banjir di Kabupaten Pati sejumlah Rp1.495.000.000,00;
2. Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka melaksanakan amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah yang digunakan untuk menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan, ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerja sama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi terealisasi sejumlah Rp15.050.479.100,00 meliputi :

a. Bantuan Sosial uang distribusi hasil produksi pangan dan selisih harga BBM subsidi proses penggilingan padi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan terealisasi sejumlah Rp3.587.083.200,00;
b. Bantuan Sosial uang selisih harga BBM subsidi nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi sejumlah Rp4.788.199.900,00;
c. Bantuan Sosial uang untuk IKM Pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan terealisasi sejumlah Rp802.868.000,00;
d. Bantuan Sosial uang bagi pelaku usaha tranportasi wisata lokal yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata terealisasi sejumlah Rp723.292.000,00;
e. Bantuan Sosial uang pembelian bahan baku pangan dan bahan produksi pangan olahan produksi peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terealisasi sejumlah Rp560.000.000,00; dan
f. Bantuan Sosial uang kepada pekerja transportasi angkutan AKDP, AJDP dan Taksi serta transportasi driver angkutan *online* yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terealisasi sejumlah Rp4.589.036.000,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer **Rp8.763.165.716.275,00**

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp8.862.885.338.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.763.165.716.275,00 atau 98,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.497.298.646.119,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.265.867.070.156,00 atau 16,88% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	6.123.468.838.000,00	6.085.808.822.482,00	99,38	5.735.553.033.353,00	350.255.789.129,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	2.739.416.500.000,00	2.677.356.893.793,00	97,73	1.761.745.612.766,00	915.611.281.027,00
	Jumlah	**8.862.885.338.000,00**	**8.763.165.716.275,00**	**98,87**	**7.497.298.646.119,00**	**1.265.867.070.156,00**

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil **Rp6.085.808.822.482,00**

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp6.123.468.838.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.085.808.822.482,00 atau 99,38%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.735.553.033.353,00 mengalami kenaikan sebesar Rp350.255.789.129,00 atau 6,11% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.123.468.838.000,00	6.085.808.822.482,00	99,38	5.735.553.033.353,00	350.255.789.129,00
	Jumlah	**6.123.468.838.000,00**	**6.085.808.822.482,00**	**99,38**	**5.735.553.033.353,00**	**350.255.789.129,00**

Adapun rincian belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	196.033.111.000,00	196.033.111.000,00	100,00	191.675.079.511,00	4.358.031.489,00
2	Kabupaten Kendal	174.643.550.000,00	170.252.676.396,00	97,49	162.850.087.805,00	7.402.588.591,00
3	Kabupaten Demak	199.489.194.000,00	199.350.328.595,00	99,93	184.791.228.586,00	14.559.100.009,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
4	Kabupaten Grobogan	203.287.965.000,00	201.905.325.091,00	99,32	187.464.515.183,00	14.440.809.908,00
5	Kabupaten Pati	231.352.193.000,00	230.314.850.204,00	99,55	217.909.242.516,00	12.405.607.688,00
6	Kabupaten Kudus	172.180.469.000,00	171.893.652.772,00	99,83	166.347.501.424,00	5.546.151.348,00
7	Kabupaten Jepara	197.435.301.000,00	197.435.301.000,00	100,00	183.729.807.909,00	13.705.493.091,00
8	Kabupaten Rembang	119.936.641.000,00	119.936.641.000,00	100,00	120.762.316.716,00	(825.675.716,00)
9	Kabupaten Blora	130.676.984.000,00	130.676.984.000,00	100,00	126.260.266.417,00	4.416.717.583,00
10	Kabupaten Pekalongan	135.132.754.000,00	135.132.754.000,00	100,00	124.294.980.355,00	10.837.773.645,00
11	Kabupaten Batang	133.251.678.000,00	133.251.678.000,00	100,00	120.623.411.961,00	12.628.266.039,00
12	Kabupaten Pemalang	190.433.000.000,00	190.281.923.697,00	99,92	170.393.852.397,00	19.888.071.300,00
13	Kabupaten Tegal	212.766.623.000,00	211.566.275.761,00	99,44	186.620.461.851,00	24.945.813.910,00
14	Kabupaten Brebes	231.206.264.000,00	226.946.635.230,00	98,16	206.205.264.636,00	20.741.370.594,00
15	Kabupaten Banyumas	259.608.171.000,00	253.570.782.196,00	97,67	233.070.254.488,00	20.500.527.708,00
16	Kabupaten Cilacap	264.282.344.000,00	263.877.289.558,00	99,85	247.068.593.170,00	16.808.696.388,00
17	Kabupaten Purbalingga	133.435.930.000,00	130.492.465.203,00	97,79	124.624.802.130,00	5.867.663.073,00
18	Kabupaten Banjarnegara	136.584.972.000,00	134.248.126.559,00	98,29	122.694.193.588,00	11.553.932.971,00
19	Kabupaten Magelang	193.342.589.000,00	192.799.361.034,00	99,72	169.742.571.852,00	23.056.789.182,00
20	Kabupaten Temanggung	122.999.737.000,00	122.999.737.000,00	100,00	114.087.366.818,00	8.912.370.182,00
21	Kabupaten Wonosobo	122.029.316.000,00	121.815.108.966,00	99,82	112.685.340.755,00	9.129.768.211,00
22	Kabupaten Purworejo	118.603.095.000,00	118.603.095.000,00	100,00	108.924.659.904,00	9.678.435.096,00
23	Kabupaten Kebumen	175.763.136.000,00	175.763.136.000,00	100,00	157.491.424.803,00	18.271.711.197,00
24	Kabupaten Klaten	218.789.502.000,00	218.303.369.271,00	99,78	206.950.349.108,00	11.353.020.163,00
25	Kabupaten Boyolali	169.795.301.000,00	169.795.301.000,00	100,00	152.016.347.750,00	17.778.953.250,00
26	Kabupaten Sragen	184.776.461.000,00	184.776.461.000,00	100,00	174.684.467.479,00	10.091.993.521,00
27	Kabupaten Sukoharjo	183.400.277.000,00	183.400.277.000,00	100,00	172.597.941.561,00	10.802.335.439,00
28	Kabupaten Karanganyar	177.559.691.000,00	177.559.691.000,00	100,00	165.757.129.864,00	11.802.561.136,00
29	Kabupaten Wonogiri	149.046.067.000,00	149.046.067.000,00	100,00	145.525.380.454,00	3.520.686.546,00
30	Kota Semarang	560.263.876.000,00	551.844.602.271,00	98,50	532.561.552.641,00	19.283.049.630,00
31	Kota Pekalongan	72.380.352.000,00	72.380.352.000,00	100,00	76.876.982.891,00	(4.496.630.891,00)
32	Kota Surakarta	167.138.908.000,00	165.478.211.614,00	99,01	167.475.868.180,00	(1.997.656.566,00)
33	Kota Salatiga	64.841.765.000,00	64.841.765.000,00	100,00	64.918.523.115,00	(76.758.115,00)
34	Kota Tegal	66.790.682.000,00	66.790.681.678,00	100,00	73.489.943.717,00	(6.699.262.039,00)
35	Kota Magelang	54.210.939.000,00	52.444.805.386,00	96,74	62.381.321.818,00	(9.936.516.432,00)
	Jumlah	**6.123.468.838.000,00**	**6.085.808.822.482,00**	**99,38**	**5.735.553.033.353,00**	**350.255.789.129,00**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Rp2.677.356.893.793,00

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp2.739.416.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.677.356.893.793,00 atau 97,73%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.761.745.612.766,00 mengalami kenaikan sebesar Rp915.611.281.027,00 atau 51,97% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	862.666.000.000,00	804.934.393.793,00	93,31	493.309.827.766,00	311.624.566.027,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.876.750.500.000,00	1.872.422.500.000,00	99,77	1.268.435.785.000,00	603.986.715.000,00
	Jumlah	**2.739.416.500.000,00**	**2.677.356.893.793,00**	**97,73**	**1.761.745.612.766,00**	**915.611.281.027,00**

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota — Rp804.934.393.793,00

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp862.666.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp804.934.393.793,00 atau 93,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp493.309.827.766,00 mengalami kenaikan sebesar Rp311.624.566.027,00 atau 63,17% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	60.574.000.000,00	50.137.794.616,00	82,77	49.527.249.000,00	610.545.616,00
2	Kabupaten Kendal	15.083.000.000,00	15.019.277.408,00	99,58	8.937.061.883,00	6.082.215.525,00
3	Kabupaten Demak	69.923.000.000,00	69.666.588.000,00	99,63	38.408.240.000,00	31.258.348.000,00
4	Kabupaten Grobogan	22.123.000.000,00	20.923.846.000,00	94,58	24.991.851.000,00	(4.068.005.000,00)
5	Kabupaten Pati	16.943.000.000,00	13.909.654.000,00	82,10	11.006.114.000,00	2.903.540.000,00
6	Kabupaten Kudus	9.653.000.000,00	9.400.460.000,00	97,38	4.319.018.000,00	5.081.442.000,00
7	Kabupaten Jepara	22.923.000.000,00	20.046.025.467,00	87,45	34.387.744.409,00	(14.341.718.942,00)
8	Kabupaten Rembang	19.033.000.000,00	16.611.141.659,00	87,28	15.987.548.639,00	623.593.020,00
9	Kabupaten Blora	26.192.000.000,00	24.517.852.000,00	93,61	14.680.004.000,00	9.837.848.000,00
10	Kabupaten Pekalongan	61.913.000.000,00	59.340.277.400,00	95,84	6.632.264.000,00	52.708.013.400,00
11	Kabupaten Batang	13.165.000.000,00	11.386.474.000,00	86,49	8.696.575.000,00	2.689.899.000,00
12	Kabupaten Pemalang	13.785.000.000,00	12.488.667.000,00	90,60	873.000.000,00	11.615.667.000,00
13	Kabupaten Tegal	11.852.000.000,00	10.540.735.795,00	88,94	18.959.286.000,00	(8.418.550.205,00)
14	Kabupaten Brebes	27.183.000.000,00	25.935.303.278,00	95,41	11.917.734.000,00	14.017.569.278,00
15	Kabupaten Banyumas	21.788.000.000,00	21.599.433.339,00	99,13	20.129.335.915,00	1.470.097.424,00
16	Kabupaten Cilacap	13.482.000.000,00	13.250.437.000,00	98,28	18.714.874.507,00	(5.464.437.507,00)
17	Kabupaten Purbalingga	16.648.000.000,00	14.458.345.000,00	86,85	687.000.000,00	13.771.345.000,00
18	Kabupaten Banjarnegara	753.000.000,00	753.000.000,00	100,00	6.549.582.000,00	(5.796.582.000,00)
19	Kabupaten Magelang	19.638.000.000,00	19.161.836.000,00	97,58	15.430.420.000,00	3.731.416.000,00
20	Kabupaten Temanggung	14.975.000.000,00	13.991.072.634,00	93,43	37.830.591.261,00	(23.839.518.627,00)
21	Kabupaten Wonosobo	94.510.000.000,00	91.211.531.410,00	96,51	17.540.253.154,00	73.671.278.256,00
22	Kabupaten Purworejo	26.083.000.000,00	25.521.105.300,00	97,85	9.269.759.900,00	16.251.345.400,00
23	Kabupaten Kebumen	31.173.000.000,00	30.643.811.000,00	98,30	5.848.070.000,00	24.795.741.000,00
24	Kabupaten Klaten	17.332.000.000,00	14.035.213.000,00	80,98	753.000.000,00	13.282.213.000,00
25	Kabupaten Boyolali	22.987.000.000,00	22.397.646.000,00	97,44	21.282.605.000,00	1.115.041.000,00
26	Kabupaten Sragen	16.051.000.000,00	15.534.534.000,00	96,78	8.295.179.000,00	7.239.355.000,00
27	Kabupaten Sukoharjo	18.598.000.000,00	14.692.954.000,00	79,00	2.319.045.000,00	12.373.909.000,00
28	Kabupaten Karanganyar	15.675.000.000,00	12.420.170.000,00	79,24	7.097.592.000,00	5.322.578.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	19.703.000.000,00	18.628.103.000,00	94,54	26.144.456.000,00	(7.516.353.000,00)
30	Kota Semarang	32.013.000.000,00	27.421.089.496,00	85,66	23.539.789.384,00	3.881.300.112,00
31	Kota Pekalongan	35.524.000.000,00	34.590.507.000,00	97,37	1.952.969.600,00	32.637.537.400,00
32	Kota Surakarta	23.253.000.000,00	23.253.000.000,00	100,00	18.620.615.114,00	4.632.384.886,00
33	Kota Salatiga	12.185.000.000,00	12.032.531.000,00	98,75	586.000.000,00	11.446.531.000,00
34	Kota Tegal	6.553.000.000,00	6.553.000.000,00	100,00	753.000.000,00	5.800.000.000,00
35	Kota Magelang	13.397.000.000,00	12.860.977.991,00	96,00	642.000.000,00	12.218.977.991,00
	Jumlah	**862.666.000.000,00**	**804.934.393.793,00**	**93,31**	**493.309.827.766,00**	**311.624.566.027,00**

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa — Rp1.872.422.500.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Desa dianggarkan sebesar Rp1.876.750.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.872.422.500.000,00 atau 99,77%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.268.435.785.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp603.986.715.000,00 atau 47,62% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	97.622.000.000,00	97.622.000.000,00	100,00	60.499.000.000,00	37.123.000.000,00
2	Kabupaten Kendal	65.892.000.000,00	65.592.000.000,00	99,54	29.054.000.000,00	36.538.000.000,00
3	Kabupaten Demak	59.130.000.000,00	59.122.000.000,00	99,99	29.020.000.000,00	30.102.000.000,00
4	Kabupaten Grobogan	121.655.000.000,00	121.651.000.000,00	100,00	58.623.200.000,00	63.027.800.000,00
5	Kabupaten Pati	142.132.000.000,00	142.132.000.000,00	100,00	107.514.664.000,00	34.617.336.000,00
6	Kabupaten Kudus	35.612.000.000,00	35.532.000.000,00	99,78	23.041.000.000,00	12.491.000.000,00
7	Kabupaten Jepara	99.494.000.000,00	99.494.000.000,00	100,00	39.189.207.000,00	60.304.793.000,00
8	Kabupaten Rembang	47.885.000.000,00	47.035.000.000,00	98,22	30.848.400.000,00	16.186.600.000,00
9	Kabupaten Blora	56.928.000.000,00	56.920.000.000,00	99,99	36.419.700.000,00	20.500.300.000,00
10	Kabupaten Pekalongan	36.594.000.000,00	36.101.000.000,00	98,65	20.581.200.000,00	15.519.800.000,00
11	Kabupaten Batang	41.510.000.000,00	41.285.000.000,00	99,46	51.193.428.000,00	(9.908.428.000,00)
12	Kabupaten Pemalang	62.665.000.000,00	62.565.000.000,00	99,84	48.188.000.000,00	14.377.000.000,00
13	Kabupaten Tegal	49.282.000.000,00	49.179.000.000,00	99,79	29.490.900.000,00	19.688.100.000,00
14	Kabupaten Brebes	106.254.000.000,00	106.248.000.000,00	99,99	65.573.000.000,00	40.675.000.000,00
15	Kabupaten Banyumas	73.940.000.000,00	73.771.000.000,00	99,77	37.761.000.000,00	36.010.000.000,00
16	Kabupaten Cilacap	49.609.000.000,00	49.409.000.000,00	99,60	42.636.350.000,00	6.772.650.000,00
17	Kabupaten Purbalingga	36.330.000.000,00	36.278.000.000,00	99,86	31.121.000.000,00	5.157.000.000,00
18	Kabupaten Banjarnegara	45.349.000.000,00	45.349.000.000,00	100,00	24.194.000.000,00	21.155.000.000,00
19	Kabupaten Magelang	72.407.000.000,00	72.132.000.000,00	99,62	78.200.059.000,00	(6.068.059.000,00)
20	Kabupaten Temanggung	64.959.500.000,00	64.544.500.000,00	99,36	32.720.500.000,00	31.824.000.000,00
21	Kabupaten Wonosobo	63.988.000.000,00	63.988.000.000,00	100,00	57.563.000.000,00	6.425.000.000,00
22	Kabupaten Purworejo	41.085.000.000,00	40.935.000.000,00	99,63	21.613.950.000,00	19.321.050.000,00
23	Kabupaten Kebumen	34.427.000.000,00	34.422.000.000,00	99,99	23.927.370.000,00	10.494.630.000,00
24	Kabupaten Klaten	83.199.000.000,00	82.924.000.000,00	99,67	73.842.000.000,00	9.082.000.000,00
25	Kabupaten Boyolali	50.647.000.000,00	50.643.000.000,00	99,99	58.384.051.000,00	(7.741.051.000,00)
26	Kabupaten Sragen	56.102.000.000,00	55.882.000.000,00	99,61	39.275.500.000,00	16.606.500.000,00
27	Kabupaten Sukoharjo	54.642.000.000,00	54.412.000.000,00	99,58	31.026.000.000,00	23.386.000.000,00
28	Kabupaten Karanganyar	83.455.000.000,00	83.305.000.000,00	99,82	41.906.506.000,00	41.398.494.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	43.956.000.000,00	43.950.000.000,00	99,99	45.028.800.000,00	(1.078.800.000,00)
	Jumlah	**1.876.750.500.000,00**	**1.872.422.500.000,00**	**99,77**	**1.268.435.785.000,00**	**603.986.715.000,00**

5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH Rp1.018.773.865.813,00

Pembiayaan Daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.018.692.885.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.018.773.865.813,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp646.492.992.625,00 mengalami kenaikan sebesar Rp372.280.873.188,00 atau 57,58% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	1.909.692.885.000,00	1.909.773.865.813,00	100,00	861.492.992.625,00	1.048.280.873.188,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	891.000.000.000,00	891.000.000.000,00	100,00	215.000.000.000,00	676.000.000.000,00
	Jumlah	**1.018.692.885.000,00**	**1.018.773.865.813,00**	**100,01**	**646.492.992.625,00**	**372.280.873.188,00**

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp1.909.773.865.813,00

Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp1.909.692.885.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.909.773.865.813,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp861.492.992.625,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.048.280.873.188,00 atau 121,68% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1.435.692.885.000,00	1.435.692.146.361,00	100,00	861.376.784.856,00	574.315.361.505,00
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	474.000.000.000,00	474.081.719.452,00	100,02	116.207.769,00	473.965.511.683,00
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1.909.692.885.000,00**	**1.909.773.865.813,00**	**100,00**	**861.492.992.625,00**	**1.048.280.873.188,00**

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp1.435.692.146.361,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp1.435.692.885.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.435.692.146.361,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp861.376.784.856,00 mengalami kenaikan sebesar Rp574.315.361.505,00 atau 66,67% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(322.330.885.000,00)	(322.330.885.246,00)	100,00	(598.802.543.145,00)	276.471.657.899,00
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	158.043.701.000,00	158.043.701.000,00	100,00	(263.515.584.707,00)	421.559.285.707,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(1.021.147.000,00)	(1.021.147.000,00)	100,00	802.159.000,00	(1.823.306.000,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	149.180.000,00	149.180.000,00	100,00	190.781.370,00	(41.601.370,00)
5	Penghematan Belanja	1.600.852.036.000,00	1.600.851.297.607,00	100,00	1.722.701.972.338,00	(121.850.674.731,00)
	Jumlah	**1.435.692.885.000,00**	**1.435.692.146.361,00**	**100,00**	**861.376.784.856,00**	**574.315.361.505,00**

5.1.3.1.2 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp474.081.719.452,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah ditargetkan sebesar Rp474.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp474.081.719.452,00 atau 100,02%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp116.207.769,00 mengalami kenaikan sebesar Rp473.965.511.683,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	474.000.000.000,00	474.000.000.000,00	100,00	-	474.000.000.000,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	81.719.452,00	-	116.207.769,00	(34.488.317,00)
	Jumlah	**474.000.000.000,00**	**474.081.719.452,00**	**100,02**	**116.207.769,00**	**473.965.511.683,00**

Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD merupakan divestasi pada PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah yang digunakan untuk *support* pendanaan penanganan *covid-19* dan penguatan permodalan BUMD lain yang mengampu proyek strategis nasional serta meningkatkan porsi saham Bank Jateng.

Adapun rincian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	3.600.000,00	-	6.400.000,00	(2.800.000,00)
2	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	-	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	-	72.219.452,00	-	87.357.769,00	(15.138.317,00)
4	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan & Keswan)	-	1.000.000,00	-	19.200.000,00	(18.200.000,00)
5	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	-	4.900.000,00	-	3.250.000,00	1.650.000,00
	Jumlah	**-**	**81.719.452,00**	**-**	**116.207.769,00**	**(34.488.317,00)**

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN Rp891.000.000.000,00

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pojok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp891.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp891.000.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp215.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp676.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Daerah	491.000.000.000,00	491.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	476.000.000.000,00
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**891.000.000.000,00**	**891.000.000.000,00**	**100,00**	**215.000.000.000,00**	**676.000.000.000,00**

5.1.3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan Rp400.000.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan ditargetkan sebesar Rp400.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp400.000.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp200.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	400.000.000.000,00	100,00	200.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	Jumlah	**400.000.000.000,00**	**400.000.000.000,00**	**100,00**	**200.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**

5.1.3.2.2 Penyertaan Modal Daerah Rp491.000.000.000,00

Penyertaan Modal Daerah ditargetkan sebesar Rp491.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp491.000.000.000,00 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.000.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp476.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2022 (Rp)	%	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	491.000.000.000,00	491.000.000.000,00	100,00	15.000.000.000,00	476.000.000.000,00
	Jumlah	**491.000.000.000,00**	**491.000.000.000,00**	**100,00**	**15.000.000.000,00**	**476.000.000.000,00**

5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.236.469.002.535,00 SiLPA tersebut dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	122.864.447.852,00	(322.330.888.838,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(83.721.371.213,00)	158.043.702.054,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(220.798.512,00)	(1.021.148.253,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	80.980.813,00	149.180.625,00
5	Penghematan Belanja	1.197.465.743.595,00	1.600.852.039.166,00
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan		-
7	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan		-
8	Sisa Belanja Lainnya		-
	Jumlah	**1.236.469.002.535,00**	**1.435.692.884.754,00**

Penjelasan SiLPA Tahun Anggaran 2022 dimaksud termasuk di dalamnya :

		2022 (Rp)	**2021 (Rp)**
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	412.202.942.305,00	398.435.833.644,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	177.410.000,00	314.414.803,00
4	Kas di Bendahara BLUD	802.709.511.890,00	991.964.597.859,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	21.379.138.340,00	44.978.038.448,00
6	Setara Kas (Deposito RKUD)	-	-
	Jumlah	**1.236.469.002.535,00**	**1.435.692.884.754,00**

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	132.419.000,00	50.594.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.650.000,00	-
3	Dinas LH & Kehutanan	3.468.000,00	-
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.873.000,00	263.820.803,00
	Jumlah	177.410.000,00	314.414.803,00

Kas di Bendahara Pengeluaran BLUD

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	321.566.059.328,00	537.589.720.807,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	275.103.756.032,00	260.978.713.560,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	113.177.887.724,00	87.709.279.625,00
4	RSUD Kelet Donorejo	11.217.122.454,00	19.581.785.302,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	33.119.712.349,00	13.093.455.058,00
6	RSJD Surakarta	26.050.693.834,00	49.518.044.392,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	22.474.280.169,00	23.493.599.115,00
	Jumlah	802.709.511.890,00	991.964.597.859,00

Kas di Bendahara Sekolah

		2022 (Rp)	**2021 (Rp)**
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.379.138.340	44.978.038.448,00
	Jumlah	**21.379.138.340,00**	**44.978.038.448,00**

- SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.437.121.228.479,00 di dalamnya terdapat SiLPA Terikat dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dengan rincian sebagai berikut :

Jenis DAK	**Saldo Awal**	**Koreksi Saldo Awal**	**Penyaluran Dana dr Pusat**	**Realisasi**	**Saldo Akhir**
Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	21.023.960,00	-	2.871.940.040,00	2.888.297.404,00	4.666.596,00
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	226.739.554,00	-	-	226.152.054,00	587.500,00
Dana Pelayanan Perlindungan	257.256.710,00	-	344.543.290,00	473.280.192,00	128.519.808,00

Jenis DAK	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Penyaluran Dana dr Pusat	Realisasi	Saldo Akhir
Perempuan dan Anak					
Dana Fasilitasi Penanaman Modal	42.767.000,00	-	855.624.000,00	885.374.040,00	13.016.960,00
Bantuan Operasional Sekolah	21.262.241.199,00	(1.720.482,00)	1.987.260.551.320,00	2.000.432.405.268,00	8.088.666.769,00
Bantuan Operasional Kesehatan	2.344.368.441,00	-	120.680.559,00	2.256.109.240,00	208.939.760,00
Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	3.540.595,00	-	-	3.540.595,00	-
Tunjangan Profesi Guru	48.313.137.792,00	-	1.006.404.713.269,00	1.053.823.846.520,00	894.004.541,00
Tambahan Penghasilan Guru	644.990.000,00	-	12.527.772.500,00	12.209.900.000,00	962.862.500,00
Tunjangan Khusus Guru	610.588.000,00	-	-	-	610.588.000,00
Bantuan Operasional Penyelengaraan Taman Budaya	160.123.100,00	-	3.839.876.900,00	3.949.905.896,00	50.094.104,00
Dana Pelayanan Pariwisata	76.880.000,00	-	-	76.880.000,00	-
Grand Total DAK Non Fisik	**73.963.656.351,00**	**(1.720.482,00)**	**3.014.225.701.878,00**	**3.077.225.691.209,00**	**10.961.946.538,00**

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp1.435.692.884.754,00**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 sebesar Rp1.435.692.884.754,00 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2021.

Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

No	Uraian	2022	2021
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	18.040.000,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	314.414.803,00	102.386.400,00
4	Kas di BLUD	991.964.597.859,00	437.713.567.521,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	44.978.038.448,00	60.865.862.020,00
	Jumlah	**1.435.692.884.754,00**	**861.343.812.527,00**

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan **Rp1.435.692.146.361,00**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.435.692.146.361,00 merupakan penggunaan atas bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2021.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan **Rp1.236.469.002.535,00**

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp1.236.469.002.535,00 terdiri dari:

No	Uraian	2022	2021
1	Pendapatan Asli daerah	16.264.618.853.852,00	14.695.474.898.162,00
2	Pendapatan Transfer	7.810.882.578.787,00	11.871.796.336.054,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	92.434.201.488,00	65.728.851.747,00
	Jumlah	**24.167.935.634.127,00**	**26.633.000.085.963,00**
1	Belanja Operasi	13.456.887.671.949,00	16.826.577.831.470,00
2	Belanja Modal	1.713.641.630.081,00	1.447.620.411.245,00
3	Belanja Tidak Terduga	16.545.479.100,00	72.303.305.000,00
4	Belanja Transfer/Bagi Hasil Pendptan ke Kab/Kota	8.763.165.716.275,00	7.497.298.646.119,00
	Jumlah	**23.950.240.497.405,00**	**25.843.800.193.834,00**
1	Penerimaan Pembiayaan	1.909.773.865.813,00	861.492.992.625,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	891.000.000.000,00	215.000.000.000,00
	Jumlah	**1.018.773.865.813,00**	**646.492.992.625,00**
	SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	**1.236.469.002.535,00**	**1.435.692.884.754,00**

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp738.393)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp738.393) merupakan koreksi atas Sisa Dana BOS dan BOP tahun sebelumnya.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp1.236.469.002.535,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 sebesar Rp1.236.469.002.535,00 berasal dari :

No	Uraian	2022	2021
1	Realisasi Pendapatan	24.167.935.634.127,00	26.633.000.085.963,00
2	Realisasi Belanja	23.950.240.497.405,00	25.843.800.193.834,00
3	Penerimaan Pembiayaan	1.909.773.865.813,00	861.492.992.625,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	891.000.000.000,00	215.000.000.000,00
	SiLPA	**1.236.469.002.535,00**	**1.435.692.884.754,00**

Saldo ini terdiri dari :

No	Uraian	2022	2021
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
	- Giro di bank Jateng	412.202.942.305,00	398.435.833.644,00
	Setara Kas BUD		
	- Bank Jateng	-	-
	- Bank BNI	-	-
	- Bank BRI	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yg belum disetor ke RKUD)		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
	- Dinas Kesehatan	-	-
	- Dinas Perhubungan	132.419.000,00	50.594.000,00
	- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	21.650.000,00	-
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta karya	-	-
	- Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.468.000,00	-
	- Dinas Perikanan dan kelautan	-	-
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.873.000,00	263.820.803,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP)		
	- Dinas Kesehatan	-	-
4	Kas di BLUD		
	Rekening Giro Kas Bendahara BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	31.421.191.232,00	132.412.316.321,00
	- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	48.571.332.183,00	149.170.498.570,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo	32.618.769.723,00	12.545.705.989,00
	- RSUD Tugurejo	113.177.887.724,00	1.000.000,00
	- RSUD Kelet Donorejo	11.217.122.454,00	19.561.430.312,00
	- RSJD Surakarta	16.031.816.154,00	49.463.561.019,00

No	Uraian	2022	2021
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	8.470.326.746,00	19.489.969.961,00
	Setara Kas BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BRI)	50.000.000.000,00	125.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BTN Syariah)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Bank Jateng)	150.000.000.000,00	100.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Muamalat)	30.000.000.000,00	55.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Mandiri)	-	10.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BNI)	10.000.000.000,00	65.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Bank DKI)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BSI)	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI)	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng)	140.000.000.000,00	65.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BRI)	55.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Mandiri)	10.000.000.000,00	-
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN)	500.000.000,00	500.000.000,00
	- RSJD Surakarta (Bank Jateng)	10.000.000.000,00	-
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (BSI)	10.000.000.000,00	-
	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	144.868.096,00	177.404.486,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo	32.423.849,00	308.214.990,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo	942.626,00	47.749.069,00
	- RSJD Tugurejo	-	87.708.279.625,00
	- RSUD Kelet Donorejo	-	20.354.990,00
	- RSJD Surakarta	18.877.680,00	54.483.373,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	3.953.423,00	3.629.154,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	21.379.138.340,00	44.978.038.448,00
	Jumlah	**1.236.469.002.535,00**	**1.435.692.884.754,00**

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur penyajian Neraca Tahun Anggaran 2022 dan 2021 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 ASET **Rp40.276.338.752.810,46**

Total Aset sebesar Rp40.276.338.752.810,46 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39.291.945.337.213,10 mengalami **kenaikan** sebesar Rp984.393.415.597,36 atau 2,51%. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Lancar	3.561.496.934.500,47	3.791.840.781.045,51
2	Investasi Jangka Panjang	7.359.256.134.721,51	7.454.908.269.377,92
3	Aset Tetap	26.085.962.628.082,34	26.362.173.533.902,30
4	Dana Cadangan	600.000.000.000,00	200.000.000.000,00
5	Aset Lainnya	2.669.623.055.506,14	1.483.022.752.887,38
	Jumlah	**40.276.338.752.810,46**	**39.291.945.337.213,10**

5.3.1.1 ASET LANCAR **Rp3.561.496.934.500,47**

Aset Lancar sebesar Rp3.561.496.934.500,47 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.791.840.781.045,51 mengalami **penurunan** sebesar (Rp230.343.846.545,04) atau (6,07%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	1.237.681.108.155,00	1.436.740.557.457,00
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang Pajak Daerah	2.212.266.408.390,00	2.116.395.701.783,00
4	Piutang Retribusi Daerah	265.512.463,00	1.188.953.671,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	58.532.786.077,48	344.393.176.499,09
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	14.764.276.977,00	-
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9	Piutang Lainnya	15.599.471.995,00	15.717.526.838,00
10	Penyisihan Piutang	(380.010.526.610,72)	(642.081.528.398,58)
11	Belanja Dibayar Dimuka	5.301.065.353,13	5.756.838.225,90
12	Persediaan	397.096.831.700,58	513.729.554.970,09
	Jumlah	**3.561.496.934.500,47**	**3.791.840.781.045,51**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas **Rp1.237.681.108.155,00**

Kas dan Setara Kas sebesar Rp1.237.681.108.155,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.436.740.557.457,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp199.059.449.302,00) atau (13,85%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	412.202.942.305,00	398.435.833.644,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	177.410.000,00	314.414.803,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
4	Kas di BLUD	803.488.749.247,00	992.730.293.369,00
5	Kas Dana BOS	21.812.006.603,00	45.260.015.641,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
7	Kas Lainnya	-	-
8	Setara Kas	-	-
	Jumlah	**1.237.681.108.155,00**	**1.436.740.557.457,00**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah Rp412.202.942.305,00

Kas di Kas Daerah sebesar Rp412.202.942.305,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp398.435.833.644,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.767.108.661,00 atau 3,46% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas di BUD No rek 1.034.01504.7	412.202.942.305,00	398.435.833.644,00
	Jumlah	**412.202.942.305,00**	**398.435.833.644,00**

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan Rp177.410.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp177.410.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp314.414.803,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp137.004.803,00) atau (43,57%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas Bendahara Penerimaan SiLPA	177.410.000,00	314.414.803,00
2	Kas Bendahara Penerimaan Non SiLPA	-	-
	Jumlah	**177.410.000,00**	**314.414.803,00**

5.3.1.1.1.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA Rp177.410.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA sebesar Rp177.410.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp314.414.803,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp137.004.803,00) atau (43,57%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	132.419.000,00	50.594.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.468.000,00	-
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.650.000,00	-
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.873.000,00	263.820.803,00
	Jumlah	**177.410.000,00**	**314.414.803,00**

Saldo Kas Tahun 2022 telah disetor ke rekening kas daerah pada Tahun 2023 dengan rincian :

No.	Uraian	No. STS	Tgl Penyetoran	Nilai
1	**Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal**			
a.	BPSPP Wilayah I			
	Setor Retribusi Fasilitas Lainnya Terminal Bintoro	3310941000126900	02/01/2023	71.000,00
	Setor Retribusi Fasilitas Lainnya Terminal Penggaron	3310941000126800	02/01/2023	65.000,00
	Setor Retribusi Fasilitas Lainnya Terminal Purwodad	3310941000126700	02/01/2023	270.000,00
b	Bpspp Wilayah II			
	Disetor Retribusi Terminal Gagak Rimang Blora	3310942000042800	02/01/2023	115.000,00

No.	Uraian	No. STS	Tgl Penyetoran	Nilai
	Disetor Retribusi Terminal Gagak Rimang Blora	3310942000042700	15/02/2023	230.000,00
c	Bpspp Wilayah III			
	Disetor Retribusi Terminal Kartasura	3310943000422000	02/01/2023	270.000,00
	Di Setor Retribusi Terminal Terminal Penggung	3310943000421900	02/01/2023	400.000,00
	Disetor Retribusi Terminal Terminal Jatisrono	3310943000421800	02/01/2023	90.000,00
	Disetor Retribusi Terminal Tegalgede	3310943000421700	02/01/2023	47.000,00
	Disetor Retribusi Terminal Terminal Tawangmangu	3310943000421600	02/01/2023	36.000,00
	Disetor Retribusi TerminalTerminal Purwantoro	3310943000421500	02/01/2023	105.000,00
	Disetor Retribusi Terminal Sukoharjo	3310943000421400	02/01/2023	274.000,00
	Disetor Retribusi Terminal Pracimantoro	3310943000421300	02/01/2023	40.000,00
	Di Setor Retribusi Terminal Baturetno	3310943000421200	02/01/2023	30.000,00
	Di Setor Retribusi Terminal Terminal Pilangsari	3310943000421100	02/01/2023	340.000,00
d	Bpspp Wilayah IV			
	Disetorkan Retribusi Terminal Drs. Prajitno Kab. Magelang	3310944000093000	02/01/2023	357.000,00
	Disetorkan Retribusi Terminal Madureso Kab. Temanggung	3310944000092900	02/01/2023	219.000,00
e	Bpspp Wilayah V			
	Disetor Retribusi Terminal Banjarnegara	3310945000095800	02/01/2023	175.000,00
	Disetor Retribusi Terminal Purbalingga	3310945000095700	02/01/2023	104.000,00
f	Bpspp Wilayah VI			
	Disetor Retribusi Terminal Kajen	3310946000158600	02/01/2023	65.000,00
	Disetor Ret Terminal Tanjung	3310946000158500	02/01/2023	25.000,00
	Disetor Ret Terminal Banyuputih	3310946000158400	02/01/2023	107.000,00
2	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**			
a	Balai Transportasi Jawa Tengah			
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Barlingmascakeb	3310947000226000	02/01/2023	11.070.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Barlingmascakeb	3310947000225900	02/01/2023	14.284.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Semarang - Bawen	3310947000225800	02/01/2023	11.844.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Semarang - Bawen	3310947000225700	02/01/2023	21.492.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Magelang - Purworejo	3310947000225600	02/01/2023	10.846.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Magelang – Purworejo	3310947000225500	02/01/2023	13.150.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Semarang (Penggaron) - Grobogan (Gubug)	3310947000225400	02/01/2023	5.762.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Semarang (Penggaron) - Grobogan (Gubug)	3310947000225300	02/01/2023	10.050.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Semarang (Mangkang) – Kendal	3310947000225200	02/01/2023	3.502.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Semarang (Mangkang) – Kendal	3310947000225100	02/01/2023	13.554.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Solo – Sragen	3310947000225000	02/01/2023	6.310.000,00
	Penyetoran Pendapatan Brt Trans Jateng Solo – Sragen	3310947000224900	02/01/2023	7.120.000,00
3	**Retribusi Tempat Wisata dan Olah Raga**			
	Tiket Masuk Baturraden		02/01/2023	1.995.000,00
	Tiket Kendaraan Baturraden		02/01/2023	131.000,00
	Tiket Masuk Taman Hutan Raya		02/01/2023	1.342.000,00
4	**Retribusi Pengujian K3 dengan pihak ketiga**	3310996000000100	02/01/2023	21.650.000,00
5	**Pendapatan Denda PKB**			
	UPPD Semarang II	3311002020223520	02/01/2023	825.500,00
	UPPD Semarang II	3311002020328420	02/01/2023	263.500,00
6	**Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor**			
	UPPD Semarang II	3311002020223510	02/01/2023	9.488.500,00
	UPPD Semarang II	3311002020328410	02/01/2023	9.071.500,00
7	**PAP-Pokok PAP**	3311026260100250	02/01/2023	224.000,00
Jumlah				**177.410.000,00**

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp00,00, dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas Bendahara Pengeluaran SiLPA	-	-
2	Kas Bendahara Pengeluaran Non SiLPA	-	-
	Jumlah	**-**	**-**

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD **Rp803.488.749.247,00**

Kas di BLUD sebesar Rp803.488.749.247,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp992.730.293.369,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp189.241.544.122,00) atau (19,06%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas Di Rekening BLUD	261.508.446.216,00	470.547.333.370,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD-SiLPA	201.065.674,00	417.264.489,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Uang Titipan Pasien)-Non SiLPA	779.237.357,00	765.695.510,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Bunga Jamkesmas)-Non SiLPA	-	-
5	Deposito BLUD	541.000.000.000,00	521.000.000.000,00
	Jumlah	**803.488.749.247,00**	**992.730.293.369,00**

Saldo ini merupakan kas di BLUD yang berada di bank dan tunai, merupakan bagian dari SiLPA dengan rincian sebagai berikut :

No.	BLUD	EDC	Tunai	Bank	Jumlah
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	44.640,00	290.691.647.362,00	31.412.369.225,00	322.104.061.227,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	226.719.904.975,00	48.552.839.807,00	275.272.744.782,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	1.000.000,00	102.699.858,00	113.146.434.574,00	113.250.134.432,00
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-	11.217.122.454,00	11.217.122.454,00
5	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.320.388,00	500.942.626,00	32.616.449.335,00	33.119.712.349,00
6	RSJD Surakarta		26.050.693.834,00		26.050.693.834,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	14.014.411.467,00	8.459.868.702,00	22.474.280.169,00
Jumlah					803.488.749.247,00

5.3.1.1.1.4.1 Kas di Rekening BLUD **Rp261.508.446.216,00**

Kas di Rekening BLUD sebesar Rp261.508.446.216,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp470.547.333.370,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp209.038.887.154,00) atau (44,42%) dengan rincian sebagai berikut :

Berikut bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	31.421.191.232,00	132.412.316.321,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	48.571.332.183,00	149.344.615.153,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	32.618.769.723,00	12.545.705.989,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	113.177.887.724,00	87.709.279.625,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	11.217.122.454,00	19.581.785.302,00
6	RSJD Surakarta	16.031.816.154,00	49.463.561.019,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.470.326.746,00	19.490.069.961,00
	Jumlah	**261.508.446.216,00**	**470.547.333.370,00**

5.3.1.1.1.4.2 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD SiLPA Rp201.065.674,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD SiLPA sebesar Rp201.065.674,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp417.264.489,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp216.198.815,00) atau (51,81%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	144.868.096,00	177.404.486,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	32.423.849,00	134.098.407,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	942.626,00	47.749.069,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	18.877.680,00	54.483.373,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.953.423,00	3.529.154,00
	Jumlah	**201.065.674,00**	**417.264.489,00**

5.3.1.1.1.4.3 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA Rp779.237.357,00

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA sebesar Rp779.237.357,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp765.695.510,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.541.847,00 atau 1,77% dengan rincian sebagai berikut :

a. Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Uang Titipan Pasien)-Non SiLPA

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA yang merupakan Uang Titipan Pasien sampai dengan 31 Desember 2021.

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	538.001.899,00	527.046.026,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	168.988.750,00	145.289.484,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	-
4	RSUD Tugurejo Semarang	72.246.708,00	93.360.000,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	-	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-
	Jumlah	**779.237.357,00**	**765.695.510,00**

5.3.1.1.1.4.4 Deposito BLUD Rp541.000.000.000,00

Deposito BLUD sebesar Rp541.000.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp521.000.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp20.000.000.000,00 atau 3,84% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	290.000.000.000,00	405.000.000.000,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	226.500.000.000,00	111.500.000.000,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	500.000.000,00	500.000.000,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	-
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	10.000.000.000,00	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	14.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Jumlah	**541.000.000.000,00**	**521.000.000.000,00**

	SKPD	BANK	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Bank Jateng	A 288744	27/07/2020	18.493.151	30.000.000.000
		Bank Jateng	A 308732	13/06/2022	147.945.205	120.000.000.000
		BNI	1330593542	28/12/2021	2.876.712	10.000.000.000
		BTN Syariah	SY 101796	15/09/2021	18.630.137	10.000.000.000
		BTN Syariah	SY 101965	28/12/2021	4.109.589	10.000.000.000
		BRI	129701001191400	27/09/2021	19.178.082	50.000.000.000
		Bank Muamalat Indonesia	4188232	15/02/2021	30.684.932	20.000.000.000
		Bank Muamalat Indonesia	4188383	30/12/2021	958.904	10.000.000.000
		Bank DKI	64025004449	29/06/2021	2.191.781	10.000.000.000
		Bank DKI	64025004783	27/09/2021	4.383.562	10.000.000.000
		Bank Syariah Indonesia	7177297008	27/09/2021	2.912.877	10.000.000.000
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	BNI	0453300666	01/07/2016	27.739.726	15.000.000.000
		BNI	0453297347	01/07/2016	12.020.548	6.500.000.000
		Bank Jateng	A135524	06/08/2018	34.246.575	20.000.000.000
		Bank Jateng	A135525	06/08/2018	34.246.575	20.000.000.000
		Bank Jateng	A295508	08/04/2020	39.383.562	25.000.000.000
		Bank Jateng	A345011	10/02/2022	35.958.904	25.000.000.000
		Bank Jateng	A345012	10/02/2022	35.958.904	25.000.000.000
		Bank Jateng	A345013	10/02/2022	35.958.904	25.000.000.000
		BRI	007701007188406	12/04/2019	7.808.219	5.000.000.000
		BRI	007701007564408	08/04/2020	18.904.110	10.000.000.000
		BRI	007701008094406	30/08/2021	821.918	10.000.000.000
		BRI	007701008248403	17/02/2022	17.260.274	15.000.000.000
		BRI	007701008423401	06/09/2022	7.397.260	15.000.000.000
		BANK MANDIRI	1800200173369	01/03/2022	32.876.712	10.000.000.000
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	Bank BTN	0032501400003248	10/04/2015	2.013.699	500.000.000
4	RSJD Surakarta	Bank Jateng	A 308712	24/05/2022	20.547.945	10.000.000.000
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Bank BPD Jateng	A281070	26/10/2021	1.369.863	4.000.000.000
		Bank Syariah Indonesia	AA00195725	29/09/2022	9.041.096	10.000.000.000
		Jumlah			625.919.726	541.000.000.000

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS **Rp21.812.006.603,00**

Kas Dana BOS sebesar Rp21.812.006.603,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.260.015.641,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp23.448.009.038,00) atau (51,81%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas Dana BOS-SiLPA	8.088.666.769,00	21.262.240.651,00
2	Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA	1.910.040,00	110.549,00
3	Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA	307.271.691,00	127.000.283,00
4	Kas Dana BOSDA/BOP-SILPA	13.283.319.173,00	23.712.528.871,00
5	Kas Dana BOSDA (Bunga Bank)-SiLPA	5.242.358,00	3.158.377,00
6	Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA	14.006.709,00	137.004.621,00
7	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA	111.589.863,00	17.696.989,00
8	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Utang Pajak)-Non SiLPA	-	275.300,00
	Jumlah	**21.812.006.603,00**	**45.260.015.641,00**

5.3.1.1.1.5.1 Kas Dana BOS-SiLPA **Rp8.088.666.769,00**

Kas Dana BOS-SiLPA sebesar Rp8.088.666.769,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.262.240.651,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp13.173.573.882,00) atau (61,96%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SMA Negeri	3.703.805.269,00	6.727.517.827,00
2	SMK Negeri	4.317.091.359,00	13.962.104.871,00
3	SLB Negeri	67.770.141,00	572.617.953,00
	Jumlah	**8.088.666.769,00**	**21.262.240.651,00**

5.3.1.1.1.5.2 Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA **Rp1.910.040,00**

Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA sebesar Rp1.910.040,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp110.549,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.799.491,00 atau 1.627,78% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SMA Negeri	-	-
2	SMK Negeri	1.910.040,00	110.549,00
3	SLB Negeri	-	-
	Jumlah	**1.910.040,00**	**110.549,00**

5.3.1.1.1.5.3 Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA **Rp307.271.691,00**

Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA sebesar Rp307.271.691,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp127.000.283,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp180.271.408,00 atau 141,95% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SMA Negeri	158.891.845,00	76.360.219,00
2	SMK Negeri	128.717.710,00	50.640.064,00
3	SLB Negeri	19.662.136,00	-
	Jumlah	**307.271.691,00**	**127.000.283,00**

5.3.1.1.1.5.4 Kas Dana BOSDA/BOP-SiLPA **Rp13.283.319.173,00**

Kas Dana BOSDA/BOP-SiLPA sebesar Rp13.283.319.173,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.712.528.871,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.429.209.698,00) atau (43,98%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SMA Negeri	4.838.049.956,00	5.255.458.404,00
2	SMK Negeri	8.155.990.759,00	18.388.807.184,00
3	SLB Negeri	289.278.458,00	68.263.283,00
	Jumlah	**13.283.319.173,00**	**23.712.528.871,00**

5.3.1.1.1.5.5 Kas Dana BOSDA/BOP (Bunga Bank)-SiLPA **Rp5.242.358,00**

Kas Dana BOSDA/BOP (Bunga Bank)-SiLPA sebesar Rp5.242.358,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.158.377,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.083.981,00 atau 65,98% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SMA Negeri	327.227,00	3.158.377,00
2	SMK Negeri	4.915.131,00	-

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
3	SLB Negeri	-	-
	Jumlah	**5.242.358,00**	**3.158.377,00**

5.3.1.1.1.5.6 Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA Rp14.006.709,00

Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA sebesar Rp14.006.709,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp137.004.621,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp122.997.912,00) atau (89,78%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SMA Negeri	7.479.884,00	38.567.818,00
2	SMK Negeri	6.526.825,00	98.386.018,00
3	SLB Negeri	-	50.785,00
	Jumlah	**14.006.709,00**	**137.004.621,00**

5.3.1.1.1.5.7 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA Rp111.589.863,00

Kas Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp111.589.863,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.696.989,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp93.892.874,00 atau 530,56% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	111.589.863,00	17.696.989,00
	Jumlah	**111.589.863,00**	**17.696.989,00**

5.3.1.1.1.5.8 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Utang Pajak)-Non SiLPA Rp0,00

Kas Dana Bantuan Pemerintah sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp275.300,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp275.300,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	275.300,00
		-	**275.300,00**

Saldo kas pada sekolah sebesar Rp21.812.006.603,00,00 tidak termasuk di dalamnya:

a. Saldo Kas Usaha Mandiri (USMAN) pada 140 Satuan Pendidikan Khusus (SMK) Negeri yang tidak disetorkan ke Kas Daerah dan dikelola secara mandiri per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

   Saldo awal : 4.416.268.327,00
   Pendapatan : 23.034.794.872,00
   Belanja : 22.606.670.402,00
   Saldo akhir : 4.844.392.797,00

b. Saldo Kas Bantuan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang yang diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah/Khusus (SMA/SMK/SLB) Negeri apabila terdapat sisa maka akan disetorkan ke Rekening Umum Kas Negera (RKUN) per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

SALDO AWAL BANTAH BERUPA UANG	**1.791.053,00**	
PENERIMAAN BANTUAN PEMERINTAH BERUPA UANG	**126.886.900.951,00**	
PENGGUNAAN :		
BELANJA BARANG & JASA	29.714.508.829,00	

BELANJA MODAL PERALATAN & MESIN	55.352.729.533,00	
BELANJA MODAL BANGUNAN & GEDUNG	35.750.102.272,00	
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	5.939.481.168,00	
TOTAL PENGGUNAAN	**126.756.821.802,00**	
SISA DANA BANTUAN PEMERINTAH	**131.870.202,00**	TANGGAL SETOR
SISA DANA TELAH DISETOR SEBELUM 31 DESEMBER 2022		
SMK NEGERI KARANGPUCUNG	751.968,00	15/12/2022
SMK NEGERI TEMBARAK	10.198.000,00	30/12/2022
SMK NEGERI 1 ALIAN	110.375,00	26/12/2022
SMKN 1 SRAGEN	770.000,00	30/12/2022
SMK NEGERI JAWA TENGAH	8.449.996,00	28/12/2022
TOTAL	**20.280.339,00**	-
SISA DANA BELUM DISETOR DAN UTANG BELANJA SAMPAI 31 DESEMBER 2022	**111.589.863,00**	TANGGAL SETOR/PELUNASAN
SMKN 1 KARANGAWEN	1.516.700,00	03/01/2023
SMKN 2 SUKOHARJO	109.612.163,00	11/01/2023 & 27/01/2023
SMK NEGERI 01 SEMARANG	461.000,00	14/04/2023

5.3.1.1.3 Piutang Pajak Daerah **Rp2.212.266.408.390,00**

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.212.266.408.390,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.116.395.701.783,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp95.870.706.607,00 atau 4,53% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.212.218.992.400,00	2.116.302.921.544,00
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
4	Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	47.415.990,00	92.780.239,00
5	Piutang Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	**2.212.266.408.390,00**	**2.116.395.701.783,00**

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2022				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
	Piutang Pajak Daerah	**2.116.395.701.783,00**	**6.068.662.267.070,00**	**-**	**5.972.791.560.463,00**	**-**	**2.212.266.408.390,00**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.116.302.921.544,00	6.068.614.851.080,00		5.972.698.780.224,00		2.212.218.992.400,00
2	Pajak Air Permukaan	92.780.239,00	47.415.990,00		92.780.239,00		47.415.990,00
		2.116.395.701.783,00	**6.068.662.267.070,00**	**-**	**5.972.791.560.463,00**	**-**	**2.212.266.408.390,00**

PENJELASAN MUTASI PIUTANG PKB DIATAS SEBAGAI BERIKUT :

1	**PENAMBAHAN :**				**6.068.614.851.080,00**
	A. MUTASI TAMBAH			**5.341.559.876.900,00**	
	PENETAPAN POTENSI OBJEK TAHUN 2022		**4.619.053.641.150,00**		
	PENETAPAN ATAS OBJEK JATUH TEMPO 2022	4.153.963.352.250,00			
	PENETAPAN OBJEK PIUTANG BARU TAHUN 2022	408.934.393.000			
	TAMBAHAN PENETAPAN PKB OBJEK JT 2022	56.155.895.900			
	ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN		**210.005.863.000,00**	**-**	
	TH 2017	5.285.662.500,00			
	TH 2018	10.480.847.000,00			
	TH 2019	19.136.964.000,00			
	TH 2020	31.245.684.500,00			
	TH 2021	143.856.705.000,00			
	ATAS MUTASI DARI LUAR PROVINSI		**129.967.174.750,00**		
	ATAS PKB KENDARAAN BARU		**344.985.301.250,00**		
	ATAS OBJEK JATUH TEMPO 2023 DIBAYAR DI 2022		**37.547.896.750,00**		
	B. KOREKSI TAMBAH			**727.054.974.180,00**	
	ATAS PENETAPAN PIUTANG TAHUN LALU		**727.053.108.180,00**		
	1. PENETAPAN NJKB PIUTANG LALU	36.288.541.500,00			
	2. PENETAPAN VALIDASI JT BARU	101.381.774.180,00			
	3. PENETAPAN SISA PIUTANG LALU	589.382.792.500,00			
	ATAS PENGHAPUSAN TAHUN JALAN		**1.866.000,00**		
2	**PENGURANGAN :**				**5.972.698.780.224,00**
	A. MUTASI (PEMBAYARAN)			**5.764.536.250.330,00**	
	PEMBAYARAN PIUTANG TAHUN LALU		**556.056.004.000,00**		
	2017	1.940.796.000,00			
	2018	13.258.816.500,00			
	2019	34.048.474.000,00			
	2020	122.410.045.500,00			
	2021	384.397.872.000,00			
	PEMBAYARAN OBJEK JT 2022		**4.153.963.352.250,00**		
	PEMBAYARAN OBJEK JATUH TEMPO 2023 DIBAYAR DI 2022		**37.547.896.750,00**		
	PEMBAYARAN OBJEK PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN		**210.005.863.000,00**		
	TH 2017	5.285.662.500,00			
	TH 2018	10.480.847.000,00			
	TH 2019	19.136.964.000,00			
	TH 2020	31.245.684.500,00			
	TH 2021	143.856.705.000,00			
	PEMBAYARAN MUTASI DARI LUAR PROVINSI		**129.967.174.750,00**		
	PEMBAYARAN KENDARAAN BARU		**344.985.301.250,00**		
	MUTASI PENGHAPUSAN (SK GUB NO.973.1/143 TAHUN 2022)				
	OBJEK PIUTANG KEDALUWARSA		**332.010.658.330,00**		
	B. KOREKSI			**208.162.529.894,00**	
	ATAS PENCATATAN TAHUN SEBELUMNYA		**206.901.170.394,00**		
	1. VALIDASI JT BARU NIHIL (BUKAN OBYEK PIUTANG)	103.290.378.632,00			
	2. PENETAPAN VALIDASI JT BARU	79.071.348.262,00			
	3. PENETAPAN NJKB PIUTANG LALU	24.539.443.500,00			
	ATAS NOKA GANDA		**252.590.000,00**		
	ATAS CABUT REGISTRASI		**911.775.500,00**		

KOREKSI PENGHAPUSAN (SK GUB NO.973.1/143 TAHUN 2022)		
OBJEK PIUTANG TIDAK TERTAGIH	**96.994.000,00**	
SALDO AKHIR PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022		**2.212.218.992.400,00**

Keterangan :

- Penambahan
  - A. Mutasi Tambah
    - a. Penetapan Atas Objek Jatuh Tempo merupakan Penetapan atas obyek jatuh tempo Tahun 2022.
    - b. Penetapan Objek Piutang Baru merupakan Penetapan atas obyek jatuh tempo Tahun 2022 yang belum membayar di akhir tahun.
    - c. Tambahan Penetapan PKB Objek Jatuh Tempo merupakan Penetapan atas obyek jatuh tempo 2022 yang nilai PKB sebelumnya = 0 (nihil).
    - d. Piutang yang telah dihapusbukukan merupakan Penetapan atas obyek yang telah dihapusbukukan.
    - e. Mutasi dari luar provinsi merupakan Penetapan atas obyek mutasi masuk dari luar provinsi
    - f. PKB Kendaraan Baru merupakan Penetapan atas obyek kendaraan baru.
    - g. Objek Jatuh Tempo 2023 dibayarkan di Tahun 2022 merupakan Penetapan atas obyek jt 2023 yang dibayar di tahun 2022 (60 hari sebelum Jatuh Tempo)
  - B. Koreksi Tambah
    - a. NJKB Piutang Lalu merupakan Koreksi tambah atas penetapan NJKB Piutang Lalu
    - b. Validasi Jatuh Tempo merupakan Koreksi tambah atas penetapan tahun lalu hasil validasi JT baru.
    - c. Sisa Piutang Lalu Penetapan atas sisa piutang tahun lalu yang belum membayar di akhir tahun 2022.
    - d. Penghapusan Tahun Jalan Koreksi atas penghapusan PKB tahun jalan.
- Pengurangan
  - A. Mutasi (Pembayaran)
    - a. Pembayaran atas piutang tahun lalu merupakan pelunasan atas piutang tahun-tahun sebelumnya.
    - b. Pembayaran atas obyek Jatuh Tempo tahun berkenaan merupakan pelunasan atas Jatuh Tempo 2022.
    - c. Pembayaran atas obyek tahun 2023 yang dibayar di tahun 2022 merupakan pelunasan sebelum jatuh tempo.
    - d. Pembayaran atas objek piutang yang telah dihapusbukukan merupakan pelunasan atas objek piutang yang masih tercatat sebelum tahun 2022 telah dihapusbukukan.
    - e. Pembayaran mutasi dari luar provinsi merupakan pelunasan pajak kendaraan tahun 2022 yang dilakukan di luar Provinsi Jawa Tengah
    - f. Pembayaran kendaraan baru merupakan pelunasan pajak kendaraan baru di Tahun 2022
  - B. Mutasi penghapusan merupakan Obyek pajak kendaraan yang jatuh temponya lebih dari 5 tahun sejak pelaporan.
  - C. Koreksi
    - a. Atas pencatatan tahun sebelumnya merupakan koreksi kurang atas pencatatan piutang antara lain karena validasi atas objek kendararan yang memiliki piutang.

b. Atas nomor kendaraan ganda merupakan koreksi kurang atas pencatatan piutang lalu yang memiliki nomor rangka ganda.
c. Atas cabut registrasi merupakan koreksi kurang atas penetapan piutang lalu yang sudah dilakukan pencabutan registrasi (mutasi keluar)

D. Koreksi penghapusan merupakan Obyek pajak kendaraan yang diusulkan dihapus karena rusak atau hilang

- Saldo Piutang PKB sebesar Rp2.212.218.992.400,00 menurut umur piutang sebagai berikut :

TAHUN JATUH TEMPO	SALDO AWAL	MUTASI		KOREKSI		SALDO AKHIR
		TAMBAH	KURANG	TAMBAH	KURANG	
1	2	5	6	7	8	9 = (4+5-6+7-8)
2017	354.920.652.450,00	5.285.662.500,00	352.718.330.330,00	19.653.525.975,00	26.872.190.595,00	-
2018	359.355.783.400,00	10.480.847.000,00	47.560.580.500,00	88.057.393.300,00	17.958.843.200,00	391.528.352.000,00
2019	397.143.798.469,00	19.136.964.000,00	80.054.466.500,00	153.549.590.225,00	111.092.648.957,00	297.889.316.000,00
2020	520.895.672.650,00	31.245.684.500,00	203.258.029.000,00	201.534.457.150,00	15.627.595.900,00	553.470.440.500,00
2021	483.987.014.575,00	143.856.705.000,00	414.481.119.000,00	264.258.141.530,00	36.581.916.742,00	504.268.063.500,00
2022		5.131.554.013.900,00	4.666.463.725.000,00	1.866.000,00	29.334.500,00	465.062.820.400,00
JUMLAH	2.116.302.921.544,00	5.341.559.876.900,00	5.764.536.250.330,00	727.054.974.180,00	208.162.529.894,00	2.212.218.992.400,00

- Penyelesaian Piutang PKB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Atas piutang pajak daerah tersebut dilakukan langkah-langkah penagihan secara *door to door* kepada wajib pajak, bekerjasama dengan BUMDES dan perangkat pemerintah di daerah maupun organisasi kemasyarakatan untuk memudahkan pembayaran Pajak Daerah, penambahan titik layanan dan pengembangan aplikasi pembayaran (*New Sakpole*).
- Atas piutang yang tidak tertagih dilakukan penghapusbukuan oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah, penghapusbukuan piutang yang tak tertagih yang dilakukan Tahun 2022 sebagai berikut:
  a. Piutang PKB status kedaluwarsa sebesar Rp. 332.010.658.330,00
  b. Koreksi pencatatan piutang tak tertagih sebesar Rp. 96.994.000,00 terdiri dari:
     - Piutang PKB yang telah dilakukan klarifikasi berstatus rusak berat melalui *door to door* kepada wajib pajak sebesar Rp. 51.005.000,00
     - Piutang PKB yang telah dilakukan klarifikasi berstatus hilang melalui *door to door* kepada wajib pajak sebesar Rp. 45.989.000,00
  c. Koreksi atas pencatatan piutang sebesar Rp. 104.454.744.132,- terdiri dari:
     - Validasi jatuh tempo sebesar Rp. 103.290.378.632,00
     - Dicabut registrasi sebesar Rp. 911.775.500,00
     - Noka ganda sebesar Rp. 252.590.000,00

5.3.1.1.4 Piutang Retribusi Daerah **Rp265.512.463,00**

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp265.512.463,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.188.953.671,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp923.441.208,00) atau (77,67%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	183.846.044,00	1.156.912.071,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	81.666.419,00	32.041.600,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
	Jumlah	**265.512.463,00**	**1.188.953.671,00**

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2022				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
	Piutang Retribusi Daerah	**1.188.953.671,00**	**233.470.863,00**	**-**	**1.156.912.071,00**	**-**	**265.512.463,00**
1	Dinas Kesehatan	1.156.912.071,00	183.846.044,00	-	1.156.912.071,00	-	183.846.044,00
2	Dinas Pusdataru	-	49.624.819,00	-	-	-	49.624.819,00
3	BPKAD	32.041.600,00	-	-	-	-	32.041.600,00

5.3.1.1.4.1 Piutang Retribusi Jasa Umum **Rp183.846.044,00**

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp183.846.044,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.156.912.071,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp973.066.027,00) atau (84,11%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	183.846.044,00	1.156.912.071,00
2	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta		
3	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan		
	Jumlah	**183.846.044,00**	**1.156.912.071,00**

Piutang Dinas Kesehatan dengan jaminan pada Balai Tahun 2022 merupakan piutang yang telah diverifikasi oleh penjamin per 31 Desember 2022. Tahun 2023 telah diajukan klaim atas tagihan Tahun 2022 maupun tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
Dinas Kesehatan					
Balkesmas Semarang	Susulan November 2022	58.910.300,00	31 Januari 2023	10 Februari 2023	24 Februari 2023
	Bulan Des 2022	117.952.800,00	05 Januari 2023	20 Januari 2023	30 Januari 2023
	Obat Kronis Desember 2022	16.251.006,00	05 Januari 2023	17 Januari 2023	25 Januari 2023
Balkesmas Ambarawa	Obat Kronis Desember 2022	31.114.057,00	17 Januari 2023	18 Januari 2023	31 Januari 2023
	Bulan Desember 2022	133.293.600,00	22 Januari 2023	22 Januari 2023	02 Februari 2023
	Pending Obat Kronis Des 2022	13.695.554,00	15 Februari 2023	17 Februari 2023	02 Maret 2023
Balkesmas Klaten	Bulan Desember 2022	101.838.300,00	26 Januari 2023	27 Januari 2023	09 Februari 2023
	Pending Bulan November 2022	13.495.800,00	24 Januari 2023	27 Januari 2023	06 Februari 2023
	Obat Des 2022	27.903.902,00	10 Februari 2023	10 Februari 2023	21 Februari 2023
Balkesmas Pati	Bulan Desember 2022	77.369.200,00	16 Januari 2023	18 Januari 2023	30 Januari 2023
	Obat Bulan Desember 2022	7.054.226,00	08 Februari 2023	10 Februari 2023	23 Februari 2023
BKIM	Obat Des 2022	511.301.700,00	10 Januari 2023	19 Januari 2023	31 Januari 2023
Balkesmas Magelang	Bulan Desember 2022	46.413.300,00	05 Januari 2023	10 Januari 2023	20 Januari 2023
	Obat Desember 2022	9.624.422,00	05 Januari 2023	10 Januari 2023	20 Januari 2023
	Pending November 2022	3.954.400,00	05 Januari 2023	11 Januari 2023	20 Januari 2023
Balai Labkes dan PAK	Bulan Desember 2022	371.100,00	05 Januari 2023	10 Januari 2023	05 Januari 2023
	Total	**1.170.543.667,00**			

5.3.1.1.4.1.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp183.846.044,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp183.846.044,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.156.912.071,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp973.066.027,00) atau (84,11%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	183.846.044,00	1.156.912.071,00
	Jumlah	**183.846.044,00**	**1.156.912.071,00**

5.3.1.1.4.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha Rp81.666.419,00

Piutang Retribusi Jasa Uasha sebesar Rp81.666.419,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp49.624.819,00 atau 154,88% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	81.666.419,00	32.041.600,00
	Jumlah	**81.666.419,00**	**32.041.600,00**

5.3.1.1.4.2.1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp81.666.419,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp81.666.419,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.041.600,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp49.624.819,00 atau 154,88% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	49.624.819,00	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
	Jumlah	**81.666.419,00**	**32.041.600,00**

5.3.1.1.6 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Rp58.532.786.077,48

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp58.532.786.077,48, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp344.393.176.499,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp285.860.390.421,62) atau (83,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	370.051.669,00	758.763.959,00
2	Piutang Jasa Giro	25.099.003,18	-
3	Piutang Pendapatan Bunga	-	356.367.123,66
4	Piutang Pendapatan BLUD	58.137.635.405,30	343.278.045.416,43
	Jumlah	**58.532.786.077,48**	**344.393.176.499,09**

5.3.1.1.6.1 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp370.051.669,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp370.051.669,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp758.763.959,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp388.712.290,00) atau (51,23%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Tugurejo Semarang	-	388.712.290,00
2	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	370.051.669,00	370.051.669,00
	Jumlah	**370.051.669,00**	**758.763.959,00**

5.3.1.1.6.2 Piutang Jasa Giro **Rp25.099.003,18**

Piutang Jasa Giro sebesar Rp25.099.003,18, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp25.099.003,18 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	25.099.003,18	-
	Jumlah	**25.099.003,18**	**-**

5.3.1.1.6.3 Piutang Pendapatan Bunga **Rp0,00**

Piutang Pendapatan Bunga sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp356.367.123,66 mengalami **penurunan** sebesar (Rp356.367.123,66) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	179.589.041,10
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	173.394.520,55
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	2.013.699,00
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	1.369.863,01
	Jumlah	**-**	**356.367.123,66**

5.3.1.1.6.4 Piutang Pendapatan BLUD **Rp58.137.635.405,30**

Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp58.137.635.405,30 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp343.278.045.416,43 mengalami **penurunan** sebesar (Rp285.140.410.011,13) atau (83,06%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	12.185.976.892,57	88.821.840.729,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	37.253.671.557,19	124.563.586.617,65
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.749.568.694,00	32.731.003.566,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	4.762.296.105,60	69.974.157.920,60
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	800.877.962,21	16.030.292.462,18
6	RSJD Surakarta	790.094.890,00	657.683.460,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	595.149.303,73	10.499.480.661,00
	Jumlah	**58.137.635.405,30**	**343.278.045.416,43**

Piutang Pasien BLUD

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	5.965.930.540,00	5.772.884.757,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	6.288.136.326,91	8.695.466.494,90
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.108.851.041,00	1.078.519.887,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	3.081.506.319,60	2.920.413.349,60
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	85.704.562,21	92.154.544,18
6	RSJD Surakarta	608.677.539,00	655.623.460,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	179.856.663,00	203.399.051,00
	Jumlah	**17.318.662.991,72**	**19.418.461.543,68**

Piutang Jaminan Pelayanan

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	5.917.413.727,00	83.048.955.972,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	30.603.665.038,50	115.868.120.122,75

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	638.703.954,00	31.652.483.679,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	1.319.420.996,00	67.053.744.571,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	584.230.060,00	15.868.650.438,00
6	RSJD Surakarta	172.243.991,00	380.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	413.089.901,00	10.296.081.610,00
	Jumlah	**39.648.767.667,50**	**323.788.416.392,75**

Piutang Lain-Lain BLUD

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	302.632.625,57	-
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	361.870.191,78	-
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.013.699,00	-
4	RSUD Tugurejo Semarang	361.368.790,00	-
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	130.943.340,00	69.487.480,00
6	RSJD Surakarta	9.173.360,00	1.680.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.202.739,73	-
	Jumlah	**1.170.204.746,08**	**71.167.480,00**

Piutang rumah sakit dengan jaminan Tahun 2022 merupakan piutang yang telah diverifikasi oleh penjamin per 31 Desember 2022. Tahun 2023 telah diajukan klaim atas tagihan Tahun 2022 maupun tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	JENIS PIUTANG	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
RSUD Dr Moewardi Surakarta	BPJS Susulan Obat Juli-Agustus 2022	187.004.116,00	28 Desember 2022	05 Januari 2023	12 Januari 2023
	BPJS Obat Oktober 2022	5.114.248.458,00	12 Januari 2023	19 Januari 2023	26 Januari 2023
	BPJS Susulan Pelayanan Juli-Oktober 2022	7.061.574.927,00	30 Desember 2022	05 Januari 2023	12 Januari 2023
	BPJS Pelayanan Desember 2022	55.972.573.176,00	17 Januari 2023	24 Januari 2023	30 Januari 2023
	BPJS Alkes November 2022	15.100.000,00	19 Desember 2022	19 Desember 2022	02 Januari 2023
	BPJS CAPD November 2022	323.747.100,00	19 Desember 2022	19 Desember 2022	02 Januari 2023
	Total	**68.674.247.777,00**			
RSUD Dr Margono Sukardjo Purwokerto	BPJS SUSULAN JULI 2022	3.109.200,00	02 Januari 2023	02 Januari 2023	16 Januari 2023
	BPJS OBAT AGUSTUS 2022	3.358.766.343,00	04 Januari 2023	13 Januari 2023	16 Januari 2023
	BPJS CAPD NOVEMBER 2022	82.750.000,00	11 Januari 2023	11 Januari 2023	24 Januari 2023
	BPJS ALKES NOVEMBER 2022	17.800.000,00	11 Januari 2023	11 Januari 2023	24 Januari 2023
	BPJS AMBULANCE NOVEMBER 2022	8.860.000,00	11 Januari 2023	11 Januari 2023	24 Januari 2023
	BPJS SUSULAN SEPTEMBER 2022	1.530.826.750,00	08 Januari 2023	16 Januari 2023	24 Januari 2023
	BPJS DESEMBER 2022	29.427.081.696,00	13 Januari 2023	20 Januari 2023	26 Januari 2023
	BPJS CAPD Desember 2022	83.250.000,00	20 Januari 2023	20 Januari 2023	02 Februari 2023
	BPJS ALKES Desember 2022	19.850.000,00	20 Januari 2023	20 Januari 2023	02 Februari 2023
	BPJS AMBULANCE Desember 2022	2.200.000,00	20 Januari 2023	20 Januari 2023	02 Februari 2023
	BPJS SUSULAN AGUSTUS 2022	324.088.589,00	21 Januari 2023	30 Januari 2023	02 Februari 2023
	BPJS SUSULAN OBAT AGUSTUS 2022	14.905.814,00	24 Januari 2023	24 Januari 2023	06 Februari 2023
	BPJS SUSULAN OKTOBER 2022	1.256.544.900,00	22 Januari 2023	31 Januari 2023	06 Februari 2023
	BPJS KLAIM DISPUTE JANUARI 2019-SEPTEMBER 2021	266.711.504,00	01 Februari 2023	01 Februari 2023	13 Februari 2023
	BPJS KLAIM DISPUTE NOVEMBER 2021	19.354.525,00	01 Februari 2023	07 Februari 2023	13 Februari 2023
	BPJS OBAT SEPTEMBER 2022	3.443.860.437,00	01 Februari 2023	09 Februari 2023	13 Februari 2023
	BPJS OBAT OKTOBER 2022	3.355.962.317,00	01 Februari 2023	09 Februari 2023	13 Februari 2023

Nama SKPD	JENIS PIUTANG	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	BPJS SUSULAN AGUSTUS 2022	40.606.100,00	06 Februari 2023	03 Februari 2023	16 Februari 2023
	BPJS KLAIM DISPUTE DESEMBER 2021-JUNI 2022	182.703.409,00	06 Februari 2023	07 Februari 2023	20 Februari 2023
	BPJS OBAT NOVEMBER 2022	3.283.253.858,00	10 Februari 2023	17 Februari 2023	23 Februari 2023
	BPJS SUSULAN SEPTEMBER 2022	286.422.413,00	12 Februari 2023	20 Februari 2023	27 Februari 2023
	BPJS SUSULAN OBAT SEPTEMBER 2022	24.220.747,00	17 Februari 2023	17 Februari 2023	02 Maret 2023
	BPJS SUSULAN OKTOBER 2022	363.361.173,00	25 Februari 2023	01 Maret 2023	09 Maret 2023
	BPJS SUSULAN NOVEMBER 2022	1.347.474.756,00	25 Februari 2023	06 Maret 2023	09 Maret 2023
	BPJS SUSULAN SEPTEMBER 2022	103.939.750,00	28 Februari 2023	28 Februari 2023	13 Maret 2023
	BPJS SUSULAN SEPTEMBER 2022	67.666.300,00	02 Maret 2023	02 Maret 2023	16 Maret 2023
	BPJS OBAT DESEMBER 2022	2.523.425.236,00	19 Maret 2023	28 Maret 2023	31 Maret 2023
	BPJS SUSULAN OKTOBER 2022	228.620.500,00	16 Maret 2023	28 Maret 2023	10 April 2023
	BPJS SUSULAN OKTOBER 2022	84.514.800,00	01 April 2023	03 April 2023	Belum Transfer
	BPJS Kesehatan Desember 2022	29.427.081.696,00	13 Januari 2023		26 Januari 2023
	BPJS Ketenagakerjaan Desember 2022	83.359.978,00	04 Januari 2023		Belum Transfer
	Inhealth Desember 2022	29.484.718,00	03 Januari 2023		13 Februari 2023
	Jamkesda Brebes Desember 2022	4.797.240,00	03 Januari 2023		Belum Transfer
	Jasa Raharja Pelayanan 21-31 Desember 2022	422.193.828,00	03 Januari 2023		9/1/23, 10/1/23, 11/1/23, 12/1/23, 26/1/23, 31/1/23, 15/3/23, 16/3/23
	PT KAI Desember 2022	10.817.909,00	02 Januari 2023		06 Maret 2023
	Lab Kimia Farma Desember 2022	310.000,00	02 Januari 2023		03 Februari 2023
	LPSK Desember 2022	572.301,00	03 Januari 2023	20 Januari 2023	Belum Transfer
	PT Pertamina Bina Medika Desember 2022	12.885.129,00	02 Januari 2023		08 Maret 2023
	PT Pertamina Persero Desember 2022	235.494,00	02 Januari 2023		Belum Transfer
	RS Ananda Desember 2022	5.865.000,00	02 Januari 2023		19 Januari 2023
	RS Hermina Desember 2022	36.170.000,00	02 Januari 2023		26 Januari 2023
	RS JIH Desember 2022	23.805.000,00	02 Januari 2023		31/1/23, 3/2/23
	PT Taspen Desember 2022	570.150,00	04 Januari 2023		07 Februari 2023
	TBMDR Triwulan 4	103.752.950,00	10 Januari 2023		Belum Transfer
	TCM Triwulan 4	38.350.000,00	14 Februari 2023		Belum Transfer
	Telkom Desember 2022	30.213.452,00	02 Januari 2023		01 Februari 2023
	PT Pertamina Persero Desember 2022	158.396.026,00	03 Januari 2023		Belum Transfer
	Total	**82.140.991.988,00**			
RSUD Tugurejo Semarang	Susulan RI Mei 2022	30.106.206,00	05 Januari 2023	05 Januari 2023	12 Januari 2023
	Alkes Desember 2022	5.054.200,00	20 Januari 2023	20 Januari 2023	02 Februari 2023
	Klaim BPJS RI Desember 2022	7.908.716.051,00	20 Januari 2023	20 Januari 2023	24 Januari 2023
	Klaim BPJS RJ Desember 2022	2.320.568.100,00			
	Klaim obat sitos kronis RI Desember 2022	138.281.400,00	25 Januari 2023	25 Januari 2023	30 Januari 2023
	Klaim obat sitos kronis Rj Desember 2022	475.103.708,00			
	Dispute RITL November 2020	4.189.900,00	27 Januari 2023	27 Januari 2023	02 Februari 2023
	Dispute RITL Januari 2021	21.255.900,00	27 Januari 2022	27 Januari 2022	02 Februari 2023
	Dispute RITL Februari 2020	9.420.941,00	27 Januari 2023	27 Januari 2023	02 Februari 2023
	Dispute RITL Februari 2021	46.097.000,00	27 Januari 2023	27 Januari 2023	02 Februari 2023
	Revisi RI November 2022	379.415.100,00	27 Januari 2023	27 Januari 2023	06 Februari 2023
	Revisi RJ November 2022	50.403.200,00			
	Dispute RITL Juli 2018	10.103.300,00	15 Februari 2023	15 Februari 2023	20 Februari 2023
	Dispute RJTL April 2019	286.800,00			
	Dispute RJTL Februari 2020	215.240,00			
	Dispute RITL Mei 2021	4.396.550,00			
	Klaim Susulan RITL Oktober 2022	25.956.716,00	15 Februari 2023	15 Februari 2023	20 Februari 2023
	Klaim Susulan RITL November 2022	6.205.769,00			
	Klaim Susulan RITL Desember 2022	7.831.653,00			
	Klaim Susulan RJTL Oktober 2022	345.600,00			

Nama SKPD	JENIS PIUTANG	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	Klaim Susulan RJTL Desember 2022	4.417.900,00			
	Dispute RITL Juli 2019	44.864.442,00			
	Dispute RJTL Oktober 2019	183.300,00			
	Dispute RJTL Januari 2020	153.700,00			20 Februari 2023
	Dispute RJTL April 2020	113.100,00			
	Dispute RITL Juli 2020	9.492.171,00			
	Dispute RiTL April 2021	7.326.828,00			
	Dispute RiTL Agustus 2021	6.211.500,00	15 Februari 2023	15 Februari 2023	
	Dispute RITL Oktober 2021	7.754.500,00			
	Dispute RITL November 2021	12.634.900,00			20 Februari 2023
	Dispute RITL Maret 2022	16.239.637,00			
	Dispute RITL Mei 2022	6.674.726,00			
	Dispute RJTL April 2022	206.900,00			
	Klaim Susulan Bulan Okrtober 2022	11.103.954,00	20 Februari 2023	20 Februari 2023	02 Maret 2023
	Klaim Susulan RJTL November 2022	1.756.400,00	24 Februari 2023	24 Februari 2023	09 Maret 2023
	Dispute BPJS RI Desember 2020	4.189.900,00	02 Maret 2023	02 Maret 2023	16 Maret 2023
	Dispute BPJS RI Januari 2021	6.149.500,00	02 Maret 2023	02 Maret 2023	16 Maret 2023
	Susulan BPJS Obat Sitos RI Des 2022	1.035.851,00	10 Maret 2023	10 Maret 2023	16 Maret 2023
	Susulan BPJS Obat Sitos RJ Des 2022	54.245.353,00			
	Revisi RI Desember 2022	124.025.600,00	16 Maret 2023	16 Maret 2023	27 Maret 2023
	Revisi RJ Desember 2022	182.701.300,00			
	Total	**11.945.434.796,00**			
RSUD Kelet/Donorojo Jepara		-			
	Total	**-**			
RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang	PELAYANAN DESEMBER RITL	2.025.682.800,00	05 Januari 2023	19 Januari 2023	30 Januari 2023
	PELAYANAN DESEMBER RJTL	547.584.100,00	05 Januari 2023	19 Januari 2023	30 Januari 2023
	NOVEMBER PENDING	138.821.000,00	03 Januari 2023	05 Januari 2023	16 Januari 2023
	DESEMBER PENDING	128.372.100,00	26 Januari 2023	01 Februari 2023	13 Februari 2023
	NOVEMBER OBAT KRONIS	176.405.209,00	15 Desember 2022	22 Desember 2022	02 Januari 2023
	DESEMBER OBAT KRONIS	161.740.352,00	20 Februari 2023	03 Maret 2023	09 Maret 2023
	OKTOBER OBAT KRONIS (REVISI)	2.685.790,00	24 Januari 2023	30 Januari 2023	09 Februari 2023
	NOVEMBER OBAT KRONIS (REVISI)	108.414,00	13 Januari 2023	26 Januari 2023	06 Februari 2023
	Total	**3.181.399.765,00**			
RSJD Surakarta	BPJS pely bl. Desember 2022	1.762.424.000,00	06 Januari 2023	12 Januari 2023	18 Januari 2023
	BPJS Obat Kronis bl. November 2022	316.424.035,00	05 Januari 2023	12 Januari 2023	18 Januari 2023
	BPJS pely bl. November 2022 Thp II	95.314.600,00	24 Januari 2023	27 Januari 2023	07 Februari 2023
	BPJS Obat Kronis bl. Desember 2022	322.194.943,00	07 Februari 2023	08 Februari 2023	20 Februari 2023
	BPJS pely bl. November 2022 Thp III	201.000,00	27 Februari 2023	02 Maret 2023	23 Maret 2023
	BPJS pely bl. Desember 2022	138.906.900,00	27 Februari 2023	02 Maret 2023	23 Maret 2023
	Jamkesda Kab. Boyolali bl Desember 2022	4.994.529,00	05 Januari 2023	05 Januari 2023	Belum Transfer
	Jamkesda Kab. Boyolali bl Desember 2022 Thp II	1.007.000,00	05 Januari 2023	05 Januari 2023	27 Februari 2023
	Jamkesda Kab. Pacitan bl Desember 2022	6.217.800,00	05 Januari 2023	05 Januari 2023	Belum Transfer
	Jamkesda Kab. Sukoharjo bl Desember 2022	12.245.262,00	05 Januari 2023	05 Januari 2023	20 Februari 2023
	Jamkesda Kab. Sragen bl Desember 2022	27.046.142,00	05 Januari 2023	05 Januari 2023	30 Maret 2023

Nama SKPD	JENIS PIUTANG	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	Total	**2.686.976.211,00**			
RSJD Dr Soedjarwadi Klaten	Klaim Covid November Rawat Inap 2022	192.688.000	28 Desember 2022	01 Februari 2023	02 Januari 2023
	Klaim Covid November Rawat Jalan 2022	3.312.000	28 Desember 2022	01 Februari 2023	31 Januari 2023
	Total	**196.000.000,00**			
Jumlah Total Piutang BLUD Jaminan		**169.995.594.204,00**			

5.3.1.1.7 Piutang Transfer Pemerintah Pusat **Rp14.764.276.977,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp14.764.276.977,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.764.276.977,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Dana Perimbangan	14.764.276.977,00	-
2	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	-
	Jumlah	**14.764.276.977,00**	**-**

5.3.1.1.7.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan **Rp14.764.276.977,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp14.764.276.977,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.764.276.977,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH	14.764.276.977,00	-
2	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)	-	-
3	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-
4	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik	-	-
	Jumlah	**14.764.276.977,00**	**-**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2022 sebesar Rp14.764.276.977,00 sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/202 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022.

5.3.1.1.7.1.1 Piutang Transfer Umum-DBH **Rp14.764.276.977,00**

Piutang Transfer Umum-DBH sebesar Rp14.764.276.977,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.764.276.977,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-PPh 21	3.980.269.688,00	-
2	Piutang Dana Transfer Umum-Cukai dan Tembakau	10.784.007.289,00	-
	Jumlah	**14.764.276.977,00**	**-**

5.3.1.1.9 Piutang Lainnya **Rp15.599.471.995,00**

Piutang Lainnya sebesar Rp15.599.471.995,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.717.526.838,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp118.054.843,00) atau (0,75%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	11.129.442.003,00	11.246.587.755,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	4.470.029.992,00	4.470.939.083,00
	Jumlah	**15.599.471.995,00**	**15.717.526.838,00**

Piutang Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya piutang atas sisa pengembalian uang muka penghentian dan pemutusan kontrak PT Sinar Intan Papua Permai (berdasarkan SPK Nomor 027.2/GDG0,00IBS/IV/2015 tanggal 23 April 2015) atas pekerjaan perluasan dan rehab IBS, ICU, ICCU, HCU, PICU, NICU, Hemodialisa, Ruang Tunggu ICU, Pembuatan Selasar dan Penataan Taman pada RSUD Tugurejo Semarang sebesar Rp1.962.929.100,00. Penghentian pekerjaan tersebut dilakukan karena hingga tanggal 23 Desember 2015 PT Sinar Intan Papua Permai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan progres yang dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas dan Pejabat Teknis Lapangan bersama Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan tanggal 23 Desember 2015.

Atas permasalahan tersebut, RSUD Tugurejo sudah menindaklanjuti perintah Gubernur Jawa Tengah untuk mengupayakan pengembalian sisa jaminan uang muka ke Kas Daerah dengan tindakan sebagai berikut:

a. Surat Tagihan kepada PT Asuransi Recapital sebanyak 7 (tujuh) kali
b. Surat Pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 6 (lienam) kali
c. Pertemuan mediasi di OJK Perwakilan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 5 Desember 2018 dan 2 Februari 2018.
d. Surat permohonan penjelasan lebih lanjut kepada Deputi Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan Kepada Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan Ri tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukkan produk *Surety Bond* Non Konstruksi

Gugatan atas putus kontrak yang diajukan oleh PT Sinar Intan Papua Permai (SIPP) telah ditolak oleh Mahkamah Agung, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 65.PK/TUN/2018 tanggal 8 Juni 2018, Nomor 159.PK/TUN/2018 tanggal 2 November 2018, Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor putusan 281 K/KPDT/2020 dan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT Sinar Intan Papua Permai Nomor 281.K/Pdt/2020 tanggal 18 Februari 2020. Implikasi dari penolakan gugatan atas putus kontrak ini mengharuskan PT Asuransi Recapital selaku penjamin uang muka pekerjaan untuk mengembalikan uang muka.Namun, sampai saat ini PT Asuransi Recapital belum mencairkan sisa jaminan uang muka dimaksud.

Terhadap hal tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan langkah lebih lanjut antara lain:

a. 21 Januari 2019 Surat dari RSUD Tugurejo Kepada DEPUTI Komisioner Pengawasan IKNB II-OJK dan kepada Dirjen Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI perihal: Permohonan penjelasan

lebih lanjut tentang penghapusan PT Asuransi Recapital dari daftar perusahaan Asuransi Umum yang dapat memasukan produk Surety Bond Non Kontrusksi

b. 11 Februari 2019 Surat Kementrian Keuangan RI No.S-184/PB/2019 tentang Penjelasan PT Asuransi Recapital dari Daftar Perusahaan Asuransi Umum yg dapat memasarkan Produk Surety Bond Non Kontruksi
c. 15 Februari 2019 Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.S-226/NB.21/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penyampaian Informasi Terkini Terkait PT Asuransi Recapital
d. 06 Maret 2019 Surat Tembusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No.W.12.U/686/Pdt. 04/03/2019 Kepada Direktur RSUD Tugurejo tentang Penerimaan dan Registrasi Berkas Perkara Banding.
e. 25 September 2020 Surat Permohonan Pendampingan Kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
f. 26 Oktober 2021 Pencairan Jaminan Uang Muka No. SMG/APB/05/2015/0122138-1 Jawaban Surat 181.3/4489 : PT Asuransi Recapital terkena Cabut Ijin Usaha Proses Likuidasi PT Asuransi Recapital sedang berjalan dan belum masuk tahap pembayaran. PT Asuransi Recapital telah meminta konfirmasi ke PT SIPP, namun belum ada jawaban.
g. 25 Oktober 2022 Tanggal surat : 25 Oktober 2022 Nomor Surat : 900/4853 Perihal : Permohonan Penjelasan Informasi terkini terkait PT Asuransi Recapital.
h. 31 Oktober 2022 Tanggal surat : 31 Oktober 2022 Nomor Surat : 900/4854 Perihal : Permohonan Jaminan Pencairan Uang Muka.

5.3.1.1.9.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Rp11.129.442.003,00

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp11.129.442.003,00 apablia dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.246.587.755,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp117.145.752,00) atau (1,04%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	11.129.442.003,00	11.246.587.755,00
		11.129.442.003,00	**11.246.587.755,00**

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Biro Perekonomian-UMKM	1.710.392.264,00	1.710.392.264,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	1.778.027.705,00	1.781.627.705,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.403.855.800,00	1.403.855.800,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	33.800.000,00	38.700.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.064.633.401,00	2.065.633.401,00
6	Dinas Kehutanan	2.882.500.000,00	2.882.500.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.256.232.833,00	1.363.878.585,00
	Jumlah	**11.129.442.003,00**	**11.246.587.755,00**

5.3.1.1.9.2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Rp4.470.029.992,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp4.470.029.992,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.470.939.083,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp909.091,00) atau (0,02%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah	364.727.274,00	365.636.365,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
		4.470.029.992,00	**4.470.939.083,00**

5.3.1.1.9.2.1 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah — Rp364.727.274,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp364.727.274,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp365.636.365,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp909.091,00) atau (0,25%) dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dana Talangan Kab Cilacap)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	364.727.274,00	365.636.365,00
	Jumlah	**364.727.274,00**	**365.636.365,00**

5.3.1.1.9.2.2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat — Rp4.105.302.718,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar Rp4.105.302.718,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.105.302.718,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat
Piutang Tempat Pelelangan Ikan

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
		4.105.302.718,00	**4.105.302.718,00**

5.3.1.1.10 Penyisihan Piutang — (Rp380.010.526.610,72)

Penyisihan Piutang sebesar (Rp380.010.526.610,72) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp642.081.528.398,58) mengalami **penurunan** sebesar Rp262.071.001.787,86 atau (40,82%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(364.411.054.615,72)	(626.364.001.560,58)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(15.599.471.995,00)	(15.717.526.838,00)
	Jumlah	**(380.010.526.610,72)**	**(642.081.528.398,58)**

5.3.1.1.10.1 Penyisihan Piutang Pendapatan — (Rp364.411.054.615,72)

Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar (Rp364.411.054.615,72) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp626.364.001.560,58) mengalami **penurunan** sebesar Rp261.952.946.944,86 atau (41,82%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(348.775.738.894,45)	(610.220.083.398,57)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(33.208.954,31)	(37.826.160,36)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(15.602.106.766,96)	(16.106.092.001,65)
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
6	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
	Jumlah	**(364.411.054.615,72)**	**(626.364.001.560,58)**

5.3.1.1.10.1.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah (Rp348.775.738.894,45)

Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah sebesar (Rp348.775.738.894,45) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp610.220.083.398,57) mengalami **penurunan** sebesar Rp261.444.344.504,12 atau (42,84%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	(348.775.501.814,50)	(610.219.619.497,37)
2	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-
3	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
4	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	(237.079,95)	(463.901,20)
5	Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	**(348.775.738.894,45)**	**(610.220.083.398,57)**

Rincian penyisihan piutang pajak Tahun 2022 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

(*Dalam Rupiah)*

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2022				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Koreksi	
	Piutang Pajak Daerah	**610.220.083.398,57**	**70.566.777.727,07**	**-**	**332.011.122.231,20**	**-**	**348.775.738.894,45**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	610.219.619.497,38	70.566.540.647,12		332.010.658.330,00		348.775.501.814,50
2	Pajak Air Permukaan	463.901,20	237.079,95		463.901,20		237.079,95
		610.220.083.398,57	**70.566.777.727,07**	**-**	**332.011.122.231,20**	**-**	**348.775.738.894,45**

5.3.1.1.10.1.2 Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi (Rp33.208.954,31)

Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi sebesar (Rp33.208.954,31), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp37.826.160,36) mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.617.206,05) atau (12,21%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	(919.230,22)	(5.784.560,36)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(32.289.724,09)	(32.041.600,00)
	Jumlah	**(33.208.954,31)**	**(37.826.160,36)**

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah)*

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2022				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Koreksi	
	Piutang Retribusi Daerah	**37.826.160,36**	**1.167.354,32**	**-**	**5.784.560,36**	**-**	**33.208.954,32**
1	Dinas Kesehatan	5.784.560,36	919.230,22	-	5.784.560,36	-	919.230,22
2	Dinas Pusdataru	-	248.124,10	-	-	-	248.124,10
3	BPKAD	32.041.600,00	-	-	-	-	32.041.600,00

5.3.1.1.10.1.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rp919.203,22)

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar (Rp919.203,22), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.784.560,36) mengalami **penurunan** sebesar Rp4.865.330,14 atau (84,11%)

dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	(919.230,22)	(5.784.560,36)
	Jumlah	**(919.230,22)**	**(5.784.560,36)**

5.3.1.1.10.1.2.2 Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp32.289.724,09)

Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp32.289.724,09), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (32.041.600,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp248.124,09) atau 0,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	(248.124,09)	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
	Jumlah	**(32.289.724,09)**	**(32.041.600,00)**

5.3.1.1.10.1.4 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Rp15.602.106.766,96)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp15.602.106.766,96), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.106.092.001,65) mengalami **penurunan** sebesar Rp503.985.234,69 atau (3,13%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(370.051.669,00)	(370.051.669,00)
2	Penyisihan Piutang Bunga	-	-
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(15.232.055.097,96)	(15.736.040.332,65)
	Jumlah	**(15.602.106.766,96)**	**(16.106.092.001,65)**

Perhitungan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2022				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Koreksi	
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**16.106.092.001,65**	**4.712.799.324,51**	**207.188.264,83**	**5.414.325.148,95**	**9.647.675,07**	**15.602.106.766,98**
1	Dinas Pemuda Olahraga & Pariwisata	370.051.669,00	-	-	-	-	370.051.669,00
2	RSUD Moewardi	4.489.579.744,13	3.024.544.294,71	207.188.264,83	3.340.236.568,90	7.611.031,07	4.373.464.703,71
3	RSUD Margono	6.473.663.370,56	471.453.596,89	-	786.846.581,00	-	6.158.270.386,45
4	RSUD Tugurejo	2.448.688.792,42	584.657.501,29	-	369.231.095,95	-	2.664.115.197,76
5	RSUD Kelet	166.469.831,71	540.109,10	-	79.807.579,29	-	87.202.361,52
6	RSJD Amino	1.314.988.118,50	52.993.957,58	-	156.479.344,08	-	1.211.502.732,01
7	RSJD Solo	614.836.775,04	576.500.946,91	-	614.836.775,04	-	576.500.946,91
8	RSJD Soedjarwadi	227.813.700,29	2.108.918,02	-	66.887.204,69	2.036.644,00	160.998.769,61

5.3.1.1.10.1.4.1 Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD (Rp370.051.669,00)

Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar (Rp370.051.669,00),

apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp370.051.669,00) tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(370.051.669,00)	(370.051.669,00)
	Jumlah	**(370.051.669,00)**	**(370.051.669,00)**

5.3.1.1.10.1.4.3 Penyisihan Piutang BLUD (Rp15.232.055.097,96)

Penyisihan Piutang BLUD sebesar (Rp15.232.055.097,96) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.736.040.332,65) mengalami **penurunan** sebesar Rp503.985.234,69 atau (3,20%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.373.464.703,70)	(4.489.579.744,14)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(6.158.270.386,45)	(6.473.663.370,56)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(1.211.502.732,00)	(1.314.988.118,50)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(2.664.115.197,76)	(2.448.688.792,42)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(87.202.361,52)	(166.469.831,71)
6	RSJD Surakarta	(576.500.946,91)	(614.836.775,04)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(160.998.769,62)	(227.813.700,29)
	Jumlah	**(15.232.055.097,96)**	**(15.736.040.332,65)**

Penyisihan Piutang Pasien

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.340.787.396,53)	(4.069.367.147,04)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(5.335.619.483,02)	(5.458.164.226,74)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(823.486.971,00)	(771.903.458,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(1.961.170.591,76)	(1.510.029.486,42)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(81.743.693,11)	(85.129.170,52)
6	RSJD Surakarta	(575.593.860,16)	(614.826.475,04)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(158.922.306,41)	(176.326.443,33)
	Jumlah	**(13.277.324.301,99)**	**(12.685.746.407,08)**

Penyisihan Piutang Jaminan Pelayanan

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(31.164.144,05)	(419.345.624,50)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(820.841.552,47)	(1.014.601.198,61)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(388.005.693,00)	(543.074.592,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(604.141.739,50)	(920.101.804,55)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(2.921.150,31)	(79.343.252,19)
6	RSJD Surakarta	(861.219,95)	(1.900,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(2.065.449,51)	(51.480.408,05)
	Jumlah	**(1.850.000.948,79)**	**(3.027.948.779,90)**

Penyisihan Piutang BLUD Lainnya

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(1.513.163,12)	(866.972,60)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(1.809.350,96)	(897.945,21)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(10.068,00)	(10.068,50)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(98.802.866,50)	(18.557.501,45)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(2.537.518,10)	(1.997.409,00)
6	RSJD Surakarta	(45.866,80)	(8.400,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(11.013,70)	(6.848,91)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Jumlah	**(104.729.847,18)**	**(22.345.145,67)**

5.3.1.1.10.2 Penyisihan Piutang Lainnya (Rp15.599.471.995,00)

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp15.599.471.995,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.717.526.838,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp118.054.843,00 atau (0,75%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	(11.129.442.003,00)	(11.246.587.755,00)
2	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	(4.470.029.992,00)	(4.470.939.083,00)
		(15.599.471.995,00)	**(15.717.526.838,00)**

Rincian penyisihan piutang lainnya 2022 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

(*Dalam Rupiah*)

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang UnAudited	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	Piutang Lainnya	**15.599.471.995,00**	**-**	**-**	**-**	**15.599.471.995,00**	**15.599.471.995,00**
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	11.494.169.277,00	-	-	-	11.494.169.277,00	11.494.169.277,00
2	Dinas Kelautan & Perikanan	4.105.302.718,00	-	-	-	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00

5.3.1.1.10.2.1 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain (Rp11.129.442.003,00)

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain sebesar (Rp11.129.442.003,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp11.246.587.755,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp117.145.752,00 atau (1,04%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	SKPKD	(11.129.442.003,00)	(11.246.587.755,00)
	Jumlah	**(11.129.442.003,00)**	**(11.246.587.755,00)**

5.3.1.1.10.2.2 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang (Rp4.470.029.992,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar (Rp4.470.029.992,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.470.939.083,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp909.091,00 atau (0,02%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah	(364.727.274,00)	(365.636.365,00)
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	(4.105.302.718,00)	(4.105.302.718,00)
		(4.470.029.992,00)	**(4.470.939.083,00)**

5.3.1.1.10.2.2.1 Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Rp364.727.274,00)

Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar (Rp364.727.274,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp365.636.365,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp909.091,00 atau (0,25%) dengan rincian sebagai berikut :

	Dana Talangan Kab Cilacap	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	(364.727.274,00)	(365.636.365,00)
	Jumlah	**(364.727.274,00)**	**(365.636.365,00)**

5.3.1.1.10.2.2.2 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat (Rp4.105.302.718,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar (Rp4.105.302.718,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

Piutang Pelelangan Ikan

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	(4.105.302.718,00)	(4.105.302.718,00)
	Jumlah	**(4.105.302.718,00)**	**(4.105.302.718,00)**

5.3.1.1.11 Beban Dibayar Dimuka Rp5.301.065.353,13

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp5.301.065.353,13 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.756.838.225,90 mengalami **penurunan** sebesar (Rp455.772.872,77) atau (7,92%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	5.072.568.759,69	5.756.838.225,90
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	228.496.593,44	-
	Jumlah	**5.301.065.353,13**	**5.756.838.225,90**

5.3.1.1.11.1 Beban Dibayar Dimuka Rp5.072.568.759,69

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp5.072.568.759,69 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.756.838.225,90 mengalami **penurunan** sebesar (Rp684.269.466,21) atau (11,89%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	128.128.047,73	643.042.480,01
2	Dinas Kesehatan	169.355.265,13	681.771.316,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	615.390.210,98	562.081.720,16
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	403.099.214,82	406.891.692,81
5	RSUD Tugurejo Semarang	88.282.677,60	71.514.067,77
6	RSJD Surakarta	12.746.080,42	13.143.131,86
7	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	195.339.586,03	198.662.476,32
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	8.720.819,67	3.743.419,18
9	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	150.368.085,86	150.017.783,85
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	94.961.172,95	99.822.372,06
11	Satuan Polisi Pamong Praja	80.739.689,55	109.630.920,97
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.379.488,50	17.386.995,44
13	Dinas Sosial	120.881.989,61	127.328.359,32
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.605.466,45	74.639.572,34
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	83.196.267,37	98.833.042,32

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	28.032.786,93	25.275.352,84
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	206.637.977,36	140.051.072,05
18	Dinas Ketahanan Pangan	83.019.356,39	82.830.994,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	71.833.871,60	72.438.793,18
20	Dinas Perhubungan	213.751.213,11	213.172.400,00
21	Dinas Koperasi dan UKM	86.693.518,54	78.571.627,21
22	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
23	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	171.019.894,44	163.731.356,00
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	31.309.135,80
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	93.103.369,40	114.357.138,10
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	47.522.946,03	91.938.783,58
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	28.887.250,79	-
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	82.660.918,84	14.415.599,19
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	212.704.382,36	142.664.824,32
30	Sekretariat Daerah	187.311.074,75	106.474.839,78
31	Sekretariat DPRD	377.722.788,53	276.357.357,09
32	Inspektorat	109.436.727,60	125.580.046,51
33	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	614.303.200,34	611.067.805,14
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	146.301.891,01	91.605.143,58
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.749.526,56	10.304.819,39
36	Badan Penghubung	105.682.002,45	106.181.787,74
	Jumlah	**5.072.568.759,69**	**5.756.838.225,90**

5.3.1.1.11.2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rp228.496.593,44

Beban Dibayar Dimuka-Sewa sebesar Rp228.496.593,44 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp228.496.593,44 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	228.496.593,44	-
	Jumlah	**228.496.593,44**	**-**

5.3.1.1.12 Persediaan Rp397.096.831.700,58

Persediaan sebesar Rp397.096.831.700,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp513.729.554.970,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp116.632.723.269,51) atau (22,70%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	397.069.859.195,58	513.673.181.320,09
2	Barang Tak Habis Pakai	23.280.005,00	55.317.650,00
3	Barang Bekas Pakai	3.692.500,00	1.056.000,00
	Jumlah	**397.096.831.700,58**	**513.729.554.970,09**

Persediaan sebesar Rp397.096.831.700,58 belum termasuk persediaan Usaha Mandiri di satuan pendidikan menengah khusus (SMK) per 31 Desember 2022 sebesar Rp507.630.402,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Bahan : Rp25.732.500,00
b. Suku Cadang : Rp8.123.500,00
c. Alat/Bahan untuk Kegiatan : Rp72.107.439,60
d. Obat-Obatan : Rp1.568.047,00
e. Persediaan untuk Diserahkan : Rp377.265.912,67
f. Natura dan Pakan : Rp22.833.002,73

5.3.1.1.12.1 Barang Pakai Habis **Rp397.069.859.195,58**

Barang Pakai Habis adalah barang yang sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun yaitu sebesar Rp397.069.859.195,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp513.673.181.320,09 mengalami **penurunan** sebesar (Rp116.603.322.124,51) atau (22,70%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bahan	55.318.380.978,00	158.643.062.505,56
2	Suku Cadang	27.841.442.460,92	19.812.924.154,41
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	112.137.700.647,96	246.987.359.102,41
4	Obat-obatan	186.761.439.831,15	78.243.063.518,00
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	9.463.672.665,00	3.237.124.148,00
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	3.856.875,00	1.939.300,00
7	Natura dan Pakan	4.293.515.020,75	5.777.922.828,21
8	Persediaan Penelitian	1.249.850.716,80	969.785.763,50
9	Persediaan dalam Proses	-	-
	Jumlah	**397.069.859.195,58**	**513.673.181.320,09**

5.3.1.1.12.1.1 Bahan **Rp55.318.380.978,00**

Bahan sebesar Rp55.318.380.978,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp158.643.062.505,56 mengalami **penurunan** sebesar (Rp103.324.681.527,56) atau (65,13%). Komponen bahan antara lain bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit tanaman, bahan/bibit ternak dan ikan, serta bahan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	603.074.990,50	746.547.808,75
2	Dinas Kesehatan	36.215.495.966,80	135.029.494.022,05
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	5.226.010.403,64	10.994.191.102,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.744.960.154,16	1.388.562.842,02
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	139.080.841,00	41.909.116,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	115.791.155,20	2.793.000,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	10.387.000,00	101.231.030,00
8	RSJD Surakarta	928.350,00	255.100,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	21.864.280,00	43.335.440,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	893.554.520,72	1.155.368.656,16
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	304.592.150,00	166.506.160,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas	-	60.000,00
13	Dinas Sosial	15.006.500,00	-
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	202.092.000,00	312.120.500,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	920.899.244,39	690.801.630,08
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	45.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	316.217.354,09	322.179.818,50
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	572.211.382,50	427.438.007,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.849.118.117,00	7.203.396.255,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	35.750.000,00	10.587.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	126.779.900,00	-
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.500.000,00	1.012.000,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	66.668,00	5.228.018,00
24	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**55.318.380.978,00**	**158.643.062.505,56**

5.3.1.1.12.1.2 Suku Cadang **Rp27.841.442.460,92**

Suku Cadang sebesar Rp27.841.442.460,92 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.812.924.154,41 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.028.518.306,51 atau 40,52%. Komponen Suku cadang antara lain suku cadang kedokteran, suku cadang alat laboratorium dan suku cadang alat bengkel dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.292.572.341,20	3.522.335.119,00
2	Dinas Kesehatan	8.642.242.714,84	2.212.787.296,17
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	16.934.563.514,97	12.680.875.017,24
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	58.839.068,80	601.000,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.562.828,25	-
6	RSUD Tugurejo Semarang	777.000,00	-
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	158.991.673,00
8	RSJD Surakarta	18.021.717,16	13.411.629,50
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	244.514.606,70	749.279.110,50
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.424.750,00	67.913.004,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	8.569.000,00
14	Dinas Perhubungan	212.653.000,00	210.275.307,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.810.000,00	547.800,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	392.126.050,00	178.040.095,00
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.545.535,00	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	250.000,00	-
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	539.334,00	9.298.103,00
20	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**27.841.442.460,92**	**19.812.924.154,41**

5.3.1.1.12.1.3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor **Rp112.137.700.647,96**

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp112.137.700.647,96 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp246.987.359.102,41 mengalami **penurunan** sebesar (Rp134.849.658.454,45) atau (54,60%). Komponen alat/bahan untuk kegiatan kantor antara lain alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan computer, perabot kantor, alat listrik dan perlengkapan dinas, perlengkapan

pendukung olahraga, souvenir dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya. dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.155.522.648,99	23.337.849.651,18
2	Dinas Kesehatan	56.910.966.562,80	187.921.988.346,07
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.047.494.605,32	3.378.956.861,60
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	5.967.462.488,56	6.118.144.678,37
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.639.015.887,78	5.918.351.689,16
6	RSUD Tugurejo Semarang	6.722.210.507,66	3.305.975.764,90
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.049.459.231,33	1.413.742.517,30
8	RSJD Surakarta	405.952.884,00	421.530.438,20
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	935.428.227,77	1.590.679.677,61
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	73.517.514,00	187.808.975,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	25.621.090,00	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.254.656,00	776.500,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	64.762.000,00	53.619.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.697.000,00	20.892.200,00
15	Dinas Sosial	122.654.949,00	20.893.149,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.293.365.700,40	7.480.405.029,40
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.074.625,00	17.393.850,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.459.620,00	5.348.500,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	51.129.211,34	13.503.200,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	19.001.928,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	20.879.600,06	5.390.000,00
22	Dinas Perhubungan	293.880.440,00	381.282.800,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	32.210.757,00	1.610.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	1.132.250,00	8.321.045,00
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	800.000,00	1.571.900,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	13.492.395,60	170.847.850,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	947.750,00	108.968.935,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	123.452.192,00	123.880.526,72
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	74.399.381,00	163.564.485,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.220.255.850,00	210.944.416,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	186.042.389,00	120.780.190,00
34	Sekretariat Daerah	10.039.630,00	1.377.000,00
35	Sekretariat DPRD	1.083.000,00	3.824.600,00
36	Inspektorat	94.530,00	1.170.100,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.319.512,00	9.588.925,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.204.270.755,00	3.906.899.791,90
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.834.898,00	51.329.900,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	311.012.472,35	302.171.892,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	99.984.436,00	148.308.290,00
42	Badan Penghubung	9.519.000,00	38.664.500,00
	Jumlah	**112.137.700.647,96**	**246.987.359.102,41**

5.3.1.1.12.1.4 Obat-Obatan **Rp186.761.439.831,15**

Obat-Obatan sebesar Rp186.761.439.831,15 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp78.243.063.518,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp108.518.376.313,15 atau 138,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	314.242.092,00	467.951.170,00
2	Dinas Kesehatan	94.540.238.194,73	18.262.674.005,16
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	40.260.429.487,37	22.652.000.916,73
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	39.970.145.168,62	25.075.538.242,76
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.887.532.006,14	3.199.052.456,95
6	RSUD Tugurejo Semarang	4.622.949.112,80	3.156.754.034,80
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.205.079.848,42	1.180.779.086,10
8	RSJD Surakarta	2.082.366.269,78	2.022.246.677,66
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.523.780.718,29	1.212.711.181,84
10	Dinas Sosial	15.267.818,00	6.915.391,00
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	26.782.989,00	717.340.700,00
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	293.520.140,00	250.442.930,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	610.000,00	80.340,00
14	Sekretariat Daerah	1.682.100,00	4.403.730,00
15	Sekretariat DPRD	9.053.359,00	-
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.115.146,00	6.978.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	300.000,00	16.872.000,00
18	Satuan Polisi Pamong Praja	-	75.000,00
19	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.345.381,00	10.247.655,00
	Jumlah	**186.761.439.831,15**	**78.243.063.518,00**

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi terdapat persediaan yang kadaluarsa diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan kadaluarsa per 31 Desember 2022 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp53.419.291.461,08 terdiri dari:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak

Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai

di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah

per 31 desember 2022

No	Rumah Sakit Daerah	Obat/Reagen	Alkes dan Bahan Habis Pakai
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah		
	2022	2.077.999.891,11	10.478.246.752,00
	DI ATAS 2021	858.739.329,89	37.118.255.216,00
2	RSUD Moewardi		
	2022	144.553.481,40	44.361.502,91
	DI ATAS 2021	1.407.519.877,65	400.168.239,63
3	RSUD Margono Sukarjo		
	2022	157.311.946,00	33.730.877,00
	DI ATAS 2021	-	-

4	RSUD Tugurejo		
	2022	30.290.991,97	12.877.866,21
	DI ATAS 2021	140.406.359,00	253.666.484,00
5	RSUD Kelet		
	2022	177.680.354,00	-
	DI ATAS 2021	-	-
6	RSJD Amino Gondohutomo		
	2022	-	-
	DI ATAS 2021	-	-
7	RSJD Surakarta		
	2022	55.416.020,78	-
	DI ATAS 2021	2.464.876,98	-
8	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		
	2022	6.185.943,00	2.276.877,00
	DI ATAS 2021	17.138.574,55	-
Total		**5.075.707.646,33**	**48.343.583.814,75**

5.3.1.1.12.1.5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Rp9.463.672.665,00

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp9.463.672.665,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.237.124.148,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.226.548.517,00 atau 192,35% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	247.045.545	441.125.848
2	Dinas Kesehatan	1.676.052.890,00	27.720.100,00
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	738.350.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	2.210.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	90.000,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	482.846.250,00	-
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.057.727.980,00	2.027.628.200,00
	Jumlah	**9.463.672.665,00**	**3.237.124.148,00**

5.3.1.1.12.1.6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Rp3.856.875,00

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga sebesar Rp3.856.875,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.939.300,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.917.575,00 atau 98,88% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.856.875,00	1.939.300,00
	Jumlah	**3.856.875,00**	**1.939.300,00**

5.3.1.1.12.1.7 Natura dan Pakan Rp4.293.515.020,75

Natura dan Pakan sebesar Rp4.293.515.020,75 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.777.922.828,21 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.484.407.807,46) atau (25,69%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	99.555.599,00	149.191.055,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	255.248.865,25	194.216.937,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	77.390.350,00	78.225.293,10
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	281.162.389,91	126.571.123,68
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	128.915.476,75	83.194.065,43
6	RSUD Tugurejo Semarang	132.071.909,10	37.690.170,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	19.030.725,00	119.878.290,00
8	RSJD Surakarta	109.948.465,00	28.541.010,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	39.807.399,50	23.396.739,00
10	Dinas Sosial	37.688.850,00	-
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	579.907.428,00	265.468.505,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.119.142.550,00	2.322.912.500,00
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	255.576.935,00	2.151.164.625,00
14	SKPKD	-	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Khutanan	8.945.980,00	7.643.090,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	149.122.098,24	189.829.425,00
	Jumlah	**4.293.515.020,75**	**5.777.922.828,21**

5.3.1.1.12.1.8 Persediaan Penelitian Rp1.249.850.716,80

Persediaan Penelitian sebesar Rp1.249.850.716,80 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp969.785.763,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp280.064.953,30 atau 28,88%. Komponen persediaan penelitian yaitu untuk penelitian biologi dan teknologi dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	18.343.500,00	45.302.050,00
2	Dinas Kesehatan	6.517.500,00	6.517.500,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	678.568.592,80	442.976.137,50
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	325.869.369,00	335.238.086,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	181.351.755,00	12.071.990,00
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39.200.000,00	127.680.000,00
	Jumlah	**1.249.850.716,80**	**969.785.763,50**

5.3.1.1.12.2 Barang Tak Habis Pakai Rp23.280.005,00

Persediaan Barang Tak Habis Pakai merupakan barang untuk keperluan dinas yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun yaitu sebesar Rp23.280.005,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp55.317.650,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp32.037.645,00) atau (57,92%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Komponen	1.117.200,00	11.735.000,00
2	Pipa	22.162.805,00	43.582.650,00
	Jumlah	**23.280.005,00**	**55.317.650,00**

5.3.1.1.12.2.1 Komponen Rp1.117.200,00

Persediaan Komponen sebesar Rp1.117.200,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.735.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.617.800,00) atau (90,48%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.117.200,00	11.735.000,00
	Jumlah	**1.117.200,00**	**11.735.000,00**

5.3.1.1.12.2.2 Pipa Rp22.162.805,00

Persediaan Pipa sebesar Rp22.162.805,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp43.582.650,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp21.419.845,00) atau (49,15%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.424.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	28.117.650,00
3	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	94.000,00
4	RSJD Dr Amino Gondohutomo	3.668.705,00	-
4	RSJD Surakarta	13.069.600,00	14.981.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		390.000,00
	Jumlah	**22.162.805,00**	**43.582.650,00**

5.3.1.1.12.3 Barang Bekas Pakai Rp3.692.500,00

Persediaan Barang Bekas Pakai merupakan barang bekas yang merupakan sisa dari suatu kegiatan yang masih dapat digunakan kembali yaitu sebesar Rp3.692.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.056.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.636.500,00 atau 249,67% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	3.692.500,00	1.056.000,00
	Jumlah	**3.692.500,00**	**1.056.000,00**

5.3.1.1.12.3.1 Komponen Bekas dan Pipa Bekas Rp3.692.500,00

Persediaan Komponen Bekas dan Pipa Bekas sebesar Rp3.692.500,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.056.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.636.500,00 atau 249,67% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.992.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	756.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	700.000,00	-
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	300.000,00
		3.692.500,00	**1.056.000,00**

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp7.359.256.134.721,51

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp7.359.256.134.721,51 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.454.908.269.377,92 mengalami **penurunan** sebesar (Rp95.652.134.656,41) atau (1,28%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.359.256.134.721,51	7.454.908.269.377,92
	Jumlah	**7.359.256.134.721,51**	**7.454.908.269.377,92**

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen Rp7.359.256.134.721,51

Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp7.359.256.134.721,51 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.454.908.269.377,92 mengalami **penurunan** sebesar (Rp95.652.134.656,41) atau (1,28%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyertaan Modal	7.359.256.134.721,51	7.454.908.269.377,92
2	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah	**7.359.256.134.721,51**	**7.454.908.269.377,92**

5.3.1.2.2.1 Penyertaan Modal Rp7.359.256.134.721,51

Penyertaan Modal sebesar Rp7.359.256.134.721,51 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.454.908.269.377,92 mengalami **penurunan** sebesar (Rp95.652.134.656,41) atau (1,28%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	5.044.143.816.429,12	4.181.024.376.961,98
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jateng	795.587.669.570,11	721.793.377.015,16
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	201.482.628.056,56	158.095.685.200,87
4	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Klaten	-	-
5	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Pringsurat	-	-
6	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
7	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	49.083.173.898,14	26.813.471.851,16
8	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	153.188.727.680,00	126.431.424.812,00
9	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	176.633.349.641,00	178.359.282.602,00
10	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	548.690.709.437,03	1.029.653.382.679,22
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	195.525.955.754,00	171.673.110.100,00
12	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Jateng	164.514.104.255,55	164.318.755.476,86
13	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	10.446.000.000,00	676.785.402.678,67
	Jumlah	**7.359.256.134.721,51**	**7.454.908.269.377,92**

Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37. Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma yang

menggunakan metode biaya. Dengan menggunakan metode biaya (Cost Method) penyertaan modal kepada BUMD maupun non BUMD disajikan sebagai berikut:

Cost Method :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	2.205.289.000.000,00	1.830.289.000.000,00
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jateng	428.170.000.000,00	455.880.000.000,00
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	186.290.000.000,00	166.290.000.000,00
4	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BKK Klaten (Perseroda)	6.910.000.000,00	6.910.000.000,00
5	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BKK Pringsurat (Perseroda)	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00
6	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
7	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	64.252.200.000,00	39.252.200.000,00
8	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	109.197.500.000,00	87.085.000.000,00
9	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	100.000.000.000,00	31.861.846.791,00
10	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	375.392.000.000,00	849.392.000.000,00
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	54.887.500.000,00	25.000.000.000,00
12	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Jateng	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
13	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	10.446.000.000,00	10.446.000.000,00
	Jumlah	**3.704.144.200.000,00**	**3.665.716.046.791,00**

Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT. SPJT) tanggal 31 Desember 2021 telah menyetujui dan mengesahkan pengurangan modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT. SPJT sebesar Rp 474.000.000.000,- dan telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT. SPJT menjadi sebesar Rp 375.392.000.000,-. Hal ini didasarkan atas pertimbangan untuk mendorong manajemen PT. SPJT agar lebih mandiri, kreatif dan fokus terhadap bisnis yang potensial sehingga menghasilkan pendapatan usaha yang optimal dan tercipta efisiensi dalam pengelolaan perusahaan. Dana dapat dialihkan untuk pengembangan bisnis BUMD lain yang lebih potensial. Pengurangan modal disetor ini telah memperhitungkan bahwa cadangan PT. SPJT masih memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu minimal 20% dari modal disetor.

Pada Tahun Anggaran 2022 telah diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 22.112.500.000,- yang digunakan untuk pembebasan lahan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu SPAM Regional Wosusokas (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 31 Desember 2021); kepada PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 25.000.000.000,- yang digunakan untuk pengurusan sertifikat dan peningkatan status tanah PT. PRPP (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 20 April 2022); kepada

PT. JPEN (Perseroda) sebesar Rp 14.887.500.000,- yang digunakan untuk pengembangan usaha yaitu pengembangan PLTS, niaga CNG serta kegiatan usaha migas dan penunjang lainnya (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 30 Desember 2022).

PT JPEN (Perseroda) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT JPEN (Perseroda) Nomor 29 tanggal 8 Oktober 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn) dengan modal dasar Rp100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000 lembar saham. Dari modal dasar dimaksud telah disetorkan atau ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 25% atau sejumlah 25.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (memenuhi ketentuan minimal modal disetor perseroan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Sumber modal disetor Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp25.000.000.000,00 berasal dari pengalihan saham Pemerintah Provinsi Jateng pada PT SPHC sebesar Rp10.223.766.000,00 atau setara sebanyak 10.200 lembar saham dan sebesar Rp14.776.234.000,00 atas pengalihan ekuitas dari PT SPHC yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat RUPS LB PT SPHC Nomor 68 dan RUPS LB PT JPEN (Perseroda) Nomor 69 tanggal 12 November 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn). c. Cadangan PT SPHC posisi sebelum 12 November 2020 atau sebelum menjadi anak perusahaan PT JPEN (Perseroda) adalah hak pemegang saham pada saat itu, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Yakekar (proporsional sesuai proporsi saham). Cadangan PT SPHC posisi tanggal 11 November 2020 adalah sebesar US$4.925.902,44, yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar US$4.704.729,42 dan hak Yakekar sebesar US$221.173,02. Cadangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dialihkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT JPEN sebesar US$ 1.029.272,36 atau Rp14.776.234.000,00 (kurs Rp.14.356/ US$ 1 sesuai kurs yang berlaku pada saat realisasi), sehingga sisa cadangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp US$3.675.457,06 atau Rp57.307.726.479,52 (kurs Rp.15.592,00/ US$ 1 sesuai hasil Laporan Keuangan Audited PT SPHC per 31 Desember 2022). Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 539/0002283 tanggal 3 Februari 2022 telah dilakukan reklasifikasi pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 yang semula dicatat pada akun kewajiban lain-lain ke akun ekuitas dengan pertimbangan guna memenuhi ketentuan cadangan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ekuitas PT SPHC terkonsolidasi dengan PT JPEN (Perseroda) dalam laporan keuangan konsolidasi dan saham PT JPEN dimiliki 100% oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 29 (dua puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah diantaranya adalah PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan pada RUPS-LB tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa RUPS menyetujui Penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN) menjadi PT BKK JAWA TENGAH.

Terhitung sejak tidak diikutkannya konsolidasi, maka PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam proses untuk likuidasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PD BKK PRINGSURAT
   - ✓ Berhenti Operasional dikarenakan tidak mempunyai likuiditas
   - ✓ Performa keuangan berhenti per 29 Juni 2019 (audited)

- ✓ Nilai ekuitas PD Pringsurat berdasarkan laporan keuangan per 29 Juni 2019 sebesar (Rp119.703.975.952)

b. PD BKK KLATEN
   - ✓ Beroperasional secara terbatas dan fokus untuk proses likuidasi serta menjaga kepercayaan nasabah;
   - ✓ Secara bertahap mengurangi jumlah pegawai dan beroreintasi pada efisiensi biaya dan menjaga posisi likuiditas.
   - ✓ Performa keuangan masih tercatat periodik dan tiap tahun dilakukan audit.
   - ✓ Nilai ekuitas PD Klaten berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp31.465.592.587)

Sampai dengan tanggal pemeriksaan, pada tanggal 16 Maret 2023 telah diundangkan Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, namun belum diundangkan Pergub untuk petunjuk pelaksanaannya. Klausul pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dituangkan dalam pasal 76A.

Sebagai tindak lanjut telah dibuat draft Pergub tentang Pembubaran Dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten serta draft Tim Pembubaran dan Likuidasi serta penyusunan SOP.

Berdasarkan Hasil rapat paparan dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2022 terkait penyelesaian permasalahan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten Bahwa penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten diputuskan menggunakan opsi penyehatan yang memiliki tujuan untuk:

a. Penyelamatan simpanan/tabungan masyarakat/nasabah yang ada di PD BKK Pringsurat dan Klaten;
b. Terdapat potensi pergerakan ekonomi atau perputaran ekonomi sebesar penyertaan modal dan simpanan masyarakat;
c. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemprov. Jateng dan BUMD lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2022, kami telah mengadakan rapat dan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Jateng dan OJK Regional 3 Jateng dan DIY dengan pembahasan terkait:

a. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah, dengan ketentuan:
   1) Memberlakukan kembali (merubah) Pasal 79 Perda 4/2017 tentang Pembentukan BPR BKK Jawa Tengah sebagai dasar hukum pendirian PD BKK Pringsurat dan Klaten dengan:
      a) Menghapuskan klausul pembubaran atas 2 PD BKK (pasal 76A);
      b) Menambahkan klausul penyehatan atas 2 PD BKK;
      c) Menambahkan klausul penyertaan modal/suntikan modal dalam rangka penyehatan;
   2) Menambahkan klausul tentang status PD BKK setelah disehatkan menjadi BPR melalui merger dengan PT BPR BKK Jateng atau menjadi BPR yang mandiri.
b. Perubahan Perda 10/2019 Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMN, dan Pihak Ketiga dengan menambahkan penyertaan modal kepada PD BKK Pringsurat dan Klaten.

Telah mengajukan perubahan Peraturan Daerah kepada Bampeperda DPRD melalui Surat Sekretaris Daerah:

a. Surat Nomor 180/0012294 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Tahun 2022
b. Surat Nomor 180/0003545 tanggal 27 Februari 2023 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Tahun 2023

Untuk mengajukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMD, dan Pihak Ketiga.

Dengan terbitnya Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan di tanggal 12 Januari 2023, maka pada tanggal 21 Maret 2023 kami melakukan audensi dengan DPIP OJK KR 3 DIY & Yogyakarta untuk berdiskusi tentang peluang penggabungan dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan BPR BKK setempat guna percepatan penyelesaian dengan berpedoman pada UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 28A pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa BPR dapat melakukan Penggabungan dengan lembaga keuangan mikro. Dalam hal ini, OJK akan melakukan koordinasi internal untuk mengakomodir usulan penggabungan dari Pemprov Jateng.

Pada tanggal 12 Maret 2020, PT KIW mengajukan surat nomor: 44/S/KIW/3/2020 perihal Pengajuan Permohonan Penyertaan Modal Negara kepada Wakil Menteri II BUMN untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah. Pada tanggal 06 Juli 2020, Menteri BUMN memberikan surat nomor: S-47/MBU/07/2020 kepada Menteri Keuangan yang berisi tentang Usulan Penambahan PMN Tunai pada BUMN dari APBN TA 2021 kepada PT KIW (Persero) sebesar Rp 1,5 T untuk Mendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Industri Batang Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 26 Oktober 2020, terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, dimana dalam UU tersebut, PT KIW menjadi salah satu penerima dana tambahan PMN sebesar Rp977 Milyar. Pada tanggal 28 Mei 2021, Ditandatanganinya Kajian bersama penambahan penyertaan modal negara pada perusahaan perseroan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021 oleh Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada tanggal 30 Agustus 2021, Terbit Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT KIW. Pada tanggal 30 September 2021, dilakukan valuasi saham dengan hasil laporan nomor 01001/2.0041-03/BS/03/0566/1/IX/2021 yang dilaksanakan oleh KJPP Dasa'at Yudhistira & Rekan. Nilai saham per lembar Rp15.355.450,-. Sehingga menyebabkan perubahan kepemilikan saham, yang mulanya Republik Indonesia 51,09%, Provinsi Jawa Tengah 40,39% dan Kabupaten Cilacap 8,52% menjadi Republik Indonesia 85,87%, Provinsi Jawa Tengah 11,67% dan Kabupaten Cilacap 2,46%. Pada tanggal 17 Desember 2021, Dilaksanakan RUPS LB PT KIW secara sirkuler untuk memutuskan harga per lembar saham dan Perubahan AD ART. No. S-933/MBU/12/2021, 539/0017754, 538.3/08882/06 tanggal 17 Desember 2021

5.3.1.3 Aset Tetap **Rp26.085.962.628.082,34**

Aset Tetap sebesar Rp26.085.962.628.082,34 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.362.173.533.902,30 mengalami **penurunan** sebesar (Rp276.210.905.819,96) atau (1,05%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah	13.198.047.275.028,00	13.583.627.731.544,00
2	Peralatan dan Mesin	8.329.364.755.485,00	7.529.773.129.665,00
3	Gedung dan Bangunan	8.861.709.983.162,00	7.920.921.189.200,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	11.173.745.673.192,00	10.585.831.733.218,00
5	Aset Tetap Lainnya	976.375.566.548,00	1.472.453.852.706,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	242.550.742.201,00	788.310.129.085,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(16.695.831.367.533,66)	(15.518.744.231.515,70)
	Jumlah	**26.085.962.628.082,34**	**26.362.173.533.902,30**

Nilai Aset tetap setelah dilakukan penyusutan sebesar (Rp16.695.831.367.533,66) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.382.201.228.019,60)	(5.837.047.301.241,31)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.269.311.205.958,22)	(2.145.263.849.524,04)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.041.836.432.320,21)	(7.534.456.813.217,39)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.482.501.235,63)	(1.976.267.532,97)
	Jumlah	**(16.695.831.367.533,66)**	**(15.518.744.231.515,70)**

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	41.880.917.765.418
Penambahan	
Belanja Modal	1.710.800.501.266
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	82.397.766.906
Hibah	187.552.302.153
Hasil Usaha Mandiri	1.120.821.203
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	394.847.910.002
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	25.184.657.393
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	25.235.018
Koreksi	867.284.806.996
Jumlah	**3.319.638.725.164**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	50.424.724.227
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	394.847.910.002
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	1.209.758.214.327
Koreksi Belanja Modal	12.218.118.973
Koreksi Belanja Hutang	808.557.474
Koreksi Tahun Lalu	808.557.474
Jumlah	**2.418.762.494.966**
Grand Total	**42.781.793.995.616**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2022.
b. Belanja Hutang adalah aset tetap yang diterima dari pengadaan aset tahun 2022 akan tetapi pelunasan pembayannya dilaksanakan tahun depan.
c. Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2021 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
d. Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
e. Hasil Usaha Mandiri adalah aset yang dibeli dari Dana Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Khusus Negeri
f. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
g. Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
h. Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel adalah aset ekstrakomtabel yang dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang atau aset tetap dikarenakan pemeliharaan sehingga meningkatkan nilai aset.
i. Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :
a. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
b. Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
c. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
d. Koreksi Belanja Modal pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari jenis belanja lainnya.
e. Koreksi Belanja Hutang pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari tahun sebelumnya dan baru dibayarkan pada tahun selanjutnya.
f. Koreksi Tahun Lalu adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

5.3.1.3.1 Tanah **Rp13.198.047.275.028,00**

Tanah sebesar Rp13.198.047.275.028,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.583.627.731.544,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp385.580.456.516,00) atau (2,84%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Tanah Persil	6.373.166.721.404,00	6.387.934.879.397,00
2	Tanah Non Persil	1.531.744.068.918,00	1.502.784.828.568,00
3	Lapangan	5.293.136.484.706,00	5.692.908.023.579,00
	Jumlah	**13.198.047.275.028,00**	**13.583.627.731.544,00**

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	13.583.627.731.544
Penambahan	
Belanja Modal	17.204.443.173
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	94.493.000
Hibah	11.513.214.600
Hasil Usaha Mandiri	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	30.010.859
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	21.984.856.500
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	70.112.399.778
Jumlah	**136.935.417.910**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	15.996.000.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	30.010.859
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	478.589.593.317
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	-
Jumlah	**522.515.874.426**
Grand Total	**13.198.047.275.028**

5.3.1.3.1.1 Tanah Persil **Rp6.373.166.721.404,00**

Tanah Persil sebesar Rp6.373.166.721.404,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.387.934.879.397,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.768.157.993,00) atau (0,23%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.881.249.195.310,00	1.866.272.554.798,00
2	Dinas Kesehatan	60.100.940.000,00	60.325.940.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	110.237.763.000,00	110.237.763.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	104.730.000.000,00	104.730.000.000,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	41.950.458.143,00	41.950.458.143,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	656.775.000.000,00	656.775.000.000,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	90.572.000.000,00	90.572.000.000,00
8	RSJD Surakarta	50.269.000.000,00	50.269.000.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	14.192.500.000,00	14.192.500.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	114.065.417.812,00	110.494.217.813,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.477.590.149.836,00	1.480.636.355.836,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.513.941.740,00	1.513.941.740,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.076.000.000,00	3.076.000.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.011.143.000,00	11.786.143.000,00
15	Dinas Sosial	130.756.035.440,00	131.305.435.440,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	89.253.973.000,00	89.336.053.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	834.078.750,00	834.078.750,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	57.793.550.000,00	57.793.550.000,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	599.040.000,00	599.040.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.849.500.000,00	7.849.500.000,00
22	Dinas Perhubungan	87.867.951.625,00	88.816.801.625,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	6.764.500.000,00	12.286.500.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	57.532.777.500,00	56.262.234.500,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	113.254.096.160,00	113.499.696.160,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	178.780.147.130,00	178.780.147.130,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	361.218.773.504,00	361.218.773.504,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.493.720.000,00	3.493.720.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.444.664.587,00	22.444.664.587,00
33	SKPKD	-	24.600.447.789,00
34	Sekretariat Daerah	157.890.240.000,00	162.295.740.000,00
35	Sekretariat DPRD	12.678.250.000,00	12.678.250.000,00
36	Inspektorat	-	120.185.000.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	120.185.000.000,00	71.532.500.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	108.850.722.582,00	108.850.722.582,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	76.346.042.285,00	6.427.650.000,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	6.427.650.000,00	124.074.000.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	124.074.000.000,00	7.015.000.000,00
42	Badan Penghubung	7.015.000.000,00	-
	Jumlah	**6.373.166.721.404,00**	**6.387.934.879.397,00**

5.3.1.3.1.2 Tanah Non Persil **Rp1.531.744.068.918,00**

Tanah Non Persil sebesar Rp1.531.744.068.918,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.502.784.828.568,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp28.959.240.350 atau 1,93% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	36.804.904.059,00	36.819.904.059,00
2	Dinas Kesehatan	998.800.000,00	998.800.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	509.250.000,00	509.250.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	56.867.647.350,00	56.867.647.350,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	662.632.861.258,00	633.495.634.258,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00
7	Dinas Sosial	1.393.475.000,00	2.839.565.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.016.700.000,00	1.016.700.000,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	6.000.000,00	-
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.045.100.000,00	11.045.100.000,00
11	Dinas Perhubungan	1.848.750.000,00	1.848.750.000,00
12	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.050.622.500,00	4.050.622.500,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	53.824.295.000,00	55.652.295.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	658.015.243.751,00	654.910.140.401,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22.376.100.000,00	22.376.100.000,00
16	SKPKD	-	152.500.000,00
17	Sekretariat Daerah	4.301.820.000,00	4.301.820.000,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	152.500.000,00	-
19	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**1.531.744.068.918,00**	**1.502.784.828.568,00**

5.3.1.3.1.3 Lapangan Rp5.293.136.484.706,00

Tanah Persil sebesar Rp5.293.136.484.706,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.692.908.023.579,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp399.771.538.873) atau (7,02%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	29.751.772.578,00	29.917.938.500,00
2	RSUD Tugurejo Semarang	3.998.392.532,00	3.998.392.532,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.377.500.540.256,00	2.359.845.030.072,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.762.471.183.332,00	3.180.063.715.397,00
5	Dinas Sosial	1.066.019.500,00	1.058.297.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.560.000.000,00	2.560.000.000,00
7	Dinas Perhubungan	104.102.924.008,00	103.778.997.078,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	11.464.344.000,00	11.464.344.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.500.000,00	7.500.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	213.808.500,00	213.808.500,00
	Jumlah	**5.293.136.484.706,00**	**5.692.908.023.579,00**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin Rp8.329.364.755.485,00

Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.329.364.755.485,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.529.773.129.665,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp799.591.625.820,00 atau 10,62% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Alat Besar	351.321.577.260,00	338.211.070.551,00
2	Alat Angkutan	653.349.026.837,00	615.586.090.634,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	415.631.226.789,00	391.953.867.089,00
4	Alat Pertanian	68.955.715.993,00	66.577.755.181,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.787.942.525.428,00	1.620.620.204.759,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	301.206.565.102,00	277.124.071.195,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.292.885.496.633,00	1.996.861.602.216,00
8	Alat Laboratorium	668.412.614.258,00	623.224.673.104,00
9	Alat Persenjataan	6.447.589.315,00	7.449.588.365,00
10	Komputer	1.564.479.261.193,00	1.409.197.679.158,00
11	Alat Eksplorasi	468.093.022,00	468.093.022,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
12	Alat Pengeboran	156.971.298,00	156.971.298,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	678.087.150,00	644.457.150,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	21.180.000,00	21.180.000,00
15	Alat Keselamatan Kerja	5.813.816.540,00	4.521.693.912,00
16	Alat Peraga	125.535.182.616,00	107.782.725.419,00
17	Peralatan Proses/Produksi	3.575.279.234,00	2.641.915.987,00
18	Rambu-rambu	23.368.160.908,00	22.268.797.932,00
19	Peralatan Olahraga	59.116.385.909,00	44.460.692.693,00
	Jumlah	**8.329.364.755.485,00**	**7.529.773.129.665,00**

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	7.529.773.129.665
Penambahan	
Belanja Modal	790.534.309.162
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	6.266.808.571
Hibah	74.337.745.295
Hasil Usaha Mandiri	1.099.821.203
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	209.310.084.567
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	1.370.804.593
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	305.000
Koreksi	20.000.671.725
Jumlah	**1.121.167.531.411**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	18.246.981.295
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	208.209.710.695
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	80.960.492.175
Koreksi Belanja Modal	8.612.992.225
Koreksi Belanja Hutang	782.617.474
Koreksi Tahun Lalu	782.617.474
Jumlah	**321.575.905.591**
Grand Total	**8.329.364.755.485**

5.3.1.3.2.1 Alat Besar — Rp351.321.577.260,00

Alat Besar sebesar Rp351.321.577.260,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp338.211.070.551,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.110.506.709,00 atau 3,88% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	24.683.272.533,00	21.231.869.193,00
2	Dinas Kesehatan	7.097.290.825,00	7.122.522.799,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	19.272.499.070,00	19.284.739.070,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	21.208.346.104,00	26.043.127.104,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
5	RSUD Tugurejo Semarang	10.231.384.591,00	10.203.146.989,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.358.243.889,00	3.366.243.889,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	6.511.024.900,00	6.504.376.000,00
8	RSJD Surakarta	3.601.879.730,00	2.779.445.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.641.566.715,00	1.676.342.715,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	135.054.010.458,00	123.745.211.306,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	25.538.301.615,00	25.549.291.615,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	575.080.900,00	526.280.900,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	640.150.000,00	640.150.000,00
15	Dinas Sosial	1.521.537.298,00	1.451.251.798,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.575.199.050,00	7.709.819.750,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	312.979.998,00	316.916.998,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	622.400.000,00	637.400.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	573.197.768,00	573.197.768,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	356.814.500,00	331.895.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.258.167.018,00	1.258.167.018,00
22	Dinas Perhubungan	1.980.734.500,00	2.004.191.741,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.611.911.900,00	2.134.235.500,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	1.371.192.000,00	1.355.770.000,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	621.842.250,00	635.867.250,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.174.513.819,00	3.111.581.219,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.065.823.260,00	4.065.823.260,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.856.804.990,00	3.879.292.090,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.427.341.026,00	7.427.341.026,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	681.889.100,00	671.120.762,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.482.596.500,00	3.450.563.000,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.470.288.135,00	6.605.974.083,00
33	SKPKD	-	665.315.500,00
34	Sekretariat Daerah	12.871.327.816,00	12.663.522.251,00
35	Sekretariat DPRD	1.401.092.100,00	1.410.045.100,00
36	Inspektorat	201.852.000,00	208.302.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.362.443.500,00	3.141.937.500,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	16.215.563.656,00	16.331.627.517,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.282.548.860,00	3.632.655.360,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	1.505.960.000,00	810.245.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.615.706.986,00	2.567.467.580,00
42	Badan Penghubung	486.797.900,00	486.797.900,00
	Jumlah	**351.321.577.260,00**	**338.211.070.551,00**

5.3.1.3.2.2 Alat Angkutan **Rp653.349.026.837,00**

Alat Angkutan sebesar Rp653.349.026.837,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp615.586.090.634,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.762.936.203,00 atau 6,13% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	144.593.460.660,00	127.358.836.906,00
2	Dinas Kesehatan	33.404.114.918,00	33.952.288.818,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	8.770.923.241,00	8.270.908.756,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	8.809.221.263,00	8.736.721.263,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	5.963.570.103,00	5.166.630.303,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	7.579.840.544,00	6.730.623.544,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	5.329.711.160,00	4.973.089.750,00
8	RSJD Surakarta	8.153.576.559,00	8.153.576.559,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	5.351.226.742,00	5.334.986.742,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	24.357.139.497,00	18.577.338.497,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	21.297.196.951,00	9.564.086.951,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.156.418.720,00	4.156.418.720,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.361.706.752,00	5.699.203.947,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
15	Dinas Sosial	17.495.709.411,00	16.817.098.411,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.052.083.801,00	22.907.651.101,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.010.526.292,00	11.005.626.292,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.744.674.268,00	2.744.674.268,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.322.268.997,00	20.607.507.585,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	2.912.707.514,00	2.912.707.514,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.922.028.223,00	2.922.028.223,00
22	Dinas Perhubungan	28.733.634.421,00	30.533.434.421,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	8.274.440.673,00	8.274.440.673,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	2.731.000.626,00	2.731.000.626,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.924.162.144,00	3.924.162.144,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.693.887.082,00	5.223.477.489,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.470.636.345,00	5.383.636.345,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.981.172.283,00	21.291.549.383,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.223.945.317,00	14.309.556.092,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.823.985.643,00	6.791.435.643,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.007.604.778,00	8.210.849.278,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.666.061.245,00	6.698.961.245,00
33	SKPKD	-	15.900.859.014,00
34	Sekretariat Daerah	60.338.417.523,00	59.797.998.638,00
35	Sekretariat DPRD	26.328.276.513,00	24.190.561.513,00
36	Inspektorat	4.782.892.291,00	4.782.892.291,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.934.008.793,00	5.934.008.793,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	38.600.418.366,00	37.512.474.616,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.269.046.816,00	8.734.170.918,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
40	Badan Kepegawaian Daerah	3.893.204.721,00	3.660.554.721,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.795.029.838,00	2.633.029.838,00
42	Badan Penghubung	9.204.437.403,00	9.390.374.403,00
	Jumlah	**653.349.026.837,00**	**615.586.090.634,00**

5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur Rp415.631.226.789,00

Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp415.631.226.789,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp391.953.867.089,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.677.359.700,00 atau 6,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	357.556.014.850,00	334.615.985.773,00
2	Dinas Kesehatan	2.047.463.400,00	1.834.513.400,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.865.977.493,00	1.865.977.493,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.276.725.191,00	1.822.857.208,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	634.203.769,00	575.942.044,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	605.247.475,00	594.299.250,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	47.923.000,00	47.923.000,00
8	RSJD Surakarta	1.250.979.890,00	1.236.066.140,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.506.379.275,00	1.504.009.275,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	635.027.282,00	556.025.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.494.756.002,00	2.438.923.002,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	71.400.000,00	-
15	Dinas Sosial	401.490.300,00	397.683.300,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.157.890.000,00	1.008.316.900,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.936.456.730,00	3.892.906.730,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.276.857.377,00	4.223.679.377,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	101.388.000,00	46.700.000,00
22	Dinas Perhubungan	5.095.533.200,00	5.095.533.200,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	29.542.000,00	26.242.000,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	83.582.005,00	-
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	-
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	126.100.000,00	45.300.000,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.056.129.956,00	2.056.129.956,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.222.142.295,00	1.113.103.295,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.140.357.900,00	3.140.357.900,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	921.659.656,00	746.936.106,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.539.593.360,00	7.299.023.150,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.915.150.283,00	15.069.726.090,00
34	Sekretariat Daerah	131.476.000,00	131.476.000,00
36	Inspektorat	9.650.000,00	71.400.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.951.600,00	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	474.850.000,00	474.850.000,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.328.500,00	12.331.500,00
42	Badan Penghubung	-	9.650.000,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
Jumlah	**415.631.226.789,00**	**391.953.867.089,00**

5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian Rp68.955.715.993,00

Alat Pertanian sebesar Rp68.955.715.993,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66.577.755.181,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.377.960.812,00 atau 3,57% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	19.239.852.265,00	17.291.219.053,00
2	Dinas Kesehatan	11.600.000,00	11.600.000,00
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	43.982.500,00	43.982.500,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	292.492.795,00	292.492.795,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	126.640.630,00	126.640.630,00
6	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	14.996.100,00	-
7	RSJD Surakarta	11.317.500,00	-
8	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	7.330.060,00	7.330.060,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	38.000.000,00	38.000.000,00
10	Dinas Sosial	15.485.000,00	15.485.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.148.239.925,00	2.148.239.925,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	564.489.500,00	540.589.500,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	1.472.744.070,00	1.322.669.070,00
14	Dinas Koperasi dan UKM	26.295.000,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.319.516.500,00	1.221.068.500,00
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	34.496.546.094,00	34.496.546.094,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.070.638.054,00	8.940.047.054,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.750.000,00	39.750.000,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	26.295.000,00
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00
21	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**68.955.715.993,00**	**66.577.755.181,00**

5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.787.942.525.428,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp1.787.942.525.428,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.620.620.204.759,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp167.322.320.669,00 atau 10,32% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	993.626.059.669,00	909.645.074.285,00
2	Dinas Kesehatan	39.959.891.678,00	37.555.894.848,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	54.705.398.893,00	47.432.484.413,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	69.524.878.012,00	56.179.119.877,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	45.239.158.421,00	43.015.795.371,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	17.051.279.397,00	14.165.822.376,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	18.030.415.930,00	17.811.929.533,00
8	RSJD Surakarta	32.054.063.480,00	27.301.277.854,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	15.362.648.568,00	14.518.450.265,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	11.147.947.982,00	6.393.007.760,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	9.281.975.361,00	8.646.029.711,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.392.265.652,00	3.126.866.512,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.517.109.774,00	2.517.109.774,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.055.346.892,00	3.024.120.542,00
15	Dinas Sosial	22.737.249.966,00	21.988.982.873,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.946.382.339,00	7.022.761.639,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.923.261.732,00	14.589.209.603,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	2.121.593.475,00	2.056.519.063,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.814.793.945,00	15.248.615.626,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	6.734.713.156,00	4.133.830.769,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.674.079.627,00	5.626.127.627,00
22	Dinas Perhubungan	8.457.640.844,00	8.393.566.797,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	10.970.406.656,00	6.719.825.529,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	10.050.933.467,00	8.736.274.002,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.064.213.500,00	3.050.188.500,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	36.571.039.019,00	21.569.323.718,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.536.986.998,00	13.458.208.198,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.403.450.019,00	9.797.660.601,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.163.012.425,00	18.013.322.425,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.252.423.748,00	8.232.896.753,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	14.395.286.830,00	13.075.789.534,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.100.602.344,00	19.276.424.711,00
33	SKPKD	-	4.932.394.010,00
34	Sekretariat Daerah	45.050.268.379,00	44.414.186.281,00
35	Sekretariat DPRD	53.492.201.173,00	43.582.864.107,00
36	Inspektorat	4.827.549.250,00	4.789.236.400,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.415.758.063,00	8.826.098.331,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	65.085.310.549,00	63.295.146.178,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.559.819.246,00	25.913.728.829,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	7.137.046.665,00	6.766.869.691,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.550.500.420,00	19.411.301.536,00
42	Badan Penghubung	5.957.561.884,00	6.365.868.307,00
	Jumlah	**1.787.942.525.428,00**	**1.620.620.204.759,00**

5.3.1.3.2.6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar **Rp301.206.565.102,00**

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp301.206.565.102,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp277.124.071.195,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp24.082.493.907,00 atau 8,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	174.536.943.233,00	160.400.715.633,00
2	Dinas Kesehatan	6.184.631.209,00	6.010.506.948,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	4.837.101.723,00	4.456.920.223,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	7.341.456.736,00	4.122.997.736,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	4.013.726.213,00	3.920.907.775,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.704.475.238,00	1.646.717.688,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	823.965.546,00	1.194.690.455,00
8	RSJD Surakarta	1.352.698.072,00	1.245.209.622,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	637.353.603,00	610.161.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.208.527.910,00	534.251.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.888.696.650,00	1.859.604.650,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	672.564.496,00	600.255.496,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	641.190.000,00	641.190.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	761.478.000,00	719.325.000,00
15	Dinas Sosial	506.649.784,00	469.037.784,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.315.047.449,00	2.315.047.449,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.120.001.631,00	2.114.108.085,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	229.074.850,00	335.349.850,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.476.928.966,00	3.402.973.416,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	823.304.038,00	816.960.000,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.777.674.383,00	1.777.674.383,00
22	Dinas Perhubungan	2.387.394.176,00	2.451.729.176,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	12.010.252.184,00	10.556.303.951,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	1.612.035.947,00	1.351.961.500,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	756.813.320,00	756.813.320,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	5.802.218.030,00	2.352.827.678,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.687.166.256,00	4.687.166.256,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.762.063.064,00	1.732.084.064,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	4.210.475.900,00	4.141.264.710,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	898.144.700,00	658.135.700,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.408.551.827,00	4.179.091.128,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.326.453.158,00	1.342.619.035,00
33	SKPKD	-	108.911.000,00
34	Sekretariat Daerah	22.227.705.207,00	23.132.250.746,00
35	Sekretariat DPRD	4.728.800.402,00	4.238.137.402,00
36	Inspektorat	940.908.165,00	940.908.165,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.375.204.806,00	1.355.914.806,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.155.733.339,00	6.118.148.739,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.256.745.310,00	2.303.054.757,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	397.601.656,00	384.059.656,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.007.349.198,00	3.746.253.848,00
42	Badan Penghubung	1.401.458.727,00	1.391.830.865,00
	Jumlah	**301.206.565.102,00**	**277.124.071.195,00**

5.3.1.3.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp2.292.885.496.633,00

Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.292.885.496.633,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.996.861.602.216,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp296.023.894.417,00 atau 14,82% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	12.241.297.260,00	11.047.570.674,00
2	Dinas Kesehatan	68.941.981.043,00	64.713.018.276,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	893.552.624.331,00	660.309.496.493,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	609.666.846.447,00	571.464.416.490,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	346.729.222.818,00	331.152.864.736,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	146.424.543.871,00	147.089.319.141,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	73.729.461.843,00	73.041.609.618,00
8	RSJD Surakarta	58.979.104.753,00	57.973.650.153,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	78.413.061.239,00	76.320.081.074,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.351.032,00	-
11	Dinas Sosial	946.452.321,00	950.557.321,00
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.779.600,00	190.779.600,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	541.292.525,00	541.292.525,00
14	Dinas Perhubungan	8.150.000,00	-
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.875.000,00	5.875.000,00
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	20.100.000,00	20.100.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.277.500,00	8.277.500,00
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.100.000,00	7.100.000,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.226.418.800,00	799.111.000,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.500.000,00	2.500.000,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	112.733.635,00	109.460.000,00
22	Sekretariat Daerah	204.665.000,00	204.665.000,00
23	Sekretariat DPRD	312.215.000,00	294.215.000,00
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	800.000,00	-
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	150.065.000,00	150.065.000,00
26	Badan Kepegawaian Daerah	216.001.615,00	216.001.615,00
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	249.576.000,00	249.576.000,00
28	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**2.292.885.496.633,00**	**1.996.861.602.216,00**

5.3.1.3.2.8 Alat Laboratorium **Rp668.412.614.258,00**

Alat Laboratorium sebesar Rp668.412.614.258,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp623.224.673.104,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp45.187.941.154,00 atau 7,25% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	425.879.432.569,00	389.879.033.453,00
2	Dinas Kesehatan	47.725.469.531,00	45.939.357.291,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	23.907.897.339,00	23.537.996.839,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	14.650.970.858,00	12.690.095.504,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	23.761.802.380,00	25.632.948.022,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.670.851.967,00	2.584.797.503,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.554.708.075,00	3.554.708.075,00
8	RSJD Surakarta	3.467.541.051,00	3.370.785.576,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	4.707.068.097,00	4.598.077.097,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	11.623.394.409,00	9.474.071.395,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.881.394.955,00	2.671.294.155,00
12	Dinas Sosial	95.285.000,00	95.285.000,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.090.700,00	65.446.700,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.112.204.743,00	9.111.382.743,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.360.275.195,00	15.263.644.395,00
16	Dinas Ketahanan Pangan	6.106.871.272,00	5.893.509.922,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	44.715.000,00	44.715.000,00
18	Dinas Perhubungan	163.343.000,00	163.343.000,00
19	Dinas Koperasi dan UKM	39.882.050,00	-
20	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	203.850.000,00	198.650.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90.230.000,00	90.230.000,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.864.418.734,00	8.648.905.084,00
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.065.629.415,00	9.065.629.415,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.780.068.193,00	15.873.383.213,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.602.510.552,00	6.632.420.000,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.264.639.573,00	27.421.894.122,00
27	Sekretariat Daerah	-	50.000.000,00
28	Inspektorat	122.022.000,00	122.022.000,00
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	23.750.000,00	23.750.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	527.297.600,00	527.297.600,00
31	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**668.412.614.258,00**	**623.224.673.104,00**

5.3.1.3.2.9 Alat Persenjataan Rp6.447.589.315,00

Alat Persenjataan sebesar Rp6.447.589.315,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.449.588.365,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.001.999.050,00) atau (13,45%). Aset tetap berupa persenjataan ini antara lain terdiri atas senjata api, senjata non senjata api, senjata sinar dan alat khusus kepolisian dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.858.155.860,00	3.649.689.360,00
2	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	187.829.055,00	187.829.055,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.175.000,00	6.175.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.953.500,00	5.953.500,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	179.710.000,00	179.710.000,00
6	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.659.729.175,00	1.659.729.175,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	144.900.000,00	144.900.000,00
8	Dinas Perhubungan	31.204.725,00	31.204.725,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	25.000.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	175.600.000,00	175.600.000,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	52.000.000,00	52.000.000,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.882.000,00	34.616.000,00
13	Sekretariat Daerah	94.300.000,00	1.265.031.550,00
14	Inspektorat	8.500.000,00	8.500.000,00
15	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	23.650.000,00	23.650.000,00
16	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**6.447.589.315,00**	**7.449.588.365,00**

5.3.1.3.2.10 Komputer Rp1.564.479.261.193,00

Komputer sebesar Rp1.564.479.261.193,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.409.197.679.158,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp155.281.582.035,00 atau 11,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.144.750.817.916,00	1.046.451.880.482,00
2	Dinas Kesehatan	16.552.475.059,00	15.491.209.905,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	25.422.945.208,00	20.562.937.196,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	39.652.246.334,00	32.163.433.246,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	8.635.322.414,00	6.581.872.416,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.017.251.913,00	3.442.946.723,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	3.357.693.009,00	4.258.351.150,00
8	RSJD Surakarta	5.846.833.220,00	5.377.749.036,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	3.594.871.041,00	3.226.796.571,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.559.323.765,00	4.297.802.665,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.666.061.173,00	5.607.476.173,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.043.312.799,00	1.571.857.489,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.729.901.470,00	1.729.901.470,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.729.560.790,00	1.577.698.790,00
15	Dinas Sosial	6.707.676.846,00	5.948.075.221,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.334.356.484,00	2.334.356.484,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.059.062.945,00	6.919.482.945,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	971.579.533,00	976.359.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	9.550.051.969,00	9.155.002.433,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	2.915.619.665,00	2.690.972.500,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.251.971.347,00	3.251.971.347,00
22	Dinas Perhubungan	5.189.294.129,00	5.485.479.131,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	91.828.310.693,00	69.912.260.941,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	2.077.214.963,00	1.878.999.386,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	3.695.973.511,00	3.608.373.511,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.740.120.612,00	4.484.630.706,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.554.799.446,00	5.531.799.446,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.123.135.999,00	3.825.728.999,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.235.505.026,00	6.164.133.276,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.206.065.375,00	2.094.272.275,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.080.238.748,00	6.509.296.029,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.830.602.536,00	7.427.086.587,00
33	SKPKD	-	344.055.995,00
34	Sekretariat Daerah	17.495.699.646,00	16.338.750.531,00
35	Sekretariat DPRD	13.217.592.999,00	9.755.912.999,00
36	Inspektorat	2.320.723.418,00	2.217.523.418,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.020.667.845,00	5.228.298.745,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	57.368.228.552,00	51.370.114.852,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.707.524.131,00	9.323.485.838,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	7.837.275.997,00	7.499.492.397,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.150.221.600,00	5.128.719.787,00
42	Badan Penghubung	1.451.131.067,00	1.451.131.067,00
	Jumlah	**1.564.479.261.193,00**	**1.409.197.679.158,00**

5.3.1.3.2.11 Alat Eksplorasi **Rp468.093.022,00,00**

Alat Eksplorasi sebesar Rp468.093.022,00,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	445.923.022,00	445.923.022,00
2	Dinas Kesehatan	1.800.000,00	1.800.000,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.370.000,00	20.370.000,00
	Jumlah	**468.093.022,00**	**468.093.022,00**

5.3.1.3.2.12 Alat Pengeboran Rp156.971.298,00

Alat Pengeboran sebesar Rp156.971.298,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	156.971.298,00	156.971.298,00
	Jumlah	**156.971.298,00**	**156.971.298,00**

5.3.1.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Rp678.087.150,00

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp678.087.150,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp644.457.150,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp33.630.000,00 atau 5,22% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	599.713.950,00	566.083.950,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	78.373.200,00	78.373.200,00
	Jumlah	**678.087.150,00**	**644.457.150,00**

5.3.1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi Rp21.180.000,00,00

Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp21.180.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.180.000,00	21.180.000,00
	Jumlah	**21.180.000,00**	**21.180.000,00**

5.3.1.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja Rp5.813.816.540,00

Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp5.813.816.540,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.521.693.912,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.292.122.628,00 atau 28,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	4.625.111.949,00	3.786.719.712,00
2	Dinas Kesehatan	38.375.000,00	29.125.000,00
3	RSJD Surakarta	48.576.000,00	48.576.000,00
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	526.500.000,00	445.500.000,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	42.033.200,00	42.033.200,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.940.000,00	-
7	Dinas Ketahanan Pangan	14.740.000,00	14.740.000,00
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	390.665.891,00	-
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	24.875.000,00	-
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.999.500,00	-
11	SKPKD	-	135.000.000,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
12	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.000.000,00	-
14	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**5.813.816.540,00**	**4.521.693.912,00**

5.3.1.3.2.16 Alat Peraga Rp125.535.182.616,00

Alat Peraga sebesar Rp125.535.182.616,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp107.782.725.419,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.752.457.197,00 atau 16,47% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	123.289.659.422,00	105.631.969.525,00
2	Dinas Kesehatan	38.117.300,00	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.335.877.692,00	1.335.877.692,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	235.505.882,00	235.505.882,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	26.664.000,00	26.664.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.825.000,00	99.825.000,00
7	Dinas Sosial	297.815.000,00	241.165.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	211.718.320,00	211.718.320,00
9	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**125.535.182.616,00**	**107.782.725.419,00**

5.3.1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi Rp3.575.279.234,00

Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp3.575.279.234,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.641.915.987,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp933.363.247,00 atau 35,33% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	2.806.424.234,00	1.890.747.987,00
2	Dinas Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	95.000.000,00	95.000.000,00
4	RSUD Tugurejo Semarang	67.314.000,00	66.500.000,00
5	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	422.670.000,00	422.670.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.873.000,00	-
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.948.000,00	44.948.000,00
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.550.000,00	99.550.000,00
9	Badan Penghubung		-
	Jumlah	**3.575.279.234,00**	**2.641.915.987,00**

5.3.1.3.2.18 Rambu-Rambu Rp23.368.160.908,00

Rambu-Rambu sebesar Rp23.368.160.908,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.268.797.932,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.099.362.976,00 atau 4,94% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	248.303.050,00	231.203.050,00
2	Dinas Perhubungan	23.001.302.858,00	21.928.639.882,00
3	Dinas Komunikasi dan Informasi	65.537.000,00	55.937.000,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.000.000,00	11.000.000,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.708.000,00	6.708.000,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00
	Jumlah	**23.368.160.908,00**	**22.268.797.932,00**

5.3.1.3.2.19 Alat Olahraga Rp59.116.385.909,00

Alat Olahraga sebesar Rp59.116.385.909,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp44.460.692.693,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.655.693.216,00 atau 32,96% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	16.579.777.697,00	15.642.234.759,00
2	Dinas Kesehatan	81.729.600,00	81.729.600,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	25.800.000,00	25.800.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	20.079.600,00	20.079.600,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	10.625.000,00	10.625.000,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	227.588.719,00	227.588.719,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	86.900.000,00	86.900.000,00
8	RSJD Surakarta	21.575.000,00	20.880.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	28.600.000,00	28.600.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.100.000,00	10.100.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	27.550.000,00	27.550.000,00
13	Dinas Sosial	53.095.000,00	53.095.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.000.000,00	1.000.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.300.000,00	14.300.000,00
16	Dinas Ketahanan Pangan	3.006.000,00	3.006.000,00
17	Dinas Perhubungan	8.601.440,00	8.601.440,00
18	Dinas Koperasi dan UKM	89.725.000,00	89.725.000,00
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	39.872.316.783,00	26.165.861.505,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.484.000,00	200.484.000,00
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	25.263.350,00	25.263.350,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.750.000,00	23.750.000,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	72.210.000,00	72.210.000,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	203.656.250,00	203.656.250,00
25	SKPKD	-	13.985.000,00
26	Sekretariat Daerah	223.903.000,00	223.903.000,00
27	Sekretariat DPRD	31.000.000,00	20.000.000,00
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	694.752.000,00	694.752.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.985.000,00	-
30	Badan Kepegawaian Daerah	166.152.750,00	166.152.750,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	273.959.720,00	273.959.720,00
32	Badan Penghubung	22.900.000,00	22.900.000,00
	Jumlah	**59.116.385.909,00**	**44.460.692.693,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp8.861.709.983.162,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.861.709.983.162,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.920.921.189.200,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp940.788.793.962,00 atau 11,88% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bangunan Gedung	8.684.882.903.358,00	7.765.611.327.601,00
2	Monumen	29.043.739.782,00	23.095.492.782,00
3	Bangunan Menara	5.276.623.117,00	5.276.623.117,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	142.506.716.905,00	126.937.745.700,00
	Jumlah	**8.861.709.983.162,00**	**7.920.921.189.200,00**

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	7.920.921.189.200
Penambahan	
Belanja Modal	201.905.153.897
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	66.019.058.825
Hibah	80.814.759.709
Hasil Usaha Mandiri	21.000.000
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	143.680.508.569
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	1.801.796.300
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	24.930.017
Koreksi	730.892.134.334
Jumlah	**1.238.438.916.914**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	13.279.575.263
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	6.791.154.517
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	56.020.786.105
Koreksi Belanja Modal	2.301.838.999
Koreksi Belanja Hutang	3.500.000
Koreksi Tahun Lalu	3.500.000
Jumlah	**297.650.122.952**
Grand Total	**8.861.709.983.162**

5.3.1.3.3.1 Bangunan Gedung — Rp8.684.882.903.358,00

Bangunan Gedung sebesar Rp8.684.882.903.358,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.765.611.327.601,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp919.271.575.757,00 atau 11,84% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	4.701.909.398.505,00	4.497.430.203.277,00
2	Dinas Kesehatan	105.812.548.790,00	103.701.230.594,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	473.388.361.938,00	311.970.327.973,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	298.381.270.179,00	273.475.092.976,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	163.994.821.424,00	160.840.883.162,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	91.122.480.766,00	90.499.917.873,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	79.185.308.311,00	79.407.748.861,00
8	RSJD Surakarta	44.778.088.571,00	43.091.709.152,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	51.889.665.050,00	49.693.966.688,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	150.274.374.109,00	135.560.232.609,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	20.554.497.000,00	20.554.497.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	18.452.315.000,00	18.452.315.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.587.970.308,00	6.030.845.708,00
15	Dinas Sosial	189.590.654.931,00	189.524.520.931,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.546.270.968,00	8.523.869.968,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.876.579.430,00	57.510.532.130,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	19.745.211.575,00	19.597.811.575,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	58.819.076.249,00	57.770.528.034,00
20	Dinas Ketahanan Pangan	13.002.778.268,00	13.045.267.519,00
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.642.534.037,00	10.642.534.037,00
22	Dinas Perhubungan	121.797.193.235,00	116.197.000.730,00
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	20.935.374.904,00	5.442.697.874,00
24	Dinas Koperasi dan UKM	27.223.109.352,00	38.139.551.473,00
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.491.574.985,00	7.491.574.985,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	738.362.143.456,00	235.391.292.498,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.719.853.147,00	22.719.853.147,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	93.771.228.510,00	86.632.287.616,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	135.272.123.311,00	135.301.142.478,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	88.151.146.393,00	87.904.205.956,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.102.214.833,00	40.967.739.283,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	83.206.660.711,00	82.972.998.341,00
33	SKPKD	-	178.609.636.818,00
34	Sekretariat Daerah	97.499.884.979,00	96.818.509.879,00
35	Sekretariat DPRD	31.773.112.999,00	31.773.112.999,00
36	Inspektorat	13.125.575.450,00	13.125.575.450,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20.895.824.202,00	20.069.377.002,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	239.696.865.477,00	239.380.152.167,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	247.797.625.273,00	90.908.355.606,00
40	Badan Kepegawaian Daerah	8.844.922.902,00	8.701.526.902,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	55.056.289.385,00	55.056.289.385,00
42	Badan Penghubung	13.985.855.385,00	14.064.292.885,00
	Jumlah	**8.684.882.903.358,00**	**7.765.611.327.601,00**

5.3.1.3.3.2 Monumen **Rp29.043.739.782,00**

Monumen sebesar Rp29.043.739.782,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.095.492.782,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.948.247.000,00 atau 25,76% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	11.775.501.706,00	11.433.465.706,00
2	Dinas Kesehatan	144.162.000,00	144.162.000,00
3	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	223.611.000,00	223.611.000,00
4	RSJD Surakarta	814.052.600,00	814.052.600,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.500.000,00	1.500.000,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
6	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	286.009.000,00	286.009.000,00
7	Dinas Sosial	32.619.000,00	32.619.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	106.992.570,00	106.992.570,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	322.003.450,00	322.003.450,00
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	3.653.127.820,00	3.653.127.820,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.800.000,00	7.800.000,00
12	Sekretariat DPRD	-	3.167.456.996,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.620.602.996,00	846.935.000,00
14	Badan Penghubung	2.055.757.640,00	2.055.757.640,00
	Jumlah	**29.043.739.782,00**	**23.095.492.782,00**

5.3.1.3.3.3 Bangunan Menara Rp5.276.623.117,00

Bangunan Menara sebesar Rp5.276.623.117,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	917.962.130,00	917.962.130,00
2	Dinas Perhubungan	535.357.815,00	535.357.815,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.130.315,00	301.130.315,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.486.502.857,00	3.486.502.857,00
5	SKPKD	-	1.170.000,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.170.000,00	-
8	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**5.276.623.117,00**	**5.276.623.117,00**

5.3.1.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp142.506.716.905,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp142.506.716.905,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp126.937.745.700,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp15.568.971.205,00 atau 12,27% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	68.495.763.331,00	60.145.216.499,00
2	Dinas Kesehatan	4.933.166.740,00	4.970.666.040,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	709.981.000,00	709.981.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	508.200.000,00	508.200.000,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	423.613.269,00	423.613.269,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.467.220.000,00	4.467.220.000,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	175.858.000,00	175.858.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.814.210.081,00	1.814.210.081,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	391.442.000,00	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	139.508.000,00	139.508.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.650.000,00	131.650.000,00
15	Dinas Sosial	3.027.920.500,00	2.690.008.500,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	693.305.100,00	558.577.300,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.006.826.000,00	1.694.531.000,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	367.060.000,00	367.060.000,00
22	Dinas Perhubungan	887.940.946,00	482.260.000,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
25	Dinas Komunikasi dan Informasi	793.494.572,00	-
23	Dinas Koperasi dan UKM	90.006.000,00	90.006.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	110.020.000,00	110.020.000,00
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	9.008.368.796,00	3.316.168.141,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	342.880.670,00	342.880.670,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.702.470.087,00	5.364.747.087,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.654.062.112,00	12.654.062.112,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.658.293.957,00	4.483.593.957,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	488.620.500,00	443.665.500,00
33	SKPKD	-	1.375.642.800,00
35	Sekretariat DPRD	374.062.000,00	374.062.000,00
36	Inspektorat	14.310.000,00	14.310.000,00
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	94.220.000,00	94.220.000,00
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.792.711.410,00	1.792.711.410,00
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.498.061.684,00	15.491.626.184,00
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00
	Jumlah	**142.506.716.905,00**	**126.937.745.700,00**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp11.173.745.673.192,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp11.173.745.673.192,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.585.831.733.218,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp587.913.939.974,00 atau 5,55% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	9.462.579.469.235,00	8.957.928.287.830,00
2	Bangunan Air	1.379.526.532.779,00	1.316.097.404.887,00
3	Instalasi	140.880.958.164,00	141.302.864.131,00
4	Jaringan	190.758.713.014,00	170.503.176.370,00
	Jumlah	**11.173.745.673.192,00**	**10.585.831.733.218,00**

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	10.585.831.733.218
Penambahan	
Belanja Modal	490.468.444.035
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	1.785.215.154
Hibah	16.539.591.581
Hasil Usaha Mandiri	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	41.696.952.606
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	1
Koreksi	46.195.912.497
Jumlah	**598.630.290.034**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	1.944.174.160
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	3.688.355.800

Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	732.517.000
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	-
Jumlah	**10.716.350.060**
Grand Total	**11.173.745.673.192**

5.3.1.3.4.1 Jalan dan Jembatan — Rp9.462.579.469.235,00

Jalan dan Jembatan sebesar Rp9.462.579.469.235,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.957.928.287.830,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp504.651.181.405,00 atau 5,63% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	19.296.093.822,00	18.751.768.226,00
2	Dinas Kesehatan	117.825.000,00	117.825.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	952.451.000,00	952.451.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	121.968.158,00	121.968.158,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.194.025.625,00	3.792.813.625,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.895.101.000,00	2.895.101.000,00
8	RSJD Surakarta	3.157.151.073,00	2.053.018.611,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	96.997.000,00	96.997.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.287.308.770.311,00	8.803.298.028.942,00
11	Dinas Sosial	52.859.000,00	52.859.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.623.202.625,00	13.580.140.166,00
13	Dinas Perhubungan	31.673.474.149,00	31.447.084.707,00
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	14.330.793.695,00	1.141.159.418,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.004.218.557,00	41.617.041.757,00
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.125.486.500,00	5.125.486.500,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.038.124.250,00	3.293.436.250,00
18	SKPKD	-	26.900.626.970,00
19	Sekretariat Daerah	-	181.000,00
20	Sekretariat DPRD	387.415.000,00	387.415.000,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.900.626.970,00	-
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00
23	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**9.462.579.469.235,00**	**8.957.928.287.830,00**

5.3.1.3.4.2 Bangunan Air — Rp1.379.526.532.779,00

Bangunan Air sebesar Rp1.379.526.532.779,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.316.097.404.887,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp63.429.127.892,00 atau 4,82% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	19.526.553.346,00	18.677.033.136,00
2	Dinas Kesehatan	746.910.500,00	746.910.500,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	2.821.073.315,00	2.821.073.315,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	175.000.000,00	175.000.000,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.493.250.625,00	1.493.250.625,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.019.596.500,00	4.019.596.500,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	98.529.000,00	98.529.000,00
8	RSJD Surakarta	100.621.000,00	100.621.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.180.539.500,00	1.180.539.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	153.112.512.660,00	150.503.705.467,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	994.802.715.529,00	943.555.862.679,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	159.200.000,00	159.200.000,00
13	Dinas Sosial	3.267.301.569,00	3.267.301.569,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.000.000,00	89.000.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.317.600,00	4.317.600,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.960.164.654,00	3.960.164.654,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	164.387.000,00	164.387.000,00
18	Dinas Perhubungan	15.158.134.030,00	15.158.134.030,00
19	Dinas Koperasi dan UKM	233.520.000,00	223.370.000,00
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	85.794.000,00	85.794.000,00
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	4.958.942.078,00	1.655.931.026,00
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	190.275.000,00	190.275.000,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	123.893.822.870,00	121.729.147.372,00
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.616.533.130,00	18.426.934.230,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.314.042.743,00	2.214.320.900,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	24.903.076.130,00	23.936.135.784,00
27	Sekretariat DPRD	1.173.201.000,00	1.173.201.000,00
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	184.250.000,00	184.250.000,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	10.150.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	93.269.000,00	93.269.000,00
31	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**1.379.526.532.779,00**	**1.316.097.404.887,00**

5.3.1.3.4.3 Instalasi **Rp140.880.958.164,00**

Instalasi sebesar Rp140.880.958.164,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp141.302.864.131,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp421.905.967,00) atau (0,30%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	14.771.442.744,00	14.517.354.286,00
2	Dinas Kesehatan	3.868.562.664,00	3.868.562.664,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	9.347.297.439,00	7.726.772.813,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	15.079.574.535,00	15.810.341.535,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	23.498.906.495,00	23.498.906.495,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	4.109.496.714,00	3.263.622.965,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.819.860.000,00	2.819.860.000,00
8	RSJD Surakarta	6.382.684.791,00	6.333.245.391,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	4.968.527.249,00	4.894.119.749,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.112.314.520,00	137.554.120,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	664.938.567,00	664.938.567,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	111.870.000,00
13	Dinas Sosial	25.000.000,00	25.000.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.433.000,00	91.433.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	763.895.492,00	763.895.492,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.434.465.013,00	1.434.465.013,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	25.900.000,00	25.900.000,00
18	Dinas Perhubungan	17.525.803.035,00	17.898.252.585,00
19	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.815.817.500,00	361.662.000,00
20	Dinas Koperasi dan UKM	33.665.810,00	-
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	225.454.455,00	225.454.455,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.916.649.692,00	1.916.649.692,00
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	334.957.086,00	334.957.086,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.315.832.475,00	3.126.715.225,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.223.844.607,00	26.192.202.457,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.751.450,00	50.751.450,00
27	Sekretariat Daerah	-	2.170.591.600,00
28	Sekretariat DPRD	975.049.350,00	-
29	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	75.156.300,00	780.444.500,00
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	233.186.880,00	233.186.880,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	382.553.273,00	416.219.083,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	-	799.998.000,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	762.275.550,00	762.275.550,00
34	Badan Penghubung	45.661.478,00	45.661.478,00
	Jumlah	**140.880.958.164,00**	**141.302.864.131,00**

5.3.1.3.4.4 Jaringan **Rp190.758.713.014,00**

Jaringan sebesar Rp190.758.713.014,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp170.503.176.370,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp20.255.536.644,00 atau 11,88% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.776.463.841,00	21.282.491.192,00
2	Dinas Kesehatan	1.135.375.128,00	1.135.375.128,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	447.980.000,00	447.980.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	4.211.762.949,00	4.211.762.949,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	2.633.664.219,00	2.633.664.219,00
6	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.567.161.390,00	1.567.161.390,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	90.438.123.904,00	70.066.159.909,00
8	Dinas Sosial	500.000,00	82.834.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	107.706.800,00	107.706.800,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.547.760.100,00	1.547.760.100,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	98.208.800,00	98.208.800,00
12	Dinas Perhubungan	30.546.250.076,00	30.700.485.076,00
13	Dinas Komunikasi dan Informasi	113.983.400,00	113.983.400,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	5.744.873,00	5.744.873,00
15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	613.286.177,00	613.286.177,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.700.000,00	16.700.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	866.157.987,00	846.162.987,00
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.238.625.000,00	1.238.625.000,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	852.174.400,00	1.144.341.400,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.481.926.400,00	31.407.235.400,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	261.556.700,00	242.056.700,00
22	SKPKD	-	179.871.120,00
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.421.797.750,00	617.647.750,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	179.871.120,00	-
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	195.932.000,00	195.932.000,00
26	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**190.758.713.014,00**	**170.503.176.370,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya — Rp976.375.566.548,00

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp976.375.566.548,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.472.453.852.706,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp496.078.286.158,00) atau (33,69%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	933.062.889.315,00	1.430.483.249.340,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	38.703.865.580,00	37.214.873.513,00
3	Hewan	2.914.170.280,00	3.101.144.480,00
4	Biota Perairan	1.109.200,00	1.109.200,00
5	Tanaman	1.284.051.773,00	1.275.095.773,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	55.802.500,00	24.702.500,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	353.677.900,00	353.677.900,00
	Jumlah	**976.375.566.548,00**	**1.472.453.852.706,00**

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	1.472.453.852.706
Penambahan	
Belanja Modal	92.251.533.910
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	2.611.476.316
Hibah	4.346.990.968
Hasil Usaha Mandiri	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	130.353.401
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	27.200.000
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	83.688.662
Jumlah	**100.409.236.766**
Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	957.993.509
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	553.060.236
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	593.454.825.730
Koreksi Belanja Modal	1.303.287.749
Koreksi Belanja Hutang	22.440.000
Koreksi Tahun Lalu	22.440.000
Jumlah	**596.487.522.924**
Grand Total	**976.375.566.548**

5.3.1.3.5.1 Bahan Perpustakaan Rp933.062.889.315,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp933.062.889.315,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.430.483.249.340,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp497.420.360.025,00) atau (34,77%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	911.260.648.464,00	1.408.805.433.479,00
2	Dinas Kesehatan	163.296.145,00	161.796.145,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	438.062.190,00	418.373.990,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	195.908.140,00	195.908.140,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	337.975.331,00	337.975.331,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	337.390.600,00	337.390.600,00
8	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	38.858.950,00	38.858.950,00
9	RSJD Surakarta	31.414.319,00	15.632.230,00
10	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	74.619.830,00	74.619.830,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	353.449.591,00	334.921.241,00
12	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	86.412.066,00	86.412.066,00
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	148.103.400,00	147.060.400,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja	25.500.000,00	25.500.000,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.619.400,00	80.619.400,00
16	Dinas Sosial	418.871.600,00	418.871.600,00
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.083.955,00	55.083.955,00
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	193.742.092,00	193.742.092,00
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	58.430.000,00	56.430.000,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	890.065.290,00	885.396.665,00
21	Dinas Ketahanan Pangan	108.482.200,00	103.501.200,00
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	108.800.000,00	108.800.000,00
23	Dinas Perhubungan	26.090.000,00	26.090.000,00
24	Dinas Komunikasi dan Informasi	-	-
25	Dinas Koperasi dan UKM	268.112.525,00	268.112.525,00
26	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	135.443.600,00	135.443.600,00
27	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	237.639.500,00	237.639.500,00
28	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.609.968.464,00	12.764.133.079,00
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	512.347.698,00	512.347.698,00
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	217.562.081,00	217.562.081,00
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	129.624.250,00	129.624.250,00
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	330.956.000,00	330.956.000,00
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	234.252.390,00	234.252.390,00
34	SKPKD	-	-
35	Sekretariat Daerah	601.089.961,00	1.410.691.620,00
36	Sekretariat DPRD	348.689.983,00	348.689.983,00
37	Inspektorat	21.412.900,00	21.412.900,00
38	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	399.089.950,00	379.089.950,00
39	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	53.884.000,00	53.884.000,00
40	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.078.000,00	9.078.000,00
41	Badan Kepegawaian Daerah	35.073.100,00	35.073.100,00
42	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	486.841.350,00	486.841.350,00
43	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**933.062.889.315**	**1.430.483.249.340**

5.3.1.3.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp38.703.865.580,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp38.703.865.580,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.214.873.513,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.488.992.067,00 atau 4,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	29.849.719.551,00	28.513.586.512,00
2	Dinas Kesehatan	105.951.000,00	105.951.000,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	38.409.000,00	38.409.000,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	68.612.500,00	236.978.500,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	55.000.000,00	55.000.000,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	501.733.666,00	501.733.666,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	423.235.750,00	423.235.750,00
8	RSJD Surakarta	70.560.000,00	67.630.000,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	378.588.000,00	378.588.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	150.635,00	150.635,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.000,00	170.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	500.219.500,00	500.219.500,00
13	Dinas Sosial	667.212.135,00	635.099.300,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	750.000,00	750.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.258.500,00	78.258.500,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	22.215.000,00	22.215.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	497.841.500,00	497.841.500,00
18	Dinas Perhubungan	387.710.000,00	387.710.000,00
19	Dinas Koperasi dan UKM	90.137.290,00	-
20	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	395.583.753,00	96.188.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.038.571,00	10.038.571,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	58.667.000,00	58.667.000,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.860.000,00	-
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80.581.000,00	80.581.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.258.236,00	102.258.236,00
26	Sekretariat Daerah	211.606.342,00	211.606.342,00
27	Sekretariat DPRD	498.273.000,00	498.273.000,00
28	Inspektorat	2.000.000,00	2.000.000,00
29	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.600.000,00	24.600.000,00
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	418.390.000,00	418.390.000,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.100.000,00	94.237.290,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	4.390.000,00	4.390.000,00
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	164.956.250,00	164.956.250,00
34	Badan Penghubung	2.947.087.401,00	3.005.160.961,00
	Jumlah	**38.703.865.580,00**	**37.214.873.513,00**

5.3.1.3.5.3 Hewan Rp2.914.170.280,00

Hewan sebesar Rp2.914.170.280,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.101.144.480,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp186.974.200,00) atau (6,03%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	231.193.560,00	168.207.560,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	10.300.000,00	10.300.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	9.500.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	164.572.000,00	164.572.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.508.104.720,00	2.748.564.920,00
	Jumlah	**2.914.170.280,00**	**3.101.144.480,00**

5.3.1.3.5.4 Biota Perairan Rp1.109.200,00

Biota Perairan sebesar Rp1.109.200,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2021 (Rp)	2020 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	1.109.200,00	1.109.200,00
	Jumlah	**1.109.200,00**	**1.109.200,00**

5.3.1.3.5.5 Tanaman Rp1.284.051.773,00

Tanaman sebesar Rp1.284.051.773,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.275.095.773,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.956.000,00 atau 0,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	872.531.940,00	863.575.940,00
2	Dinas Kesehatan	34.650.000,00	34.650.000,00
3	RSUD Tugurejo Semarang	295.101.633,00	295.101.633,00
4	Dinas Perhubungan	39.465.000,00	39.465.000,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.303.200,00	42.303.200,00
	Jumlah	**1.284.051.773,00**	**1.275.095.773,00**

5.3.1.3.5.6 Barang Koleksi Non Budaya Rp55.802.500,00

Barang Koleksi Non Budaya sebesar Rp55.802.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.702.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp31.100.000,00 atau 125,90% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	25.802.500,00	24.702.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.000.000,00	-
	Jumlah	**55.802.500,00**	**24.702.500,00**

5.3.1.3.5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi Rp353.677.900,00

Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp353.677.900,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	353.677.900,00	353.677.900,00
	Jumlah	**353.677.900,00**	**353.677.900,00**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp242.550.742.201,00

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp242.550.742.201,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp788.310.129.085,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp545.759.386.884,00) atau (69,23%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	15.725.955.095,00	27.763.475.659,00
2	Dinas Kesehatan	1.143.700.220,00	2.346.105.183,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	61.258.350.026,00	128.712.228.848,00
4	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.606.628.367,00	2.606.628.367,00
5	RSJD Surakarta	35.566.756.049,00	23.565.614.903,00
6	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	739.121.250,00	-
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	31.661.298.243,00	54.149.602.953,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	14.848.969.088,00	9.253.254.048,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	749.565.400,00	749.565.400,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	397.279.621,00	67.534.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	48.621.100,00	48.621.100,00
12	Dinas Perhubungan	2.938.774.288,00	3.079.601.218,00
13	Dinas Koperasi dan UKM	89.551.000,00	89.551.000,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	72.915.700,00	72.915.700,00
15	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	42.965.698.120,00	532.158.596.816,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	133.276.000,00	133.276.000,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	29.364.435.094,00	1.207.451.350,00
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	73.344.245,00	73.344.245,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	329.850.550,00	329.850.550,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	38.290.415,00	80.624.415,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	759.399.130,00	759.399.130,00
22	Sekretariat DPRD	942.658.200,00	942.658.200,00
23	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	23.925.000,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	96.305.000,00	96.305.000,00
25	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**242.550.742.201,00**	**788.310.129.085,00**

Rincian mutasi kontruksi dalam pengerjaan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	788.310.129.085
Penambahan	
Belanja Modal	118.436.617.089
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	5.620.715.040
Hibah	-
Hasil Usaha Mandiri	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk Dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	-
Jumlah	**124.057.332.129**

Berkurang	
Reklasifikasi Keluar ke aset tetap	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	175.575.617.895
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	-
Jumlah	**669.816.719.013**
Grand Total	**242.550.742.201**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp16.695.831.367.533,66)

Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp16.695.831.367.533,66) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.518.744.231.515,70) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.117.087.136.017,96) atau 7,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.382.201.228.019,60)	(5.837.047.301.241,31)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.269.311.205.958,22)	(2.145.263.849.524,04)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(8.041.836.432.320,21)	(7.534.456.813.217,39)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(2.482.501.235,63)	(1.976.267.532,97)
	Jumlah	**(16.695.831.367.533,66)**	**(15.518.744.231.515,70)**

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp6.382.201.228.019,60)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp6.382.201.228.019,60) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.837.047.301.241,31) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp545.153.926.778,29) atau 9,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(271.855.775.175,12)	(253.007.791.172,67)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(510.699.949.116,20)	(471.567.006.787,11)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(300.450.045.189,07)	(273.645.436.822,77)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(61.911.367.469,00)	(58.724.439.276,85)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.410.928.632.034,00)	(1.277.277.423.648,09)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(238.241.332.922,32)	(222.681.879.012,70)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(1.782.856.435.129,87)	(1.663.836.712.794,19)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(441.546.493.328,34)	(401.356.159.843,71)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(5.855.445.467,23)	(6.731.866.504,07)
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.259.720.792.430,12)	(1.132.062.918.592,94)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(229.641.142,07)	(166.088.939,87)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	(45.603.975,58)	(29.906.845,78)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(181.108.097,21)	(123.415.808,87)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(8.472.000,00)	(6.354.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(3.563.159.560,08)	(3.017.476.258,67)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(49.115.675.023,23)	(38.014.966.866,31)
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(1.379.117.730,68)	(1.063.464.137,20)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	(18.396.027.916,28)	(16.473.664.476,60)
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(25.216.154.313,20)	(17.260.329.452,91)
	Jumlah	**(6.382.201.228.019,60)**	**(5.837.047.301.241,31)**

5.3.1.3.7.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Rp271.855.775.175,12)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar (Rp271.855.775.175,12) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp253.007.791.172,67) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp18.847.984.002,45) atau 7,45% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(15.046.613.292,09)	(13.483.181.186,09)
2	Dinas Kesehatan	(6.256.295.125,53)	(5.827.438.383,79)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(15.690.085.389,47)	(13.856.742.661,42)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(17.955.443.491,50)	(21.019.966.010,26)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(8.293.909.201,43)	(7.818.751.468,18)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(3.358.243.889,00)	(3.160.272.795,25)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(4.835.731.209,38)	(4.091.007.250,00)
8	RSJD Surakarta	(2.145.877.286,04)	(1.934.562.708,34)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.192.197.054,62)	(1.064.903.167,83)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(98.531.873.681,01)	(89.317.916.912,02)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(20.338.600.605,50)	(18.755.676.819,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(267.715.450,00)	(197.355.337,50)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(640.150.000,00)	(560.131.250,00)
15	Dinas Sosial	(1.424.130.149,00)	(1.313.702.236,75)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(5.869.913.341,23)	(5.278.136.921,65)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(291.438.331,34)	(295.099.498,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(622.400.000,00)	(636.650.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(497.655.800,67)	(469.397.079,67)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(333.712.046,88)	(331.895.000,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.258.167.018,00)	(1.258.167.018,00)
22	Dinas Perhubungan	(1.693.756.200,00)	(1.662.672.865,38)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(1.445.498.275,00)	(1.224.415.750,00)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(1.061.528.250,00)	(906.197.500,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(310.921.125,00)	(239.352.302,08)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(2.802.748.735,19)	(2.600.358.137,70)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.065.823.260,00)	(3.969.398.260,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(2.791.293.752,50)	(2.537.448.577,50)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.828.094.776,83)	(5.515.622.419,33)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(429.287.079,17)	(402.614.537,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(3.063.598.265,63)	(2.936.924.625,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.063.202.114,58)	(6.149.715.875,29)
33	SKPKD	-	(665.315.500,00)
34	Sekretariat Daerah	(9.969.312.534,71)	(8.801.956.828,71)
35	Sekretariat DPRD	(1.278.092.100,00)	(1.223.807.600,00)
36	Inspektorat	(168.726.375,00)	(170.268.875,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(3.147.450.150,00)	(3.141.937.500,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(15.355.633.161,50)	(14.515.443.753,42)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(3.612.121.235,00)	(2.717.496.110,01)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(1.487.734.500,00)	(691.669.000,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.192.336.272,32)	(2.063.006.790,00)
42	Badan Penghubung	(238.464.650,00)	(201.214.662,50)
	Jumlah	**(271.855.775.175,12)**	**(253.007.791.172,67)**

5.3.1.3.7.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (Rp510.699.949.116,20)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar (Rp510.699.949.116,20) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp471.567.006.787,11) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp39.132.942.329,09) atau 8,30% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(110.465.064.894,24)	(93.255.685.431,88)
2	Dinas Kesehatan	(15.539.588.611,21)	(12.258.367.913,13)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(5.778.035.664,84)	(5.869.658.547,67)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(7.008.670.992,15)	(7.141.523.054,41)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(5.061.595.348,84)	(4.651.740.594,67)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(5.199.658.847,83)	(5.838.330.319,63)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(4.300.193.987,30)	(4.346.575.166,67)
8	RSJD Surakarta	(6.136.086.749,77)	(5.570.723.664,02)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(3.556.164.945,76)	(3.096.458.045,34)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(13.515.127.142,85)	(11.181.323.747,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(8.698.892.879,81)	(7.050.977.430,25)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(4.104.583.970,00)	(4.052.749.220,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.827.085.314,50)	(4.983.216.197,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.824.014.525,00)	(2.639.798.775,00)
15	Dinas Sosial	(15.880.513.902,67)	(14.648.461.386,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(19.685.249.910,57)	(18.400.523.746,03)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(7.679.922.261,16)	(6.655.478.817,83)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(2.664.311.455,50)	(2.532.134.393,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(19.428.821.184,50)	(19.256.623.129,75)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(2.908.923.347,34)	(2.858.893.784,84)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(2.870.193.473,00)	(2.818.358.723,00)
22	Dinas Perhubungan	(27.931.120.339,75)	(29.164.938.396,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(7.753.303.235,50)	(7.482.676.048,00)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(2.693.754.376,00)	(2.631.654.147,75)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.437.886.862,75)	(3.226.063.246,52)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(3.722.072.082,00)	(3.923.863.614,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(5.141.424.282,50)	(4.875.170.407,50)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(16.835.215.516,33)	(15.388.585.645,49)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(13.432.169.287,38)	(11.637.304.120,38)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(4.589.830.552,96)	(4.108.857.811,83)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.432.054.873,83)	(5.776.841.548,83)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.283.107.401,25)	(5.822.800.149,17)
33	SKPKD	-	(15.062.727.889,01)
34	Sekretariat Daerah	(51.285.782.202,96)	(49.508.223.715,25)
35	Sekretariat DPRD	(17.591.877.783,85)	(15.263.858.794,25)
36	Inspektorat	(3.870.646.041,00)	(3.578.538.666,01)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.917.276.230,50)	(4.508.249.674,25)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(31.750.815.287,88)	(28.877.209.818,25)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(19.901.139.545,17)	(7.357.684.983,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(3.847.733.658,50)	(3.509.015.096,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.589.807.338,00)	(2.464.328.588,00)
42	Badan Penghubung	(8.560.232.809,25)	(8.290.812.340,50)
	Jumlah	**(510.699.949.116,20)**	**(471.567.006.787,11)**

5.3.1.3.7.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur (Rp300.450.045.189,07)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar (Rp300.450.045.189,07) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp273.645.436.822,77) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp26.804.608.366,30) atau 9,80% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(248.969.945.097,24)	(223.944.753.482,91)
2	Dinas Kesehatan	(1.143.889.053,36)	(763.430.540,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(1.470.507.476,34)	(1.323.575.651,34)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(1.583.538.345,46)	(1.515.296.363,73)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(543.658.617,20)	(526.268.895,66)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(559.444.253,75)	(470.384.233,33)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(35.294.000,00)	(28.734.000,00)
8	RSJD Surakarta	(1.118.815.562,00)	(1.004.436.067,33)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.213.618.289,16)	(1.056.501.681,66)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(177.599.068,91)	(69.705.916,73)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.310.911.900,60)	(2.091.124.000,20)
12	Dinas Sosial	(382.144.800,00)	(364.541.300,00)
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(864.458.305,06)	(763.038.629,98)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.881.596.330,00)	(3.782.190.930,00)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(4.209.161.610,33)	(4.203.563.877,00)
16	Dinas Ketahanan Pangan	(50.291.583,34)	(45.200.000,00)
17	Dinas Perhubungan	(4.943.559.866,60)	(4.847.179.866,60)
18	Dinas Komunikasi dan Informasi	(23.212.600,00)	(21.569.200,00)
19	Dinas Koperasi dan UKM	(2.200.951,09)	-
20	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(50.045.833,34)	(27.180.000,00)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.483.707.677,50)	(1.220.271.542,00)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	(995.053.331,68)	(919.200.755,00)
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(2.961.206.206,67)	(2.876.636.946,67)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(679.023.439,33)	(606.263.666,00)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(7.211.023.769,51)	(6.833.732.770,00)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(13.168.579.823,93)	(14.000.061.689,96)
27	Sekretariat Daerah	(112.164.600,00)	(107.742.400,00)
28	Inspektorat	(71.400.000,00)	(71.400.000,00)
29	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(197.580,00)	-
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(218.076.666,67)	(147.811.666,67)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(7.358.550,00)	(5.775.750,00)
32	Badan Penghubung	(8.360.000,00)	(7.865.000,00)
	Jumlah	**(300.450.045.189,07)**	**(273.645.436.822,77)**

5.3.1.3.7.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian (Rp61.911.367.469,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian sebesar (Rp61.911.367.469,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp58.724.439.276,85) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp3.186.928.192,15) atau 5,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(14.589.601.856,94)	(14.086.272.468,80)
2	Dinas Kesehatan	(4.350.000,00)	(1.450.000,00)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(39.903.562,50)	(35.510.562,50)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(292.492.795,00)	(292.492.795,00)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(126.461.880,00)	(126.283.130,00)
6	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(2.811.768,75)	-
7	RSJD Surakarta	(449.531,25)	-
8	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(7.330.060,00)	(6.609.545,00)
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(38.000.000,00)	(38.000.000,00)
10	Dinas Sosial	(14.860.000,00)	(14.235.000,00)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(2.124.802.425,00)	(2.113.552.425,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(541.585.333,34)	(524.152.000,00)
13	Dinas Ketahanan Pangan	(1.130.316.986,67)	(1.308.919.070,00)
14	Dinas Koperasi dan UKM	(26.295.000,00)	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.239.578.208,33)	(1.213.641.000,00)
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(32.801.525.461,34)	(31.284.524.572,34)
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(8.877.640.099,88)	(7.601.326.708,21)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(37.562.500,00)	(35.375.000,00)
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(26.295.000,00)
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(15.800.000,00)	(15.800.000,00)
21	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(61.911.367.469,00)**	**(58.724.439.276,85)**

5.3.1.3.7.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp1.410.928.632.034,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp1.410.928.632.034,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.277.277.423.648,09) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp133.651.208.385,91) atau 10,46% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(750.860.420.251,75)	(665.557.618.348,25)
2	Dinas Kesehatan	(34.711.389.840,78)	(32.716.029.485,57)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(44.939.015.374,72)	(42.287.356.133,58)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(48.956.606.942,86)	(42.497.427.265,33)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(34.578.633.263,42)	(32.003.022.518,43)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(15.022.803.923,53)	(12.845.865.492,87)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(16.092.985.192,69)	(14.721.070.036,24)
8	RSJD Surakarta	(24.783.003.852,70)	(22.729.854.772,41)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(13.462.423.215,71)	(12.713.188.064,81)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(4.599.942.654,57)	(2.727.026.513,61)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(8.646.354.838,50)	(8.371.980.511,40)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.003.417.231,99)	(2.842.853.978,65)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.384.558.374,00)	(2.246.393.974,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.819.387.148,09)	(2.715.125.981,75)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
15	Dinas Sosial	(21.030.375.888,71)	(19.024.000.793,68)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.204.843.108,53)	(6.602.002.977,40)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(13.743.997.516,43)	(13.035.673.150,79)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(1.929.968.700,47)	(1.838.296.359,67)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(14.612.814.849,89)	(13.833.369.410,66)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(4.020.641.507,85)	(3.877.369.244,30)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.363.815.990,34)	(5.201.271.854,34)
22	Dinas Perhubungan	(7.251.008.986,27)	(6.562.759.872,12)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(5.398.554.627,51)	(5.492.157.810,62)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(8.544.535.633,64)	(7.209.375.251,79)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(2.908.092.273,33)	(2.680.422.080,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(18.220.579.057,60)	(15.216.960.642,78)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(13.094.153.121,36)	(12.879.824.491,39)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(9.282.694.760,38)	(8.441.012.417,86)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(17.171.088.976,47)	(16.649.367.931,80)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(7.337.942.692,16)	(6.434.408.626,32)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(12.085.919.467,25)	(11.000.377.591,49)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(19.095.269.441,63)	(18.551.285.109,20)
33	SKPKD	-	(4.910.760.676,66)
34	Sekretariat Daerah	(42.726.125.508,73)	(39.443.338.652,09)
35	Sekretariat DPRD	(40.320.060.966,59)	(36.644.505.092,27)
36	Inspektorat	(4.511.764.995,03)	(4.247.931.025,03)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(8.185.111.367,40)	(7.623.547.464,38)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(61.620.904.317,47)	(58.741.169.485,74)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(29.977.331.016,89)	(24.922.863.829,01)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(6.473.219.339,89)	(5.877.486.829,48)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(18.243.134.766,21)	(17.461.684.876,66)
42	Badan Penghubung	(5.713.741.050,66)	(5.899.387.023,66)
	Jumlah	**(1.410.928.632.034,00)**	**(1.277.277.423.648,09)**

5.3.1.3.7.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Rp238.241.332.922,32)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar (Rp238.241.332.922,32) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp222.681.879.012,70) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp15.559.453.909,62) atau 6,99% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(132.809.812.016,46)	(124.647.797.978,53)
2	Dinas Kesehatan	(5.009.108.490,03)	(4.481.448.374,17)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(4.184.558.797,98)	(4.003.166.122,98)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(5.584.504.028,98)	(2.445.392.695,19)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(3.586.275.515,64)	(3.411.797.078,71)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.635.451.864,70)	(1.591.740.804,68)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(736.775.921,07)	(1.037.993.755,07)
8	RSJD Surakarta	(1.151.381.848,76)	(1.116.956.720,10)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(450.326.824,98)	(398.009.679,99)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(456.883.756,57)	(392.176.250,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.756.640.350,00)	(1.665.645.250,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(588.132.079,33)	(559.475.296,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(578.730.000,00)	(536.050.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(623.727.166,67)	(557.015.000,00)
15	Dinas Sosial	(477.968.117,32)	(450.732.784,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.261.965.415,66)	(2.172.533.115,66)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.926.400.410,86)	(1.780.924.101,66)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(207.169.631,67)	(306.400.661,67)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(3.164.504.490,99)	(3.102.320.589,33)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(719.517.339,67)	(680.887.600,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(1.655.804.343,00)	(1.589.859.903,00)
22	Dinas Perhubungan	(2.212.919.489,33)	(2.155.344.379,33)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(7.078.607.809,63)	(5.431.174.287,62)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(1.331.077.913,64)	(1.122.950.166,65)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(749.126.231,67)	(687.111.196,67)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(2.307.931.517,24)	(2.150.885.678,00)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.658.632.276,00)	(4.513.134.687,20)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.689.058.821,34)	(1.507.524.808,54)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(4.022.170.521,83)	(3.931.883.110,00)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(565.013.941,67)	(505.921.650,00)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.066.021.184,56)	(3.848.355.208,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.188.764.768,93)	(1.220.039.117,60)
33	SKPKD	-	(108.911.000,00)
34	Sekretariat Daerah	(19.358.647.889,16)	(20.117.545.112,69)
35	Sekretariat DPRD	(3.794.067.051,95)	(3.385.554.535,32)
36	Inspektorat	(889.781.290,00)	(829.011.290,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(1.345.597.805,99)	(1.338.724.806,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(5.857.162.799,00)	(5.637.244.939,00)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.211.230.310,00)	(2.127.974.957,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(351.177.905,99)	(333.190.525,99)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(3.618.194.434,65)	(3.432.174.491,35)
42	Badan Penghubung	(1.380.510.549,40)	(1.368.899.305,00)
	Jumlah	**(238.241.332.922,32)**	**(222.681.879.012,70)**

5.3.1.3.7.1.7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan (1.782.856.435.129,87)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar (Rp1.782.856.435.129,87) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.663.836.712.794,19) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp119.019.722.335,68) atau 7,15% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(8.656.596.787,64)	(7.677.090.870,97)
2	Dinas Kesehatan	(48.984.552.546,87)	(42.739.310.280,73)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(592.195.043.502,36)	(550.630.151.881,67)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(510.426.444.858,62)	(481.886.280.456,29)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(297.641.281.345,52)	(280.399.391.227,36)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(135.138.742.656,76)	(125.059.433.458,27)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(62.383.812.995,90)	(55.278.165.316,79)

8	RSJD Surakarta	(53.144.461.139,49)	(48.493.063.371,90)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(71.179.385.106,50)	(68.860.693.548,69)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(72.517,20)	-
11	Dinas Sosial	(854.744.487,71)	(842.664.654,37)
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(190.779.600,00)	(190.779.600,00)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(541.292.525,00)	(540.992.525,00)
14	Dinas Perhubungan	(479.166,67)	-
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(4.275.000,00)	(3.100.000,00)
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(13.980.000,00)	(9.960.000,00)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	(2.621.208,34)	(965.708,34)
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(7.100.000,00)	(7.100.000,00)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(480.219.800,02)	(315.255.333,34)
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(1.500.000,00)	(1.000.000,00)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(98.027.272,53)	(89.780.000,00)
22	Sekretariat Daerah	(120.216.666,67)	(96.241.666,67)
23	Sekretariat DPRD	(294.815.000,00)	(294.215.000,00)
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(26.666,67)	-
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(102.147.000,00)	(73.718.000,00)
26	Badan Kepegawaian Daerah	(182.762.429,40)	(149.523.243,80)
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(211.054.850,00)	(197.836.650,00)
28	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(1.782.856.435.129,87)**	**(1.663.836.712.794,19)**

5.3.1.3.7.1.8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (Rp441.546.493.328,34)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar (Rp441.546.493.328,34) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp401.356.159.843,71) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp40.190.333.484,63) atau 10,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(274.091.393.902,67)	(249.834.972.883,62)
2	Dinas Kesehatan	(26.367.259.857,55)	(22.275.572.829,29)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(15.652.491.973,35)	(13.824.967.981,02)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(4.546.824.563,73)	(2.948.987.371,31)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(17.401.168.074,20)	(17.379.016.583,24)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.981.476.681,41)	(1.844.803.245,53)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(3.096.227.632,43)	(2.931.801.193,95)
8	RSJD Surakarta	(2.893.306.179,75)	(2.700.016.937,44)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(3.608.405.881,09)	(3.322.510.966,68)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(7.710.633.666,42)	(7.039.737.686,69)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.225.853.859,77)	(1.987.783.202,47)
12	Dinas Sosial	(85.548.000,00)	(77.211.000,00)
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(58.614.622,92)	(42.267.660,42)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(8.025.591.978,84)	(7.724.943.397,79)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(13.208.902.578,57)	(12.202.850.047,97)
16	Dinas Ketahanan Pangan	(5.666.195.203,37)	(5.585.003.149,83)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(4.471.500,00)	(1.490.500,00)
18	Dinas Perhubungan	(163.343.000,00)	(163.343.000,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
19	Dinas Koperasi dan UKM	(1.976.014,28)	-
20	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(74.540.138,89)	(49.662.500,00)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(90.230.000,00)	(90.230.000,00)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	(8.040.309.769,29)	(7.367.733.355,67)
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(8.999.046.615,00)	(8.962.698.865,00)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(12.036.093.708,41)	(10.595.287.579,14)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.549.328.908,01)	(4.020.480.135,45)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(20.332.947.960,09)	(17.711.408.421,20)
27	Sekretariat Daerah	-	(50.000.000,00)
28	Inspektorat	(113.172.000,00)	(104.322.000,00)
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(6.333.333,30)	(4.750.000,00)
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(514.805.725,00)	(512.307.350,00)
31	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(441.546.493.328,34)**	**(401.356.159.843,71)**

5.3.1.3.7.1.9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan (Rp5.855.445.467,23)

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan sebesar (Rp5.855.445.467,23) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.731.866.504,07) mengalami **penurunan** sebesar Rp876.421.036,84 atau (13,02%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(3.346.391.012,23)	(3.063.784.665,74)
2	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(187.829.055,00)	(187.829.055,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(6.175.000,00)	(6.175.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.953.500,00)	(5.953.500,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(154.930.000,00)	(146.670.000,00)
6	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.604.130.175,00)	(1.585.431.175,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(144.900.000,00)	(144.900.000,00)
8	Dinas Perhubungan	(31.204.725,00)	(31.204.725,00)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	(520.833,33)
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(175.600.000,00)	(175.600.000,00)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(52.000.000,00)	(52.000.000,00)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(19.882.000,00)	(34.616.000,00)
13	Sekretariat Daerah	(94.300.000,00)	(1.265.031.550,00)
14	Inspektorat	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
15	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(23.650.000,00)	(23.650.000,00)
16	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(5.855.445.467,23)**	**(6.731.866.504,07)**

5.3.1.3.7.1.10 Akumulasi Penyusutan Komputer (Rp1.259.720.792.430,12)

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar (Rp1.259.720.792.430,12) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.132.062.918.592,94) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp127.657.873.837,18) atau 11,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(931.306.647.705,59)	(836.718.929.407,25)
2	Dinas Kesehatan	(13.693.547.947,55)	(12.610.422.011,88)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(18.282.580.701,25)	(16.575.285.487,70)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(24.172.789.056,02)	(19.375.247.052,76)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(5.653.928.864,61)	(5.081.369.266,27)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(3.391.608.593,80)	(3.224.398.649,19)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(2.947.063.554,35)	(3.765.906.454,19)
8	RSJD Surakarta	(4.625.711.458,76)	(4.631.943.369,83)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(2.900.376.628,22)	(2.579.191.270,88)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(4.065.588.383,99)	(3.224.927.727,56)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.554.503.964,66)	(5.408.470.610,49)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.565.000.417,18)	(1.422.846.822,33)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.729.901.470,00)	(1.657.159.977,50)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.390.928.717,07)	(1.214.829.108,75)
15	Dinas Sosial	(5.922.414.508,18)	(5.212.145.418,79)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.235.419.504,89)	(2.138.435.543,39)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(6.248.089.590,75)	(5.867.195.319,93)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(847.638.691,36)	(848.472.495,87)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(8.966.023.323,60)	(8.689.472.045,52)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(2.388.744.713,51)	(2.087.996.545,76)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.191.069.722,00)	(3.045.736.847,00)
22	Dinas Perhubungan	(5.098.504.754,00)	(5.314.607.297,83)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(59.162.266.786,03)	(47.331.240.330,87)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(1.697.730.629,68)	(1.598.578.055,19)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.528.474.604,73)	(3.398.294.979,73)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(4.476.124.245,67)	(4.159.509.634,33)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(5.429.792.847,74)	(5.224.067.563,57)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.693.345.759,03)	(3.473.220.724,44)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.991.370.057,25)	(5.771.810.984,33)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(2.028.434.293,83)	(1.678.174.818,75)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.345.101.164,85)	(5.795.932.369,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(7.232.012.805,20)	(6.951.264.611,18)
33	SKPKD	-	(344.055.995,00)
34	Sekretariat Daerah	(15.405.918.292,01)	(13.400.073.157,72)
35	Sekretariat DPRD	(9.590.348.373,55)	(8.213.009.498,97)
36	Inspektorat	(2.099.341.968,83)	(2.043.567.167,99)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.913.475.409,18)	(4.553.553.952,84)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(50.180.216.135,66)	(46.724.148.911,00)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(9.138.992.443,49)	(8.138.016.483,81)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(6.552.072.045,86)	(6.468.766.640,39)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(4.626.899.770,86)	(4.683.844.607,83)
42	Badan Penghubung	(1.450.792.525,33)	(1.416.799.375,33)
	Jumlah	**(1.259.720.792.430,12)**	**(1.132.062.918.592,94)**

5.3.1.3.7.1.11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi (Rp229.641.142,07)

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi sebesar (Rp229.641.142,07) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp166.088.939,87) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp63.552.202,20) atau 38,26% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(214.059.142,07)	(154.760.939,87)
2	Dinas Kesehatan	(210.000,00)	(30.000,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(15.372.000,00)	(11.298.000,00)
	Jumlah	**(229.641.142,07)**	**(166.088.939,87)**

5.3.1.3.7.1.12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran (Rp45.603.975,58)

Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran sebesar (Rp45.603.975,58) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp29.906.845,78) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp15.697.129,80) atau 52,49% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(45.603.975,58)	(29.906.845,78)
	Jumlah	**(45.603.975,58)**	**(29.906.845,78)**

5.3.1.3.7.1.13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (Rp181.108.097,21)

Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar (Rp181.108.097,21) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp123.415.808,87) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp57.692.288,34) atau 46,75% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(157.596.137,21)	(107.741.168,87)
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(23.511.960,00)	(15.674.640,00)
	Jumlah	**(181.108.097,21)**	**(123.415.808,87)**

5.3.1.3.7.1.14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi (Rp8.472.000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi sebesar (Rp8.472.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.354.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.118.000,00) atau 33,33% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(8.472.000,00)	(6.354.000,00)
	Jumlah	**(8.472.000,00)**	**(6.354.000,00)**

5.3.1.3.7.1.15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja (Rp3.563.159.560,08)

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja sebesar (Rp3.563.159.560,08) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.017.476.258,67) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp545.683.301,41) atau 18,08% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(2.934.022.911,00)	(2.510.535.341,99)
2	Dinas Kesehatan	(21.233.333,33)	(3.322.916,67)
3	RSJD Surakarta	(38.860.800,00)	(29.145.600,00)
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(489.375.000,00)	(445.500.000,00)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(23.196.800,00)	(20.057.400,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(399.000,00)	-
7	Dinas Ketahanan Pangan	(9.826.666,68)	(2.456.666,68)
8	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(3.255.549,09)	-
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(2.072.916,65)	-
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(833.250,00)	-
11	SKPKD	-	(5.625.000,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
12	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(10.833.333,33)	(833.333,33)
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(29.250.000,00)	-
14	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(3.563.159.560,08)**	**(3.017.476.258,67)**

5.3.1.3.7.1.16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga (Rp49.115.675.023,23)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga sebesar (Rp49.115.675.023,23) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp38.014.966.866,31) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp11.100.708.156,92) atau 29,20% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(48.392.370.570,24)	(37.520.885.906,55)
2	Dinas Kesehatan	(1.805.595,83)	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(176.511.749,96)	(42.923.980,76)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(25.513.137,22)	(1.962.549,02)
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(10.225.600,00)	(7.559.200,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(11.646.249,96)	(1.663.749,96)
7	Dinas Sosial	(296.215.000,00)	(239.940.000,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(201.387.120,02)	(200.031.480,02)
9	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(49.115.675.023,23)**	**(38.014.966.866,31)**

5.3.1.3.7.1.17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi (Rp1.379.117.730,68)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi sebesar (Rp1.379.117.730,68) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.063.464.137,20) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp315.653.593,48) atau 29,68% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(883.714.501,49)	(622.065.449,70)
2	Dinas Kesehatan	(3.984.375,00)	(1.171.875,00)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(47.500.000,00)	(35.625.000,00)
4	RSUD Tugurejo Semarang	(28.084.791,67)	(19.875.000,00)
5	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(364.545.000,00)	(352.920.000,00)
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.420.000,02)	-
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(28.092.500,00)	(22.474.000,00)
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(21.776.562,50)	(9.332.812,50)
9	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(1.379.117.730,68)**	**(1.063.464.137,20)**

5.3.1.3.7.1.18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu (Rp18.396.027.916,28)

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu sebesar (Rp18.396.027.916,28) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.473.664.476,60) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.922.363.439,68) atau 11,67% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(95.882.745,79)	(65.278.197,89)
2	Dinas Perhubungan	(18.234.474.003,82)	(16.356.434.487,04)
3	Dinas Komunikasi dan Informasi	(42.052.750,00)	(34.960.625,00)
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.447.916,67)	(2.072.916,67)
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.515.500,00)	(1.677.000,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(17.655.000,00)	(13.241.250,00)
	Jumlah	**(18.396.027.916,28)**	**(16.473.664.476,60)**

5.3.1.3.7.1.19 Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga (Rp25.216.154.313,20)

Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga sebesar (Rp25.216.154.313,20) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp17.260.329.452,91) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp7.955.824.860,29) atau 46,09% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(13.836.822.365,64)	(12.415.457.683,22)
2	Dinas Kesehatan	(81.729.600,00)	(81.729.600,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(25.800.000,00)	(25.800.000,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(20.079.600,00)	(16.109.700,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(10.625.000,00)	(10.375.000,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(227.588.719,00)	(227.588.719,00)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(65.175.000,00)	(43.450.000,00)
8	RSJD Surakarta	(20.894.479,17)	(20.880.000,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(13.337.500,00)	(7.562.500,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(10.100.000,00)	(7.575.000,00)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	(27.550.000,00)	(20.662.500,00)
13	Dinas Sosial	(53.095.000,00)	(53.095.000,00)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(11.695.833,33)	(10.445.833,33)
16	Dinas Ketahanan Pangan	(3.006.000,00)	(3.006.000,00)
17	Dinas Perhubungan	(8.601.440,00)	(8.601.440,00)
18	Dinas Koperasi dan UKM	(85.167.708,33)	(62.736.458,33)
19	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(8.775.801.247,73)	(2.386.471.219,86)
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	(200.484.000,00)	(200.484.000,00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(25.263.350,00)	(25.263.350,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(23.750.000,00)	(23.750.000,00)
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(72.210.000,00)	(72.210.000,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(203.656.250,00)	(203.656.250,00)
25	SKPKD	-	(13.985.000,00)
26	Sekretariat Daerah	(218.513.416,67)	(216.025.916,67)
27	Sekretariat DPRD	(20.458.333,33)	(20.000.000,00)
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(694.752.000,00)	(620.311.500,00)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(13.985.000,00)	-
30	Badan Kepegawaian Daerah	(166.152.750,00)	(163.237.062,50)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(273.959.720,00)	(273.959.720,00)
32	Badan Penghubung	(22.900.000,00)	(22.900.000,00)
	Jumlah	**(25.216.154.313,20)**	**(17.260.329.452,91)**

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp2.269.311.205.958,22)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp2.269.311.205.958,22) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.145.263.849.524,04) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp124.047.356.434,18) atau 5,78% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.239.035.974.069,81)	(2.118.586.602.089,32)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(4.743.846.710,77)	(4.118.038.725,71)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(1.105.486.305,41)	(1.000.010.502,31)
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(24.425.898.872,23)	(21.559.198.206,70)
	Jumlah	**(2.269.311.205.958,22)**	**(2.145.263.849.524,04)**

5.3.1.3.7.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Rp2.239.035.974.069,81)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar (Rp2.239.035.974.069,81) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.118.586.602.089,32) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp120.449.371.980,49) atau 5,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(1.244.077.439.182,89)	(1.171.506.784.619,99)
2	Dinas Kesehatan	(24.487.787.096,36)	(22.734.628.494,54)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(70.163.464.099,26)	(63.262.386.086,56)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(69.404.171.162,64)	(61.208.021.815,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(34.769.037.679,26)	(31.561.758.831,75)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(18.861.778.325,23)	(17.492.532.479,55)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(14.987.055.121,09)	(13.472.492.503,79)
8	RSJD Surakarta	(14.606.590.766,56)	(13.765.416.153,62)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(15.474.753.526,92)	(14.586.839.430,44)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(15.024.046.008,27)	(12.189.303.715,85)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(10.065.157.794,93)	(9.584.897.225,03)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.326.745.450,57)	(3.114.915.534,20)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.685.010.834,44)	(4.312.921.532,67)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.570.424.096,32)	(2.119.610.919,08)
15	Dinas Sosial	(89.402.272.223,51)	(85.567.909.076,29)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.854.157.672,62)	(1.682.605.665,64)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(21.311.280.244,15)	(20.110.340.609,32)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(9.415.807.775,69)	(9.014.285.989,30)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(14.663.961.495,18)	(12.846.425.457,43)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(3.241.580.824,53)	(2.997.153.664,41)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(3.651.883.709,67)	(3.439.236.598,97)
22	Dinas Perhubungan	(36.053.492.585,00)	(33.078.184.377,97)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(3.172.880.795,28)	(3.038.061.011,20)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(11.850.499.952,57)	(12.464.803.132,40)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(3.624.427.167,87)	(3.415.224.074,01)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(29.298.120.132,84)	(29.641.872.030,15)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(11.646.446.447,24)	(11.173.141.151,71)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(27.954.930.483,95)	(25.761.544.246,55)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(52.058.875.119,65)	(49.270.110.573,89)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(23.988.630.500,06)	(22.224.530.754,67)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(9.874.326.964,19)	(8.926.210.763,62)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(26.410.190.950,96)	(24.828.782.087,73)
33	SKPKD	-	(74.035.464.951,02)
34	Sekretariat Daerah	(51.267.992.768,12)	(50.332.574.255,24)
35	Sekretariat DPRD	(18.050.628.476,84)	(17.350.988.561,04)
36	Inspektorat	(6.465.545.667,57)	(6.117.765.468,49)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(13.401.300.580,33)	(12.822.209.631,58)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(72.773.079.496,79)	(67.712.514.364,92)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(110.771.284.275,61)	(47.030.029.624,08)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(4.355.241.491,94)	(4.173.025.550,70)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(32.446.938.402,88)	(31.404.466.425,36)
42	Badan Penghubung	(7.526.736.720,03)	(7.214.632.649,56)
	Jumlah	**(2.239.035.974.069,81)**	**(2.118.586.602.089,32)**

5.3.1.3.7.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen (Rp4.743.846.710,77)

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar (Rp4.743.846.710,77) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.118.038.725,71) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp625.807.985,06) atau 15,20% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(2.370.028.501,26)	(2.102.537.043,35)
2	Dinas Kesehatan	(23.065.920,00)	(20.182.680,00)
3	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(33.843.540,00)	(28.525.320,00)
4	RSJD Surakarta	(146.529.468,00)	(130.248.416,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(600.000,00)	(570.000,00)
6	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(70.472.380,00)	(64.752.200,00)
7	Dinas Sosial	(15.004.740,00)	(14.352.360,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(62.112.867,20)	(57.833.164,40)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(53.978.152,91)	(47.513.828,60)
10	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(433.983.318,40)	(357.000.802,00)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.964.000,00)	(2.808.000,00)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-
13	SKPKD	-	-
14	Sekretariat Daerah	-	-
15	Sekretariat DPRD	(737.911.778,20)	(556.416.719,36)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(135.509.600,00)	(118.570.900,00)
17	Badan Penghubung	(657.842.444,80)	(616.727.292,00)
	Jumlah	**(4.743.846.710,77)**	**(4.118.038.725,71)**

5.3.1.3.7.2.3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara (Rp1.105.486.305,41)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara sebesar (Rp1.105.486.305,41) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.000.010.502,31) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp105.475.803,10) atau 10,55% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(179.622.342,00)	(161.327.317,00)
2	Dinas Perhubungan	(66.632.785,20)	(55.925.628,90)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	(88.612.126,00)	(82.589.519,70)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(766.735.852,21)	(696.998.236,71)
5	SKPKD	-	(1.099.800,00)
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(2.760.000,00)	(2.070.000,00)
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.123.200,00)	-
	Jumlah	**(1.105.486.305,41)**	**(1.000.010.502,31)**

5.3.1.3.7.2.4 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti (Rp24.425.898.872,23)

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar (Rp24.425.898.872,23) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp21.559.198.206,70) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.866.700.665,53) atau 13,30% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(11.462.089.623,39)	(9.895.919.260,77)
2	Dinas Kesehatan	(885.316.805,03)	(797.785.566,40)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(196.672.320,00)	(182.472.700,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(172.788.000,00)	(162.624.000,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(86.796.048,42)	(78.323.783,04)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(913.256.004,00)	(825.034.086,00)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(35.171.600,00)	(31.654.440,00)
8	RSJD Surakarta	-	-
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(475.592.850,96)	(445.490.113,24)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(26.248.900,00)	-
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(25.111.440,00)	(22.321.280,00)
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(40.427.000,00)	(37.794.000,00)
13	Dinas Sosial	(312.889.973,23)	(226.328.952,96)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(139.170.996,00)	(112.114.319,00)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(264.677.575,00)	(218.492.380,00)
16	Dinas Ketahanan Pangan	(73.301.600,00)	(65.960.400,00)
17	Dinas Perhubungan	(56.248.673,67)	(35.637.713,33)
18	Dinas Komunikasi dan Informasi	(1.322.490,95)	-
19	Dinas Koperasi dan UKM	(5.400.360,00)	(3.600.240,00)
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(17.603.200,00)	(15.402.800,00)
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(458.391.490,02)	(379.760.949,70)
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(92.165.303,50)	(85.033.567,83)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.095.713.354,44)	(964.747.051,97)
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(2.925.927.333,69)	(2.673.182.038,26)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(846.811.353,03)	(757.279.468,62)
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(36.167.565,00)	(26.619.930,00)
27	SKPKD	-	(181.281.040,00)
28	Sekretariat DPRD	(77.578.240,00)	(70.122.544,00)
29	Inspektorat	(3.148.200,00)	(2.862.000,00)
30	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(26.381.600,00)	(24.497.200,00)
31	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(237.085.108,88)	(201.270.458,24)
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.827.512.602,02)	(2.463.392.873,34)
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(608.931.261,00)	(572.193.050,00)
34	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(24.425.898.872,23)**	**(21.559.198.206,70)**

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp8.041.836.432.320,21)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp8.041.836.432.320,21) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp7.534.456.813.217,39) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp507.379.619.102,82) atau 6,73% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	(7.553.709.879.024,46)	(7.101.438.215.456,08)
2	Bangunan Air	(427.626.741.132,31)	(380.357.076.753,09)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
3	Instalasi	(36.859.427.699,59)	(33.751.447.030,09)
4	Jaringan	(23.640.384.463,85)	(18.910.073.978,13)
	Jumlah	**(8.041.836.432.320,21)**	**(7.534.456.813.217,39)**

5.3.1.3.7.3.1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (Rp7.553.709.879.024,46)

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar (Rp7.553.709.879.024,46) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp7.101.438.215.456,08) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp452.271.663.568,38) atau 6,37% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(13.636.787.607,90)	(12.532.804.433,08)
2	Dinas Kesehatan	(117.825.000,00)	(117.825.000,00)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(76.196.080,00)	(57.147.060,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	(62.913.268,44)	(61.472.905,28)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(3.252.271.425,00)	(2.999.172.375,00)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(2.545.722.400,00)	(2.369.138.700,00)
8	RSJD Surakarta	(1.773.276.682,75)	(1.569.267.311,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(96.997.000,00)	(96.997.000,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(7.446.473.375.885,80)	(7.001.974.503.234,36)
11	Dinas Sosial	(52.859.000,00)	(52.859.000,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(7.181.740.586,34)	(5.869.213.519,09)
13	Dinas Perhubungan	(19.401.959.538,58)	(17.556.068.441,86)
14	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(632.391.836,40)	(407.458.550,80)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	(22.456.781.254,49)	(20.889.285.488,94)
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.854.865.100,00)	(3.462.523.000,00)
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(2.527.126.238,76)	(1.879.823.650,00)
18	Sekretariat Daerah	-	(3.016,67)
19	Sekretariat DPRD	(387.415.000,00)	(387.415.000,00)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(26.900.626.970,00)	-
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.278.748.150,00)	(2.254.610.800,00)
22	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(7.553.709.879.024,46)**	**(7.101.438.215.456,08)**

5.3.1.3.7.3.2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Rp427.626.741.132,31)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar (Rp427.626.741.132,31) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp380.357.076.753,09) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp47.269.664.379,22) atau 12,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(5.164.644.346,79)	(4.619.906.859,62)
2	Dinas Kesehatan	(189.567.003,33)	(171.412.046,67)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(448.187.416,86)	(386.345.151,92)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(175.000.000,00)	(175.000.000,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(295.862.088,63)	(257.932.180,47)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.210.268.203,32)	(1.103.080.096,67)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(39.411.600,00)	(36.127.300,00)
8	RSJD Surakarta	(45.149.425,00)	(41.958.900,00)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(309.238.339,17)	(273.778.108,33)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(46.072.508.156,28)	(43.027.303.280,84)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(323.032.965.269,53)	(285.594.180.252,29)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	(21.226.666,67)	(15.920.000,00)
13	Dinas Sosial	(1.374.389.877,41)	(1.298.442.793,85)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(40.050.000,00)	(37.825.000,00)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(4.317.600,00)	(4.173.680,00)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.428.493.668,20)	(1.165.320.201,72)
17	Dinas Ketahanan Pangan	(104.313.000,00)	(102.167.500,00)
18	Dinas Perhubungan	(4.206.323.437,19)	(3.835.126.793,39)
19	Dinas Koperasi dan UKM	(63.216.440,00)	(55.028.185,00)
20	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(25.738.200,00)	(22.878.400,00)
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(284.966.357,13)	(198.761.353,05)
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(90.320.161,29)	(84.488.709,68)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	(32.334.492.367,69)	(28.741.398.773,66)
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(4.090.567.359,22)	(3.667.782.785,10)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(665.938.566,22)	(299.633.174,26)
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.161.289.074,04)	(4.458.042.418,23)
27	Sekretariat DPRD	(698.080.866,67)	(638.529.308,34)
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(24.566.666,67)	(18.425.000,00)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(2.791.250,00)
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(25.648.975,00)	(23.317.250,00)
31	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(427.626.741.132,31)**	**(380.357.076.753,09)**

5.3.1.3.7.3.3 Akumulasi Penyusutan Instalasi (Rp36.859.427.699,59)

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar (36.859.427.699,59) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp33.751.447.030,09) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp3.107.980.669,50) atau 9,21% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(4.415.110.736,29)	(3.979.012.512,86)
2	Dinas Kesehatan	(1.183.860.458,13)	(1.057.522.359,87)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(3.134.505.779,15)	(1.750.026.814,61)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(4.030.296.529,98)	(4.361.725.064,79)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(6.220.192.438,61)	(5.563.603.768,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.176.192.860,52)	(1.057.279.638,08)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(1.563.143.611,12)	(1.159.861.277,79)
8	RSJD Surakarta	(1.356.491.682,60)	(1.146.514.607,46)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.310.289.712,15)	(1.161.824.852,52)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(40.480.782,50)	(30.949.677,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(174.543.158,82)	(157.654.413,00)
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(54.622.000,00)
13	Dinas Sosial	(21.666.666,67)	(21.333.333,33)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(27.429.900,00)	(25.144.075,00)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(201.729.849,00)	(178.993.937,33)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(664.140.548,50)	(610.377.658,16)
17	Dinas Ketahanan Pangan	(10.360.000,00)	(9.496.666,67)
18	Dinas Perhubungan	(3.788.705.166,76)	(3.459.697.161,12)
19	Dinas Komunikasi dan Informasi	(96.846.557,29)	(84.223.850,00)
20	Dinas Koperasi dan UKM	(10.099.743,00)	-
21	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(53.825.439,50)	(46.310.291,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	(743.680.217,00)	(684.251.679,82)
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(101.585.592,73)	(91.599.265,58)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(457.788.253,13)	(547.211.431,67)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.400.552.864,31)	(4.803.987.356,78)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(16.827.142,50)	(14.979.450,00)
27	Sekretariat Daerah	-	(632.658.825,84)
28	Sekretariat DPRD	(97.504.935,00)	-
29	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(40.083.360,00)	(207.453.976,88)
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(86.905.766,40)	(80.507.426,53)
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(159.036.684,38)	(157.378.370,55)
32	Badan Kepegawaian Daerah	-	(359.892.450,00)
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(231.031.322,50)	(211.974.433,75)
34	Badan Penghubung	(44.519.941,05)	(43.378.404,10)
	Jumlah	**(36.859.427.699,59)**	**(33.751.447.030,09)**

5.3.1.3.7.3.4 Akumulasi Penyusutan Jaringan (Rp23.640.384.463,85)

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar (Rp23.640.384.463,85) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp18.910.073.978,13) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp4.730.310.485,72) atau 25,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(5.516.785.561,24)	(4.989.054.379,97)
2	Dinas Kesehatan	(263.095.773,62)	(233.372.872,29)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(41.653.584,29)	(28.331.503,27)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(866.709.359,67)	(742.145.891,16)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(645.712.961,47)	(588.462.841,26)
6	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(396.684.428,50)	(351.647.153,00)
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(2.604.099.812,55)	(196.800.680,91)
8	Dinas Sosial	(333.333,33)	(32.292.100,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(42.353.766,67)	(39.243.013,33)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(370.251.910,84)	(323.596.750,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(38.928.555,00)	(36.452.501,67)
12	Dinas Perhubungan	(4.083.111.176,99)	(3.401.053.704,33)
13	Dinas Komunikasi dan Informasi	(20.822.510,00)	(17.972.925,00)
14	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(2.872.436,50)	(2.728.814,68)
16	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(121.129.200,78)	(105.776.664,95)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(11.690.000,00)	(11.272.500,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(220.594.085,35)	(199.076.673,27)
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(231.938.958,34)	(200.771.249,98)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(210.011.225,84)	(262.181.899,16)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(7.472.817.511,46)	(6.802.840.637,73)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(104.552.721,66)	(88.388.804,17)
23	SKPKD	-	(26.980.668,00)
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(311.780.768,75)	(203.673.050,00)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(31.477.446,00)	-
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(30.977.375,00)	(25.956.700,00)
27	Badan Penghubung	-	-
	Jumlah	**(23.640.384.463,85)**	**(18.910.073.978,13)**

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Rp2.482.501.235,63)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp2.482.501.235,63) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.976.267.532,97) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp506.233.702,66) atau 25,62% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	(2.482.501.235,63)	(1.976.267.532,97)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	Jumlah	**(2.482.501.235,63)**	**(1.976.267.532,97)**

5.3.1.3.7.4.1 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (Rp2.482.501.235,63)

Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar (Rp2.482.501.235,63) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.976.267.532,97) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp506.233.702,66) atau 25,62% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(2.009.927.235,63)	(1.627.870.232,97)
2	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(10.800.000,00)	(7.200.000,00)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	(400.175.600,00)	(300.131.700,00)
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(46.298.400,00)	(30.865.600,00)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(15.300.000,00)	(10.200.000,00)
	Jumlah	**(2.482.501.235,63)**	**(1.976.267.532,97)**

5.3.1.4 Dana Cadangan Rp600.000.000.000,00

Dana Cadangan sebesar Rp600.000.000.000,00 yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, mengalami **kenaikan** sebesar Rp400.000.000.000,00 atau 200% apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000,00, sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	600.000.000.000,00	200.000.000.000,00
	Jumlah	**600.000.000.000,00**	**200.000.000.000,00**

Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024. Besaran Dana Cadangan sesuai Peraturan Daerah dimaksud sebesar Rp900.000.000.000,00 yang dipenuhi dalam 3 (tiga) tahun anggaran, sejak Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023. Dana Cadangan ditempatkan pada rekening giro Bank Jateng dengan nomor 1.034.03551.9 yang terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah, untuk kemudian ditempatkan pada rekening deposito. Atas penempatan Dana Cadangan pada rekening giro dan deposito tersebut, terdapat penerimaan Jasa Giro dan Bunga Deposito masing-masing sebesar Rp147.723.906,00 dan Rp9.232.876.707,00, yang telah dicatat sebagai Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp9.380.600.613,00

5.3.1.5 Aset Lainnya Rp2.669.623.055.506,14

Aset Lainnya sebesar Rp2.669.623.055.506,14 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.483.022.752.887,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.186.600.302.618,76 atau 80,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	107.001.525.781,00	74.906.991.293,00
2	Aset Tak Berwujud	36.540.063.930,00	28.936.052.970,00
3	Aset Lain-lain	2.898.167.680.722,00	1.756.554.545.840,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(25.209.487.525,70)	(21.190.441.634,27)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(450.364.793.392,16)	(356.184.395.581,35)
6	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	103.488.065.991,00	-
	Jumlah	**2.669.623.055.506,14**	**1.483.022.752.887,38**

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp107.001.525.781,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp107.001.525.781,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp74.906.991.293,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp32.094.534.488,00 atau 42,85% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Sewa	98.492.530.125,00	66.415.293.293,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan	8.491.698.000,00	8.491.698.000,00
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	17.297.656,00	-
4	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-
5	Pinjam Pakai	-	-
	Jumlah	**107.001.525.781,00**	**74.906.991.293,00**

5.3.1.5.1.1 Sewa Rp98.492.530.125,00

Sewa sebesar Rp98.492.530.125,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66.415.293.293,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp32.077.236.832,00 atau 48,30% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	3.645.000.000,00	4.479.874.000,00
2	Dinas Sosial	2.553.490.000,00	-
3	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	44.214.367.984,00	-
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.395.000.000,00	1.395.000.000,00
5	SKPKD	-	60.287.057.425,00
6	Badan Perencaaan Pembangunan Daerah	214.421.868,00	214.421.868,00
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	38.940.000,00	38.940.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	46.431.310.273,00	-
	Jumlah	**98.492.530.125,00**	**66.415.293.293,00**

5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan Rp8.491.698.000,00

Kerjasama Pemanfatan sebesar Rp8.491.698.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.944.850.000,00	2.944.850.000,00
2	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.841.848.000,00	1.841.848.000,00
3	SKPKD	-	3.705.000.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	3.705.000.000,00	-
	Jumlah	**8.491.698.000,00**	**8.491.698.000,00**

5.3.1.5.1.3 Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Rp17.297.656,00

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Rp17.297.656,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.297.656,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	17.297.656,00	-
	Jumlah	**17.297.656,00**	**-**

5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud Rp36.540.063.930,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp36.540.063.930,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.936.052.970,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.604.010.960,00 atau 26,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	324.680.000,00	5.000.000,00
3	Hak Cipta	-	-
4	Hak Paten	-	-
5	Software	33.447.652.913,00	28.666.735.313,00
6	Kajian	2.670.080.360,00	84.397.000,00
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	97.650.657,00	179.920.657,00
	Jumlah	**36.540.063.930,00**	**28.936.052.970,00**

5.3.1.5.2.1 Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise Rp324.680.000,00

Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise sebesar Rp324.680.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.000.000 ,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp319.680.000 atau 6.393,60% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Rsud Tugurejo Semarang	319.680.000,00	-
2	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	**324.680.000,00**	**5.000.000,00**

5.3.1.5.2.2 Aset Tidak Berwujud-Software Rp33.447.652.913,00

Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp33.447.652.913,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.666.735.313,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.780.917.600,00 atau 16,68% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	3.138.682.305,00	2.930.474.367,00
2	Dinas Kesehatan	2.232.936.350,00	1.752.277.800,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	4.678.140.378,00	4.058.890.378,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	749.632.740,00	746.032.740,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.340.090.000,00	1.340.090.000,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	3.176.701.000,00	2.322.001.000,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	1.532.250.000,00	1.532.250.000,00
8	RSJD Surakarta	2.168.846.409,00	2.168.846.409,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	1.423.192.169,00	1.423.192.169,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	465.417.600,00	315.557.000,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	89.880.000,00	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	677.122.600,00	578.387.600,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	189.500.000,00	189.500.000,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	186.500.000,00	176.500.000,00
15	Dinas Sosial	112.650.500,00	112.650.500,00
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	684.630.000,00	611.580.000,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	327.694.000,00	166.820.000,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	414.385.000,00	414.385.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	455.455.500,00	273.248.500,00
21	Dinas Perhubungan	114.000.000,00	66.000.000,00
22	Dinas Komunikasi dan Informasi	1.785.036.000,00	1.785.036.000,00
23	Dinas Koperasi dan UKM	240.633.000,00	216.709.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	522.633.000,00	522.633.000,00
25	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	1.156.135.400,00	1.043.147.950,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	193.550.000,00	140.950.000,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	119.500.000,00	119.500.000,00
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	615.240.900,00	615.240.900,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	508.013.000,00	488.733.000,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.444.815,00	24.544.750,00
32	Sekretariat DPRD	386.301.000,00	386.301.000,00
33	Inspektorat	311.165.000,00	311.165.000,00
34	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.560.000,00	24.560.000,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	287.200.000,00	501.362.000,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.181.595.000,00	809.745.000,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.175.984.810,00	151.539.500,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	614.504.437,00	293.434.750,00
39	Badan Penghubung	93.450.000,00	53.450.000,00
	Jumlah	**33.447.652.913,00**	**28.666.735.313,00**

5.3.1.5.2.3 Aset Tidak Berwujud-Kajian **Rp2.670.080.360,00**

Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp2.670.080.360,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp84.397.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.585.683.360,00 atau 3.063,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	2.480.714.360,00	-
2	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	189.366.000,00	84.397.000,00
	Jumlah	**2.670.080.360,00**	**84.397.000,00**

5.3.1.5.2.4 Aset Tidak Berwujud-Lainnya **Rp97.650.657,00**

Aset Tidak Berwujud-Lainnya sebesar Rp97.650.657,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp179.920.657,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp82.270.000,00) atau (45,73%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.193.157,00	38.393.157,00
2	Dinas Perhubungan	43.457.500,00	43.457.500,00
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	98.070.000,00
	Jumlah	**97.650.657,00**	**179.920.657,00**

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain Rp2.898.167.680.722,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp2.898.167.680.722,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.756.554.545.840,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.141.613.134.882,00 atau 64,99% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	1.029.260.383.989,00	347.363.773.925,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.859.482.341.205,00	1.409.154.825.553,00
3	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	9.424.955.528,00	35.946.362,00
	Jumlah	**2.898.167.680.722,00**	**1.756.554.545.840,00**

5.3.1.5.3.1 Aset Rusak Berat/Usang Rp1.029.260.383.989,00

Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp1.029.260.383.989,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp347.363.773.925,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp681.896.610.064,00 atau 196,31% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	692.991.862.262,00	53.433.288.721,00
2	Dinas Kesehatan	8.294.411.522,00	8.690.021.322,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.593.538.375,00	3.593.538.375,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	104.735.296.713,00	97.490.800.343,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	12.953.328.044,00	5.761.281.546,00
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	6.466.896.237,00	1.514.779.299,00
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	5.259.181.977,00	3.007.704.424,00
8	RSJD Surakarta	5.947.629.422,00	4.953.063.101,00
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	4.273.800.739,00	4.919.814.727,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	23.444.915.636,00	23.745.733.386,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	8.784.997.337,00	8.784.997.337,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	619.423.794,00	619.423.794,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.673.917.484,00	1.673.917.484,00
14	Dinas Sosial	3.154.760.882,00	3.079.307.382,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.497.952.544,00	8.488.452.544,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	237.113.667,00	34.359.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.864.704.574,00	3.232.214.041,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	385.455.000,00	196.030.000,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	50.941.000,00	50.941.000,00
20	Dinas Perhubungan	11.056.459.109,00	10.618.045.913,00
21	Dinas Komunikasi dan Informasi	3.306.254.790,00	2.642.879.674,00
22	Dinas Koperasi dan UKM	3.791.256.377,00	3.791.256.377,00
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	432.290.000,00	432.290.000,00
24	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	25.499.884.976,00	10.676.186.324,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.498.028.824,00	1.498.028.824,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.973.653.323,00	8.973.653.323,00
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.916.440.127,00	2.916.440.127,00

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	31.303.308.727,00	31.299.950.727,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.747.413.588,00	3.747.413.588,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.578.947.509,00	11.149.158.012,00
31	SKPKD	-	536.891.001,00
32	Sekretariat Daerah	7.119.112.364,00	5.948.380.814,00
33	Sekretariat DPRD	14.500.000,00	14.500.000,00
34	Inspektorat	111.319.915,00	111.319.915,00
35	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.335.890.183,00	2.335.890.183,00
36	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.436.151.706,00	1.600.365.726,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.772.773.027,00	10.706.921.406,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.447.572.305,00	4.447.572.305,00
39	Badan Penghubung	688.999.930,00	646.961.860,00
	Jumlah	**1.029.260.383.989,00**	**347.363.773.925,00**

5.3.1.5.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah — Rp1.859.482.341.205,00

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.859.482.341.205,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.409.154.825.553,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp450.327.515.652,00 atau 31,96% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	5.720.093.174,00	2.523.218.373,00
2	Dinas Kesehatan	8.147.468.670,00	7.966.468.071,00
3	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	36.189.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.022.997.195.781,00	1.022.997.195.781,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	449.865.841.573,00	28.233.129.508,00
6	Dinas Ketahanan Pangan	3.653.783.251,00	3.611.294.000,00
7	Dinas Perhubungan	11.000.000,00	-
8	Dinas Koperasi dan UKM	115.500.000,00	-
9	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	697.813.260,00	501.030.560,00
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.200.613.580,00	5.200.613.580,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	779.380.200,00	429.920.000,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	479.043.000,00	3.125.022.700,00
13	SKPKD	-	334.262.661.326,00
14	Sekretariat Daerah	100.000.000,00	-
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	304.271.654,00	304.271.654,00
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	361.295.710.562,00	-
17	Badan Penghubung	78.437.500,00	-
	Jumlah	**1.859.482.341.205,00**	**1.409.154.825.553,00**

5.3.1.5.3.3 Kas Yang Dibatasi Penggunaannya — Rp9.424.955.528,00

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp9.424.955.528,00, mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.389.009.166,00 atau 26.119,50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp35.946.362,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa titipan uang muka pasien pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang sampai akhir periode 31 Desember 2022 belum diambil oleh pasien sebesar Rp44.354.915,00,

b. Jasa Giro dan Bunga Deposito yang diperoleh dari penempatan Dana Cadangan masing-masing sebesar Rp147.723.906,00 dan Rp9.232.876.707,00, dengan total sebesar Rp9.380.600.613,00.

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	44.354.915,00	35.946.362,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	9.380.600.613,00	-
	Jumlah	**9.424.955.528,00**	**35.946.362,00**

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp25.209.487.525,70)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp25.209.487.525,70) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp21.190.441.634,27) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp4.019.045.891,43) atau 18,97% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	(42.296.000,00)	(5.000.000,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(24.980.560.212,70)	(20.973.384.677,27)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	(104.229.822,67)	(33.758.800,00)
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	(82.401.490,33)	(178.298.157,00)
	Jumlah	**(25.209.487.525,70)**	**(21.190.441.634,27)**

5.3.1.5.4.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise (Rp42.296.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise sebesar (Rp42.296.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.000.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp37.296.000,00) atau 745,92% rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Rsud Tugurejo Semarang	(37.296.000,00)	-
2	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
	Jumlah	**(42.296.000,00)**	**(5.000.000,00)**

5.3.1.5.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software (Rp24.980.560.212,70)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar (24.980.560.212,70) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp20.973.384.677,27) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp4.007.175.535,43) atau 19,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(2.412.904.173,44)	(2.155.887.189,70)
2	Dinas Kesehatan	(1.277.544.372,95)	(1.209.926.809,01)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(3.626.379.626,15)	(3.415.262.011,34)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(630.378.959,00)	(536.722.411,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(1.327.756.666,67)	(1.323.756.666,67)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(2.167.957.930,00)	(2.005.764.000,00)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(1.439.090.833,33)	(1.181.760.833,33)
8	RSJD Surakarta	(1.689.308.327,20)	(1.209.770.245,40)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(1.415.492.169,00)	(1.407.792.169,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(144.125.940,00)	(68.677.866,67)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.996.000,00)	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(341.555.676,67)	(231.474.840,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(151.600.000,00)	(113.700.000,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(104.966.666,67)	(67.666.666,67)
15	Dinas Sosial	(112.650.500,00)	(90.521.100,00)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(315.094.883,95)	(200.768.971,83)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(249.522.177,78)	(166.820.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
20	Dinas Ketahanan Pangan	(261.507.000,00)	(178.630.000,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(156.924.408,33)	(78.324.125,00)
22	Dinas Perhubungan	(78.000.000,00)	(66.000.000,00)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(1.626.293.633,34)	(1.491.966.433,34)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(153.805.092,31)	(106.036.600,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(482.320.200,00)	(393.300.933,33)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(573.699.752,21)	(368.761.731,38)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(193.550.000,00)	(140.950.000,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(61.833.333,33)	(45.833.333,33)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(506.272.434,29)	(413.925.111,43)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(458.016.400,00)	(370.266.466,67)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(25.289.142,00)	(12.726.850,00)
33	SKPKD	-	-
34	Sekretariat Daerah	-	-
35	Sekretariat DPRD	(227.934.875,16)	(156.676.749,67)
36	Inspektorat	(192.617.000,00)	(133.343.000,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(24.560.000,00)	(19.648.000,00)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(287.200.000,00)	(501.362.000,00)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.048.825.000,00)	(779.865.000,00)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(611.001.768,58)	(151.539.500,00)
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(547.468.603,67)	(135.197.062,50)
42	Badan Penghubung	(54.116.666,67)	(42.760.000,00)
	Jumlah	**(24.980.560.212,70)**	**(20.973.384.677,27)**

5.3.1.5.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian (Rp104.229.822,67)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar (Rp104.229.822,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp33.758.800,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp70.471.022,67) atau 208,75% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	(41.345.239,34)	-
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(62.884.583,33)	(33.758.800,00)
	Jumlah	**(104.229.822,67)**	**(33.758.800,00)**

5.3.1.5.4.4 Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya (Rp82.401.490,33)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar (Rp82.401.490,33) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp178.298.157,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp95.896.666,67 atau (53,78%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(38.943.990,33)	(36.770.657,00)
2	Dinas Perhubungan	(43.457.500,00)	(43.457.500,00)
3	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	-	-
4	Dinas Koperasi dan UKM	-	-
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	(98.070.000,00)
	Jumlah	**(82.401.490,33)**	**(178.298.157,00)**

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp450.364.793.392,16)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp450.364.793.392,16) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp356.184.395.581,35) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp94.180.397.810,81) atau 26,44% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(450.364.793.392,16)	(356.184.395.581,35)
2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	-
6	Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-
	Jumlah	**(450.364.793.392,16)**	**(356.184.395.581,35)**

5.3.1.5.5.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa (Rp450.364.793.392,16)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar (Rp450.364.793.392,16) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp356.184.395.581,35) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp94.180.397.810,81) atau 26,44% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(89.014.486.052,82)	(41.645.781.989,99)
2	Dinas Kesehatan	(8.882.071.596,82)	(7.697.769.788,93)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(3.200.106.815,00)	(3.200.106.815,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(104.586.170.903,00)	(97.357.574.533,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	(12.684.609.051,33)	(5.755.957.546,00)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(6.431.603.653,67)	(1.479.486.715,67)
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	(4.614.872.714,13)	(2.566.725.390,09)
8	RSJD Surakarta	(4.584.019.043,84)	(3.603.500.036,17)
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	(4.305.681.582,21)	(4.742.211.106,44)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(54.737.543.407,96)	(54.074.864.157,11)
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.158.706.199,50)	(5.146.706.639,50)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(604.369.794,00)	(604.369.794,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.669.331.484,00)	(1.669.331.484,00)
15	Dinas Sosial	(3.037.008.781,99)	(2.954.103.281,99)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(8.318.505.343,99)	(8.318.505.343,99)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(237.113.667,00)	(34.359.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(3.835.443.957,34)	(3.204.737.374,33)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(4.015.844.055,46)	(3.806.874.000,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(50.941.000,00)	(50.941.000,00)
22	Dinas Perhubungan	(9.006.466.376,03)	(8.557.053.180,03)
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	(3.304.777.890,00)	(2.641.402.774,00)
24	Dinas Koperasi dan UKM	(16.684.677.257,36)	(3.767.363.877,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	(432.290.000,00)	(432.290.000,00)
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	(11.703.983.048,67)	(10.343.034.406,93)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.498.028.824,00)	(1.498.028.824,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(7.561.670.868,30)	(7.561.670.868,30)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(7.624.823.415,33)	(7.624.823.415,33)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(17.400.521.567,69)	(17.391.351.056,76)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(3.730.673.588,00)	(3.730.673.588,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.402.732.489,80)	(12.389.499.554,58)
33	SKPKD	-	(3.781.133.708,06)
34	Sekretariat Daerah	(7.218.553.064,00)	(5.947.821.514,00)
35	Sekretariat DPRD	(8.458.333,33)	(8.458.333,33)
36	Inspektorat	(82.685.865,00)	(82.685.865,00)
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(2.294.419.613,13)	(2.290.131.175,77)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(11.750.609.129,92)	(11.020.181.329,92)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(13.019.190.590,54)	(4.601.359.317,13)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	-
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(4.162.967.505,00)	(4.162.967.505,00)
42	Badan Penghubung	(508.834.862,00)	(438.559.292,00)
	Jumlah	**(450.364.793.392,16)**	**(356.184.395.581,35)**

5.3.1.5.6 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Rp103.488.065.991,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran dana transfer ke daerah secara nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Hingga akhir 31 Desember 2022, jumlah Dana Transfer dalam bentuk non tunai yang tersimpan dalam *Treasury Deposit Facility* adalah sebesar Rp103.448.065.991,00.

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	103.488.065.991,00	-
	Jumlah	**103.488.065.991,00**	**-**

5.3.2 KEWAJIBAN Rp338.699.949.467,91

Kewajiban sebesar Rp338.699.949.467,91 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp383.270.068.724,08 mengalami **penurunan** sebesar (Rp44.570.119.256,16) atau (11,63%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	338.699.949.467,91	383.270.068.724,08
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	**338.699.949.467,91**	**383.270.068.724,08**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek **Rp338.699.949.467,91**

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp338.699.949.467,91 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp383.270.068.724,08 mengalami **penurunan** sebesar (Rp44.570.119.256,16) atau (11,63%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	323.256.100,00	281.977.193,00
2	Utang Bunga	-	-
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
5	Pendapatan Dibayar Dimuka	38.988.175.991,98	39.251.892.013,58
6	Utang Belanja	287.498.121.718,93	339.312.280.309,50
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	11.890.395.657,00	4.423.919.208,00
	Jumlah	**338.699.949.467,91**	**383.270.068.724,08**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga **Rp323.256.100,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp323.256.100,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp281.977.193,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp41.278.907,00 atau 14,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Taspen	-	-
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	-	-
5	Utang PPh Pusat	91.973.257,00	45.666.889,00
6	Utang PPN Pusat	229.305.143,00	218.613.315,00
7	Utang Taperum	-	-
8	Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-
9	Utang Pihak Ketiga Lainnya	1.977.700,00	17.696.989,00
	Jumlah	**323.256.100,00**	**281.977.193,00**

5.3.2.1.1.5 Utang PPh Pusat **Rp91.973.257,00**

Utang PPh Pusat sebesar Rp91.973.257,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.666.889,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp47.066.463,00 atau 101,40% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	91.973.257,00	45.666.889,00
	Jumlah	**91.973.257,00**	**45.666.889,00**

5.3.2.1.1.6 Utang PPN Pusat **Rp229.305.143,00**

Utang PPN Pusat sebesar Rp229.305.143,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp218.613.315 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.691.828,00 atau 4,89% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	229.305.143,00	218.613.315,00
	Jumlah	**229.305.143,00**	**218.613.315,00**

5.3.2.1.1.7 Utang Pihak Ketiga Lainnya Rp1.977.700,00

Utang PPN Pusat sebesar Rp1.977.700,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp Rp17.696.989,00, mengalami **penurunan** sebesar (Rp15.719.289,00) atau (88,82%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.977.700,00	17.696.989,00
	Jumlah	**1.977.700,00**	**17.696.989,00**

5.3.2.1.5 Pendapatan Dibayar Dimuka Rp38.988.175.991,98

Pendapatan Dibayar Dimuka sebesar Rp38.988.175.991,98 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39.251.892.013,58 mengalami **penurunan** sebesar (Rp263.716.021,59) atau (0,67%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	38.327.134.107,01	39.251.892.013,58
2	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	-	-
3	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	661.041.884,97	-
	Jumlah	**38.988.175.991,98**	**39.251.892.013,58**

5.3.2.1.5.1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III Rp38.327.134.107,01

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan pendapatan yang diterima atas pelayanan rumah sakit maupun pajak kendaraan bermotor namun belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Adapun jumlahnya adalah sebesar Rp38.327.134.107,01 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39.251.892.013,58 mengalami **penurunan** sebesar (Rp924.757.906,56) atau (2,36%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	538.001.899,00	903.462.692,67
2	RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto	168.988.750,01	256.092.445,54
3	RSUD Tugurejo Semarang	72.246.708,00	120.860.000,00
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	36.880.136,99
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	37.547.896.750,00	37.348.700.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	585.896.738,38
	Jumlah	**38.327.134.107,01**	**39.251.892.013,58**

5.3.2.1.5.4 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa Rp661.041.884,97

Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp661.041.884,97 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp661.041.884,97 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	272.500.000,00	-
2	RSUD Dr Margono Soekarjo Purwokerto	271.889.830,18	-
3	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	48.852.054,79	-

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
4	Dinas Koperasi dan UKM	67.800.000,00	-
	Jumlah	**661.041.884,97**	**-**

5.3.2.1.6 Utang Belanja **Rp287.498.121.718,93**

Utang Belanja sebesar Rp287.498.121.718,93 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp339.312.280.309,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp51.814.158.590,57) atau (15,27%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	7.040.425.144,00	4.287.414.859,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	174.377.494.891,93	238.607.355.361,50
3	Utang Belanja Bunga	-	-
4	Utang Belanja Subsidi	-	-
5	Utang Belanja Hibah	-	-
6	Utang Belanja Modal Tanah	-	-
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	109.612.163,00	-
8	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	2.668.401.804,00
9	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
10	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
11	Utang Belanja Tidak Terduga	-	-
12	Utang Belanja Bagi Hasil	105.970.589.520,00	93.749.108.285,00
13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	Jumlah	**287.498.121.718,93**	**339.312.280.309,50**

5.3.2.1.6.1 Utang Belanja Pegawai **Rp7.040.425.144,00**

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp7.040.425.144,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.287.414.859,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.753.010.285,00 atau 64,21% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
2	Dinas Kesehatan	2.089.289.040,00	1.325.679.102,00
3	RSUD Moewardi Surakarta	2.169.425.000,00	111.600.000,00
4	RSUD Margono Soekarjo	2.779.570.464,00	2.840.510.757,00
5	RSUD Kelet/Donorojo Jepara	-	-
6	RSJD Surakarta	890.640,00	-
7	RSJD Amino Gondohutomo	1.250.000,00	9.625.000,00
	Jumlah	**7.040.425.144,00**	**4.287.414.859,00**

Rincian terkait Utang Belanja Pegawai tersebut antara lain:

Dinas Kesehatan	
Belanja Honorarium	2.089.289.040,00
Total	**2.089.289.040,00**
RS Dr Moewardi Surakarta	
Utang Belanja Honorarium-Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	2.169.425.000,00
Total	**2.169.425.000,00**
RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	
Belanja Gaji PPPK	2.760.720.464,00
Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	18.850.000,00
Total	**2.779.570.464,00**
RSJD Amino Gondohutomo	
Belanja Honorarium Pengelola Keuangan	1.250.000,00
Total	**1.250.000,00**

RSJD Surakarta	
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan	890.640,00

5.3.2.1.6.2 Utang Belanja Barang dan Jasa Rp174.377.494.891,93

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp174.377.494.891,93 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp238.607.355.361,50 mengalami **penurunan** sebesar (Rp64.229.860.469,57) atau (26,92%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	113.537.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	61.529.289.587,00
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	103.999.788.682,00	93.705.709.059,00
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	56.741.384.565,00	55.356.220.308,00
5	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	2.534.687.942,00	2.287.228.312,00
6	RSUD Tugurejo Semarang	3.949.562.109,00	6.098.366.919,00
7	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	1.823.285.806,97	6.736.189.180,00
8	RSJD Surakarta	1.117.498.569,00	8.944.373.425,00
9	RSJD RM Soedjarwadi Klaten	4.211.287.217,96	3.836.441.571,50
	Jumlah	**174.377.494.891,93**	**238.607.355.361,50**

Adapun rincian atas utang belanja barang dan jasa tersebut antara lain:

RSUD Dr Moewardi Surakarta	
Belanja Bahan Kimia	2.834.819.787,00
Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	25.909.000,00
Belanja Bahan Lainnya	1.909.059.000,00
Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	29.173.545.959,00
Belanja Alat Tulis Kantor	59.445.000,00
Belanja Bahan Cetak	6.520.000,00
Belanja Benda Pos	4.935.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	427.683.220,00
Belanja Obat-Obatan	44.156.343.543,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	23.982.037.811,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	11.960.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	100.152.969,00
Belanja Tagihan Telepon	8.919.109,00
Belanja Tagihan Air	81.294.300,00
Belanja Tagihan Listrik	868.320.027,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	153.893.597,00
Belanja Jasa Konsultasi Manajemen	194.950.360,00
Total	**103.999.788.682,00**
RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	
Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran	463.389.549,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	55.403.386.341,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	75.654.045,00
Belanja Tagihan Telepon	10.452.318,00
Belanja Tagihan Air	41.644.250,00
Belanja Tagihan Listrik	676.048.043,00
Belanja Internet	70.810.019,00
Total	**56.741.384.565,00**
RSUD Tugurejo Semarang	
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.949.562.109,00
RSJD Amino Gondohutomo	
Belanja Bahan bakar Pelumas	350.000,00
Belanja Bahan isi Tabung Gas	14.143.679,00

Belanja Bahan Lainnya	12.140.000,00
Belanja Obat-Obatan	121.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	2.347.529.229,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	11.212.100,00
Belanja Tagihan Telepon	1.865.589,00
Belanja Tagihan Air	337.000,00
Belanja Tagihan Listrik	124.381.677,00
Belamja Jasa Pelayanan Non PNS	15.153.827,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	2.220.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan	5.233.841,00
Total	**2.534.687.942,00**
RSJD Surakarta	
Belanja Alat Tulis Kantor	1.440.000,00
Belanja Bahan Cetak	408.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.169.650,00
Belanja Pakaian Dinas harian	11.745.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.028.952.106,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.436.000,00
Belanja Jasa Transaksi Keuangan	31.750,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	11.902.402,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4.733.364,00
Belanja Tagihan Air	18.979.800,00
Belanja Medical checkup	11.323.547,00
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga	971.250,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor	3.935.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan	9.845.700,00
Belanja Perjalanan Dinas	6.625.000,00
Total	**1.117.498.569,00**
RSUD Kelet Donorejo	
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.793.372.626,97
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	3.957.200,00
Belanja Honorarium	4.500.000,00
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	17.455.980,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.000.000,00
Total	**1.823.285.806,97**
RSJD Dr RM Soedjarwadi Klaten	
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	4.211.287.217,96
TOTAL	**4.211.287.217,96**

5.3.2.5.1.7 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp109.612.163,00

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp109.612.163,00 apablia dibandingkan tahun sebelumnya Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp109.612.163,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	109.612.163,00	-
	Jumlah	**109.612.163,00**	**-**

5.3.2.5.1.8 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.668.401.804,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.668.401.804,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Moewardi	-	2.668.401.804,00
	Jumlah	**-**	**2.668.401.804,00**

5.3.2.5.1.12 Utang Belanja Bagi Hasil Rp105.970.589.520,00

Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp105.970.589.520,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp93.749.108.285,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.221.481.235,00 atau 13,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kabupaten Semarang	5.123.447.260,00	2.423.634.417,00
2	Kabupaten Kendal	2.600.544.857,00	1.851.541.694,00
3	Kabupaten Demak	1.583.511.900,00	4.706.680.913,00
4	Kabupaten Grobogan	1.692.253.271,00	3.502.871.496,00
5	Kabupaten Pati	22.471.458,00	5.954.775.300,00
6	Kabupaten Kudus	2.720.764.054,00	2.152.434.208,00
7	Kabupaten Jepara	867.367.953,00	4.201.602.981,00
8	Kabupaten Rembang	3.203.055.383,00	1.439.443.520,00
9	Kabupaten Blora	2.811.187.366,00	1.531.387.636,00
10	Kabupaten Pekalongan	3.729.214.682,00	2.737.657.114,00
11	Kabupaten Batang	3.658.531.330,00	1.521.348.001,00
12	Kabupaten Pemalang	933.426.308,00	5.237.871.223,00
13	Kabupaten Tegal	3.949.751.407,00	2.061.747.513,00
14	Kabupaten Brebes	2.936.420.982,00	2.391.722.607,00
15	Kabupaten Banyumas	3.785.256.768,00	3.058.195.354,00
16	Kabupaten Cilacap	2.824.436.591,00	3.115.063.277,00
17	Kabupaten Purbalingga	1.832.816.292,00	1.550.469.616,00
18	Kabupaten Banjarnegara	1.812.109.666,00	2.972.708.579,00
19	Kabupaten Magelang	2.692.928.545,00	2.061.704.229,00
20	Kabupaten Temanggung	1.519.482.482,00	1.221.344.271,00
21	Kabupaten Wonosobo	1.674.983.776,00	1.419.243.946,00
22	Kabupaten Purworejo	3.414.832.493,00	1.420.788.321,00
23	Kabupaten Kebumen	3.437.968.245,00	4.770.941.665,00
24	Kabupaten Klaten	3.066.129.116,00	2.776.175.889,00
25	Kabupaten Boyolali	3.518.119.980,00	4.918.536.469,00
26	Kabupaten Sragen	4.587.002.208,00	2.090.976.736,00
27	Kabupaten Sukoharjo	5.354.490.516,00	2.179.871.567,00
28	Kabupaten Karanganyar	3.423.815.966,00	1.933.153.948,00
29	Kabupaten Wonogiri	2.756.550.113,00	1.349.000.600,00
30	Kota Semarang	11.371.509.122,00	8.983.304.077,00
31	Kota Pekalongan	1.176.939.802,00	954.437.170,00
32	Kota Surakarta	2.965.280.405,00	2.590.192.791,00
33	Kota Salatiga	2.653.046.940,00	730.901.435,00
34	Kota Tegal	2.184.648.953,00	1.043.145.678,00
35	Kota Magelang	4.086.293.330,00	894.234.044,00
	Jumlah	**105.970.589.520,00**	**93.749.108.285,00**

Pajak Kendaraan Bermotor

		2022	2021
1	Kabupaten Semarang	1.502.996.029,00	1.451.646.197,00
2	Kabupaten Kendal	1.240.652.181,00	1.059.206.393,00
3	Kabupaten Demak	1.018.653.910,00	1.229.751.938,00
4	Kabupaten Grobogan	1.412.214.756,00	1.325.891.185,00
5	Kabupaten Pati	1.477.124.500,00	1.665.979.640,00
6	Kabupaten Kudus	1.457.052.337,00	1.271.459.939,00

Pajak Kendaraan Bermotor

		2022	2021
7	Kabupaten Jepara	1.160.237.863,00	1.386.069.095,00
8	Kabupaten Rembang	1.070.057.391,00	779.265.661,00
9	Kabupaten Blora	810.765.542,00	948.555.341,00
10	Kabupaten Pekalongan	720.192.650,00	813.685.797,00
11	Kabupaten Batang	892.130.989,00	753.918.131,00
12	Kabupaten Pemalang	1.193.925.214,00	1.228.179.490,00
13	Kabupaten Tegal	1.596.137.103,00	1.144.621.233,00
14	Kabupaten Brebes	1.679.517.036,00	1.364.043.705,00
15	Kabupaten Banyumas	1.955.617.734,00	1.894.803.328,00
16	Kabupaten Cilacap	2.060.965.082,00	1.908.547.480,00
17	Kabupaten Purbalingga	963.821.559,00	961.784.007,00
18	Kabupaten Banjarnegara	1.031.896.645,00	863.592.180,00
19	Kabupaten Magelang	1.315.263.711,00	1.210.119.787,00
20	Kabupaten Temanggung	794.068.431,00	773.600.548,00
21	Kabupaten Wonosobo	1.009.323.243,00	865.323.551,00
22	Kabupaten Purworejo	1.070.072.557,00	921.166.481,00
23	Kabupaten Kebumen	1.161.536.538,00	1.199.523.388,00
24	Kabupaten Klaten	1.467.960.719,00	1.704.214.652,00
25	Kabupaten Boyolali	1.137.910.058,00	1.194.472.907,00
26	Kabupaten Sragen	1.612.947.494,00	1.350.109.644,00
27	Kabupaten Sukoharjo	1.358.814.481,00	1.351.316.348,00
28	Kabupaten Karanganyar	1.288.448.490,00	1.219.304.601,00
29	Kabupaten Wonogiri	857.613.632,00	1.147.500.876,00
30	Kota Semarang	5.430.412.771,00	5.450.905.197,00
31	Kota Pekalongan	395.425.193,00	656.733.277,00
32	Kota Surakarta	2.160.624.476,00	1.741.504.170,00
33	Kota Salatiga	522.877.634,00	500.378.528,00
34	Kota Tegal	1.430.074.677,00	678.728.713,00
35	Kota Magelang	2.306.317.667,00	679.636.550,00
	Jumlah	**48.563.650.293,00**	**44.695.539.958,00**

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

		2022	2021
1	Kabupaten Semarang	1.029.708.431,00	862.002.293,00
2	Kabupaten Kendal	813.485.265,00	789.231.946,00
3	Kabupaten Demak	771.097.503,00	981.567.947,00
4	Kabupaten Grobogan	384.307.848,00	910.734.385,00
5	Kabupaten Pati	946.472.010,00	1.104.923.023,00
6	Kabupaten Kudus	766.507.796,00	879.934.977,00
7	Kabupaten Jepara	687.579.443,00	1.033.133.944,00
8	Kabupaten Rembang	1.346.373.543,00	564.324.243,00
9	Kabupaten Blora	494.117.517,00	571.591.209,00
10	Kabupaten Pekalongan	559.059.988,00	619.652.320,00
11	Kabupaten Batang	697.010.093,00	699.449.907,00
12	Kabupaten Pemalang	705.531.818,00	850.792.344,00
13	Kabupaten Tegal	988.449.025,00	905.820.813,00
14	Kabupaten Brebes	1.188.253.188,00	998.953.755,00
15	Kabupaten Banyumas	1.057.569.133,00	1.131.191.568,00
16	Kabupaten Cilacap	1.432.960.503,00	1.146.618.823,00
17	Kabupaten Purbalingga	538.229.909,00	555.918.174,00
18	Kabupaten Banjarnegara	534.782.822,00	540.424.969,00
19	Kabupaten Magelang	727.749.504,00	803.348.697,00
20	Kabupaten Temanggung	379.183.497,00	443.099.148,00
21	Kabupaten Wonosobo	570.872.250,00	530.972.376,00

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

		2022	2021
22	Kabupaten Purworejo	575.802.050,00	494.280.622,00
23	Kabupaten Kebumen	521.965.387,00	697.432.275,00
24	Kabupaten Klaten	776.412.915,00	1.056.142.989,00
25	Kabupaten Boyolali	562.407.631,00	712.043.803,00
26	Kabupaten Sragen	825.371.430,00	739.497.073,00
27	Kabupaten Sukoharjo	684.964.486,00	815.004.453,00
28	Kabupaten Karanganyar	667.415.137,00	684.570.624,00
29	Kabupaten Wonogiri	356.768.130,00	174.447.686,00
30	Kota Semarang	3.197.010.166,00	3.490.233.845,00
31	Kota Pekalongan	335.763.698,00	296.957.174,00
32	Kota Surakarta	931.060.402,00	846.040.274,00
33	Kota Salatiga	434.447.564,00	227.406.821,00
34	Kota Tegal	765.873.816,00	363.739.915,00
35	Kota Magelang	1.229.744.190,00	205.777.656,00
	Jumlah	**28.484.308.088,00**	**27.727.262.071,00**

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

		2022	2021
1	Kabupaten Semarang	2.479.931.755,00	409.021,00
2	Kabupaten Kendal	534.915.387,00	400.089,00
3	Kabupaten Demak	(205.523.789,00)	2.476.809.664,00
4	Kabupaten Grobogan	(125.964.116,00)	1.184.941.095,00
5	Kabupaten Pati	(2.200.773.845,00)	3.182.197.005,00
6	Kabupaten Kudus	514.599.242,00	376.255,00
7	Kabupaten Jepara	(654.493.923,00)	1.779.731.870,00
8	Kabupaten Rembang	794.122.483,00	87.528.223,00
9	Kabupaten Blora	1.504.211.964,00	366.214,00
10	Kabupaten Pekalongan	2.441.987.225,00	1.282.038.057,00
11	Kabupaten Batang	2.052.750.696,00	358.612,00
12	Kabupaten Pemalang	(975.482.569,00)	3.148.947.299,00
13	Kabupaten Tegal	1.339.639.362,00	420.477,00
14	Kabupaten Brebes	58.310.946,00	19.684.780,00
15	Kabupaten Banyumas	706.266.190,00	451.270,00
16	Kabupaten Cilacap	(990.982.237,00)	452.724,00
17	Kabupaten Purbalingga	309.324.119,00	353.267,00
18	Kabupaten Banjarnegara	(221.819.605,00)	1.414.176.897,00
19	Kabupaten Magelang	641.290.108,00	397.472,00
20	Kabupaten Temanggung	349.384.978,00	356.784,00
21	Kabupaten Wonosobo	49.744.978,00	341.989,00
22	Kabupaten Purworejo	1.769.459.559,00	352.987,00
23	Kabupaten Kebumen	1.673.572.649,00	2.826.374.186,00
24	Kabupaten Klaten	816.339.632,00	421.085,00
25	Kabupaten Boyolali	1.820.449.860,00	2.989.288.635,00
26	Kabupaten Sragen	2.166.268.793,00	406.847,00
27	Kabupaten Sukoharjo	3.304.487.598,00	400.120,00
28	Kabupaten Karanganyar	1.449.571.829,00	390.579,00
29	Kabupaten Wonogiri	1.538.938.853,00	366.401,00
30	Kota Semarang	2.707.711.841,00	590.903,00
31	Kota Pekalongan	485.088.495,00	320.263,00

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

		2022	2021
32	Kota Surakarta	(129.426.812,00)	381.366,00
33	Kota Salatiga	1.745.353.648,00	315.570,00
34	Kota Tegal	(237.204.761,00)	332.316,00
35	Kota Magelang	544.704.975,00	251.695,00
	Jumlah	**28.056.755.508,00**	**20.400.932.017,00**

Pajak Air Permukaan

		2022	2021
1	Kabupaten Semarang	110.811.045,00	109.576.906,00
2	Kabupaten Kendal	11.492.024,00	2.703.266,00
3	Kabupaten Demak	(715.724,00)	18.551.364,00
4	Kabupaten Grobogan	21.694.783,00	81.304.831,00
5	Kabupaten Pati	(200.351.207,00)	1.675.632,00
6	Kabupaten Kudus	(17.395.321,00)	663.037,00
7	Kabupaten Jepara	(325.955.430,00)	2.668.072,00
8	Kabupaten Rembang	(7.498.034,00)	8.325.393,00
9	Kabupaten Blora	2.092.343,00	10.874.872,00
10	Kabupaten Pekalongan	7.974.819,00	22.280.940,00
11	Kabupaten Batang	16.639.552,00	67.621.351,00
12	Kabupaten Pemalang	9.451.845,00	9.952.090,00
13	Kabupaten Tegal	25.525.917,00	10.884.990,00
14	Kabupaten Brebes	10.339.812,00	9.040.367,00
15	Kabupaten Banyumas	65.803.711,00	31.749.188,00
16	Kabupaten Cilacap	321.493.243,00	59.444.250,00
17	Kabupaten Purbalingga	21.440.705,00	32.414.168,00
18	Kabupaten Banjarnegara	467.249.804,00	154.514.533,00
19	Kabupaten Magelang	8.625.222,00	47.838.273,00
20	Kabupaten Temanggung	(3.154.424,00)	4.287.791,00
21	Kabupaten Wonosobo	45.043.305,00	22.606.030,00
22	Kabupaten Purworejo	(501.673,00)	4.988.231,00
23	Kabupaten Kebumen	80.893.671,00	47.611.816,00
24	Kabupaten Klaten	5.415.850,00	15.397.163,00
25	Kabupaten Boyolali	(2.647.569,00)	22.731.124,00
26	Kabupaten Sragen	(17.585.509,00)	963.172,00
27	Kabupaten Sukoharjo	6.223.951,00	13.150.646,00
28	Kabupaten Karanganyar	18.380.510,00	28.888.144,00
29	Kabupaten Wonogiri	3.229.498,00	26.685.637,00
30	Kota Semarang	36.374.344,00	41.574.132,00
31	Kota Pekalongan	(39.337.584,00)	426.456,00
32	Kota Surakarta	3.022.339,00	2.266.981,00
33	Kota Salatiga	(49.631.906,00)	2.800.516,00
34	Kota Tegal	(8.342.486,00)	344.734,00
35	Kota Magelang	5.526.498,00	8.568.143,00
	Jumlah	**631.627.924,00**	**925.374.239,00**

Pajak Rokok

		2022	2021
1	Kota Tegal	234.247.707,00	
	Jumlah	**234.247.707,00**	**-**

5.3.2.1.7 Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp11.890.395.657,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp11.890.395.657,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.423.919.208,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.466.476.449,00 atau 168,78% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	-	-
2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	11.846.040.742,00	4.387.972.846,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	44.354.915,00	35.946.362,00
	Jumlah	**11.890.395.657,00**	**4.423.919.208,00**

5.3.2.1.7.2 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer **Rp11.846.040.742,00**

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer terdiri atas lebih salur atas dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2022 berdasarkan PMK 127/PMK.07/2022 sebesar Rp11.846.040.742,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.387.972.846,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.458.067.896,00 atau 169,97% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	11.846.040.742,00	4.387.972.846,00
	Jumlah	**11.846.040.742,00**	**4.387.972.846,00**

5.3.2.1.7.3 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp44.354.915,00**

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sisa titipan uang muka pasien pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang sampai akhir periode 31 Desember 2022 belum diambil oleh pasien yaitu sebesar Rp44.354.915,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp35.946.362,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.408.553,00 atau 23,39% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	44.354.915,00	35.946.362,00
	Jumlah	**44.354.915,00**	**35.946.362,00**

5.3.2.2 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah.

Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

a. Barang Milik Daerah berupa bangunan SMA Negeri 1 Tegal dan tanah seluas 6.890 m^2 senilai Rp 2.219.562.000,- di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok atas nama Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 23/G/2017/PTUN.Smg tanggal 18 Oktober 2017 yang intinya mengabulkan gugatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah ProvinsiJawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya

Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 24/B/2018/PT.TUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2018 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 414 K/TUN/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 129 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang intinya menolakpermohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berproses memohon fasilitasi penggunaan tanah seluas 6890 m² sebagai bangunan SMA Negeri 1 Kota Tegal.

b. Sengketa tanah antara Sdr. Soekarmo selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar selaku Tergugat dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah selaku Tergugat Intervensi mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan Nomor: 35/G/2022/PTUN.Smg.

Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00005/ Desa/Kelurahan Gayamdompo, tanggal 30 Maret 2002, Surat Ukur Nomor: 09323/ Gayamdompo/1998, tanggal 20 Agustus 1998, luas 1.970 m² atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Penggugat adalah pihak pemegang hak atas tanah yang tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor : 1108/Desa Bangsri, tanggal 14 Oktober 1991, Surat Ukur/ Gambar Situasi Sertifikat Nomor : 9672/HM/1991 tanggal 15 Oktober 1991, luas 1.048 m^2;

Bahwa terhadap gugatan tersebut diatas telah diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat majelis hakim tidak menemukan patok batas, yang ada berupa tugu pembatas Desa berada di Utara, akan tetapi tugu tersebut masih belum mempunyai kejelasan letak batas Desa Bangsri dengan Kelurahan Gayamdompo;

"Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00005/Gayamdompo atas nama Pemerintah Propinsi Jawa Tengah (objek sengketa) dan sertipikat Hak Milik Nomor: 1108/Bangsri atas nama Sukarmo (Penggugat) telah memiliki legalitas. Pertentangan wilayah yang didalilkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan harus diselesaikan terlebih dahulu mengenai kepastian wilayahny, apakah benar lokasi tanah milik Penggugat (Desa Bangsri), dan lokasi tanah yang diterbitkan Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00005 masuk wilayah Desa Bangsri ataukah masuk wilayah Kelurahan Gayamdompo";

"Menimbang, bahwa esensi permasalahan hukum dalam sengketa ini menyangkut masalah pertentangan wilayah antara Desa Bangsri dan Kelurahan Gayamdompo, maka sengketa in casu tidaklah memenuhi unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara secara kumulatif sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";

Maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dan menerima eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi terkait dengan kompetensi absolut. (Putusan tanggal 12 Oktober 2022).

Bahwa atas putusan tersebut diatas Penggugat mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 28

Oktober 2022 dan hasil Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor: 179/B/2022/PT.TUN.Sby yang intinya Gugatan Penggugat tidak diterima, sehingga kedudukan Sertifikat Hak Pakai Nomor 5 atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sah dan masih berlaku, namun Penggugat masih ada peluang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

5.3.3 EKUITAS **Rp39.937.638.803.342,55**

Ekuitas sebesar Rp39.937.638.803.342,55, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.908.675.268.489,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.028.963.534.853,55 atau 2,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	8.024.122.570.801,57	7.784.477.991.917,73
2	Dinas Kesehatan	427.479.121.622,05	524.676.286.848,16
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.212.162.539.300,59	1.214.138.050.969,73
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	796.959.164.018,09	821.791.313.198,54
5	RSUD Tugurejo Semarang	390.793.880.984,31	429.351.355.755,76
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	774.802.030.754,70	803.533.757.395,20
7	RSJD Amino Gondohutomo Semarang	214.482.603.251,88	234.412.760.840,99
8	RSJD Surakarta	171.603.667.139,81	174.372.017.095,16
9	RSJD Dr RM. Sujarwadi Klaten	93.051.647.824,99	104.483.630.784,64
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.807.382.960.582,51	5.727.793.991.588,99
11	Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	6.080.772.639.692,81	6.021.338.925.963,22
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.435.909.070,25	27.270.537.410,42
13	Satuan Polisi Pamong Praja	18.059.689.925,94	19.043.102.730,80
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.281.713.958,68	17.439.852.334,19
15	Dinas Sosial	246.458.231.139,88	251.208.351.757,31
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.474.037.434,37	26.289.894.517,57
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	135.697.591.518,21	138.708.180.795,50
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.826.505.128,26	12.164.380.864,93
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	141.155.896.661,56	139.866.085.922,57
20	Dinas Ketahanan Pangan	17.507.418.810,15	15.238.492.921,84
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15.953.049.942,26	16.448.770.458,87
22	Dinas Perhubungan	358.116.902.551,25	361.719.250.466,77
23	Dinas Komunikasi dan Informasi	73.391.722.311,47	40.712.293.496,35
24	Dinas Koperasi dan UKM	57.075.359.349,64	41.407.355.947,10
25	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	13.702.400.831,15	14.623.098.955,98
26	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	931.390.701.446,01	858.747.991.199,37
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	31.227.826.485,87	32.010.895.117,92
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	391.301.734.628,40	365.280.247.673,77
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	958.663.129.363,26	962.964.122.978,55
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	508.259.442.997,69	502.484.198.788,84

		2022 (Rp)	2021 (Rp)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111.085.372.573,70	113.172.415.923,89
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	93.018.875.108,30	97.494.420.803,24
33	SKPKD	-	8.478.839.474.763,17
34	Sekretariat Daerah	228.783.022.078,72	241.572.324.210,23
35	Sekretariat DPRD	65.048.985.748,06	51.302.280.519,54
36	Inspektorat	8.493.832.244,17	9.463.122.327,99
37	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	133.191.219.906,72	132.530.563.587,97
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.128.987.829.241,75	1.777.263.487.691,78
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.014.365.409.704,60	133.808.538.896,27
40	Badan Kepegawaian Daerah	14.021.485.798,19	14.144.684.325,14
41	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	153.658.346.312,47	154.501.020.433,94
42	Badan Penghubung	19.392.335.098,26	20.585.748.309,09
	Jumlah	**39.937.638.803.342,55**	**38.908.675.268.489,00**

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Struktur penyajian LO Tahun 2022 dan 2021 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan	24.167.935.634.127,00	4.650.812.773.458,12	2.667.556.801.700,17	26.151.191.605.884,95	28.014.504.212.770,56	(1.863.312.606.885,61)	(6,65)
2	Beban	22.220.053.388.224,00	21.014.536.304.765,74	18.571.914.487.275,76	24.662.675.205.713,98	26.335.553.248.899,89	(1.672.878.043.185,91)	(6,35)
	Surplus/ (Defisit) Operasional	**1.947.882.245.903,00**	**(16.363.723.531.307,62)**	**(15.904.357.685.575,59)**	**1.488.516.400.170,97**	**1.678.950.963.870,67**	**(190,434,563,699,70)**	**(11,34)**
3	Kegiatan Non Operasional	-	(711.896.326.083,56)	-	(711.896.326.083,56)	324.852.321.985,87	(1.036.748.648.069,43)	(319,14)
	Surplus/ (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**1.947.882.245.903,00**	**(17.075.619.857.391,18)**	**(15.904.357.685.575,59)**	**776.620.074.087,41**	**2.003.803.285.856,54**	**(1.227.183.211.769,13)**	**(61,24)**
4	Pos Luar Biasa	(16.545.479.100,00)	-	-	(16.545.479.100,00)	(4.329.429.000,00)	(12.216.050.100,00)	282,16
	Jumlah	**1.931.336.766.803,00**	**(17.075.619.857.391,18)**	**(15.904.357.685.575,59)**	**760.074.594.987,41**	**1.999.473.856.856,54**	**(1.239.399.261.869,13)**	**(61,99)**

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO **Rp26.151.191.605.884,95**

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp26.151.191.605.884,95 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.014.504.212.770,56 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.863.312.606.885,56) atau (6,65%) dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	16.264.618.853.852,00	3.273.328.074.620,21	2.562.784.245.788,87	16.975.162.682.683,34	15.317.147.124.796,49	1.658.015.557.886,90	10,82
2	Pendapatan Transfer - LO	7.810.882.578.787,00	118.252.342.968,00	102.150.147.692,00	7.826.984.774.063,00	11.610.733.551.105,00	(3.783.748.777.042,00)	(32,59)
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah - LO	92.434.201.488,00	1.259.232.355.869,91	2.622.408.219,30	1.349.044.149.138,61	1.086.623.536.869,07	262.420.612.269,54	24,15
	Jumlah	**24.167.935.634.127,00**	**4.650.812.773.458,12**	**2.667.556.801.700,17**	**26.151.191.605.884,95**	**28.014.504.212.770,56**	**(1.863.312.606.885,56)**	**(6,65)**

Realisasi Pendapatan Daerah-LO sebesar Rp26.151.191.605.884,95 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA **24.167.935.634.127,00**

Mutasi Tambah

- Saldo Akhir Piutang 2.301.428.455.902,47
- Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka 38.486.196.503,57
- Hibah Barang Menjadi Aset 183.178.088.117,00
- Hibah Barang Menjadi Bahan Habis Pakai 1.041.013.846.984,91
- Bantuan Pemerintah berupa Aset 4.771.611.736,00
- Bantuan Pemerintah berupa Uang 29.545.385.529,00
- Aset Hasil Usaha Mandiri 723.423.503,00
- Reklasifikasi pendapatan dari Penerimaan Pembiayaan 81.719.452,00

➢ Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	604.762.908.402,17	
➢ Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	332.010.658.330,00	
➢ Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	103.488.065.991,00	
➢ Pendapatan Giro Atas Dana Cadangan	9.380.600.613,00	
➢ Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	1.941.812.394,00	
Total Penambahan		**4.650.812.773.458,12**
Mutasi Kurang		
➢ Saldo Awal Piutang	2.477.695.358.791,08	
➢ Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	38.208.938.635,00	
➢ Penyusutan atas Hibah Barang menjadi Aset	2.622.408.219,30	
➢ Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	6.027.730.630,79	
➢ Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	143.002.365.424,00	
Total Pengurangan		**2.667.556.801.700,17**
Pendapatan-LO		**26.151.191.605.884,95**

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Rp16.975.162.682.683,34

PAD-LO terealisasi sebesar Rp16.975.162.682.683,34 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.317.147.124.796,49 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.658.015.557.886,85 atau 10,82% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	13.484.851.151.740,00	2.581.625.766.720,00	2.153.943.598.533,00	**13.912.533.319.927,00**	11.772.065.741.700,00	2.140.467.578.227,00	18,18
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	115.158.014.199,00	4.956.711.919,38	5.362.056.389,00	114.752.669.729,38	91.286.282.786,62	23.466.386.942,76	25,71
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO	546.717.104.899,00	604.762.908.402,17	6.027.730.630,79	**1.145.452.282.670,38**	957.641.390.593,36	187.810.892.077,02	19,61
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	2.117.892.583.014,00	81.982.687.578,66	397.450.860.236,08	1.802.424.410.356,58	2.496.153.709.716,51	(693.729.299.359,93)	(27,79)
	Jumlah	**16.264.618.853.852,00**	**3.273.328.074.620,21**	**2.562.784.245.788,87**	**16.975.162.682.683,34**	**15.317.147.124.796,49**	**1.658.015.557.886,85**	**10,82**

Realisasi PAD-LO terealisasi sebesar Rp16.975.162.682.683,34, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**16.264.618.853.852,00**
Mutasi Tambah		
➢ Saldo Akhir Piutang	2.286.664.178.925,46	
➢ Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	38.486.196.503,58	
➢ Reklasifikasi pendapatan dari Penerimaan Pembiayaan	81.719.452,00	
➢ Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	604.762.908.402,17	
➢ Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	332.010.658.330,00	
➢ Pendapatan Giro Atas Dana Cadangan	9.380.600.613,00	
➢ Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	1.941.812.394,00	
Total Penambahan		**3.273.328.074.620,21**
Mutasi Kurang		
➢ Saldo Awal Piutang	2.477.695.358.791,08	
➢ Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	38.208.938.635,00	
➢ Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	6.027.730.630,79	

- Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya 40.852.217.732,00

Total Pengurangan **2.562.784.245.788,87**

Pendapatan-LO **16.975.162.682.683,34**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO Rp13.912.533.319.927,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO terealisasi sebesar Rp13.912.533.319.927,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.772.065.741.700,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.140.467.578.227,00 atau 18,18%, dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	5.432.525.592.000,00	2.581.578.350.730,00	2.153.850.818.294,00	5.860.253.124.436,00	4.812.801.768.825,00	1.047.451.355.611,00	21,76
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	2.886.101.450.650,00			2.886.101.450.650,00	2.775.978.070.000,00	110.123.380.650,00	3,97
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	2.248.760.733.492,00			2.248.760.733.492,00	1.826.681.450.277,00	422.079.283.215,00	23,11
4	Pajak Air Permukaan - LO	18.802.964.785,00	47.415.990,00	92.780.239,00	18.757.600.536,00	16.965.914.049,00	1.791.686.487,00	10,56
5	Pajak Rokok - LO	2.898.660.410.813,00			2.898.660.410.813,00	2.339.638.538.549,00	559.021.872.264,00	23,89
	Jumlah	**13.484.851.151.740,00**	**2.581.625.766.720,00**	**2.153.943.598.533,00**	**13.912.533.319.927,00**	**11.772.065.741.700,00**	**2.140.467.578.227,00**	**18,18**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp13.912.533.319.927,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA **13.484.851.151.740,00**

Mutasi Tambah

- Saldo Akhir Piutang 2.212.266.408.390,00
- Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka 37.348.700.000,00
- Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa 332.010.658.330,00

Total Penambahan **2.581.625.766.720,00**

Mutasi Kurang

- Saldo Awal Piutang 2.116.395.701.783,00
- Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka 37.547.896.750,00

Total Pengurangan **2.153.943.598.533,00**

Pendapatan-LO **13.912.533.319.927,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp114.752.669.729,38

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp114.752.669.729,38, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp91.286.282.786,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.466.386.942,76 atau 25,71%, dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Jasa Umum - LO	25.848.603.574,00	183.846.044,00	1.156.912.071,00	24.875.537.547,00	17.840.871.515,00	7.034.666.032,00	39,43
2	Retribusi Jasa Usaha - LO	85.078.946.825,00	4.772.865.875,38	4.205.144.318,00	85.646.668.382,38	67.276.216.531,62	18.370.451.850,76	27,31

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
3	Retribusi Perizinan Tertentu - LO	4.230.463.800,00	-	-	4.230.463.800,00	6.169.194.740,00	(1.938.730.940,00)	(31,43)
	Jumlah	**115.158.014.199,00**	**4.956.711.919,38**	**5.362.056.389,00**	**114.752.669.729,38**	**91.286.282.786,62**	**23.466.386.942,76**	**25,71**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp114.752.669.729,38, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**115.158.014.199,00**
Mutasi Tambah		
➢ Saldo Akhir Piutang	4.370.815.181,00	
➢ Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	585.896.738,38	
Total Penambahan		**4.956.711.919,38**
Mutasi Kurang		
➢ Saldo Awal Piutang	5.294.256.389,00	
➢ Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	67.800.000,00	
Total Pengurangan		**5.362.056.389,00**
Total Pendapatan-LO		**114.752.669.729,38**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Rp24.875.537.547,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp24.875.537.547,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.840.871.515,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.034.666.032,00 atau 39,43% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	25.271.653.574,00	183.846.044,00	1.156.912.071,00	24.298.587.547,00	17.243.971.515,00	7.054.616.032,00	40,91
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	278.700.000,00	-	-	278.700.000,00	63.400.000,00	215.300.000,00	339,59
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	298.250.000,00	-	-	298.250.000,00	533.500.000,00	(235.250.000,00)	(44,10)
	Jumlah	**25.848.603.574,00**	**183.846.044,00**	**1.156.912.071,00**	**24.875.537.547,00**	**17.840.871.515,00**	**7.034.666.032,00**	**39,43**

Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp24.875.537.547,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**25.848.603.574,00**
Mutasi Tambah		
➢ Saldo Akhir Piutang	183.846.044,00	
Total Penambahan		**183.846.044,00**
Mutasi Kurang		
➢ Saldo Awal Piutang	1.156.912.071,00	
Total Pengurangan		**1.156.912.071,00**
Total Pendapatan-LO		**24.875.537.547,00**

5.4.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Rp24.298.587.547,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp24.298.587.547,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.243.971.515,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.054.616.032,00 atau 40,91% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	25.271.653.574,00	183.846.044,00	1.156.912.071,00	24.298.587.547,00	17.243.971.515,00	7.054.616.032,00	40,91
	Jumlah	**25.271.653.574,00**	**183.846.044,00**	**1.156.912.071,00**	**24.298.587.547,00**	**17.243.971.515,00**	**7.054.616.032,00**	**40,91**

5.4.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO Rp278.700.000,00

Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp278.700.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp63.400.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp215.300.000,00 atau 339,59% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	3.300.000,00	2.700.000,00	81,82
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	272.700.000,00	-	-	272.700.000,00	60.100.000,00	212.600.000,00	353,74
	Jumlah	**278.700.000,00**	**-**	**-**	**278.700.000,00**	**63.400.000,00**	**215.300.000,00**	**339,59**

5.4.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO Rp298.250.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan terealisasi sebesar Rp298.250.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp533.500.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp235.250.000,00) atau (44,10%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	298.250.000,00	-	-	298.250.000,00	533.500.000,00	(235.250.000,00)	(44,10)
	Jumlah	**298.250.000,00**	**-**	**-**	**298.250.000,00**	**533.500.000,00**	**(235.250.000,00)**	**(44,10)**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Rp85.646.668.382,38

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp85.646.668.382,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67.276.216.531,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp18.370.451.850,76 atau 27,31% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	48.995.329.563,00	667.563.157,38	99.841.600,00	49.563.051.120,38	37.748.553.995,62	11.814.497.124,76	31,30
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	536.446.650,00	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00	536.446.650,00	458.284.775,00	78.161.875,00	17,06
3	Retribusi Terminal-LO	3.868.353.200,00	-	-	3.868.353.200,00	1.279.079.750,00	2.589.273.450,00	202,43
4	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila-LO	3.524.730.000,00	-	-	3.524.730.000,00	694.235.000,00	2.830.495.000,00	407,71
5	Retribusi Kepelabuhan-LO	6.535.788.500,00	-	-	6.535.788.500,00	5.532.632.500,00	1.003.156.000,00	18,13
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	646.295.350,00	-	-	646.295.350,00	269.133.000,00	377.162.350,00	140,14
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	20.972.003.562,00	-	-	20.972.003.562,00	21.294.297.511,00	(322.293.949,00)	(1,51)
	Jumlah	**85.078.946.825,00**	**4.772.865.875,38**	**4.205.144.318,00**	**85.646.668.382,38**	**67.276.216.531,62**	**18.370.451.850,76**	**27,31**

Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp85.646.668.382,38 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**85.078.946.825,00**
Mutasi Tambah		
➢ Saldo Akhir Piutang	4.186.969.137,00	
➢ Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	585.896.738,38	
Total Penambahan		**4.772.865.875,38**
Mutasi Kurang		
➢ Saldo Awal Piutang	4.137.344.318,00	
➢ Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	67.800.000,00	
Total Pengurangan		**4.205.144.318,00**
Total Pendapatan-LO		**85.646.668.382,38**

5.4.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LO — Rp49.563.051.120,38

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp49.563.051.120,38 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp37.748.553.995,62 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.814.497.124,76 atau 31,30% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.366.029.500,00	-	-	3.366.029.500,00	384.100.000,00	2.981.929.500,00	776,34
2	Dinas Kesehatan	672.314.100,00	-	-	672.314.100,00	227.436.500,00	444.877.600,00	195,61
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	8.162.613.237,00	-	-	8.162.613.237,00	7.052.041.238,00	1.110.571.999,00	15,75
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	4.264.111.751,00	49.624.819,00	-	4.313.736.570,00	3.687.879.541,00	625.857.029,00	16,97
5	Satuan Polisi Pamong Praja	482.220.480,00	-	-	482.220.480,00	412.747.200,00	69.473.280,00	16,83
6	Dinas Sosial	130.382.850,00	-	-	130.382.850,00	96.005.900,00	34.376.950,00	35,81
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.080.462.500,00	-	-	2.080.462.500,00	2.239.177.500,00	(158.715.000,00)	(7,09)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.483.553.630,00	-	-	4.483.553.630,00	4.287.836.770,00	195.716.860,00	4,56
9	Dinas Perhubungan	55.990.000,00	-	-	55.990.000,00	25.035.000,00	30.955.000,00	123,65
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	510.563.250,00	-	67.800.000,00	442.763.250,00	457.460.030,00	(14.696.780,00)	(3,21)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.344.577.000,00	-	-	2.344.577.000,00	261.172.650,00	2.083.404.350,00	797,71
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	42.465.500,00	-	-	42.465.500,00	12.977.500,00	29.488.000,00	227,22

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.358.112.480,00	-	-	4.358.112.480,00	4.277.056.448,00	81.056.032,00	1,90
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.434.945.011,00	-	-	1.434.945.011,00	1.204.972.877,00	229.972.134,00	19,09
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.804.750.365,00	-	-	1.804.750.365,00	1.392.727.850,00	412.022.515,00	29,58
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	833.080.000,00	-	-	833.080.000,00	512.947.000,00	320.133.000,00	62,41
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.349.931.094,00	-	-	3.349.931.094,00	2.977.834.969,00	372.096.125,00	12,50
19	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.460.000,00	-	-	26.460.000,00	26.460.000,00	-	100,00
20	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.575.981.284,00	-	-	4.575.981.284,00	4.363.246.121,00	212.735.163,00	4,88
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPKD)	2.654.010.781,00	617.938.338,38	32.041.600,00	3.239.907.519,38	1.344.433.901,62	1.895.473.617,76	140,99
22	Badan Kepegawaian Daerah	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	10.000.000,00	2.000.000,00	20,00
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.251.974.750,00	-		2.251.974.750,00	1.351.805.000,00	900.169.750,00	66,59
24	Sekretariat Daerah	516.200.000,00	-	-	516.200.000,00	452.600.000,00	63.600.000,00	14,05
25	Sekretariat DPRD	552.600.000,00	-	-	552.600.000,00	550.600.000,00	2.000.000,00	0,36
26	Badan Penghubung	-	-	-	-	110.000.000,00	(110.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**48.995.329.563,00**	**667.563.157,38**	**99.841.600,00**	**49.563.051.120,38**	**37.748.553.995,62**	**11.814.497.124,76**	**31,30**

5.4.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO Rp536.446.650,00

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp536.446.650,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp458.284.775,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp78.161.875,00 atau 17,06% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	536.446.650,00	-	-	536.446.650,00	458.284.775,00	78.161.875,00	17,06
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00	-	-	-	-
	Jumlah	**536.446.650,00**	**4.105.302.718,00**	**4.105.302.718,00**	**536.446.650,00**	**458.284.775,00**	**78.161.875,00**	**17,06**

5.4.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal-LO Rp3.868.353.200,00

Pendapatan Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp3.868.353.200,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.279.079.750,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.589.273.450,00 atau 202,43% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	3.868.353.200,00	-	-	3.868.353.200,00	1.279.079.750,00	2.589.273.450,00	202,43
	Jumlah	**3.868.353.200,00**	**-**	**-**	**3.868.353.200,00**	**1.279.079.750,00**	**2.589.273.450,00**	**202,43**

5.4.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO Rp3.524.730.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp3.524.730.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp694.235.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.830.495.000,00 atau 407,71% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Sosial	21.610.000,00	-	-	21.610.000,00	13.335.000,00	8.275.000,00	62,05
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	163.600.000,00	-	-	163.600.000,00	139.450.000,00	24.150.000,00	17,32
3	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	428.175.000,00	-	-	428.175.000,00	107.775.000,00	320.400.000,00	297,29
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	124.500.000,00	-	-	124.500.000,00	15.400.000,00	109.100.000,00	708,44
5	Sekretariat Daerah	99.800.000,00	-	-	99.800.000,00	33.000.000,00	66.800.000,00	202,42
6	Sekretariat DPRD	285.050.000,00	-	-	285.050.000,00	158.680.000,00	126.370.000,00	79,64
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.811.770.000,00	-	-	1.811.770.000,00	-	1.811.770.000,00	100
8	Badan Penghubung	590.225.000,00	-	-	590.225.000,00	226.595.000,00	363.630.000,00	160,48
	Jumlah	**3.524.730.000,00**	**-**	**-**	**3.524.730.000,00**	**694.235.000,00**	**2.830.495.000,00**	**407,71**

5.4.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Kepelabuhan-LO Rp6.535.788.500,00

Pendapatan Retribusi Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp6.535.788.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.532.632.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.003.156.000,00 atau 18,13% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.535.788.500,00	-	-	6.535.788.500,00	5.532.632.500,00	1.003.156.000,00	18,13
	Jumlah	**6.535.788.500,00**	**-**	**-**	**6.535.788.500,00**	**5.532.632.500,00**	**1.003.156.000,00**	**18,13**

5.4.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO Rp646.295.350,00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO terealisasi sebesar Rp646.295.350,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp269.133.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp377.162.350,00 atau 140,14% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	172.904.000,00	-	-	172.904.000,00	-	172.904.000,00	100,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	447.946.350,00	-	-	447.946.350,00	256.788.000,00	191.158.350,00	74,44
3	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.445.000,00	-	-	25.445.000,00	12.345.000,00	13.100.000,00	106,12
	Jumlah	**646.295.350,00**	**-**	**-**	**646.295.350,00**	**269.133.000,00**	**377.162.350,00**	**140,14**

5.4.1.1.2.2.7 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO Rp20.972.003.562,00

Pendapatan Retribusi Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp20.972.003.562,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.294.297.511,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp322.293.949,00) atau (1,51%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.965.855.400,00	-	-	1.965.855.400,00	1.688.769.844,00	277.085.556,00	16,41
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.831.532.372,00	-	-	11.831.532.372,00	11.039.412.404,00	792.119.968,00	7,18
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.961.662.790,00	-	-	5.961.662.790,00	7.061.053.263,00	(1.099.390.473,00)	(15,57)
4	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	1.212.953.000,00	-	-	1.212.953.000,00	1.505.062.000,00	(292.109.000,00)	(19,41)
	Jumlah	**20.972.003.562,00**	**-**	**-**	**20.972.003.562,00**	**21.294.297.511,00**	**(322.293.949,00)**	**(1,51)**

5.4.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Rp4.230.463.800,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp4.230.463.800,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.169.194.740,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.938.730.940,00) atau (31,43%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	495.100.000,00	-	-	495.100.000,00	673.827.500,00	(178.727.500,00)	(26,52)
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	3.735.363.800,00	-	-	3.735.363.800,00	2.816.377.700,00	918.986.100,00	32,63
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	-	-	-	-	2.678.989.540,00	(2.678.989.540,00)	(100,00)
	Jumlah	**4.230.463.800,00**	**-**	**-**	**4.230.463.800,00**	**6.169.194.740,00**	**(1.938.730.940,00)**	**(31,43)**

5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO Rp495.100.000,00

Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terealisasi sebesar Rp495.100.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp673.827.500,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp178.727.500,00) atau (26,52%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	495.100.000,00	-	-	495.100.000,00	673.827.500,00	(178.727.500,00)	(26,52)
	Jumlah	**495.100.000,00**	**-**	**-**	**495.100.000,00**	**673.827.500,00**	**(178.727.500,00)**	**(26,52)**

5.4.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO Rp3.735.363.800,00

Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan terealisasi sebesar Rp3.735.363.800,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.816.377.700,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp918.986.100,00 atau 32,63% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.735.363.800,00	-	-	3.735.363.800,00	2.816.377.700,00	918.986.100,00	32,63
	Jumlah	**3.735.363.800,00**	**-**	**-**	**3.735.363.800,00**	**2.816.377.700,00**	**918.986.100,00**	**32,63**

5.4.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) -LO Rp0,00

Pendapatan Retribusi IMTA terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.678.989.540,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.678.989.540,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	2.678.989.540,00	(2.678.989.540,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.678.989.540,00**	**(2.678.989.540,00)**	**(100,00)**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Rp1.145.452.282.670,38

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp1.145.452.282.670,38, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp957.641.390.593,36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp187.810.892.077,02 atau 19,61% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	5.643.744.878,00	-	-	5.643.744.878,00	30.996.583.252,61	(25.352.838.374,61)	(81,79)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	541.073.360.021,00	604.762.908.402,17	6.027.730.630,79	1.139.808.537.792,38	926.644.807.340,75	213.163.730.451,63	23,00
	Jumlah	**546.717.104.899,00**	**604.762.908.402,17**	**6.027.730.630,79**	**1.145.452.282.670,38**	**957.641.390.593,36**	**187.810.892.077,02**	**19,61**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp1.145.452.282.670,38, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA **546.717.104.899,00**

Mutasi Tambah

- Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD 604.762.908.402,17

Total Penambahan **604.762.908.402,17**

Mutasi Kurang

- Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD 6.027.730.630,79

Total Pengurangan **6.027.730.630,79**

Pendapatan-LO **1.145.452.282.670,38**

5.4.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMN-LO Rp5.643.744.878,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMN terealisasi sebesar Rp5.643.744.878,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp30.996.583.252,61 mengalami **penurunan** sebesar (Rp25.352.838.374,61) atau (81,79%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) - LO	2.445.643.698,00	-	-	2.445.643.698,00	27.992.965.825,61	(25.547.322.127,61)	(91,26)
2	Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LO	3.198.101.180,00	-	-	3.198.101.180,00	3.003.617.427,00	194.483.753,00	6,47
	Jumlah	**5.643.744.878,00**	**-**	**-**	**5.643.744.878,00**	**30.996.583.252,61**	**(25.352.838.374,61)**	**(81,79)**

5.4.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMD-LO Rp1.139.808.537.792,38

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMD terealisasi sebesar Rp1.139.808.537.792,38, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp926.644.807.340,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp213.163.730.451,63 atau 23,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)-LO	6.500.000.000,00	3.973.356.504,00		10.473.356.504,00	7.138.711.108,00	3.334.645.396,00	46,71
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng-LO	408.645.620.567,00	471.817.549.429,47		**880.463.169.996,47**	675.416.766.268,85	205.046.403.727,62	30,36
3	Bagian Laba BPR-BKK-LO	69.771.757.284,00	91.468.786.315,67		161.240.543.599,67	150.963.828.715,60	10.276.714.884,07	6,81
4	Bagian Laba PDAB Slawi (Tirta Utama)-LO	7.621.727.841,00	8.404.022.174,00		16.025.750.015,00	13.856.257.527,00	2.169.492.488,00	15,66
5	Deviden PT. PRPP-LO	-	-		-	-	-	-
6	Deviden PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah-LO	9.024.857.185,00		6.027.730.630,79	2.997.126.554,21	9.217.111.541,68	(6.219.984.987,47)	(67,48)
7	Deviden PT. Jateng Petro Energi-LO	31.301.982.000,00	27.058.416.758,00		58.360.398.758,00	53.992.494.073,00	4.367.904.685,00	8,09
8	Deviden PT. Jamkrida-LO	8.207.415.144,00	2.040.777.221,03		10.248.192.365,03	16.059.638.106,62	(5.811.445.741,59)	(36,19)
	Jumlah	**541.073.360.021,00**	604.762.908.402,17	**6.027.730.630,79**	**1.139.808.537.792,38**	**926.644.807.340,75**	**213.163.730.451,63**	**23,00**

Realisasi Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMD sebesar Rp1.139.808.537.792,38, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA **541.073.360.021,00**

Mutasi Tambah

- Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD 604.762.908.402,17

Total Penambahan **604.762.908.402,17**

Mutasi Kurang

- Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD 6.027.730.630,79

Total Pengurangan **6.027.730.630,79**

Pendapatan-LO **1.139.808.537.792,38**

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Rp1.802.424.410.356,58

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp1.802.424.410.356,58, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.496.153.709.716,51 mengalami **penurunan** sebesar (Rp693.729.299.359,93) atau (27,79%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	605.007.560,00	-	-	605.007.560,00	22.089.947.250,00	(21.484.939.690,00)	(97,26)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	-	370.051.669,00	370.051.669,00	-	-	-	-
4	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro - LO	14.585.286.961,00	172.822.909,18	-	14.758.109.870,18	33.421.665.370,00	(18.663.555.499,82)	(55,84)
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-	-	-	-
7	Pendapatan Bunga - LO	54.536.127.340,00	9.232.876.707,00	-	63.769.004.047,00	52.487.671.175,00	11.281.332.872,00	21,49
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	15.890.000,00	-	-	15.890.000,00	8.612.000,00	7.278.000,00	84,51
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	**52.115.165.872,00**	11.611.315.029,00	11.612.224.120,00	52.114.256.781,00	34.263.799.325,00	17.850.457.456,00	52,10
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO	-	-	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	5.886.922.048,00	-	-	5.886.922.048,00	2.779.750.191,00	3.107.171.857,00	111,78
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	178.434.784.980,00	-	-	178.434.784.980,00	115.195.838.121,00	63.238.946.859,00	54,90
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	193.690.851,00	-	-	193.690.851,00	181.042.060,00	12.648.791,00	6,99
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	611.752.000,00	-	-	611.752.000,00	-	611.752.000,00	
15	Pendapatan dari Pengembalian - LO	1.493.643.033,00	-	-	1.493.643.033,00	8.090.683.266,00	(6.597.040.233,00)	(81,54)
16	Pendapatan BLUD - LO	1.809.050.418.298,00	60.595.621.264,48	385.468.584.447,08	1.484.177.455.115,40	2.227.625.012.364,51	(743.447.557.249,11)	(33,37)
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO	20.017.000,00	-	-	20.017.000,00	-	20.017.000,00	100,00
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO	-	-	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO	-	-	-	-	-	-	-

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
20	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	-	-	-	-	9.688.594,00	(9.688.594,00)	(100,00)
21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	343.877.071,00	-	-	343.877.071,00	-	343.877.071,00	100,00
22	Pendapatan Zakat - LO	-	-	-	-	-	-	-
23	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa - LO	-	-	-	-	-	-	-
24	Pendapatan Lain-Lain SKPKD - LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**2.117.892.583.014,00**	**81.982.687.578,66**	**397.450.860.236,08**	**1.802.424.410.356,58**	**2.496.153.709.716,51**	**(693.729.299.359,93)**	**(27,79)**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp1.802.424.410.356,58, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**2.117.892.583.014,00**
Mutasi Tambah		
➢ Saldo Akhir Piutang	70.026.955.354,46	
➢ Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	551.599.765,20	
➢ Reklasifikasi pendapatan dari Penerimaan Pembiayaan	81.719.452,00	
➢ Pendapatan Giro Atas Dana Cadangan	9.380.600.613,00	
➢ Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	1.941.812.394,00	
Total Penambahan		**81.982.687.578,66**
Mutasi Kurang		
➢ Saldo Awal Piutang	356.005.400.619,08	
➢ Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	593.241.885,00	
➢ Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	40.852.217.732,00	
Total Pengurangan		**397.450.860.236,08**
Pendapatan-LO		**1.802.424.410.356,58**

5.4.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Rp605.007.560,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp605.007.560,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.089.947.250,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp21.484.939.690,00) atau (97,26%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	146.601.560,00	-	-	146.601.560,00	324.962.000,00	(178.360.440,00)	(54,89)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-	20.826.561.000,00	(20.826.561.000,00)	(100,00)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.360.000,00		-	16.360.000,00	23.750.000,00	(7.390.000,00)	(31,12)
4	Dinas Koperasi dan UKM	46.725.000,00		-	46.725.000,00		46.725.000,00	-
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	395.321.000,00	-	-	395.321.000,00	914.674.250,00	(519.353.250,00)	(56,78)
	Jumlah	**605.007.560,00**	**-**	**-**	**605.007.560,00**	**22.089.947.250,00**	**(21.484.939.690,00)**	**(97,26)**

5.4.1.1.4.2 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Rp 0,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp 0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 0,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	-	370.051.669,00	370.051.669,00	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**370.051.669,00**	**370.051.669,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

5.4.1.1.4.3 Jasa Giro-LO Rp14.758.109.870,18

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp14.758.109.870,18 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.421.665.370,00 mengalami **penurunan** (Rp18.663.555.499,82) atau (55,84%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.585.286.961,00	172.822.909,18	-	14.758.109.870,18	33.421.665.370,00	(18.663.555.499,82)	(55,84)
	Jumlah	**14.585.286.961,00**	**172.822.909,18**	**-**	**14.758.109.870,18**	**33.421.665.370,00**	**(18.663.555.499,82)**	**(55,84)**

5.4.1.1.4.4 Pendapatan Bunga-LO Rp63.769.004.047,00

Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp63.769.004.047,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52.487.671.175,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.281.332.872,00 atau 21,49% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.536.127.340,00	9.232.876.707,00	-	63.769.004.047,00	52.487.671.175,00	11.281.332.872,00	21,49
	Jumlah	**54.536.127.340,00**	**9.232.876.707,00**	**-**	**63.769.004.047,00**	**52.487.671.175,00**	**11.281.332.872,00**	**21,49**

5.4.1.1.4.5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Rp15.890.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp15.890.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.612.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.278.000,00 atau 84,51% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	-	-	-	-	8.612.000,00	(8.612.000,00)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPKD)	15.890.000,00	-	-	15.890.000,00	-	15.890.000,00	100,00
	Jumlah	**15.890.000,00**	**-**	**-**	**15.890.000,00**	**8.612.000,00**	**7.278.000,00**	**84,51**

5.4.1.1.4.6 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Rp52.114.256.781,00

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp52.114.256.781,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34.263.799.325,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.850.457.456,00 atau 52,10% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	77.770.500,00	-	-	77.770.500,00	-	77.770.500,00	100,00
2	Satuan Polisi Pamong Praja	5.000,00	-	-	5.000,00	-	5.000,00	100,00
3	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	1.400.000,00	-	-	1.400.000,00	-	1.400.000,00	100,00
4	Dinas Perhubungan	22.409.202.336,00	-	-	22.409.202.336,00	12.549.852.000,00	9.859.350.336,00	78,56
5	Dinas Arsip dan Perpustakaan	26.811.000,00	-	-	26.811.000,00	1.224.768.425,00	(1.197.957.425,00)	(97,81)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.514.118.650,00	-	-	1.514.118.650,00	-	1.514.118.650,00	100,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.821.561.186,00	11.611.315.029,00	11.612.224.120,00	5.820.652.095,00	-	5.820.652.095,00	100,00
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.427.450,00	-	-	2.427.450,00	-	2.427.450,00	100,00
9	Badan Kepegawaian Daerah	791.400.000,00	-	-	791.400.000,00	643.900.000,00	147.500.000,00	22,91
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.470.469.750,00	-	-	21.470.469.750,00	19.845.278.900,00	1.625.190.850,00	8,19
	Jumlah	**52.115.165.872,00**	**11.611.315.029,00**	**11.612.224.120,00**	**52.114.256.781,00**	**34.263.799.325,00**	**17.850.457.456,00**	**52,10**

5.4.1.1.4.7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Rp5.886.922.048,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp5.886.922.048,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.779.750.191,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.107.171.857,00 atau 111,78% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	-	-	-	-	2.779.750.191,00	(2.779.750.191,00)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPKD)	5.886.922.048,00	-	-	5.886.922.048,00	-	5.886.922.048,00	100,00
	Jumlah	**5.886.922.048,00**	**-**	**-**	**5.886.922.048,00**	**2.779.750.191,00**	**3.107.171.857,00**	**111,78**

5.4.1.1.4.8 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Rp178.434.784.980,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp178.434.784.980,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp115.195.838.121,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp63.238.946.859,00 atau 54,90 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Sebagai SKPKD)	178.434.784.980,00	-	-	178.434.784.980,00	115.195.838.121,00	63.238.946.859,00	54,90
	Jumlah	**178.434.784.980,00**	**-**	**-**	**178.434.784.980,00**	**115.195.838.121,00**	**63.238.946.859,00**	**54,90**

5.4.1.1.4.9 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Rp193.690.851,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp193.690.851,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp181.042.060,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.648.791,00 atau 6,99% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	75.000,00	-	-	75.000,00	-	75.000,00	100
2	Satuan Polisi Pamong Praja	31.680,00	-	-	31.680,00	90.618,00	(58.938,00)	(65,04)
3	Dinas Perhubungan	69.933.800,00	-	-	69.933.800,00	62.112.570,00	7.821.230,00	12,59
4	Dinas Kelautan dan perikanan	122.570.192,00			122.570.192,00	117.265.756,00	5.304.436,00	4,52
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Sebagai SKPKD)	1.080.179,00	-	-	1.080.179,00	1.573.116,00	(492.937,00)	(31,34)
	Jumlah	**193.690.851,00**	**-**	**-**	**193.690.851,00**	**181.042.060,00**	**12.648.791,00**	**6,99**

5.4.1.1.4.10 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO Rp611.752.000,00

Pendapatan dari Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp611.752.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp611.752.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPKD)	611.752.000,00	-	-	611.752.000,00	-	611.752.000,00	100,00
	Jumlah	**611.752.000,00**	**-**	**-**	**611.752.000,00**	**-**	**611.752.000,00**	**100,00**

5.4.1.1.4.11 Pendapatan dari Pengembalian-LO Rp1.493.643.033,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp1.493.643.033,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.090.683.266,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp6.597.040.233,00) atau (81,54%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	62.686,00	(62.686,00)	(100,00)
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	17.322.000,00	(17.322.000,00)	(100,00)
3	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	5.200.000,00	(5.200.000,00)	(100,00)
4	Dinas Enrgi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	6.759.000,00	(6.759.000,00)	(100,00)
5	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	-	-	-	-	53.722.000,00	(53.722.000,00)	(100,00)
6	SKPKD		-	-	-	8.007.144.080,00	(8.007.144.080,00)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.493.643.033,00	-	-	1.493.643.033,00	-	1.493.643.033,00	100,00
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	473.500,00	(473.500,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.493.643.033,00**	**-**	**-**	**1.493.643.033,00**	**8.090.683.266,00**	**(6.597.040.233,00)**	**(81,54)**

5.4.1.1.4.12 Pendapatan BLUD-LO Rp1.484.177.455.115,40

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp1.484.177.455.115,40, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.227.625.012.364,51 mengalami **penurunan** sebesar (Rp743.447.557.249,11) atau (33,37%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	893.806.891.320,00	14.010.011.849,24	130.119.771.927	777.697.131.242,69	1.074.211.609.551,85	(296.514.478.309,16)	(27,60)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	512.016.637.608,00	37.364.474.519,73	125.015.065.489	424.366.046.637,78	610.745.137.539,79	(186.379.090.902,01)	(30,52)

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
3	RSUD Tugurejo Semarang	201.494.647.182,00	4.841.235.109,60	70.363.051.265,60	135.972.831.026,00	271.614.730.179,00	(135.641.899.153,00)	(49,94)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	74.960.514.784,00	1.749.568.694,00	32.733.017.265,00	43.977.066.213,00	77.268.385.772,00	(33.291.319.559,00)	(43,09)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	49.303.125.064,00	837.758.099,20	16.079.144.516,98	34.061.738.646,22	61.740.893.483,42	(27.679.154.837,20)	(44,83)
6	RSJD Surakarta	34.951.606.511,00	790.094.890,00	657.683.460,00	35.084.017.941,00	70.228.992.755,00	(35.144.974.814,00)	(50,04)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	42.516.995.829,00	1.002.478.103,73	10.500.850.524,00	33.018.623.408,71	61.815.263.083,45	(28.796.639.674,74)	(46,58)
	Jumlah	**1.809.050.418.298,00**	**60.595.621.264,48**	**385.468.584.447,08**	**1.484.177.455.115,40**	**2.227.625.012.364,51**	**(743.447.557.249,11)**	**(33,37)**

5.4.1.1.4.13 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO Rp20.017.000,00

Pendapatan Dari Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp20.017.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp20.017.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPKD)	20.017.000,00	-	-	20.017.000,00	-	20.017.000,00	100,00
	Jumlah	**20.017.000,00**	**-**	**-**	**20.017.000,00**	**-**	**20.017.000,00**	**100,00**

5.4.1.1.4.14 Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO Rp0,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.688.594,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp9.688.594,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-		-	-	9.688.594,00	(9.688.594,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.688.594,00**	**(9.688.594,00)**	**(100,00)**

5.4.1.1.4.15 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah – LO Rp343.877.071,00

Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah terealisasi sebesar Rp343.877.071,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp343.877.071,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPKD)	343.877.071,00	-	-	343.877.071,00	-	343.877.071,00	100,00
	Jumlah	**343.877.071,00**	**-**	**-**	**343.877.071,00**	**-**	**343.877.071,00**	**100,00**

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO Rp 7.826.984.774.063,00

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp7.826.984.774.063,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.610.733.551.105,00 mengalami **penurunan** sebesar

(Rp3.783.748.777.042,00) atau (32,59%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	7.810.882.578.787,00	118.252.342.968,00	102.150.147.692,00	7.826.984.774.063,00	11.610.733.551.105,00	(3.783.748.777.042,00)	(32,59)
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**7.810.882.578.787,00**	**118.252.342.968,00**	**102.150.147.692,00**	**7.826.984.774.063,00**	**11.610.733.551.105,00**	**(3.783.748.777.042,00)**	**(32,59)**

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp7.826.984.774.063,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**7.810.882.578.787,00**
Mutasi Tambah		
➢ Saldo Akhir Piutang	14.764.276.977,00	
➢ Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	103.488.065.991,00	
Total Penambahan		**118.252.342.968,00**
Mutasi Kurang		
➢ Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	102.150.147.692,00	
Total Pengurangan		**102.150.147.692,00**
Pendapatan-LO		**7.826.984.774.063,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp7.826.984.774.063,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp7.826.984.774.063,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.610.733.551.105,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.783.748.777.042,00) atau (32,59%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Perimbangan-LO	7.749.530.078.787,00	118.252.342.968,00	102.150.147.692,00	7.765.632.274.063,00	11.542.022.946.105,00	(3.776.390.672.042,00)	(32,72)
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	61.352.500.000,00	-	-	61.352.500.000,00	68.710.605.000,00	(7.358.105.000,00)	(10,71)
	Jumlah	**7.810.882.578.787,00**	**118.252.342.968,00**	**102.150.147.692,00**	**7.826.984.774.063,00**	**11.610.733.551.105,00**	**(3.783.748.777.042,00)**	**(32,59)**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp7.826.984.774.063,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**7.810.882.578.787,00**
Mutasi Tambah		
➢ Saldo Akhir Piutang	14.764.276.977,00	
➢ Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	103.488.065.991,00	
Total Penambahan		**118.252.342.968,00**
Mutasi Kurang		
➢ Koreksi Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	102.150.147.692,00	

Total Pengurangan **102.150.147.692,00**

Pendapatan-LO **7.826.984.774.063,00**

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO Rp7.765.632.274.063,00

Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp7.765.632.274.063,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.542.022.946.105,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.776.390.672.042,00) atau (32,72%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	928.700.713.880,00	118.252.342.968,00	102.150.147.692,00	944.802.909.156,00	774.782.845.485,00	170.020.063.671,00	21,94
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	3.435.718.090.405,00	-	-	3.435.718.090.405,00	3.432.978.859.000,00	2.739.231.405,00	0,08
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	371.734.785.185,00	-	-	371.734.785.185,00	401.885.567.398,00	(30.150.782.213,00)	(7,50)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	3.013.376.489.317,00	-	-	3.013.376.489.317,00	6.932.375.674.222,00	(3.918.999.184.905,00)	(56,53)
	Jumlah	**7.749.530.078.787,00**	**118.252.342.968,00**	**102.150.147.692,00**	**7.765.632.274.063,00**	**11.542.022.946.105,00**	**(3.776.390.672.042,00)**	**(32,72)**

5.4.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Rp944.802.909.156,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp944.802.909.156,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp774.782.845.485,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp170.020.063.671,00 atau 21,94% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	66.189.247.793,00	6.989.332.869,00	8.830.108.661,00	64.348.472.001,00	52.231.215.884,00	12.117.256.117,00	23,20
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - LO	560.482.715.387,00	65.460.147.363,00	67.454.754.075,00	558.488.108.675,00	481.882.603.329,00	76.605.505.346,00	15,90
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	283.039.127.270,00	44.621.223.421,00	20.280.382.559,00	307.379.968.132,00	230.960.701.553,00	76.419.266.579,00	33,09
4	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	7.537.039.968,00	659.301.915,00	1.439.761.968,00	6.756.579.915,00	6.959.013.384,00	(202.433.469,00)	(2,91)
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	1.171.008.442,00	35.228.494,00	845.212.442,00	361.024.494,00	204.832.300,00	156.192.194,00	76,25
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LO	6.708.488.500,00	373.939.385,00	3.250.266.500,00	3.832.161.385,00	1.020.387.900,00	2.811.773.485,00	275,56
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LO	3.368.143.349,00	102.028.077,00		3.470.171.426,00	1.470.222.610,00	1.999.948.816,00	136,03
8	Bagi Hasil Dari Minerba - LO	204.943.171,00	11.141.444,00	49.661.487,00	166.423.128,00	53.868.525,00	112.554.603,00	208,94
	Jumlah	**928.700.713.880,00**	**118.252.342.968,00**	**102.150.147.692,00**	**944.802.909.156,00**	**774.782.845.485,00**	**170.020.063.671,00**	**21,94**

5.4.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Rp3.435.718.090.405,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp3.435.718.090.405,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.432.978.859.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.739.231.405,00 atau 0,08% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	3.435.718.090.405,00	-	-	3.435.718.090.405,00	3.432.978.859.000,00	2.739.231.405,00	0,08
	Jumlah	**3.435.718.090.405,00**	**-**	**-**	**3.435.718.090.405,00**	**3.432.978.859.000,00**	**2.739.231.405,00**	**0,08**

5.4.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Rp371.734.785.185,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp371.734.785.185,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp401.885.567.398,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp30.150.782.213,00) atau (7,50%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	DAK Bidang Pendidikan - LO	230.469.645.393,00	-	-	230.469.645.393,00	204.019.889.120,00	26.449.756.273,00	12,96
2	DAK Bidang Kesehatan - LO	37.731.575.276,00	-	-	37.731.575.276,00	99.424.571.254,00	(61.692.995.978,00)	(62,05)
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO	46.503.957.400,00	-	-	46.503.957.400,00	39.801.657.780,00	6.702.299.620,00	16,84
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO	11.099.152.400,00	-	-	11.099.152.400,00	9.301.772.343,00	1.797.380.057,00	19,32
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO	28.130.594.000,00	-	-	28.130.594.000,00	13.409.579.190,00	14.721.014.810,00	109,78
6	DAK Bidang Pertanian - LO	-	-	-	-	4.217.308.288,00	(4.217.308.288,00)	(100,00)
7	DAK Bidang Kehutanan - LO	17.799.860.716,00	-	-	17.799.860.716,00	26.823.374.450,00	(9.023.513.734,00)	(33,64)
8	DAK Bidang Pariwisata - LO	-	-	-	-	4.887.414.973,00	(4.887.414.973,00)	(100,00)
9	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral - LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**371.734.785.185,00**	**-**	**-**	**371.734.785.185,00**	**401.885.567.398,00**	**(30.150.782.213,00)**	**(7,50)**

5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO Rp3.013.376.489.317,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp3.013.376.489.317,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.932.375.674.222,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.918.999.184.905,00) atau (56,53%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	1.018.083.273.208,00	-	-	1.018.083.273.208,00	1.101.018.112.000,00	(82.934.838.792,00)	(7,53)
2	Bantuan Operasional Sekolah - LO	1.987.260.551.320,00	-	-	1.987.260.551.320,00	5.821.222.770.000,00	(3.833.962.218.680,00)	(65,86)

3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB) - LO	120.680.559,00	-	-	120.680.559,00	233.096.459,00	(112.415.900,00)	(48,23)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan - LO	3.727.564.040,00	-	-	3.727.564.040,00	3.281.743.678,00	445.820.362,00	13,58
5	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil - LO	344.543.290,00	-	-	344.543.290,00	2.271.473.316,00	(1.926.930.026,00)	(84,83)
6	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya-LO	3.839.876.900,00	-	-	3.839.876.900,00	3.487.300.769,00	352.576.131,00	10,11
7	Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan - LO	-	-	-	-	861.178.000,00	(861.178.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**3.013.376.489.317,00**	**-**	**-**	**3.013.376.489.317,00**	**6.932.375.674.222,00**	**(3.918.999.184.905,00)**	**(56,53)**

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)-LO **Rp61.352.500.000,00**

Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp61.352.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 68.710.605.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp7.358.105.000,00), atau (10,71%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Insentif Daerah (DID)- LO	61.352.500.000,00			61.352.500.000,00	68.710.605.000,00	(7.358.105.000,00)	(10,71)
	Jumlah	**61.352.500.000,00**	**-**	**-**	**61.352.500.000,00**	**68.710.605.000,00**	**(7.358.105.000,00)**	**(10,71)**

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO **Rp1.349.044.149.138,61**

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.349.044.149.138,61, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.086.623.536.869,07 mengalami **kenaikan** sebesar Rp262.420.612.269,54 atau 24,15% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah- LO	92.161.740.403,00	1.259.232.355.869,91	2.622.408.219,30	1.348.771.688.053,61	1.085.776.688.624,07	262.994.999.429,54	24,22
2	Dana Darurat- LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	272.461.085,00	-	-	272.461.085,00	846.848.245,00	(574.387.160,00)	(67,83)
	Jumlah	**92.434.201.488,00**	**1.259.232.355.869,91**	**2.622.408.219,30**	**1.349.044.149.138,61**	**1.086.623.536.869,07**	**262.420.612.269,54**	**24,15**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.349.044.149.138,61 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA **92.434.201.488,00**

Mutasi Tambah

- Hibah Barang Menjadi Aset 183.178.088.117,00
- Hibah Barang Menjadi Bahan Habis Pakai 1.041.013.846.984,91
- Bantuan Pemerintah berupa Aset 4.771.611.736,00
- Bantuan Pemerintah berupa Uang 29.545.385.529,00
- Aset Hasil Usaha Mandiri 723.423.503,00

Total Penambahan **1.259.232.355.869,91**

Mutasi Kurang

- Penyusutan atas Hibah Barang menjadi Aset 2.622.408.219,30

Total Pengurangan **2.622.408.219,30**

Pendapatan-LO **1.349.044.149.138,61**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO Rp1.348.771.688.053,61

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp1.348.771.688.053,61 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.085.776.688.624,07 mengalami **kenaikan** sebesar Rp262.994.999.429,54 atau 24,22% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	49.411.740.407,00	1.173.634.899.661,96	1.758.114.224,30	1.221.288.525.844,66	943.750.569.155,81	277.537.956.688,85	29,41
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO	-	15.312.893.623,86	-	15.312.893.623,86	64.991.501.718,76	(49.678.608.094,90)	(76,44)
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO	-	66.092.886.424,00	864.293.995,00	65.228.592.429,00	8.979.232.882,83	56.249.359.546,17	626,44
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO	22.749.999.996,00	3.945.902.384,54	-	26.695.902.380,54	27.353.504.870,00	(657.602.489,46)	(2,40)
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	20.000.000.000,00	245.773.775,55	-	20.245.773.775,55	40.701.879.996,67	(20.456.106.221,12)	(50,26)
	Jumlah	**92.161.740.403,00**	**1.259.232.355.869,91**	**2.622.408.219,30**	**1.348.771.688.053,61**	**1.085.776.688.624,07**	**262.994.999.429,54**	**24,22**

5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO Rp1.221.288.525.844,66

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.221.288.525.844,66, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp943.750.569.155,81 mengalami **kenaikan** sebesar Rp277.537.956.688,85 atau 29,41% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	121.204.622.709,00	(20.253.556,46)	121.224.876.265,46	62.746.547.969,32	58.478.328.296,14	93,20
2	Dinas Kesehatan	-	1.011.375.571.459,80		1.011.375.571.459,80	754.265.855.006,12	257.109.716.453,68	34,09
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	1.050.220.317,16	790.816.666,00	259.403.651,16	21.885.572.269,00	(21.626.168.617,84)	(98,81)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	23.100.000,00	5.005.000,00	18.095.000,00	41.561.291.886,00	(41.543.196.886,00)	(99,96)
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	7.021.080,00	-	7.021.080,00	332.426.542,00	(325.405.462,00)	(97,89)
6	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	3.750.000,00	-	3.750.000,00	2.733.967.013,16	(2.730.217.013,16)	(99,86)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	25.256.889,76	(25.256.889,76)	771.524.900,00	(796.781.789,76)	(103,27)
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	3.920.000,01	(3.920.000,01)	(100,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-	-	-	1.852.344.768,20	(1.852.344.768,20)	(100,00)
10	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	24.158.602.581,00	-	24.158.602.581,00	3.087.000.000,00	21.071.602.581,00	682,59
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	908.124.050,00	-	908.124.050,00		908.124.050,00	100,00
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	13.674.394.340,00	-	13.674.394.340,00	9.077.283.800,00	4.597.110.540,00	50,64
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	227.503.900,00	42.900.000,00	184.603.900,00		184.603.900,00	100,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	29.480.000,00	(29.480.000,00)	(100,00)
15	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	2.108.207.000,00	(2.108.207.000,00)	(100,00)
16	Dinas Penanaman	-	87.600.000,00	-	87.600.000,00	81.268.500,00	6.331.500,00	7,79

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Modal dan PTSP							
17	Dinas Pertanian dan Pekebunan	-	914.389.225,00	914.389.225,00	-	-	-	-
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-		-	42.000.000,00	(42.000.000,00)	(100,00)
19	SKPKD	-	-		-	43.132.003.502,00	(43.132.003.502,00)	(100,00)
20	Badan Pembangunan Daerah dan Litbang	-	-		-		-	-
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	49.411.740.407,00	-		49.411.740.407,00	-	49.411.740.407,00	100,00
22	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	-	-		-	39.876.000,00	(39.876.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**49.411.740.407,00**	**1.173.634.899.661,96**	**1.758.114.224,30**	**1.221.288.525.844,66**	**943.750.569.155,81**	**277.537.956.688,85**	**29,41**

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO Rp15.312.893.623,86

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp15.312.893.623,86, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64.991.501.718,76 mengalami **penurunan** sebesar (Rp49.678.608.094,90) atau (76,44%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	1.642.946.900,00	-	1.642.946.900,00	5.605.090.125,66	(3.962.143.225,66)	(70,69)
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	5.838.814.075,69	-	5.838.814.075,69	52.158.338.940,55	(46.319.524.864,86)	(88,81)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	3.584.880.275,12	-	3.584.880.275,12	5.342.736.904,20	(1.757.856.629,08)	(32,90)
4	RSUD Tugurejo Semarang	-	1.386.818.541,28	-	1.386.818.541,28	1.253.403.832,35	133.414.708,93	10,64
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	2.083.165.064,76	-	2.083.165.064,76	-	2.083.165.064,76	100,00
6	RSJD Surakarta	-	-	-	-	41.698.400,00	(41.698.400,00)	(100,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	8.645.687,01	-	8.645.687,01	203.922.016,00	(195.276.328,99)	(95,76)
8	Dinas Sosial	-	195.391.080,00	-	195.391.080,00	-	195.391.080,00	100,00
9	Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Sebagai SKPKD)	-	572.232.000,00	-	572.232.000,00	386.311.500,00	185.920.500,00	48,13
	Jumlah	**-**	**15.312.893.623,86**	**-**	**15.312.893.623,86**	**64.991.501.718,76**	**(49.678.608.094,90)**	**(76,44)**

5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO Rp65.228.592.429,00

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp65.228.592.429,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.979.232.882,83 mengalami **kenaikan** sebesar Rp56.249.359.546,17 atau 626,44% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	55.461.015.744,00	864.293.995,00	54.596.721.749,00	878.801.333,33	53.717.920.415,67	6.112,64
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	7.720.080.822,00	-	7.720.080.822,00	915.463.355,00	6.804.617.467,00	743,30
3	RSUD Tugurejo Semarang	-	2.511.192.858,00	-	2.511.192.858,00	1.240.714.942,00	1.270.477.916,00	102,40
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-	-	-	287.633.825,00	(287.633.825,00)	(100)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	-	-	-	5.633.698.741,50	(5.633.698.741,50)	(100)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-	-	-	9.432.000,00	(9.432.000,00)	(100)
7	Dinas Sosial	-	190.197.000,00	-	190.197.000,00	-	190.197.000,00	100,00
8	Dinas Perhubungan	-	101.400.000,00	-	101.400.000,00	-	101.400.000,00	100,00

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	109.000.000,00	-	109.000.000,00	-	109.000.000,00	100,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	13.488.686,00	(13.488.686,00)	(100)
	Jumlah	**-**	**66.092.886.424,00**	**864.293.995,00**	**65.228.592.429,00**	**8.979.232.882,83**	**56.249.359.546,17**	**626,44**

5.4.1.3.1.4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO **Rp26.695.902.380,54**

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri terealisasi sebesar Rp26.695.902.380,54, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.353.504.870,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp657.602.489,46) atau (2,40%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	-	3.724.315.500,00	(3.724.315.500,00)	(100,00)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	863.933.421,84	-	863.933.421,84	297.606.370,00	566.327.051,84	190,29
3	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	18.747.562,50	-	18.747.562,50	-	18.747.562,50	100,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	369.450.000,00	-	369.450.000,00	-	369.450.000,00	100,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.039.041.550,00	-	1.039.041.550,00	-	1.039.041.550,00	100,00
6	Dinas Sosial	-	179.230.000,00	-	179.230.000,00	231.983.000,00	(52.753.000,00)	(22,74)
7	Dinas Ketahanan Pangan	-	192.000.050,20	-	192.000.050,20	-	192.000.050,20	100,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	-	127.499.800,00	-	127.499.800,00	-	127.499.800,00	100,00
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	22.749.999.996,00	1.156.000.000,00	-	23.905.999.996,00	-	23.905.999.996,00	100,00
10	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	349.600.000,00	(349.600.000,00)	(100,00)
11	SKPKD	-	-	-	-	22.750.000.000,00	(22.750.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**22.749.999.996,00**	**3.945.902.384,54**	**-**	**26.695.902.380,54**	**27.353.504.870,00**	**(657.602.489,46)**	(2,40)

5.4.1.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO **Rp20.245.773.775,55**

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis terealisasi sebesar Rp20.245.773.775,55, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.701.879.996,67 mengalami **penurunan** sebesar (Rp20.456.106.221,12) atau (50,26%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**-**	-	-	-	39.527.457.830	(39.527.457.829,67)	(100,00)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	**-**	245.773.776	**-**	245.773.775,55	1.174.422.167	(928.648.391,45)	(79,07)
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Sebagai SKPKD)	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000,00	-	20.000.000.000,00	100,00
	Jumlah	**20.000.000.000,00**	**245.773.775,55**	**-**	**20.245.773.775,55**	**40.701.879.996,67**	**(20.456.106.221,12)**	**(50,26)**

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Rp272.461.085,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp272.461.085,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp846.848.245,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp574.387.160,00) atau (67,83%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	SKPKD	-	-	-	-	846.848.245,00	(846.848.245,00)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	272.461.085,00	-	-	272.461.085,00	-	272.461.085,00	100,00
	Jumlah	**272.461.085,00**	**-**	**-**	**272.461.085,00**	**846.848.245,00**	**(574.387.160,00)**	**(67,83)**

5.4.2 BEBAN DAERAH Rp24.662.675.205.713,98

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp24.662.675.205.713,98, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.335.553.248.899,89 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.672.878.043.185,91) atau (6,35%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Operasional	13.456.887.671.949,00	20.908.565.715.245,74	18.478.165.378.990,76	15.887.288.008.203,98	19.330.681.421.072,90	(3.443.393.412.868,91)	(17,81)
2	Beban Transfer	8.763.165.716.275,00	105.970.589.520,00	93.749.108.285,00	8.775.387.197.510,00	7.004.871.827.827,00	1.770.515.369.683,00	25,28
	Jumlah	**22.220.053.388.224,00**	**21.014.536.304.765,74**	**18.571.914.487.275,76**	**24.662.675.205.713,98**	**26.335.553.248.899,89**	**(1.672.878.043.185,91)**	**(6,35)**

Realisasi Beban Daerah sebesar Rp24.662.675.205.713,98, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

➢ Belanja Daerah (APBD)	21.397.634.055.235,00	
➢ Belanja Daerah (BLUD)	822.419.332.989,00	
Total Belanja Daerah		**22.220.053.388.224,00**

Penambahan

➢ Saldo Akhir Utang	287.388.509.555,94
➢ Reklasifikasi dari Beban Persediaan	867.443.348.358,98
➢ Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	189.857.825,00
➢ Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	808.557.474,00
➢ Beban dari Belanja Bantuan Pemerintah	29.545.385.529,00
➢ Aset Ekstrakomtabel	12.218.118.973,00
➢ Hibah Barang berupa Persediaan	1.041.013.846.984,91
➢ Hibah Barang Berupa Aset	11.960.654.667,00
➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	355.921.136.436,03
➢ Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	332.010.658.330,00
➢ Saldo Awal Persediaan	513.729.554.970,09
➢ Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.756.838.225,91
➢ Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	17.170.748.245.324,50
➢ Mutasi Keluar	23.862.925.693,83
➢ Reklas Ke Aset tetap	177.833.793.255,56
➢ Reklas ke Aset Lainnya	103.011.432.360,16

➢ Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	180.609.712,36	
➢ Reklas Pemanfaatan	15.091.769.517,58	
➢ Penjualan	1.275.950.219,07	
➢ Ganti Rugi	17.872.250,00	
➢ Hibah dan LainLain	4.172.585.517,66	
➢ Koreksi	60.354.653.585,16	
Total Penambahan		**21.014.536.304.765,74**

Pengurangan

➢ Saldo Awal Utang	336.643.878.505,50	
➢ Reklasifikasi ke beban hibah	867.874.911.862,98	
➢ Reklasifikasi ke Beban Jasa	189.857.825,00	
➢ Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	82.397.766.906,00	
➢ Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	3.870.326.170,00	
➢ Beban Penyusutan Ektrakomtabel	180.609.712,38	
➢ Penyusutan Aset Tetap yang Dihibahkan	3.641.781.100,99	
➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	617.147.440.252,50	
➢ Saldo Akhir Persediaan	396.665.268.196,59	
➢ Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	5.301.065.353,15	
➢ Hibah	2.622.408.219,30	
➢ Mutasi Masuk	23.862.925.693,83	
➢ Reklas Dari Aset Tetap	277.145.065.775,05	
➢ Reklas Dari Aset Lainnya	17.315.132.748,58	
➢ Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	18.144.711,44	
➢ Reklas Dari ATB	1.126.155.732,34	
➢ Koreksi	39.792.679.778,83	
➢ Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	15.896.119.068.731,30	
Total Pengurangan		**18.571.914.487.275,76**
Beban Daerah		**24.662.675.205.713,98**

5.4.2.1 BEBAN OPERASIONAL — Rp15.887.288.008.203,98

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp15.887.288.008.203,98, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.330.681.421.072,90 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.443.393.412.868,91) atau (17,81%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	5.902.903.886.767,00	7.040.425.144,00	4.287.414.859,00	5.905.656.897.052,00	5.599.672.063.711,00	305.984.833.341,00	5,46
2	Beban Barang dan Jasa	5.377.369.153.895,00	1.777.639.654.873,83	1.592.826.085.393,57	5.562.182.723.375,26	5.624.678.582.064,53	(62.495.858.689,27)	(1,11)
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	4.958.884.836,00	-	-	4.958.884.836,00	90.482.166,00	4.868.402.670,00	5.380,51
5	Beban Hibah	2.092.761.564.803,00	879.404.003.025,98	5.902.857.094,99	2.966.262.710.733,99	6.634.910.082.267,36	(3.668.647.371.533,37)	(55,29)
6	Beban Bantuan Sosial	78.894.181.648,00	-	-	78.894.181.648,00	133.388.891.190,00	(54.494.709.542,00)	(40,85)
7	Beban Penyisihan Piutang	-	687.931.794.766,03	617.147.440.252,50	70.784.354.513,53	1.755.144.617,29	69.029.209.896,24	3.932,96
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi		17.556.549.837.435,90	16.258.001.581.390,70	1.298.548.256.045,20	1.321.362.950.359,57	(22.814.694.314,37)	(1,73)
9	Beban Lain-Lain		-	-	-	14.823.224.697,14	(14.823.224.697,14)	(100,00)
	Jumlah	**13.456.887.671.949,00**	**20.908.565.715.245,74**	**18.478.165.378.990,76**	**15.887.288.008.203,98**	**19.330.681.421.072,90**	**(3.443.393.412.868,91)**	**(17,81)**

Realisasi Beban Operasional sebesar Rp15.887.288.008.203,98 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
➢ Belanja Daerah (APBD)	12.634.468.338.960,00	
➢ Belanja Daerah (BLUD)	822.419.332.989,00	
Total Belanja Daerah		**13.456.887.671.949,00**
Penambahan		
➢ Saldo Akhir Utang	181.417.920.035,94	
➢ Reklasifikasi dari Beban Persediaan	867.443.348.358,98	
➢ Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	189.857.825,00	
➢ Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	808.557.474,00	
➢ Beban dari Belanja Bantuan Pemerintah	29.545.385.529,00	
➢ Aset Ekstrakomtabel	12.218.118.973,00	
➢ Hibah Barang berupa Persediaan	1.041.013.846.984,91	
➢ Hibah Barang Berupa Aset	11.960.654.667,00	
➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	355.921.136.436,03	
➢ Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	332.010.658.330,00	
➢ Saldo Awal Persediaan	513.729.554.970,09	
➢ Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.756.838.225,91	
➢ Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	17.170.748.245.324,50	
➢ Mutasi Keluar	23.862.925.693,83	
➢ Reklas Ke Aset tetap	177.833.793.255,56	
➢ Reklas ke Aset Lainnya	103.011.432.360,16	
➢ Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	180.684.632,11	
➢ Reklas Pemanfaatan	15.091.769.517,58	
➢ Penjualan	1.275.950.219,07	
➢ Ganti Rugi	17.872.250,00	
➢ Hibah dan LainLain	4.172.585.517,66	
➢ Koreksi	60.354.653.585,16	
Total Penambahan		**20.908.565.715.245,74**
Pengurangan		
➢ Saldo Awal Utang	242.894.770.220,50	
➢ Reklasifikasi ke beban hibah	867.874.911.862,98	
➢ Reklasifikasi ke Beban Jasa	189.857.825,00	
➢ Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	82.397.766.906,00	
➢ Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	3.870.326.170,00	
➢ Beban Penyusutan Ektrakomtabel	180.609.712,38	
➢ Penyusutan Aset Tetap yang Dihibahkan	3.641.781.100,99	
➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	617.147.440.252,50	

➢ Saldo Akhir Persediaan	396.665.268.196,59	
➢ Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	5.301.065.353,15	
➢ Hibah	2.622.408.219,30	
➢ Mutasi Masuk	23.862.925.693,83	
➢ Reklas Dari Aset Tetap	277.145.065.775,05	
➢ Reklas Dari Aset Lainnya	17.315.132.748,58	
➢ Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	18.144.711,44	
➢ Reklas Dari ATB	1.126.155.732,34	
➢ Koreksi	39.792.679.778,83	
➢ Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	15.896.119.068.731,30	
Total Pengurangan		**18.478.165.378.990,76**
Beban Daerah		**15.887.288.008.203,98**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai Rp5.905.656.897.052,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp5.905.656.897.052,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.599.672.063.711,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp305.984.833.341,00 atau 5,46% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.063.667.976.548,00	2.761.611.104,00	2.820.410.757,00	3.063.609.176.895,00	2.833.801.132.207,00	229.808.044.688,00	8,11
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.562.359.091.837,00	-	-	1.562.359.091.837,00	1.486.836.984.726,00	75.522.107.111,00	5,08
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.131.382.856.121,00	4.278.814.040,00	1.467.004.102,00	1.134.194.666.059,00	1.142.524.021.684,00	(8.329.355.625,00)	(0,73)
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	120.364.254.821,00	-	-	120.364.254.821,00	112.475.592.654,00	7.888.662.167,00	7,01
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	240.276.440,00	-	-	240.276.440,00	241.290.440,00	(1.014.000,00)	(0,42)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	24.889.431.000,00	-	-	24.889.431.000,00	23.793.042.000,00	1.096.389.000,00	4,61
7	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**5.902.903.886.767,00**	**7.040.425.144,00**	**4.287.414.859,00**	**5.905.656.897.052,00**	**5.599.672.063.711,00**	**305.984.833.341,00**	**5,46**

Realisasi Beban Pegawai sebesar Rp5.905.656.897.052,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

➢ Belanja Daerah (APBD)	5.767.089.705.271,00	
➢ Belanja Daerah (BLUD)	135.814.181.496,00	
Total Belanja Daerah		**5.902.903.886.767,00**

Penambahan

➢ Saldo Akhir Utang	7.040.425.144,00	
Total Penambahan		**7.040.425.144,00**

Pengurangan

- Saldo Awal Utang 4.287.414.859,00

Total Pengurangan **4.287.414.859,00**

Beban Daerah **5.905.656.897.052,00**

5.4.2.1.2.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.063.609.176.895,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.063.609.176.895,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.833.801.132.207,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp229.808.044.688,00 atau 8,11% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.067.545.755.591,00	-	-	2.067.545.755.591,00	1.797.311.726.038,00	270.234.029.553,00	15,04
2	Dinas Kesehatan	41.726.646.584,00	-	-	41.726.646.584,00	43.587.800.574,00	(1.861.153.990,00)	(4,27)
3	RSUD Dr. Moewardi	122.827.154.922,00	-	-	122.827.154.922,00	117.337.649.175,00	5.489.505.747,00	4,68
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	98.512.211.498,00	2.760.720.464,00	2.820.410.757,00	98.452.521.205,00	97.173.106.862,00	1.279.414.343,00	1,32
5	RSUD Tugurejo Semarang	70.164.626.983,00	-	-	70.164.626.983,00	65.646.972.111,00	4.517.654.872,00	6,88
6	RSUD Kelet Donorejo	22.236.176.345,00	-	-	22.236.176.345,00	21.609.650.173,00	626.526.172,00	2,90
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	34.886.741.721,00	-	-	34.886.741.721,00	31.110.100.120,00	3.776.641.601,00	12,14
8	RSJD Surakarta	34.981.674.707,00	890.640,00	-	34.982.565.347,00	34.814.129.484,00	168.435.863,00	0,48
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	24.228.898.831,00	-	-	24.228.898.831,00	23.586.309.987,00	642.588.844,00	2,72
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	36.154.835.978,00	-	-	36.154.835.978,00	41.258.508.362,00	(5.103.672.384,00)	(12,37)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	33.093.928.828,00	-	-	33.093.928.828,00	33.746.803.484,00	(652.874.656,00)	(1,93)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.533.040.384,00	-	-	5.533.040.384,00	5.291.684.096,00	241.356.288,00	4,56
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.666.627.444,00	-	-	4.666.627.444,00	4.920.377.760,00	(253.750.316,00)	(5,16)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.694.455.365,00	-	-	3.694.455.365,00	3.905.648.268,00	(211.192.903,00)	(5,41)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.704.095.236,00	-	-	2.704.095.236,00	2.477.321.451,00	226.773.785,00	9,15
16	Dinas Sosial	43.226.843.893,00	-	-	43.226.843.893,00	45.003.482.798,00	(1.776.638.905,00)	(3,95)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.001.217.044,00	-	-	31.001.217.044,00	31.700.917.601,00	(699.700.557,00)	(2,21)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.828.572.979,00	-	-	3.828.572.979,00	3.665.527.516,00	163.045.463,00	4,45
19	Dinas Ketahanan Pangan	5.977.719.367,00	-	-	5.977.719.367,00	6.084.682.618,00	(106.963.251,00)	(1,76)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.251.084.060,00	-	-	55.251.084.060,00	58.307.510.694,00	(3.056.426.634,00)	(5,24)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.322.045.251,00	-	-	5.322.045.251,00	5.533.280.297,00	(211.235.046,00)	(3,82)
22	Dinas Perhubungan	19.488.459.540,00	-	-	19.488.459.540,00	20.361.925.859,00	(873.466.319,00)	(4,29)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.328.250.521,00	-	-	7.328.250.521,00	7.553.329.231,00	(225.078.710,00)	(2,98)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	6.609.637.041,00	-	-	6.609.637.041,00	6.964.193.642,00	(354.556.601,00)	(5,09)

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Menengah							
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.450.800.849,00	-	-	5.450.800.849,00	4.753.681.697,00	697.119.152,00	14,66
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.769.468.853,00	-	-	11.769.468.853,00	12.478.658.116,00	(709.189.263,00)	(5,68)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.707.886.878,00	-	-	12.707.886.878,00	11.971.886.644,00	736.000.234,00	6,15
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.009.954.000,00	-	-	17.009.954.000,00	16.268.521.515,00	741.432.485,00	4,56
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	43.451.625.915,00	-	-	43.451.625.915,00	47.969.601.140,00	(4.517.975.225,00)	(9,42)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.716.547.493,00	-	-	13.716.547.493,00	14.081.620.658,00	(365.073.165,00)	(2,59)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.635.146.352,00	-	-	12.635.146.352,00	12.630.802.888,00	4.343.464,00	0,03
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.898.622.154,00	-	-	12.898.622.154,00	13.058.868.122,00	(160.245.968,00)	(1,23)
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.682.321.052,00	-	-	11.682.321.052,00	10.823.019.013,00	859.302.039,00	7,94
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	41.312.705.284,00	-	-	41.312.705.284,00	41.126.703.302,00	186.001.982,00	0,45
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.993.219.250,00	-	-	8.993.219.250,00	8.851.536.467,00	141.682.783,00	1,60
36	Badan Kepegawaian Daerah	19.746.189.713,00	-	-	19.746.189.713,00	58.370.109.953,00	(38.623.920.240,00)	(66,17)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.580.194.329,00	-	-	13.580.194.329,00	13.634.382.919,00	(54.188.590,00)	(0,40)
38	Inspektorat	9.306.100.004,00	-	-	9.306.100.004,00	8.884.177.699,00	421.922.305,00	4,75
39	Sekretariat Daerah	36.595.736.405,00	-	-	36.595.736.405,00	37.925.978.538,00	(1.330.242.133,00)	(3,51)
40	Sekretariat DPRD	8.476.089.370,00	-	-	8.476.089.370,00	8.481.754.895,00	(5.665.525,00)	(0,07)
41	Badan Penghubung	3.344.668.534,00	-	-	3.344.668.534,00	3.537.190.440,00	(192.521.906,00)	(5,44)
	Jumlah	**3.063.667.976.548,00**	**2.761.611.104,00**	**2.820.410.757,00**	**3.063.609.176.895,00**	**2.833.801.132.207,00**	**229.808.044.688,00**	**8,11**

5.4.2.1.2.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN **Rp1.562.359.091.837,00**

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp1.562.359.091.837,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.486.836.984.726,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp75.522.107.111,00 atau 5,08% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	650.931.910.100,00	-	-	650.931.910.100,00	630.488.227.464,00	20.443.682.636,00	3,24
2	Dinas Kesehatan	43.613.577.360,00	-	-	43.613.577.360,00	41.919.953.907,00	1.693.623.453,00	4,04
3	RSUD Dr. Moewardi	93.302.675.834,00	-	-	93.302.675.834,00	84.224.924.721,00	9.077.751.113,00	10,78
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	58.852.655.369,00	-	-	58.852.655.369,00	54.737.055.733,00	4.115.599.636,00	7,52
5	RSUD Tugurejo Semarang	46.857.117.444,00	-	-	46.857.117.444,00	41.863.532.567,00	4.993.584.877,00	11,93
6	RSUD Kelet Donorejo	18.969.678.443,00	-	-	18.969.678.443,00	17.857.437.221,00	1.112.241.222,00	6,23
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	31.741.470.599,00	-	-	31.741.470.599,00	29.144.446.669,00	2.597.023.930,00	8,91
8	RSJD Surakarta	32.566.853.596,00	-	-	32.566.853.596,00	30.118.000.201,00	2.448.853.395,00	8,13
9	RSJD Dr. RM	22.321.999.901,00	-	-	22.321.999.901,00	20.419.059.528,00	1.902.940.373,00	9,32

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Soedjarwadi							
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	36.687.261.883,00	-	-	36.687.261.883,00	38.155.967.798,00	(1.468.705.915,00)	(3,85)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	31.500.987.170,00	-	-	31.500.987.170,00	29.417.297.711,00	2.083.689.459,00	7,08
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.207.264.782,00	-	-	6.207.264.782,00	5.378.938.097,00	828.326.685,00	15,40
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.062.551.363,00	-	-	5.062.551.363,00	4.836.804.224,00	225.747.139,00	4,67
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.246.071.743,00	-	-	4.246.071.743,00	4.038.129.959,00	207.941.784,00	5,15
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.237.546.332,00	-	-	3.237.546.332,00	2.686.023.445,00	551.522.887,00	20,53
16	Dinas Sosial	49.732.429.265,00	-	-	49.732.429.265,00	48.206.698.274,00	1.525.730.991,00	3,16
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.062.867.533,00	-	-	31.062.867.533,00	30.789.753.598,00	273.113.935,00	0,89
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.583.010.462,00	-	-	4.583.010.462,00	4.127.312.413,00	455.698.049,00	11,04
19	Dinas Ketahanan Pangan	6.721.912.928,00	-	-	6.721.912.928,00	6.295.131.947,00	426.780.981,00	6,78
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	54.995.891.088,00	-	-	54.995.891.088,00	52.961.393.759,00	2.034.497.329,00	3,84
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	6.192.898.492,00	-	-	6.192.898.492,00	5.930.779.076,00	262.119.416,00	4,42
22	Dinas Perhubungan	20.181.392.145,00	-	-	20.181.392.145,00	19.350.859.590,00	830.532.555,00	4,29
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.106.470.409,00	-	-	8.106.470.409,00	7.686.707.033,00	419.763.376,00	5,46
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.229.900.975,00	-	-	7.229.900.975,00	6.916.788.566,00	313.112.409,00	4,53
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.467.281.062,00	-	-	6.467.281.062,00	5.150.108.983,00	1.317.172.079,00	25,58
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.439.708.917,00	-	-	12.439.708.917,00	12.092.273.459,00	347.435.458,00	2,87
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.533.815.244,00	-	-	12.533.815.244,00	11.072.896.393,00	1.460.918.851,00	13,19
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.899.338.231,00	-	-	18.899.338.231,00	16.652.362.397,00	2.246.975.834,00	13,49
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	38.697.191.608,00	-	-	38.697.191.608,00	39.438.671.552,00	(741.479.944,00)	(1,88)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.726.848.270,00	-	-	13.726.848.270,00	13.187.035.593,00	539.812.677,00	4,09
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.077.833.407,00	-	-	15.077.833.407,00	14.092.215.100,00	985.618.307,00	6,99
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.994.095.206,00	-	-	13.994.095.206,00	13.042.881.026,00	951.214.180,00	7,29
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	11.723.208.313,00	-	-	11.723.208.313,00	10.240.779.454,00	1.482.428.859,00	14,48
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	44.518.240.235,00	-	-	44.518.240.235,00	41.050.717.417,00	3.467.522.818,00	8,45
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.824.386.630,00	-	-	9.824.386.630,00	8.950.000.000,00	874.386.630,00	9,77
36	Badan	11.154.454.771,00	-	-	11.154.454.771,00	10.200.374.357,00	954.080.414,00	9,35

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Kepegawaian Daerah							
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.889.711.000,00	-	-	12.889.711.000,00	11.984.159.121,00	905.551.879,00	7,56
38	Inspektorat	9.466.118.275,00	-	-	9.466.118.275,00	8.391.634.368,00	1.074.483.907,00	12,80
39	Sekretariat Daerah	42.818.815.906,00	-	-	42.818.815.906,00	41.181.412.915,00	1.637.402.991,00	3,98
40	Sekretariat DPRD	8.653.910.018,00	-	-	8.653.910.018,00	8.009.094.170,00	644.815.848,00	8,05
41	Badan Penghubung	4.567.739.528,00	-	-	4.567.739.528,00	4.549.144.920,00	18.594.608,00	0,41
	Jumlah	**1.562.359.091.837,00**	**-**	**-**	**1.562.359.091.837,00**	**1.486.836.984.726,00**	**75.522.107.111,00**	**5,08**

5.4.2.1.2.3 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.134.194.666.059,00

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp1.134.194.666.059,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.142.524.021.684,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp8.329.355.625,00) atau (0,73%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.067.791.793.005,00			1.067.791.793.005,00	1.105.307.357.882,00	(37.515.564.877,00)	(3,39)
2	Dinas Kesehatan	5.644.979.951,00	2.089.289.040,00	1.325.679.102,00	6.408.589.889,00	1.325.679.102,00	5.082.910.787,00	383,42
3	RSUD Dr. Moewardi	9.002.740.540,00	2.169.425.000,00	111.600.000,00	11.060.565.540,00	9.366.083.000,00	1.694.482.540,00	18,09
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.217.000.000,00	18.850.000,00	20.100.000,00	1.215.750.000,00	1.171.344.118,00	44.405.882,00	3,79
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.929.420.000,00			1.929.420.000,00	2.047.920.000,00	(118.500.000,00)	(5,79)
6	RSUD Kelet Donorejo	2.582.176.684,00			2.582.176.684,00	2.246.039.347,00	336.137.337,00	14,97
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.035.987.500,00	1.250.000,00	9.625.000,00	2.027.612.500,00	1.667.262.000,00	360.350.500,00	21,61
8	RSJD Surakarta	1.500.400.000,00	-	-	1.500.400.000,00	727.160.000,00	773.240.000,00	106,34
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.334.650.000,00	-	-	1.334.650.000,00	1.184.350.000,00	150.300.000,00	12,69
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.728.620.000,00	-	-	1.728.620.000,00	-	1.728.620.000,00	100,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	836.890.000,00	-	-	836.890.000,00	-	836.890.000,00	100,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	380.840.000,00	-	-	380.840.000,00	-	380.840.000,00	100,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	242.160.000,00	-	-	242.160.000,00	-	242.160.000,00	100,00
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	213.120.000,00	-	-	213.120.000,00	-	213.120.000,00	100,00
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	213.000.000,00	-	-	213.000.000,00	-	213.000.000,00	100,00
16	Dinas Sosial	1.066.410.000,00	-	-	1.066.410.000,00	-	1.066.410.000,00	100,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	100,00
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	276.230.000,00	-	-	276.230.000,00	-	276.230.000,00	100,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	325.260.000,00	-	-	325.260.000,00	-	325.260.000,00	100,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	607.943.250,00	-	-	607.943.250,00	-	607.943.250,00	100,00

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	341.640.000,00	-	-	341.640.000,00	-	341.640.000,00	100,00
22	Dinas Perhubungan	662.110.000,00	-	-	662.110.000,00	-	662.110.000,00	100,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	496.614.000,00	-	-	496.614.000,00	-	496.614.000,00	100,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	404.640.000,00	-	-	404.640.000,00	-	404.640.000,00	100,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	100,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	744.150.000,00	-	-	744.150.000,00	-	744.150.000,00	100,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	209.769.000,00	-	-	209.769.000,00	-	209.769.000,00	100,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.272.610.000,00	-	-	1.272.610.000,00	-	1.272.610.000,00	100,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.120.423.724,00	-	-	3.120.423.724,00	-	3.120.423.724,00	100,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	27.660.000,00	-	-	27.660.000,00	-	27.660.000,00	100,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	956.992.000,00	-	-	956.992.000,00	-	956.992.000,00	100,00
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	945.170.000,00	-	-	945.170.000,00	-	945.170.000,00	100,00
33	SKPKD		-	-	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	380.140.000,00	-	-	380.140.000,00	-	380.140.000,00	100,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.345.266.467,00	-	-	19.345.266.467,00	17.480.826.235,00	1.864.440.232,00	10,67
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	905.040.000,00	-	-	905.040.000,00	-	905.040.000,00	100,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	515.960.000,00	-	-	515.960.000,00	-	515.960.000,00	100,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	477.480.000,00	-	-	477.480.000,00	-	477.480.000,00	100,00
39	Inspektorat	203.100.000,00	-	-	203.100.000,00	-	203.100.000,00	100,00
40	Sekretariat Daerah	718.220.000,00	-	-	718.220.000,00	-	718.220.000,00	100,00
41	Sekretariat DPRD	690.850.000,00	-	-	690.850.000,00	-	690.850.000,00	100,00
42	Badan Penghubung	35.400.000,00	-	-	35.400.000,00	-	35.400.000,00	100,00
	Jumlah	**1.131.382.856.121,00**	**4.278.814.040,00**	**1.467.004.102,00**	**1.134.194.666.059,00**	**1.142.524.021.684,00**	**(8.329.355.625,00)**	**(0,73)**

5.4.2.1.2.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Rp120.364.254.821,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp120.364.254.821,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp112.475.592.654,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.888.662.167,00 atau 7,01% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat DPRD	120.364.254.821,00	-	-	120.364.254.821,00	112.475.592.654,00	7.888.662.167,00	7,01
	Jumlah	**120.364.254.821,00**	**-**	**-**	**120.364.254.821,00**	**112.475.592.654,00**	**7.888.662.167,00**	**7,01**

5.4.2.1.2.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp240.276.440,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp240.276.440,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp241.290.440,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.014.000,00) atau (0,42%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat Daerah	240.276.440,00	-	-	240.276.440,00	241.290.440,00	(1.014.000,00)	(0,42)
	Jumlah	**240.276.440,00**	**-**	**-**	**240.276.440,00**	**241.290.440,00**	**(1.014.000,00)**	**(0,42)**

5.4.2.1.2.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH Rp24.889.431.000,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp24.889.431.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.793.042.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.096.389.000,00 atau 4,61% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat Daerah	24.212.631.000,00	-	-	24.212.631.000,00	23.116.242.000,00	1.096.389.000,00	4,74
2	Sekretariat DPRD	676.800.000,00	-	-	676.800.000,00	676.800.000,00	-	-
	Jumlah	**24.889.431.000,00**	**-**	**-**	**24.889.431.000,00**	**23.793.042.000,00**	**1.096.389.000,00**	**4,61**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp5.562.182.723.375,26

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp5.562.182.723.375,26 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.624.678.582.064,53 mengalami **penurunan** sebesar (Rp62.495.858.689,27) atau (1,11%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	999.910.484.085,00	1.618.156.026.663,07	1.256.794.866.885,35	1.361.271.643.862,72	1.513.501.886.300,77	(152.230.242.438,05)	(10,06)
2	Beban Jasa	2.013.881.127.522,00	114.966.499.718,83	230.664.709.018,65	1.898.182.918.222,18	2.488.402.294.904,40	(590.219.376.682,22)	(23,72)
3	Beban Pemeliharaan	389.728.047.988,00	13.742.920.238,00	55.079.941.277,36	348.391.026.948,64	537.057.928.770,00	(188.666.901.821,36)	(35,13)
4	Beban Perjalanan Dinas	364.406.406.690,00	2.202.275.092,00	2.875.000,00	366.605.806.782,00	239.273.525.666,00	127.332.281.116,00	53,22
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	132.883.085.254,00	362.778.500,00	-	133.245.863.754,00	177.737.257.983,00	(44.491.394.229,00)	(25,03)
6	Beban Barang dan Jasa BOP	781.802.645.118,00	10.194.708.684,07	19.627.202.515,16	772.370.151.286,91	-	772.370.151.286,91	100,00
7	Beban Barang dan Jasa BOS	694.757.357.238,00	18.014.445.977,86	30.656.490.697,05	682.115.312.518,81	668.705.688.440,36	13.409.624.078,45	2,01
	Jumlah	**5.377.369.153.895,00**	**1.777.639.654.873,83**	**1.592.826.085.393,57**	**5.562.182.723.375,26**	**5.624.678.582.064,53**	**(62.495.858.689,27)**	**(1,11)**

Realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp5.562.182.723.375,26 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

- Belanja Daerah (APBD) 4.690.764.002.402,00
- Belanja Daerah (BLUD) 686.605.151.493,00

Total Belanja Daerah **5.377.369.153.895,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Utang 174.377.494.891,93
- Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan 189.857.825,00

➢ Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	808.557.474,00	
➢ Beban dari Belanja Bantuan Pemerintah	29.545.385.529,00	
➢ Aset Ekstrakomtabel	12.218.118.973,00	
➢ Hibah Barang berupa Persediaan	1.041.013.846.984,91	
➢ Saldo Awal Persediaan	513.729.554.970,09	
➢ Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.756.838.225,90	
Total Penambahan		**1.777.639.654.873,83**
Pengurangan		
➢ Saldo Awal Utang	238.607.355.361,50	
➢ Reklasifikasi ke beban hibah	867.874.911.862,98	
➢ Reklasifikasi ke Beban Jasa	189.857.825,00	
➢ Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	80.136.690.912,00	
➢ Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	3.870.326.170,00	
➢ Beban Penyusutan Ektrakomtabel	180.609.712,36	
➢ Saldo Akhir Persediaan	396.665.268.196,58	
➢ Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	5.301.065.353,15	
Total Pengurangan		**1.592.826.085.393,57**
Beban Daerah		**5.562.182.723.375,26**

5.4.2.1.2.1 Beban Barang **Rp1.361.271.643.862,72**

Beban Barang terealisasi sebesar Rp1.361.271.643.862,72, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.513.501.886.300,77 mengalami **penurunan** sebesar (Rp152.230.242.438,05) atau (10,06%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	42.836.153.374,00	13.078.864.554,00	771.274.352,48	55.143.743.575,52	336.917.352.715,14	(281.773.609.139,62)	(83,63)
2	Dinas Kesehatan	42.493.669.093,00	1.355.030.969.666,25	1.043.699.796.068,22	353.824.842.691,03	59.876.843.369,91	293.947.999.321,12	490,92
3	RSUD Dr. Moewardi	314.234.520.238,00	135.435.851.185,52	79.708.789.304,30	369.961.582.119,22	391.635.351.853,40	(21.673.769.734,18)	(5,53)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	186.891.509.667,00	37.047.385.055,34	48.651.233.031,05	175.287.661.691,29	219.519.092.607,43	(44.231.430.916,14)	(20,15)
5	RSUD Tugurejo Semarang	59.501.964.265,00	10.860.365.111,82	11.602.681.084,76	58.759.648.292,06	66.792.010.398,81	(8.032.362.106,75)	(12,03)
6	RSUD Kelet Donorejo	11.262.486.756,00	8.598.593.096,96	4.283.956.804,75	15.577.123.048,21	18.708.271.073,22	(3.131.148.025,01)	(16,74)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	14.476.926.833,00	3.001.377.275,40	4.821.379.274,92	12.656.924.833,48	25.383.395.489,44	(12.726.470.655,96)	(50,14)
8	RSJD Surakarta	12.855.524.460,00	2.519.728.505,36	2.638.859.285,94	12.736.393.679,42	12.967.029.409,94	(230.635.730,52)	(1,78)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	10.673.766.758,00	3.628.047.835,96	2.767.171.232,26	11.534.643.361,70	14.561.178.941,21	(3.026.535.579,51)	(20,78)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.032.784.314,00	1.411.090.635,16	970.196.784,72	9.473.678.164,44	14.912.693.517,84	(5.439.015.353,40)	(36,47)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	14.415.667.691,00	166.506.160,00	378.063.240,00	14.204.110.611,00	9.624.466.045,00	4.579.644.566,00	47,58
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.940.249.348,00	776.500,00	1.254.656,00	3.939.771.192,00	3.657.993.616,00	281.777.576,00	7,70
13	Satuan Polisi Pamong Praja	529.320.558,00	53.844.000,00	64.762.000,00	518.402.558,00	929.921.021,00	(411.518.463,00)	(44,25)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.444.162.032,00	20.892.200,00	3.697.000,00	4.461.357.232,00	4.652.153.020,00	(190.795.788,00)	(4,10)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.905.470.702,00	22.773.369.224,40	19.132.539.664,40	5.546.300.262,00	12.721.575.862,60	(7.175.275.600,60)	(56,40)
16	Dinas Sosial	46.447.178.580,00	88.443.540,00	190.618.117,00	46.345.004.003,00	50.075.092.429,00	(3.730.088.426,00)	(7,45)
17	Dinas Tenaga	8.103.749.042,00	17.393.850,00	24.074.625,00	8.097.068.267,00	6.474.274.396,00	1.622.793.871,00	25,07

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Kerja dan Transmigrasi							
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.752.672.230,00	5.348.500,00	7.459.620,00	1.750.561.110,00	2.092.449.408,00	(341.888.298,00)	(16,34)
19	Dinas Ketahanan Pangan	9.667.713.057,00	2.533.959.478,20	6.471.346.116,24	5.730.326.418,96	3.785.421.715,00	1.944.904.703,96	51,38
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.162.798.853,00	749.460.910,08	1.162.626.190,73	16.749.633.572,35	9.848.807.280,92	6.900.826.291,43	70,07
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	1.391.726.191,00	5.390.000,00	-	1.397.116.191,00	1.721.724.590,00	(324.608.399,00)	(18,85)
22	Dinas Perhubungan	2.600.978.178,00	591.558.107,00	506.533.440,00	2.686.002.845,00	8.912.359.587,00	(6.226.356.742,00)	(69,86)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.238.259.654,00	1.610.000,00	48.606.500,00	4.191.263.154,00	22.682.155.827,00	(18.490.892.673,00)	(81,52)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.727.341.098,00	8.321.045,00	32.210.757,00	4.703.451.386,00	3.162.290.503,00	1.541.160.883,00	48,74
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	532.292.407,00	1.571.900,00	1.132.250,00	532.732.057,00	1.219.792.230,00	(687.060.173,00)	(56,33)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.675.771.675,00	909.197.850,00	801.342.395,60	10.783.627.129,40	12.356.163.033,00	(1.572.535.903,60)	(12,73)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	557.663.792,00	108.968.935,00	947.750,00	665.684.977,00	1.209.348.181,00	(543.663.204,00)	(44,96)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.930.887.425,00	1.088.601.707,72	2.178.704.885,13	4.840.784.247,59	6.832.030.658,80	(1.991.246.411,21)	(29,15)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.982.848.397,00	1.643.581.278,00	1.482.109.371,50	8.144.320.303,50	10.324.026.834,00	(2.179.706.530,50)	(21,11)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.904.860.502,00	12.149.986.521,00	18.297.990.178,00	11.756.856.845,00	11.808.034.182,00	(51.177.337,00)	(0,43)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.393.197.705,00	10.587.000,00	35.750.000,00	4.368.034.705,00	2.537.341.147,00	1.830.693.558,00	72,15
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.067.965.136,00	120.860.530,00	352.602.824,00	27.836.222.842,00	21.174.366.555,00	6.661.856.287,00	31,46
33	SKPKD		-	-	-	57.281.377.441,00	(57.281.377.441,00)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.808.900.877,00	9.588.925,00	6.319.512,00	5.812.170.290,00	3.664.712.765,00	2.147.457.525,00	58,60
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	28.465.755.669,00	3.906.899.791,90	5.204.520.755,00	27.168.134.705,90	23.679.319.491,10	3.488.815.214,80	14,73
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.626.323.900,00	52.341.900,00	31.334.898,00	5.647.330.902,00	4.826.025.562,00	821.305.340,00	17,02
37	Badan Kepegawaian Daerah	4.076.553.994,00	302.171.892,00	311.012.472,35	4.067.713.413,65	2.745.245.606,00	1.322.467.807,65	48,17
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	8.825.569.681,00	173.082.066,00	102.935.819,00	8.895.715.928,00	5.051.280.482,00	3.844.435.446,00	76,11
39	Inspektorat	1.416.925.835,00	1.170.100,00	94.530,00	1.418.001.405,00	935.001.905,00	482.999.500,00	51,66
40	Sekretariat Daerah	13.356.118.735,00	5.780.730,00	11.721.730,00	13.350.177.735,00	21.346.020.438,00	(7.995.842.703,00)	(37,46)
41	Sekretariat DPRD	28.986.617.194,00	3.824.600,00	27.699.365,00	28.962.742.429,00	23.904.298.429,00	5.058.444.000,00	21,16
42	Badan Penghubung	1.715.638.189,00	38.664.500,00	9.519.000,00	1.744.783.689,00	993.596.684,00	751.187.005,00	75,60
	Jumlah	**999.910.484.085,00**	**1.618.156.026.663,07**	**1.256.794.866.885,35**	**1.361.271.643.862,72**	**1.513.501.886.300,77**	**(152.230.242.438,05)**	**(10,06)**

Realisasi Beban Barang sebesar Rp1.361.271.643.862,72 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

➢ Belanja Daerah (APBD)	408.650.396.163,00	
➢ Belanja Daerah (BLUD)	591.260.087.922,00	
Total Belanja Daerah		**999.910.484.085,00**
Penambahan		
➢ Saldo Akhir Utang	79.107.167.387,00	
➢ Beban dari Belanja Bantuan Pemerintah	12.492.171.983,00	
➢ Hibah Barang berupa Persediaan	1.041.013.846.984,91	
➢ Saldo Awal Persediaan	485.542.840.308,16	
Total Penambahan		**1.618.156.026.663,07**
Pengurangan		
➢ Saldo Awal Utang	14.489.251.016,00	
➢ Reklasifikasi ke beban hibah	867.874.911.862,98	
➢ Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	814.303.374,00	
➢ Saldo Akhir Persediaan	373.616.400.632,37	
Total Pengurangan		**1.256.794.866.885,35**
Beban Daerah		**1.361.271.643.862,72**

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa **Rp1.898.182.918.222,18**

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp1.898.182.918.222,18, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.488.402.294.904,40 mengalami **penurunan** sebesar (Rp590.219.376.682,22) atau (23,72%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.137.184.869,00	14.420.878.184,01	157.761.797,73	70.400.301.255,28	705.358.086.368,46	(634.957.785.113,18)	(90,02)
2	Dinas Kesehatan	484.309.745.456,00	681.771.316,00	61.698.644.852,14	423.292.871.919,87	471.406.689.999,82	(48.113.818.079,96)	(10,21)
3	RSUD Dr. Moewardi	397.164.712.339,00	25.963.609.893,16	77.740.564.920,43	345.387.757.311,73	392.781.548.983,87	(47.393.791.672,14)	(12,07)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	144.763.726.165,00	56.684.886.708,81	55.549.854.749,82	145.898.758.123,98	135.795.561.605,90	10.103.196.518,08	7,44
5	RSUD Tugurejo Semarang	77.594.972.358,00	4.021.076.176,77	6.177.768.196,60	75.438.280.338,17	73.043.344.236,06	2.394.936.102,11	3,28
6	RSUD Kelet Donorejo	29.284.459.425,00	1.819.285.806,97	6.736.189.180,00	24.367.556.051,97	22.840.706.993,22	1.526.849.058,75	6,68
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	29.635.575.878,00	2.500.479.422,00	2.273.920.812,00	29.862.134.488,00	22.425.314.611,00	7.436.819.877,00	33,16
8	RSJD Surakarta	28.623.507.729,00	1.091.473.350,86	8.945.672.505,42	20.769.308.574,44	26.214.282.794,52	(5.444.974.220,08)	(20,77)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	22.754.275.177,00	4.409.949.694,28	4.031.781.157,53	23.132.443.713,75	21.699.554.512,65	1.432.889.201,10	6,60
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	21.040.264.938,00	3.743.419,18	187.831.419,67	20.856.176.937,51	18.804.075.745,82	2.052.101.191,68	10,91
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	48.190.737.062,00	150.017.783,85	2.720.962.445,86	45.619.792.399,99	38.779.999.964,56	6.839.792.435,43	17,64
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.694.744.192,00	99.822.372,06	193.696.172,95	8.600.870.391,11	4.564.415.150,32	4.036.455.240,79	88,43
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.155.811.781,00	109.630.920,97	80.739.689,55	3.184.703.012,42	3.964.708.566,61	(780.005.554,19)	(19,67)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.616.264.907,00	17.386.995,44	28.379.488,50	12.605.272.413,94	16.224.735.795,17	(3.619.463.381,23)	(22,31)

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.832.275.440,00	74.639.572,34	25.605.466,45	3.881.309.545,88	5.042.354.362,14	(1.161.044.816,26)	(23,03)
16	Dinas Sosial	30.922.255.011,00	317.186.184,32	120.881.989,61	31.118.559.205,71	21.149.839.736,04	9.968.719.469,66	47,13
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.495.333.180,00	98.833.042,32	156.246.267,37	12.437.919.954,95	12.769.037.977,39	(331.118.022,44)	(2,59)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.739.799.477,00	25.275.352,84	38.032.786,93	4.727.042.042,91	7.791.577.348,29	(3.064.535.305,38)	(39,33)
19	Dinas Ketahanan Pangan	5.742.617.568,00	82.830.994,00	83.019.356,39	5.742.429.205,61	5.386.267.574,73	356.161.630,88	6,61
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.310.386.066,00	140.051.072,05	206.637.977,36	15.243.799.160,69	13.377.537.134,24	1.866.262.026,45	13,95
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.879.590.250,00	72.438.793,18	238.833.871,60	3.713.195.171,58	5.631.657.488,31	(1.918.462.316,73)	(34,07)
22	Dinas Perhubungan	105.472.731.451,00	213.172.400,00	213.751.213,11	105.472.152.637,89	94.242.984.177,22	11.229.168.460,67	11,92
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	55.063.839.816,00	-	-	55.063.839.816,00	34.921.114.777,00	20.142.725.039,00	57,68
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.058.832.552,00	78.571.627,21	86.693.518,54	20.050.710.660,67	18.703.647.712,54	1.347.062.948,13	7,20
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.475.281.119,00	-	-	4.475.281.119,00	4.651.961.817,00	(176.680.698,00)	(3,80)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	24.854.387.798,00	163.731.356,00	380.976.344,44	24.637.142.809,56	31.474.236.386,00	(6.837.093.576,44)	(21,72)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.307.087.866,00	31.309.135,80	-	3.338.397.001,80	4.741.485.418,84	(1.403.088.417,04)	(29,59)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	16.572.989.988,00	114.357.138,10	93.103.369,40	16.594.243.756,70	21.165.817.195,24	(4.571.573.438,54)	(21,60)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	19.139.316.427,00	91.938.783,58	47.522.946,03	19.183.732.264,55	23.724.028.181,85	(4.540.295.917,30)	(19,14)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	13.667.937.515,00	-	44.841.250,79	13.623.096.264,21	12.438.646.530,33	1.184.449.733,88	9,52
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.758.686.922,00	17.915.599,19	82.660.918,84	11.693.941.602,34	10.042.633.982,60	1.651.307.619,74	16,44
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	21.889.040.268,00	142.664.824,32	212.704.382,36	21.819.000.709,96	18.911.246.117,67	2.907.754.592,29	15,38
33	SKPKD		-	-	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.228.761.201,00	-	-	10.228.761.201,00	8.808.736.407,00	1.420.024.794,00	16,12
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	90.156.091.499,00	611.067.805,14	614.303.200,34	90.152.856.103,80	77.183.730.329,72	12.969.125.774,08	16,80
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.185.794.179,00	91.605.143,58	146.301.891,01	13.131.097.431,58	13.263.676.074,50	(132.578.642,92)	(1,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	7.079.415.081,00	-	517.922.760,00	6.561.492.321,00	7.435.785.293,00	(874.292.972,00)	(11,76)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	20.733.414.191,00	10.304.819,39	10.749.526,56	20.732.969.483,83	16.686.898.119,44	4.046.071.364,39	24,25
39	Inspektorat	2.001.087.347,00	125.580.046,51	109.436.727,60	2.017.230.665,91	3.957.039.500,82	(1.939.808.834,91)	(49,02)
40	Sekretariat Daerah	43.570.453.873,00	106.474.839,78	187.311.074,75	43.489.617.638,03	32.134.423.295,78	11.355.194.342,25	35,34

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
41	Sekretariat DPRD	84.758.801.267,00	276.357.357,09	377.722.788,52	84.657.435.835,57	24.363.867.297,55	60.293.568.538,02	247,47
42	Badan Penghubung	5.018.937.894,00	106.181.787,74	145.682.002,45	4.979.437.679,29	4.499.039.341,19	480.398.338,10	10,68
	Jumlah	**2.013.881.127.522,00**	**114.966.499.718,83**	**230.664.709.018,65**	**1.898.182.918.222,18**	**2.488.402.294.904,40**	**(590.219.376.682,22)**	**(23,72)**

Realisasi Beban Jasa sebesar Rp1.898.182.918.222,18 dapat dirinci dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

➢ Belanja Daerah (APBD)	2.010.859.393.073,00	
➢ Belanja Daerah (BLUD)	3.021.734.449,00	
Total Belanja Daerah		**2.013.881.127.522,00**

Penambahan

➢ Saldo Akhir Utang	95.238.467.963,93	
➢ Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	189.857.825,00	
➢ Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	3.500.000,00	
➢ Beban dari Belanja Bantuan Pemerintah	13.777.835.704,00	
➢ Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.756.838.225,90	
Total Penambahan		**114.966.499.718,83**

Pengurangan

➢ Saldo Awal Utang	221.352.632.345,50	
➢ Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	163.892.150,00	
➢ Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	3.847.119.170,00	
➢ Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	5.301.065.353,15	
Total Pengurangan		**230.664.709.018,65**
Beban Daerah		**1.898.182.918.222,18**

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp348.391.026.948,64

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp348.391.026.948,64, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp537.057.928.770,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp188.666.901.821,36) atau (35,13%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.477.899.146,00	11.239.200.209,00	43.190.858.849,96	22.526.240.505,04	281.759.619.699,00	(259.233.379.193,96)	(92,01)
2	Dinas Kesehatan	9.562.575.164,00	53.080.381,00	1.310.459.363,00	8.305.196.182,00	8.210.878.146,00	94.318.036,00	1,15
3	RSUD Dr. Moewardi	33.734.222.201,00	98.345.000,00	2.646.130.000,00	31.186.437.201,00	24.737.733.009,00	6.448.704.192,00	26,07
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	35.517.634.456,00	29.044.200,00	1.559.716,57	35.545.118.939,43	30.115.800.064,00	5.429.318.875,43	18,03
5	RSUD Tugurejo Semarang	6.785.657.084,00	-	-	6.785.657.084,00	6.650.552.352,00	135.104.732,00	2,03
6	RSUD Kelet Donorejo	3.923.159.613,00	11.462.005,00	7.000.000,00	3.927.621.618,00	1.424.873.748,00	2.502.747.870,00	175,65
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.541.683.593,00	30.679.211,00	55.050.000,00	2.517.312.804,00	1.881.658.270,00	635.654.534,00	33,78
8	RSJD Surakarta	4.142.602.683,00	159.735.370,00	341.578.919,00	3.960.759.134,00	2.600.006.198,00	1.360.752.936,00	52,34
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	492.391.667,00	4.995.000,00	-	497.386.667,00	554.379.874,00	(56.993.207,00)	(10,28)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	145.162.101.481,00	186.000,00	44.400.000,00	145.117.887.481,00	110.414.195.066,00	34.703.692.415,00	31,43
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	17.927.474.187,00	-	5.595.715.040,00	12.331.759.147,00	13.637.871.201,00	(1.306.112.054,00)	(9,58)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan	662.720.500,00	463.000,00	-	663.183.500,00	435.491.900,00	227.691.600,00	52,28

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Kawasan Permukiman							
13	Satuan Polisi Pamong Praja	349.715.082,00	-	-	349.715.082,00	418.483.347,00	(68.768.265,00)	(16,43)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	618.110.876,00	1.000.000,00	-	619.110.876,00	402.545.927,00	216.564.949,00	53,80
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	512.885.641,00	11.487.350,00	22.752.562,50	501.620.428,50	357.575.536,00	144.044.892,50	40,28
16	Dinas Sosial	4.737.214.568,00	51.565.000,00	189.857.825,00	4.598.921.743,00	1.647.692.710,00	2.951.229.033,00	179,11
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.507.999.554,00	500.000,00	220.933.400,00	2.287.566.154,00	3.790.968.159,00	(1.503.402.005,00)	(39,66)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	359.917.148,00	-	135.000.000,00	224.917.148,00	225.283.800,00	(366.652,00)	(0,16)
19	Dinas Ketahanan Pangan	957.015.718,00	-	15.337.500,00	941.678.218,00	685.758.900,00	255.919.318,00	37,32
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.834.500.507,00	64.637.433,00	184.885.000,00	4.714.252.940,00	2.585.440.904,00	2.128.812.036,00	82,34
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	275.016.760,00	-	15.207.000,00	259.809.760,00	622.422.812,00	(362.613.052,00)	(58,26)
22	Dinas Perhubungan	4.872.685.940,00	1.381.713.084,00	160.016.718,00	6.094.382.306,00	2.788.348.530,00	3.306.033.776,00	118,57
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.505.644.130,00	5.516.000,00	-	3.511.160.130,00	3.047.198.064,00	463.962.066,00	15,23
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	791.512.545,00	90.325.395,00	-	881.837.940,00	870.759.193,00	11.078.747,00	1,27
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	173.881.570,00	-	-	173.881.570,00	391.161.531,00	(217.279.961,00)	(55,55)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.348.369.819,00	93.731.317,00	163.652.600,00	1.278.448.536,00	1.600.893.312,00	(322.444.776,00)	(20,14)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	219.416.000,00	2.245.000,00	389.133,33	221.271.866,67	699.176.966,00	(477.905.099,33)	(68,35)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.635.678.750,00	7.861.350,00	10.725.000,00	2.632.815.100,00	1.740.282.064,00	892.533.036,00	51,29
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.181.049.686,00	2.619.600,00	-	1.183.669.286,00	1.289.530.751,00	(105.861.465,00)	(8,21)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.568.408.981,00	141.536.000,00	662.414.450,00	7.047.530.531,00	1.615.470.282,00	5.432.060.249,00	336,25
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.321.245.920,00	25.583.463,00	-	2.346.829.383,00	1.338.940.729,00	1.007.888.654,00	75,28
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.122.374.438,00	43.870.000,00	56.905.200,00	4.109.339.238,00	2.606.402.596,00	1.502.936.642,00	57,66
33	SKPKD		-	-	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.851.695.820,00	-	-	1.851.695.820,00	621.180.193,00	1.230.515.627,00	198,09
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	10.295.854.790,00	-	-	10.295.854.790,00	8.788.862.246,00	1.506.992.544,00	17,15
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.623.269.197,00	84.524.800,00	-	1.707.793.997,00	880.633.757,00	827.160.240,00	93,93
37	Badan Kepegawaian Daerah	1.198.855.260,00	-	49.113.000,00	1.149.742.260,00	1.026.188.779,00	123.553.481,00	12,04
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.315.593.337,00	1.891.500,00	-	2.317.484.837,00	2.189.946.386,00	127.538.451,00	5,82
39	Inspektorat	579.801.196,00	883.350,00	-	580.684.546,00	951.086.684,00	(370.402.138,00)	(38,95)
40	Sekretariat Daerah	5.683.510.875,00	970.000,00	-	5.684.480.875,00	4.282.916.091,00	1.401.564.784,00	32,72
41	Sekretariat DPRD	5.913.271.260,00	102.698.900,00	-	6.015.970.160,00	5.495.475.211,00	520.494.949,00	9,47
42	Badan Penghubung	1.443.430.845,00	570.320,00	-	1.444.001.165,00	1.674.243.783,00	(230.242.618,00)	(13,75)
	Jumlah	**389.728.047.988,00**	**13.742.920.238,00**	**55.079.941.277,36**	**348.391.026.948,64**	**537.057.928.770,00**	**(188.666.901.821,36)**	**(35,13)**

Realisasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp348.391.026.948,64 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
➢ Belanja Daerah (APBD)	302.590.696.691,00	
➢ Belanja Daerah (BLUD)	87.137.351.297,00	
Total Belanja Daerah		**389.728.047.988,00**
Penambahan		
➢ Saldo Akhir Utang	25.234.541,00	
➢ Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	782.617.474,00	
➢ Beban dari Belanja Bantuan Pemerintah	716.949.250,00	
➢ Aset Ekstrakomtabel	12.218.118.973,00	
Total Penambahan		**13.742.920.238,00**
Pengurangan		
➢ Saldo Awal Utang	2.762.597.000,00	
➢ Reklasifikasi ke Beban Jasa	189.857.825,00	
➢ Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	51.923.669.740,00	
➢ Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	23.207.000,00	
➢ Beban Penyusutan Ektrakomtabel	180.609.712,36	
Total Pengurangan		**55.079.941.277,36**
Beban Daerah		**348.391.026.948,64**

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp366.605.806.782,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp366.605.806.782,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp239.273.525.666,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp127.332.281.116,00 atau 53,22% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.182.948.437,00	2.195.650.092,00	-	23.378.598.529,00	28.852.018.887,00	(5.473.420.358,00)	(18,97)
2	Dinas Kesehatan	11.075.591.396,00	-	-	11.075.591.396,00	11.075.908.152,00	(316.756,00)	(0,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	903.156.233,00	-	-	903.156.233,00	375.481.830,00	527.674.403,00	140,53
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.082.536.049,00	-	-	1.082.536.049,00	905.417.313,00	177.118.736,00	19,56
5	RSUD Tugurejo Semarang	569.031.945,00	-	-	569.031.945,00	285.318.759,00	283.713.186,00	99,44
6	RSUD Kelet Donorejo	372.185.327,00	-	-	372.185.327,00	405.066.098,00	(32.880.771,00)	(8,12)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	443.568.333,00	-	-	443.568.333,00	168.223.600,00	275.344.733,00	163,68
8	RSJD Surakarta	997.357.636,00	6.625.000,00	2.875.000,00	1.001.107.636,00	424.867.736,00	576.239.900,00	135,63
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	889.680.132,00			889.680.132,00	694.565.294,00	195.114.838,00	28,09
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.647.688.461,00	-	-	4.647.688.461,00	3.897.498.222,00	750.190.239,00	19,25
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	12.839.706.138,00	-	-	12.839.706.138,00	7.309.871.347,00	5.529.834.791,00	75,65
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.564.977.845,00	-	-	4.564.977.845,00	2.047.258.166,00	2.517.719.679,00	122,98
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.131.370.926,00	-	-	2.131.370.926,00	2.989.888.251,00	(858.517.325,00)	(28,71)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.975.321.266,00	-	-	9.975.321.266,00	6.012.619.367,00	3.962.701.899,00	65,91
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.059.464.936,00	-	-	3.059.464.936,00	2.369.434.078,00	690.030.858,00	29,12
16	Dinas Sosial	6.213.373.906,00	-	-	6.213.373.906,00	2.854.887.793,00	3.358.486.113,00	117,64
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.179.941.173,00	-	-	10.179.941.173,00	7.304.152.652,00	2.875.788.521,00	39,37

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.862.771.153,00	-	-	2.862.771.153,00	1.677.347.467,00	1.185.423.686,00	70,67
19	Dinas Ketahanan Pangan	3.801.767.118,00	-	-	3.801.767.118,00	1.995.039.820,00	1.806.727.298,00	90,56
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.321.747.153,00	-	-	14.321.747.153,00	5.086.625.645,00	9.235.121.508,00	181,56
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.213.209.709,00	-	-	4.213.209.709,00	4.092.585.380,00	120.624.329,00	2,95
22	Dinas Perhubungan	5.963.487.000,00	-	-	5.963.487.000,00	4.818.676.525,00	1.144.810.475,00	23,76
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	9.617.880.805,00	-	-	9.617.880.805,00	6.635.479.171,00	2.982.401.634,00	44,95
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	17.165.347.662,00	-	-	17.165.347.662,00	7.109.133.562,00	10.056.214.100,00	141,45
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.690.391.723,00	-	-	1.690.391.723,00	1.160.367.757,00	530.023.966,00	45,68
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	14.563.874.655,00	-	-	14.563.874.655,00	7.080.395.533,00	7.483.479.122,00	105,69
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	356.079.075,00	-	-	356.079.075,00	764.007.850,00	(407.928.775,00)	(53,39)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.305.902.489,00	-	-	6.305.902.489,00	4.290.178.875,00	2.015.723.614,00	46,98
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.934.623.181,00	-	-	12.934.623.181,00	8.480.435.929,00	4.454.187.252,00	52,52
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.702.816.821,00	-	-	5.702.816.821,00	3.776.669.951,00	1.926.146.870,00	51,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	11.942.549.781,00	-	-	11.942.549.781,00	5.283.773.930,00	6.658.775.851,00	126,02
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.753.809.840,00	-	-	9.753.809.840,00	3.777.939.535,00	5.975.870.305,00	158,18
33	SKPKD		-	-	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.314.377.924,00	-	-	7.314.377.924,00	3.110.509.962,00	4.203.867.962,00	135,15
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	20.655.366.011,00	-	-	20.655.366.011,00	11.841.957.873,00	8.813.408.138,00	74,43
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.295.072.267,00	-	-	6.295.072.267,00	3.907.964.280,00	2.387.107.987,00	61,08
37	Badan Kepegawaian Daerah	8.298.164.664,00	-	-	8.298.164.664,00	3.646.809.162,00	4.651.355.502,00	127,55
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.806.130.670,00	-	-	4.806.130.670,00	1.458.477.712,00	3.347.652.958,00	229,53
39	Inspektorat	8.777.555.102,00	-	-	8.777.555.102,00	6.370.710.106,00	2.406.844.996,00	37,78
40	Sekretariat Daerah	22.639.540.446,00	-	-	22.639.540.446,00	14.176.179.153,00	8.463.361.293,00	59,70
41	Sekretariat DPRD	72.131.604.903,00	-	-	72.131.604.903,00	49.422.296.201,00	22.709.308.702,00	45,95
42	Badan Penghubung	1.164.436.399,00	-	-	1.164.436.399,00	1.337.486.742,00	(173.050.343,00)	(12,94)
	Jumlah	**364.406.406.690,00**	**2.202.275.092,00**	**2.875.000,00**	**366.605.806.782,00**	**239.273.525.666,00**	**127.332.281.116,00**	**53,22**

Realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp366.605.806.782,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

- Belanja Daerah (APBD) 359.220.428.865,00
- Belanja Daerah (BLUD) 5.185.977.825,00

Total Belanja Daerah **364.406.406.690,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Utang 6.625.000,00
- Beban dari Belanja Bantuan Pemerintah 2.195.650.092,00

Total Penambahan **2.202.275.092,00**

Pengurangan

- Saldo Awal Utang 2.875.000,00

Total Pengurangan **2.875.000,00**

Beban Daerah **366.605.806.782,00**

5.4.2.1.2.5 Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga Rp133.245.863.754,00

Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp133.245.863.754,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp177.737.257.983,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp44.491.394.229,00) atau (25,03%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.510.683.978,00	362.778.500,00		5.873.462.478,00	6.833.363.621,00	(959.901.143,00)	(14,05)
2	Dinas Kesehatan	155.785.000,00	-	-	155.785.000,00	67.995.000,00	87.790.000,00	129,11
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	15.137.752.700,00	(15.119.752.700,00)	(99,88)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00	129.960.000,00	45.040.000,00	34,66
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	200.350.000,00	-	-	200.350.000,00	-	200.350.000,00	100,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	153.400.000,00	(153.400.000,00)	(100,00)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	90.650.000,00	-	-	90.650.000,00	131.370.000,00	(40.720.000,00)	(31,00)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Sosial	117.804.108.000,00	-	-	117.804.108.000,00	6.104.295.000,00	111.699.813.000,00	1.829,86
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	277.934.195,00	-	-	277.934.195,00	728.700.000,00	(450.765.805,00)	(61,86)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.655.285.000,00	-	-	1.655.285.000,00	97.905.000,00	1.557.380.000,00	1.590,71
19	Dinas Ketahanan Pangan	237.725.500,00	-	-	237.725.500,00	7.485.559.000,00	(7.247.833.500,00)	(96,82)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.043.540.000,00	-	-	1.043.540.000,00	29.759.396.585,00	(28.715.856.585,00)	(96,49)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	90.400.000,00	-	-	90.400.000,00	172.950.000,00	(82.550.000,00)	(47,73)
22	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	-	18.000.000,00	100,00
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	596.050.000,00	-	-	596.050.000,00	-	596.050.000,00	100,00
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	-	99.000.000,00	(99.000.000,00)	(100,00)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.000.000,00	-	-	39.000.000,00	-	39.000.000,00	100,00
26	Dinas Kepemudaan, Olah	710.258.000,00	-	-	710.258.000,00	5.519.733.000,00	(4.809.475.000,00)	(87,13)

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
	Raga dan Pariwisata							
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.300.000,00	-	-	36.300.000,00	-	36.300.000,00	100,00
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	10.146.493.664,00	(10.146.493.664,00)	(100,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	568.745.493,00	-	-	568.745.493,00	54.013.544.100,00	(53.444.798.607,00)	(98,95)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	109.400.000,00	-	-	109.400.000,00	843.032.500,00	(733.632.500,00)	(87,02)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	36.272.694,00	-	-	36.272.694,00	1.714.285.713,00	(1.678.013.019,00)	(97,88)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.263.940.694,00	-	-	1.263.940.694,00	971.854.100,00	292.086.594,00	30,05
33	SKPKD		-	-			-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	231.950.000,00	-	-	231.950.000,00	281.500.000,00	(49.550.000,00)	(17,60)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	100,00
39	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-
40	Sekretariat Daerah	1.915.206.700,00	-	-	1.915.206.700,00	37.277.168.000,00	(35.361.961.300,00)	(94,86)
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	77.500.000,00	-	-	77.500.000,00	68.000.000,00	9.500.000,00	13,97
	Jumlah	**132.883.085.254,00**	**362.778.500,00**	**-**	**133.245.863.754,00**	**177.737.257.983,00**	**(44.491.394.229,00)**	**(25,03)**

Realisasi Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp133.245.863.754,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah **132.883.085.254,00**

Penambahan

- Beban dari Belanja Bantuan Pesmerintah 362.778.500,00

Total Penambahan **362.778.500,00**

Pengurangan

Total Pengurangan **0,00**

Beban Daerah **133.245.863.754,00**

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOP Rp772.370.151.286,91

Beban Barang dan Jasa BOP terealisasi sebesar Rp772.370.151.286,91, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp772.370.151.286,91 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	781.802.645.118,00	10.194.708.684,07	19.627.202.515,16	772.370.151.286,91	-	772.370.151.286,91	100,00
	Jumlah	**781.802.645.118,00**	**10.194.708.684,07**	**19.627.202.515,16**	**772.370.151.286,91**	**-**	**772.370.151.286,91**	**100,00**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOP dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah **781.802.645.118,00**

Penambahan

➢ Saldo Awal Persediaan	10.194.708.684,07	
Total Penambahan		**10.194.708.684,07**

Pengurangan

➢ Kapitalisasi Ke Aset Tetap	12.332.045.634,00	
➢ Saldo Akhir Persediaan	7.295.156.881,16	
Total Pengurangan		**19.627.202.515,16**
Beban Daerah		**772.370.151.286,91**

5.2.4.1.2.7 Beban Barang dan Jasa BOS — Rp682.115.312.518,81

Beban Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp682.115.312.518,81, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp668.705.688.440,36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.409.624.078,45 atau 2,01% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	694.757.357.238,00	18.014.445.977,86	30.656.490.697,05	682.115.312.518,81	668.705.688.440,36	13.409.624.078,45	2,01
	Jumlah	**694.757.357.238,00**	**18.014.445.977,86**	**30.656.490.697,05**	**682.115.312.518,81**	**668.705.688.440,36**	**13.409.624.078,45**	**2,01**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah		**694.757.357.238,00**
Penambahan		
➢ Belanja Modal Non Aset Tetap	22.440.000,00	
➢ Saldo Awal Persediaan	17.992.005.977,86	
Total Penambahan		**18.014.445.977,86**
Pengurangan		
➢ Kapitalisasi Ke Aset Tetap	14.902.780.014,00	
➢ Saldo Akhir Persediaan	15.753.710.683,05	
Total Pengurangan		**30.656.490.697,05**
Beban Daerah		**682.115.312.518,81**

5.4.2.1.3 Beban Subsidi — Rp4.958.884.836,00

Beban Subsidi terealisasi sebesar Rp4.958.884.836,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp90.482.166,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.868.402.670,00 atau 5.380,51% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Subsidi kepada BUMN	1.200.000.000,00	-	-	1.200.000.000,00	-	1.200.000.000,00	100,00
2	Beban Subsidi kepada BUMD	3.758.884.836,00	-	-	3.758.884.836,00	90.482.166,00	3.668.402.670,00	4.054,28
3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**4.958.884.836,00**	**-**	**-**	**4.958.884.836,00**	**90.482.166,00**	**4.868.402.670,00**	**5.380,51**

5.4.2.1.3.1 Beban Subsidi kepada BUMN **Rp1.200.000.000,00**

Beban Subsidi kepada BUMN terealisasi sebesar Rp1.200.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.200.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Ketahanan Pangan	1.200.000.000,00	-	-	1.200.000.000,00		1.200.000.000,00	100,00
	Jumlah	**1.200.000.000,00**	**-**	**-**	**1.200.000.000,00**	**-**	**1.200.000.000,00**	**100,00**

5.4.2.1.3.2 Beban Subsidi kepada BUMD **Rp3.758.884.836,00**

Beban Subsidi kepada BUMD terealisasi sebesar Rp3.758.884.836,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp90.482.166,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.668.402.670,00 atau 4.054,28% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Ketahanan Pangan	3.546.319.800,00	-	-	3.546.319.800,00	-	3.546.319.800,00	100,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	212.565.036,00	-	-	212.565.036,00	90.482.166,00	122.082.870,00	134,92
	Jumlah	**3.758.884.836,00**	**-**	**-**	**3.758.884.836,00**	**90.482.166,00**	**3.668.402.670,00**	**4.054,28**

5.4.2.1.4 Beban Hibah **Rp2.966.262.710.733,99**

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp2.966.262.710.733,99, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.634.910.082.267,36 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.668.647.371.533,37) atau (55,29%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	16.046.400.000,00	1.045.030.000,00	-	17.091.430.000,00	298.745.066.141,00	(281.653.636.141,00)	(94,28)
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	871.372.915.917,80	3.609.114.434,32	867.763.801.483,48	897.297.697.949,36	(29.533.896.465,88)	(3,29)
3	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	1.057.706.101.856,00	6.986.057.108,18	32.666.666,67	1.064.659.492.297,51	5.418.497.433.377,00	(4.353.837.941.079,49)	(80,35)
6	Beban Hibah Dana BOS	998.639.178.147,00	-	2.261.075.994,00	996.378.102.153,00	-	996.378.102.153,00	100,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai	20.369.884.800,00	-	-	20.369.884.800,00	20.369.884.800,00	-	-

	LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Politik							
Jumlah	**2.092.761.564.803,00**	**879.404.003.025,98**	**5.902.857.094,99**	**2.966.262.710.733,99**	**6.634.910.082.267,36**	**(3.668.647.371.533,37)**	**(55,29)**

Realisasi Beban Hibah sebesar Rp2.966.262.710.733,99, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		**2.092.761.564.803,00**
Penambahan		
➢ Reklasifikasi dari Beban Persediaan	867.443.348.358,98	
➢ Hibah Barang Berupa Aset	11.960.654.667,00	
Total Penambahan		**879.404.003.025,98**
Pengurangan		
➢ Kapitalisasi ke Aset Tetap	2.261.075.994,00	
➢ Penyusutan Aset Tetap yang Dihibahkan	3.641.781.100,99	
Total Pengurangan		**5.902.857.094,99**
Beban Daerah		**2.966.262.710.733,99**

5.4.2.1.4.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp17.091.430.000,00

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp17.091.430.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp298.745.066.141,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp281.653.636.141,00) atau (94,28%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	-		-	-	8.630.000.000	(8.630.000.000,00)	(100,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang		96.180.000		96.180.000,00	-	96.180.000,00	100,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.046.400.000,00	-	-	16.046.400.000,00	9.436.432.141,00	6.609.967.859,00	70,05
4	Dinas Perhubungan		948.850.000,00		948.850.000,00		948.850.000,00	100,00
5	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	280.678.634.000,00	(280.678.634.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**16.046.400.000,00**	**1.045.030.000,00**	**-**	**17.091.430.000,00**	**298.745.066.141,00**	**(281.653.636.141,00)**	**(94,28)**

5.4.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp867.763.801.483,48

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp867.763.801.483,48, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp897.297.697.949,36 mengalami **penurunan** sebesar (Rp29.533.896.465,88) atau 3,29% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	845.383.713.123,80	-	845.383.713.123,80	894.253.756.662,69	(48.870.043.538,89)	(5,46)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	-	-	-	2.050.819.800,00	(2.050.819.800,00)	(100,00)
3	Sekretariat Badan Penanggulanga	-	14.566.043.127,00	-	14.566.043.127,00	-	14.566.043.127,00	100,00

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
	n Bencana Daerah							
4	Dinas Sosial	-	-	-	-	42.640.000,00	(42.640.000,00)	(100,00)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	82.080.000,00	-	82.080.000,00	-	82.080.000,00	100,00
6	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	354.181.070,00	(354.181.070,00)	(100,00)
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	738.350.000,00	-	738.350.000,00	-	738.350.000,00	100,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	2.310.225.000,00	168.905.833,33	2.141.319.166,67	-	2.141.319.166,67	100,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	29.019.167,00	13.203.720,99	15.815.446,01	-	15.815.446,01	100,00
10	Sekretariat Daerah	-	8.149.464.500,00	3.312.983.880,00	4.836.480.620,00	-	4.836.480.620,00	100,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	114.021.000,00	114.021.000,00	-	-	-	-
12	Badan Pengeloaan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	596.300.416,67	(596.300.416,67)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**871.372.915.917,80**	**3.609.114.434,32**	**867.763.801.483,48**	**897.297.697.949,36**	**(29.533.896.465,88)**	**(3,29)**

5.4.2.1.4.3 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp1.064.659.492.297,51

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp1.064.659.492.297,51, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.418.497.433.377,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.353.837.941.079,49) atau (80,35%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	347.928.585.764,00	233.449.000,00	32.666.666,67	348.129.368.097,33	5.144.908.503.073,00	(4.796.779.134.975,67)	(93,23)
2	Dinas Kesehatan	1.444.500.000,00		-	1.444.500.000,00	-	1.444.500.000,00	100,00
3	Dinas Sosial	905.000.000,00	-	-	905.000.000,00	-	905.000.000,00	100,00
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	42.662.000.000,00	-	-	42.662.000.000,00	16.335.000.000,00	26.327.000.000,00	161,17
5	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.487.274.534,00		1.487.274.534,00		1.487.274.534,00	100,00
6	Dinas Ketahanan Pangan		4.331.323.966,18		4.331.323.966,18		4.331.323.966,18	100,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21.896.741.441,00	-	-	21.896.741.441,00	6.238.409.731,00	15.658.331.710,00	251,00
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.500.000.000,00	-	-	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-	0,00
9	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	114.073.000.000,00	-	-	114.073.000.000,00	102.775.000.000,00	11.298.000.000,00	10,99
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.464.146.900,00	900.419.502,00		5.364.566.402,00	23.846.242.732,00	(18.481.676.330,00)	(77,50)
11	Dinas Pertanian dan	57.233.766.991,00	-	-	57.233.766.991,00	1.675.000.000,00	55.558.766.991,00	3.316,94

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Perkebunan							
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	36.194.761.245,00	27.965.106,00	-	36.222.726.351,00	16.940.101.000,00	19.282.625.351,00	113,83
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.254.489.515,00	-	-	8.254.489.515,00	9.360.676.841,00	(1.106.187.326,00)	(11,82)
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.190.000.000,00	5.625.000,00	-	1.195.625.000,00	405.000.000,00	790.625.000,00	195,22
15	Sekretariat Daerah	417.959.110.000,00		-	417.959.110.000,00	92.513.500.000,00	325.445.610.000,00	351,78
	Jumlah	**1.057.706.101.856,00**	**6.986.057.108,18**	**32.666.666,67**	**1.064.659.492.297,51**	**5.418.497.433.377,00**	**(4.353.837.941.079,49)**	**(80,35)**

5.4.2.1.4.4 Beban Hibah Dana BOS Rp996.378.102.153,00

Beban Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp996.378.102.153,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp996.378.102.153,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	998.639.178.147,00	-	2.261.075.994,00	996.378.102.153,00	-	996.378.102.153,00	100,00
	Jumlah	**998.639.178.147,00**	**-**	**2.261.075.994,00**	**996.378.102.153,00**	**-**	**996.378.102.153,00**	**100,00**

5.4.2.1.4.5 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp20.369.884.800,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp20.369.884.800,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.369.884.800,00 tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.369.884.800,00	-	-	20.369.884.800,00	20.369.884.800,00	-	-
	Jumlah	**20.369.884.800,00**	**-**	**-**	**20.369.884.800,00**	**20.369.884.800,00**	**-**	**-**

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial Rp78.894.181.648,00

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp78.894.181.648,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp133.388.891.190,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp54.494.709.542,00) atau (40,85%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	64.768.264.710,00	-	-	64.768.264.710,00	126.076.201.270,00	(61.307.936.560,00)	(48,63)
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	9.633.430.914,00	-	-	9.633.430.914,00	7.312.689.920,00	2.320.740.994,00	31,74
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	4.492.486.024,00	-	-	4.492.486.024,00	-	4.492.486.024,00	100,00
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang	-	-	-	-	-	-	-

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)							
Jumlah	**78.894.181.648,00**	**-**	**-**	**78.894.181.648,00**	**133.388.891.190,00**	**(54.494.709.542,00)**	**(40,85)**

5.4.2.1.5.1 Beban Bantuan Sosial kepada Individu Rp64.768.264.710,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Individu terealisasi sebesar Rp64.768.264.710,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp126.076.201.270,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp61.307.936.560,00) atau (48,63%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.993.000.000,00	-	-	9.993.000.000,00	76.202.836.000,00	(66.209.836.000,00)	(86,89)
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	12.972.000.000,00	-	-	12.972.000.000,00	8.956.000.000,00	4.016.000.000,00	44,84
3	Dinas Sosial	30.840.000.000,00	-	-	30.840.000.000,00	29.961.000.000,00	879.000.000,00	2,93
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	531.800.000,00	(531.800.000,00)	(100,00)
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	915.257.200,00	-	-	915.257.200,00	577.900.500,00	337.356.700,00	58,38
6	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.048.007.510,00	-	-	10.048.007.510,00	9.846.664.770,00	201.342.740,00	2,04
	Jumlah	**64.768.264.710,00**	**-**	**-**	**64.768.264.710,00**	**126.076.201.270,00**	**(61.307.936.560,00)**	**(48,63)**

5.4.2.1.5.2 Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp9.633.430.914,00

Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp9.633.430.914,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.312.689.920,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.320.740.994,00 atau 31,74% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	9.633.430.914,00	-	-	9.633.430.914,00	7.312.689.920,00	2.320.740.994,00	31,74
	Jumlah	**9.633.430.914,00**	**-**	**-**	**9.633.430.914,00**	**7.312.689.920,00**	**2.320.740.994,00**	**31,74**

5.4.2.1.5.3 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp4.492.486.024,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.492.486.024,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.492.486.024,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Sosial	600.000.000,00	-	-	600.000.000,00	-	600.000.000,00	100,00
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.892.486.024,00	-	-	3.892.486.024,00	-	3.892.486.024,00	100,00
	Jumlah	**4.492.486.024,00**	**-**	**-**	**4.492.486.024,00**	**-**	**4.492.486.024,00**	**100,00**

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang Rp70.784.354.513,53

Beban Penyisihan Piutang terealisasi sebesar Rp70.784.354.513,53, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.755.144.617,29 mengalami **kenaikan** sebesar Rp69.029.209.896,24 atau 3.932,96 % dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	70.566.540.647,13	-	70.566.540.647,13	100,00
2	Beban Penyishan Piutang Retribusi Daerah	248.124,09	17.162.066,60	(16.913.942,51)	(98,55)
3	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekyaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Beban Penyishan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	217.565.742,31	1.737.982.550,69	(1.520.416.808,38)	(87,48)
5	Beban Penyishan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**70.784.354.513,53**	**1.755.144.617,29**	**69.029.209.896,24**	**3.932,96**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp70.784.354.513,53, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Penambahan

➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	355.921.136.436,03	
➢ Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	332.010.658.330,00	
Total Penambahan		**687.931.794.766,03**

Pengurangan

➢ Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	617.147.440.252,50	
Total Pengurangan		**617.147.440.252,50**
Beban Daerah		**70.784.354.513,53**

5.4.2.1.6.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp70.566.540.647,13

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp70.566.540.647,13, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp70.566.540.647,13 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	70.566.540.647,13	-	70.566.540.647,13	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-	-	-
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	-	-	-	-
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-	-	-
	Jumlah	**70.566.540.647,13**	**-**	**70.566.540.647,13**	**100,00**

5.4.2.1.6.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Rp248.124,09

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp248.124,09, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.162.066,60 mengalami **penurunan** sebesar (Rp16.913.942,51)atau (98,55%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	-	1.141.266,60	(1.141.266,60)	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	248.124,09	16.020.800,00	(15.772.675,91)	(98,45)
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
	Jumlah	**248.124,09**	**17.162.066,60**	**(16.913.942,51)**	**(98,55)**

5.4.2.1.6.2.1 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.141.266,60 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.141.266,60) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	1.141.266,60	(1.141.266,60)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**1.141.266,60**	**(1.141.266,60)**	**(100,00)**

5.4.2.1.6.2.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Rp248.124,09

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp248.124,09, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.020.800,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp15.772.675,91) atau (98,45%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah	-	16.020.800,00	(16.020.800,00)	(100,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	248.124,09	-	248.124,09	100,00
	Jumlah	**248.124,09**	**16.020.800,00**	**(15.772.675,91)**	**(98,45)**

5.4.2.1.6.3 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp217.565.742,31

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp217.565.742,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.737.982.550,69 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.520.416.808,38) atau (87,48%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	-	127.971,74	(127.971,74)	(100,00)
2	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	217.565.742,31	1.737.854.578,95	(1.520.288.836,63)	(87,48)
	Jumlah	**217.565.742,31**	**1.737.982.550,69**	**(1.520.416.808,38)**	**(87,48)**

5.4.2.1.6.3.1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp127.971,74 mengalami **penurunan** sebesar (Rp127.971,74) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	-	127.971,74	(127.971,74)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**127.971,74**	**(127.971,74)**	**(100,00)**

5.4.2.1.6.3.2 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Rp217.565.742,31

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp217.565.742,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.737.854.578,95 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.520.288.836,64) atau (87,48%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	646.190,52	336.269.794,27	(335.623.603,75)	(99,81)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	911.405,75	728.389.297,59	(727.477.891,84)	(99,87)
3	RSUD Tugurejo Semarang	215.426.405,35	342.959.274,75	(127.532.869,40)	(37,19)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	240.432.531,00	(240.432.531,00)	(100,00)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	540.109,10	64.829.590,93	(64.289.481,83)	(99,17)
6	RSJD Surakarta	37.466,80	-	37.466,80	100,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.164,79	24.974.090,41	(24.969.925,62)	(99,98)
	Jumlah	**217.565.742,31**	**1.737.854.578,95**	**(1.520.288.836,64)**	**(87,48)**

5.4.2.1.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp1.298.548.256.045,20

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp1.298.548.256.045,20, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.321.362.950.359,57 mengalami **penurunan** sebesar (Rp22.814.694.314,37) atau (1,73%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Peralatan dan Mesin	615.582.968.476,70	599.923.511.551,53	15.659.456.925,17	2,61
2	Beban Gedung dan Bangunan	167.226.415.830,74	156.613.203.540,10	10.613.212.290,64	6,78
3	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan	509.406.449.527,18	557.487.644.088,46	(48.081.194.561,28)	(8,62)
4	Beban Aset Tetap Lainnya	506.233.702,66	462.120.223,48	44.113.479,18	9,55
5	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.614.182.721,92	3.553.804.436,60	60.378.285,32	1,70
6	Beban Penyusutan Aset Lainnya	2.212.005.786,00	3.322.666.519,40	(1.110.660.733,40)	(33,43)
	Jumlah	**1.298.548.256.045,20**	**1.321.362.950.359,57**	**(22.814.694.314,37)**	**(1,73)**

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.298.548.256.045,20 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**17.170.748.245.324,50**
Penambahan		
➢ Mutasi Keluar	23.862.925.693,83	
➢ Reklas Ke Aset tetap	177.833.793.255,56	
➢ Reklas ke Aset Lainnya	103.011.432.360,16	
➢ Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	180.609.712,35	
➢ Reklas Pemanfaatan	15.091.769.517,58	
➢ Penjualan	1.275.950.219,07	
➢ Ganti Rugi	17.872.250,00	
➢ Hibah dan LainLain	4.172.585.517,66	
➢ Koreksi	60.354.653.585,16	
Total Penambahan		**385.801.592.111,37**
Pengurangan		
➢ Hibah	2.622.408.219,30	
➢ Mutasi Masuk	23.862.925.693,83	
➢ Reklas Dari Aset Tetap	277.145.065.775,05	
➢ Reklas Dari Aset Lainnya	17.315.132.748,58	
➢ Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	18.144.711,44	
➢ Reklas Dari ATB	1.126.155.732,34	
➢ Koreksi	39.792.679.778,83	
Total Pengurangan		**361.882.512.659,37**
Saldo Akumulasi Penyusutan Awal		**15.896.119.068.731,30**
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		**1.298.548.256.045,20**

5.4.2.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp615.582.968.476,70

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp615.582.968.476,70, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp599.923.511.551,53 mengalami **kenaikan** sebesar Rp15.659.456.925,17 atau 2,61% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	23.882.048.330,54	24.630.052.078,83	(748.003.748,29)	(3,04)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	39.098.696.778,87	38.940.671.345,04	158.025.433,83	0,41
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	29.861.409.396,22	29.107.427.427,19	753.981.969,03	2,59
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	4.339.532.862,82	4.463.333.157,00	(123.800.294,18)	(2,77)
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	142.105.801.670,60	132.720.666.950,87	9.385.134.719,73	7,07
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	20.307.195.627,03	18.178.798.977,38	2.128.396.649,65	11,71
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	133.347.227.676,21	138.565.896.014,38	(5.218.668.338,17)	(3,77)
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	48.034.020.693,61	41.057.917.543,77	6.976.103.149,84	16,99
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	330.294.513,16	319.345.645,51	10.948.867,65	3,43
10	Beban Penyusutan Komputer	152.078.633.806,40	156.895.167.961,73	(4.816.534.155,33)	(3,07)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	63.552.202,20	49.914.408,87	13.637.793,33	27,32
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	15.697.129,80	13.917.345,78	1.779.784,02	12,79
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	57.692.288,34	51.196.177,19	6.496.111,15	12,69
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	547.218.718,08	551.837.009,80	(4.618.291,72)	(0,84)
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	11.088.723.240,24	9.736.020.799,52	1.352.702.440,72	13,89
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	316.399.530,98	243.971.052,57	72.428.478,41	29,69
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	1.979.449.301,31	2.266.603.204,87	(287.153.903,56)	(12,67)
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	8.127.256.710,29	2.128.656.451,23	5.998.600.259,06	281,80
	Jumlah	**615.582.968.476,70**	**599.923.511.551,53**	**15.659.456.925,17**	2,61

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp615.582.968.476,70 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**6.382.201.228.019,60**
Penambahan		
➢ Mutasi Keluar	12.380.158.705,48	
➢ Reklas Ke Aset tetap	173.056.202.826,96	
➢ Reklas ke Aset Lainnya	79.456.425.744,57	
➢ Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	112.659.112,36	
➢ Koreksi	2.172.526.904,97	
Total Penambahan		**267.177.973.294,34**
Pengurangan		
➢ Hibah	2.114.703.682,63	
➢ Mutasi Masuk	12.380.158.705,48	
➢ Reklas Dari Aset Tetap	173.568.128.352,22	
➢ Reklas Dari Aset Lainnya	1.367.896.259,67	
➢ Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	305.000,00	

➢ Koreksi	7.317.739.595,93
Total Pengurangan	**196.748.931.595,93**
Saldo Akumulasi Penyusutan Awal	**5.837.047.301.241,31**
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	**615.582.968.476,70**

5.4.2.1.7.1.1 Beban Penyusutan Alat Besar — Rp23.882.048.330,54

Beban Penyusutan Alat Besar terealisasi sebesar Rp23.882.048.330,54, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.630.052.078,83 mengalami **penurunan** sebesar (Rp748.003.748,29) atau (3,04%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.713.817.119,55	1.574.671.276,12	139.145.843,43	8,84
2	Dinas Kesehatan	444.808.942,16	681.882.005,79	(237.073.063,63)	(34,77)
3	RSUD Dr. Moewardi	1.845.582.728,05	1.833.255.644,71	12.327.083,34	0,67
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.408.305.366,66	1.848.392.332,26	(440.086.965,60)	(23,81)
5	RSUD Tugurejo Semarang	536.584.683,36	692.058.152,93	(155.473.469,57)	(22,47)
6	RSUD Kelet Donorejo	205.971.093,75	205.971.093,75	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	744.723.959,38	744.100.625,00	623.334,38	0,08
8	RSJD Surakarta	227.943.588,12	209.797.083,34	18.146.504,78	8,65
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	152.774.209,71	136.214.577,83	16.559.631,88	12,16
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.792.747.769,38	9.142.142.353,14	650.605.416,24	7,12
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.593.913.786,50	1.465.768.161,50	128.145.625,00	8,74
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	70.360.112,50	65.785.112,50	4.575.000,00	6,95
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.018.750,00	80.033.333,33	(14.583,33)	(0,02)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	714.645.503,97	333.534.330,80	381.111.173,17	114,26
16	Dinas Sosial	40.122.099,75	143.394.037,25	(103.271.937,50)	(72,02)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.275.833,34	21.817.500,00	458.333,34	2,10
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	343.750,00	375.000,00	(31.250,00)	(8,33)
19	Dinas Ketahanan Pangan	1.817.046,88	59.895.000,00	(58.077.953,12)	(96,97)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.258.721,00	29.245.762,67	(987.041,67)	(3,37)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	87.597.625,00	(87.597.625,00)	(100,00)
22	Dinas Perhubungan	52.082.796,36	48.007.955,13	4.074.841,23	8,49
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	221.082.525,00	202.798.750,00	18.283.775,00	9,02
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	139.908.750,00	169.471.250,00	(29.562.500,00)	(17,44)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79.337.312,50	79.379.239,58	(41.927,08)	(0,05)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	203.795.545,41	354.883.637,70	(151.088.092,29)	(42,57)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	96.425.000,00	96.425.000,00	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	327.347.264,61	312.613.550,00	14.733.714,61	4,71
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	312.472.357,50	450.456.765,20	(137.984.407,70)	(30,63)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	47.982.225,00	47.125.037,50	857.187,50	1,82
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	133.323.640,63	314.951.825,00	(181.628.184,37)	(57,67)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	142.908.095,62	129.630.457,29	13.277.638,33	10,24
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.512.650,00	276.254.250,00	(270.741.600,00)	(98,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	946.093.894,09	1.222.271.331,67	(276.177.437,58)	(22,60)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	244.731.624,99	247.519.125,01	(2.787.500,02)	(1,13)
37	Badan Kepegawaian Daerah	100.350.500,00	100.350.500,00	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	138.733.956,27	142.028.572,50	(3.294.616,23)	(2,32)
39	Inspektorat	4.907.500,00	1.226.875,00	3.680.625,00	300,00
40	Sekretariat Daerah	959.550.141,00	992.938.411,83	(33.388.270,83)	(3,36)
41	Sekretariat DPRD	63.237.500,00	68.487.500,00	(5.250.000,00)	(7,67)
42	Badan Penghubung	37.249.987,50	17.301.037,50	19.948.950,00	115,30
	Jumlah	**23.882.048.330,54**	**24.630.052.078,83**	**(748.003.748,29)**	**(3,04)**

5.4.2.1.7.1.2 Beban Penyusutan Alat Angkutan — Rp39.098.696.778,87

Beban Penyusutan Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp39.098.696.778,87, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.940.671.345,04 mengalami **kenaikan** sebesar Rp158.025.433,83 atau 0,41% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.527.422.612,37	7.843.417.373,48	684.005.238,89	8,72
2	Dinas Kesehatan	3.482.972.985,58	2.111.880.176,21	1.371.092.809,37	64,92
3	RSUD Dr. Moewardi	511.075.689,17	538.238.916,67	(27.163.227,50)	(5,05)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	544.647.937,74	725.020.191,91	(180.372.254,17)	(24,88)
5	RSUD Tugurejo Semarang	315.361.883,34	398.517.333,34	(83.155.450,00)	(20,87)
6	RSUD Kelet Donorejo	366.797.465,70	449.855.469,88	(83.058.004,18)	(18,46)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	178.297.487,30	307.461.416,67	(129.163.929,37)	(42,01)
8	RSJD Surakarta	565.363.085,75	553.402.866,02	11.960.219,73	2,16
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	459.706.900,42	470.880.254,59	(11.173.354,17)	(2,37)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.333.803.395,85	1.734.724.700,00	599.078.695,85	34,53
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.647.915.449,56	632.175.055,12	1.015.740.394,44	160,67
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51.834.750,00	112.019.750,00	(60.185.000,00)	(53,73)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	181.366.312,50	321.042.562,74	(139.676.250,24)	(43,51)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.215.750,00	246.252.250,00	(62.036.500,00)	(25,19)
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.369.421.411,41	1.045.733.814,91	323.687.596,50	30,95
16	Dinas Sosial	557.541.516,67	614.099.600,00	(56.558.083,33)	(9,21)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.024.443.443,33	1.050.525.214,16	(26.081.770,83)	(2,48)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	132.177.062,50	196.275.887,50	(64.098.825,00)	(32,66)
19	Dinas Ketahanan Pangan	50.029.562,50	132.527.645,84	(82.498.083,34)	(62,25)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	457.436.642,75	745.521.761,87	(288.085.119,12)	(38,64)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	51.834.750,00	172.231.062,50	(120.396.312,50)	(69,90)
22	Dinas Perhubungan	565.981.943,75	706.973.193,75	(140.991.250,00)	(19,94)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	270.627.187,50	358.699.375,00	(88.072.187,50)	(24,55)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	62.100.228,25	115.068.978,25	(52.968.750,00)	(46,03)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	211.823.616,23	273.007.541,27	(61.183.925,04)	(22,41)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	325.673.875,00	417.418.643,87	(91.744.768,87)	(21,98)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	219.128.875,00	327.915.750,00	(108.786.875,00)	(33,18)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.884.185.970,84	1.944.887.024,99	(60.701.054,15)	(3,12)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	880.475.942,00	1.167.093.442,00	(286.617.500,00)	(24,56)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	480.972.741,13	572.805.511,95	(91.832.770,82)	(16,03)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	673.085.575,00	722.877.695,83	(49.792.120,83)	(6,89)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	495.707.252,08	609.276.252,09	(113.569.000,01)	(18,64)
33	SKPKD		79.619.927,01	(79.619.927,01)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	409.026.556,25	567.668.710,87	(158.642.154,62)	(27,95)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.497.699.133,69	2.765.979.434,75	(268.280.301,06)	(9,70)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	615.871.039,16	589.139.135,00	26.731.904,16	4,54
37	Badan Kepegawaian Daerah	106.068.562,50	212.049.902,50	(105.981.340,00)	(49,98)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	125.478.750,00	233.887.562,50	(108.408.812,50)	(46,35)
39	Inspektorat	292.107.374,99	344.444.875,01	(52.337.500,02)	(15,19)
40	Sekretariat Daerah	3.205.639.602,71	3.654.692.334,99	(449.052.732,28)	(12,29)
41	Sekretariat DPRD	2.328.018.989,60	2.146.561.781,25	181.457.208,35	8,45
42	Badan Penghubung	455.357.468,75	728.800.968,75	(273.443.500,00)	(37,52)
	Jumlah	**39.098.696.778,87**	**38.940.671.345,04**	**158.025.433,83**	0,41

5.4.2.1.7.1.3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur **Rp29.861.409.396,22**

Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur terealisasi sebesar Rp29.861.409.396,22, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.107.427.427,19 mengalami **kenaikan** sebesar Rp753.981.969,03 atau 2,59% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.582.280.371,58	25.940.718.337,65	641.562.033,93	2,47
2	Dinas Kesehatan	380.458.513,36	359.217.680,00	21.240.833,36	5,91
3	RSUD Dr. Moewardi	146.931.825,00	176.368.958,34	(29.437.133,34)	(16,69)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	68.241.981,73	39.560.412,73	28.681.569,00	72,50
5	RSUD Tugurejo Semarang	17.389.721,54	20.011.389,66	(2.621.668,12)	(13,10)
6	RSUD Kelet Donorejo	89.060.020,42	85.960.833,33	3.099.187,09	3,61
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	6.560.000,00	6.910.000,00	(350.000,00)	(5,07)
8	RSJD Surakarta	107.607.661,34	102.650.911,33	4.956.750,01	4,83
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	157.116.607,50	156.673.094,16	443.513,34	0,28
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	107.893.152,18	22.916.416,73	84.976.735,45	370,81
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	219.787.900,40	215.993.500,40	3.794.400,00	1,76
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	101.419.675,08	43.144.139,96	58.275.535,12	135,07
13	Dinas Sosial	16.796.500,00	16.851.500,00	(55.000,00)	(0,33)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55.855.400,00	111.900.800,00	(56.045.400,00)	(50,08)
15	Dinas Ketahanan Pangan	5.091.583,34	500.000,00	4.591.583,34	918,32
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.723.733,33	10.159.500,00	2.564.233,33	25,24
17	Dinas Perhubungan	96.380.000,00	100.287.666,60	(3.907.666,60)	(3,90)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.643.400,00	519.200,00	1.124.200,00	216,53
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.200.951,09	-	2.200.951,09	-
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.015.833,34	4.530.000,00	10.485.833,34	231,48
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	263.436.135,50	263.552.935,50	(116.800,00)	(0,04)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	75.852.576,68	78.771.822,50	(2.919.245,82)	(3,71)
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	84.569.260,00	86.470.646,67	(1.901.386,67)	(2,20)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	72.759.773,33	80.412.440,00	(7.652.666,67)	(9,52)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	370.640.999,51	347.249.890,00	23.391.109,51	6,74
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	726.733.239,97	799.463.334,96	(72.730.094,99)	(9,10)
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	197.580,00	-	197.580,00	100,00
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	70.265.000,00	30.481.666,67	39.783.333,33	130,52
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.582.800,00	1.233.150,00	349.650,00	28,35
30	Sekretariat Daerah	4.422.200,00	4.422.200,00	-	-
31	Badan Penghubung	495.000,00	495.000,00	-	-
	Jumlah	**29.861.409.396,22**	**29.107.427.427,19**	**753.981.969,03**	2,59

5.4.2.1.7.1.4 Beban Penyusutan Alat Pertanian Rp4.339.532.862,82

Beban Penyusutan Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp4.339.532.862,82, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.463.333.157,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp123.800.294,18) atau (2,77%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.472.759.058,81	1.039.651.771,45	433.107.287,36	41,66
2	Dinas Kesehatan	2.900.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	100,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	4.393.000,00	3.550.812,50	842.187,50	23,72
4	RSUD Kelet Donorejo	178.750,00	178.750,00	-	-
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.811.768,75	-	2.811.768,75	100,00
6	RSJD Surakarta	449.531,25	-	449.531,25	100,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	720.515,00	720.515,00	-	-
8	Dinas Sosial	625.000,00	625.000,00	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.250.000,00	10.312.500,00	937.500,00	9,09
10	Dinas Ketahanan Pangan	10.822.916,67	251.161.017,50	(240.338.100,83)	(95,69)
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.433.333,34	103.110.000,00	(85.676.666,66)	(83,09)
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.687.208,33	103.864.625,00	(84.177.416,67)	(81,05)
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.517.000.889,00	1.643.614.086,34	(126.613.197,34)	(7,70)
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.276.313.391,67	1.302.906.579,21	(26.593.187,54)	(2,04)
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.187.500,00	2.187.500,00	-	-
	Jumlah	**4.339.532.862,82**	**4.463.333.157,00**	**(123.800.294,18)**	**(2,77)**

5.4.2.1.7.1.5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp142.105.801.670,60

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp142.105.801.670,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp132.720.666.950,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.385.134.719,73 atau 7,07% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96.482.562.804,05	89.658.512.688,80	6.824.050.115,25	7,61
2	Dinas Kesehatan	2.005.251.391,23	1.665.437.714,17	339.813.677,06	20,40
3	RSUD Dr. Moewardi	2.630.752.574,47	2.504.560.570,98	126.192.003,49	5,04
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	4.720.200.344,19	4.627.749.448,53	92.450.895,66	2,00
5	RSUD Tugurejo Semarang	2.720.434.983,96	1.313.247.434,63	1.407.187.549,33	107,15

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
6	RSUD Kelet Donorejo	661.249.201,99	715.138.790,47	(53.889.588,48)	(7,54)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.773.351.153,78	1.876.676.253,64	(103.325.099,86)	(5,51)
8	RSJD Surakarta	2.358.061.130,28	2.409.913.097,81	(51.851.967,53)	(2,15)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	710.177.067,56	868.119.969,86	(157.942.902,30)	(18,19)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.191.572.621,59	389.358.913,61	802.213.707,98	206,03
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	263.384.327,10	600.465.959,60	(337.081.632,50)	(56,14)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	160.563.253,34	148.719.066,65	11.844.186,69	7,96
13	Satuan Polisi Pamong Praja	138.164.400,00	163.514.400,00	(25.350.000,00)	(15,50)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	104.261.166,34	97.481.379,75	6.779.786,59	6,95
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	280.028.806,13	292.058.916,85	(12.030.110,72)	(4,12)
16	Dinas Sosial	1.806.717.415,36	1.797.697.927,34	9.019.488,02	0,50
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	683.037.365,64	693.670.341,19	(10.632.975,55)	(1,53)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	99.692.340,80	82.647.396,67	17.044.944,13	20,62
19	Dinas Ketahanan Pangan	143.272.263,55	82.543.915,30	60.728.348,25	73,57
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	930.510.059,23	847.327.219,86	83.182.839,37	9,82
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	162.544.136,00	160.686.707,34	1.857.428,66	1,16
22	Dinas Perhubungan	719.513.369,37	790.119.911,32	(70.606.541,95)	(8,94)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	558.411.523,89	501.680.254,42	56.731.269,47	11,31
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	798.502.056,85	655.536.781,39	142.965.275,46	21,81
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	216.895.193,33	233.307.460,00	(16.412.266,67)	(7,03)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.031.764.664,82	2.579.599.029,98	452.165.634,84	17,53
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	265.473.496,64	262.986.454,79	2.487.041,85	0,95
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	748.117.724,20	749.888.016,86	(1.770.292,66)	(0,24)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	521.721.044,67	671.026.948,80	(149.305.904,13)	(22,25)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	884.255.403,84	884.417.384,32	(161.980,48)	(0,02)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.085.541.875,76	1.248.829.417,29	(163.287.541,53)	(13,08)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	442.342.774,76	438.612.650,07	3.730.124,69	0,85
33	SKPKD		366.666,66	(366.666,66)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	552.970.203,02	557.211.257,78	(4.241.054,76)	(0,76)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.715.977.637,39	2.968.450.030,01	(252.472.392,62)	(8,51)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	698.531.086,22	779.433.560,01	(80.902.473,79)	(10,38)
37	Badan Kepegawaian Daerah	585.732.510,41	772.250.013,08	(186.517.502,67)	(24,15)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	806.481.064,55	739.592.080,06	66.888.984,49	9,04
39	Inspektorat	257.383.970,00	317.993.625,03	(60.609.655,03)	(19,06)
40	Sekretariat Daerah	3.280.253.939,97	3.463.145.823,42	(182.891.883,45)	(5,28)
41	Sekretariat DPRD	3.666.602.874,32	2.829.323.049,27	837.279.825,05	29,59
42	Badan Penghubung	243.540.450,00	281.368.423,26	(37.827.973,26)	(13,44)
	Jumlah	**142.105.801.670,60**	**132.720.666.950,87**	**9.385.134.719,73**	7,07

5.4.2.1.7.1.6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar **Rp20.307.195.627,03**

Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp20.307.195.627,03, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp18.178.798.977,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.128.396.649,65 atau 11,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.343.847.865,01	10.769.155.524,13	1.574.692.340,88	14,62
2	Dinas Kesehatan	527.660.115,86	342.932.425,17	184.727.690,69	53,87
3	RSUD Dr. Moewardi	181.392.675,00	135.742.399,98	45.650.275,02	33,63
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	674.606.292,12	712.705.757,99	(38.099.465,87)	(5,35)
5	RSUD Tugurejo Semarang	174.478.436,93	155.054.378,61	19.424.058,32	12,53
6	RSUD Kelet Donorejo	24.653.510,02	20.341.926,68	4.311.583,34	21,20
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	74.002.575,00	82.018.100,07	(8.015.525,07)	(9,77)
8	RSJD Surakarta	34.105.128,66	10.972.483,10	23.132.645,56	210,82
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	52.317.144,99	22.455.429,99	29.861.715,00	132,98
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	66.707.506,57	31.025.250,00	35.682.256,57	115,01
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	90.995.100,00	95.834.100,00	(4.839.000,00)	(5,05)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.656.783,33	33.613.400,00	(4.956.616,67)	(14,75)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	42.680.000,00	42.680.000,00	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66.712.166,67	58.390.000,00	8.322.166,67	14,25
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.432.300,00	69.738.450,04	19.693.849,96	28,24

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
16	Dinas Sosial	8.623.333,32	7.915.000,00	708.333,32	8,95
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	145.476.309,20	130.981.016,66	14.495.292,54	11,07
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.043.970,00	3.490.661,67	3.553.308,33	101,79
19	Dinas Ketahanan Pangan	38.629.739,67	26.062.400,00	12.567.339,67	48,22
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	145.588.101,66	141.229.293,33	4.358.808,33	3,09
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	65.944.440,00	86.331.240,00	(20.386.800,00)	(23,61)
22	Dinas Perhubungan	124.510.110,00	149.698.843,33	(25.188.733,33)	(16,83)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.802.464.019,01	1.383.155.256,62	419.308.762,39	30,32
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	124.919.299,99	96.300.266,65	28.619.033,34	29,72
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.015.035,00	67.483.926,67	(5.468.891,67)	(8,10)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	156.295.839,24	122.017.500,00	34.278.339,24	28,09
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	145.497.588,80	159.589.588,80	(14.092.000,00)	(8,83)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	181.534.012,80	184.626.578,54	(3.092.565,74)	(1,68)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	90.287.411,83	113.462.400,00	(23.174.988,17)	(20,43)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	59.092.291,67	44.055.550,00	15.036.741,67	34,13
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	217.665.976,56	310.759.160,00	(93.093.183,44)	(29,96)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	37.553.027,33	145.661.393,00	(108.108.365,67)	(74,22)
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.872.999,99	5.730.000,00	1.142.999,99	19,95
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	219.917.860,00	270.053.180,00	(50.135.320,00)	(18,56)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	127.634.300,00	127.782.800,00	(148.500,00)	(0,12)
37	Badan Kepegawaian Daerah	17.987.380,00	17.069.749,99	917.630,01	5,38
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	186.019.943,30	262.439.481,35	(76.419.538,05)	(29,12)
39	Inspektorat	60.770.000,00	94.805.625,00	(34.035.625,00)	(35,90)
40	Sekretariat Daerah	1.382.481.276,47	1.270.291.926,69	112.189.349,78	8,83
41	Sekretariat DPRD	408.512.516,63	354.728.733,32	53.783.783,31	15,16
42	Badan Penghubung	11.611.244,40	20.417.780,00	(8.806.535,60)	(43,13)
	Jumlah	**20.307.195.627,03**	**18.178.798.977,38**	**2.128.396.649,65**	**11,71**

5.4.2.1.7.1.7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp133.347.227.676,21

Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp133.347.227.676,21, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp138.565.896.014,38 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.218.668.338,17)atau (3,77%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.218.844.136,74	1.085.029.095,50	133.815.041,24	12,33
2	Dinas Kesehatan	6.844.176.288,22	4.933.998.419,44	1.910.177.868,78	38,71
3	RSUD Dr. Moewardi	40.773.774.954,69	36.674.548.988,54	4.099.225.966,15	11,18
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	33.987.530.306,71	43.390.580.443,61	(9.403.050.136,90)	(21,67)
5	RSUD Tugurejo Semarang	22.190.901.478,16	24.852.318.266,61	(2.661.416.788,45)	(10,71)
6	RSUD Kelet Donorejo	13.645.788.698,49	12.982.607.977,33	663.180.721,16	5,11
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	7.222.157.679,11	6.724.702.348,77	497.455.330,34	7,40
8	RSJD Surakarta	4.651.717.767,59	4.141.934.990,58	509.782.777,01	12,31
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2.354.880.557,81	3.512.523.920,00	(1.157.643.362,19)	(32,96)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	72.517,20	-	72.517,20	100,00
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	129.880.000,00	6.359.320,00	123.520.680,00	1.942,36
12	Dinas Sosial	47.989.833,34	56.647.166,70	(8.657.333,36)	(15,28)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.000,00	300.000,00	-	-
14	Dinas Perhubungan	479.166,67	-	479.166,67	100,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.175.000,00	1.175.000,00	-	-
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.020.000,00	4.020.000,00	-	-
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.655.500,00	965.708,34	689.791,66	71,43
18	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	164.964.466,68	103.883.533,34	61.080.933,34	58,80
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	500.000,00	500.000,00	-	-
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.931.272,53	8.393.333,35	(1.462.060,82)	(17,42)
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26.666,67	-	26.666,67	100,00
22	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	28.429.000,00	28.429.000,00	-	-
23	Badan Kepegawaian Daerah	33.239.185,60	33.239.185,60	-	-
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.218.200,00	7.667.650,00	5.550.550,00	72,39
25	Sekretariat Daerah	23.975.000,00	11.451.666,67	12.523.333,33	109,36
26	Sekretariat DPRD	600.000,00	4.620.000,00	(4.020.000,00)	(87,01)
	Jumlah	**133.347.227.676,21**	**138.565.896.014,38**	**(5.218.668.338,17)**	**(3,77)**

5.4.2.1.7.1.8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Rp48.034.020.693,61

Beban Penyusutan Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp48.034.020.693,61, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.057.917.543,77 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.976.103.149,84 atau 16.99% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.657.714.265,86	24.940.178.174,35	5.717.536.091,51	22,93
2	Dinas Kesehatan	4.073.004.014,47	3.276.519.681,64	796.484.332,83	24,31
3	RSUD Dr. Moewardi	1.821.086.492,33	1.622.284.488,25	198.802.004,08	12,25
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.597.837.192,42	1.131.470.897,63	466.366.294,79	41,22
5	RSUD Tugurejo Semarang	1.768.218.649,29	1.678.460.147,76	89.758.501,53	5,35
6	RSUD Kelet Donorejo	136.673.435,88	90.687.173,78	45.986.262,10	50,71
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	164.426.438,48	171.882.688,57	(7.456.250,09)	(4,34)
8	RSJD Surakarta	193.289.242,31	208.101.049,99	(14.811.807,68)	(7,12)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	285.894.914,41	264.914.746,95	20.980.167,46	7,92
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	670.895.979,73	504.380.041,69	166.515.938,04	33,01
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	238.070.657,30	254.527.987,26	(16.457.329,96)	(6,47)
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	24.909.594,39	2.726.945,84	22.182.648,55	813,46
13	Dinas Sosial	8.337.000,00	8.337.000,00	-	-
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	300.648.581,05	430.153.201,10	(129.504.620,05)	(30,11)
15	Dinas Ketahanan Pangan	81.192.053,54	75.005.444,67	6.186.608,87	8,25
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.033.918.405,61	1.195.281.772,18	(161.363.366,57)	(13,50)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.981.000,00	1.490.500,00	1.490.500,00	100,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.976.014,28	-	1.976.014,28	100,00
19	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	24.877.638,89	24.831.250,00	46.388,89	0,19
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	672.576.413,62	685.198.763,16	(12.622.349,54)	(1,84)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	36.347.750,00	315.596.351,87	(279.248.601,87)	(88,48)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.437.185.868,86	1.420.910.136,14	16.275.732,72	1,15
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	533.128.772,56	383.127.747,95	150.001.024,61	39,15
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.255.898.610,03	2.355.169.644,69	(99.271.034,66)	(4,22)
25	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.583.333,30	5.333.333,30	(3.750.000,00)	(70,31)
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.498.375,00	2.498.375,00	-	-
27	Inspektorat	8.850.000,00	8.850.000,00	-	-
	Jumlah	**48.034.020.693,61**	**41.057.917.543,77**	**6.976.103.149,84**	**16,99**

5.4.2.1.7.1.9 Beban Penyusutan Alat Persenjataan Rp330.294.513,16

Beban Penyusutan Alat Persenjataan terealisasi sebesar Rp330.294.513,16, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp319.345.645,51 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.948.867,65 atau 3,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	297.606.346,49	217.833.312,18	79.773.034,31	36,62
2	Satuan Polisi Pamong Praja	8.260.000,00	8.260.000,00	-	-
3	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.699.000,00	18.699.000,00	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	19.507.500,00	(19.507.500,00)	(100,00)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.729.166,67	520.833,33	5.208.333,34	1.000,00
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	43.900.000,00	(43.900.000,00)	(100,00)
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
8	Inspektorat	-	2.125.000,00	(2.125.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**330.294.513,16**	**319.345.645,51**	**10.948.867,65**	**3,43**

5.4.2.1.7.1.10 Beban Penyusutan Komputer Rp152.078.633.806,40

Beban Penyusutan Komputer terealisasi sebesar Rp152.078.633.806,40, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp156.895.167.961,73 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.816.534.155,33) atau (3,07%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	114.596.064.064,24	120.251.214.360,37	(5.655.150.296,13)	(4,70)
2	Dinas Kesehatan	1.217.342.602,33	909.689.588,63	307.653.013,70	33,82
3	RSUD Dr. Moewardi	1.707.295.213,55	1.804.015.041,70	(96.719.828,15)	(5,36)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	5.186.981.907,92	2.663.898.045,26	2.523.083.862,66	94,71
5	RSUD Tugurejo Semarang	606.834.571,34	339.776.295,27	267.058.276,07	78,60
6	RSUD Kelet Donorejo	167.209.944,61	318.756.488,69	(151.546.544,08)	(47,54)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	257.316.030,16	274.915.204,19	(17.599.174,03)	(6,40)
8	RSJD Surakarta	608.537.109,93	555.055.502,33	53.481.607,60	9,64
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	321.185.357,34	285.190.774,88	35.994.582,46	12,62
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	840.660.656,43	490.381.737,56	350.278.918,87	71,43
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	146.033.354,17	298.609.187,49	(152.575.833,32)	(51,10)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	142.153.594,85	134.949.083,33	7.204.511,52	5,34
13	Satuan Polisi Pamong Praja	72.741.492,50	95.098.992,50	(22.357.500,00)	(23,51)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	176.099.608,32	129.220.418,75	46.879.189,57	36,28
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	96.983.961,50	135.788.482,39	(38.804.520,89)	(28,58)
16	Dinas Sosial	609.457.464,39	668.801.138,79	(59.343.674,40)	(8,87)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	380.894.270,82	283.743.624,93	97.150.645,89	34,24
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72.625.862,49	50.682.695,87	21.943.166,62	43,30
19	Dinas Ketahanan Pangan	300.748.167,75	244.250.320,76	56.497.846,99	23,13
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	424.194.578,08	533.080.969,77	(108.886.391,69)	(20,43)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	154.762.875,00	225.074.500,00	(70.311.625,00)	(31,24)
22	Dinas Perhubungan	112.697.458,17	171.943.987,33	(59.246.529,16)	(34,46)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.045.306.367,16	12.579.463.075,87	(534.156.708,71)	(4,25)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	195.120.997,49	211.919.789,19	(16.798.791,70)	(7,93)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	130.179.625,00	206.446.211,73	(76.266.586,73)	(36,94)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	319.114.611,34	481.142.723,33	(162.028.111,99)	(33,68)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	186.725.284,17	300.530.412,57	(113.805.128,40)	(37,87)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	220.125.034,59	300.865.232,94	(80.740.198,35)	(26,84)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	219.559.072,92	271.723.108,33	(52.164.035,41)	(19,20)
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	350.259.475,08	326.588.143,75	23.671.331,33	7,25
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	564.168.795,85	705.246.655,00	(141.077.859,15)	(20,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	305.950.694,02	292.952.754,18	12.997.939,84	4,44
33	SKPKD	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	368.967.456,34	298.323.936,84	70.643.519,50	23,68
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.924.899.024,66	5.105.346.747,17	(1.180.447.722,51)	(23,12)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	848.007.979,18	962.488.895,81	(114.480.916,63)	(11,89)
37	Badan Kepegawaian Daerah	471.286.805,47	554.219.253,39	(82.932.447,92)	(14,96)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	227.824.850,03	238.258.220,83	(10.433.370,80)	(4,38)
39	Inspektorat	154.961.240,84	142.617.499,99	12.343.740,85	8,66
40	Sekretariat Daerah	1.936.024.321,79	2.106.253.751,72	(170.229.429,93)	(8,08)
41	Sekretariat DPRD	1.377.338.874,58	899.365.499,97	477.973.374,61	53,15
42	Badan Penghubung	33.993.150,00	47.279.608,33	(13.286.458,33)	(28,10)
	Jumlah	**152.078.633.806,40**	**156.895.167.961,73**	**(4.816.534.155,33)**	(3,07)

5.4.2.1.7.1.11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Rp63.552.202,20

Beban Penyusutan Alat Eksplorasi terealisasi sebesar Rp63.552.202,20, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.914.408,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.637.793,33 atau 27,32% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	59.298.202,20	45.810.408,87	13.487.793,33	29,44
2	Dinas Kesehatan	180.000,00	30.000,00	150.000,00	500,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.074.000,00	4.074.000,00	-	-
	Jumlah	**63.552.202,20**	**49.914.408,87**	**13.637.793,33**	**27,32**

5.4.2.1.7.1.12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran Rp15.697.129,80

Beban Penyusutan Alat Pengeboran terealisasi sebesar Rp15.697.129,80, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.917.345,78 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.779.784,02 atau 12,79% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.697.129,80	13.917.345,78	1.779.784,02	12,79
	Jumlah	**15.697.129,80**	**13.917.345,78**	**1.779.784,02**	**12,79**

5.4.2.1.7.1.13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp57.692.288,34

Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian terealisasi sebesar Rp57.692.288,34, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.196.177,19 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.496.111,15 atau 12,69% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.854.968,34	43.358.857,19	6.496.111,15	14,98
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.837.320,00	7.837.320,00	-	-
	Jumlah	**57.692.288,34**	**51.196.177,19**	**6.496.111,15**	**12,69**

5.4.2.1.7.1.14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi Rp2.118.000,00

Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi terealisasi sebesar Rp2.118.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.118.000,00 **tidak mengalami kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
	Jumlah	**2.118.000,00**	**2.118.000,00**	**-**	**-**

5.4.2.1.7.1.15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja Rp547.218.718,08

Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp547.218.718,08, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp551.837.009,80 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.618.291,72) atau (0,84%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	427.154.235,68	526.744.493,12	(99.590.257,44)	(18,91)
2	Dinas Kesehatan	14.947.916,66	3.322.916,67	11.624.999,99	349,84
3	RSJD Surakarta	9.715.200,00	9.715.200,00	-	-
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	31.206.250,00	-	31.206.250,00	100,00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.139.400,00	3.139.400,00	-	-
6	Dinas Ketahanan Pangan	7.370.000,00	2.456.666,68	4.913.333,32	200,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	399.000,00	-	399.000,00	100,00
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.255.549,09	-	3.255.549,09	100,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.072.916,65	-	2.072.916,65	100,00
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	833.250,00	-	833.250,00	100,00
11	SKPKD		5.625.000,00	(5.625.000,00)	(100,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.000.000,00	833.333,33	9.166.666,67	1.100,00

13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	37.125.000,00	-	37.125.000,00	100,00
	Jumlah	**547.218.718,08**	**551.837.009,80**	**(4.618.291,72)**	**(0,84)**

5.4.2.1.7.1.16 Beban Penyusutan Alat Peraga Rp11.088.723.240,24

Beban Penyusutan Alat Peraga terealisasi sebesar Rp11.088.723.240,24, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.736.020.799,52 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.352.702.440,72 atau 13,89% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.915.581.413,68	9.707.260.479,76	1.208.320.933,92	12,45
2	Dinas Kesehatan	1.805.595,83	-	1.805.595,83	100,00
3	RSUD Dr. Moewardi	133.587.769,20	21.123.980,76	112.463.788,44	532,40
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	23.550.588,20	1.962.549,02	21.588.039,18	1.100,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.666.400,00	2.666.400,00	-	-
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.982.500,00	1.663.749,96	8.318.750,04	500,00
7	Dinas Sosial	193.333,33	175.000,00	18.333,33	10,48
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.355.640,00	1.168.640,02	186.999,98	16,00
	Jumlah	**11.088.723.240,24**	**9.736.020.799,52**	**1.352.702.440,72**	**13,89**

5.4.2.1.7.1.17 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi Rp316.399.530,98

Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi terealisasi sebesar Rp316.399.530,98, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp243.971.052,57 mengalami **kenaikan** sebesar Rp72.428.478,41 atau 29,69% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	262.394.989,29	196.222.865,07	66.172.124,22	33,72
2	Dinas Kesehatan	2.812.500,00	1.171.875,00	1.640.625,00	140,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	11.875.000,00	11.875.000,00	-	-
4	RSUD Tugurejo Semarang	8.209.791,67	8.125.000,00	84.791,67	1,04
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	11.625.000,00	11.625.000,00	-	-
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.420.000,02	-	1.420.000,02	100,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.618.500,00	5.618.500,00	-	-
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.443.750,00	9.332.812,50	3.110.937,50	33,33
	Jumlah	**316.399.530,98**	**243.971.052,57**	**72.428.478,41**	**29,69**

5.4.2.1.7.1.18 Beban Penyusutan Rambu-Rambu Rp1.979.449.301,31

Beban Penyusutan Rambu-Rambu terealisasi sebesar Rp1.979.449.301,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.266.603.204,87 mengalami **penurunan** sebesar (Rp287.153.903,56) atau (12,67%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	30.604.547,90	24.781.547,87	5.823.000,03	23,50
2	Dinas Perhubungan	1.935.125.378,41	2.228.254.365,33	(293.128.986,92)	(13,16)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.092.125,00	6.992.125,00	100.000,00	1,43
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.375.000,00	1.322.916,67	52.083,33	3,94
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	838.500,00	838.500,00	-	-
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.413.750,00	4.413.750,00	-	-
	Jumlah	**1.979.449.301,31**	**2.266.603.204,87**	**(287.153.903,56)**	**(12,67)**

5.4.2.1.7.1.19 Beban Penyusutan Alat Olahraga Rp8.127.256.710,29

Beban Penyusutan Alat Olahraga terealisasi sebesar Rp8.127.256.710,29, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.128.656.451,23 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.998.600.259,06 atau 281,80% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.592.796.532,42	1.306.533.685,54	286.262.846,88	21,91
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	3.969.900,00	3.969.900,00	-	-
3	RSUD Tugurejo Semarang	250.000,00	250.000,00	-	-
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	21.725.000,00	21.725.000,00	-	-
5	RSJD Surakarta	14.479,17	-	14.479,17	100,00
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	5.775.000,00	1.237.500,00	4.537.500,00	366,67
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.525.000,00	2.525.000,00	-	-
8	Satuan Polisi Pamong Praja	6.887.500,00	6.887.500,00	-	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.250.000,00	1.145.833,33	104.166,67	9,09
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	22.431.250,00	22.248.958,33	182.291,67	0,82
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.389.330.027,87	583.456.469,86	5.805.873.558,01	995,08
12	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	74.440.500,00	173.688.000,00	(99.247.500,00)	(57,14)
13	Badan Kepegawaian Daerah	2.915.687,50	2.915.687,50	-	-
14	Sekretariat Daerah	2.487.500,00	2.072.916,67	414.583,33	20,00
15	Sekretariat DPRD	458.333,33	-	458.333,33	100,00
	Jumlah	**8.127.256.710,29**	**2.128.656.451,23**	**5.998.600.259,06**	**281,80**

5.4.2.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp167.226.415.830,74

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp167.226.415.830,74, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp156.613.203.540,10 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.613.212.290,64 atau 6,78% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	163.828.900.586,42	153.727.169.723,56	10.101.730.862,86	6,57
2	Beban Penyusutan Monumen	625.807.985,06	565.592.833,45	60.215.151,61	10,65
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	105.475.803,10	119.529.238,95	(14.053.435,85)	(11,76)
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.666.231.456,16	2.200.911.744,14	465.319.712,02	21,14
	Jumlah	**167.226.415.830,74**	**156.613.203.540,10**	10.613.212.290,64	6,78

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp167.226.415.830,74 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**2.269.311.205.958,22**
Penambahan		
➢ Mutasi Keluar	11.288.491.456,27	
➢ Reklas Ke Aset tetap	714.204.774,40	
➢ Reklas ke Aset Lainnya	21.713.615.654,08	
➢ Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	67.950.600,00	
➢ Koreksi	54.935.468.085,79	
Total Penambahan		**88.719.730.570,54**
➢ Hibah	507.704.536,67	
➢ Mutasi Masuk	11.288.491.456,27	
➢ Reklas Dari Aset Tetap	534.164.432,03	
➢ Reklas Dari Aset Lainnya	855.466.971,33	
➢ Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	17.839.710,62	
➢ Koreksi	32.337.004.067,06	
Total Pengurangan		**45.540.671.173,98**
Saldo Akumulasi Penyusutan Awal		**2.145.263.849.524,04**
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		**167.226.415.830,74**

5.4.2.1.7.2.1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Rp163.828.900.586,42

Beban Penyusutan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp163.828.900.586,42, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp153.727.169.723,56 mengalami **kenaikan** sebesar Rp10.101.730.862,86

atau 6,57% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.473.732.147,40	89.157.949.346,06	4.315.782.801,34	4,84
2	Dinas Kesehatan	2.081.162.823,82	2.043.680.410,25	37.482.413,57	1,83
3	RSUD Dr. Moewardi	6.901.078.012,70	6.455.258.094,87	445.819.917,83	6,91
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	5.751.205.827,65	5.526.990.506,86	224.215.320,79	4,06
5	RSUD Tugurejo Semarang	3.207.278.847,51	2.753.058.034,99	454.220.812,52	16,50
6	RSUD Kelet Donorejo	1.779.867.635,15	1.784.968.188,13	(5.100.552,98)	(0,29)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.588.717.938,34	1.589.802.901,51	(1.084.963,17)	(0,07)
8	RSJD Surakarta	880.811.299,61	807.042.698,13	73.768.601,48	9,14
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	887.914.096,48	872.490.268,39	15.423.828,09	1,77
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.846.710.132,42	722.940.247,42	2.123.769.885,00	293,77
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	480.260.569,90	480.260.569,92	(0,02)	(0,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	211.829.916,37	211.829.916,37	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	372.089.301,77	372.089.301,77	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	122.808.955,24	119.741.013,03	3.067.942,21	2,56
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	171.552.006,98	172.776.010,38	(1.224.003,40)	(0,71)
16	Dinas Sosial	3.841.680.147,22	3.839.174.148,61	2.505.998,61	0,07
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.200.939.634,83	1.187.213.136,15	13.726.498,68	1,16
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	392.407.786,39	392.634.428,62	(226.642,23)	(0,06)
19	Dinas Ketahanan Pangan	263.618.138,49	262.484.215,57	1.133.922,92	0,43
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.817.536.037,75	901.240.057,73	916.295.980,02	101,67
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	212.647.110,70	212.647.110,70	-	-
22	Dinas Perhubungan	2.719.399.545,53	2.404.566.362,86	314.833.182,67	13,09
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	134.819.784,08	163.603.696,84	(28.783.912,76)	(17,59)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.200.063.124,58	991.528.920,93	208.534.203,65	21,03
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	209.203.093,86	208.770.640,12	432.453,74	0,21
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	5.704.026.038,67	4.780.492.813,78	923.533.224,89	19,32
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	473.305.295,53	475.922.795,59	(2.617.500,06)	(0,55)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.052.135.260,11	1.922.024.229,25	130.111.030,86	6,77
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	2.801.968.266,75	2.769.066.967,83	32.901.298,92	1,19
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.161.470.284,80	2.150.052.634,81	11.417.649,99	0,53
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	948.349.533,90	917.478.939,80	30.870.594,10	3,36
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.693.280.693,55	1.675.834.957,84	17.445.735,71	1,04
33	SKPKD		3.699.946.778,18	(3.699.946.778,18)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	579.090.948,75	564.254.279,54	14.836.669,21	2,63
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.902.026.749,20	4.919.402.127,47	(17.375.378,27)	(0,35)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.080.838.837,38	1.528.509.237,77	3.552.329.599,61	232,40
37	Badan Kepegawaian Daerah	182.215.941,24	180.438.013,55	1.777.927,69	0,99
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.042.471.977,52	1.053.087.644,20	(10.615.666,68)	(1,01)
39	Inspektorat	347.780.199,08	347.780.199,07	0,01	0,00
40	Sekretariat Daerah	2.043.654.392,88	2.065.416.137,87	(21.761.744,99)	(1,05)
41	Sekretariat DPRD	699.639.915,80	697.503.602,19	2.136.313,61	0,31
42	Badan Penghubung	367.312.336,49	345.218.138,61	22.094.197,88	6,40
	Jumlah	**163.828.900.586,42**	**153.727.169.723,56**	**10.101.730.862,86**	**6,57**

5.4.2.1.7.2.2 Beban Penyusutan Monumen Rp625.807.985,06

Beban Penyusutan Monumen terealisasi sebesar Rp625.807.985,06, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp565.592.833,45 mengalami **kenaikan** sebesar Rp60.215.151,61 atau 10,65% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	267.491.457,91	256.423.693,47	11.067.764,44	4,32
2	Dinas Kesehatan	2.883.240,00	2.883.240,00	-	-
3	RSUD Kelet Donorejo	5.318.220,00	5.318.220,00	-	-
4	RSJD Surakarta	16.281.052,00	16.281.052,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	30.000,00	30.000,00	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.720.180,00	5.720.180,00	-	-
7	Dinas Sosial	652.380,00	652.380,00	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.279.702,80	2.923.308,57	1.356.394,23	46,40

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.464.324,31	13.470.110,37	(7.005.786,06)	(52,01)
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	76.982.516,40	76.982.516,40	-	-
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	156.000,00	156.000,00	-	-
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
13	Sekretariat DPRD	181.495.058,84	126.698.279,84	54.796.779,00	43,25
14	Badan Penghubung	41.115.152,80	41.115.152,80	-	-
	Jumlah	**625.807.985,06**	**565.592.833,45**	**60.215.151,61**	**10,65**

5.4.2.1.7.2.3 Beban Penyusutan Bangunan Menara Rp105.475.803,10

Beban Penyusutan Bangunan Menara terealisasi sebesar Rp105.475.803,10, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp119.529.238,95 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.053.435,85) atau (11,76%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.295.025,00	31.018.065,84	(12.723.040,84)	(41,02)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	272.965,00	(272.965,00)	(100,00)
3	Dinas Perhubungan	10.707.156,30	10.707.156,30	-	-
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	1.057.430,00	(1.057.430,00)	(100,00)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.022.606,30	6.022.606,30	-	-
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	69.737.615,50	69.737.615,51	(0,01)	(0,00)
7	SKPKD		23.400,00	(23.400,00)	(100,00)
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	690.000,00	690.000,00	-	-
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.400,00	-	23.400,00	100,00
	Jumlah	**105.475.803,10**	**119.529.238,95**	**(14.053.435,85)**	**(11,76)**

5.4.2.1.7.2.4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.666.231.456,16

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp2.666.231.456,16, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.200.911.744,14 mengalami **kenaikan** sebesar Rp465.319.712,02 atau 21,14% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.312.643.775,29	926.400.772,50	386.243.002,79	41,69
2	Dinas Kesehatan	98.604.321,96	99.413.320,80	(808.998,84)	(0,81)
3	RSUD Dr. Moewardi	14.199.620,00	14.199.620,00	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	10.164.000,00	10.164.000,00	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	8.472.265,38	8.472.265,38	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	88.221.918,00	88.221.918,00	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.517.160,00	3.517.160,00	-	-
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	30.102.737,72	25.194.571,05	4.908.166,67	19,48
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.304.806,67	-	1.304.806,67	100,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.790.160,00	2.790.160,00	-	-
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.633.000,00	2.083.000,00	550.000,00	26,40
12	Dinas Sosial	53.333.006,93	47.245.842,35	6.087.164,58	12,88
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.113.887,33	10.889.341,00	224.546,33	2,06
14	Dinas Ketahanan Pangan	7.341.200,00	7.341.200,00	-	-
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35.075.495,00	13.589.955,00	21.485.540,00	158,10
16	Dinas Perhubungan	20.610.960,34	11.168.491,11	9.442.469,23	84,55
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.322.490,95	-	1.322.490,95	100,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.175.620,00	1.800.120,00	375.500,00	20,86
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.200.400,00	2.200.400,00	-	-
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	75.117.724,95	34.898.134,89	40.219.590,06	115,25
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.131.735,67	7.131.735,66	0,01	0,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	108.808.360,81	107.683.666,94	1.124.693,87	1,04
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	252.745.295,43	252.745.295,43	-	-
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.531.884,41	89.260.108,38	271.776,03	0,30
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.547.635,00	8.873.310,00	674.325,00	7,60
26	SKPKD		34.294.374,33	(34.294.374,33)	(100,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.884.400,00	1.884.400,00	-	-
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	35.814.650,64	35.814.650,64	-	-
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	335.342.836,68	309.153.823,68	26.189.013,00	8,47
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	36.738.211,00	36.738.211,00	-	-

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
31	Inspektorat	286.200,00	286.200,00	-	-
32	Sekretariat DPRD	7.455.696,00	7.455.696,00	-	-
	Jumlah	**2.666.231.456,16**	**2.200.911.744,14**	**465.319.712,02**	**21,14**

5.4.2.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp509.406.449.527,18

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan terealisasi sebesar Rp509.406.449.527,18, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp557.487.644.088,46 mengalami **penurunan** sebesar (Rp48.081.194.561,28) atau (8,62%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jalan dan Jembatan	451.952.821.355,41	503.713.161.867,75	(51.760.340.512,34)	(10,28)
2	Bangunan Air	46.953.469.719,73	46.418.284.346,61	535.185.373,12	1,15
3	Instalasi	5.503.721.473,24	4.583.420.823,02	920.300.650,22	20,08
4	Jaringan	4.996.436.978,80	2.772.777.051,08	2.223.659.927,72	80,20
	Jumlah	**509.406.449.527,18**	**557.487.644.088,46**	**(48.081.194.561,28)**	**(8,62)**

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp509.406.449.527,18 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**8.041.836.432.320,21**
Penambahan		
➢ Mutasi Keluar	194.275.532,08	
➢ Reklas Ke Aset tetap	1.833.422.423,20	
➢ Reklas ke Aset Lainnya	715.235.229,17	
➢ Koreksi	1.344.955.596,11	
Total Penambahan		**4.087.888.780,56**
➢ Mutasi Masuk	194.275.532,08	
➢ Reklas Dari Aset Tetap	1.830.282.823,30	
➢ Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	0,82	
➢ Koreksi	36.500.000,00	
Total Pengurangan		**2.061.058.356,20**
Saldo Akumulasi Penyusutan Awal		**7.534.456.813.217,39**
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		**509.406.449.527,18**

5.4.2.1.7.3.1 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Rp451.952.821.355,41

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp451.952.821.355,41, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp503.713.161.867,75 mengalami **penurunan** sebesar (Rp51.760.340.512,34) atau (10,28%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.103.983.174,82	1.116.326.532,07	(12.343.357,25)	(1,11)
2	RSUD Dr. Moewardi	19.049.020,00	19.049.020,00	-	-
3	RSUD Tugurejo Semarang	1.440.363,16	1.440.363,16	-	-
4	RSUD Kelet Donorejo	253.099.050,00	266.973.750,00	(13.874.700,00)	(5,20)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	176.583.700,00	262.356.100,00	(85.772.400,00)	(32,69)
6	RSJD Surakarta	204.009.371,75	192.536.550,00	11.472.821,75	5,96
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	9.699.700,00	(9.699.700,00)	(100,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	444.498.872.651,44	497.352.837.863,64	(52.853.965.212,20)	(10,63)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.312.527.067,25	659.418.339,89	653.108.727,36	99,04
10	Dinas Perhubungan	1.845.891.096,72	1.551.378.861,58	294.512.235,14	18,98
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	224.933.285,60	91.177.781,80	133.755.503,80	146,70
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.567.495.765,55	1.444.140.913,94	123.354.851,61	8,54
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan	392.342.100,00	392.342.100,00	-	-

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	328.440.767,46	329.343.625,00	(902.857,54)	(0,27)
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	24.137.350,00	24.137.350,00	-	-
16	Sekretariat Daerah	16.591,66	3.016,67	13.574,99	450,00
	Jumlah	**451.952.821.355,41**	**503.713.161.867,75**	**(51.760.340.512,34)**	**(10,28)**

5.4.2.1.7.3.2 Beban Penyusutan Bangunan Air **Rp46.953.469.719,73**

Beban Penyusutan Bangunan Air terealisasi sebesar Rp46.953.469.719,73, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp46.418.284.346,61 mengalami **kenaikan** sebesar Rp535.185.373,12 atau 1,15% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	527.064.585,51	458.790.253,91	68.274.331,60	14,88
2	Dinas Kesehatan	18.154.956,66	18.154.956,67	(0,01)	(0,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	61.842.264,94	51.772.871,09	10.069.393,85	19,45
4	RSUD Tugurejo Semarang	37.929.908,16	31.968.177,97	5.961.730,19	18,65
5	RSUD Kelet Donorejo	107.188.106,65	107.188.106,66	(0,01)	(0,00)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.284.300,00	3.284.300,00	-	-
7	RSJD Surakarta	3.190.525,00	3.190.525,00	-	-
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	35.432.272,50	35.432.170,83	101,67	0,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.045.204.875,44	2.920.971.094,99	124.233.780,45	4,25
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	37.438.785.017,24	37.679.258.846,90	(240.473.829,66)	(0,64)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	5.306.666,67	5.306.666,67	-	-
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-
13	Dinas Sosial	75.947.083,56	74.031.416,91	1.915.666,65	2,59
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	143.920,00	143.920,00	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan	2.145.500,00	2.145.500,00	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	263.173.466,48	263.173.466,48	-	-
17	Dinas Perhubungan	371.196.643,80	371.196.643,79	0,01	0,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.227.838,33	5.143.255,00	84.583,33	1,64
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.859.800,00	2.859.800,00	-	-
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	86.205.004,08	40.397.289,16	45.807.714,92	113,39
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.831.451,61	5.831.451,62	(0,01)	(0,00)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.593.093.593,21	3.139.943.269,34	453.150.323,87	14,43
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	422.784.574,12	405.655.401,76	17.129.172,36	4,22
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	67.811.593,29	60.480.144,26	7.331.449,03	12,12
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	703.246.655,81	661.461.117,58	41.785.538,23	6,32
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.141.666,67	6.141.666,67	-	-
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	169.166,67	253.750,00	(84.583,33)	(33,33)
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.331.725,00	2.331.725,00	-	-
29	Sekretariat DPRD	59.551.558,33	59.551.558,35	(0,02)	(0,00)
	Jumlah	**46.953.469.719,73**	**46.418.284.346,61**	**535.185.373,12**	**1,15**

5.4.2.1.7.3.3 Beban Penyusutan Instalasi **Rp5.503.721.473,24**

Beban Penyusutan Instalasi terealisasi sebesar Rp5.503.721.473,24, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.583.420.823,02 mengalami **kenaikan** sebesar Rp920.300.650,22 atau 20,08% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	505.163.848,43	492.350.169,01	12.813.679,42	2,60
2	Dinas Kesehatan	126.338.098,26	126.338.098,27	(0,01)	(0,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	1.384.478.964,54	598.968.464,61	785.510.499,93	131,14
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	383.438.465,19	384.038.465,22	(600.000,03)	(0,16)
5	RSUD Tugurejo Semarang	656.588.670,61	656.588.670,58	0,03	0,00
6	RSUD Kelet Donorejo	118.913.222,44	116.563.573,13	2.349.649,31	2,02
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	403.282.333,33	386.834.277,79	16.448.055,54	4,25
8	RSJD Surakarta	209.977.075,14	133.927.559,08	76.049.516,06	56,78
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	148.464.859,63	133.012.233,23	15.452.626,40	11,62
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.531.105,50	3.438.853,00	6.092.252,50	177,16
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	16.888.745,82	16.888.745,80	0,02	0,00
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.206.527,78	2.895.666,67	(1.689.138,89)	(58,33)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.285.825,00	2.285.825,00	-	-
14	Dinas Sosial	333.333,34	333.333,33	0,01	0,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	22.735.911,67	22.513.689,43	222.222,24	0,99
16	Dinas Ketahanan Pangan	863.333,33	863.333,34	(0,01)	(0,00)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.762.890,34	37.213.481,98	16.549.408,36	44,47
18	Dinas Perhubungan	445.541.306,65	449.420.989,84	(3.879.683,19)	(0,86)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.622.707,29	9.593.216,66	3.029.490,63	31,58
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	280.548,42	-	280.548,42	100,00
21	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	7.515.148,50	7.515.148,50	-	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.428.537,18	58.100.611,15	1.327.926,03	2,29
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.986.327,15	9.527.993,80	458.333,35	4,81
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	108.027.597,16	108.974.596,45	(946.999,29)	(0,87)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	677.819.620,03	694.022.145,80	(16.202.525,77)	(2,33)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.847.692,50	1.847.692,50	-	-
27	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.890.623,02	20.967.705,63	(3.077.082,61)	(14,68)
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.398.339,87	6.398.339,86	0,01	0,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.477.508,41	11.758.056,82	(280.548,41)	(2,39)
30	Badan Kepegawaian Daerah	15.392.808,33	19.999.950,00	(4.607.141,67)	(23,04)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	19.056.888,75	19.056.888,75	-	-
32	Sekretariat Daerah	48.790.250,18	50.041.510,84	(1.251.260,66)	(2,50)
33	Sekretariat DPRD	16.250.822,50	-	16.250.822,50	100,00
34	Badan Penghubung	1.141.536,95	1.141.536,95	-	-
	Jumlah	**5.503.721.473,24**	**4.583.420.823,02**	**920.300.650,22**	**20,08**

5.4.2.1.7.3.4 Beban Penyusutan Jaringan Rp4.996.436.978,80

Beban Penyusutan Jaringan terealisasi sebesar Rp4.996.436.978,80, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.772.777.051,08 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.223.659.927,72 atau 80,20% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	568.261.943,78	560.677.177,23	7.584.766,55	1,35
2	Dinas Kesehatan	29.722.901,33	29.722.901,35	(0,02)	(0,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	13.322.081,02	8.575.544,94	4.746.536,08	55,35
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	124.563.468,51	124.563.468,51	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	57.250.120,21	57.250.120,21	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	45.037.275,50	41.737.275,50	3.300.000,00	7,91
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.407.299.131,64	195.023.214,51	2.212.275.917,13	1.134,37
16	Dinas Sosial	1.160.194,45	2.761.133,33	(1.600.938,88)	(57,98)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.110.753,34	3.110.753,33	0,01	0,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	2.476.053,33	2.476.053,34	(0,01)	(0,00)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	46.655.160,84	46.655.160,84	-	-
22	Dinas Perhubungan	772.991.858,08	774.598.476,97	(1.606.618,89)	(0,21)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.849.585,00	2.849.585,00	-	-
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.621,82	143.621,83	(0,01)	(0,00)
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.352.535,83	15.352.535,82	0,01	0,00
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	417.500,00	417.500,00	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	21.517.412,08	21.434.099,55	83.312,53	0,39
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	31.167.708,36	31.167.708,30	0,06	0,00
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	35.232.239,88	36.012.951,66	(780.711,78)	(2,17)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	770.218.682,06	785.640.504,61	(15.421.822,55)	(1,96)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.576.417,49	6.413.917,50	162.499,99	2,53
33	SKPKD		4.496.778,00	(4.496.778,00)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	31.592.881,25	16.675.893,75	14.916.987,50	89,45
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.496.778,00	-	4.496.778,00	100,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.020.675,00	5.020.675,00	-	-
	Jumlah	**4.996.436.978,80**	**2.772.777.051,08**	**2.223.659.927,72**	**80,20**

5.4.2.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp506.233.702,66

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp506.233.702,66, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp462.120.223,48 mengalami **kenaikan** sebesar Rp44.113.479,18 atau 9,55% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	506.233.702,66	462.120.223,48	44.113.479,18	9,55
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
	Jumlah	**506.233.702,66**	**462.120.223,48**	**44.113.479,18**	**9,55**

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp506.233.702,66 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		:	2.482.501.235,63
Total Penambahan	0,00	:	
Total Pengurangan	0,00	:	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		:	1.976.267.532,97
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya - LO		**:**	**506.233.702,66**

5.4.2.1.7.4.1 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga — Rp506.233.702,66

Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga terealisasi sebesar Rp506.233.702,66, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp462.120.223,48 mengalami **kenaikan** sebesar Rp44.113.479,18 atau 9,55% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	382.057.002,66	337.349.523,48	44.707.479,18	13,25
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.600.000,00	4.194.000,00	(594.000,00)	(14,16)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	100.043.900,00	100.043.900,00	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.432.800,00	15.432.800,00	-	-
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-
	Jumlah	**506.233.702,66**	**462.120.223,48**	**44.113.479,18**	**9,55**

5.4.2.1.7.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya — Rp2.212.005.786,00

Beban Penyusutan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp2.212.005.786,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.322.666.519,40 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.110.660.733,40) atau (33,43%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	2.212.005.786,00	3.317.563.769,27	(1.105.557.983,27)	(33,32)
2	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	5.102.750,13	(5.102.750,13)	(100,00)
3	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Pinjam Pakai	-	-	-	-
6	Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	-	-	-	-
	Jumlah	**2.212.005.786,00**	**3.322.666.519,40**	**(1.110.660.733,40)**	(33,43)

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp2.212.005.786,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan **449.707.390.265,16**

Penambahan

- Reklas Ke Aset tetap 2.223.363.231,00
- Reklas Pemanfaatan 15.091.769.517,58
- Penjualan 1.275.950.219,07

➢ Ganti Rugi	17.872.250,00	
➢ Hibah dan Lain-Lain	4.172.585.517,66	
➢ Koreksi	1.900.619.664,96	
Total Penambahan		**24.682.160.400,27**
Pengurangan		
➢ Reklas Dari Aset Tetap	99.775.224.048,16	
➢ Reklas Dari Aset Lainnya	15.091.769.517,58	
➢ Reklas Dari ATB	1.126.155.732,34	
Total Pengurangan		**115.993.149.298,08**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**356.184.395.581,35**
Beban Daerah		**2.212.005.786,00**

5.4.2.1.7.5.1 Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa Rp2.212.005.786,00

Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa terealisasi sebesar Rp2.212.005.786,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.317.563.769,27 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.105.557.983,27) atau (33,32%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	15.433.370,32	8.406.843,36	7.026.526,96	83,58
2	Dinas Kesehatan	996.018.508,88	995.808.508,87	210.000,01	0,02
3	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	-	-	-
6	RSUD Kelet Donorejo	-	-	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-
8	RSJD Surakarta	-	-	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	-	-	-
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	664.794.687,52	2.074.663.927,32	(1.409.869.239,80)	(67,96)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	11.999.560,00	11.999.560,00	-	-
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	-	-	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-
16	Dinas Sosial	135.000,00	-	135.000,00	100,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-
19	Dinas Ketahanan Pangan	354.077,09	-	354.077,09	100,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	-
22	Dinas Perhubungan	-	-	-	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	153.742.179,68	-	153.742.179,68	100,00
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.706.334,34	12.326.944,53	(620.610,19)	(5,03)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-		-	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.571.667,60	4.285.833,80	4.285.833,80	100,00
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.960.031,81	60.352.872,07	(19.392.840,26)	(32,13)
33	SKPKD	-	143.505.164,88	(143.505.164,88)	(100,00)
34	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.288.437,36	4.288.437,36	0,00	0,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.197.500,00	1.925.677,08	(728.177,08)	(37,81)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	302.281.514,75	-	302.281.514,75	100,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	-
39	Inspektorat	-	-	-	-
40	Sekretariat Daerah	-	-	-	-
41	Sekretariat DPRD	-	-	-	-
42	Badan Penghubung	522.916,65	-	522.916,65	100,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Jumlah	**2.212.005.786,00**	**3.317.563.769,27**	**(1.105.557.983,27)**	**(33,32)**

5.4.2.1.7.5.2 Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan Rp0,00

Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.102.750,13 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.102.750,13) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	4.465.833,33	(4.465.833,33)	(100,00)
2	SKPKD	-	636.916,80	(636.916,80)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**5.102.750,13**	**(5.102.750,13)**	**(100,00)**

5.4.2.1.7.6 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Rp3.614.182.721,92

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud terealisasi sebesar Rp3.614.182.721,92, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.553.804.436,60 mengalami **kenaikan** sebesar Rp60.378.285,32 atau 1,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	37.296.000,00	25.641.066,66	11.654.933,34	45,45
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	3.504.242.365,92	3.393.732.469,93	110.509.895,99	3,26
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	70.471.022,67	134.430.900,01	(63.959.877,34)	(47,58)
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	2.173.333,33	-	2.173.333,33	-
	Jumlah	**3.614.182.721,92**	**3.553.804.436,60**	**60.378.285,32**	**1,70**

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.614.182.721,92 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**25.209.487.525,70**
Penambahan		
➢ Reklas Ke Aset tetap	6.600.000,00	
➢ Reklas ke Aset Lainnya	1.126.155.732,34	
➢ Koreksi	1.083.333,33	
Total Penambahan		**1.133.839.065,67**
➢ Reklas Dari Aset Tetap	1.437.266.119,34	
➢ Koreksi	101.436.115,84	
Total Pengurangan		**1.538.702.235,18**
Saldo Akumulasi Penyusutan Awal		**21.190.441.634,27**
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi		**3.614.182.721,92**

5.4.2.1.7.6.1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise Rp37.296.000,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise terealisasi sebesar Rp37.296.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25.641.066,66 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.654.933,34 atau 45,45% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Tugurejo Semarang	37.296.000,00	-	37.296.000,00	100,00
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	1.000.000,00	(1.000.000,00)	(100,00)
3	Dinas Sosial	-	22.129.400,00	(22.129.400,00)	(100,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	2.511.666,66	(2.511.666,66)	(100,00)
	Jumlah	**37.296.000,00**	**25.641.066,66**	**11.654.933,34**	45,45

5.4.2.1.7.6.2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Sofware Rp3.504.242.365,92

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software terealisasi sebesar Rp3.504.242.365,92, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.393.732.469,93 mengalami **kenaikan** sebesar Rp110.509.895,99 atau 3,26% dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	261.616.983,74	219.641.239,10	41.975.744,64	19,11
2	Dinas Kesehatan	235.813.597,27	160.646.609,01	75.166.988,26	46,79
3	RSUD Dr. Moewardi	211.117.614,81		211.117.614,81	100,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	90.056.548,00	260.069.853,71	(170.013.305,71)	(65,37)
5	RSUD Tugurejo Semarang	4.000.000,00	42.866.666,67	(38.866.666,67)	(90,67)
6	RSUD Kelet Donorejo	162.193.930,00	162.458.000,00	(264.070,00)	(0,16)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	257.330.000,00	253.200.833,33	4.129.166,67	1,63
8	RSJD Surakarta	479.538.081,80	488.110.015,14	(8.571.933,34)	(1,76)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	7.700.000,00	241.166.448,25	(233.466.448,25)	(96,81)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	75.448.073,33	-	75.448.073,33	100,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.996.000,00	-	2.996.000,00	100,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	110.080.836,67	23.976.973,33	86.103.863,34	359,11
13	Satuan Polisi Pamong Praja	37.900.000,00	37.900.000,00	-	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.300.000,00	13.275.000,00	24.025.000,00	180,98
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah		-	-	-
16	Dinas Sosial	22.129.400,00	-	22.129.400,00	100,00
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	114.325.912,12	154.385.471,83	(40.059.559,71)	(25,95)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	38.856.961,11	-	38.856.961,11	100,00
19	Dinas Ketahanan Pangan	82.877.000,00	6.906.416,67	75.970.583,33	1.100,00
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		5.408.333,33	(5.408.333,33)	(100,00)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	78.600.283,33	48.720.925,00	29.879.358,33	61,33
22	Dinas Perhubungan	2.400.000,00	9.791.500,00	(7.391.500,00)	(75,49)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	134.327.200,00	357.484.783,34	(223.157.583,34)	(62,42)
24	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	43.844.492,31	50.455.500,00	(6.611.007,69)	(13,10)
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	89.019.266,67	81.018.533,33	8.000.733,34	9,88
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	204.938.020,83	174.269.464,71	30.668.556,12	17,60
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	28.190.000,00	(28.190.000,00)	(100,00)
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	16.000.000,00	14.233.333,33	1.766.666,67	12,41
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	92.347.322,86	106.738.751,43	(14.391.428,57)	(13,48)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	68.469.933,33	68.469.933,34	(0,01)	(0,00)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.562.292,00	4.908.950,00	7.653.342,00	155,91
33	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.912.000,00	28.265.756,25	(23.353.756,25)	(82,62)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	41.334.500,00	(41.334.500,00)	(100,00)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	268.960.000,00	178.982.500,00	89.977.500,00	50,27
36	Badan Kepegawaian Daerah	23.489.969,41	-	23.489.969,41	100,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	91.201.854,17	7.737.062,50	83.464.791,67	1.078,77
38	Inspektorat	59.274.000,00	59.274.000,00	-	-
39	Sekretariat Daerah		-	-	-
40	Sekretariat DPRD	71.258.125,49	62.954.283,00	8.303.842,49	13,19
41	Badan Penghubung	11.356.666,67	890.833,33	10.465.833,34	1.174,84
	Jumlah	**3.504.242.365,92**	**3.393.732.469,93**	**110.509.895,99**	3,26

5.4.2.1.7.6.3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian Rp70.471.022,67

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian terealisasi sebesar Rp70.471.022,67, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp134.430.900,01 mengalami **penurunan** sebesar (Rp63.959.877,34) atau (47,58%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	-	74.634.633,34	(74.634.633,34)	(100,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	42.916.866,67	(42.916.866,67)	(100,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	41.345.239,34	-	41.345.239,34	100.00
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	29.125.783,33	16.879.400,00	12.246.383,33	72,55
	Jumlah	**70.471.022,67**	**134.430.900,01**	**(63.959.877,34)**	**(47,58)**

5.4.2.1.7.6.4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp2.173.333,33

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya terealisasi sebesar Rp2.173.333,33, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.173.333,33 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidkan dan Kebudayaan	2.173.333,33	-	2.173.333,33	100,00
	Jumlah	**2.173.333,33**	**-**	**2.173.333,33**	**100,00**

5.4.2.1.8 Beban Lain-Lain Rp0,00

Beban Lain-Lain terealisasi sebesar Rp,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.823.224.697,14 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.823.224.697,14) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	9.026.913.212,19	(9.026.913.212,19)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	-	300.596.400,00	(300.596.400,00)	(100,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	107.370.500,00	(107.370.500,00)	(100,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	3.297.000,00	(3.297.000,00)	(100,00)
5	RSUD Tugurejo Semarang	-	13.369.000,00	(13.369.000,00)	(100,00)
6	RSUD Kelet Donorejo	-	18.209.000,00	(18.209.000,00)	(100,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	43.464.250,00	(43.464.250,00)	(100,00)
8	RSJD Surakarta	-	59.800.915,00	(59.800.915,00)	(100,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	40.810.900,00	(40.810.900,00)	(100,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	7.040.000,00	(7.040.000,00)	(100,00)
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	36.243.400,00	(36.243.400,00)	(100,00)
12	Dinas Sosial	-	14.025.000,00	(14.025.000,00)	(100,00)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	44.631.440,00	(44.631.440,00)	(100,00)
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	1.225.260,00	(1.225.260,00)	(100,00)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	226.767.424,61	(226.767.424,61)	(100,00)
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	6.600.000,00	(6.600.000,00)	(100,00)
17	Dinas Perhubungan	-	2.784.523.000,00	(2.784.523.000,00)	(100,00)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	7.160.000,00	(7.160.000,00)	(100,00)
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	5.711.000,00	(5.711.000,00)	(100,00)
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	55.034.635,00	(55.034.635,00)	(100,00)
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	200.000,00	(200.000,00)	(100,00)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	39.709.881,00	(39.709.881,00)	(100,00)
24	SKPKD	-	1.754.712.546,00	(1.754.712.546,00)	(100,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	300.000,00	(300.000,00)	(100,00)
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	302.000,00	(302.000,00)	(100,00)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	101.305.000,00	(101.305.000,00)	(100,00)
28	Badan Kepegawaian Daerah	-	1.919.600,00	(1.919.600,00)	(100,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	31.808.333,34	(31.808.333,34)	(100,00)
30	Inspektorat	-	875.000,00	(875.000,00)	(100,00)
31	Sekretariat Daerah	-	83.300.000,00	(83.300.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**14.823.224.697,14**	**(14.823.224.697,14)**	**(100,00)**

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER Rp8.775.387.197.510,00

Beban Transfer terealisasi sebesar Rp8.775.387.197.510,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.004.871.827.827,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.770.515.369.683,00 atau 25,28% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil	6.085.808.822.482,00	105.970.589.520,00	93.749.108.285,00	6.098.030.303.717,00	5.243.126.215.061,00	854.904.088.656,00	16,31
2	Beban Bantuan Keuangan	2.677.356.893.793,00	-	-	2.677.356.893.793,00	1.761.745.612.766,00	915.611.281.027,00	51,97
	Jumlah	**8.763.165.716.275,00**	**105.970.589.520,00**	**93.749.108.285,00**	**8.775.387.197.510,00**	**7.004.871.827.827,00**	**1.770.515.369.683,00**	**25,28**

Realisasi Beban Transfer sebesar Rp8.775.387.197.510,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah		**8.763.165.716.275,00**
Penambahan		
➢ Saldo Akhir Utang	105.970.589.520,00	
Total Penambahan		**105.970.589.520,00**
Pengurangan		
➢ Saldo Awal Utang	93.749.108.285,00	
Total Pengurangan		**93.749.108.285,00**
Beban Daerah		**8.775.387.197.510,00**

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil Rp6.098.030.303.717,00

Beban Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp6.098.030.303.717,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.243.126.215.061,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp854.904.088.656,00 atau 16,31% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.085.808.822.482,00	105.970.589.520,00	93.749.108.285,00	6.098.030.303.717,00	5.243.126.215.061,00	854.904.088.656,00	16,31
	Jumlah	**6.085.808.822.482,00**	**105.970.589.520,00**	**93.749.108.285,00**	**6.098.030.303.717,00**	**5.243.126.215.061,00**	**854.904.088.656,00**	**16,31**

5.4.2.2.1.1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp6.098.030.303.717,00

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa terealisasi sebesar Rp6.098.030.303.717,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.243.126.215.061,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp854.904.088.656,00 atau 16,31% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	196.033.111.000,00	5.123.447.260,00	2.423.634.417,00	198.732.923.843,00	173.768.886.556,00	24.964.037.287,00	14,37
2	Kabupaten Kendal	170.252.676.396,00	2.600.544.857,00	1.851.541.694,00	171.001.679.559,00	148.611.936.943,00	22.389.742.616,00	15,07
3	Kabupaten Demak	199.350.328.595,00	1.583.511.900,00	4.706.680.913,00	196.227.159.582,00	171.287.040.862,00	24.940.118.720,00	14,56
4	Kabupaten Grobogan	201.905.325.091,00	1.692.253.271,00	3.502.871.496,00	200.094.706.866,00	172.960.792.213,00	27.133.914.653,00	15,69
5	Kabupaten Pati	230.314.850.204,00	22.471.458,00	5.954.775.300,00	224.382.546.362,00	201.178.887.499,00	23.203.658.863,00	11,53
6	Kabupaten Kudus	171.893.652.772,00	2.720.764.054,00	2.152.434.208,00	172.461.982.618,00	151.399.073.348,00	21.062.909.270,00	13,91
7	Kabupaten Jepara	197.435.301.000,00	867.367.953,00	4.201.602.981,00	194.101.065.972,00	168.943.342.535,00	25.157.723.437,00	14,89
8	Kabupaten Rembang	119.936.641.000,00	3.203.055.383,00	1.439.443.520,00	121.700.252.863,00	110.024.039.066,00	11.676.213.797,00	10,61
9	Kabupaten Blora	130.676.984.000,00	2.811.187.366,00	1.531.387.636,00	131.956.783.730,00	116.088.570.678,00	15.868.213.052,00	13,67
10	Kabupaten	135.132.754.000,00	3.729.214.682,00	2.737.657.114,00	136.124.311.568,00	116.247.143.114,00	19.877.168.454,00	17,10

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Pekalongan							
11	Kabupaten Batang	133.251.678.000,00	3.658.531.330,00	1.521.348.001,00	135.388.861.329,00	110.084.417.804,00	25.304.443.525,00	22,99
12	Kabupaten Pemalang	190.281.923.697,00	933.426.308,00	5.237.871.223,00	185.977.478.782,00	159.531.967.760,00	26.445.511.022,00	16,58
13	Kabupaten Tegal	211.566.275.761,00	3.949.751.407,00	2.061.747.513,00	213.454.279.655,00	171.144.434.642,00	42.309.845.013,00	24,72
14	Kabupaten Brebes	226.946.635.230,00	2.936.420.982,00	2.391.722.607,00	227.491.333.605,00	188.328.708.138,00	39.162.625.467,00	20,79
15	Kabupaten Banyumas	253.570.782.196,00	3.785.256.768,00	3.058.195.354,00	254.297.843.610,00	211.911.109.153,00	42.386.734.457,00	20,00
16	Kabupaten Cilacap	263.877.289.558,00	2.824.436.591,00	3.115.063.277,00	263.586.662.872,00	225.648.176.751,00	37.938.486.121,00	16,81
17	Kabupaten Purbalingga	130.492.465.203,00	1.832.816.292,00	1.550.469.616,00	130.774.811.879,00	114.499.141.950,00	16.275.669.929,00	14,21
18	Kabupaten Banjarnegara	134.248.126.559,00	1.812.109.666,00	2.972.708.579,00	133.087.527.646,00	114.664.683.296,00	18.422.844.350,00	16,07
19	Kabupaten Magelang	192.799.361.034,00	2.692.928.545,00	2.061.704.229,00	193.430.585.350,00	154.036.245.528,00	39.394.339.822,00	25,57
20	Kabupaten Temanggung	122.999.737.000,00	1.519.482.482,00	1.221.344.271,00	123.297.875.211,00	104.306.697.630,00	18.991.177.581,00	18,21
21	Kabupaten Wonosobo	121.815.108.966,00	1.674.983.776,00	1.419.243.946,00	122.070.848.796,00	104.244.691.348,00	17.826.157.448,00	17,10
22	Kabupaten Purworejo	118.603.095.000,00	3.414.832.493,00	1.420.788.321,00	120.597.139.172,00	99.585.092.771,00	21.012.046.401,00	21,10
23	Kabupaten Kebumen	175.763.136.000,00	3.437.968.245,00	4.770.941.665,00	174.430.162.580,00	147.547.358.972,00	26.882.803.608,00	18,22
24	Kabupaten Klaten	218.303.369.271,00	3.066.129.116,00	2.776.175.889,00	218.593.322.498,00	187.920.546.522,00	30.672.775.976,00	16,32
25	Kabupaten Boyolali	169.795.301.000,00	3.518.119.980,00	4.918.536.469,00	168.394.884.511,00	141.897.703.104,00	26.497.181.407,00	18,67
26	Kabupaten Sragen	184.776.461.000,00	4.587.002.208,00	2.090.976.736,00	187.272.486.472,00	158.689.045.617,00	28.583.440.855,00	18,01
27	Kabupaten Sukoharjo	183.400.277.000,00	5.354.490.516,00	2.179.871.567,00	186.574.895.949,00	156.524.395.436,00	30.050.500.513,00	19,20
28	Kabupaten Karanganyar	177.559.691.000,00	3.423.815.966,00	1.933.153.948,00	179.050.353.018,00	150.560.078.592,00	28.490.274.426,00	18,92
29	Kabupaten Wonogiri	149.046.067.000,00	2.756.550.113,00	1.349.000.600,00	150.453.616.513,00	132.957.997.382,00	17.495.619.131,00	13,16
30	Kota Semarang	551.844.602.271,00	11.371.509.122,00	8.983.304.077,00	554.232.807.316,00	473.781.138.471,00	80.451.668.845,00	16,98
31	Kota Pekalongan	72.380.352.000,00	1.176.939.802,00	954.437.170,00	72.602.854.632,00	70.255.042.000,00	2.347.812.632,00	3,34
32	Kota Surakarta	165.478.211.614,00	2.965.280.405,00	2.590.192.791,00	165.853.299.228,00	150.465.611.048,00	15.387.688.180,00	10,23
33	Kota Salatiga	64.841.765.000,00	2.653.046.940,00	730.901.435,00	66.763.910.505,00	59.137.076.256,00	7.626.834.249,00	12,90
34	Kota Tegal	66.790.681.678,00	2.184.648.953,00	1.043.145.678,00	67.932.184.953,00	67.995.036.290,00	(62.851.337,00)	(0,09)
35	Kota Magelang	52.444.805.386,00	4.086.293.330,00	894.234.044,00	55.636.864.672,00	56.900.105.786,00	(1.263.241.114,00)	(2,22)
	Jumlah	**6.085.808.822.482,00**	**105.970.589.520,00**	**93.749.108.285,00**	**6.098.030.303.717,00**	**5.243.126.215.061,00**	**854.904.088.656,00**	**16,31**

Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp6.098.030.303.717,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah **6.085.808.822.482,00**

Penambahan

- Saldo Akhir Utang 105.970.589.520,00

Total Penambahan **105.970.589.520,00**

Pengurangan

- Saldo Awal Utang 93.749.108.285

Total Pengurangan **93.749.108.285**

Beban Daerah **6.098.030.303.717,00**

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan Rp2.677.356.893.793,00

Beban Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp2.677.356.893.793,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.761.745.612.766,00 mengalami kenaikan sebesar Rp915.611.281.027,00 atau 51,97% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	804.934.393.793,00	-	-	804.934.393.793,00	493.309.827.766,00	311.624.566.027,00	63,17
4	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.872.422.500.000,00	-	-	1.872.422.500.000,00	1.268.435.785.000,00	603.986.715.000,00	47,62
	Jumlah	**2.677.356.893.793,00**	**-**	**-**	**2.677.356.893.793,00**	**1.761.745.612.766,00**	**915.611.281.027,00**	**51,97**

5.4.2.2.2.1 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota **Rp804.934.393.793,00**

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp804.934.393.793,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp493.309.827.766,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp311.624.566.027,00 atau 63,17% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	50.137.794.616,00	-	-	50.137.794.616,00	49.527.249.000,00	610.545.616,00	1,23
2	Kabupaten Kendal	15.019.277.408,00	-	-	15.019.277.408,00	8.937.061.883,00	6.082.215.525,00	68,06
3	Kabupaten Demak	69.666.588.000,00	-	-	69.666.588.000,00	38.408.240.000,00	31.258.348.000,00	81,38
4	Kabupaten Grobogan	20.923.846.000,00	-	-	20.923.846.000,00	24.991.851.000,00	(4.068.005.000,00)	(16,28)
5	Kabupaten Pati	13.909.654.000,00	-	-	13.909.654.000,00	11.006.114.000,00	2.903.540.000,00	26,38
6	Kabupaten Kudus	9.400.460.000,00	-	-	9.400.460.000,00	4.319.018.000,00	5.081.442.000,00	117,65
7	Kabupaten Jepara	20.046.025.467,00	-	-	20.046.025.467,00	34.387.744.409,00	(14.341.718.942,00)	(41,71)
8	Kabupaten Rembang	16.611.141.659,00	-	-	16.611.141.659,00	15.987.548.639,00	623.593.020,00	3,90
9	Kabupaten Blora	24.517.852.000,00	-	-	24.517.852.000,00	14.680.004.000,00	9.837.848.000,00	67,02
10	Kabupaten Pekalongan	59.340.277.400,00	-	-	59.340.277.400,00	6.632.264.000,00	52.708.013.400,00	794,72
11	Kabupaten Batang	11.386.474.000,00	-	-	11.386.474.000,00	8.696.575.000,00	2.689.899.000,00	30,93
12	Kabupaten Pemalang	12.488.667.000,00	-	-	12.488.667.000,00	873.000.000,00	11.615.667.000,00	1.330,55
13	Kabupaten Tegal	10.540.735.795,00	-	-	10.540.735.795,00	18.959.286.000,00	(8.418.550.205,00)	(44,40)
14	Kabupaten Brebes	25.935.303.278,00	-	-	25.935.303.278,00	11.917.734.000,00	14.017.569.278,00	117,62
15	Kabupaten Banyumas	21.599.433.339,00	-	-	21.599.433.339,00	20.129.335.915,00	1.470.097.424,00	7,30
16	Kabupaten Cilacap	13.250.437.000,00	-	-	13.250.437.000,00	18.714.874.507,00	(5.464.437.507,00)	(29,20)
17	Kabupaten Purbalingga	14.458.345.000,00	-	-	14.458.345.000,00	687.000.000,00	13.771.345.000,00	2.004,56
18	Kabupaten Banjarnegara	753.000.000,00	-	-	753.000.000,00	6.549.582.000,00	(5.796.582.000,00)	(88,50)
19	Kabupaten Magelang	19.161.836.000,00	-	-	19.161.836.000,00	15.430.420.000,00	3.731.416.000,00	24,18
20	Kabupaten Temanggung	13.991.072.634,00	-	-	13.991.072.634,00	37.830.591.261,00	(23.839.518.627,00)	(63,02)
21	Kabupaten Wonosobo	91.211.531.410,00	-	-	91.211.531.410,00	17.540.253.154,00	73.671.278.256,00	420,01
22	Kabupaten Purworejo	25.521.105.300,00	-	-	25.521.105.300,00	9.269.759.900,00	16.251.345.400,00	175,32
23	Kabupaten Kebumen	30.643.811.000,00	-	-	30.643.811.000,00	5.848.070.000,00	24.795.741.000,00	424,00
24	Kabupaten Klaten	14.035.213.000,00	-	-	14.035.213.000,00	753.000.000,00	13.282.213.000,00	1.763,91
25	Kabupaten Boyolali	22.397.646.000,00	-	-	22.397.646.000,00	21.282.605.000,00	1.115.041.000,00	5,24
26	Kabupaten Sragen	15.534.534.000,00	-	-	15.534.534.000,00	8.295.179.000,00	7.239.355.000,00	87,27
27	Kabupaten Sukoharjo	14.692.954.000,00	-	-	14.692.954.000,00	2.319.045.000,00	12.373.909.000,00	533,58
28	Kabupaten Karanganyar	12.420.170.000,00	-	-	12.420.170.000,00	7.097.592.000,00	5.322.578.000,00	74,99
29	Kabupaten Wonogiri	18.628.103.000,00	-	-	18.628.103.000,00	26.144.456.000,00	(7.516.353.000,00)	(28,75)
30	Kota Semarang	27.421.089.496,00	-	-	27.421.089.496,00	23.539.789.384,00	3.881.300.112,00	16,49
31	Kota Pekalongan	34.590.507.000,00	-	-	34.590.507.000,00	1.952.969.600,00	32.637.537.400,00	1.671,17
32	Kota Surakarta	23.253.000.000,00	-	-	23.253.000.000,00	18.620.615.114,00	4.632.384.886,00	24,88
33	Kota Salatiga	12.032.531.000,00	-	-	12.032.531.000,00	586.000.000,00	11.446.531.000,00	1.953,33
34	Kota Tegal	6.553.000.000,00	-	-	6.553.000.000,00	753.000.000,00	5.800.000.000,00	770,25
35	Kota Magelang	12.860.977.991,00	-	-	12.860.977.991,00	642.000.000,00	12.218.977.991,00	1.903,27
	Jumlah	**804.934.393.793,00**	**-**	**-**	**804.934.393.793,00**	**493.309.827.766,00**	**311.624.566.027,00**	**63,17**

5.4.2.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp1.872.422.500.000,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp1.872.422.500.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.268.435.785.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp603.986.715.000,00 atau 47,62% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	97.622.000.000,00	-	-	97.622.000.000,00	60.499.000.000,00	37.123.000.000,00	61,36
2	Kabupaten Kendal	65.592.000.000,00	-	-	65.592.000.000,00	29.054.000.000,00	36.538.000.000,00	125,76
3	Kabupaten Demak	59.122.000.000,00	-	-	59.122.000.000,00	29.020.000.000,00	30.102.000.000,00	103,73
4	Kabupaten Grobogan	121.651.000.000,00	-	-	121.651.000.000,00	58.623.200.000,00	63.027.800.000,00	107,51
5	Kabupaten Pati	142.132.000.000,00	-	-	142.132.000.000,00	107.514.664.000,00	34.617.336.000,00	32,20
6	Kabupaten Kudus	35.532.000.000,00	-	-	35.532.000.000,00	23.041.000.000,00	12.491.000.000,00	54,21
7	Kabupaten Jepara	99.494.000.000,00	-	-	99.494.000.000,00	39.189.207.000,00	60.304.793.000,00	153,88
8	Kabupaten Rembang	47.035.000.000,00	-	-	47.035.000.000,00	30.848.400.000,00	16.186.600.000,00	52,47
9	Kabupaten Blora	56.920.000.000,00	-	-	56.920.000.000,00	36.419.700.000,00	20.500.300.000,00	56,29
10	Kabupaten Pekalongan	36.101.000.000,00	-	-	36.101.000.000,00	20.581.200.000,00	15.519.800.000,00	75,41
11	Kabupaten Batang	41.285.000.000,00	-	-	41.285.000.000,00	51.193.428.000,00	(9.908.428.000,00)	(19,35)
12	Kabupaten Pemalang	62.565.000.000,00	-	-	62.565.000.000,00	48.188.000.000,00	14.377.000.000,00	29,84
13	Kabupaten Tegal	49.179.000.000,00	-	-	49.179.000.000,00	29.490.900.000,00	19.688.100.000,00	66,76
14	Kabupaten Brebes	106.248.000.000,00	-	-	106.248.000.000,00	65.573.000.000,00	40.675.000.000,00	62,03
15	Kabupaten Banyumas	73.771.000.000,00	-	-	73.771.000.000,00	37.761.000.000,00	36.010.000.000,00	95,36
16	Kabupaten Cilacap	49.409.000.000,00	-	-	49.409.000.000,00	42.636.350.000,00	6.772.650.000,00	15,88
17	Kabupaten Purbalingga	36.278.000.000,00	-	-	36.278.000.000,00	31.121.000.000,00	5.157.000.000,00	16,57
18	Kabupaten Banjarnegara	45.349.000.000,00	-	-	45.349.000.000,00	24.194.000.000,00	21.155.000.000,00	87,44
19	Kabupaten Magelang	72.132.000.000,00	-	-	72.132.000.000,00	78.200.059.000,00	(6.068.059.000,00)	(7,76)
20	Kabupaten Temanggung	64.544.500.000,00	-	-	64.544.500.000,00	32.720.500.000,00	31.824.000.000,00	97,26
21	Kabupaten Wonosobo	63.988.000.000,00	-	-	63.988.000.000,00	57.563.000.000,00	6.425.000.000,00	11,16
22	Kabupaten Purworejo	40.935.000.000,00	-	-	40.935.000.000,00	21.613.950.000,00	19.321.050.000,00	89,39
23	Kabupaten Kebumen	34.422.000.000,00	-	-	34.422.000.000,00	23.927.370.000,00	10.494.630.000,00	43,86
24	Kabupaten Klaten	82.924.000.000,00	-	-	82.924.000.000,00	73.842.000.000,00	9.082.000.000,00	12,30
25	Kabupaten Boyolali	50.643.000.000,00	-	-	50.643.000.000,00	58.384.051.000,00	(7.741.051.000,00)	(13,26)
26	Kabupaten Sragen	55.882.000.000,00	-	-	55.882.000.000,00	39.275.500.000,00	16.606.500.000,00	42,28
27	Kabupaten Sukoharjo	54.412.000.000,00	-	-	54.412.000.000,00	31.026.000.000,00	23.386.000.000,00	75,38
28	Kabupaten Karanganyar	83.305.000.000,00	-	-	83.305.000.000,00	41.906.506.000,00	41.398.494.000,00	98,79
29	Kabupaten Wonogiri	43.950.000.000,00	-	-	43.950.000.000,00	45.028.800.000,00	(1.078.800.000,00)	(2,40)
	Jumlah	**1.872.422.500.000,00**	**-**	**-**	**1.872.422.500.000,00**	**1.268.435.785.000,00**	**603.986.715.000,00**	**47,62**

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (Rp711.896.326.083,56)

Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terealisasi sebesar (Rp711.896.326.083,56) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp324.852.321.985,87 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.036.748.648.069,43) atau (319,14%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Non Operasional	1.478.620.139,69	341.940.608.963,02	(340.461.988.823,33)	(99,57)
2	Defisit Non Operasional	(713.374.946.223,25)	(17.088.286.977,15)	(696.286.659.246,10)	4.074,64
	Jumlah	**(711.896.326.083,56)**	**324.852.321.985,87**	**(1.036.748.648.069,43)**	**(319,14)**

5.4.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL Rp1.478.620.139,69

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar Rp1.478.620.139,69, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp341.940.608.963,02 mengalami **penurunan** sebesar (Rp340.461.988.823,33) atau (99,57%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	1.478.620.139,69	341.940.608.963,02	(340.461.988.823,33)	(99,57)
	Jumlah	**1.478.620.139,69**	**341.940.608.963,02**	**(340.461.988.823,33)**	**(99,57)**

Realisasi Surplus Non Operasional sebesar Rp1.478.620.139,69 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
➢ Penyisihan Piutang Awal	24.934.088.146,07	
➢ Koreksi Penyisihan Piutang	207.188.264,84	
➢ Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	46.912.703.159,43	
➢ Reklas Penyusutan Ke Aset Lainnya	326.080.348,99	
Total Penambahan		**72.380.059.919,33**
Pengurangan		
➢ Penyisihan Piutang Akhir	24.089.390.174,68	
➢ Koreksi Penyisihan Piutang	45.073.975,07	
➢ Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	46.479.211.463,22	
➢ Reklas Penyusutan Dari Aset Lainnya	287.764.166,67	
Total Pengurangan		**70.901.439.779,64**
Surplus Kegiatan Non Operasional - LO		**1.478.620.139,69**

5.4.3.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO Rp1.478.620.139,69

Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp1.478.620.139,69, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp341.940.608.963,02 mengalami **penurunan** sebesar (Rp340.461.988.823,33) atau (99,57%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	1.478.620.139,69	341.940.608.963,02	(340.461.988.823,33)	(99,57)
	Jumlah	**1.478.620.139,69**	**341.940.608.963,02**	**(340.461.988.823,33)**	**(99,57)**

5.4.3.1.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO Rp1.478.620.139,69

Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp1.478.620.139,69, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp341.940.608.963,02 mengalami **penurunan** sebesar (Rp340.461.988.823,33) atau (99,57%) dengan rincian sebagai berikut:

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49.515.544,38	71.118.700,00	(21.603.155,62)	(30,38)
2	Dinas Kesehatan	22.248.663,46	-	22.248.663,46	100,00
3	RSUD Dr. Moewardi	316.338.464,71	-	316.338.464,71	100,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	602.905.233,62	-	602.905.233,62	100,00
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	79.807.579,29	-	79.807.579,29	100,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	103.485.386,50	-	103.485.386,50	100,00
7	RSJD Surakarta	38.373.294,93	66.142.888,35	(27.769.593,42)	(41,98)

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	64.782.451,47	1.125.000.000,00	(1.060.217.548,53)	(94,24)
9	Dinas Perhubungan	-	85.925,00	(85.925,00)	(100,00)
10	Dinas Perindutrian dan Perdagangan	117.836.248,75	315.578,36	117.520.670,39	37.239,77
11	SKPKD	-	106.519.175,00	(106.519.175,00)	(100,00)
12	Sekretariat Daerah	19.608,33	-	19.608,33	100,00
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	452.300,00	-	452.300,00	100,00
14	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	226.821,25	340.571.426.696,31	(340.571.199.875,06)	(100,00)
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	82.628.543,00	-	82.628.543,00	100,00
	Jumlah	**1.478.620.139,69**	**341.940.608.963,02**	**(340.461.988.823,33)**	**(99,57)**

5.4.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL (Rp713.374.946.223,25)

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar (Rp713.374.946.223,25), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp17.088.286.977,15) mengalami **penurunan** sebesar (Rp696.286.659.246,10) atau 4.074,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	(1.190.620.583,93)	(10.428.083.662,69)	9.237.463.078,76	(88,58)
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	(712.184.325.639,32)	(6.660.203.314,46)	(705.524.122.324,86)	10.593,13
	Jumlah	**(713.374.946.223,25)**	**(17.088.286.977,15)**	**(696.286.659.246,10)**	**4.074,64**

Defisit Non Operasional sebesar (Rp713.374.946.223,25) dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

➢ Defisit Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	711.387.312.427,79	
➢ Aset dari Ektrakomptabel	2.466.570.803,00	
➢ Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	101.288.295.362,97	
➢ Aset Dimusnahkan	531.375.250,00	
➢ TGR	35.744.500,00	
Total Penambahan		**815.709.298.343,76**

Pengurangan

➢ Penyusutan Penjualan Aset Lainnya	1.275.950.219,07	
➢ Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	52.065.747.866,07	
➢ Reklas Penyusutan Ke Aset Lainnya	48.443.977.368,70	
➢ Penyusutan Aset Tetap Dimusnahkan	530.804.416,67	
➢ Penyusutan TGR	17.872.250,00	
Total Pengurangan		**102.334.352.120,51**
Surplus Kegiatan Non Operasional - LO		**713.374.946.223,25**

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO (Rp1.190.620.583,93)

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO terealisasi sebesar (Rp1.190.620.583,93), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.428.083.662,69) mengalami **penurunan** sebesar Rp9.237.463.078,76 atau (88,58%) dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	(1.190.620.583,93)	(10.428.083.662,69)	9.237.463.078,76	(88,58)
2	Defisit Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-
	Jumlah	**(1.190.620.583,93)**	**(10.428.083.662,69)**	**9.237.463.078,76**	**(88,58)**

5.4.3.2.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO (Rp1.190.620.583,93)

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO terealisasi sebesar (Rp1.190.620.583,93), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.428.083.662,69) mengalami **penurunan** sebesar Rp9.237.463.078,76 atau 88,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(451.326.496,82)	(352.092.026)	(99.234.470,46)	28,18
2	Dinas Kesehatan	(468.223.583,34	-	(468.223.583,34)	100,00
3	RSUD Dr. Moewardi	-	(4.999.165.035)	4.999.165.035,29	(100,00)
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	(173.295.463,77)	-	(173.295.463,77)	100,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(97.775.040,00)	-	(97.775.040,00)	100,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	(1.559.140.000,00)	1.559.140.000,00	(100,00)
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	(1.382.266.443,43)	1.382.266.443,43	(100,00)
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	(909.754.782,61)	909.754.782,61	(100,00)
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	(1.221.345.375,00)	1.221.345.375,00	(100,00)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(4.320.000,00)	4.320.000,00	(100,00)
	Jumlah	**(1.190.620.583,93)**	**(10.428.083.662,69)**	**9.237.463.078,76**	**(271,82)**

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar (Rp1.190.620.583,93) dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

➢ Aset dari Ekstrakomptabel	2.466.570.803,00	
Total Penambahan		**2.466.570.803,00**

Pengurangan

➢ Penyusutan Penjualan Aset Lainnya	1.275.950.219,07	
Total Pengurangan		**1.275.950.219,07**
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO		**1.190.620.583,93**

5.4.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO (Rp712.184.325.639,32)

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar (Rp712.184.325.639,32), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.660.203.314,46) mengalami **penurunan** sebesar (Rp705.524.122.324,86) atau 10.593,13% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	(712.184.325.639,32)	(6.660.203.314,46)	(705.524.122.324,86)	10.593,13
	Jumlah	**(712.184.325.639,32)**	**(6.660.203.314,46)**	**(705.524.122.324,86)**	**10.593,13**

5.4.3.2.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO (Rp712.184.325.639,32)

Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO terealisasi sebesar (Rp712.184.325.639,32), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.660.203.314,46) mengalami **penurunan** sebesar (Rp705.524.122.324,86) atau 10.593,13% dengan rincian sebagai berikut :

		2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.570.833,33)	(1.047.521.958,61)	1.044.951.125,28	(99,75)
2	Dinas Kesehatan	(4.083.430,25)	-	(4.083.430,25)	(100,00)
3	RSUD Tugurejo Semarang	(34.723.360,41)	(19.000.000,00)	(15.723.360,41)	82,75
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	(474.649.613,00)	474.649.613,00	(100,00)
5	RSJD Surakarta	(6.677.406,25)	-	(6.677.406,25)	(100,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	(8.939.052,09)	(42.660.245,00)	33.721.192,91	(79,05)
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(121.958.602,31)	-	(121.958.602,31)	(100,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	(110.160.000,00)	110.160.000,00	(100,00)
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(31.636.500,00)	31.636.500,00	(100,00)
10	Dinas Sosial	(8.728.907,28)	(24.537.567,50)	15.808.660,22	(64,43)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(30.449.370,84)	-	(30.449.370,84)	(100,00)
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(406.250,00)	(16.954.927,91)	16.548.677,91	(97,60)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	(367.661.025,05)	367.661.025,05	(100,00)
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	(171.000,00)	171.000,00	(100,00)
15	Dinas Perhubungan	(1.414.477,04)	(47.302.698,18)	45.888.221,14	(97,01)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(3.006.510,42)	-	(3.006.510,42)	(100,00)
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(220.052,08)	(436.490.985,80)	436.270.933,72	(99,95)
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	(18.846.000,00)	18.846.000,00	(100,00)
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	(22.562.528,71)	(3.970.384.733,41)	3.947.822.204,70	(99,43)
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	-
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(163.889.902,39)	-	(163.889.902,39)	(100,00)
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(17.872.250,00)	-	(17.872.250,00)	(100,00)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-
24	SKPKD	-	-	-	-
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(9.127.708,33)	(11.156.250,00)	2.028.541,67	(18,18)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(711.387.312.427,79)	-	(711.387.312.427,79)	(100,00)
28	Badan Kepegawaian Daerah	(358.518.218,75)	-	(358.518.218,75)	(100,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(1.864.351,05)	-	(1.864.351,05)	(100,00)
30	Inspektorat	-	-	-	-
31	Sekretariat Daerah	-	(8.918.560,00)	8.918.560,00	(100,00)
32	Sekretariat DPRD	-	(32.151.250,00)	32.151.250,00	(100,00)
33	Badan Penghubung	-	-	-	-
		(712.184.325.639,32)	**(6.660.203.314,46)**	**(705.524.122.324,86)**	**10.593,13**

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya-LO sebesar (Rp712.184.325.639,32) dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan

➢ Defisit Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	711.387.312.427,79	
➢ Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	101.288.295.362,97	
➢ Aset Dimusnahkan	531.375.250,00	
➢ TGR	35.744.500,00	
Total Penambahan		**813.242.727.540,76**

Pengurangan

➢ Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	52.065.747.866,07	
➢ Reklas Penyusutan Ke Aset Lainnya	48.443.977.368,70	
➢ Penyusutan Aset Tetap Dimusnahkan	530.804.416,67	
➢ Penyusutan TGR	17.872.250,00	
Total Pengurangan		**101.058.401.901,44**
Surplus Kegiatan Non Operasional - LO		**712.184.325.639,32**

5.4.4 POS LUAR BIASA (Rp16.545.479.100,00)

Pos Luar Biasa terealisasi sebesar Rp16.545.479.100,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.329.429.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.216.050.100,00 atau 282,16% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendaptan Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Luar Biasa	16.545.479.100,00	-	-	16.545.479.100,00	4.329.429.000,00	12.216.050.100,00	282,16
	Jumlah	**(16.545.479.100,00)**	**-**	**-**	**(16.545.479.100,00)**	**(4.329.429.000,00)**	**12.216.050.100,00**	**(282,16)**

5.4.4.1 PENDAPATAN LUAR BIASA **Rp,00**

Pendapatan Luar Biasa tahun 2022 dan 2021 terealisasi sebesar Rp,00.

5.4.4.2 BEBAN LUAR BIASA **Rp16.545.479.100,00**

Beban Luar Biasa bersumber dari Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp16.545.479.100,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.329.429.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.216.050.100,00 atau 282,16% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2022 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Luar Biasa	16.545.479.100,00	-	-	16.545.479.100,00	4.329.429.000,00	12.216.050.100,00	282,16
	Jumlah	**16.545.479.100,00**	**-**	**-**	**16.545.479.100,00**	**4.329.429.000,00**	**12.216.050.100,00**	**282,16**

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan Arus Keluar Kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2022 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2022.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi **Rp1.930.731.759.243,00**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.930.731.759.243,00, merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Arus Masuk Kas	24.167.330.626.567,00	26.610.910.138.713,00
2.	Arus Keluar Kas	22.236.598.867.324,00	24.396.179.782.589,00
	Jumlah	**1.930.731.759.243,00**	**2.214.730.356.124,00**

5.5.1.1. Arus Masuk Kas **Rp24.167.330.626.567,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp24.167.330.626.567,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp26.610.910.138.713,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	13.484.851.151.740,00	11.718.378.320.505,00
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	115.158.014.199,00	91.634.269.205,00
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	546.717.104.899,00	508.263.876.971,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	2.117.287.575.454,00	2.355.108.484.231,00
5.	Dana Bagi Hasil Pajak	909.711.090.450,00	1.023.258.872.325,00
6.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	18.989.623.430,00	12.586.758.109,00
7.	Dana Alokasi Umum	3.435.718.090.405,00	3.432.978.859.000,00
8.	Dana Alokasi Khusus	3.385.111.274.502,00	7.334.261.241.620,00
9.	Dana Insentif Daerah	61.352.500.000,00	68.710.605.000,00
10.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-
11.	Pendapatan Hibah	92.161.740.403,00	64.882.003.502,00
12.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	272.461.085,00	846.848.245,00
	Jumlah	**24.167.330.626.567,00**	**26.610.910.138.713,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi tahun 2022 sebesar Rp24.167.330.626.567,00 sedangkan total pada LRA tahun 2022 (5.1.1) sebesar Rp24.167.935.634.127,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp605.007.560,00. Perbedaan tersebut terjadi karena pada total Arus Masuk Kas dari aktivitas

operasi tidak termasuk pendapatan yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp605.007.560,00 (5.5.2.1).

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah **Rp13.484.851.151.740,00**

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.484.851.151.740,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp11.718.378.320.505,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5.432.537.592.000,00	4.758.837.101.600,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.886.089.450.650,00	2.775.978.070.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.248.760.733.492,00	1.826.681.450.277,00
4	Pajak Air Permukaan	18.802.964.785,00	17.243.160.079,00
5	Pajak Rokok	2.898.660.410.813,00	2.339.638.538.549,00
	Jumlah	**13.484.851.151.740,00**	**11.718.378.320.505,00**

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah **Rp115.158.014.199,00**

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp115.158.014.199,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp91.634.269.205,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.271.653.574,00	17.015.718.195,00
2	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	278.700.000,00	63.400.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pendidikan	298.250.000,00	533.500.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	48.995.329.563,00	38.307.608.734,00
5	Retribusi Terminal	3.868.353.200,00	1.296.264.750,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	536.446.650,00	458.284.775,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	3.524.730.000,00	694.235.000,00
8	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	6.535.788.500,00	5.532.632.500,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	646.295.350,00	269.133.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	20.972.003.562,00	21.294.297.511,00
11	Retribusi Ijin Trayek	495.100.000,00	673.827.500,00
12	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	3.735.363.800,00	2.816.377.700,00
13	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	2.678.989.540,00
	Jumlah	**115.158.014.199,00**	**91.634.269.205,00**

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan **Rp546.717.104.899,00**

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp546.717.104.899,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2021 sebesar Rp508.263.876.971,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bagian Laba Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah	6.500.000.000,00	316.959.000,00
2	Bagian Laba PT. BPD Jateng	408.645.710.531,00	375.956.828.408,00
3	Bagian Laba PT. BPR BKK (PERSERODA) Se-Jawa Tengah	69.771.667.232,00	63.975.590.182,00
4	Bagian Laba PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)	-	-
5	Bagian Laba PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	7.621.727.841,00	6.812.844.537,00
6	Bagian Laba PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	2.445.643.698,00	3.325.376.041,00
7	Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida	3.198.101.180,00	2.989.250.618,00
8	Bagian Laba PT. PRPP	-	-
9	Bagian Laba PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah	9.024.857.185,00	15.651.337.104,00
10	Bagian Laba PT. Sarana Patra Hulu Cepu	-	-
11	Bagian Laba PT. Jamkrida	8.207.415.144,00	7.233.274.455,00
12	Bagian Laba PT. Jateng Petro Energi	31.301.982.088,00	32.002.416.626,00
	Jumlah	**546.717.104.899,00**	**508.263.876.971,00**

5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah — Rp2.117.287.575.454,00

Arus Masuk Kas dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.117.287.575.454,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2021 sebesar Rp2.355.108.484.231,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	-
2	Penerimaan Jasa Giro	14.585.286.961,00	33.421.665.370,00
3	Penerimaan Bunga	54.111.469.806,00	52.487.671.175,00
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15.890.000,00	8.612.000,00
5	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain	52.539.823.406,00	34.263.799.325,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.886.922.048,00	2.779.750.191,00
7	Pendapatan Denda Pajak	178.434.784.980,00	115.195.838.121,00
8	Pendapatan Denda Retribusi	193.690.851,00	181.042.060,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	611.752.000,00	-
10	Pendapatan dari Pengembalian	1.493.643.033,00	1.809.013.300,00
11	Penerimaan dari BLUD	1.809.050.418.298,00	2.106.839.090.275,00
12	Pendapatan Dari Hasil Temuan Pemeriksa	-	1.739.312.072,00
13	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	20.017.000,00	-
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	343.877.071,00	-
15	Penerimaan Lain-Lain	-	6.382.690.342,00
	Jumlah	**2.117.287.575.454,00**	**2.355.108.484.231,00**

5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak — Rp909.711.090.450,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp909.711.090.450,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2021 sebesar Rp1.023.258.872.325,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	66.189.247.793,00	78.170.445.518,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	560.482.715.387,00	690.318.309.644,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	283.039.127.270,00	254.770.117.163,00
	Jumlah	**909.711.090.450,00**	**1.023.258.872.325,00**

5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam — Rp18.989.623.430,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp18.989.623.430,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp12.586.758.109,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	7.367.506.020,00	9.386.722.285,00
2	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi (DR)	169.533.948,00	-
3	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	176.725.594,00	105.849.449,00
4	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	28.217.577,00	17.452.925,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	1.171.008.442,00	204.832.300,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	6.708.488.500,00	1.020.387.900,00
7	Bagi Hasil dari Panas Bumi	3.368.143.349,00	1.851.513.250,00
	Jumlah	**18.989.623.430,00**	**12.586.758.109,00**

5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum — Rp3.435.718.090.405,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.435.718.090.405,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp3.432.978.859.000,00.

5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus — Rp3.385.111.274.502,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.385.111.274.502,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp7.334.261.241.620,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**371.734.785.185,00**	**401.885.567.398,00**
-	DAK Bidang Pendidikan	230.469.645.393,00	204.019.889.120,00
-	DAK Bidang Kesehatan	37.731.575.276,00	99.424.571.254,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	46.503.957.400,00	39.801.657.780,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	11.099.152.400,00	9.301.772.343,00
-	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	28.130.594.000,00	13.409.579.190,00
-	DAK Bidang Pertanian	-	4.217.308.288,00
-	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.799.860.716,00	26.823.374.450,00
-	DAK Bidang Pariwisata	-	4.887.414.973,00
-	DAK Bidang Energi Sumber Daya Mineral	-	-

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
-	DAK Bidang Pasar	-	-
2	**Dana Alokasi Khusus Non Fisik**	**3.013.376.489.317,00**	**6.932.375.674.222,00**
-	Tambahan Penghasilan Guru	12.524.010.000,00	2.331.000.000,00
-	Bantuan Operasional Sekolah	1.987.260.551.320,00	5.821.222.770.000,00
-	Tunjangan Profesi Guru - PNSD	1.005.559.263.208,00	1.098.687.112.000,00
-	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	120.680.559,00	233.096.459,00
-	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	3.727.564.040,00	3.281.743.678,00
-	Bantuan Kependudukan dan Catatan Sipil	344.543.290,00	2.271.473.316,00
-	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	3.839.876.900,00	3.487.300.769,00
-	Dana Penyelenggaraan Kepariwisataan	-	861.178.000,00
	Jumlah	**3.385.111.274.502,00**	**7.334.261.241.620,00**

5.5.1.1.9. Dana Insentif Daerah **Rp61.352.500.000,00**

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Insentif Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp61.352.500.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp68.710.605.000,00.

5.5.1.1.10. Pendapatan Transfer Antar Daerah **Rp00,00**

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Transfer Antar Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp00,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp00,00.

5.5.1.1.11. Pendapatan Hibah **Rp92.161.740.403,00**

Arus Masuk Kas berupa Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp92.161.740.403,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp64.882.003.502,00.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	49.411.740.407,00	42.132.003.502,00
2	Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	22.749.999.996,00	22.750.000.000,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	20.000.000.000,00	-
	Jumlah	**92.161.740.403,00**	**64.882.003.502,00**

5.5.1.1.12. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **Rp272.461.085,00**

Arus Masuk Kas berupa Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp272.461.085,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp846.848.245,00.

5.5.1.2. Arus Keluar Kas **Rp22.236.598.867.324,00**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp22.236.598.867.324,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp24.396.179.782.589,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Belanja Pegawai	5.902.903.886.767,00	5.685.925.255.020,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.377.369.153.895,00	5.345.399.454.776,00
3	Belanja Subsidi	4.958.884.836,00	90.482.166,00
4	Belanja Hibah	2.092.761.564.803,00	5.728.982.384.318,00
5	Belanja Bantuan Sosial	78.894.181.648,00	66.180.255.190,00
6	Belanja Tidak Terduga	16.545.479.100,00	72.303.305.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	6.085.808.822.482,00	5.735.553.033.353,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	2.677.356.893.793,00	1.761.745.612.766,00
	Jumlah	**22.236.598.867.324,00**	**24.396.179.782.589,00**

5.5.1.2.1. Belanja Pegawai **Rp5.902.903.886.767,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.902.903.886.767,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp5.685.925.255.020,00.

5.5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp5.377.369.153.895,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.377.369.153.895,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp5.345.399.454.776,00.

5.5.1.2.3. Belanja Subsidi **Rp4.958.884.836,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Subsidi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp4.958.884.836,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp90.482.166,00.

5.5.1.2.4. Belanja Hibah **Rp2.092.761.564.803,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.092.761.564.803,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp5.728.982.384.318,00.

5.5.1.2.5. Belanja Bantuan Sosial **Rp78.894.181.648,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp78.894.181.648,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp66.180.255.190,00.

5.5.1.2.6. Belanja Tidak Terduga **Rp16.545.479.100,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp16.545.479.100,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp72.303.305.000,00.

5.5.1.2.7. Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota **Rp6.085.808.822.482,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp6.085.808.822.482,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp5.735.553.033.353,00.

5.5.1.2.8. Belanja Bantuan Keuangan **Rp2.677.356.893.793,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.677.356.893.793,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp1.761.745.612.766,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota	804.934.393.793,00	493.309.827.766,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	1.872.422.500.000,00	1.268.435.785.000,00
	Jumlah	**2.677.356.893.793,00**	**1.761.745.612.766,00**

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan **(Rp1.713.036.622.521,00)**

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.713.036.622.521,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar (Rp1.425.530.463.995,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	605.007.560,00	22.089.947.250,00
2	Arus Keluar Kas	1.713.641.630.081,00	1.447.620.411.245,00
	Jumlah	**(1.713.036.622.521,00)**	**(1.425.530.463.995,00)**

5.5.2.1. Arus Masuk Kas **Rp605.007.560,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp605.007.560,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp22.089.947.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pendapatan Penjualan atas Tanah	-	20.826.561.000,00
2	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	11.080.000,00	130.149.400,00
3	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	79.289.000,00	-
4	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	217.998.000,00	675.394.250,00
5	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	296.640.560,00	457.842.600,00
	Jumlah	**605.007.560,00**	**22.089.947.250,00**

5.5.2.1.1. Pendapatan Penjualan atas Tanah **Rp00,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp00,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp20.826.561.000,00.

5.5.2.1.2. Penjualan Peralatan dan Mesin **Rp11.080.000,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp11.080.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp130.149.400,00.

5.5.2.1.3. Penjualan Gedung dan Bangunan **Rp79.289.000,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp79.289.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp00,00.

5.5.2.1.4. Penjualan Aset Tetap Lainnya **Rp217.998.000,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp217.998.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp675.394.250,00.

5.5.2.1.5. Penjualan Aset Lainnya **Rp296.640.560,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp296.640.560,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp457.842.600,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas **Rp1.713.641.630.081,00**

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.713.641.630.081,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp1.447.620.411.245,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Belanja Tanah	17.346.322.716,00	79.135.275.975,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	767.027.589.289,00	578.353.949.251,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	359.726.308.741,00	330.679.148.402,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	475.441.543.110,00	351.328.654.582,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	94.099.866.225,00	108.123.383.035,00
6	Belanja Aset Lainnya	-	-
	Jumlah	**1.713.641.630.081,00**	**1.447.620.411.245,00**

5.5.2.2.1. Belanja Tanah **Rp17.346.322.716,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp17.346.322.716,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp79.135.275.975,00.

5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin **Rp767.027.589.289,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp767.027.589.289,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp578.353.949.251,00.

5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan **Rp359.726.308.741,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp359.726.308.741,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp330.679.148.402,00.

5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp475.441.543.110,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp475.441.543.110,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp351.328.654.582,00.

5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp94.099.866.225,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp94.099.866.225,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp108.123.383.035,00.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan **(Rp416.918.280.548,00)**

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp416.918.280.548,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar (Rp214.883.792.231,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	474.081.719.452,00	116.207.769,00
2	Arus Keluar Kas	891.000.000.000,00	215.000.000.000,00
	Jumlah	**(416.918.280.548,00)**	**(214.883.792.231,00)**

5.5.3.1. Arus Masuk Kas **Rp474.081.719.452,00**

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp474.081.719.452,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp116.207.769,00 terdiri dari:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Pencairan Dana Cadangan	-	-
2.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
3	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	81.719.452,00	106.519.175,00
4	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	-	9.688.594,00

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5	Penerimaan Kembali Investasi Permanen kepada BUMD	474.000.000.000,00	-
	Jumlah	**474.081.719.452,00**	**116.207.769,00**

5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan **Rp00,00**

Arus Masuk Kas dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah Nihil dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 adalah Nihil.

5.5.3.1.2. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan **Rp00,00**

Tidak ada Arus Masuk Kas dari Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021.

5.5.3.1.3. Penerimaan Kembali Pokok Piutang **Rp87.719.452,00**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pinjaman Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp87.719.452,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp106.519.175,00 yang merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	3.600.000,00	6.400.000,00
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	-
3	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM	-	-
4	Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan)	1.000.000,00	19.200.000,00
5	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	72.219.452,00	77.669.175,00
6	Penerimaan Dana Bergulir Gerakan Mapan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	4.900.000,00	3.250.000,00
	Jumlah	**81.719.452,00**	**106.519.175,00**

5.5.3.1.4. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir **Rp00,00**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp00,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp9.688.594,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	-
2	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	-
3	Penerimaan Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM	-	-
4	Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan)	-	-
5	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	-	9.688.594,00
6	Penerimaan Dana Bergulir Gerakan Mapan Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	-	-
	Jumlah	**-**	**9.688.594,00**

5.5.3.1.5. Penerimaan Kembali Investasi Permanen kepada BUMD Rp474.000.000.000,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Kembali Investasi Permanen kepada BUMD periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp474.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp00,00.

5.5.3.2. Arus Keluar Kas Rp891.000.000.000,00

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp891.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp215.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:.

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	400.000.000.000,00	200.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	491.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	Jumlah	**891.000.000.000,00**	**215.000.000.000,00**

5.5.3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan Rp400.000.000.000,00

Arus Keluar Kas untuk Pembentukan Dana Cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp400.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 adalah Rp200.000.000.000,00.

5.5.3.2.2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp491.000.000.000,00

Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp491.000.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp15.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	PT. Jateng Petro Energi	14.887.500.000,00	15.000.000.000,00
2	PT. BPD Jateng	375.000.000.000,00	-
3	PT. BPR BKK (PERSERODA) Se-Jawa Tengah	34.000.000.000,00	-
4	PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)	20.000.000.000,00	-
5	PT. PRPP	25.000.000.000,00	-
6	PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	22.112.500.000,00	-
	Jumlah	**491.000.000.000,00**	**15.000.000.000,00**

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran Rp136.266.410,00

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp136.266.410,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar (Rp161.016.074,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	724.885.514.404,00	901.199.806.552,00
2	Arus Keluar Kas	724.749.247.994,00	901.360.822.626,00
	Jumlah	**136.266.410,00**	**(161.016.074,00)**

5.5.4.1. Arus Masuk Kas Rp724.885.514.404,00

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp724.885.514.404,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp901.199.806.552,00 terdiri dari:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	724.571.099.601,00	901.046.407.823,00
2.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	-	18.040.000,00
3.	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	314.414.803,00	102.386.400,00
4	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	-	32.972.329,00
	Jumlah	**724.885.514.404,00**	**901.199.806.552,00**

5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Rp724.571.099.601,00

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp724.571.099.601,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp901.046.407.823,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Pajak-pajak	444.786.912.188,00	381.778.072.902,00
2.	IWP	166.639.925.644,00	345.646.908.164,00
3.	Taperum	-	-
4.	BPJS	113.144.261.769,00	173.621.426.757,00
	Jumlah	**724.571.099.601,00**	**901.046.407.823,00**

5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya Rp00,00

Arus Masuk Kas dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp00,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp18.040.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	18.040.000,00
	Jumlah	**-**	**18.040.000,00**

5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya Rp314.414.803,00

Arus Masuk Kas dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp314.414.803,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp102.386.400,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	17.710.000,00
2	Dinas Perhubungan	50.594.000,00	55.828.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.900.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	13.530.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1.108.000,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	12.310.400,00
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	263.820.803,00	-
	Jumlah	**314.414.803,00**	**102.386.400,00**

5.5.4.1.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah Rp00,00

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2022 sebesar Rp00,00 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp32.972.329,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2020 pada kas Bendahara Sekolah.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas Rp724.749.247.994,00

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp724.749.247.994,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp901.360.822.626,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	724.571.099.601,00	901.046.407.823,00
2	Kas di Bend Penerimaan Tahun Berjalan	177.410.000,00	314.414.803,00
3	Kas di Bend Pengeluaran	-	-
4	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	738.393,00	-
	Jumlah	**724.749.247.994,00**	**901.360.822.626,00**

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp724.571.099.601,00

Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp724.571.099.601,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp901.046.407.823,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Pajak-pajak	444.786.912.188,00	381.778.072.902,00
2.	IWP	166.639.925.644,00	345.646.908.164,00
3.	Taperum	-	-

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
4.	BPJS	113.144.261.769,00	173.621.426.757,00
	Jumlah	**724.571.099.601,00**	**901.046.407.823,00**

5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan-Tahun Berjalan Rp177.410.000,00

Arus Keluar Kas berupa kas di Bendahara Penerimaan yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp177.410.000,00 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp314.414.803,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Dinas Perhubungan	132.419.000,00	50.594.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.468.000,00	-
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.650.000,00	-
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	19.873.000,00	263.820.803,00
	Jumlah	**177.410.000,00**	**314.414.803,00**

5.5.4.2.3. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tahun Berjalan Rp00,00

Arus Keluar Kas berupa pengiriman kas ke Bendahara Pengeluaran yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum dipertanggungjawabkan dan disetor kembali ke Rekening Kas Daerah atau ke Kas Negara sebesar Rp00,00 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp00,00.

5.5.4.2.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah Rp738.393,00

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2022 sebesar Rp738.393,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2021 pada kas Bendahara Sekolah dan untuk tahun 2021 sebesar Rp00,00.

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas (Rp199.086.877.416,00)

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp199.086.877.416,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2021 sebesar Rp574.155.083.824,00 yang berasal dari:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	1.930.731.759.243,00	2.214.730.356.124
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(1.713.036.622.521,00)	(1.425.530.463.995)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	(416.918.280.548,00)	(214.883.792.231,00)
4.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	136.266.410,00	(161.016.074,00)
	Jumlah	**(199.086.877.416,00)**	**574.155.083.824**

5.5.6. Saldo Akhir Kas Rp1.236.291.592.535,00

Saldo Akhir Kas posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.236.291.592.535,00 sedangkan untuk tahun 2021 sebesar Rp1.435.378.469.951,00 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2022 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas BUD	398.435.833.644,00	362.643.956.586,00
2.	Saldo Awal Kas BLUD	991.964.597.859,00	437.713.567.521,00
3.	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah	44.978.038.448,00	60.865.862.020,00
4.	Kenaikan/Penurunan Kas	(199.086.877.416,00)	574.155.083.824,00
	Jumlah	**1.236.291.592.535,00**	**1.435.378.469.951,00**

5.5.7. Saldo Akhir Kas **Rp1.237.681.108.155,00**

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Sekolah dan Kas Lainnya pada posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.237.681.108.155,00 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp1.436.740.557.457,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)
1	Kas Di Kas Daerah	412.202.942.305,00	398.435.833.644,00
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	177.410.000,00	314.414.803,00
4	Kas Di Bendahara BLUD	803.488.749.247,00	992.730.293.369,00
5	Kas Di Bendahara Sekolah	21.812.006.603,00	45.260.015.641,00
6	Kas Lainnya	-	-
	Jumlah	**1.237.681.108.155,00**	**1.436.740.557.457,00**

Dari saldo akhir kas sebesar Rp1.237.681.108.155,00 tersebut, berupa SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp1.236.469.002.535,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.212.105.620,00. Selisih tersebut terdiri uang muka pasien di Rumah Sakit Rp779.237.357,00 dan Kas di Bendahara Sekolah karena pajak yang belum disetor tahun 2022 sebesar Rp321.278.400,00 dan sisa kas bantuan pemerintah tahun 2022 sebesar Rp111.589.863,00.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	38.908.675.268.489,02	36.397.640.492.434,77	2.511.034.776.054,25	6,90
2	Surplus/Defisit-LO	760.074.594.987,41	1.999.473.856.856,54	(1.239.399.261.869,13)	(61,99)
3	RK-PPKD	-	-	-	-
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	268.888.939.866,12	511.560.919.197,71	(242.671.979.331,59)	(47,44)
	Ekuitas Akhir	**39.937.638.803.342,55**	**38.908.675.268.489,02**	**1.028.963.534.853,53**	**2,64**

5.6.1 Ekuitas Awal **Rp38.908.675.268.489,02**

Saldo ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp38.908.675.268.489,02 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	6.910.177.353.230,36	(6.910.177.353.230,36)	(100,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.784.477.991.917,73	7.472.423.283.601,55	312.054.708.316,18	4,18
3	Dinas Kesehatan	524.676.286.848,15	483.551.327.661,49	41.124.959.186,66	8,50
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.214.138.050.969,72	868.310.767.705,29	345.827.283.264,44	39,83
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	821.791.313.198,57	631.528.523.911,38	190.262.789.287,19	30,13
6	RSUD Tugurejo Semarang	429.351.355.755,76	306.917.688.922,99	122.433.666.832,77	39,89
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	234.412.760.841,29	212.395.521.123,96	22.017.239.717,33	10,37
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	803.533.757.394,88	789.181.364.835,44	14.352.392.559,44	1,82
9	RSJD Surakarta	174.372.017.095,16	147.088.884.048,79	27.283.133.046,37	18,55
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	104.483.630.784,72	82.590.566.813,57	21.893.063.971,15	26,51
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	5.727.793.991.588,99	5.769.379.221.456,91	(41.585.229.867,92)	(0,72)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	6.021.338.925.963,22	6.018.830.273.125,86	2.508.652.837,36	0,04
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	27.270.537.410,42	27.444.429.864,56	(173.892.454,14)	(0,63)
14	Satuan Polisi Pamong Praja	19.043.102.730,80	20.143.780.512,13	(1.100.677.781,33)	(5,46)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.439.852.334,19	17.545.225.220,23	(105.372.886,04)	(0,60)
16	Dinas Sosial	251.208.351.757,31	256.190.436.140,46	(4.982.084.383,15)	(1,94)
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26.289.894.517,57	22.587.268.266,47	3.702.626.251,10	16,39
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	138.708.180.795,50	139.817.728.039,21	(1.109.547.243,71)	(0,79)
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	12.164.380.864,93	12.699.410.136,03	(535.029.271,10)	(4,21)
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	139.866.085.921,57	123.275.089.914,82	16.590.996.006,75	13,46
21	Dinas Ketahanan Pangan	15.238.492.921,84	15.242.053.671,59	(3.560.749,75)	(0,02)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	16.448.770.458,87	16.803.906.387,70	(355.135.928,83)	(2,11)
23	Dinas Perhubungan	361.719.250.466,77	330.046.158.417,09	31.673.092.049,68	9,60

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	40.712.293.496,35	42.266.582.314,10	(1.554.288.817,75)	(3,68)
25	Dinas Koperasi dan UMKM	41.407.355.946,86	41.211.433.007,21	195.922.939,65	0,48
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.623.098.955,98	15.472.306.530,48	(849.207.574,50)	(5,49)
27	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	858.747.991.199,37	795.674.996.615,24	63.072.994.584,13	7,93
28	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	32.010.895.117,92	33.513.908.446,25	(1.503.013.328,33)	(4,48)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	365.280.247.673,77	363.097.541.882,54	2.182.705.791,23	0,60
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	962.964.122.978,55	964.471.443.261,22	(1.507.320.282,67)	(0,16)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	502.484.198.788,84	517.199.890.933,55	(14.715.692.144,71)	(2,85)
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	113.172.415.923,89	116.522.370.941,10	(3.349.955.017,21)	(2,87)
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	97.494.420.803,24	100.955.944.674,66	(3.461.523.871,42)	(3,43)
34	Sekretariat Daerah	241.572.324.210,23	254.145.316.537,61	(12.572.992.327,38)	(4,95)
35	Sekretariat DPRD	51.302.280.519,54	55.082.954.658,72	(3.780.674.139,18)	(6,86)
36	Inspektorat	9.463.122.327,99	10.480.775.496,95	(1.017.653.168,96)	(9,71)
37	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	132.530.563.587,97	134.184.233.325,36	(1.653.669.737,39)	(1,23)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.777.263.487.691,77	1.950.360.342.884,18	(173.096.855.192,41)	(8,88)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.612.648.013.660,62	136.854.116.118,17	8.475.793.897.542,45	6.193,31
40	Badan Kepegawaian Daerah	14.144.684.325,14	15.342.803.598,74	(1.198.119.273,60)	(7,81)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	154.501.020.433,94	155.913.885.703,41	(1.412.865.269,47)	(0,91)
42	Badan Penghubung	20.585.748.309,09	20.719.382.497,40	(133.634.188,31)	(0,64)
	Jumlah	**38.908.675.268.489,02**	**36.397.640.492.434,77**	**2.511.034.776.054,25**	**6,90**

5.6.2 Surplus/Defisit – LO **Rp760.074.594.987,41**

Surplus/defisit – LO sebesar Rp760.074.594.987,41 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	5.507.132.872.351,50	(5.507.132.872.351,50)	(100,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(6.997.690.234.668,16)	(11.007.814.593.266,10)	4.010.124.358.597,90	(36,43)
3	Dinas Kesehatan	(731.555.274.616,91)	(779.761.759.881,18)	48.206.485.264,27	(6,18)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(241.154.774.594,69)	62.106.681.003,63	(303.261.455.598,32)	(488,29)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(141.245.846.566,59)	57.505.568.180,33	(198.751.414.746,92)	(345,62)
6	RSUD Tugurejo Semarang	(153.167.738.601,12)	(15.215.915.780,83)	(137.951.822.820,29)	906,63
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(82.611.554.878,12)	(41.619.128.624,98)	(40.992.426.253,14)	98,49
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(69.655.483.096,81)	(37.871.029.302,83)	(31.784.453.793,99)	83,93
9	RSJD Surakarta	(82.952.322.933,68)	(47.427.154.278,95)	(35.525.168.654,73)	74,90
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(56.655.276.980,98)	(24.854.626.679,63)	(31.800.650.301,35)	127,95
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(690.989.614.232,15)	(747.744.439.653,94)	56.754.825.421,80	(7,59)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	(187.599.857.345,41)	(153.619.281.025,55)	(33.980.576.319,86)	22,12
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(43.850.284.841,17)	(31.066.863.077,46)	(12.783.421.763,71)	41,15
14	Satuan Polisi Pamong Praja	(16.638.712.798,86)	(18.953.568.675,29)	2.314.855.876,43	(12,21)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(115.758.899.620,29)	(82.257.891.338,70)	(33.501.008.281,59)	40,73
16	Dinas Sosial	(338.856.062.498,21)	(212.065.956.832,15)	(126.790.105.666,06)	59,79
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(23.524.636.753,13)	(19.266.043.984,91)	(4.258.592.768,21)	22,10
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(96.662.964.183,62)	(92.086.215.333,19)	(4.576.748.850,43)	4,97
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(20.656.223.581,00)	(20.423.387.259,10)	(232.836.321,90)	1,14
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(185.953.025.852,01)	(179.305.344.921,45)	(6.647.680.930,56)	3,71
21	Dinas Ketahanan Pangan	(39.363.111.107,69)	(32.875.705.964,40)	(6.487.405.143,29)	19,73
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(22.259.629.169,61)	(24.706.950.313,85)	2.447.321.144,24	(9,91)
23	Dinas Perhubungan	(144.311.780.405,08)	(148.844.082.696,64)	4.532.302.291,56	(3,04)
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	(107.604.097.749,88)	(101.602.495.088,41)	(6.001.602.661,47)	5,91
25	Dinas Koperasi dan UMKM	(59.521.095.801,94)	(43.675.813.134,28)	(15.845.282.667,66)	36,28
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(19.719.626.854,83)	(18.371.597.889,53)	(1.348.028.965,30)	7,34
27	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	(205.849.097.929,57)	(196.644.066.332,56)	(9.205.031.597,01)	4,68
28	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(31.535.800.105,39)	(32.339.441.577,37)	803.641.471,98	(2,49)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	(69.914.512.957,27)	(102.512.341.306,19)	32.597.828.348,92	(31,80)
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(178.807.202.444,29)	(183.324.073.371,59)	4.516.870.927,30	(2,46)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(102.810.126.933,97)	(75.753.846.920,33)	(27.056.280.013,64)	35,72
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(85.725.775.419,35)	(71.955.056.755,30)	(13.770.718.664,05)	19,14
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(95.005.379.284,90)	(76.278.374.669,85)	(18.727.004.615,05)	24,55
34	Sekretariat Daerah	(626.731.569.373,36)	(598.101.113.128,15)	(28.630.456.245,21)	4,79
35	Sekretariat DPRD	(338.672.427.801,99)	(239.409.300.090,74)	(99.263.127.711,25)	41,46
36	Inspektorat	(32.955.110.482,82)	(30.809.929.161,92)	(2.145.181.320,90)	6,96
37	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(51.190.945.702,65)	(39.866.635.755,35)	(11.324.309.947,30)	28,41
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	13.756.656.549.079,60	11.993.584.758.188,50	1.763.071.790.891,06	14,70
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(394.139.606.838,86)	42.619.323.172,02	(436.758.930.010,89)	(1.024,79)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(52.587.514.711,86)	(84.665.065.005,61)	32.077.550.293,75	(37,89)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	(42.727.316.469,47)	(32.580.121.571,47)	(10.147.194.898,00)	31,15
42	Badan Penghubung	(17.971.437.904,50)	(17.806.135.389,72)	(165.302.514,78)	0,93
	Jumlah	**760.074.594.987,41**	**1.999.473.856.856,54**	**(1.239.399.261.869,13)**	**(61,99)**

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar — Rp268.888.939.866,12

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp268.888.939.866,12 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Kas	(738.393,00)	32.972.328,65	(33.710.721,65)	(102,24)
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	133.602.485.134,00	207.027.275.428,62	(73.424.790.294,62)	(35,47)
3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	(162.114.289,77)	(562.386.694.925,14)	562.224.580.635,37	(99,97)
4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	193.681.017.147,88	(193.681.017.147,88)	(100,00)
5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	-	-	-	-
6	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen	-	-	-	-
7	Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen	-	567.938.674.324,21	(567.938.674.324,21)	(100,00)
8	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	119.273.473.855,00	139.112.653.436,00	(19.839.179.581,00)	(14,26)
9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	18.743.562.212,44	(33.829.823.867,00)	52.573.386.079,44	(155,41)
10	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(4.367.995.535,00)	(4.997.267.920,00)	629.272.385,00	(12,59)
11	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	(100.352.782,51)	(80.105.975,83)	(20.246.806,68)	25,28
12	Koreksii/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	1.900.619.664,95	5.008.727.119,30	(3.108.107.454,35)	(62,05)
13	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai	-	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
14	Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa	-	39.567.101,64	(39.567.101,64)	(100,00)
15	Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain	0,01	(0,62)	0,61	(98,56)
	Jumlah	**268.888.939.866,12**	**511.560.919.197,71**	**(242.671.979.331,59)**	**(47,44)**

5.6.3.1 Koreksi/Penyesuaian Kas — (Rp738.393,00)

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar (Rp738.393,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(738.393,00)	32.972.329,00	(33.710.722,00)	(102,24)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	(0,35)	0,35	(100,00)
	Jumlah	**(738.393,00)**	**32.972.328,65**	**(33.710.721,65)**	**(102,24)**

Koreksi/Penyesuaian Kas merupakan Koreksi/Penyesuaian Kas pada Dinas Pendidikan disebabkan oleh koreksi atas kesalahan pengakuan saldo kas di Bendahara Sekolah atas dana BOS dan BOP Tahun 2021 sebesar (Rp738.393,00)

5.6.3.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang **Rp133.602.485.134,00**

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesar Rp133.602.485.134,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	129.846.906.291,00	(129.846.906.291,00)	(100,00)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	39.404.418.387,00	66.053.944.345,00	(26.649.525.958,00)	(40,35)
3	RSUD Tugurejo Semarang	(51.257.949,00)	(91.758.783,00)	40.500.834,00	(44,14)
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	(1.100.000,00)	1.100.000,00	(100,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(407.328.800,00)	(77.659.555,00)	(329.669.245,00)	424,51
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	11.296.943.130,62	(11.296.943.130,62)	(100,00)
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	94.656.653.496,00	-	94.656.653.496,00	-
	Jumlah	**133.602.485.134,00**	**207.027.275.428,62**	**(73.424.790.294,62)**	**(35,47)**

Penyebab Koreksi/Penyesuaian Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp39.404.418.387,00 disebabkan oleh koreksi tambah piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp40.852.036.677,00 dan koreksi kurang piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar (Rp1.447.618.290,00) dengan rincian sebagai berikut :

	PENYESUAIAN KLAIM		PENJELASAN KOREKSI
	Koreksi (+)	Koreksi (-)	
Piutang Pasien Umum			
Pasien TB - MDR	81.193.125,00	20.882.780,00	Koreksi tambah senilai Rp.81.193.125 yang merupakan klaim Pasien TB-MDR tahun 2021 terverifikasi pada tahun 2022 yang belum tercatat di piutang 2021 dan disesuaikan pada tahun 2022
			Koreksi Kurang senilai Rp.20.882.780 dikarenakan verifikasi klaim piutang TB-MDR 2021 pada saat pembayaran klaim pada tahun 2022
Piutang Pasien Jaminan			
BPJS	15.323.147.030,00	-	Koreksi tambah senilai Rp.15.323.147.030 yang merupakan klaim BPJS tahun 2021 terverifikasi pada tahun 2022 yang belum tercatat di piutang 2021 dan disesuaikan pada tahun 2022
JAMKESDA KAB	16.101.211,00	-	Koreksi tambah senilai Rp.16.101.211 yang merupakan klaim Jamkesda Kab. tahun 2021 terverifikasi pada tahun 2022 yang belum tercatat di piutang 2021 dan disesuaikan pada tahun 2022
Inhealth	87.084.765,00	-	Koreksi tambah senilai Rp.87.084.765 yang merupakan klaim Inhealt tahun 2021 terverifikasi pada tahun 2022 yang belum tercatat di piutang 2021 dan disesuaikan pada tahun 2022

	PENYESUAIAN KLAIM		PENJELASAN KOREKSI
	Koreksi (+)	**Koreksi (-)**	
Jaminan Perusahaan	547.820.026,00	-	Koreksi tambah senilai Rp.547.820.026 yang merupakan klaim Jaminan Perusahaan tahun 2021 terverifikasi pada tahun 2022 yang belum tercatat di piutang 2021 dan disesuaikan pada tahun 2022
Jasa Raharja	-	54.309.510,00	Koreksi Kurang senilai Rp.54.309.510 dikarenakan verifikasi klaim piutang Jasa Raharja 2021 pada saat pembayaran pada tahun 2022
Covid	24.796.690.520,00	1.372.426.000,00	Koreksi tambah senilai Rp.24.796.690.520 yang merupakan klaim Covid tahun 2021 terverifikasi pada tahun 2022 yang belum tercatat di piutang 2021 dan disesuaikan pada tahun 2022
			Koreksi kurang senilai Rp.1.372.426.000 dikarenakan verifikasi ulang piutang Covid 2021 dari Kemenkes pada tahun 2022
	40.852.036.677,00	**1.447.618.290,00**	

2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Tugurejo Semarang sebesar (Rp51.257.949,00) karena adanya koreksi tambah piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp181.055,00 dan koreksi kurang atas piutang yang sama sebesar (Rp51.439.004,00) dengan rincian sebagai berikut :

PENJELASAN KOREKSI	**Koreksi (+)**	**Koreksi (-)**
Pasien Umum	**-**	**13,00**
koreksi kurang piutang pasien umum tahun 2021		13,00
Indosat	**-**	**26.623.800,00**
piutang tgl 17-Des-2012 setelah konfirmasi ternyata bukan pegawai Indosat		26.623.800,00
Kimia Farma	**-**	**7.286.550,00**
piutang tgl 25-Maret-2014 setelah konfirmasi ternyata bukan pegawai Indosat		7.286.550,00
Apparel One	**-**	**3.893.553,00**
piutang tgl 11-Sept-2014 setelah konfirmasi ternyata bukan pegawai Indosat		78.103,00
piutang tgl 9-Mei-2016 setelah konfirmasi ternyata bukan pegawai Indosat		3.815.450,00
Taspen	**-**	**3.063.750,00**
piutang tgl 11-Juni-2015 setelah konfirmasi tidak diakui sebagai piutang Taspen karena Taspen baru dimulai tgl 1 Juli 2015		3.063.750,00
KNCV Dinkes Prov Jateng	**-**	**2.391.348,00**
piutang tgl 1-Okt-2020 setelah konfirmasi menyatakan mereka tidak menerima berkas tagihan klaimnya		2.200.000,00
piutang tgl 11-Juni-2021 tidak memenuhi syarat klaim		25.000,00
piutang tgl 19-Juli-2021 tidak memenuhi syarat klaim		100.000,00
piutang tgl 7-Des-2021 tidak memenuhi syarat klaim		66.348,00
RS Permata Medika	**-**	**220.956,00**
piutang tgl 7-Okt-2021 setelah konfirmasi ternyata sudah dibayar di tahun 2021 tetapi belum dikurangkan di catatan piutang		218.056,00

PENJELASAN KOREKSI	Koreksi (+)	Koreksi (-)
piutang tgl 25-Nov-2021 biaya administrasi bank		2.900,00
RSJ Hermina Pandanaran	**-**	**4.375.000,00**
piutang tgl 29-Juli-2021 dobel klaim		4.375.000,00
Jasa Raharja	**150.505,00**	**1.306.938,00**
piutang tgl 12-Mar-2021 penagihan melebihi platform Jasa Raharja		1.256.938,00
piutang tgl 10-Des-2021 selisih lebih klaim	150.505,00	
piutang tgl 20-Des-2021 tidak memenuhi syarat klaim		50.000,00
BPJS Ketenagakerjaan (JKK)	**30.550,00**	**2.277.096,00**
piutang tgl10-Feb-2021 setelah konfirmasi ternyata tidak ditanggung JKK karena perusahaan non aktiv		2.277.096,00
piutang tgl 8-Mei-2017 selisih lebih klaim	7,00	
piutang tgl 30-Mar-2019 selisih lebih klaim	5,00	
piutang tgl 30-Apr-2019 selisih lebih klaim	4,00	
piutang tgl 30-Mei-2019 selisih lebih klaim	7,00	
piutang tgl 30-Ags-2019 selisih lebih klaim	1,00	
piutang tgl 30-Okt-2019 selisih lebih klaim	9,00	
piutang tgl 10-Feb-2021 selisih lebih klaim	8,00	
piutang tgl 21-Des-2021 selisih lebih klaim	30.509,00	
JUMLAH	**181.055,00**	**51.439.004,00**

3. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi sebesar (Rp407.328.800,00) merupakan koreksi kurang atas piutang pasien jaminan BPJS dengan rincian sebagai berikut :

	PENYESUAIAN KLAIM	
	Koreksi (-)	Keterangan
PIUTANG ASURANSI	**407.328.800,00**	
Covid September Pending Rawat Inap 2021	407.298.000,00	Koreksi terjadi karena pasien atas nama Latif Jauhari ternyata mengidap komorbid (Tidak hanya Covid). Sedangkan pada klaim senilai Rp407.298.000 yang diajukan, Latif Jauhari dikategorikan sebagai penderita Covid murni. Sehingga RS melakukan pengajuan klaim ulang senilai Rp415.298.000. Klaim atas pasien yang menderita Covid + Komorbid lebih besar dibandingkan dengan pasien yang hanya menderita Covid murni
Covid September 2021 Dispute RI		Pengajuan ulang klaim atas nama pasien Latif Jauhari
Klaim Oktober 2021 Pending Rawat Inap	2.900,00	Koreksi Biaya Administrasi
Klaim Oktober 2021 Obat	2.900,00	Koreksi Biaya Administrasi
Klaim Desember 2021 Rawat Jalan	25.000,00	Koreksi Biaya Administrasi
TOTAL PIUTANG	**407.328.800,00**	

4. Koreksi tambah ekuitas di BPKAD selaku SKPKD sebesar Rp94.656.653.496,00 karena:
   - Koreksi tambah ekuitas atas pengakuan kurang/lebih salur atas transfer pusat-dana perimbangan Tahun 2021 berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.07/2022 sebesar Rp102.150.147.692,00.
   - Koreksi kurang ekuitas atas kurang/lebih salur transfer-dana perimbangan Tahun 2021 sebesar

(Rp7.458.067.896,00) berdasarkan PMK Nomor 127/PMK.07/2022.

- Koreksi kurang ekuitas atas koreksi saldo awal Tahun 2022 atas Piutang Lainnya berupa Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar (Rp35.426.300,00).

5.6.3.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang (Rp162.114.289,77)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp162.114.289,77) merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	195.375.649,01	(195.375.649,01)	(100,00)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(199.577.233,77)	(421.977.894,30)	222.400.660,53	(52,70)
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.036.644,00	-	2.036.644,00	-
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	(562.160.092.679,85)	562.160.092.679,85	(100,00)
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.426.300,00	-	35.426.300,00	-
	Jumlah	**(162.114.289,77)**	**(562.386.694.925,14)**	**562.224.580.635,37**	**(99,97)**

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar (Rp199.577.233,77) karena penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
2. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten sebesar Rp2.036.644,00 karena penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
3. Koreksi kurang ekuitas di BPKAD selaku SKPKD merupakan koreksi Piutang Lainnya berupa Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat yang sudah tidak digulirkan lagi sebesar Rp35.426.300,00.

5.6.3.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Persediaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	12.105.613.830,00	(12.105.613.830,00)	(100,00)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	10.932.416.200,00	(10.932.416.200,00)	(100,00)
3	RSUD Tugurejo Semarang	-	8.095.160.327,81	(8.095.160.327,81)	(100,00)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	2.464.404.512,34	(2.464.404.512,34)	(100,00)
5	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	1.177.646.119,98	(1.177.646.119,98)	(100,00)
6	RSJD Surakarta	-	649.632.157,30	(649.632.157,30)	(100,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	1.257.995.800,00	(1.257.995.800,00)	(100,00)
8	Dinas Kesehatan	-	153.269.198.009,93	(153.269.198.009,93)	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	1.347.957.730,00	(1.347.957.730,00)	(100,00)
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	937.777.260,52	(937.777.260,52)	(100,00)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	1.443.215.200,00	(1.443.215.200,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**193.681.017.147,88**	**(193.681.017.147,88)**	**(100,00)**

5.6.3.5 Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**

5.6.3.6 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Investasi Non Permanen sebesar Rp0,00 merupakan koreksi atas reklasifikasi dana bergulir yang sudah tidak digulirkan lagi pada SKPKD.

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**

5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Investasi Permanen sebesar Rp0,00 merupakan koreksi pada SKPKD atas perubahan nilai Investasi pada BUMD berdasarkan perhitungan dengan Metode Ekuitas.

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	567.938.674.324,21	(567.938.674.324,21)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-		-	-
	Jumlah	**-**	**567.938.674.324,21**	**(567.938.674.324,21)**	**(100,00)**

5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap Rp119.273.473.855,00

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar Rp119.273.473.855,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	2.556.662.772,00	(2.556.662.772,00)	(100,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.712.085.594,00	93.932.180.108,00	(65.220.094.514,00)	(69,43)
3	Dinas Kesehatan	(2.916.616.804,00)	(4.151.564.309,00)	1.234.947.505,00	(29,75)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	1.220.584.575,00	(1.220.584.575,00)	(100,00)
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.619.236.916,00	2.126.870.579,00	492.366.337,00	23,15
6	RSUD Tugurejo Semarang	-	3.333.550.000,00	(3.333.550.000,00)	(100,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	62.142.184,00	1.181.198.369,00	(1.119.056.185,00)	(94,74)
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	280.813.000,00	484.730.732,00	(203.917.732,00)	(42,07)
9	RSJD Surakarta	-	2.305.809.839,00	(2.305.809.839,00)	(100,00)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	517.913.627,00	(517.913.627,00)	(100,00)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	44.437.098.936,00	271.422.000,00	44.165.676.936,00	16.271,96
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	29.402.507.000,00	667.693.835,00	28.734.813.165,00	4.303,59
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	565.900.000,00	(565.900.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-		-	-
15	Dinas Sosial	545.900.000,00	1.143.338.346,00	(597.438.346,00)	(52,25)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.357.157.770,00	15.739.733.107,00	(11.382.575.337,00)	(72,32)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.952.093.570,00	(1.952.093.570,00)	(100,00)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	-	-	-	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	25.624.543.788,00	(25.624.543.788,00)	(100,00)
20	Dinas Ketahanan Pangan	-	(90.640.000,00)	90.640.000,00	(100,00)
21	Dinas Perhubungan	300.000,00	500.976.687,00	(500.676.687,00)	(99,94)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	1.964.507.000,00	(1.964.507.000,00)	(100,00)
23	Dinas Koperasi dan UMKM	-	-	-	-
24	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	1.723.325.377,00	6.993.621.600,00	(5.270.296.223,00)	(75,36)
25	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	108.128.000,00	-	108.128.000,00	-
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.653.117.634,00	1.341.000.000,00	3.312.117.634,00	246,99
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.105.103.350,00	-	3.105.103.350,00	-
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(63.815.100,00)	(13.999.645.000,00)	13.935.829.900,00	(99,54)
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	(232.329.100,00)	232.329.100,00	(100,00)
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	2.452.000.000,00	(2.452.000.000,00)	(100,00)
31	Sekretariat Daerah	236.500.000,00	(10.849.302.170,00)	11.085.802.170,00	(102,18)
32	Sekretariat DPRD	1.298.000.000,00	(2.306.546.744,00)	3.604.546.744,00	(156,27)
33	Inspektorat	-	577.548.835,00	(577.548.835,00)	(100,00)
34	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	(49.065.000,00)	49.065.000,00	(100,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	457.211.750,00	(415.082.750,00)	872.294.500,00	(210,15)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	229.678.248,00	3.982.722.140,00	(3.753.043.892,00)	(94,23)
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
38	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	(229.773.000,00)	229.773.000,00	(100,00)
39	Badan Penghubung	25.600.000,00	-	25.600.000,00	-
	Jumlah	**119.273.473.855,00**	**139.112.653.436,00**	**(19.839.179.581,00)**	**(14,26)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:

NO	SKPD	KOREKSI TAMBAH												TOTAL
		BARANG TEMUAN ATAU KOREKSI TAMBAH	DARI BELANJA BMD	DARI BELANJA BOS	DARI BELANJA BOP	DARI BELANJA DAK	DARI HIBAH PUSAT	DARI HIBAH DAERAH	DARI HIBAH USAHA MANDIRI	KOREKSI VOLUME ASET	KOREKSI NILAI ASET	DARI HIBAH MASYARAKAT	DARI EKTRAKOMTABLE	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	60.220.424.205	-	285.582.750	916.137.400	42.460.000	5.137.556.838	1.912.682.703	7.164.406.326	35.146.153.507	2.762.090.945	-	25.235.000	113.612.729.674
2	Dinas Kesehatan	37.150.700	15.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.050.700
3	Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo	761.393.600	-	-	-	-	300.232.178	1.263.240.000	-	47.419.637.350	-	462.737.138	-	50.207.240.266
4	Rsud Tugurejo Semarang	-	-	-	-	-	-	-	-	34.274.973	-	-	-	34.274.973
5	Rsud Kelet Donorojo	280.813.000	-	-	-	-	-	-	-	14.657.198.660	-	-	-	14.938.011.660
6	Rsud Dr. Aminogondo Utomo	62.142.184	-	-	-	-	-	-	-	64.800.000	-	-	-	126.942.184
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya	44.437.098.936	-	-	-	-	-	-	-	302.352.000	-	-	-	44.739.450.936
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	29.498.687.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.498.687.000
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana	-	-	-	-	-	4.357.157.770	-	-	-	-	-	-	4.357.157.770
10	Dinas Sosial	628.234.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	628.234.000
11	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	71.636.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71.636.000
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	9.430.000	-	-	-	9.430.000
13	Dinas Perhubungan	23.555.526.180	-	-	-	-	-	-	-	571.097.867	526.684.550	-	-	24.653.308.597
14	Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	562.895.801.865	-	-	-	-	-	-	-	5.793.300.417	-	-	-	568.689.102.282
15	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	108.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108.128.000
16	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.148.485.000	-	-	-	-	-	-	-	-	3.504.632.616	-	18	4.653.117.634
17	Dinas Pertanian Dan Perkebunan	3.411.103.350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.411.103.350
18	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-	-	-	-	1.443.132.750	-	-	-	1.443.132.750
19	Sekretariat Daerah	236.500.000	-	-	-	-	-	-	-	2.220.591.600	-	-	-	2.457.091.600
20	Sekretariat Dprd	1.298.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.298.000.000
21	SKPKD	229.678.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229.678.248
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	826.447.200	-	-	-	826.447.200
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	457.211.750	-	-	-	-	-	-	-	342.268.000	-	-	-	799.479.750
24	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	94.283.000	-	-	-	94.283.000
25	Badan Penghubung	159.268.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159.268.000
26	Inspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-	99.186.440	-	-	-	99.186.440
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	111.870.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111.870.000
	Jumlah	729.609.152.018	15.900.000	285.582.750	916.137.400	42.460.000	9.794.946.786	3.175.922.703	7.164.406.326	109.024.153.764	6.793.408.111	462.737.138	25.235.018	867.310.042.014

SKPD	KOREKSI KURANG	KOREKSI VOLUME ASET	KOREKSI NILAI ASET	KOREKSI NILAI KURANG	TOTAL
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	46.881.098.667,00	35.403.576.468,00	2.615.968.945,00	-	84.900.644.080,00
Dinas Kesehatan	2.969.667.504,00	-	-	-	2.969.667.504,00
Rsud Prof. Dr. Margono Soekarjo	168.366.000,00	47.419.637.350,00	-	-	47.588.003.350,00
Rsud Tugurejo Semarang	-	34.274.973,00	-	-	34.274.973,00
Rsud Kelet Donorojo	-	14.657.198.660,00	-	-	14.657.198.660,00
Rsud Dr. Aminogondo Utomo	-	64.800.000,00	-	-	64.800.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya	-	302.352.000,00	-	-	302.352.000,00
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang	-	-	-	96.180.000,00	96.180.000,00
Dinas Sosial	82.334.000,00	-	-	-	82.334.000,00
Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	-	71.636.000,00	-	-	71.636.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	9.430.000,00	-	-	9.430.000,00
Dinas Perhubungan	24.081.910.730,00	571.097.867,00	-	-	24.653.008.597,00
Dinas Kepemudaan, Olah Raga Dan Pariwisata	490.569.033.008,00	76.396.743.897,00	-	-	566.965.776.905,00
Dinas Pertanian Dan Perkebunan	306.000.000,00	-	-	-	306.000.000,00
Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	63.815.100,00	1.443.132.750,00	-	-	1.506.947.850,00
Sekretariat Daerah	-	2.220.591.600,00	-	-	2.220.591.600,00
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	-	826.447.200,00	-	-	826.447.200,00
Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	342.268.000,00	-	-	342.268.000,00
Badan Kepegawaian Daerah	-	94.283.000,00	-	-	94.283.000,00
Badan Penghubung	-	133.668.000,00	-	-	133.668.000,00
Inspektorat	-	99.186.440,00	-	-	99.186.440,00
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	111.870.000,00	-	-	-	111.870.000,00
Jumlah	**565.234.095.009,00**	**180.090.324.205,00**	**2.615.968.945,00**	**96.180.000,00**	**748.036.568.159,00**

5.6.3.9 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Rp18.743.562.212,44

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar Rp18.743.562.212,44 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	(405.086.772,01)	405.086.772,01	(100,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.841.405.844,00	(16.125.517.872,76)	24.966.923.716,76	(154,83)
3	Dinas Kesehatan	993.281.085,48	(611.557.820,09)	1.604.838.905,57	(262,42)
4	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	587.294.405,33	492.665.137,68	94.629.267,65	19,21
5	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(2.461.779.130,86)	(247.810.869,88)	(2.213.968.260,98)	893,41
6	RSUD Tugurejo Semarang	(52.816.335,34)	(458.536.475,21)	405.720.139,87	(88,48)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	220.012.000,00	(147.387.295,03)	367.399.295,03	(249,27)
8	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	(1.496.293.489,70)	(105.149.079,62)	(1.391.144.410,08)	1.323,02
9	RSJD Surakarta	(4.666.666,67)	(432.596.441,65)	427.929.774,98	(98,92)
10	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(4.666.666,67)	30.542.493,78	(35.209.160,45)	(115,28)
11	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(24.944.093,33)	(459.944.676,96)	435.000.583,63	(94,58)
12	Dinas PU Sumber Daya Air dan Tata Ruang	-	(667.693.835,09)	667.693.835,09	(100,00)
13	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	(0,01)	0,01	(100,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
14	Satuan Polisi Pamong Praja	337.497.195,00	(565.900.000,04)	903.397.195,04	(159,64)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(272.175.694,22)	14.583,33	(272.190.277,55)	(1.866.448,04)
16	Dinas Sosial	(1.129.989.965,22)	(1.143.338.346,00)	13.348.380,78	(1,17)
17	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.904.232,93	(10.047.561.048,99)	10.066.465.281,92	(100,19)
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(15.942.789,67)	(1.761.006.464,19)	1.745.063.674,52	(99,09)
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(9.114.000,00)	-	(9.114.000,00)	-
20	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	60.526.300,00	(3.491.109.364,80)	3.551.635.664,80	(101,73)
21	Dinas Ketahanan Pangan	-	(0,02)	0,02	(100,00)
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	9.430.000,00	0,02	9.429.999,98	47.149.999.900,00
23	Dinas Perhubungan	1.808.444.886,56	13.206.822,32	1.795.238.064,24	13.593,26
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	357.950.000,00	(1.515.110.500,00)	1.873.060.500,00	(123,63)
25	Dinas Koperasi dan UMKM	(11.531.148.356,52)	(0,07)	(11.531.148.356,45)	16.473.069.080.642,90
26	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	0,03	(0,03)	(100,00)
27	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	5.246.159.470,21	(1.154.514.920,64)	6.400.674.390,85	(554,40)
28	Dinas Arsip Daerah dan Perpustakaan	(67.969.266,66)	0,04	(67.969.266,70)	(169.923.166.750,00)
29	Dinas Kelautan dan Perikanan	107.741.346,90	(1.305.843.750,10)	1.413.585.097,00	(108,25)
30	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	(0,08)	0,08	(100,00)
31	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	201.554.977,82	399.900.379,62	(198.345.401,80)	(49,60)
32	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	181.729.254,16	(235.093.540,91)	416.822.795,07	(177,30)
33	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	(1.882.892.262,56)	1.882.892.262,56	(100,00)
34	Sekretariat Daerah	1.716.001.396,85	8.282.717.318,77	(6.566.715.921,92)	(79,28)
35	Sekretariat DPRD	(81.254.112,50)	2.121.362.618,68	(2.202.616.731,18)	(103,83)
36	Inspektorat	99.186.440,00	(577.548.835,04)	676.735.275,04	(117,17)
37	Badan Perencana, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	108.746.402,40	65.454.999,96	43.291.402,44	66,14
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(577.019.718,61)	313.707.165,36	(890.726.883,97)	(283,94)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.181.459.748,02	(2.208.195.214,92)	17.389.654.962,94	(787,51)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(204.561.522,92)	-	(204.561.522,92)	-

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
41	Badan Penghubung	600.579.035,67	0,08	600.579.035,59	750.723.794.487,50
	Jumlah	**18.743.562.212,44**	**(33.829.823.867,00)**	**52.573.386.079,44**	**(155,41)**

5.6.3.10 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya (Rp4.367.995.535,00)

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp4.367.995.535,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	(455.999.999,95)	455.999.999,95	(100,00)
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(345.214.485,00)	(281.196.110,00)	(64.018.375,00)	22,77
3	Dinas Kesehatan	(15.900.000,00)	(74.000.000,00)	58.100.000,00	(78,51)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	(626.904.233,00)	626.904.233,00	(100,00)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	(697.940.750,00)	697.940.750,00	(100,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	62.000.000,00	(62.000.000,00)	(100,00)
7	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(523.590.000,00)	-	(523.590.000,00)	-
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	291.644.000,00	(291.644.000,00)	(100,00)
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	114.500.000,00	(114.500.000,00)	(100,00)
10	Dinas Sosial	-	(3.754.560.827,00)	3.754.560.827,00	(100,00)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.874.000,00	74.000.000,00	76.874.000,00	103,88
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	414.385.000,00	(414.385.000,00)	(100,00)
13	Dinas Perhubungan	48.000.000,00	66.000.000,00	(18.000.000,00)	(27,27)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	(38.615.000,00)	38.615.000,00	(100,00)
15	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	(125.800.000,00)	125.800.000,00	(100,00)
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(3.125.022.700,00)	-	(3.125.022.700,00)	-
17	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(45.683.500,00)	98.069.999,95	(143.753.499,95)	(146,58)
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(630.000.000,00)	(116.300.000,00)	(513.700.000,00)	441,70
19	Badan Kepegawaian Daerah	118.541.150,00		118.541.150,00	-
20	Badan Penghubung	-	53.450.000,00	(53.450.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**(4.367.995.535,00)**	**(4.997.267.920,00)**	**629.272.385,00**	**(12,59)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total
		Barang Temuan/Koreksi Tambah ATB	Koreksi Aset Usang/Rusak/Tidak Digunakan	
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	15.800.000,00	361.014.485,00	(345.214.485,00)
2	Dinas Kesehatan	(15.900.000,00)	-	(15.900.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya	-	523.590.000,00	(523.590.000,00)
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	150.874.000,00	-	150.874.000,00
5	Dinas Perhubungan	48.000.000,00	-	48.000.000,00
6	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	-	3.125.022.700,00	(3.125.022.700,00)
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	630.000.000,00	(630.000.000,00)
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	45.683.500,00	(45.683.500,00)
9	Badan Kepegawaian Daerah	118.541.150,00	-	118.541.150,00
Jumlah		**317.315.150,00**	**4.685.310.685,00**	**(4.367.995.535,00)**

5.6.3.11 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi (Rp100.352.782,51)

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp100.352.782,51) merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	(183.866.675,00)	183.866.675,00	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	1.083.333,33	-	1.083.333,33	-
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	458.749.982,51	(458.749.982,51)	(100,00)
4	RSJD Surakarta	-	95.351.666,67	(95.351.666,67)	(100,00)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	(62.000.000,00)	62.000.000,00	(100,00)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	(207.497.866,67)	207.497.866,67	(100,00)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(54.391.666,67)	54.391.666,67	(100,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	(53.583.333,33)	53.583.333,33	(100,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(43.845.216,67)		(43.845.216,67)	-
10	Dinas Ketahanan Pangan	-	(171.723.583,33)	171.723.583,33	(100,00)
11	Dinas Perhubungan	(9.600.000,00)	(64.900.000,00)	55.300.000,00	(85,21)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	19.785.416,66	(19.785.416,66)	(100,00)
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	(96.435.500,00)	96.435.500,00	(100,00)
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	116.300.000,00	(116.300.000,00)	(100,00)
15	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	165.974.750,00	(165.974.750,00)	(100,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
16	Badan Kepegawaian Daerah	(47.990.899,17)		(47.990.899,17)	-
17	Badan Penghubung	-	(41.869.166,67)	41.869.166,67	(100,00)
	Jumlah	**(100.352.782,51)**	**(80.105.975,83)**	**(20.246.806,68)**	**25,28**

5.6.3.12 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya **Rp1.900.619.664,95**

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar Rp1.900.619.664,95 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	348.143.235,00	604.686.610,00	(256.543.375,00)	(42,43)
2	Dinas Kesehatan	(0,01)	25.160.000,00	(25.160.000,01)	(100,00)
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	697.940.750,00	(697.940.750,00)	(100,00)
4	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	31.415.400,00	(0,02)	31.415.400,02	(157.077.000.100,00)
5	Dinas Sosial	-	3.653.793.426,00	(3.653.793.426,00)	(100,00)
6	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	-	27.466.333,33	(27.466.333,33)	(100,00)
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.475.377.529,96	(0,01)	1.475.377.529,97	(14.753.775.299.700,00)
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	45.683.500,00	-	45.683.500,00	-
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(320.000,00)	320.000,00	(100,00)
	Jumlah	**1.900.619.664,95**	**5.008.727.119,30**	**(3.108.107.454,35)**	**(62,05)**

5.6.3.13 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai **Rp0,00**

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Pegawai sebesar Rp0,00 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian Hutang Belanja Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	13.925.000,00	(13.925.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**13.925.000,00**	(13.925.000,00)	**(100,00)**

5.6.3.14 Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa **Rp0,00**

Koreksi/Penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp0,00 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian Hutang Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	39.567.100,00	(39.567.100,00)	(100,00)
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1,64	(1,64)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**39.567.101,64**	**(39.567.101,64)**	**(100,00)**

5.6.3.15 Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain **Rp0,01**

Koreksi/Penyesuaian Lain-Lain sebesar Rp0,01 merupakan koreksi atas selisih koma karena pembulatan antar akun di neraca dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	SKPKD	-	(0,50)	0,50	(100,00)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	0,43	(0,43)	(100,00)
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	0,58	(0,58)	(100,57)
4	RSUD Kelet/Donorejo Jepara	-	-	-	-
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	(1,00)	1,00	(100,00)
6	Sekretariat DPRD	-	(0,12)	0,12	(100,00)
7	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	(0,02)	0,02	(100,00)
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	0,01	-	(0,01)	-
9	Badan Kepegawaian Daerah	-	0,01	(0,01)	(100,00)
	Jumlah	**0,01**	**(0,62)**	**0,61**	**(98,56)**

5.6.4 Ekuitas Akhir **Rp39.937.638.803.342,55**

Ekuitas akhir sebesar Rp39.937.638.803.342,55 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Ekuitas Akhir	39.937.638.803.342,55	38.908.675.268.489,02	1.028.963.534.853,53	2,64
	Jumlah	**39.937.638.803.342,55**	**38.908.675.268.489,02**	**1.028.963.534.853,53**	**2,64**

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Luas dan batas wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km2 atau sebesar25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia.secara administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah juga dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Secara administrasi wilayah Provinsi JawaTengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Letak dan kondisi geografis Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Kondisi geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol yang tersebar di seluruh wilayah, jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite, Batuapung, Trass, Diatome,

Marmer, Batu gamping, Dolomit, Basal, Andesit, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, Kalsit, Zeolit, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

Kondisi hidrologi Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Suhu udara di Jawa Tengah tahun 2021 rata-rata mencapai 28,33^{0}C, dengan suhu minimum sebesar 22,85^{0}C dan maksimum sebesar 33,84^{0}C. Sedangkan kelembaban udara rata-rata mencapai 83 persen, dengan kelembaban minimum sebesar 60 persen, dan maksimum sebesar 96,58 persen.

Data BPS dalam Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2022 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 berdasarkan proyeksi interim data hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020) dari Badan Pusat Statistik sebanyak 36.742.501 jiwa, terdiri dari pria sebanyak 18.472.627 jiwa dan wanita sebanyak 18.269.874 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,81 persen atau rata-rata 296 ribu jiwa per tahun jika dibandingkan tahun 2020. Penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 1.992.685 jiwa, diikuti dengan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.963.824 jiwa, dan Kabupaten Banyumas sebanyak 1.789.630 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kota Magelang sebanyak 121.610 jiwa, diikuti dengan Kota Salatiga sebanyak 193.525 jiwa, dan Kota Tegal sebanyak 275.781 jiwa. Dan jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan penduduk kabupaten/kota diketahui bahwa Kabupaten Cilacap memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk tertinggi di Jawa Tengah yaitu sebesar 1,29 persen diikuti dengan Kabupaten Banjarnegara sebesar 1,18 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 1,14 persen, dan Kabupaten Wonosobo sebesat 1,12 persen. Sedangkan Kota Magelang dan Kota Surakarta menjadi wilayah yang memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk terendah yaitu sebesar 0,09 persen.

Sementara itu kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah menurut data BPS tercatat sebanyak 1.129 jiwa/km2. Wilayah terpadat penduduknya adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk sebanyak 11.872 jiwa/km2, diikuti dengan Kota Tegal sebanyak 7.996 jiwa/km2, dan Kota Pekalongan sebanyak 6.857 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Blora dengan kepadatan penduduk sebanyak 494 jiwa/km2, diikuti oleh Kabupaten Wonogiri sebanyak 576 jiwa/km2, dan Kabupaten Rembang sebanyak 639 jiwa/km2. Melihat kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa wilayah kota lebih padat dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Selain itu sebaran penduduk di Jawa Tengah umumnya terkonsentrasi di wilayah kota, perkotaan, dan pusat-pusat kota baik kabupaten ataupun kota. Hal tersebut dilihat juga dari sebaran kawasan permukiman dimana kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran, Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Selanjutnya berdasarkan data BPS komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia di tahun 2021 maka diketahui bahwa penduduk Jawa Tengah masih berada pada fase bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,62 juta orang dan non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 8,44 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 32,94 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 32 penduduk usia non produktif.

6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman sebelum merdeka didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

1) Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (*Decentralisatie Wet* 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewes*t (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District* / *Standgeemente* (Kota praja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

2) Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh *Jawa kecuali Vorstenkendeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrik dan Ku* (Kelurahan).

3) Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sejak merdeka sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sebanyak 15 (lima belas) kali yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954 s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
7. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
8. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
9. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;

12. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;
13. H. Bibit Waluyo, Agustus 2008 s/d Agustus 2013;
14. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2013 s/d 2018; dan
15. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2018 s/d 2023.

DPRD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 1955 sampai sekarang dipimpin 10 (sepuluh) orang, yaitu:

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
2. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
3. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999;
7. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
8. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012;
9. Drs. Rukma Setya Budi MM, Tahun 2012 s/d 2019; dan
10. H. Bambang Kusriyanto. B.Sc, Tahun 2019 s/d sekarang.

6.4 VISI, MISI & PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

”MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI”

“TETEP MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI”

Misi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Program Unggulan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Sekolah tanpa sekat: pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, antikorupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkataan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk wirausahawan muda;

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel; dan
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

6.5 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONALNYA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Pertaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Guberbnur Jawa Tengah 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022.

BAB 7
PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut disampaikan Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat berguna bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

\

LAMPIRAN

MUTASI ASET TETAP, ASET LAINNYA, PENYUSUTAN DAN AMORTISASI, REKAPITULASI KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN DAN PEMANFAATAN KERJASAMA

MUTASI ASET TETAP
PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022
Periode s/d Bulan DESEMBER 2022

Kode Lokasi : ALL
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : ALL

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2022		PENAMBAHAN																				PENGURANGAN																		SALDO AKHIR Periode 2022	
														RECLASSIFIKASI												RECLASSIFIKASI																	
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Hutang	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Hasil Usaha Mandiri	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Dari Aset Tetap	Jml.	Dari Aset Lainnya	Jml.	Dari Aset Ekstrakomptabel	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	Jml.	Ke Aset Tetap	Jml.	Ke Aset Lainnya	Jml.	Ke Aset Ekstrakomptabel	Jml.	Koreksi Belanja Modal	Jml.	Koreksi Belanja Hutang	Jml.	Koreksi Thi Lalu	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
					BASO		BAHI		KABE		HIBH		HUMI		MAMI		KABE		KALL		KAE		INVOTALK				MKL		JKL		KALL		KAE		KOBA		KOBE		KOBATALK				
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23	
1	1.3.1.01 Tidak	10.496	13.580.627.731.544	17	17.204.442.173	-	-	-	94.493.000	12	11.313.214.600			2	35.996.000.000	2	30.010.858	16	23.984.856.500	-	-	30	70.112.399.776	80	130.931.417.930	3	15.996.000.000	2	30.010.858	269	479.189.163.217	-	-	-	-	-	-	17	27.900.270.250	431	522.535.874.426	10.141	13.188.047.275.028
2	1.3.2.01 ALAT BESAR	3.893	338.211.070.551	302	16.494.880.281	-	-	9	132.856.800	63	2.484.871.450	-	-	2	223.227.565	7	1.049.545.563	1	1.740.000	-	-	1	691.000	286	20.388.076.665	3	223.227.565	493	6.673.391.539	36	195.020.498	14	13.138.800	-	-	-	-	1	372.791.500	591	7.277.569.852	3.688	351.321.577.364
3	1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	1.671	611.186.960.614	228	26.435.105.684	-	-	12	82.089.920	72	9.603.518.801	1	352.000.000	65	12.547.863.298	560	197.199.752.633	18	5.312.244.553	-	-	62	3.830.087.650	1.604	251.535.002.476	65	12.547.862.398	975	190.643.622.633	118	4.201.461.273	24	8.460.000	-	-	-	-	1	270.654.972	1.183	213.772.064.276	7.092	611.349.038.817
4	1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	47.981	293.953.867.089	1.881	20.189.579.676	-	-	445	533.930.155	487	6.259.753.799	2	12.000.000	-	-	32	1.147.782.888	3	14.200.000	-	-	45	1.230.649.000	4.895	29.688.153.680	73	2.155.574.382	858	3.577.582.886	3.483	222.026.700	-	-	-	-	-	-	2.414	6.010.760.780	10.462	317.631.226.789
5	1.3.2.04 ALAT PERTANIAN	7.619	46.577.701.181	604	2.565.212.377	-	-	6	10.750.000	77	1.215.543.064	-	-	2	36.295.000	1	35.000.000	-	-	-	-	3	4.500.000	533	1.676.903.791	2	26.295.000	-	-	91	1.140.966.139	193	48.763.750	-	-	-	-	2	614.01.100	310	1.298.919.379	7.619	48.955.710.993
6	1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	524.951	1.629.620.204.759	61.283	666.801.218.994	-	-	5.107	2.215.648.193	2.181	8.796.597.532	167	503.839.703	181	1.834.426.113	737	5.198.271.509	-	-	1	305.000	2.019	5.855.310.800	71.676	191.153.027.924	181	1.834.426.113	4.016	1.537.580.756	5.330	14.286.662.903	30.379	5.959.096.485	-	-	-	-	32	213.241.000	29.938	23.831.307.251	566.693	1.787.842.525.429
7	1.3.2.06 ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PENANGKAP	43.358	277.134.071.195	4.360	22.291.342.589	-	-	257	374.085.112	376	4.646.950.569	9	28.435.500	59	155.220.447	48	3.233.679.791	-	-	-	-	83	1.056.222.238	5.112	31.685.916.200	19	155.220.447	25	84.927.376	1.198	7.191.306.424	1.960	171.968.046	-	-	-	-	-	-	3.192	7.603.422.293	45.278	301.306.565.102
8	1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	43.573	1.996.861.602.216	1.898	306.130.041.811	-	-	24	37.336.445	262	3.662.831.445	-	-	62	2.197.600.000	1	3.410.000	-	-	-	-	135	4.938.325.348	2.362	317.367.135.049	42	2.197.600.000	7	37.554.445	530	15.571.088.793	292	102.929.890	-	-	-	-	38	3.034.667.504	963	21.343.640.632	42.973	2.292.885.496.633
9	1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM	89.614	623.224.473.164	23.285	42.705.038.225	-	-	396	435.148.974	434	11.555.598.263	6	44.174.000	48	476.381.070	58	842.045.570	-	-	-	-	129	1.232.823.570	24.556	57.291.168.673	48	476.381.070	273	948.117.964	2.441	8.890.609.824	19.051	1.688.118.670	-	-	-	-	3	50.000.000	21.815	13.103.227.518	92.355	668.412.614.319
10	1.3.2.09 ALAT PERSENJATAAN	1.283	7.648.588.365	371	263.837.550	-	-	1	61.130.750	2	27.325.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	374	291.383.300	13	39.734.000	3	1.185.731.550	348	67.914.800	-	-	-	-	-	-	363	1.293.382.350	1.284	6.647.588.315
11	1.3.2.10 ALAT KOMPUTER	327.895	1.459.107.479.138	10.302	356.563.132.256	1	-	280	2.203.557.102	1.355	19.879.274.837	28	153.079.065	20	198.317.700	94	508.240.667	1	2.160.000	-	-	368	1.498.213.230	17.574	180.896.298.752	20	198.317.700	21	62.239.805	6.882	24.310.327.045	735	164.691.530	-	-	171	958.141.651	7.829	26.734.717.736	337.495	1.564.679.761.163
12	1.3.2.11 ALAT EKSPLORASI	111	468.093.022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	468.093.022
13	1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN	15	166.973.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	166.973.288
14	1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	38	646.457.150	2	33.188.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.830.000	-	-	-	-	-	-	3	59.018.000	-	-	1	25.388.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.388.000	40	679.087.150
15	1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLORASI	2	21.160.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.160.000
16	1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA	1.272	4.521.683.913	322	1.222.665.124	-	-	21	18.159.350	196	13.814.000	-	-	4	47.650.000	1	2.600.000	-	-	-	-	2	81.670.000	546	1.426.360.876	4	47.650.000	-	-	1	8.000.000	300	18.188.250	-	-	-	-	-	-	305	134.259.250	1.513	5.813.916.540
17	1.3.2.16 ALAT PERAGA	8.609	107.782.725.619	447	11.412.500.457	-	-	13	135.300.000	191	6.099.665.290	-	-	14	75.920.000	-	-	-	-	-	-	1	201.000.000	666	17.864.385.700	-	-	-	-	12	103.954.000	72	9.974.500	-	-	-	-	-	-	84	111.928.500	9.191	121.535.182.616
18	1.3.2.17 PEMALATAN PROSES/PRODUKSI	160	2.631.967.987	48	827.812.047	-	-	12	25.746.450	2	96.183.750	2	7.013.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	926.722.247	-	-	-	-	1	2.160.000	3	1.050.000	-	-	-	-	-	-	4	3.360.000	208	3.575.279.234
19	1.3.2.18 RAMBU-RAMBU	419	22.268.797.932	259	1.680.880.450	-	-	2	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	1.682.880.450	-	-	-	-	-	-	1	500.000	2	782.617.474	-	-	-	-	3	783.117.474	672	23.168.160.908
20	1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA	5.420	44.560.662.692	604	14.781.172.977	-	-	91	151.061.350	5	18.937.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	21.327.000	744	14.924.498.827	-	-	-	-	190	173.136.850	291	91.668.761	-	-	-	-	-	-	481	264.805.611	5.682	59.116.385.908
21	1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	19.015	7.765.611.327.693	220	389.152.975.423	-	-	61	64.293.814.334	88	79.923.942.009	1	21.000.000	7	11.893.654.460	40	143.680.508.569	8	1.801.796.300	19	24.930.057	186	734.070.333.335	836	1.214.852.918.640	7	11.893.658.463	13	6.790.354.517	98	55.638.059.105	124	2.001.762.730	1	3.550.000	1	2.668.491.804	304	216.584.866.264	568	290.581.382.883	19.383	8.684.662.969.358
22	1.3.3.02 MONUMEN	165	2.696.492.762	72	4.358.233.000	-	-	2	170.036.000	1	186.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	1.470.000.000	102	5.968.413.000	-	-	-	-	-	-	1	186.000	-	-	-	-	-	-	1	186.000	236	8.064.739.762
23	1.3.3.03 BANGUNAN MENARA	26	5.276.623.117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	5.276.623.117
24	1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	625	126.927.745.760	666	8.443.067.474	-	-	22	1.565.208.291	8	890.631.700	-	-	12	1.185.916.800	-	-	-	-	-	-	19	5.352.801.000	227	17.637.125.276	12	1.185.916.800	-	-	4	382.767.000	162	299.870.268	-	-	-	-	-	-	178	2.068.554.068	678	142.506.736.901
25	1.3.4.01 JALAN DAN JEMBATAN	2.012	8.957.028.267.830	11	404.970.725.304	-	-	14	449.134.000	2	16.539.591.581	-	-	2	44.900.218.500	8	39.257.218.400	-	-	-	-	2	44.900.218.500	27	506.216.909.405	-	-	4	1.565.728.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.565.728.000	2.285	9.461.579.469.235
26	1.3.4.02 BANGUNAN AIR	4.778	1.910.007.434.857	313	60.154.666.941	-	-	11	310.810.965	-	-	-	-	1	18.150.000	22	1.743.126.941	-	-	1	-	3	1.196.693.947	150	82.965.699.665	1	18.150.000	1	403.119.800	-	-	-	-	-	-	-	-	4	453.292.000	11	566.561.800	4.917	1.979.134.132.370
27	1.3.4.03 INSTALASI	2.447	143.202.864.133	9	4.651.092.375	-	-	109	281.842.495	-	-	-	-	2	1.008.755.160	2	156.866.363	-	-	-	-	2	1.008.755.160	122	6.368.356.293	2	1.008.755.160	10	1.673.784.868	7	730.767.000	-	-	-	-	-	-	104	3.178.796.100	125	6.790.062.260	2.444	140.880.958.163
28	1.3.4.04 JARINGAN	1.966	170.509.376.370	1	20.393.958.095	-	-	1	712.746.400	-	-	-	-	1	925.303.050	2	19.530.000	-	-	-	-	1	925.303.050	4	22.949.234.640	1	925.303.050	1	227.724.000	1	3.750.000	-	-	-	-	-	-	11	919.237.000	23	1.756.864.050	1.954	189.726.734.954
29	1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN	58.673.319	1.430.493.349.945	38.673.298	90.253.579.081	-	-	999999	2.519.761.841	10.874.630	4.232.990.968	-	-	3.984	809.782.653	4.157	66.869.495	5	16.530.000	-	-	739.794	74.463.643	40.813.878	87.383.641.587	3.988	809.782.653	147	384.319.200	556.475	592.854.859.394	18.898	1.903.297.748	100	22.840.000	-	-	-	-	1.091	27.549.700	580.691	686.458.019.417	66.014.523	931.962.889.301
30	1.3.5.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	52.016	37.214.873.513	590	1.969.214.829	-	-	24	16.748.500	2	5.000.000	-	-	63	148.210.850	12	63.550.000	3	10.700.000	-	-	-	-	673	2.213.664.179	43	148.210.850	83	168.927.036	1.123	238.968.226	-	-	-	-	-	-	1	368.366.000	1.250	726.472.112	51.419	38.703.865.580
31	1.3.5.03 HEWAN	7.666	3.103.144.680	-	-	-	-	7	62.986.000	10	109.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	171.986.000	-	-	-	-	10	358.960.200	-	-	-	-	-	-	14	358.960.200	7.661	2.914.170.280
32	1.3.5.04 BIOTA PERAIRAN	17	1.109.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1.109.200
33	1.3.5.05 TANAMAN	7.837	3.276.385.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212	9.825.000	213	9.825.000	-	-	1	30.000	-	-	-	-	-	-	1	30.000	7.837	3.284.000.773
34	1.3.5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	143	24.702.500	3	21.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	21.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146	45.802.500
35	1.3.5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI	1	353.677.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	353.677.000
36	1.3.6.01 KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	297	798.310.329.085	8	118.436.417.085	-	-	17	5.620.716.040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	124.057.133.125	-	-	20	175.575.617.895	-	-	-	-	-	-	-	-	4	494.241.535.118	29	669.816.719.013	298	242.550.742.201
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		51.766.057	41.880.917.765.418,00	26.786.174	1.710.800.591.264	-	-	999999	82.397.766.906	10.831.640	187.552.203.153	256	1.126.821.203	4.437	50.424.724.227	6.204	394.847.910.002	46	25.184.657.393	21	25.235.057	743.245	867.284.806.996	40.547.312	3.319.638.725.164	4.437	50.424.726.227	6.204	394.847.910.002	575.830	1.209.758.214.327	64.424	12.218.118.973	108	808.157.474	1	2.668.491.804	1.823	748.036.568.105	852.827	2.438.782.494.966	91.640.545.091	42.781.793.995.616,00

MUTASI ASET TAK BERWUJUD

PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022
Periode s/d Bulan DESEMBER 2022

Kode Lokasi : ALL
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : ALL

No.	Uraian	SALDO AWAL TAHUN 2022		PENAMBAHAN																PELEPASAN										SALDO AKHIR TAHUN	
												REKLASIFIKASI										REKLASIFIKASI									
		Jml.	Harga	Jml.	Belanja Modal	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Mutasi Masuk	Jml.	Reklas Masuk	Jml.	Reklas dari Aset Tetap	Jml.	Reklas dari Aset Lainnya	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	Jml.	Reklas Keluar	Jml.	Reklas ke Aset Tetap	Jml.	Reklas ke Aset Lainnya	Jml.	Koreksi	PERIODE 202212	Jumlah Pelepasan	Jml.	Harga
					BMD		NBM		HBH		MMK		RKM		AST		ASL		INV/NLK						RKL		RAST		KIBL		KOR/NLK				
1	2	3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17	18		19	
1	1.5.3.01.01.01 GOODWILL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.3.01.01.02 LISENSI DAN FRENCHISE	1	5.000.000	1	319.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	319.680.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	324.680.000
3	1.5.3.01.01.03 HAK CIPTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.3.01.01.04 HAK PATEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.3.01.01.05 SOFTWARE	402	28.666.735.313	20	2.521.468.815	12	1.284.642.810	-	-	-	-	-	-	50	1.719.440.724	-	-	6	334.015.150	88	5.859.567.499	-	-	-	-	1	16.500.000	14	1.029.629.899	2	32.500.000	37	1.078.629.899	453	33.447.652.913
6	1.5.3.01.01.06 KAIAN	1	84.397.000	-	-	8	2.585.683.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.585.683.360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.670.080.360
7	1.5.3.01.01.07 ASET TIDAK BERWUJUD YANG MEMPUNYAI NILAI SEJARAH/ BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.3.01.01.08 ASET TIDAK BERWUJUD DALAM PENGERJAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	1.5.3.01.01.09 ASET TIDAK BERWUJUD LAINNYA	7	179.920.657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15.800.000	1	15.800.000	-	-	-	-	-	-	1	98.070.000	-	-	1	98.070.000	7	97.650.657
		411,00	28.936.052.970,00	21,00	2.841.128.815,00	20,00	3.870.326.170,00	-	-	-	-	-	-	50,00	1.719.440.724,00	-	-	7,00	349.815.150,00	98,00	8.780.710.859,00	-	-	-	-	1,00	16.500.000,00	35,00	1.127.699.899,00	2,00	32.500.000,00	38,00	1.176.699.899,00	471,00	36.540.063.930,00

MUTASI ASET LAINNYA

PROVINSI JAWA TENGAH
Tahun 2022
Periode s/d Bulan DESEMBER 2022

Kode Lokasi : ALL
Bidang :
Sub Bidang :
Satuan Kerja : ALL

No.	Akun	Keterangan	Saldo Awal Tahun 2022		Penambahan								Pelepasan								Penghapusan								Jumlah Kurang		Saldo Akhir	
					Reklas Aset tetap		Reklas dari Aset ATB		Koreksi/Temuan		Jumlah Tambah		Reklas Aset Tetap		Reklas ke Aset ATB		Pemanfaatan		Penjualan		Tuntutan Ganti Rugi		Hibah dll		Koreksi							
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga						
						ASL		ATB		SAL				AST		RATB		MFT		PSL		TGR		RBH,TKM,MSL,MSN		KOR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1	1.5.4.01.01.01.001	Tanah Rusak Berat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	1.5.4.01.01.01.002	Peralatan dan Mesin Rusak Berat	135.092,00	272.357.641.468,00	15.482,00	68.883.763.117,00	-	-	-	-	15.482,00	68.883.763.117,00	22,00	1.138.154.593,00	-	-	-	-	-	-	-	-	99,00	293.472.250,00	144,00	394.417.085,00	265,00	1.826.044.828,00	150.309,00	339.415.359.757,00		
3	1.5.4.01.01.01.003	Gedung dan Bangunan Rusak Berat	226,00	27.642.804.274,00	37,00	4.056.920.910,00	-	-	-	-	37,00	4.056.920.910,00	-	-	-	-	-	-	26,00	2.466.570.803,00	-	-	-	-	1,00	523.590.000,00	27,00	2.990.160.803,00	236,00	28.709.564.381,00		
4	1.5.4.01.01.01.004	Jalan, Irigasi dan Jaringan Rusak Berat	26,00	2.187.125.020,00	8,00	732.517.000,00	-	-	-	-	8,00	732.517.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,00	2.919.642.020,00		
5	1.5.4.01.01.01.005	Aset Tetap Lainnya Rusak Berat	272.910,00	13.226.003.587,00	425.099,00	588.704.914.232,00	-	-	-	-	425.099,00	588.704.914.232,00	2,00	10.700.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	12.280.000,00	5,00	22.980.000,00	698.004,00	601.907.937.819,00		
6	1.5.4.01.01.02.001	Aset Tetap Tanah Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	531,00	1.306.779.017.604,00	366,00	473.102.943.317,00	-	-	-	-	366,00	473.102.943.317,00	2,00	141.000.000,00	-	-	24,00	27.845.015.904,00	-	-	-	-	6,00	2.250.375.000,00	1,00	630.000.000,00	33,00	30.866.390.904,00	864,00	1.749.015.570.017,00		
7	1.5.4.01.01.02.002	Aset Tetap Peralatan dan Mesin Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.378,00	17.257.062.530,00	412,00	3.583.378.015,00	-	-	-	-	412,00	3.583.378.015,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,00	2.318.769.000,00	101,00	166.250.200,00	112,00	2.485.019.200,00	1.678,00	18.355.421.345,00		
8	1.5.4.01.01.02.003	Aset Tetap Gedung dan Bangunan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	39,00	11.684.211.116,00	35,00	34.961.576.890,00	-	-	-	-	35,00	34.961.576.890,00	2,00	304.900.000,00	-	-	15,00	27.500.271.384,00	-	-	-	-	4,00	240.644.167,00	1,00	2.908.909.500,00	22,00	31.044.725.051,00	52,00	15.601.062.955,00		
9	1.5.4.01.01.02.004	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	59,00	71.756.086.971,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	49.863.000,00	1,00	49.863.000,00	58,00	71.706.223.971,00		
10	1.5.4.01.01.02.005	Aset Tetap Lainnya Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	43.128,00	1.678.447.332,00	85.462,00	3.125.615.585,00	-	-	-	-	85.462,00	3.125.615.585,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.590,00	4.804.062.917,00		
11	1.5.4.01.01.03.001	Aset Lain-lain Tanah	551,00	19.669.761.456,00	3,00	5.486.650.000,00	-	-	-	-	3,00	5.486.650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	5.486.650.000,00	-	-	3,00	5.486.650.000,00	551,00	19.669.761.456,00		
12	1.5.4.01.01.03.002	Aset Lain-lain Peralatan dan Mesin	207,00	1.259.331.505,00	1.799,00	6.998.618.257,00	-	-	-	-	1.799,00	6.998.618.257,00	1,00	232.650.000,00	-	-	-	-	-	-	1,00	35.744.500,00	60,00	237.903.000,00	-	-	62,00	506.297.500,00	1.944,00	7.751.652.262,00		
13	1.5.4.01.01.03.003	Aset Lain-lain Gedung dan Bangunan	11,00	1.469.306.010,00	26,00	17.002.388.305,00	-	-	-	-	26,00	17.002.388.305,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.664.216.500,00	-	-	2,00	1.664.216.500,00	37,00	16.837.377.835,00		
14	1.5.4.01.01.03.004	Aset Lain-lain Jalan, Irigasi dan Jaringan	1,00	149.582.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	149.582.000,00		
15	1.5.4.01.01.03.005	Aset Lain-lain Aset Tetap Lainnya	724,00	4.762.673.500,00	47.041,00	1.399.587.975,00	-	-	-	-	47.041,00	1.399.587.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.765,00	6.162.261.475,00		
16	1.5.4.01.01.03.006	Aset Lain-lain Aset Tak Berwujud	67,00	4.609.545.085,00	-	-	35,00	1.127.699.899,00	-	-	35,00	1.127.699.899,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,00	5.737.244.984,00		
			454.952	1.756.518.599.478	575.770	1.208.038.773.603	35	1.127.699.899	-	-	575.805	1.209.166.473.502	29	1.917.404.593	-	-	39	55.345.287.288	26	2.466.570.803	1	35.744.500	185	12.492.029.917	252	4.685.310.685	532	76.942.347.786	1.030.225	2.888.742.725.194		

JURNAL MUTASI ASET PEMANFAATAN

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : ALL
Bidang : ALL
Sub Bidang :
Satuan Kerja :

No.	Akun	Keterangan	Saldo Awal		Penambahan						Pelepasan						Jumlah Kurang		Saldo Akhir	
					Reklas Aset Lainnya		Koreksi/Temuan		Jumlah Tambah		Reklas Aset Tetap		Koreksi/Temuan							
			Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga	Jml	Harga						
						ASL		SAL				AST		MFT						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	1.5.2.01.01.01.001	Sewa Tanah	49	59.512.402.125	23	27.827.718.248	-	-	23	27.827.718.248	14	21.841.856.500	-	-	14	21.841.856.500	58	65.496.263.873		
2	1.5.2.01.01.01.002	Sewa Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1.5.2.01.01.01.003	Sewa Gedung dan Bangunan	26	6.902.891.168	15	27.500.271.384	-	-	15	27.500.271.384	2	1.406.896.300	-	-	2	1.406.896.300	39	32.996.266.252		
4	1.5.2.01.01.01.004	Sewa Jalam, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5	1.5.2.01.01.02.001	Kerja Sama Pemanfaatan Tanah	6	8.491.698.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8.491.698.000		
6	1.5.2.01.01.02.002	Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	1.5.2.01.01.02.003	Kerja Sama Pemanfaatan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	1.5.2.01.01.02.004	Kerja Sama Pemanfaatan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	1.5.2.01.01.02.005	Kerja Sama Pemanfaatan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	1.5.2.01.01.03.001	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Tanah	-	-	1	17.297.656	-	-	1	17.297.656	-	-	-	-	-	-	1	17.297.656		
11	1.5.2.01.01.03.002	Bangun Serah Guna (BSG) Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	1.5.2.01.01.03.003	Bangun Serah Guna (BSG) Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	1.5.2.01.01.03.004	Bangun Serah Guna (BSG) Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	1.5.2.01.01.03.005	Bangun Serah Guna (BSG) Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	1.5.2.01.01.04.001	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	1.5.2.01.01.04.002	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17	1.5.2.01.01.04.003	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	1.5.2.01.01.04.004	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19	1.5.2.01.01.04.005	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	1.5.2.01.01.05.001	Pinjam Pakai Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
21	1.5.2.01.01.05.002	Pinjam Pakai Peralatan dan Mesin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
22	1.5.2.01.01.05.003	Pinjam Pakai Bangunan dan Gedung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
23	1.5.2.01.01.05.004	Pinjam Pakai Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
24	1.5.2.01.01.05.005	Pinjam Pakai Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			81	74.906.991.293	39	55.345.287.288	-	-	39	55.345.287.288	16	23.250.752.800	-	-	16	23.250.752.800	104	107.001.525.781		

MUTASI ASET EKSTRAKOMPTABEL
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : ALL
Bidang : ALL
Sub Bidang :
Satuan Kerja :

No.	Uraian		SALDO AWAL TAHUN		TAMBAH													KURANG										SALDO AKHIR PERIODE	
											Reklasifikasi									REKLASIFIKASI										
			Jml.	Harga	Jml.	Belanja Barang Jasa	Jml.	Hibah	Jml.	Mutasi Masuk	Jml	dari Aset Ektrakomp	Jml	dari Aset Tetap	Jml	dari Aset Lainnya	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Tambah	Jml.	Mutasi Keluar	Jml.	ke Aset Ektrakomp	Jml.	ke Aset Tetap	Jml.	ke Aset Lainnya	Jml.	Koreksi	Jml.	Jumlah Kurang	Jml.	Harga
						NBM		HIBH		MMK		RKM		AST		ASL		INV/NLK				MKL		RKL		ASTK		KIBL		KOR/NLK				
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18
1	1.3.2.01	ALAT BESAR	1.145	225.709.467	1	199.800	-	-	-	-	-	-	58	13.138.850	-	-	-	-	59	13.338.650	-	-	-	-	-	-	41	8.012.815	-	-	41	8.012.815	1.163	231.035.302
2	1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN	309	90.354.880	-	-	-	-	-	-	-	-	24	8.460.000	-	-	-	-	24	8.460.000	-	-	-	-	-	-	4	355.000	-	-	4	355.000	329	98.459.880
3	1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	80.782	9.875.149.696	6	459.540	-	-	-	-	-	-	1.483	222.036.702	-	-	-	-	1.489	222.496.242	-	-	-	-	-	7.242	7.242	420.161.927	-	-	7.242	420.161.927	75.029	9.677.484.011
4	1.3.2.04	ALAT PERTANIAN	16.832	1.579.097.374	-	-	-	-	-	-	-	-	233	48.763.750	-	-	-	-	233	48.763.750	-	-	-	-	-	1.170	1.170	55.356.321	-	-	1.170	55.356.321	15.895	1.571.504.803
5	1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	1.512.248	254.243.169.668	150	186.959.390	-	-	1.746	457.857.128	-	-	20.379	5.959.396.483	-	-	-	8.000.000	22.275	6.612.213.001	1.746	457.857.128	-	-	1	305.000	24.882	2.598.007.380	-	-	26.629	3.056.169.508	1.507.894	257.799.213.161
6	1.3.2.06	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	27.034	4.990.933.468	10	4.600.000	-	-	4	1.650.000	-	-	1.960	171.968.046	-	-	-	-	1.974	178.218.046	4	1.650.000	-	-	-	-	997	198.811.457	-	-	1.001	200.461.457	28.007	4.968.690.057
7	1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN ALAT KESEHATAN	34.387	2.288.375.608	-	-	-	-	-	-	-	-	292	102.929.890	-	-	-	-	292	102.929.890	-	-	-	-	-	-	459	57.664.422	-	-	459	57.664.422	34.220	2.333.641.076
8	1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM	540.239	37.271.373.890	1	79.920	-	-	23	7.850.000	-	-	19.051	1.688.118.670	-	-	-	-	19.075	1.696.048.590	23	7.850.000	437	9.711.000	-	-	22.991	948.479.262	-	-	23.451	966.040.262	535.863	38.001.382.218
9	1.3.2.09	ALAT PERSENJATAAN	2.340	320.790.435	-	-	-	-	-	-	-	-	348	67.916.800	-	-	-	-	348	67.916.800	-	-	-	-	-	-	59	6.904.000	-	-	59	6.904.000	2.629	381.803.235
10	1.3.2.10	ALAT KOMPUTER	30.070	1.571.780.591	-	-	-	-	10	5.000.000	-	-	735	184.481.520	-	-	-	-	745	189.481.520	10	5.000.000	-	-	-	-	1.227	221.641.918	-	-	1.237	226.641.918	29.578	5.534.618.153
11	1.3.2.11	ALAT EKSPLORASI	13	4.242.490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	4.242.490
12	1.3.2.12	ALAT PENGEBORAN	14	3.525.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	3.525.000
13	1.3.2.13	ALAT PRODUKSI, PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1.3.2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	1.3.2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	361	56.400.255	-	-	-	-	-	-	-	-	300	38.588.250	-	-	-	-	300	38.588.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	661	94.988.505
16	1.3.2.16	ALAT PERAGA	42.115	1.644.082.893	-	-	-	-	-	-	-	-	72	9.974.503	-	-	-	-	72	9.974.503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.187	1.654.057.396
17	1.3.2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	68	6.704.120	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.050.000	-	-	-	-	3	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	7.754.120
18	1.3.2.18	RAMBU RAMBU	130	27.956.700	-	-	-	-	-	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	1	500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131	28.456.700
19	1.3.2.19	PERALATAN OLAH RAGA	16.503	2.804.371.254	-	-	-	-	12	4.475.000	-	-	296	95.668.761	-	-	-	-	308	100.143.761	12	4.475.000	-	-	-	-	357	40.814.409	-	-	369	45.289.409	16.442	2.859.225.606
20	1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG	2.701	18.119.553.103	1	39.950.000	-	-	2	12.159.910	-	-	128	2.001.782.730	-	-	-	35.999.996	131	2.089.892.636	2	12.159.910	1	1	19	24.930.017	12	164.968.677	66	67.020.000	100	269.078.605	2.732	19.940.367.134
21	1.3.3.02	MONUMEN	36	349.455.136	-	-	-	-	-	-	-	-	1	186.000	-	-	-	-	1	186.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	349.641.136
22	1.3.3.03	BANGUNAN MENARA	19	218.803.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	218.803.552
23	1.3.3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	293	817.431.859	-	-	-	-	-	-	-	-	162	299.870.269	-	-	-	-	162	299.870.269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	455	1.117.302.128
24	1.3.4.01	JALAN DAN JEMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1.3.4.02	BANGUNAN AIR	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
26	1.3.4.03	INSTALASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	1.3.4.04	JARINGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	372	6.070.903	2.199	26.431.652	-	-	-	-	-	9.711.000	18.898	1.303.287.749	-	-	-	-	21.097	1.339.430.401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.469	1.345.501.304
29	1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAAN/KEBUDAYAAN/OLAH RAGA	10	4.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	4.000.000
30	1.3.5.03	HEWAN	1.555	2.493.679.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	89.676.000	-	-	-	-	-	-	-	152.893.000	-	-	-	152.893.000	1.563	2.430.462.500
31	1.3.5.04	BIOTA PERAIRAN	68	34.133.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	34.133.500
32	1.3.5.05	TANAMAN	374	58.655.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.591	1.591	121.440.000	1.591	121.440.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.965	180.095.750
33	1.3.5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1.3.5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2.310.018	343.105.001.092	2.368	258.680.302	-	-	1.797	488.992.038	1	9.711.001	64.424	12.218.118.973	-	-	1.599	255.115.996	70.189	13.230.618.310	1.797	488.992.038	438	9.711.001	21	25.235.018	59.441	4.874.072.628	66	67.020.000	61.763	5.465.030.685	2.318.444	350.870.588.717

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : ALL
Bidang : ALL
Sub Bidang : ALL
Satuan Kerja : ALL

No.	Objek	Keterangan	Perolehan		Akumuasi Awal	TAMBAH						KURANG					Beban	Akumulasi Akhir	NILAI BUKU
						Hibah	Mutasi Masuk	Reklas			KOREKSI	Mutasi Keluar	Reklas			KOREKSI			
			Jml	Harga				Dari Aset Tetap	Dari Aset Lainnya	Dari Aset Ekstrakomptabel			Ke Aset Tetap	Ke Aset Lainnya	Ke Aset Ekstrakomptabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1.3.7.01.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BESAR	3.688	351.321.577.260	253.007.791.173	-	223.227.565	1.022.698.690	935.000	-	221.719	223.227.565	5.810.141.273	190.181.297	-	57.597.167	23.882.048.331	271.855.775.175	79.465.802.085
2	1.3.7.01.02	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT ANGKUTAN	7.092	653.349.026.837	471.567.006.787	1.272.645.350	10.681.541.136	163.442.768.234	1.352.344.593	-	1.563.992.370	10.681.541.136	163.323.865.526	4.177.782.502	-	95.856.969	39.098.696.779	510.699.949.116	142.649.077.721
3	1.3.7.01.03	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	50.462	415.631.226.789	273.645.436.823	42.900.000	-	1.134.905.721	14.200.000	-	1.146.466.250	-	2.101.288.098	3.293.984.903	-	-	29.861.409.396	300.450.045.189	115.181.181.600
4	1.3.7.01.04	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERTANIAN	7.629	68.955.715.993	58.724.439.277	-	26.295.000	6.250.000	-	-	934.375	26.295.000	-	1.159.789.046	-	-	4.339.532.863	61.911.367.469	7.044.348.524
5	1.3.7.01.05	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA	566.693	1.787.942.525.428	1.277.277.423.648	3.336.667	800.474.030	4.578.490.274	-	305.000	2.662.308.333	800.474.030	1.419.236.991	13.976.495.734	99.064.000	204.236.833	142.105.801.671	1.410.928.632.034	377.013.893.394
6	1.3.7.01.06	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	45.278	301.206.565.102	222.681.879.013	-	153.289.947	2.482.999.374	-	-	30.824.217	153.289.947	84.927.376	7.176.196.266	441.667	-	20.307.195.627	238.241.332.922	62.965.232.180
7	1.3.7.01.07	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	42.973	2.292.885.496.633	1.663.836.712.794	795.821.666	259.760.000	1.316.000	-	-	1.257.796.516	259.760.000	36.230.000	15.570.348.049	1.758.050	774.103.423	133.347.227.676	1.782.856.435.130	510.029.061.503
8	1.3.7.01.08	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT LABORATORIUM	92.355	668.412.614.258	401.356.159.844	-	29.320.514	676.703.857	-	-	210.442.983	29.320.514	236.940.113	8.443.542.373	351.563	50.000.000	48.034.020.694	441.546.493.328	226.866.120.930
9	1.3.7.01.09	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PERSENJATAAN	1.294	6.447.589.315	6.731.866.504	-	-	-	-	-	-	-	20.984.000	1.185.731.550	-	-	330.294.513	5.855.445.467	592.143.848
10	1.3.7.01.10	AKUMULASI PENYUSUTAN KOMPUTER	237.440	1.564.479.261.193	1.132.062.918.593	-	191.088.015	149.840.868	416.667	-	439.839.834	191.088.015	22.589.450	24.046.956.654	7.664.583	933.646.651	152.078.633.806	1.259.720.792.430	304.758.468.763
11	1.3.7.01.11	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT EKSPLORASI	115	468.093.022	166.088.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.552.202	229.641.142	238.451.880
12	1.3.7.01.12	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PENGEBORAN	15	156.971.298	29.906.846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.697.130	45.603.976	111.367.322
13	1.3.7.01.13	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT PEMURNIAN	40	678.087.150	123.415.809	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.692.288	181.108.097	496.979.053
14	1.3.7.01.14	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT BANTU EKSPLORASI	2	21.180.000	6.354.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.118.000	8.472.000	12.708.000
15	1.3.7.01.15	AKUMULASI PENYUSUTAN ALAT KESELAMATAN KERJA	1.513	5.813.816.540	3.017.476.259	-	15.162.500	1.300.000	-	-	831.250	15.162.500	-	3.666.667	-	-	547.218.718	3.563.159.560	2.250.656.980
16	1.3.7.01.16	AKUMULASI PENYUSUTAN PERAGA	9.191	125.535.182.616	38.014.966.866	-	-	70.855.333	-	-	-	-	-	58.870.417	-	-	11.088.723.240	49.115.675.023	76.419.507.593
17	1.3.7.01.17	AKUMULASI PENYUSUTAN PROSES/PRODUKSI	259	3.575.279.234	1.063.464.137	-	-	-	-	-	-	-	-	745.938	-	-	316.399.531	1.379.117.731	2.196.161.503
18	1.3.7.01.18	AKUMULASI PENYUSUTAN RAMBU - RAMBU	572	23.368.160.908	16.473.664.477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.085.862	1.979.449.301	18.396.027.916	4.972.132.992
19	1.3.7.01.19	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN OLAH RAGA	5.682	59.116.385.909	17.260.329.453	-	-	-	-	-	4.081.750	-	-	172.134.350	3.379.250	-	8.127.256.710	25.216.154.313	33.900.231.596
20	1.3.7.02.01	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN GEDUNG	19.283	8.684.882.903.358	2.118.586.602.089	507.704.537	11.163.438.285	534.164.432	855.466.971	17.839.711	32.075.431.480	11.163.438.285	714.204.774	21.660.558.276	59.904.600	54.935.468.086	163.828.900.586	2.239.035.974.070	6.445.846.929.288
21	1.3.7.02.02	AKUMULASI PENYUSUTAN MONUMEN	246	29.043.739.782	4.118.038.726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	625.807.985	4.743.846.711	24.299.893.071
22	1.3.7.02.03	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN MENARA	24	5.276.623.117	1.000.010.502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105.475.803	1.105.486.305	4.171.136.812
23	1.3.7.02.04	AKUMULASI PENYUSUTAN TUGU TITIK KONTROL/PASTI	670	142.506.716.905	21.559.198.207	-	125.053.171	-	-	-	261.572.587	125.053.171	-	53.057.378	8.046.000	-	2.666.231.456	24.425.898.872	118.080.818.033
24	1.3.7.03.01	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN DAN JEMBATAN	2.385	9.462.579.469.235	7.101.438.215.456	-	-	1.426.923.896	-	-	-	-	1.108.081.683	-	-	-	451.952.821.355	7.553.709.879.024	1.908.869.590.211
25	1.3.7.03.02	AKUMULASI PENYUSUTAN BANGUNAN AIR	4.917	1.379.526.532.779	380.357.076.753	-	2.960.417	393.771.427	-	1	36.500.000	2.960.417	99.355.031	-	-	14.721.738	46.953.469.720	427.626.741.132	951.899.791.647
26	1.3.7.03.03	AKUMULASI PENYUSUTAN AKUMULASI PENYUSUTAN INSTALASI	2.444	140.880.958.164	33.751.447.030	-	91.073.307	-	-	-	-	91.073.307	550.712.031	714.867.000	-	1.130.161.772	5.503.721.473	36.859.427.700	104.021.530.464
27	1.3.7.03.04	AKUMULASI PENYUSUTAN JARINGAN	5.954	190.758.713.014	18.910.073.978	-	100.241.808	9.587.500	-	-	-	100.241.808	75.273.678	368.229	-	200.072.086	4.996.436.979	23.640.384.464	167.118.328.550
28	1.3.7.04.01	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	975	3.471.256.090	1.976.267.533	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	506.233.703	2.482.501.236	988.754.854
			1.109.191,00	28.368.291.667.929,00	[1]15,518,744,231,515.71	2.622.408.219,30	23.862.925.693,83	175.932.575.607,55	2.223.363.231,00	18.144.711,44	39.691.243.662,99	23.862.925.693,83	175.603.830.024,56	101.885.276.627,82	180.609.712,36	58.452.950.586,87	1.292.722.067.537,28	16.695.831.367.533,66	11.672.460.300.395,30
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : ALL
Bidang : ALL
Sub Bidang : ALL
Satuan Kerja : ALL

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah					Kurang					Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					Hibah	Mutasi Masuk	Rekasl dari Aset Tetap	Rekasl dari Aset Lainnya	Koreksi	Ekstrakontabel	Mutasi Keluar	Reklas ke Aset Tetap	Reklas ke Aset Lainnya	Koreksi			
1	1.5.5.01.01.01.001 Akumulasi Amortisasi Goodwill	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1.5.5.01.01.01.002 Akumulasi Amortisasi Lisensi dan Frenchise	2	324.680.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.296.000	42.296.000	282.384.000
3	1.5.5.01.01.01.003 Akumulasi Amortisasi Hak Cipta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.5.01.01.01.004 Akumulasi Amortisasi Hak Paten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.5.01.01.01.005 Akumulasi Amortisasi Software	453	33.447.652.913	20.973.384.677	-	-	1.437.266.119	-	101.436.116	-	-	6.600.000	1.028.085.732	1.083.333	3.504.242.366	24.980.560.213	8.467.092.700
6	1.5.5.01.01.01.006 Akumulasi Amortisasi Kajian	9	2.670.080.360	33.758.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.471.023	104.229.823	2.565.850.537
7	1.5.5.01.01.01.007 Akumulasi Amortisasi Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1.5.5.01.01.01.008 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	7	97.650.657	178.298.157	-	-	-	-	-	-	-	-	98.070.000	-	2.173.333	82.401.490	15.249.167
Jumlah		471	36.540.063.930,00	21.190.441.634,27	-	-	1.437.266.119,34	-	101.436.115,84	-	-	6.600.000,00	1.126.155.732,34	1.083.333,33	3.614.182.721,92	25.209.487.525,70	11.330.576.404,30

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : ALL
Bidang : ALL
Sub Bidang : ALL
Satuan Kerja : ALL

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah			Kurang							Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					Reklas dari Aset tetap	Reklas dari Aset ATB	Koreksi Tambah	Reklas ke Aset Tetap	Reklas ke Aset ATB	Reklas Ke Pemanfaatan	Penjualan	Ganti Rugi	Hibah dll	Koreksi			
1	1.5.6.01.01.02.001 Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	848.583	972.952.503.977	284.034.552.241	70.297.308.451	-	-	1.135.246.260	-	-	1.275.950.219	-	292.901.417	425.242.135	-	351.202.520.661	621.749.983.316
2	1.5.6.01.01.02.002 Akumulasi Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional	130.378	110.466.771.188	62.648.380.856	21.333.706.614	-	-	281.326.500	-	15.091.769.518	-	-	2.408.545.221	1.475.377.530	1.898.672.988	66.623.741.690	43.843.029.498
3	1.5.6.01.01.02.003 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Lainnya	49.849	36.638.118.556	6.372.228.725	8.801.612.110	1.126.155.732	-	232.650.000	-	-	-	17.872.250	1.471.138.880	-	-	14.578.335.437	22.059.783.119
Jumlah		1.028.810	1.120.057.393.721,00	353.055.161.821,83	100.432.627.175,16	1.126.155.732,34	-	1.649.222.759,67	-	15.091.769.517,58	1.275.950.219,07	17.872.250,00	4.172.585.517,66	1.900.619.664,96	1.898.672.988,47	432.404.597.788,86	687.652.795.932,14

AKUMULASI PENYUSUTAN ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Kode Lokasi : ALL
Bidang : ALL
Sub Bidang : ALL
Satuan Kerja : ALL

No.	Uraian	Jml.	Nilai Akhir	Akumulasi Awal	Tambah		Kurang		Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					Reklas dari Aset Lainnya	Koreksi Tambah	Reklas ke Aset Tetap	Koreksi			
1	1.5.6.01.01.01.001 Akumulasi Penyusutan Sewa	39	32.996.266.252	3.129.233.760	15.091.769.518	-	574.140.471	-	313.332.798	17.960.195.603	15.036.070.649
2	1.5.6.01.01.01.002 Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Pemanfaatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	1.5.6.01.01.01.003 Akumulasi Penyusutan Bangun Serah Guna (BSG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1.5.6.01.01.01.004 Akumulasi Penyusutan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	1.5.6.01.01.01.005 Akumulasi Penyusutan Pinjam Pakai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		39	32.996.266.252,00	3.129.233.759,52	15.091.769.517,58	-	574.140.471,33	-	313.332.797,53	17.960.195.603,30	15.036.070.648,70

KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

KDP

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2021-09-23 00:00:00	10.340.600,00	
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2021-05-20 00:00:00	15.655.600,00	-
3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-01-30 00:00:00	39.793.600,00	JHJGHJ
4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-02-06 00:00:00	60.288.800,00	
5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	69.115.200,00	-
6	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	39.816.000,00	-
7	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	65.932.000,00	-
8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	39.869.600,00	-
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	59.914.400,00	-
10	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	51.497.600,00	-
11	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	48.794.000,00	-
12	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	91.342.500,00	-
13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	88.341.800,00	-
14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	16.169.600,00	-
15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl. Jenderal Sudirman No.1A, Gebyaran, Puri, Kec. Pati, Kabupaten Pati	2020-08-13 00:00:00	10.332.000,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN KEGIATAN PEMENUHAN SARPRAS SMA BERUPA PEMBANGUNAN RKB SMAN 3 PATI (1 RKB) TERMIN 1 (80%)
16	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl. Kampus UMK, Kayuapu Kulon, Gondangmanis, Kec. Bae, Kabupaten Kudus; Jl. Raya Pati - Kudus No.Km.10, RW.No.34, Jekulo, Klaling, Kec. Jekulo, Kabupaten Kudus	2020-08-05 00:00:00	16.690.400,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN RKB SMAN 2 BAE DAN TOILET SMAN 1 JEKULO TERMIN 1 (80%)
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl. Raya Sumber-Sulang KM. 6 Sumber, Logung, Kec. Sumber, Kab. Rembang	2020-08-10 00:00:00	12.878.400,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN KEGIATAN PEMENUHAN SARPRAS REHAB GEDUNG SMKN 1 SUMBER 2 RUANG TERMIN 1 (80%)
18	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. Raya Sumber - Rembang Km. 2, Sekarsari, Kec. Sumber, Kab. Rembang	2020-08-13 00:00:00	10.592.000,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN KEGIATAN PEMENUHAN SARPRAS PEMBANGUNAN RKB SMAN 1 SUMBER TERMIN 1 (80%)
19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl Ganesha II No 32, Purwosari, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus	2020-08-14 00:00:00	10.624.000,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SLBN PURWOSARI (2 RUANG) TERMIN 1 (80%)
20	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	RT. 02 RW. 01 Desa Dorokandang Kec. Lasem Kab. Rembang; Jl Jepara Km 7. Kaliwungu KAB. KUDUS	2020-08-13 00:00:00	11.373.600,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN BERUPA KEGIATAN REHAB GEDUNG SLBN LASEM (2 RUANG)BDAN SLBN KALIWUNGU (1 RUANG) TERMIN 1 80%
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. DESA REJOSARI KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS	2020-08-25 00:00:00	4.243.200,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN KEGIATAN PEMENUHAN SARPRAS SMK BERUPA PEMBANGUNAN TOILET/JAMBAN SMKN 2 KUDUS (1 RUANG) TERMIN 1 (80%)

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. R. SUPRAPTO NO. 82 RT. 7 RW. 21 KEL. PURWODADI	2019-08-15 00:00:00	1.153.725.000,00	BANGUNAN 3 R. KELAS + 3 KM. SISWA - HIBAH KOMITE.2019 (GD. E)
23	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMK Negeri 1 Wirosari	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. GAJAH MADA NO.144 RT 1 RW 1 KEL. WIROSARI KEC. WIROSARI KAB. GROBOGAN	2020-06-30 00:00:00	623.148.000,00	MASJID SEKOLAH. SPI. SMSTR I.2020
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. TERATAI BOYOLALI	2022-03-28 00:00:00	13.250.000,00	DED SPPD DALAM DAERAH
25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	MANGGUNG, Dusun III, Sukorejo, Kec. Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57331	2020-06-15 00:00:00	17.732.800,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN RPS SMK N 1 MUSUK TETAPI KARENA PANDEMI PENGERJAAN BERHENTI SAMPAI GAMBAR SAJA
26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl Manisrenggo JL Bugisan Raya	2020-06-20 00:00:00	19.606.400,00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN RKB SMAN 1 PRAMBANAN DED HANYA BERUPA GAMBAR SAJA KARENA PANDEMI
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl Manisrenggo Jl Bugisan Raya	2020-06-05 00:00:00	3.960.000,00	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PEMBANGUNAN RKB SMA N 1 PRAMBANAN
28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl Raya Utara No 148 Juwangi Sendangharjo Boyolali	2020-06-15 00:00:00	17.782.400,00	DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAMBAN DAN SANITASI SMK N 1 JUWANGI SMK N 1 KLEGO BERHENTI PADA GAMBAR SAJA KARENA PANDEMI
29	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl Tegalrejo Raya Tegalrejo Kec Argomulyo Kota Salatiga	2020-06-20 00:00:00	6.350.000,00	SPPD DALAM DAERAH LAB KOMPUTER SMA N 2 SALATIGA
30	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl Bawang Bangunharjo Pulisen Kec Boyolali	2020-06-22 00:00:00	4.300.000,00	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH RKB BOYOLALI
31	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl Tegalrejo Raya Tegalrejo Kec Argomulyo	2020-06-20 00:00:00	14.960.000,00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAB KOMPUTER SMAN 2 SALATIGA TETAPI HANYA SAMPAI GAMBAR KARENA PANDEMI
32	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	MANGGUNG Dusun III Sukorejo Kec Musuk	2020-06-20 00:00:00	7.460.000,00	SPPD PEMBANGUNAN RPS SMKN 1 MUSUK
33	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	l Bawang Bangunharjo Pulisen Kec Boyolali	2020-06-20 00:00:00	400.000,00	MAKANAN KECIL SNACK PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU KABUPATEN BOYOLALI SLB NEGERI
34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Nogosari	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SMA Negeri 1 Nogosari	2014-01-02 00:00:00	613.980.000,00	DAK Dikpora 2014 (Ruang Penunjang Guru)
35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. R.M SAID NO. 09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2022-03-29 00:00:00	7.172.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
36	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09,TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	9.200.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
37	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NP.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	13.600.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
38	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO. 09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	19.956.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
39	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	19.953.600,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	9.200.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	19.360.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
42	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	19.200.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	15.160.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	7.897.600,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
45	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	8.712.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	14.000.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RM. SAID. NO.09, TEGALGEDE, KARANGANYAR	2023-01-09 00:00:00	15.136.000,00	BARU TAHAP PEMILIHAN PENYEDIAN TETAPI TIDAK DILANJUTKAN KARENA ADANYA PANDEMI COVID 19
48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. SLAMET RIYADI NO 1 SURAKARTA	2020-07-23 00:00:00	17.896.120,00	LAB IPA SMK
49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. SLAMET RIYADI NO. 1 SURAKARTA	2020-08-10 00:00:00	14.792.800,00	REHAB KELAS SMK
50	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. SLAMET RIYADI NO. 1 SURAKARTA	2020-07-23 00:00:00	15.968.040,00	LAB KOM SMA
51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. SLAMET RIYADI NO. 1 SURAKARTA	2020-08-10 00:00:00	19.574.240,00	REHAP KELAS SMA
52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-05-25 00:00:00	74.162.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-03-30 00:00:00	48.640.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
54	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-03-20 00:00:00	27.588.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
55	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-03-23 00:00:00	24.763.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
56	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-04-06 00:00:00	67.540.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
57	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-03-27 00:00:00	73.678.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
58	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-04-07 00:00:00	39.195.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-03-30 00:00:00	78.993.200,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
60	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2022-03-20 00:00:00	58.982.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN
61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	-	2020-05-05 00:00:00	34.694.000,00	MASIH DALAM BENTUK PERENCANAAN (DED)
62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. LOGENDING KM 3 CANDIRENGGO	2020-03-02 00:00:00	5.270.000,00	DED REHAB RUANG KELAS/TEMPAT KERJA
63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RAYA SIGALUH KM 13 GEMBONGAN	2023-02-08 00:00:00	4.760.000,00	
64	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RAYA PANICAN, KEMANGKON, PURBALINGGA	2020-03-02 00:00:00	14.271.500,00	DED PEMBANGUNAN RKB SMAN 1 KEMANGKON
65	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. GATOT SUBROTO KM 6 BOJASARI, KERTEK, WONOSOBO	2020-03-02 00:00:00	5.270.000,00	DED REHAB RUANG KERJA SMAN 1 KERTEK

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
66	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RAYA BATUR, KECAMATAN BATUR, BANJARNEGARA	2020-03-02 00:00:00	13.974.000,00	DED PEMBANGUNAN RKB SMAN 1 BATUR
67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2020-03-02 00:00:00	5.066.000,00	DED PEMBANGUNAN JAMBAN SMAN 1 AYAH
68	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BALEKAMBANG KM 4 PLOBANGAN, SELOMERTO	2020-03-02 00:00:00	14.365.000,00	DED PEMBANGUNAN RKB SMAN 1 SELOMERTO
69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RAYA PADAMARA	2020-03-02 00:00:00	5.270.000,00	DED REHAB RUANG KELAS SMAN 1 PADAMARA
70	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RAYA PADAMARA	2020-03-02 00:00:00	4.862.000,00	DED PEMBANGUNAN JAMBAN SMAN 1 PADAMARA
71	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RAYA SIGALUH KM 13 GEMBONGAN	2020-03-02 00:00:00	5.270.000,00	DED REHAB RUANG KELAS/TEMPAT KERJA
72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. GATOT SUBROTO KM 6 BOJASARI	2020-03-02 00:00:00	4.802.500,00	DED PEMBANGUNAN JAMBAN SMAN 1 KERTEK
73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMK Negeri 1 Punggelan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jalan Raya Pasar Manis, Loji, RT 01 RW 05 Punggelan, Banjarnegara Kode Pos 53462	2019-08-20 00:00:00	1.058.498.500,00	BANGUNAN GOR HIBAH KOMITE PEMBANGUNAN MULTI YEARS
74	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMK Negeri 1 Puring	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA TAMBAKMULYA, JL. SELATAN SELATAN KM 04 PURING	2019-07-31 00:00:00	1.900.000.000,00	BANGUAN KANTOR DAN RPS (BANGUNAN SUDAH SELESAI)
75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	CILACAP	2023-02-28 00:00:00	19.956.000,00	PERENCANAAN SMKN 1 BINANGUN, SMKN 1 KAWUNGANTEN, SMKN KARANGPUCUNG DAN SMKN 1 WANAREJA KAB CILACAP
76	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Patikraja	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. ADIPURA 3 RT 03 RW 06 PATIKRAJA KEC PATIKRAJA KAB BANYUMAS	2016-10-01 00:00:00	1.206.000.000,00	MASJID TAHUN 2016
77	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BAWAL NO 5	2020-01-28 00:00:00	18.080.000,00	027.2/0132.C/SPK/CD.11 /2020- PERENCANAAN R. PERPUS SMK KAB. BREBES
78	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BAWAL NO. 5	2020-01-28 00:00:00	4.520.000,00	027.2/ 0132.c/SPK/cd.11/2020 - DED PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH BREBES
79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BAWAL NO. 5	2020-06-30 00:00:00	18.000.000,00	027.2/708.A/SPK/CD.11/ 2020 - JASA PENGAWASAN PERPUSTAKAAN SMK N 2 SONGGOM
80	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BAWAL NO. 5	2020-01-28 00:00:00	12.360.000,00	No.SPK 027.2/0132.e/SPK/cd.11/ 2020 - DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN JAMBAN/TOILET 3 SMK N KOTA TEGAL
81	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BAWAL NO. 5	2020-01-28 00:00:00	12.220.000,00	027.2/ 0132.d/SPK/cd.11/2020 - DED LAB. KOMP TIK SMK N BREBES
82	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BAWAL NO. 5	2020-01-28 00:00:00	8.720.000,00	027.2/0150/SPK/cd.11/2 020 - DED PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERPUSTAKAAN SLB
83	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BAWAL NO. 5	2020-01-28 00:00:00	4.200.000,00	No. 027.2/0150.a/SPK/cd.11/ 2020 - DED Perencanaan Pembangunan Jamban/Toilet SLB
84	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Larangan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN RAYA SITANGGAL BARAT	2015-01-01 00:00:00	171.600.000,00	DATA AUDIT SIDAK SESUAI
85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Larangan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN RAYA SITANGGAL BARAT	2015-02-01 00:00:00	272.350.000,00	DATA AUDIT TIDAK SESUAI
86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Larangan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL RAYA BARAT SITANGGAL	2015-12-01 00:00:00	100.000.000,00	DATA AUDIT TIDAK SESUAI
87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Sirampog	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl.Raya Sirampog KM 09	2015-01-01 00:00:00	272.350.000,00	Lab Ipa
88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Sirampog	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl.Raya Sirampog KM 09	2015-01-01 00:00:00	171.600.000,00	Ruang Kelas Baru
89	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Sirampog	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl.Raya Sirampog KM 10	2015-01-01 00:00:00	100.000.000,00	Masjid
90	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Tanjung	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL CEMARA TANJUNG	2015-01-01 00:00:00	480.000.000,00	BANGUNAN KELAS BARU

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
91	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	9.754.800,00	PEMBAYARAN 80% PEKERJAAN DED/PERENCANAAN KEGIATAN REHAB GEDUNG KANTOR SMK NEGERI 2 SLAWI KAB. TEGAL, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
92	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	3.984.000,00	PEMBAYARAN 80% DED/PERENCANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SMA N 1 KRAMAT KAB. TEGAL, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	7.880.000,00	PEMBAYARAN 80% DED/PERENCANAAN KEGIATAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SMA N 1 BELIK KAB. PEMALANG, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA PENDEMI
94	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	19.830.800,00	PEMBAYARAN 80% PEKERJAAN DED/PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAB. KOMPUTER SMKN 1 PETARUKAN KAB. PEMALANG, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	5.808.000,00	PEMBAYARAN 80% DED/PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SLB N SLAWI KAB.TEGAL, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
96	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	9.640.400,00	PEMBAYARAN 80% PEKERJAAN DED/PERENCANAAN KEGIATAN PEMBANGUNANAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMK SMK NEGERI 1 PETARUKAN KAB.PEMALANG, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	19.588.800,00	PEMBAYARAN 80% PEKERJAAN DED/PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SMKN 1 ADIWERNA DAN SMKN1 WARUREJA KAB. TEGAL, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	19.984.800,00	PEMBAYARAN 80% PEKERJAAN DED/PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAB. KOMPUTER SMKN 1 WARUREJA KAB. TEGAL, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
99	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	16.442.800,00	PEMBAYARAN 80% PEKERJAAN DED/PERENCANAAN REHAB GEDUNG KANTOR SMKN 1 LEBAKBARANG KAB. PEKALONGAN, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA PENDEMI

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JALAN JENDRAL SUDIRMAN TIMUR NO. 1 PEMALANG	2020-08-31 00:00:00	5.808.000,00	PEMBAYARAN 80% DED/PERENCANAAN PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) SLB N 2 PEMALANG KAB. TEGAL, TIDAK DILANJUTKAN KE PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KARENA
101	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Moga	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL CAMPING SIGHT BANYUMUDAL MOGA PEMALANG	2012-12-31 00:00:00	58.944.020,00	REKLAS BM / P3D 2015
102	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMK Negeri 1 Pemalang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SMK NEGERI 1 PEMALANG JL.JEND.GATOT SUBROTO PEMALANG	2013-12-01 00:00:00	136.500.000,00	REHABILITASI RUANG KELAS DAK 2013 DAN APBD II
103	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 2 Slawi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RA. KARTINI PO BOX 22 DESA DUKUHWRINGIN RT 01 RW 03 SLAWI KAB. TEGAL	2015-12-31 00:00:00	501.790.000,00	TAMBAHAN P3D 2015 (3 LOKAL RUANG KELAS GEDUNG B)
104	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 2 Slawi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RA. KARTINI PO BOX 22 DESA DUKUHWRINGIN RT 01 RW 03 SLAWI KAB. TEGAL	2015-12-31 00:00:00	167.790.000,00	TAMBAHAN P3D 2015 (1 LOKAL RUANG KOMPUTER GEDUNG B)
105	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 2 Slawi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RA. KARTINI PO BOX 22 DESA DUKUHWRINGIN RT 01 RW 03 SLAWI KAB. TEGAL	2016-12-10 00:00:00	171.600.000,00	TAHUN ANGGARAN 2016. DANA SARPRAS/KOMITE. Pengedakan 1 Lokal (R. HAll tengah)
106	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 2 Slawi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RA. KARTINI PO BOX 22 DESA DUKUHWRINGIN RT 01 RW 03 SLAWI KAB. TEGAL	2016-01-01 00:00:00	255.000.000,00	TAHUN ANGGARAN 2016. PEMABANGUNAN MASJID. KONDISI 30%
107	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 2 Slawi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. RA. KARTINI PO BOX 22 DESA DUKUHWRINGIN RT 01 RW 03 SLAWI KAB. TEGAL	2016-12-10 00:00:00	70.000.000,00	TAHUN ANGGARAN 2016. DANA SARPRAS/KOMITE. Gudang Komputer atas
108	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMK Negeri 1 Bumijawa	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL WREDAMETA NO 379 RT 07 RW 01 KEC.BUMIAJWA	2015-01-05 00:00:00	890.000.000,00	BANGUNAN KANTOR DAN 3 RUANG KELAS
109	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMK Negeri 1 Bumijawa	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL WREDAMETA NO 379 RT 07 RW 01 KEC.BUMIJAWA	2016-10-28 00:00:00	525.000.000,00	BANGUNAN MASJID
110	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMK Negeri 1 Bumijawa	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL WREDAMETA NO 379 RT 07 RW 01 KEC.BUMIJAWA	2016-12-30 00:00:00	160.000.000,00	GEDUNG PERPUSTAKAAN
111	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 1 Kedungwuni	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SMA 1 Kedungwuni Jln. Paesan Utara RT02/05 KEL. KEDUNGWUNI BARAT KEC. Kedungwuni Kab. Pekalongan	2015-12-30 00:00:00	1.083.140.000,00	Gedung Serba Guna
112	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	9.600.000,00	-
113	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	59.782.400,00	-
114	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	32.400.000,00	-
115	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	5.760.000,00	-
116	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	39.860.000,00	-
117	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	58.600.000,00	-
118	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	58.640.000,00	-
119	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2021-05-20 00:00:00	29.880.000,00	-
120	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	14.400.000,00	-
121	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	59.112.000,00	-
122	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	58.388.000,00	-
123	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 2 Pekalongan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KUSUMA BANGSA	1900-01-01 00:00:00	1.111.800.000,00	REHABILITASI 3 RUANG KELAS DANA APBN 600000000 DANA PENDAMPING 511800000

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
124	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN .SMA Negeri 2 Sukorejo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2016-12-12 00:00:00	90.337.675,00	027 / 13006.a / Dispendik
125	DINAS KESEHATAN .DINAS KESEHATAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. P. DIPONEGORO CACABAN, KEC. MAGELANG TENGAH KOTA MAGELANG	2020-08-19 00:00:00	97.757.000,00	PEKERJAAN JASA KONSULTASI AMDALALIN RSUD KANKER PROVINSI DI MAGELANG
126	DINAS KESEHATAN .DINAS KESEHATAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. P. DIPONEGORO , DUKUH PEKALONGAN UTARA KOTA PEKALONGAN	2020-10-14 00:00:00	491.447.000,00	PEKERJAAN JASA KONSULTASI AMDALALIN RSUD IBU ANAK PROVINSI DI PEKALONGAN
127	DINAS KESEHATAN .Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BRANTAS NO. 1 TEGALYOSO KLATEN	2022-11-07 00:00:00	25.000.000,00	GAMBAR PERENCANAAN MUSHOLA (DED) BALKESMAS WILAYAH KLATEN
128	DINAS KESEHATAN .Balai Kesehatan Indra Masyarakat	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 39 SEMARANG	2020-09-29 00:00:00	529.496.220,00	PENYUSUNAN DOKUMEN AMDALALIN RUMAH SAKIT KHUSUS MATA MASYARAKAT PROVINSI JAWA TENGAH
129	RSUD Dr. MOEWARDI.RSUD Dr. MOEWARDI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KOL. SOETARTO 132	2017-12-31 00:00:00	228.194.400,00	DED GEDUNG PARKIR MOTOR BERTINGKAT
130	RSUD Dr. MOEWARDI.RSUD Dr. MOEWARDI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KOL. SOETARTO 132	2020-12-31 00:00:00	576.708.000,00	DED GEDUNG CRITICAL CENTER
131	RSUD Dr. MOEWARDI.RSUD Dr. MOEWARDI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2022-01-24 00:00:00	60.453.447.626,00	DED GEDUNG ADMINISTRASI DAN PARKIR
132	RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO.RSUD Dr. AMINOGONDO UTOMO	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. BRIGJEND SUDIARTO NO. 347 SEMARANG	2020-12-31 00:00:00	2.606.628.367,00	PEMBANGUNAN GEDUNG RAMP
133	RSJD SURAKARTA.RSJD SURAKARTA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL.KI HAJAR DEWANTARA NO 80 KENTHINGAN RT 01 RW 17 JEBRES SURAKARTA	2022-03-28 00:00:00	35.465.766.049,00	KDP GEDUNG RAWAT INAP 5 LANTAI
134	RSJD SURAKARTA.RSJD SURAKARTA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	JL.KI HAJAR DEWANTARA NO 80 KENTHINGAN RT 01 RW 17 JEBRES SURAKARTA	2022-03-28 00:00:00	48.290.000,00	PERENCANAAN PNEUMATIC TUBE
135	RSJD SURAKARTA.RSJD SURAKARTA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	JL KI HAJAR DEWANTORO NO 80 KENTINGAN RT 001 RW 017 JEBRES SURAKARTA	2022-10-25 00:00:00	52.700.000,00	JASA KONSULTASI PERENCANAAN HYDRANT
136	RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI.RSJD Dr. RM. SOEJARWARDI	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	739.121.250,00	-
137	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA & CIPTA KARYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA MUNGKID KEC MUNGKID KAB MAGELANG	2019-12-31 00:00:00	19.581.462.730,00	PEMBANGUNAN MASJID AGUNG MAGELANG
138	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA & CIPTA KARYA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KELURAHAN SUSUKAN KEC UNGARAN TIMUR KAB SEMARANG	2022-02-07 00:00:00	363.140.505,00	PERENCANAAN JATENG VALLEY
139	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA BANDARKAWUNG KEC BUMIAYU KAB BREBES	2016-12-31 00:00:00	390.267.000,00	DED JEMBATAN CIRAJA RUAS BUMIAYU - SALEM
140	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Tegal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA SIRAMPOG KEC SIRAMPOK KAB BREBES	2019-12-31 00:00:00	97.506.908,00	FS/UKL/UPL (UKL/UPL Jembatan Kali Pedes)
141	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KESESI KEC KAJEN KAB PEKALONGAN	2018-12-31 00:00:00	290.296.420,00	Perencanaan Jembatan Jagung RUAS JALAN KEBONAGUNG - KESESI
142	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pekalongan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA WIRADESA KEC WIRADESA KAB PEKALONGAN	2019-12-31 00:00:00	201.496.573,00	FS/UKL/UPL (FS FO Wiradesa)
143	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA KLAMPOK KEC PURWOREJO KAB BANJARNEGARA	2016-12-31 00:00:00	275.715.000,00	DED JEMBATAN K. SERAYU KLAMPOK NO. 24.150.006 RUAS KLAMPOK - PURBALINGGA
144	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA KROYA KEC KROYA KAB CILACAP	2016-12-31 00:00:00	169.700.000,00	FS FO BUNTU - KROYA (RUAS JALAN BUNTU - KROYA - SLARANG)
145	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA KLAMPOK KEC PURWOREJO KAB BANJARNEGARA	2016-12-31 00:00:00	247.851.000,00	DED JEMBATAN K. KLAWING NO. 24.150.001 RUAS KLAMPOK - PURBALINGGA
146	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA PEKUNCEN KEC PEKUNCEN KAB BANYUMAS	2016-12-31 00:00:00	242.746.000,00	DED JEMBATAN CIKAWUNG NO. 24.153.015
147	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KROYA KEC BUNTU KAB CILACAP	2018-12-31 00:00:00	529.519.173,00	DED FO Buntu - Kroya - Slarang
148	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Cilacap	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA JETIS KEC KEMANGKON KAB PURBALINGGA	2019-12-31 00:00:00	97.479.408,00	FS/UKL/UPL (UKL/UPL Jembatan Klawing)

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
149	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA KEDUNGJATI KEC KEDUNGJATI KAB GROBOGAN	2016-12-31 00:00:00	231.759.000,00	DED JEMBATAN BLANDONGAN NO 24.190.011 KM SMG 43+090
150	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA KALORAN KEC KALORAN KAB TEMANGGUNG	2016-12-31 00:00:00	48.895.000,00	DED PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS LEMAHBAN - KALORAN TANJAKAN DS. DUREN
151	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA BOJA KEC BOJA KAB KENDAL	2019-12-31 00:00:00	145.879.408,00	DED Jembatan Blorong A dan Jembatan Blorong B (Cangkiran-Boja-Sukorejo)
152	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA WELERI KEC PATEAN KAB KENDAL	2019-12-31 00:00:00	57.759.704,00	DED Jembatan Damar (Weleri - Patean)
153	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GODONG KEC GODONG KAB GROBOGAN	2019-12-31 00:00:00	78.609.153,00	DED Jembatan Setu (Semarang - Godong)
154	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GODONG KEC GODONG KAB GROBOGAN	2019-12-31 00:00:00	149.859.054,00	DED Jembatan Rowosari (Semarang - Godong)
155	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KELURAHAN SUSUKAN KEC UNGARAN TIMUR KAB SEMARANG	2020-12-31 00:00:00	87.243.750,00	DED JATENG VALLEY
156	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GODONG KEC GODONG KAB GROBOGAN	2019-12-31 00:00:00	41.090.386,00	DED Jembatan Pare (Semarang - Godong)
157	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GODONG KEC GODONG KAB GROBOGAN	2019-12-31 00:00:00	43.507.468,00	DED Jembatan Gogodalem (Semarang - Godong)
158	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Semarang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GODONG KEC GODONG KAB GROBOGAN	2019-12-31 00:00:00	131.015.255,00	DED Jembatan Cabean (Semarang - Godong)
159	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.TANAH DALAM PENGERJAAN	DESA BOROBUDUR KEC BOROBUDUR KAB MAGELANG	2020-12-31 00:00:00	39.305.177,00	PERENCANAAN PENGADAAN TANAH KUJON
160	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA GRABAG KEC GRABAG KAB PURWOREJO	2016-12-31 00:00:00	48.680.000,00	DED UNTUK PERBAIKAN ALINYEMEN RUAS PURWOREJO - SIBOLONG LOKASI IRUNG PETRUK
161	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KUTOARJO KEC KUTOARJO KAB PURWOREJO	2020-12-31 00:00:00	37.364.490,00	DED Jembatan Silekor (Kutoarjo-Ketawang)
162	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Magelang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KUTOARJO EC KUTOARJO KAB PURWOREJO	2019-12-31 00:00:00	22.418.694,00	DED Jembatan Kedung (Kutoarjo-Ketawang)
163	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KELRAHAN PATI KEC PATI KAB PATI	2019-12-31 00:00:00	110.954.408,00	DED Jembatan Pakis (Pati-Tayu)
164	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KELRAHAN PATI KEC PATI KAB PATI	2020-02-11 00:00:00	99.349.408,00	DED Jembatan Getaan (Jl. Soponyono Pati)
165	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KELRAHAN PATI KEC PATI KAB PATI	2020-02-11 00:00:00	108.754.408,00	DED Jembatan Suwatu (Pati-Tayu)
166	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KELING KEC KELING KAB JEPARA	2019-12-31 00:00:00	62.131.941,00	DED Jembatan Mlonggo (Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati)
167	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KELING KEC KELING KAB JEPARA	2019-12-31 00:00:00	56.270.436,00	DED Jembatan Tayu (Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati)
168	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Pati	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KELING KEC KELING KAB JEPARA	2019-12-31 00:00:00	46.892.031,00	DED Jembatan Tunggul (Jepara-Keling/Bts. Kab. Pati)
169	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA WIROSARI KEC WIROSARI KAB GROBOGAN	2016-12-31 00:00:00	253.158.000,00	DED JEMBATAN LUSI RUAS NO. 24.215.017.0.01 RUAS PURWODADI - WIROSARI
170	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA KATELAN KEC TANGEN KAB SRAGEN	2016-12-31 00:00:00	5.876.479.922,00	DED JEMBATAN GANEFO NO. 24.215.017.0.01 RUAS GALEH - NGRAMPAL
171	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KEDUNGATI KEC KEDUNGJATI KAB GROBOGAN	2019-02-08 00:00:00	208.785.850,00	Perencanaan Jembatan Japan
172	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KEDUNGJATI KEC KEDUNGJATI KAB GROBOGAN	2019-02-08 00:00:00	201.506.113,00	Perencanaan Jembatan Kaliwatu
173	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA TUNTANG KEC TUNTANG KAB SEMARANG	2019-02-08 00:00:00	226.848.338,00	Perencanaan Jembatan Tuntang Tempuran
174	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KEDUNGJATI KEC KEDUNGJATI KAB GROBOGAN	2019-12-31 00:00:00	96.764.408,00	FS/UKL/UPL (UKL/UPL Jembatan Blandongan)

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
175	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Purwodadi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA SRAGEN KEC SRAGEN KAB SRAGEN	2019-12-31 00:00:00	97.506.908,00	FS/UKL/UPL (UKL/UPL Jembatan Ganefo (Sragen)
176	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	KEL PURWOSARI KEC LAWEAN KOTA SURAKARTA	2016-12-31 00:00:00	299.530.000,00	DED UKL UPL PLY OVER PURWOSARI
177	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA CAWAS KEC CAWAS KAB KLATEN	2019-12-31 00:00:00	96.599.408,00	FS/UKL/UPL (UKL/UPL Jembatan Dengkeng)
178	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA BONYOKAN KEC CAWAS KAB KLATEN	2019-12-31 00:00:00	79.765.435,00	DED Jembatan Bonyokan (Karangwuni-Cawas-Jentir)
179	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA .Balai Pelaksana Teknis Jalan Wilayah Surakarta	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA CAWAS KEC CAWAS KAB KLATEN	2020-12-31 00:00:00	89.433.973,00	DED Jembatan Dengkeng (Karangwuni-Cawas-Jentir)
180	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PENGAMANAN PANTAI KABUPATEN BREBES	2019-12-26 00:00:00	304.412.500,00	DD PENGAMANAN PANTAI KAB. BREBES
181	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	SUNGAI KEMIRI KOTA TEGAL	2019-12-26 00:00:00	205.449.335,00	DD SUNGAI KEMIRI
182	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PANTAI KOTA TEGAL	2019-12-26 00:00:00	304.412.500,00	DD PANTAI KOTA TEGAL
183	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	SUNGAI BREMI KOTA PEKALONGAN	2019-12-26 00:00:00	362.935.000,00	DD SUNGAI BREMI
184	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	SUNGAI SRAGI BARU KABUPATEN PEKALONGAN	2019-12-26 00:00:00	219.014.000,00	DD SUNGAI SRAGI BARU
185	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KALI KERUH DESA PLOMPONG KABUPATEN BREBES	2019-12-26 00:00:00	102.550.700,00	DD GROUNDSILL JEMBATAN KALI KERUH DESA PLOMPONG KABUPATEN BREBES
186	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KALI SONO KABUPATEN BATANG	2019-12-26 00:00:00	105.864.000,00	DD NORMALISASI MUARA KALI SONO
187	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KALI BACIN KABUPATEN BREBES	2019-12-26 00:00:00	205.449.335,00	DD KALI BACIN
188	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KALI KERUH KABUPATEN BREBES	2019-12-26 00:00:00	102.666.200,00	GEOTEKNIK DAN TOPOGRAFI KALI KERUH
189	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	SUNGAI MEDURI KABUPATEN PEKALONGAN	2019-12-26 00:00:00	339.743.000,00	DD SUNGAI MEDURI
190	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	SUNGAI GANGSA KABUPATEN TEGAL	2019-12-26 00:00:00	376.362.335,00	DD SUNGAI GANGSA
191	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KALI ERANG KABUPATEN BREBES	2019-12-26 00:00:00	176.611.000,00	DD PERKUATAN TEBING KALI ERANG
192	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KABUPATEN PEKALONGAN (BENDUNG GERAK SUNGAI LOJI)	2020-10-27 00:00:00	740.406.300,00	DED BENDUNG GERAK SUNGAI LOJI
193	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	REVIEW DESAIN GROUNDSILL BENDUNG MEJAGONG (KAB PEMALANG)	2022-12-31 00:00:00	97.957.000,00	REVIEW DESAIN GROUNDSILL BENDUNG MEJAGONG
194	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	REVIEW DESAIN DI PADUREKSO(KAB. PEKALONGAN) DAN DI SUDIKAMPIR (KAB. PEKALONGAN) (MODERNISASI IRIGASI)	2022-12-31 00:00:00	1.025.534.550,00	REVIEW DESAIN DI PADUREKSO DAN DI SUDIKAMPIR
195	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PERENCANAAN EMBUNG KEMURANG WETAN (KAB. BREBES)	2022-12-31 00:00:00	248.545.000,00	PERENCANAAN EMBUNG KEMURANG WETAN
196	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PERENCANAAN EMBUNG PAGENTERAN (KAB. PEMALANG)	2022-12-31 00:00:00	256.058.000,00	PERENCANAAN EMBUNG PAGENTERAN
197	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PERENCANAAN EMBUNG KALI KUWUH (KAB. PEMALANG)	2022-12-31 00:00:00	264.385.000,00	PERENCANAAN EMBUNG KALI KUWUH
198	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD PENANGANAN LONGSORAN EMBUNG CIKEUSAL (KAB BREBES)	2022-12-31 00:00:00	97.791.000,00	DD PENANGANAN LONGSORAN EMBUNG CIKEUSAL

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
199	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD PENGAMANAN TEBING SUNGAI KERUH DS. KALINUSU, DD PENGAMANAN TEBING SUNGAI PEMALI, DS. KALILANGKAP & DD NORMALISASI SUNGAI PEMALI DK, KEDUNG	2022-12-01 00:00:00	509.617.650,00	DD PENGAMANAN TEBING SUNGAI KERUH
200	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PERENCANAAN KONSERVASI DAS KALI WARIDIN (KAB. KENDAL), KALI WELO (KAB. PEKALONGAN) DAN GROUNDSIL JEMBATAN KESESI KALI LAYANGAN (KAB. PEMALANG DAN KAB.	2022-12-31 00:00:00	451.122.315,00	PERENCANAAN KONSERVASI DAS KALI WARIDIN
201	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD PENGAMANAN TEBING SUNGAI PEMALI DS. SIDOMULYO, DD PENGAMANAN TEBING SUNGAI PEMALI DS. PASAR BATANG DAN DD SUNGAI CILAKAR ANAK SUNGAI PEMALI (KAB.	2022-12-31 00:00:00	516.549.000,00	DD PENGAMANAN TEBING SUNGAI PEMALI
202	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD SUNGAI PAKIJANGAN, DD SUNGAI GANGSA (LANJUTAN) (KAB.BREBES), DD KALIGUNG LAMA (KAB.TEGAL)	2022-12-01 00:00:00	643.766.700,00	DD SUNGAI PAKIJANGAN, DD SUNGAI GANGSA
203	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI KAB. BREBES	2022-12-31 00:00:00	550.562.775,00	DD PENANGANAN BANJIR DAN ROB DI KAB. BREBES
204	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	REVIEW SISTEM SUNGAI BREMI DAN SUNGAI MEDURI (KOTA & KAB PEKALONGAN)	2022-12-31 00:00:00	97.358.000,00	REVIEW SISTEM SUNGAI BREMI DAN SUNGAI MEDURI
205	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DD PENANGANAN PANTAI TIMUR SEMARANG/DEMAK	2016-12-30 00:00:00	992.401.184,00	DD PENANGANAN PANTAI TIMUR SEMARANG/DEMAK
206	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA BANYURINGIN KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL(STUDY BASIC WADUK BODRI)	2017-12-30 00:00:00	1.084.353.351,00	STUDY BASIC WADUK BODRI
207	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA REJOSARI KEC. MIJEN KABUPATEN DEMAK	2019-12-31 00:00:00	166.605.333,00	PERENCANAAN EMBUNG REJOSARI
208	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA PIDODO KEC. KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK	2019-12-26 00:00:00	166.605.333,00	PERENCANAAN LS. PIDODO
209	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA LANJI KEC. PATEBON KABUPATEN KENDAL	2019-12-31 00:00:00	101.800.500,00	DD PENANGANAN LONGSORAN KALI BODRI DESA LANJI
210	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KELURAHAN WONOSARI KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG	2019-12-31 00:00:00	150.264.333,00	PERENCANAAN EMBUNG PLUMBON
211	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PENYELIDIKAN GEOTEK DAN TOPOGRAFI MUARA SUNGAI BODRI	2019-10-16 00:00:00	101.723.220,00	PENYELIDIKAN GEOTEKNIK DAN TOPOGRAFI SUNGAI KENDAL
212	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA TEMPURAN KEC. DEMAK KABUPATEN DEMAK	2019-12-26 00:00:00	166.605.333,00	PERENCANAAN LS KALI MATI TEMPURAN
213	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD PENANGANAN KERUSAKAN SALURAN SEKUNDER DI PADAS KLOROT (KABUPATEN SEMARANG)	2022-12-01 00:00:00	93.445.000,00	DD PENANGANAN KERUSAKAN SALURAN SEKUNDER DI PADAS KLOROT
214	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bodri Kuto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD SUNGAI KUTO (KAB. KENDAL)	2022-12-31 00:00:00	557.392.050,00	DD SUNGAI KUTO
215	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA WARU KECAMATAN KOTA REMBANG KABUPATEN REMBANG	2019-12-26 00:00:00	149.032.333,00	PERENCANAAN LS WARU
216	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DD PENANGANAN KERUSAKAN SALURAN INDUK DI MEDANI (KABUPATEN PATI)	2022-12-01 00:00:00	87.308.000,00	DD PENANGANAN KERUSAKAN SALURAN INDUK DI MEDANI
217	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GUDANGHARJO KEC. PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI	2019-08-26 00:00:00	168.003.667,00	PERENCANAAN EMBUNG BOGOR

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
218	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA NGARGOHARJO KEC. GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	168.091.667,00	PERENCANAAN EMUNG SELUR
219	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GUDANGHARJO KEC. PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	168.003.667,00	PERENCANAAN EMBUNG GODANG
220	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA TLOGOHARJO KEC. GIRITONTRO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	168.091.667,00	PERENCANAAN EMBUNG SALAM
221	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GUWOTIRTO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	172.612.250,00	PERENCANAAN EMBUNG GUWOTIRTO (TELAGA JAMBU)
222	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA SAMBIHARJO KEC. PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	168.003.667,00	PERENCANAAN EMBUNG JOHO
223	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA TIRTOSWORO KECAMATAN GIRIWOYO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	172.612.250,00	PERENCANAAN EMBUNG TIRTO SWORO (TELAGA SIMPAR)
224	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA KETOS KEC. PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	168.091.667,00	PERENCANAAN EMBUNG KEDOKAN (TELAGA TLAHAB)
225	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GUWOREJO KEC. SAMBUNG MACAN KABUPATEN SRAGEN	2019-12-26 00:00:00	150.393.333,00	PERENCANAAN EMBUNG GUWOREJO
226	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA PARANGGUPITO KEC. PARANGGUPITO KABUPATEN WONOGIRI	2019-12-26 00:00:00	172.612.250,00	PERENCANAAN EMBUNG BANGKAN
227	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DD DI TINGAL (KABUPATEN TEMANGGUNG)	2016-12-31 00:00:00	503.181.838,00	DD DI TINGAL
228	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA GEBLOK KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG	2019-12-26 00:00:00	149.046.000,00	PERENCANAAN EMBUNG GEBLOK
229	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	REVIEW DD DI LONING KRAGILAN (KABUPATEN PURWOREJO)	2022-12-31 00:00:00	98.323.000,00	REVIEW DD DI LONING KRAGILAN
230	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA WONOSARI KECAMATAN NGALIYAN KABUPATEN PURBALINGGA	2019-12-26 00:00:00	149.277.000,00	PERENCANAAN LS KALI SOKAYA
231	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG .Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DESA PIASA KULON KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS	2019-12-30 00:00:00	149.966.000,00	PERENCANAAN EMBUNG PIASA KULON
232	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN .DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DS GIRIMOYO, KAB. WONOGIRI	2014-06-16 00:00:00	70.086.000,00	DED KAWASAN TUGU BATAS JATENG-JATIM GIRIMOYO WONOGIRI
233	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN .DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	KELURAHAN PLAMONGANSARI KECAMATAN PEDURUNGAN KOTA SEMARANG	2020-10-26 00:00:00	640.337.000,00	PEMBANGUNAN RUSUNAWA KOTA SEMARANG
234	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN .DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	JL.MADUKORO BLOK AA-BB KOMPLEK PRPP SEMARANG	2020-10-22 00:00:00	39.142.400,00	DED PLTS
235	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.TANAH DALAM PENGERJAAN		2022-12-31 00:00:00	93.428.771,00	
236	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.TANAH DALAM PENGERJAAN		2022-12-31 00:00:00	236.316.850,00	
237	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL SETIABUDI KOMPLEK DIKLAT	2021-12-23 00:00:00	48.834.000,00	DED PERENCANAAN
238	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN .Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Blora	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	PASIR BANGGI	2021-02-16 00:00:00	18.700.000,00	
239	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL .DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SPIL	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	JLN. MENTERI SUPENO NO. 17 SEMARANG	2020-04-24 00:00:00	48.621.100,00	DED Perencanaan Pembangunan PLTS Rooftop
240	DINAS PERHUBUNGAN .DINAS PERHUBUNGAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Kalikuto Kendal	2015-12-01 00:00:00	40.944.000,00	DED Dermaga Kalikutho
241	DINAS PERHUBUNGAN .DINAS PERHUBUNGAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Dermaga Kalikutho Ds. Rowosari, Kendal	2016-04-21 00:00:00	55.546.250,00	UKL Dan UPL Dermaga Kalikutho Rowosari Kendal
242	DINAS PERHUBUNGAN .DINAS PERHUBUNGAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Dermaga Legon Bajak, Karimunjawa	2016-05-13 00:00:00	593.511.000,00	AMDAL Dermaga Karimunjawa

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
243	DINAS PERHUBUNGAN .DINAS PERHUBUNGAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Dermaga Kalikutho, Ds. Jatipurwo, Rowosari, Kendal	2016-04-21 00:00:00	55.746.250,00	UKL Dan UPL Dermaga Kalikutho Jatipurwo Kendal
244	DINAS PERHUBUNGAN .DINAS PERHUBUNGAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	Dermaga Sungai (Plengsengan) di Kalikutho Kendal	2020-02-10 00:00:00	45.680.000,00	Perencanaan Peningkatan Dermaga Sungai
245	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Gagak Rimang	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Gagak Rimang	2020-02-26 00:00:00	115.823.650,00	Studi DED Terminal Gagak Rimang
246	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Jatisrono	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Jatisrono, Kab. Wonogiri	2018-10-10 00:00:00	58.684.050,00	Studi DED Terminal Jatisrono 2018
247	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Pracimantoro	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Pracimantoro	2020-04-13 00:00:00	115.955.650,00	Studi DED Terminal Pracimantoro
248	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Penggung	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Penggung	2020-02-19 00:00:00	214.883.650,00	Review DED Dan Masterplan Terminal Penggung
249	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Kutoarjo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Purwomanggung	2020-02-02 00:00:00	323.818.650,00	Studi DED Dan Masterplan Terminal Purwomanggung
250	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Kutoarjo	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Tipe B di Kutoarjo	2021-04-27 00:00:00	308.829.500,00	Dokumen Lingkungan dan Studi Andalalin Terminal Kutoarjo
251	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Banjarnegara	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Banjarnegara	2020-04-13 00:00:00	115.823.650,00	Studi DED Terminal Banjarnegara
252	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Banyuputih	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Banyuputih, Kab. Batang	2018-09-12 00:00:00	58.684.050,00	Studi DED Terminal Banyuputih 2018
253	DINAS PERHUBUNGAN .Terminal Banyuputih	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Terminal Banyuputih	2021-03-04 00:00:00	62.689.300,00	Review DED Terminal Banyuputih
254	DINAS PERHUBUNGAN .Balai Transportasi Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SURAKARTA	2020-07-17 00:00:00	143.942.874,00	SHELTER LAIN-LAIN SUBOSUKOWONOSRATEN (16)
255	DINAS PERHUBUNGAN .Balai Transportasi Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	MAGELANG	2020-07-17 00:00:00	200.008.093,00	SHELTER LAIN-LAIN PURWOMANGGUNG (16)
256	DINAS PERHUBUNGAN .Balai Transportasi Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	MAGELANG-PURWOREJO	2021-03-05 00:00:00	261.545.764,00	SHELTER LAIN-LAIN PURWOMANGGUNG
257	DINAS PERHUBUNGAN .Balai Transportasi Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SEMARANG-GUBUG	2021-11-02 00:00:00	92.162.907,00	SHELTE SEMARANG - GUBUG LAIN-LAIN
258	DINAS PERHUBUNGAN .Balai Transportasi Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SOLO-WONOGIRI	2022-11-03 00:00:00	74.495.000,00	PERENCANAAN BRT TRANS JATENG SOLO-WONOGIRI
259	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH .DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2022-03-29 00:00:00	89.551.000,00	BUKU DED
260	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	JL.MGR. SOEGIYOPRANOTO NO.1	2020-03-09 00:00:00	72.915.700,00	DED PLTS
261	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA .DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KARANGREJO RT 08 RW 02 KEL. KARANG REJO	2016-02-10 00:00:00	755.700.000,00	Pekerjaan Penyusunan Detail Engineering Desain (DED) Asrama Atlit Jatidiri
262	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA .Venues Kawasan GOR Jatidiri Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KARANGREJO RT 08 RW 02 KEL. KARANGREJO	2020-02-17 00:00:00	96.965.000,00	DED GEDUNG BERSAMA
263	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA .Venues Kawasan GOR Jatidiri Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KARANGREJO RT 08 RW 02 KEL. KARANGREJO	2020-02-28 00:00:00	94.050.000,00	REVIEW DED SARPRAAS PENDUKUNG
264	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA .Venues Kawasan GOR Jatidiri Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KARANGREJO REJO RT 08 RW 02 KEL. KARANGREJO	2021-12-16 00:00:00	124.612.000,00	DED PANJAT TEBING
265	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA .Venues Kawasan GOR Jatidiri Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KARANGREJO RT 08 RW 02 KEL KARANGREJO	2022-12-16 00:00:00	49.418.000,00	DED DAN REVIEW LAPANGAN PANAHAN
266	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA .Venues Kawasan GOR Jatidiri Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. KARANGREJO RT 08 RW 02 KEL. KARANGREJO	2022-12-16 00:00:00	74.983.000,00	DED RENOVASI BERAT ASRAMA ATLIT B & C
267	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA .Venues Kawasan GOR Jatidiri Jawa Tengah	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.ASET TETAP LAINNYA DALAM PENGERJAAN	JL. KARANGREJO RT 08 RW 02 KEL. KARANGREJO	2019-08-07 00:00:00	41.769.970.120,00	DED PEMBANGUNAN KOLAM RENANG JATIDIRI
268	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN .DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SETIA BUDI KOMPLEK DIKLAT	2015-01-01 00:00:00	133.276.000,00	RENCANA PEMBANGUNAN RUANG DIORAMA ARSIP JAWA TENGAH

NO	SKPD	Jenis Barang / Nama Barang	Letak/Lokasi Alamat	Tgl. Mulai Pekerjaan	Nilai Kontrak	Keterangan
269	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	IMAM BONJOL 134	2019-10-11 00:00:00	76.781.000,00	DED ROOFTOP PLTS DKP
270	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	DED DERMAGA TEGALSARI	2019-10-02 00:00:00	99.835.000,00	DED DERMAGA TEGALSARI
271	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	PPP KLIDANGLOR	2020-12-03 00:00:00	29.020.000,00	KONSUL REHAB KANTOR PPP KLIDANGLOR
272	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	KLIDANGLOR	2020-02-04 00:00:00	7.300.000,00	KONSUL TIANG PANCANG KAPAL
273	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	KLIDANGLOR	2020-02-04 00:00:00	15.500.000,00	KONSUL REHAB KIOS KLIDANGLOR
274	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	TASIKAGUNG	2020-02-04 00:00:00	11.920.000,00	KONSUL TATA KAWASAN
275	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN		2023-05-19 13:17:00	28.156.983.744,00	-
276	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Lobgending	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	LOGENDING	2020-02-04 00:00:00	19.316.000,00	KONSUL GAPURA DAN POS
277	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdoyong	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PPP ASEMDOYONG	2020-12-03 00:00:00	91.320.000,00	KONSUL DERMAGA PPP ASEMDOYONG
278	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	PPP WONOKERTO	2022-02-28 00:00:00	730.017.150,00	PEMBAYARAN 30% PEMB DERMAGA DAN KOLAM PELABUHAN
279	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	DESA MUNJUNGAGUNG LARANGAN KAB TEGAL	2018-09-17 00:00:00	100.250.000,00	DED PPI LARANGAN
280	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	MUNJUNGAGUNG	2020-02-04 00:00:00	14.795.000,00	KONSUL MESS KARYAWAN
281	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN .Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan Dan Lingkungan Randudongkal	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	LOKA RANDUDONGKAL	2020-12-03 00:00:00	11.397.200,00	KONSUL HATCHERY RANDUDONGKAL
282	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN .Kebun Benih Padi Banyubiru	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.ASET TETAP LAINNYA DALAM PENGERJAAN	KEBUN BANYU BIRU	2020-04-24 00:00:00	13.629.000,00	DED JASA KONSULTANSI PERENCANAAN PEMBUATAN SUMUR DALAM
283	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN .Kebun Benih TPH Masaran	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.ASET TETAP LAINNYA DALAM PENGERJAAN	KEBUN MASARAN B2TPH WIL.SURAKARTA	2020-02-18 00:00:00	9.482.000,00	DED JASA PERECANAAN REHAB GUDANG
284	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN .Kebun Benih TPH Kledung	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.ASET TETAP LAINNYA DALAM PENGERJAAN	KEBUN KLEDUNG B2TPH WIL SURAKARTA	2020-02-20 00:00:00	25.949.000,00	DED JASA PERENCANAAN PERBAIKAN SCREEN HOUSE KEBUN KLEDUNG
285	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN .Kebun Benih TPH Petarukan	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM PENGERJAAN	KEBUN PETARUKAN PEMALANG	2021-04-07 00:00:00	9.038.645,00	DED JASA PERENCANAAN JALAN USAHA TANI KB.PETARUKAN
286	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN .Kebun Benih TPH Baturaden	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	KEBUN BATURADEN	2019-04-10 00:00:00	15.245.600,00	DED JASA PERENCANAAN PEMBUATAN LANTAI 2 KEBUN BATURADEN
287	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	TEMANGGUNG	2022-08-18 00:00:00	82.500.550,00	DED JASA KONSULTAN PERENCANAAN SUROPADAN
288	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	KOPENG SEMARANG	2022-08-18 00:00:00	99.100.000,00	DED JASA KONSULTAN PERENCANAAN EDUWISATA DI TAMAN TERNAK KOPENG
289	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .Taman Ternak Aneka Ternak Balekambang Surakarta	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	SURAKARTA	2022-08-18 00:00:00	49.750.000,00	DED JASA KONSULTANSI PERENCANAAN KELISTRIKAN RSH BALEKAMBANG
290	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN .Balai Veteriner Boyolali	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	BALEKAMBANG MANAHAN SURAKARTA	2019-10-07 00:00:00	98.500.000,00	PERENCANAAN DED RUMAH SAKIT HEWAN BALEKAMBANG
291	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL .Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. PANGERAN DIPONEGORO NO. 1 KEL CACABAN	2022-03-28 00:00:00	38.290.415,00	DED PEMBUATAN LAHAN PARKIR DI CABDIN MERAPI
292	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN .Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	Jl.Raya Pajang Kartasura Km 8	2022-01-03 00:00:00	759.399.130,00	PEMBANGUNAN GEDUNG LABORATORIUM LT 2 BELUM SELESAI AKAN DILANJUTKAN TA 2023
293	SEKRETARIAT DPRD.SEKRETARIAT DPRD	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN		2021-12-29 00:00:00	942.658.200,00	
294	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH .BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN.GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM PENGERJAAN	JL. SETIABUDI NO. 201A SRONDOL KULON	2021-02-03 00:00:00	96.305.000,00	DED PERENCANAAN GEDUNG BKD SRONDOL

KERJASAMA PEMANFAATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022
PERIODE S/D BULAN DESEMBER

Sewa

No.	SKPD	Letak/Alamat	Nilai
1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. BHAKTI No. 9 Kudus ,Barongan.Kota Kudus.KAB. KUDUS	62.600.000
2	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Buntu - Sumpiuh,Pageralang.Kemranjen.KAB. BANYUMAS	178.668.750
3	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Ds. Pasir Wetan Kec. Karang Lewas Kab. Banyumas,Pasir Wetan.Karanglewas.KAB. BANYUMAS	1.582.500.000
4	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Ds. Kalibagor Banyumas,TIDAK ADA.Kalibagor.KAB. BANYUMAS	1.368.750.000
5	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta,Purwodadi.Tambak.KAB. BANYUMAS	55.940.625
6	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta,Purwodadi.Tambak.KAB. BANYUMAS	54.234.375
7	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta,Purwodadi.Tambak.KAB. BANYUMAS	53.990.625
8	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta,Purwodadi.Tambak.KAB. BANYUMAS	144.665.625
9	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Sindoro No. 9, Wonosobo,Wonosobo Barat 13 Wonosobo Timur.Wonosobo.KAB. WONOSOBO	10.000.000
10	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Desa Kretek Kab Wonosobo,Kertek.Kertek.KAB. WONOSOBO	71.800.000
11	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Weleri - Batang Ds. Tulis Kec. Tulis Kab. Batang,Tulis.Tulis.KAB. BATANG	54.600.000
12	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Lawu Km 16,Tegalgede.Karanganyar.KAB. KARANGANYAR	490.500.000
13	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Surakarta - Sragen,Sroyo.Jaten.KAB. KARANGANYAR	1.890.000.000
14	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Dk. Sadon Ds. Wonorejo Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar ,TIDAK ADA.Gondangrejo.KAB. KARANGANYAR	110.000.000
15	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	PERUMAHAN SILAMAT NO.5 DAN 6 RT 01/12 Ds. Ngringgo Kecamatan Jaten Kab. Karangayar,Ngringo.Jaten.KAB. KARANGANYAR	9.960.000
16	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	DUSUN NGRUMBUL SAWIT 07/01 KEL SROYO Kecamatan Jaten Kab. Karangayar,Sroyo.Jaten.KAB. KARANGANYAR	6.000.000
17	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Ds. Muktiharjo Kec. Margorejo Kab. Pati,Muktiharjo.Margorejo.KAB. PATI	3.510.000.000
18	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Pati-Kudus ,Bumirejo.Margorejo.KAB. PATI	2.317.500.000
19	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl.JEND.Sudirman No. 52, RT 01/01,Puri.Pati.KAB. PATI	4.745.000.000
20	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Jend. Sudirman Ds. Puri Kec. Pati Kab. Pati,Puri.Pati.KAB. PATI	1.935.000.000
21	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Penjawi Dk. Randukuning,Pati Lor.Pati.KAB. PATI	1.887.500.000
22	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Desa Suruh Kecamatan Suruh Kab. Semarang,Suruh.Suruh.KAB. SEMARANG	986.250.000
23	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	jl pemuda no. 19 A dan B. RT 04/RW 22 Kel mulyoharjo kec Pemalang Kab Pemalang,Mulyoharjo.Pemalang.KAB. PEMALANG	383.750.000
24	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Kartini No. 108 Kelurahan Salatiga,TIDAK ADA.TIDAK ADA.KOTA SALATIGA	711.776.000

No.	SKPD	Letak/Alamat	Nilai
25	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Jambewangi, Komplek Perum Sidorejo,Sidorejo Lor.SIDOREJO.KOTA SALATIGA	142.200.000
26	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Pamularsih No. 58, Semarang,Bongsari.Semarang Barat.KOTA SEMARANG	2.000.000.000
27	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	JL. USMAN JANATIN RT.005/009,Tanjung Mas.Semarang Utara.KOTA SEMARANG	1.688.684.000
28	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Mahesa IA/76 Pedurungan,Pedurungan Tengah.Pedurungan.KOTA SEMARANG	163.535.625
29	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta,Purwodadi.Tambak.KAB. BANYUMAS	51.516.748
30	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta,Purwodadi.Tambak.KAB. BANYUMAS	52.343.852
31	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Tambak - Yogyakarta,Purwodadi.Tambak.KAB. BANYUMAS	125.817.648
32	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	JL.PERINTIS KEMERDEKAAN DS.NGLOROG KAB. SRAGEN,TIDAK ADA.Sragen.KAB. SRAGEN	4.950.000
33	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Tanjung No 11. A,Sekayu.Semarang Tengah.KOTA SEMARANG	1.636.500.000
34	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Borobudur Selatan I No. 1 Semarang,TIDAK ADA.TIDAK ADA.KOTA SEMARANG	470.000.000
35	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Setiabudi 128,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	4.340.000.000
36	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl.Papandayan Selatan 3,TIDAK ADA.Gajahmungkur.KOTA SEMARANG	3.360.000.000
37	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Ds. Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas,TIDAK ADA.Kalibagor.KAB. BANYUMAS	2.500.000
38	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Ds. Pasir Wetan Kec. Karang Lewas Kab. Banyumas,TIDAK ADA.Karanglewas.KAB. BANYUMAS	2.500.000
39	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Sindoro No. 9, Wonosobo Timur, Kec. Wonosobo, Kabupaten Wonosobo,TIDAK ADA.Wonosobo.KAB. WONOSOBO	210.000.000
40	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Desa Kretek Kec. Kretek Kab. Wonosobo,TIDAK ADA.Kertek.KAB. WONOSOBO	71.800.000
41	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Lawu KM 16 Ds. Tegal Gede Kec Karanganyar Kab Karanganyar,TIDAK ADA.Karanganyar.KAB. KARANGANYAR	440.000.000
42	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl.P.Sudirman no.52 Kel. Plangitan, Kec. Pati, ,TIDAK ADA.Pati.KAB. PATI	372.431.900
43	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Panglima Sudirman 52, Kompl. Karesidenan Pati, Kabupaten Pati,TIDAK ADA.Pati.KAB. PATI	2.121.546.704
44	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Panglima Sudirman 52, Kompl. Karesidenan Pati, Kabupaten Pati,TIDAK ADA.Pati.KAB. PATI	29.414.796
45	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Bakti No. 9, Barongan, Kec. Kota Kudus, Kabupaten Kudus,TIDAK ADA.Kota Kudus.KAB. KUDUS	20.000.000
46	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Desa Suruh Kab. Semarang,TIDAK ADA.Suruh.KAB. SEMARANG	3.500.000
47	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Weleri - Batang Ds. Tulis Kec. Tulis Kab. Batang,TIDAK ADA.Tulis.KAB. BATANG	35.000.000
48	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Raya Weleri - Batang Ds. Tulis Kec. Tulis Kab. Batang,TIDAK ADA.Tulis.KAB. BATANG	175.526.000
49	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Pemuda No. 19 b Kel. Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang Kab. Pemalang,TIDAK ADA.Pemalang.KAB. PEMALANG	100.000.000

No.	SKPD	Letak/Alamat	Nilai
50	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Jambewangi No. 17 Komplek Perum Sidorejo Desa Sidorejo Lor Kec Kota Salatiga Kota Salatiga,TIDAK ADA.SIDOREJO.KOTA SALATIGA	322.500.000
51	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Kartini No 108 Kel Salatiga,TIDAK ADA.SIDOREJO.KOTA SALATIGA	28.520.000
52	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Tanjung No 11. A, Sekayu, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang,Sekayu.Semarang Tengah.KOTA SEMARANG	1.092.843.700
53	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Papandayan Slt. 3,TIDAK ADA.Gajahmungkur.KOTA SEMARANG	58.481.000
54	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Papandayan Slt. 3,TIDAK ADA.Gajahmungkur.KOTA SEMARANG	1.323.589.900
55	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	JL. PROTOSARI I / 6 SRONDOL KULON, SEMARANG,TIDAK ADA.Tembalang.KOTA SEMARANG	30.488.000
56	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Papandayan Slt. 3,TIDAK ADA.Gajahmungkur.KOTA SEMARANG	70.012.000
57	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Mahesa 1 A / 76, Pedurungan Kota Semarang,TIDAK ADA.Pedurungan.KOTA SEMARANG	122.800.000
58	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Setiabudi 128, Kel.,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	30.200.000
59	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Setiabudi 128, Kel.,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	72.000.000
60	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Setiabudi 128 Kel.,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	52.403.000
61	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Setiabudi 128, Kel.,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	1.323.517.900
62	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Pamularsih No. 58, Kelurahan Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,TIDAK ADA.Semarang Barat.KOTA SEMARANG	1.574.417.500
63	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	JL Setiabudi 128 Kel.,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	74.564.000
64	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Nglorog Kab Sragen,TIDAK ADA.Sragen.KAB. SRAGEN	14.220.000
65	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl Urip Sumoharjo No. 92,Purwodiningratan.Jebres.KOTA SURAKARTA	2.853.693.100
66	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 75 Purwokerto,Purwanegara.Purwokerto Utara.KAB. BANYUMAS	10.867.824.684
67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 75 Purwokerto,Purwanegara.Purwokerto Utara.KAB. BANYUMAS	70.367.000
68	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	JL. SETIABUDI 192 ,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	8.853.418.200
69	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	JL.JEND.G.SOEBROTO 75 PURWOKERTO,Purwanegara.Purwokerto Utara.KAB. BANYUMAS	167.435.000
70	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	JL. JENDRAL GATOT SUBROTO NO.75 PURWOKERTO,Purwanegara.Purwokerto Utara.KAB. BANYUMAS	39.530.000
71	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	BELAKANG RUMAH JABATAN EX. BAKORWIL III JL. GATOT SUBROTO NO. 67 PURWOKERTO,Purwanegara.Purwokerto Utara.KAB. BANYUMAS	75.100.000
72	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend Urip Sumoharjo No 92,Purwodiningratan.Jebres.KOTA SURAKARTA	4.522.000.000
73	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 75,Kranji.Purwokerto Timur.KAB. BANYUMAS	15.765.000.000
74	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	Jl. Setiabudi 192 RT.2 RW.2,Srondol Wetan.Banyumanik.KOTA SEMARANG	1.000.000.000
75	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	DESA KARANG MANGU KEC.BATURADEN PURWOKERTO,TIDAK ADA.Baturraden.KAB. BANYUMAS	1.395.000.000

No.	SKPD	Letak/Alamat	Nilai
76	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	KELURAHAN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA,TIDAK ADA.Banjarsari.KOTA SURAKARTA	1.575.000.000
77	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	KELURAHAN KEBULEN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KOTA PEKALONGAN,TIDAK ADA.PEKALONGAN BARAT.KOTA PEKALONGAN	1.701.000.000
78	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	KELURAHAN BINTORO KECAMATAN DEMAK KABUPATEN DEMAK,TIDAK ADA.Demak.KAB. DEMAK	328.500.000
79	Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air	KELURAHAN MANAHAN KECAMATAN BANJARSARI KOTA SURAKARTA,TIDAK ADA.Banjarsari.KOTA SURAKARTA	40.500.000
80	Dinas Sosial	JL. SIDOMUKTI RT01 - 07 RW07,Panjang Baru.Pekalongan Utara.KOTA PEKALONGAN	220.800.000
81	Dinas Sosial	JL. SIDOMUKTI RT08 RW05,Panjang Baru.Pekalongan Utara.KOTA PEKALONGAN	870.400.000
82	Dinas Sosial	DSN. SECANG RT04 RW03,Jati.Binangun.KAB. CILACAP	84.860.000
83	Dinas Sosial	DSN. SECANG RT05 RW03,Jati.Binangun.KAB. CILACAP	54.940.000
84	Dinas Sosial	DS. KEBONMANIS RT02 RW05,Kebonmanis.Cilacap Utara.KAB. CILACAP	66.200.000
85	Dinas Sosial	DSN. SECANG RT05 RW03,Jati.Binangun.KAB. CILACAP	48.460.000
86	Dinas Sosial	DSN. SECANG RT05 RW03,Jati.Binangun.KAB. CILACAP	82.820.000
87	Dinas Sosial	DSN. SECANG RT05 RW03,Jati.Binangun.KAB. CILACAP	42.720.000
88	Dinas Sosial	DSN. SECANG RT05 RW03,Jati.Binangun.KAB. CILACAP	62.560.000
89	Dinas Sosial	JL. NUSA INDAH RT23 RW11,Pucung Kidul.Kroya.KAB. CILACAP	74.400.000
90	Dinas Sosial	DSN. SITEMU RT14 RW03,Bangkal.Binangun.KAB. CILACAP	56.580.000
91	Dinas Sosial	DS. PLADEN KLALING BLOK SOCO,Pladen.Jekulo.KAB. KUDUS	250.350.000
92	Dinas Sosial	DS. PLADEN KLALING BLOK SOCO,Pladen.Jekulo.KAB. KUDUS	121.800.000
93	Dinas Sosial	DS. PLADEN KLALING BLOK SOCO,Pladen.Jekulo.KAB. KUDUS	500.400.000
94	Dinas Sosial	JL. SUNAN GRIPIT GG. AT-TAQWA III RT01 RW05,Kutabanjarnegara.Banjarnegara.KAB. BANJARNEGARA	16.200.000
95	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Jl. Pramuka 145,Purwokerto Kulon.Purwokerto Selatan.KAB. BANYUMAS	15.940.000
96	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	JL.Pramuka 145, Desa Purwokerto Kulon, Kec, Purwokerto, Kab Banyumas,TIDAK ADA.TIDAK ADA.KAB. BANYUMAS	23.000.000
97	Badan Perencaaan Pembangunan Daerah	JL. PEMUDA N0. 127 - 133 SEMARANG,TIDAK ADA.TIDAK ADA.KOTA SEMARANG	214.421.868

Kerja Sama Pemanfaatan

No.	SKPD	Letak/Alamat	Nilai
1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Jl Kalierang Kec. Bumiayu Kab. Brebes,Kalierang.Bumiayu.KAB. BREBES	3.705.000.000
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Desa Krikilan Kec. Kalijambe Sragen,Krikilan.Kalijambe.KAB. SRAGEN	1.368.750.000
3	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	DESA KRIKILAN KEC. KALIJANBE KAB. SRAGEN,TIDAK ADA.Kalijambe.KAB. SRAGEN	1.132.500.000
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Kadilangu, Demak Kota, Demak,TIDAK ADA.TIDAK ADA.KAB. DEMAK	220.600.000

No.	SKPD	Letak/Alamat	Nilai
5	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Bintoro, Kec. Demak Kota, Demak,TIDAK ADA.Demak.KAB. DEMAK	223.000.000
6	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	DS CLERING KEC. KELING KAB. JEPARA,TIDAK ADA.Keling.KAB. JEPARA	1.841.848.000

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)

No.	SKPD	Letak/Alamat	Nilai
1	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	Tanah Jl. Tentara Pelajar No. 7,Kemirirejo.Magelang Tengah.KOTA MAGELANG	17.297.656

LAMPIRAN

IKHTISAR BUMD

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2022

NO	PERUSAHAAN DAERAH	HASIL AUDIT KAP	Kantor Akuntan Publik	EKUITAS		
		Opini		Total Ekuitas	% Kepemilikan	Equity Methods
1	2	3	4	5	6	7
1	PDAB Tirta Utama	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP ASHARI & IDA NURHAYATI	153.188.727.680,00	100,00	153.188.727.680,00
2	PT JPEN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	195.525.955.754,00	100,00	195.525.955.754,00
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	1.786.235.453.018,00	11,67	208.508.577.040,79
4	PT PRPP Jawa Tengah	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP ARNESTESA	57.293.571.930,00	85,67	49.083.173.898,14
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP ARNESTESA	549.591.084.184,00	99,84	548.690.709.437,03
6	PT Bank Jateng	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN	10.080.915.685.000,00	50,04	5.044.143.816.429,12
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SOEKAMTO, ADI, SYAHRIL & REKAN	176.633.349.641,00	100,00	176.633.349.641,00
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SURATMAN	183.750.503.446,00	89,53	164.514.104.255,55
9	PT ASKRIDA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN	1.163.646.352.857,00	6,39	19.960.000.000,00
JUMLAH TOTAL				**14.346.780.683.510**	**71,46**	**6.560.248.414.136**

HASIL AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

NO.	PERUSAHAAN DAERAH	Kantor Akuntan Publik	
		NAMA	OPINI
1		3	4
1	PDAB Tirta Utama	KAP ASHARI & IDA NURHAYATI	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	PT JPEN	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	PT PRPP Jawa Tengah	KAP ARNESTESA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	KAP ARNESTESA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
6	PT Bank Jateng	KAP PAUL HADIWINATA, HIDAJAT, ARSONO, RETNO, PALILINGAN DAN REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	KAP SOEKAMTO, ADI, SYAHRIL & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	KAP SURATMAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
9	PT ASKRIDA	KAP S. MANNAN, ARDIANSYAH & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

Audited

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2022

NO.	BUMD BIDANG KEUANGAN	Sumber a)			Status b)		
		2021	2022		2021	2022	
			Un Audited	Audited		Un Audited	Audited
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PDAB Tirta Utama	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
2	PT JPEN	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
4	PT PRPP Jawa Tengah	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
6	PT Bank Jateng	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
9	PT ASKRIDA	Audited	Unaudited	Audited	Sehat	Sehat	Sehat
	JUMLAH TOTAL						

NO.	BUMD BIDANG KEUANGAN	AKTIVA LANCAR			AKTIVA TIDAK LANCAR			AKTIVA LAINNYA		
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
			Un Audited	Audited		Un Audited	Audited		Un Audited	Audited
1	2	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PDAB Tirta Utama	22.770.748.826	-	25.869.879.672	21.707.601.950	-	30.794.092.888	84.669.791.036	-	97.357.769.215
2	PT JPEN	110.110.554.518	145.862.145.618	144.993.487.954	106.024.448.522	103.987.289.051	103.987.289.051	1.147.174.136	3.545.390.414	1.575.341.322
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	899.692.632.164	1.110.395.079.072	783.731.639.296	1.080.346.984.379	1.036.538.821.436	1.449.778.352.425	-	-	-
4	PT PRPP Jawa Tengah	1.249.745.326	817.860.996	774.973.954	34.472.000.101	56.725.295.293	56.766.008.754	1.223.700.000	1.223.700.000	1.223.700.000
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	864.459.487.923	382.597.025.168	382.633.823.102	175.961.640.877	176.135.193.734	175.596.161.439	-	-	-
6	PT Bank Jateng	77.495.941.448.000	-	81.388.471.678.000	2.648.305.143.000	-	2.868.320.681.000	204.092.325.000	-	236.987.193.000
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	116.343.111.619	125.224.997.956	125.234.025.341	63.155.685.879	69.254.446.820	70.213.402.316	8.273.490.777	1.963.762.654	836.164.427
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	259.270.602.068	257.682.225.120	273.103.224.849	108.030.107.044	160.868.189.053	134.883.376.807	-	-	-
9	PT ASKRIDA	3.493.430.314.725	3.341.532.604.413	4.065.552.922.467	163.572.056.291	157.801.334.362	155.713.516.940	14.928.550.072	53.631.136.202	14.071.958.471
	JUMLAH TOTAL	**83.263.268.645.169**	**5.364.111.938.343**	**87.190.365.654.635**	**4.401.575.668.043**	**1.761.310.569.749**	**5.046.052.881.620**	**314.335.031.021**	**60.363.989.270**	**352.052.126.435**

NO.	BUMD BIDANG KEUANGAN	TOTAL AKTIVA			KEWAJIBAN JK. PENDEK			KEWAJIBAN JK. PANJANG		
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
			Un Audited	Audited		Un Audited	Audited		Un Audited	Audited
1	2	18 = 9 + 12 + 15	19 = 10 + 13 + 16	20 = 11 + 14 + 17	21	22	23	24	25	26
1	PDAB Tirta Utama	129.148.141.812	-	154.021.741.775	827.933.750	-	587.361.658	1.888.783.250	-	245.652.437
2	PT JPEN	217.282.177.176	253.394.825.083	250.556.118.327	45.609.067.076	54.930.038.410	55.030.162.573	-	-	-
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	1.980.039.616.543	2.146.933.900.508	2.233.509.991.721	129.909.110.630	206.074.785.993	253.055.499.127	174.493.815.364	198.866.640.047	194.219.039.576
4	PT PRPP Jawa Tengah	36.945.445.427	58.766.856.289	58.764.682.708	2.660.070.886	1.327.728.667	188.394.111	130.000.000	167.985.651	1.282.716.667
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1.040.421.128.800	558.732.218.902	558.229.984.541	7.261.371.412	5.886.239.114	6.091.335.242	2.759.644.714	2.547.565.175	2.547.565.115
6	PT Bank Jateng	80.348.338.916.000	-	84.493.779.552.000	71.580.906.768.000	-	74.412.863.867.000	-	-	-
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	187.772.288.275	196.443.207.430	196.283.592.084	9.413.005.673	19.632.854.720	19.650.242.443	-	-	-
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	367.300.709.112	418.550.414.173	407.986.601.656	87.199.855.908	103.693.570.570	82.647.278.025	98.235.202.053	135.303.541.044	141.588.820.185
9	PT ASKRIDA	3.671.930.921.088	3.552.965.074.977	4.235.338.397.878	442.829.702.002	2.392.511.154.708	652.590.237.394	2.145.636.392.125	158.540.442.387	2.419.101.807.627
		-								
	JUMLAH TOTAL	**87.979.179.344.233**	**7.185.786.497.362**	**92.588.470.662.690**	**72.306.616.885.337**	**2.784.056.372.182**	**75.482.704.377.573**	**2.423.143.837.506**	**495.426.174.304**	**2.758.985.601.607**

NO.	BUMD BIDANG KEUANGAN	TOTAL KEWAJIBAN			MODAL SAHAM			TAMBAHAN MODAL		
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
			Un Audited	Audited		Un Audited	Audited		Un Audited	Audited
1	2	27 = 21 + 24	28 = 22 + 25	29 = 23 + 26	30	31	32	33	34	35
1	PDAB Tirta Utama	2.716.717.000	-	833.014.095	87.085.000.000	-	87.085.000.000	-	-	22.112.500.000
2	PT JPEN	45.609.067.076	54.930.038.410	55.030.162.573	25.000.000.000	54.887.500.000	54.887.500.000	15.000.000.000	-	-
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	304.402.925.994	404.941.426.040	447.274.538.703	89.488.000.000	89.488.000.000	89.488.000.000	-	-	-
4	PT PRPP Jawa Tengah	2.790.070.886	1.495.714.318	1.471.110.778	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	-	25.000.000.000	25.000.000.000
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	10.021.016.126	8.433.804.289	8.638.900.357	850.008.000.000	376.008.000.000	376.008.000.000	-	-	-
6	PT Bank Jateng	71.580.906.768.000	-	74.412.863.867.000	3.838.039.000.000	-	3.838.039.000.000	-	-	569.316.000.000
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	9.413.005.673	19.632.854.720	19.650.242.443	31.861.846.791	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-	-
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	185.435.057.961	238.997.111.614	224.236.098.210	150.950.000.000	154.950.000.000	154.950.000.000	4.000.000.000	-	1.420.000.000
9	PT ASKRIDA	2.588.466.094.127	2.551.051.597.095	3.071.692.045.021	297.510.000.000	312.530.000.000	297.510.000.000	33.305.906.904	24.705.906.904	15.020.000.000
	JUMLAH TOTAL	**74.729.760.722.843**	**3.279.482.546.486**	**78.241.689.979.180**	**5.419.941.846.791**	**1.137.863.500.000**	**5.047.967.500.000**	**52.305.906.904**	**49.705.906.904**	**632.868.500.000**

NO.	BUMD BIDANG KEUANGAN	BPDYS c)			EKUITAS Lainnya			LABA DITAHAN		
		2021	2022		2021	2022		2021	2022	
			Un Audited	Audited		Un Audited	Audited		Un Audited	Audited
1	2	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	PDAB Tirta Utama	87.085.000.000	-	109.197.500.000	25.088.186.370	-	27.965.477.665	14.258.238.442	-	16.025.750.015
2	PT JPEN	40.000.000.000	54.887.500.000	54.887.500.000	77.680.616.027	87.254.344.181	82.278.056.996	53.992.494.073	56.322.942.492	58.360.398.758
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	10.446.000.000	10.446.000.000	10.446.000.000	1.079.077.145.131	933.131.416.154	1.083.094.685.200	507.071.545.418	719.373.058.314	613.652.767.818
4	PT PRPP Jawa Tengah	39.252.200.000	64.252.200.000	64.252.200.000	479.202.022	479.202.022	479.202.022	(16.323.827.481)	(18.208.060.051)	(18.185.630.092)
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	849.392.000.000	375.392.000.000	375.392.000.000	162.495.862.547	160.441.069.625	162.163.202.332	17.896.250.127	13.849.344.988	11.419.881.852
6	PT Bank Jateng	1.830.289.000.000	-	2.205.289.000.000	1.312.366.406.000	-	1.095.773.651.000	3.617.026.742.000	-	4.577.787.034.000
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	31.861.846.791	100.000.000.000	100.000.000.000	24.602.154.230	21.556.477.130	850.949.000	121.895.281.581	55.253.875.580	75.782.400.641
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	11.585.992.694	16.145.812.012	16.747.328.594	15.329.658.457	8.457.490.547	10.633.174.852
9	PT ASKRIDA	19.960.000.000	19.960.000.000	19.960.000.000	134.358.627.350	459.260.132.671	185.659.240.719	618.290.292.707	205.417.438.307	665.457.112.138
	JUMLAH TOTAL	**3.048.286.046.791**	**764.937.700.000**	**3.079.424.200.000**	**2.827.734.192.371**	**1.678.268.453.795**	**2.655.011.793.528**	**4.949.436.675.324**	**1.040.466.090.177**	**6.010.932.889.982**

NO.	BUMD BIDANG KEUANGAN	TOTAL EKUITAS			% Saham Daerah			Kepemilikan Pemprov			JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		
		2021	2022		2021	2022		2021	2022				
			Un Audited	Audited		Un Audited	Audited		Un Audited	Audited	2021 (Audited)	2022 Unaudited	2022 Audited
1	2	45	46	47	48	49	50	51	52	53			
1	PDAB Tirta Utama	126.431.424.812	-	153.188.727.680	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	129.148.141.812	-	154.021.741.775,00
2	PT JPEN	171.673.110.100	198.464.786.673	195.525.955.754	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	217.282.177.176	253.394.825.083	250.556.118.327,00
3	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	1.675.636.690.549	1.741.992.474.468	1.786.235.453.018	88,33	88,33	88,33	11,67	11,67	11,67	1.980.039.616.543	2.146.933.900.508	2.233.509.991.721,00
4	PT PRPP Jawa Tengah	34.155.374.541	57.271.141.971	57.293.571.930	21,50	14,33	14,33	78,50	85,67	85,67	36.945.445.427	58.766.856.289	58.764.682.708,00
5	PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	1.030.400.112.674	550.298.414.613	549.591.084.184	0,07	0,16	0,16	99,93	99,84	99,84	1.040.421.128.800	558.732.218.902	558.229.984.541,00
6	PT Bank Jateng	8.767.432.148.000	-	10.080.915.685.000	52,31	0,00	49,96	47,69	0,00	50,04	80.348.338.916.000	-	84.493.779.552.000,00
7	PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	178.359.282.602	176.810.352.710	176.633.349.641	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	187.772.288.275	196.443.207.430	196.283.592.084,00
8	PT Jamkrida Jawa Tengah	181.865.651.151	179.553.302.559	183.750.503.446	9,65	9,65	10,47	90,35	90,35	89,53	367.300.709.112	418.550.414.173	407.986.601.656,00
9	PT ASKRIDA	1.083.464.826.961	1.001.913.477.882	1.163.646.352.857	93,30	93,30	93,61	6,70	6,70	6,39	3.671.930.921.088	3.552.965.074.977	4.235.338.397.878,00
		-											
	JUMLAH TOTAL	**13.249.418.621.390**	**3.906.303.950.876**	**14.346.780.683.510**	**44,30**	**206**	**257**	**55,70**	**494**	**643**	**87.979.179.344.233**	**7.185.786.497.362**	**92.588.470.662.690**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
PER 31 Desember 2022

NO	PERUSAHAAN DAERAH		HASIL AUDIT KAP	Kantor Akuntan Publik	EKUITAS		
			Opini		Total Ekuitas	% Kepemilikan	Equity Methods
1	2		3	4	5	6	7
1	BPR BKK	BANJARHARJO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	23.501.508.504	58,45	13.736.253.162,43
2	BPR BKK	BATANG	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	19.633.453.552	52,94	10.394.181.292,24
3	BPR BKK	BLORA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SARASTANTO & REKAN	57.723.739.464	52,46	30.283.424.509,84
4	BPR BKK	BOYOLALI	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN	34.576.372.841	52,45	18.135.399.825,87
5	BPR BKK	CILACAP	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP RONI PUPUNG	70.362.118.615	50,64	35.628.232.097,99
6	BPR BKK	DEMAK	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	56.571.170.157	50,07	28.324.016.579,97
7	BPR BKK	GROGOL	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	24.015.331.384	41,23	9.901.309.061,06
8	BPR BKK	JEPARA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	50.307.828.715	51,38	25.848.183.755,90
9	BPR BKK	Kab. PEKALONGAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	48.354.946.269	52,26	25.270.453.213,85
10	BPR BKK	Kab. TEGAL	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SARASTANTO & REKAN	22.919.770.422	52,40	12.009.128.414,12
11	BPR BKK	KARANGMALANG	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	96.747.760.172	52,76	51.044.980.860,76
12	BPR BKK	KEBUMEN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	64.399.429.313	47,21	30.402.480.101,85
13	BPR BKK	KENDAL	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN	48.477.084.780	60,59	29.372.814.915,96
14	BPR BKK	KOTA MAGELANG	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SARASTANTO & REKAN	11.254.914.383	51,00	5.740.458.339,92
15	BPR BKK	KOTA PEKALONGAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP TARMIZI ACHMAD	10.410.173.073	53,71	5.590.868.320,85
16	BPR BKK	KOTA SEMARANG	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	38.490.586.299	52,17	20.079.431.196,98
17	BPR BKK	KOTA TEGAL	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	11.495.959.596	52,95	6.086.821.050,83
18	BPR BKK	KUDUS	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP TARMIZI ACHMAD	24.036.984.909	73,00	17.547.731.558,77
19	BPR BKK	LASEM	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	77.115.098.558	52,32	40.345.979.232,58
20	BPR BKK	MANDIRAJA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	65.888.125.708	32,46	21.388.378.990,15
21	BPR BKK	MUNTILAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	30.099.745.176	52,05	15.668.360.502,58
22	BPR BKK	PATI	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	44.235.870.823	48,85	21.607.364.418,62
23	BPR BKK	PURBALINGGA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SARASTANTO & REKAN	73.137.593.815	58,93	43.096.979.973,80
24	BPR BKK	PURWODADI	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	151.865.266.654	44,37	67.386.845.184,10
25	BPR BKK	PURWOKERTO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SARASTANTO & REKAN	129.828.090.246	48,70	63.228.672.092,17
26	BPR BKK	PURWOREJO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP HELIANTONO & REKAN (PARKER RUSSELL INTERNATIONAL)	15.825.416.642	51,39	8.132.505.774,36
27	BPR BKK	TAMAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP Dr. RAHARDJA, MSi. CPA.	24.202.503.928	52,40	12.681.234.247,25
28	BPR BKK	TASIKMADU	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP TARMIZI ACHMAD	31.094.380.178	53,09	16.507.079.802,81
29	BPR BKK	TEMANGGUNG	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	39.672.683.452	48,20	19.123.407.668,19
30	BPR BKK	TULUNG	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP ARNESTESA	17.269.867.379	77,00	13.297.932.068,83
31	BPR BKK	UNGARAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP SARASTANTO & REKAN	45.254.740.027	65,89	29.818.733.195,96
32	BPR BKK	WONOGIRI	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	67.790.910.381	52,28	35.440.840.685,51
33	BPR BKK	WONOSOBO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP GANUNG AB	28.375.838.157	43,94	12.467.187.474,01
34	PT BKK	JATENG (Perseroda)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	396.443.487.649	50,82	201.482.628.056,56
35	BKK	KLATEN	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	KAP TARMIZI ACHMAD	(31.465.592.587)	64,40	(20.263.489.727,51)
	JUMLAH	**BPR BKK**			**1.554.935.263.572**	53,98	**795.587.669.570,11**
	JUMLAH	**PT BKK**			**396.443.487.649**	53,99	**201.482.628.056,56**
	JUMLAH	**BKK**			**(31.465.592.587)**	64,40	**(20.263.489.727,51)**
JUMLAH TOTAL					**1.919.913.158.634**	**57,46**	**976.806.807.899,16**

HASIL AUDIT KANTOR AKUNTAN PUBLIK
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2022

NO.	BKK/BPR-BKK	Kantor Akuntan Publik	
		NAMA	OPINI
1	2	3	4
1	BPR BKK BANJARHARJO	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
2	BPR BKK BATANG	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
3	BPR BKK BLORA	KAP SARASTANTO & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
4	BPR BKK BOYOLALI	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
5	BPR BKK CILACAP	KAP RONI PUPUNG	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
6	BPR BKK DEMAK	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
7	BPR BKK GROGOL	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
8	BPR BKK JEPARA	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
9	BPR BKK Kab. PEKALONGAN	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
10	BPR BKK Kab. TEGAL	KAP SARASTANTO & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
11	BPR BKK KARANGMALANG	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
12	BPR BKK KEBUMEN	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
13	BPR BKK KENDAL	KAP KUMALAHADI, KUNCARA, SUGENG PAMUDJI & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
14	BPR BKK KOTA MAGELANG	KAP SARASTANTO & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
15	BPR BKK KOTA PEKALONGAN	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
16	BPR BKK KOTA SEMARANG	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
17	BPR BKK KOTA TEGAL	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
18	BPR BKK KUDUS	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
19	BPR BKK LASEM	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
20	BPR BKK MANDIRAJA	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
21	BPR BKK MUNTILAN	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
22	BPR BKK PATI	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
23	BPR BKK PURBALINGGA	KAP SARASTANTO & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
24	BPR BKK PURWODADI	KAP RUCHENDI, MARDJITO, RUSHADI & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
25	BPR BKK PURWOKERTO	KAP SARASTANTO & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
26	BPR BKK PURWOREJO	KAP HELIANTONO & REKAN (PARKER RUSSELL INTERNATIONAL)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
27	BPR BKK TAMAN	KAP Dr. RAHARDJA, MSi. CPA.	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
28	BPR BKK TASIKMADU	KAP TARMIZI ACHMAD	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
29	BPR BKK TEMANGGUNG	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
30	BPR BKK TULUNG	KAP ARNESTESA	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
31	BPR BKK UNGARAN	KAP SARASTANTO & REKAN	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
32	BPR BKK WONOGIRI	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
33	BPR BKK WONOSOBO	KAP GANUNG AB	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
34	PT BKK JATENG (Perseroda)	KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)
35	BKK KLATEN	KAP TARMIZI ACHMAD	WDP (Wajar Dengan Pengecualian)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN
Per 31 Desember 2022

NO.	KUNCI SEGMEN KEUANGAN	CIKARANG - PC				CIKARANG - PS				KARYAWAN CIKARANG				KARYAWAN KARAWANG				KARYAWAN CIKARANG - PENGAWAS				KARAWANG - PC				KARAWANG - PS				KARAWANG - PENGAWAS				PURWAKARTA				PURWAKARTA - PENGAWAS				SUBANG				SUBANG - PENGAWAS				PURWAKARTA PENGAWAS			
		tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022			tanda	2022		
			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas			No. Kualitas	Kualitas		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
1	0001-001 - Ade Cahyadi	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
2	0001-002 - Agung Prasetyo	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
3	0001-003 - Budi Santoso	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
4	0001-004 - Citra Dewi	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
5	0001-005 - Dedi Kurniawan	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
6	0001-006 - Eka Putri	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
7	0001-007 - Fajar Nugroho	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
8	0001-008 - Gita Permatasari	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
9	0001-009 - Hendra Wijaya	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
10	0001-010 - Indah Permata Sari	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
11	0001-011 - Joko Widodo	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
12	0001-012 - Kartika Sari	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
13	0001-013 - Lukman Hakim	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
14	0001-014 - Maya Sari	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
15	0001-015 - Nina Rahmawati	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
16	0001-016 - Oscar Pratama	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
17	0001-017 - Putri Ayu Lestari	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
18	0001-018 - Rina	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
19	0001-019 - Sari Indah	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
20	0001-020 - Tono Sutrisno	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
21	0001-021 - Umar Bakri	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
22	0001-022 - Vina Melinda	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
23	0001-023 - Wahyu Setiawan	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
24	0001-024 - Yanto	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
25	0001-025 - Zainal Abidin	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
26	0001-026 - Zulkifli	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
27	0001-027 - Ahmad Fauzi	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
28	0001-028 - Bambang Sutrisno	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
29	0001-029 - Cahyo Nugroho	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
30	0001-030 - Dewi Lestari	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
31	0001-031 - Eko Prasetyo	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
32	0001-032 - Fitri Handayani	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
33	0001-033 - Gunawan Wibisono	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
34	0001-034 - Hadi Purnomo	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
35	0001-035 - Irfan Maulana	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
36	0001-036 - Jajang Nurjaman	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
37	0001-037 - Kurnia Ramadhan	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
38	0001-038 - Lestari Wulandari	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
39	0001-039 - Muhammad Rizki	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
40	0001-040 - Nurul Hidayah	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
41	0001-041 - Rahmat Hidayat	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
42	0001-042 - Sri Wahyuni	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
43	0001-043 - Tri Susanto	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
44	0001-044 - Yulia Rahmawati	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
45	0001-045 - Zaenal Arifin	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
46	0001-046 - Zulfikar Ahmad	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
47	0001-047 - Ade Cahyadi	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
48	0001-048 - Agung Prasetyo	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
49	0001-049 - Budi Santoso	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
50	0001-050 - Citra Dewi	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar	0001	Lancar	1	Lancar
	JUMLAH	**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**			**50**	**50**		
	RATA - RATA	**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**			**1**	**1**		
	NILAI																																																		
	JUMLAH TOTAL																																																		

JUMLAH	**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**		
RATA - RATA	**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**		
NILAI																																																			
JUMLAH TOTAL																																																			

JUMLAH	**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**			**2500**	**50**	**2500**		
RATA - RATA	**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**			**50**	**1**	**50**		
NILAI																																																			
JUMLAH TOTAL																																																			

LAMPIRAN

MUTASI PIUTANG PKB

ABSTRAK ANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN/ANGGARAN/REPRESTASI TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGANGGARAN								PENGGUNAAN												
		BELANJA								BELANJA												
		PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER	BAGI HASIL	BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	TAK TERDUGA	TRANSFER	BAGI HASIL	BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	PEGAWAI	BARANG DAN JASA	MODAL	JUMLAH	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2	Dinas Kesehatan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
5	Dinas Perhubungan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Transmigrasi Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
9	Dinas Sosial Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
11	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
13	Dinas Kehutanan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
18	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
21	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
22	Dinas Perhubungan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
23	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Transmigrasi Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
26	Dinas Sosial Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
28	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
29	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
30	Dinas Kehutanan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
33	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
34	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
35	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
36	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
37	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
38	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
39	Dinas Perhubungan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
41	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
42	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kampung dan Transmigrasi Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
43	Dinas Sosial Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
44	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
45	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
46	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
47	Dinas Kehutanan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
48	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
49	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
51	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
52	Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
53	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
54	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Papua	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

KERTAS KERJA PIUTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2022

NO		URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN								JUMLAH PENAMBAHAN	PENGURANGAN										JUMLAH MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
				MUTASI						KOREKSI			MUTASI						KOREKSI					
				PENETAPAN OBJEK JT 2022	PENETAPAN JT 2023 DIBAYAR DI 2022	PENETAPAN ATAS PIUTANG YG DIHAPUSBUKU	PENETAPAN MUTASI DARI LUAR PROVINSI	PENETAPAN KENDARAAN BARU	PENETAPAN PIUTANG BARU (JT 2022)	PENETAPAN TAMBAHAN ATAS PKB JT 2022	ATAS PENETAPAN PIUTANG LALU	ATAS PENGHAPUSAN TAHUN JALAN		PEMBAYARAN PIUTANG LALU	PEMBAYARAN OBJEK JT 2022	PEMBAYARAN JT 2023 DIBAYAR DI 2022	PEMBAYARAN ATAS PIUTANG YG DIHAPUSBUKUKAN	PEMBAYARAN MUTASI DARI LUAR PROVINSI	PEMBAYARAN KENDARAAN BARU	OBJEK PIUTANG KEDALUWARSA	PENGHAPUSAN TAK TERTAGIH	PENCATATAN TAHUN SEBELUMNYA	DICABUT REGISTRASI	NOKA GANDA		
			Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
		Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**2.116.302.921.544**	**4.153.963.352.250**	**37.547.896.750**	**210.005.863.000**	**129.967.174.750**	**344.985.301.250**	**408.934.393.000**	**56.155.895.900**	**727.053.108.180**	**1.866.000**	**6.068.614.851.080**	**556.056.004.000**	**4.153.963.352.250**	**37.547.896.750**	**210.005.863.000**	**129.967.174.750**	**344.985.301.250**	**332.010.658.330**	**96.994.000**	**206.901.170.394**	**911.775.500**	**252.590.000**	**5.972.698.780.224**	**2.212.218.992.400**
1		**Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan**	**61.714.859.525**	**91.391.864.000**	**711.068.000**	**8.785.903.500**	**7.991.998.000**	**2.949.415.500**	**12.299.001.000**	**1.160.403.500**	**22.089.965.850**	**1.276.500**	**147.380.895.850**	**14.670.036.000**	**91.391.864.000**	**711.068.000**	**8.785.903.500**	**7.991.998.000**	**2.949.415.500**	**8.504.847.500**	**13.140.000**	**6.905.784.375**	**91.092.000**	**6.993.500**	**142.022.142.375**	**67.073.613.000**
A	A1	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	61.360.076.200	90.535.814.000	703.785.000	8.735.237.000	7.991.998.000	2.928.601.000	12.236.063.500	1.145.060.000	21.992.975.125	1.276.500	**146.270.810.125**	14.569.050.000	90.535.814.000	703.785.000	8.735.237.000	7.991.998.000	2.928.601.000	8.399.539.500	12.658.000	6.835.786.825	91.092.000	4.742.500	**140.808.303.825**	66.822.582.500
	A2	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	129.781.225	248.454.500		20.058.500			26.536.500	4.293.500	39.076.300		**338.419.300**	39.292.500	248.454.500		20.058.500			18.004.500	482.000	18.970.025		2.251.000	**347.513.025**	120.687.500
	A3	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Pusat	-								-		-												-	-
	A4	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan- Pemerintah Daerah	225.002.100	607.595.500	7.283.000	30.608.000		20.814.500	36.401.000	11.050.000	57.914.425		**771.666.425**	61.693.500	607.595.500	7.283.000	30.608.000		20.814.500	87.303.500	-	51.027.525			**866.325.525**	130.343.000
2		**Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep**	**66.584.975.305**	**203.631.496.100**	**1.632.441.000**	**11.485.899.000**	**10.946.074.000**	**21.350.375.000**	**13.773.439.500**	**4.127.941.500**	**19.541.990.825**	-	**286.489.656.925**	**23.903.408.500**	**203.631.496.100**	**1.632.441.000**	**11.485.899.000**	**10.946.074.000**	**21.350.375.000**	**3.744.044.500**	-	**12.867.526.630**	**77.131.500**	**15.653.500**	**289.654.049.730**	**63.420.582.500**
B	B1	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	66.337.719.055	202.931.635.600	1.625.405.500	11.444.895.500	10.945.433.500	21.301.337.000	13.727.625.000	4.113.302.000	19.483.980.075		**285.573.614.175**	23.840.660.000	202.931.635.600	1.625.405.500	11.444.895.500	10.945.433.500	21.301.337.000	3.700.447.500	-	12.812.908.630	77.131.500	10.502.500	**288.690.357.230**	63.220.976.000
	B2	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	-								-		-												-	-
	B3	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	-								-		-												-	-
	B4	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	247.256.250	699.860.500	7.035.500	41.003.500	640.500	49.038.000	45.814.500	14.639.500	58.010.750		**916.042.750**	62.748.500	699.860.500	7.035.500	41.003.500	640.500	49.038.000	43.597.000	-	54.618.000		5.151.000	**963.692.500**	199.606.500
3		**Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus**	**450.884.567.729**	**1.687.276.543.300**	**15.500.866.750**	**74.981.904.450**	**88.555.840.750**	**124.570.152.750**	**103.240.140.000**	**24.842.343.000**	**149.564.914.140**	-	**2.268.532.705.140**	**165.848.782.000**	**1.687.276.543.300**	**15.500.866.750**	**74.981.904.450**	**88.555.840.750**	**124.570.152.750**	**28.510.689.500**	**29.395.500**	**54.850.461.369**	**410.786.500**	**130.862.500**	**2.240.666.285.369**	**478.750.987.500**
C	C1	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	447.572.555.134	1.677.042.409.800	15.450.285.750	74.541.647.450	88.486.902.250	123.882.745.250	102.565.800.000	24.607.459.000	148.327.235.530		**2.254.904.485.030**	164.892.088.500	1.677.042.409.800	15.450.285.750	74.541.647.450	88.486.902.250	123.882.745.250	28.048.455.000	28.413.000	53.962.838.664	408.525.500	129.749.500	**2.226.874.060.664**	475.602.979.500
	C2	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.784.532.600	1.897.535.000	8.925.500	185.254.000	51.641.000	71.173.000	152.553.000	120.644.000	613.769.750		**3.101.495.250**	536.968.000	1.897.535.000	8.925.500	185.254.000	51.641.000	71.173.000	172.080.000	326.000	505.287.350	1.879.500	1.113.000	**3.432.182.350**	1.453.845.500
	C3	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Pusat	-								-		-												-	-
	C4	Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus- Pemerintah Daerah	1.527.479.995	8.336.598.500	41.655.500	255.003.000	17.297.500	616.234.500	521.787.000	114.240.000	623.908.860		**10.526.724.860**	419.725.500	8.336.598.500	41.655.500	255.003.000	17.297.500	616.234.500	290.154.500	656.500	382.335.355	381.500		**10.360.042.355**	1.694.162.500
4		**Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus**	**8.158.205.850**	**24.494.841.100**	**100.855.500**	**1.581.130.500**	**2.339.512.000**	**1.556.332.500**	**1.797.151.000**	**79.106.500**	**5.275.292.975**	-	**37.224.222.075**	**4.177.832.500**	**24.494.841.100**	**100.855.500**	**1.581.130.500**	**2.339.512.000**	**1.556.332.500**	**652.239.500**	-	**1.787.877.325**	**14.418.000**	**232.500**	**36.705.271.425**	**8.677.156.500**
D	D1	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	6.758.761.550	20.755.500.700	93.262.500	1.248.077.000	2.209.577.500	1.408.345.500	1.493.664.500	55.624.000	4.185.830.475		**31.449.882.175**	3.393.657.500	20.755.500.700	93.262.500	1.248.077.000	2.209.577.500	1.408.345.500	490.001.500	-	1.430.292.025	8.622.500		**31.037.336.725**	7.171.307.000
	D2	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	145.537.200	2.770.228.400	6.312.500	315.996.500	127.574.500	60.003.000	263.776.500	3.610.000	88.896.500		**3.636.397.900**	71.130.000	2.770.228.400	6.312.500	315.996.500	127.574.500	60.003.000	9.438.500	-	38.224.200			**3.398.907.600**	383.027.500
	D3	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	D4	Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	1.253.907.100	969.112.000	1.280.500	17.057.000	2.360.000	87.984.000	39.710.000	19.872.500	1.000.566.000		**2.137.942.000**	713.045.000	969.112.000	1.280.500	17.057.000	2.360.000	87.984.000	152.799.500	-	319.361.100	5.795.500	232.500	**2.269.027.100**	1.122.822.000
5		**Piutang PKB-Mobil Bus-Bus**	**7.751.943.910**	**6.783.648.500**	**21.928.000**	**1.328.581.500**	**246.269.000**	**492.236.500**	**891.664.500**	**25.809.000**	**4.715.251.090**	-	**14.505.388.090**	**2.154.639.000**	**6.783.648.500**	**21.928.000**	**1.328.581.500**	**246.269.000**	**492.236.500**	**1.071.284.000**	**997.000**	**1.657.180.500**	**19.271.500**	**595.500**	**13.776.631.000**	**8.480.701.000**
E	E1	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	4.085.013.925	761.464.000	1.386.000	332.460.000	62.182.500	98.798.000	386.676.000	17.359.000	1.972.029.575		**3.632.355.075**	445.976.000	761.464.000	1.386.000	332.460.000	62.182.500	98.798.000	568.161.000	-	870.294.500	5.857.500		**3.146.579.500**	4.570.789.500
	E2	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	41.835.500	5.936.003.000	20.542.000	993.266.000	184.086.500	378.596.000	495.559.500	7.977.000	19.594.500		**8.035.624.500**	12.843.000	5.936.003.000	20.542.000	993.266.000	184.086.500	378.596.000	8.162.000	-	2.645.500			**7.536.144.000**	541.316.000
	E3	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	E4	Piutang PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	3.625.094.485	86.181.500		2.855.500		14.842.500	9.429.000	473.000	2.723.627.015		**2.837.408.515**	1.695.820.000	86.181.500		2.855.500		14.842.500	494.961.000	997.000	784.240.500	13.414.000	596.500	**3.093.907.500**	3.368.595.500
6		**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**	**137.545.663.700**	**262.483.478.100**	**1.390.361.000**	**17.812.585.000**	**5.373.423.000**	**21.394.857.500**	**38.126.336.500**	**274.186.500**	**74.059.637.650**	-	**420.914.865.250**	**41.998.736.000**	**262.483.478.100**	**1.390.361.000**	**17.812.585.000**	**5.373.423.000**	**21.394.857.500**	**15.485.585.000**	**13.415.500**	**36.384.045.350**	**71.328.500**	**38.814.500**	**402.446.629.450**	**156.013.899.500**
F	F1	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pribadi	136.505.825.200	260.143.286.600	1.374.772.000	17.551.552.500	5.349.620.000	20.923.508.000	37.906.909.500	270.121.500	73.462.090.525		**416.981.860.625**	41.506.726.500	260.143.286.600	1.374.772.000	17.551.552.500	5.349.620.000	20.923.508.000	15.321.459.000	13.236.000	36.029.523.725	71.306.500	38.814.500	**398.323.805.325**	155.163.880.500
	F2	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Umum	251.782.225	813.349.000	4.627.000	210.360.500	13.824.500	356.611.000	115.233.000	1.856.500	129.492.500		**1.645.354.000**	108.400.500	813.349.000	4.627.000	210.360.500	13.824.500	356.611.000	21.142.000	179.500	109.015.725	22.000		**1.637.531.725**	259.604.500
	F3	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	F4	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up- Pemerintah Daerah	788.056.275	1.526.842.500	10.962.000	50.672.000	9.978.500	114.738.500	104.194.000	2.208.500	468.054.625		**2.287.650.625**	383.609.000	1.526.842.500	10.962.000	50.672.000	9.978.500	114.738.500	142.984.000	-	245.505.900			**2.485.292.400**	590.414.500
7		**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck**	**138.017.960.150**	**261.297.331.650**	**1.279.527.500**	**22.849.186.000**	**5.801.896.000**	**12.404.982.500**	**31.178.554.000**	**439.763.000**	**65.733.317.500**	-	**400.984.558.150**	**48.738.057.500**	**261.297.331.650**	**1.279.527.500**	**22.849.186.000**	**5.801.896.000**	**12.404.982.500**	**14.997.637.000**	**4.725.500**	**16.157.169.650**	**142.951.000**	**21.996.000**	**383.695.460.300**	**155.307.058.000**
G	G1	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pribadi	126.075.266.575	242.938.001.650	1.164.770.000	19.406.290.000	5.633.125.000	9.857.260.500	27.923.797.500	356.574.000	56.073.350.075		**363.353.168.725**	41.422.908.500	242.938.001.650	1.164.770.000	19.406.290.000	5.633.125.000	9.857.260.500	13.074.620.500	2.184.000	14.140.483.150	122.791.500	21.996.000	**347.784.430.800**	141.644.004.500
	G2	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Umum	496.967.075	16.910.597.500	109.174.000	3.361.342.000	134.141.500	2.455.699.000	3.144.470.000	71.485.500	174.400.125		**26.361.309.625**	138.950.500	16.910.597.500	109.174.000	3.361.342.000	134.141.500	2.455.699.000	101.692.500	-	115.619.700			**23.327.216.700**	3.531.060.000
	G3	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	G4	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck- Pemerintah Daerah	11.445.726.500	1.448.732.500	5.583.500	81.554.000	34.629.500	92.023.000	110.286.500	11.703.500	9.485.567.300		**11.270.079.800**	7.176.198.500	1.448.732.500	5.583.500	81.554.000	34.629.500	92.023.000	1.821.324.000	2.541.500	1.901.066.800	20.159.500		**12.583.812.800**	10.131.993.500
8		**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck**	**26.329.239.650**	**59.610.482.300**	**658.599.500**	**5.747.672.500**	**1.269.933.000**	**2.777.396.000**	**7.075.744.000**	**1.344.974.900**	**14.510.747.450**	-	**92.995.549.650**	**7.040.726.500**	**59.610.482.300**	**658.599.500**	**5.747.672.500**	**1.269.933.000**	**2.777.396.000**	**3.360.877.500**	-	**5.326.540.100**	**19.433.000**	**468.000**	**85.812.128.400**	**33.512.660.900**
H	H1	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	16.397.947.075	36.901.942.500	220.518.500	3.447.991.000	957.553.000	1.263.237.000	4.189.790.500	893.240.500	8.953.676.750		**56.827.949.750**	4.120.902.500	36.901.942.500	220.518.500	3.447.991.000	957.553.000	1.263.237.000	2.389.335.000	-	2.740.000.325	11.095.500		**52.052.575.325**	21.173.321.500
	H2	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	116.349.000	22.584.084.300	436.865.500	2.275.769.000	312.380.000	1.489.094.000	2.869.172.500	445.706.900	35.393.000		**30.448.465.200**	19.239.000	22.584.084.300	436.865.500	2.275.769.000	312.380.000	1.489.094.000	3.536.000	-	33.878.500			**27.154.846.300**	3.409.967.900
	H3	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	H4	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck- Pemerintah Daerah	9.814.943.575	124.455.500	1.215.500	23.912.500		25.065.000	16.781.000	6.027.500	5.521.677.700		**5.719.134.700**	2.900.585.000	124.455.500	1.215.500	23.912.500		25.065.000	968.006.500	-	2.552.661.275	8.337.500	468.000	**6.604.706.775**	8.929.371.500
9		**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van**	**2.666.195.475**	**10.556.575.150**	**148.420.000**	**1.419.213.500**	**394.073.000**	**1.178.751.000**	**845.344.500**	**25.188.000**	**866.300.775**	-	**15.433.865.925**	**914.043.500**	**10.556.575.150**	**148.420.000**	**1.419.213.500**	**394.073.000**	**1.178.751.000**	**164.681.000**	-	**186.003.250**	**1.383.500**	-	**14.963.143.900**	**3.136.917.500**
I	I1	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pribadi	2.649.735.375	10.473.901.150	147.532.500	1.415.200.500	390.277.500	1.174.278.000	840.993.500	25.014.500	860.974.575		**15.328.172.225**	905.869.500	10.473.901.150	147.532.500	1.415.200.500	390.277.500	1.174.278.000	164.681.000	-	181.410.450	1.383.500		**14.854.534.100**	3.123.373.500
	I2	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Umum	11.601.600	40.239.500		1.452.000	1.087.500		514.500		4.452.200		**47.745.700**	7.386.000	40.239.500		1.452.000	1.087.500			-	3.765.300			**53.930.300**	5.417.000
	I3	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	I4	Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van- Pemerintah Daerah	4.858.500	42.434.500	887.500	2.561.000	2.708.000	4.473.000	3.836.500	173.500	874.000		**57.948.000**	788.000	42.434.500	887.500	2.561.000	2.708.000	4.473.000		-	827.500			**54.679.500**	8.127.000
10		**Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua**	**1.206.208.948.875**	**1.542.713.629.050**	**16.069.627.500**	**63.816.144.050**	**7.040.626.000**	**155.363.724.000**	**198.640.892.500**	**23.675.426.500**	**367.008.310.000**	**589.500**	**2.374.328.969.100**	**245.907.106.000**	**1.542.713.629.050**	**16.069.627.500**	**63.816.144.050**	**7.040.626.000**	**155.363.724.000**	**252.662.651.830**	**34.293.000**	**70.511.388.545**	**63.647.000**	**36.728.000**	**2.354.219.564.975**	**1.226.318.353.000**
J	J1	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	1.205.301.805.925	1.539.978.710.550	16.044.514.500	63.645.311.000	7.035.534.000	155.190.101.000	198.420.624.500	23.657.433.000	366.742.542.000	589.500	**2.370.715.360.050**	245.700.517.000	1.539.978.710.550	16.044.514.500	63.645.311.000	7.035.534.000	155.190.101.000	252.455.883.330	33.627.000	70.490.673.595	63.633.000	36.612.000	**2.350.675.116.975**	1.225.342.049.000
	J2	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	-								-		-								-	-			-	-
	J3	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	J4	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	907.142.950	2.734.918.500	25.113.000	170.833.050	5.092.000	173.623.000	220.268.000	17.993.500	265.768.000		**3.613.609.050**	206.589.000	2.734.918.500	25.113.000	170.833.050	5.092.000	173.623.000	206.768.500	666.000	20.714.950	14.000	116.000	**3.544.448.000**	976.304.000
11		**Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga**	**10.440.361.375**	**3.723.463.000**	**34.202.000**	**197.643.000**	**7.530.000**	**947.078.000**	**1.066.125.500**	**160.753.500**	**3.687.379.925**		**9.824.174.925**	**702.636.500**	**3.723.463.000**	**34.202.000**	**197.643.000**	**7.530.000**	**947.078.000**	**2.856.121.000**	**1.027.500**	**267.193.300**	**333.000**	**246.000**	**8.737.473.300**	**11.527.063.000**
K	K1	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	10.281.071.775	3.595.053.000	32.911.500	185.106.000	7.530.000	902.795.500	1.033.308.000	157.718.500	3.644.830.425		**9.559.252.925**	693.408.500	3.595.053.000	32.911.500	185.106.000	7.530.000	902.795.500	2.820.799.500	1.027.500	263.327.200	333.000	246.000	**8.502.537.700**	11.337.787.000
	K2	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	-								-		-								-	-			-	-
	K3	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	-								-		-								-	-			-	-
	K4	Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	159.289.600	128.410.000	1.290.500	12.537.000		44.282.500	32.817.500	3.035.000	42.549.500		**264.922.000**	9.228.000	128.410.000	1.290.500	12.537.000		44.282.500	35.321.500	-	3.866.100			**234.935.600**	189.276.000
12		**Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	-								-		-												-	-
13		**Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	-								-		-												-	-
		Piutang PKB--Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	-								-		-												-	-
14		**Piutang PKB-Mobil Roda Tiga**	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	-								-		-												-	-
		Piutang PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	-								-		-												-	-
		JUMLAH	**2.116.302.921.544**	**4.153.963.352.250**	**37.547.896.750**	**210.005.863.000**	**129.967.174.750**	**344.985.301.250**	**408.934.393.000**	**56.155.895.900**	**727.053.108.180**	**1.866.000**	**6.068.614.851.080**	**556.056.004.000**	**4.153.963.352.250**	**37.547.896.750**	**210.005.863.000**	**129.967.174.750**	**344.985.301.250**	**332.010.658.330**	**96.994.000**	**206.901.170.394**	**911.775.500**	**252.590.000**	**5.972.698.780.224**	**2.212.218.992.400**